PEMERINTAH KOTA DUMAI

Dumai
Kota Idaman

INDONESIA EMAS 2045



PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG RKPD KOTA DUMAI TAHUN 2026

(BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 32 SERI D)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025

WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pearaturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun .
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II

KETENTUAN RKPD TAHUN 2026

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

(3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2025.

(4) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
   a. Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
   b. pedoman penyempurnaan rangcangan Renja PD Tahun 2026.
   c. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD)

Pasal 3

(1) Penjabaran RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
   d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
   e. BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
   f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
   g. BAB VII : Penutup.

Pasal 4

Program dan kegiatan dalam RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 12 September 2025
WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 12 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 32 SERI D

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026 ini dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 55 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026 Tanggal 12 September 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 32 Seri D), bedasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Substansi RKPD Kota Dumai Tahun 2026 memuat Kebijakan dan Strategi baik di Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, terbitnya regulasi baru berkenaan dengan Perencanaan Pembangunan, adanya penambahan kegiatan baru oleh OPD Pemerintah Kota Dumai dan estimasi Pendapatan Daerah yang mengalami fluktuasi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2026 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUPA) Tahun 2026 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026.

Pada kesempatan ini Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK xi
DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN I-4
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN I-6
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II-2
2.1.1.1 KONDISI GEOGRAFI DAERAH II-2
2.1.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH II-18
2.1.1.3 WILAYAH RAWAN BENCANA II-20
2.1.1.4 DEMOGRAFI II-23
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II-32
2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI II-32
2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL II-61
2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA II-74
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM II-76
2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR II-76
2.1.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR II-159
2.1.3.3 FOKUS URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN II-233
2.1.3.4 FOKUS URUSAN PENUNJANG II-249
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-261
2.1.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH II-261
2.1.4.2 FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR II-263
2.1.4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI II-267
2.1.4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA II-271
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2025 DAN REALISASI RPJMD SAMPAI TAHUN 2025 ..... II-274
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH II-279
2.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II-279

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH III-1
3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN TAHUN 2026 ..... III-1
3.1.2 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN KOTA DUMAI III-33
3.1.3 TELAAHAN KEBIJAKAN PROVINSI YANG TERKAIT DENGAN KOTA DUMAI III-38
3.1.4 ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA DUMAI SECARA UMUM III-41
3.1.5 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2025 DAN TAHUN 2026 ..... III-42

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-44
3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-45
3.2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-47

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026 ..... IV-1

4.1.1. RPJMD TAHUN 2025-2029..... IV-1
4.1.2. MISI PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029 ..... IV-2
4.1.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA DUMAI..... IV-4
4.1.4. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026..... IV-14
4.1.5. ARAH KEBIJAKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026 ..... IV-15
4.1.6. FOKUS PEMBANGUNAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2026..... IV-17
4.1.7. HASIL EVALUASI PENCAPAIAN RKPD TAHUN 2024 ..... IV-19
4.1.8. HASIL MUSRENBANG RKPD..... IV-21
4.1.9. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD..... IV-22
4.1.10. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) IV-23
4.1.11. PELAKSANAAN *SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)..... IV-24
4.1.12. PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI STUNTING IV-26
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2026 ..... IV-27
4.3 PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG FOKUS DAN HIGHLIGHT MAJOR PROJECT PADA RKP TAHUN 2026 ..... IV172

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2026

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN
PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2026

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan Kota Dumai Tahun 2024 ..... II-2
Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan II-3
Tabel 2.3 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/ Kota Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024 ..... II-5
Tabel 2.4 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai II-7
Tabel 2.5 Suhu dan Kelembaban Udara Kota Dumai Tahun 2023 ..... II-8
Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Hari Hujan di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-9
Tabel 2.7 Perkembangan Jumlah Curah Hujan di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-9
Tabel 2.8 Peruntukan Penggunaan Lahan di Kota Dumai Tahun 2019-2039 ..... II-10
Tabel 2.9 Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai tahun 2019-2024 ..... II-20
Tabel 2.10 Luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2019-2024 ..... II-21
Tabel 2.11 Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-22
Tabel 2.12 Indikator Kependudukan Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-23
Tabel 2.13 Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019-2024 ..... II-24
Tabel 2.14 Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-25
Tabel 2.15 Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-26
Tabel 2.16 Perkembangan Sex Rasio Penduduk Tahun 2019-2024..... II-28
Tabel 2.17 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Jumlah Penduduk Produktif Non Produktif, Dependancy Ratio Dan Child Woman Ratio Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-30
Tabel 2.18 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-33
Tabel 2.19 Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-34
Tabel 2.20 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-38
Tabel 2.21 Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-39
Tabel 2.22 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-42
Tabel 2.23 Perhitungan ICOR dan perkiraan kebutuhan investasi II-45
Tabel 2.24 Penafsiran Nilai LQ II-46
Tabel 2.25 Hasil Perhitungan LQ Kota Dumai Tahun 2024 Berdasarkan PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan Tahun 2010 ..... II-48
Tabel 2.26 Hasil Perhitungan DLQ Kota Dumai Berdasarkan PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2024..... II-52
Tabel 2.27 Hasil Analisa Gabungan LQ dan DLQ sektor PDRB Kota Dumai Tahun 2024..... II-55
Tabel 2.28 Perkembangan Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2019-2024..... II-56
Tabel 2.29 Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai Tahun 2019-2024 . II-57
Tabel 2.30 Indeks Gini di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-58
Tabel 2.31 Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-59
Tabel 2.32 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-61
Tabel 2.33 Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ..... II-62
Tabel 2.34 Perkembangan Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-64
Tabel 2.35 Harapan lama sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014-2024..... II-65

Tabel 2.36 Rata-rata lama sekolah Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2023 ..... II-66
Tabel 2.37 Usia Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-67
Tabel 2.38 Prevalensi Stunting Kota Dumai Tahun 2020-2024 ..... II-68
Tabel 2.39 Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-68
Tabel 2.40 Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-68
Tabel 2.41 Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kota Dumai Tahun 2019-2029 ..... II-70
Tabel 2.42 Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-71
Tabel 2.43 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-72
Tabel 2.44 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-73
Tabel 2.45 Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2024 ..... II-74
Tabel 2.46 Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor Dan Jumlah Klub Olahraga Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-75
Tabel 2.47 Capaian SPM Bidang Pendidikan Kota Dumai 2024 ..... II-76
Tabel 2.48 Perkembangan Jumlah Fasilitas, Siswa dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2024 . II-76
Tabel 2.49 Rasio Pengawas terhadap Pemilik PAUD Tahun 2024 ..... II-77
Tabel 2.50 Kualifikasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Jenjang Paud Tahun 2024 ..... II-78
Tabel 2.51 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-78
Tabel 2.52 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-78
Tabel 2.53 Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-79
Tabel 2.54 Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-80
Tabel 2.55 Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-81
Tabel 2.56 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Siswa terhadap Ruang kelas di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-82
Tabel 2.57 Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-82
Tabel 2.58 Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-83
Tabel 2.59 Perkembangan Rasio Guru terhadap Muird SD/MI dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-85
Tabel 2.60 Rasio Guru terhadap Siswa Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun Ajaran 2023/2024 ..... II-85
Tabel 2.61 Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-86
Tabel 2.62 Rata-rata Kemampuan Literarasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP di Kota Dumai tahun 2021-2024 ..... II-88
Tabel 2.63 Persentase Kemampuan Literasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kota Dumai Tahun 2023-2024 ..... II-88
Tabel 2.64 Rata-rata Kemampuan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kota Dumai Tahun 2021-2024 ..... II-89
Tabel 2.65 Persentase Kemampuan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kota Dumai Tahun 2023-2024 ..... II-89
Tabel 2.66 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 ..... II-90
Tabel 2.67 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-101
Tabel 2.68 Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai tahun 2024 ..... II-102
Tabel 2.69 Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2019-2023 ..... II-102
Tabel 2.70 Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-104

Tabel 2.71 Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-105
Tabel 2.72 Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-106
Tabel 2.73 Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2019-2024..... II-107
Tabel 2.74 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-108
Tabel 2.75 Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-108
Tabel 2.76 Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai 2019-2024 ..... II-109
Tabel 2.77 Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2024 ..... II-110
Tabel 2.78 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan di Kota Dumai 2019-2024..... II-114
Tabel 2.79 Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-114
Tabel 2.80 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-116
Tabel 2.81 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-118
Tabel 2.82 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-119
Tabel 2.83 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2023..... II-120
Tabel 2.84 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019 – 2023 ..... II-122
Tabel 2.85 Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-123
Tabel 2.86 Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2024 ..... II-125
Tabel 2.87 Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-125
Tabel 2.88 Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2024..... II-126
Tabel 2.89 Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-126
Tabel 2.90 Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2024..... II-128
Tabel 2.91 Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2024 ..... II-129
Tabel 2.92 Capaian SPM Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2024..... II-136
Tabel 2.93 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-137
Tabel 2.94 Kondisi Jalan di Kota Dumai Per Kecamatan Tahun 2023-2024 ..... II-138
Tabel 2.95 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017-2023 ..... II-138
Tabel 2.96 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2019 – 2024 ..... II-139
Tabel 2.97 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-140
Tabel 2.98 Perkembangan Penyediaan Sanitasi Rumah Tangga Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-142
Tabel 2.99 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2019-2024..... II-143
Tabel 2.100 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-143
Tabel 2.101 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Terhadap Air Minum Layak di Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-143
Tabel 2.102 Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-144
Tabel 2.103 Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-145

Tabel 2.104 Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai Tahun 2024 ..... II-145
Tabel 2.105 Capaian SPM Perumahan Rakyat Kota Dumai Tahun 2024..... II-146
Tabel 2.106 Perkembangan Penyediaan Jalan Lingkungan Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-147
Tabel 2.107 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-148
Tabel 2.108 Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-148
Tabel 2.109 Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Tahun 2024 ..... II-148
Tabel 2.110 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-150
Tabel 2.111 Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kota Dumai Tahun 2024 ..... II-150
Tabel 2.112 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-150
Tabel 2.113 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-151
Tabel 2.114 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2023 ..... II-151
Tabel 2.115 Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-151
Tabel 2.116 Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024 ..... II-153
Tabel 2.117 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti II-155
Tabel 2.118 Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kota Dumai II-157
Tabel 2.119 Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-157
Tabel 2.120 Jumlah Penduduk yang terdaftar pada DTKS II-159
Tabel 2.121 Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-161
Tabel 2.122 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-163
Tabel 2.123 Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-164
Tabel 2.124 Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-164
Tabel 2.125 Perkembangan Rasio Jumlah Lulusan Sarjana S1 dan S2 terhadap Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2019 – 2024.. II-165
Tabel 2.126 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2021-2024..... II-166
Tabel 2.127 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-167
Tabel 2.128 Partisipasi Perempuan di Instansi Pemerintah, Lembaga DPRD dan Swasta Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-169
Tabel 2.129 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-170
Tabel 2.130 Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja Tahun 2019-2024 ..... II-170
Tabel 2.131 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-171
Tabel 2.132 Jumlah Program/ Kegiatan PUG Pada Perangkat Daerah yang Sudah di Evaluasi Melalui ARG di Kota Dumai Tahun 2024 ..... II-173
Tabel 2.133 Indikator Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai 2019-2024 ..... II-175
Tabel 2.134 Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-176
Tabel 2.135 Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2024 ..... II-177
Tabel 2.136 Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-177
Tabel 2.137 Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2017–2024 ..... II-178
Tabel 2.138 Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani Tahun 2024 ..... II-180
Tabel 2.139 Luas Lokasi dan Luas Lahan Pertanahan yang Sedang Ditangani Tahun 2023..... II-180

Tabel 2.140 Permasalahan Pertanahan yang Sudah Diselesaikan Tahun 2024 ..... II-181
Tabel 2.141 Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2020-2024..... II-183
Tabel 2.142 Ambang Batas Baku Mutu Air Sumur Tahun 2019-2024 ..... II-186
Tabel 2.143 Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai Kota Dumai Tahun 2021-2024 ..... II-187
Tabel 2.144 Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-187
Tabel 2.145 Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-188
Tabel 2.146 Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2024 II-188
Tabel 2.147 Capaian Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau terhadap Baseline Tahun 2010-2024 ..... II-189
Tabel 2.148 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020—2024 ..... II-190
Tabel 2.149 Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-191
Tabel 2.150 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-191
Tabel 2.151 Jumlah Sekolah Adiwiyata di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ... II-192
Tabel 2.152 Kepemilikan KTP Tahun 2019-2024 ..... II-193
Tabel 2.153 Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2019-2024..... II-193
Tabel 2.154 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2019-2024..... II-194
Tabel 2.155 Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Dokumen Kependudukan Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-194
Tabel 2.156 Jumlah Cakupan Penduduk Usia 0-18 Tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Dumai Tahun 2019 -2024 ..... II-194
Tabel 2.157 Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-195
Tabel 2.158 Total Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2021 – 2024..... II-196
Tabel 2.159 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-197
Tabel 2.160 Cakupan Contraseptive Prevalence Rate (CPR), PUS bukan peserta KB, Unmetneed dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan Tahun 2020-2024..... II-199
Tabel 2.161 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai Tahun 2017-2024 ..... II-200
Tabel 2.162 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2019-2024.. II-201
Tabel 2.163 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2019-2024 ..... II-202
Tabel 2.164 Aspek Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang di Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-202
Tabel 2.165 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2023 ..... II-203
Tabel 2.166 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-203
Tabel 2.167 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-203
Tabel 2.168 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Rp.) di Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-204
Tabel 2.169 Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-204
Tabel 2.170 Perkembangan Penyediaan PJU Kota Dumai Tahun 2019-2024 II-205
Tabel 2.171 Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan yang Telah dikeluarkan Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-205
Tabel 2.172 Pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) di Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-205
Tabel 2.173 Aplikasi Fungsional yang Digunakan Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 ..... II-206
Tabel 2.174 Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai Tahun 2019-20249 ..... II-210
Tabel 2.175 Capaian Indeks SPBE di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-210
Tabel 2.176 Data Kebutuhan Jaringan Internet 2019 – 2024..... II-211

Tabel 2.177	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2019-2024	II-212
Tabel 2.178	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2019-2024	II-212
Tabel 2.179	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2019-2024	II-213
Tabel 2.180	Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-213
Tabel 2.181	Rekapitulasi Perkembangan UMKM Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-213
Tabel 2.182	Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-214
Tabel 2.183	Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-215
Tabel 2.184	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-215
Tabel 2.185	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-215
Tabel 2.186	Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-216
Tabel 2.187	Data Organisasi Pemuda Kota Dumai yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan Kota Dumai Tahun 2024	II-216
Tabel 2.188	Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-218
Tabel 2.189	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2019-2024	II-218
Tabel 2.190	Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-218
Tabel 2.191	Jumlah Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-218
Tabel 2.192	Jumlah Cabang Olahraga, Pelatih, Atlit, dan Prestasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-219
Tabel 2.193	Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2019-2024	II- 220
Tabel 2.194	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-220
Tabel 2.195	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-221
Tabel 2.196	Laporan Web Application Firewall (WAF) tahun 2022-2024	II-222
Tabel 2.197	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-222
Tabel 2.198	Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2024	II-223
Tabel 2.199	Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Dumai	II-227
Tabel 2.200	Objek Diduga Cagar Budaya Kota Dumai Tahun 2024	II-228
Tabel 2.201	Cagar Budaya Kota Dumai Tahun 2024	II-229
Tabel 2.202	Jumlah Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Kota Dumai	II-229
Tabel 2.203	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-230
Tabel 2.204	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-230
Tabel 2.205	Rekapitulasi Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024	II-231
Tabel 2.206	Indeks Pembangunan Literasi Kota Dumai Tahun 2023 dan Tahun 2024	II-232
Tabel 2.207	Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2019-2024	II-233
Tabel 2.208	Arsip Vital dan Statis Kota Dumai yang Tersimpan tahun 2019-2024	II-233
Tabel 2.209	Jumlah Produksi Perikanan. Cakupan Konsumsi Ikan dan Cakupan Binaan Kelompok Nelayan Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-233
Tabel 2.210	Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-235
Tabel 2.211	Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-236
Tabel 2.212	Jenis Destinasi Wisata Alam Kota Dumai Tahun 2024	II-237
Tabel 2.213	Jenis Destinasi Wisata Kota Dumai Tahun 2024	II-237
Tabel 2.214	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-239
Tabel 2.215	Produktivitas Tanaman Padi Di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-240
Tabel 2.216	Luas. Produksi dan Produktivitas Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-240
Tabel 2.217	Populasi dan Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-241
Tabel 2.218	Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Dumai Tahun 2019-2024	II-243
Tabel 2.219	Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok Kota Dumai Tahun 2024	II-243

Tabel 2.220 Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina Tahun 2019-2024 ..... II-244
Tabel 2.221 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-244
Tabel 2.222 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-245
Tabel 2.223 Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-245
Tabel 2.224 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-246
Tabel 2.225 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-246
Tabel 2.226 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-247
Tabel 2.227 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-247
Tabel 2.228 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2024 . II-247
Tabel 2.229 Inovasi Daerah pada Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2019-2025..... II-249
Tabel 2.230 Skor Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024 ..... II-251
Tabel 2.231 Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2022-2024 ..... II-252
Tabel 2.232 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-253
Tabel 2.233 Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM) Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-254
Tabel 2.234 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-256
Tabel 2.235 Jumlah Pegawai Negeri Sipil per Jenjang Jabatan Kota Dumai Tahun 2024..... II-257
Tabel 2.236 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-259
Tabel 2.237 Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2019-2024..... II-260
Tabel 2.238 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-262
Tabel 2.239 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan dan Pangan Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-263
Tabel 2.240 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-264
Tabel 2.241 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2019-2024.. II-265
Tabel 2.242 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-266
Tabel 2.243 Persentase Luas Wilayah Industri Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-266
Tabel 2.244 Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-267
Tabel 2.245 Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Dumai Tahun 2019 – 2024 ..... II-267
Tabel 2.246 Angka Kriminalitas di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-267
Tabel 2.247 Lama Proses Perijinan di Kota Dumai Tahun 2019-2024..... II-268
Tabel 2.248 Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-269
Tabel 2.249 Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun Tahun 2019-2024..... II-272
Tabel 2.250 Persentase Rasio Ketergantungan di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-272
Tabel 2.251 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... II-273
Tabel 2.252 Penilaian Realisasi Kinerja OPD II-274
Tabel 2.253 Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Berjalan II-275
Tabel 2.254 Realisasi Pelaksanaan RPJMD Kota Dumai Tahun 2024 ..... II-277

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.1 Target Indikator Makro Kota Dumai Tahun 2026 ..... III-2
Tabel 3.2 Produk Dosmetik Regional Bruto Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019-2024..... III-3
Tabel 3.3 Kontribusi Sektor terhadap Produk Dosmetik Regional Bruto ADHB Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... III-4
Tabel 3.4 Produk Dosmetik Regional Bruto Kota Dumai Tahun 2019-2024 Atas Dasar Harga Konstan III-8
Tabel 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2019-2024..... III-9
Tabel 3.6 Matrik Tipologi Klassen Perkembagan Ekonomi Wilayah III-12
Tabel 3.7 Penafsiran nilai LQ..... III-13
Tabel 3.8 Hasil Perhitungan LQ Kota Dumai Berdasarkan PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010..... III-14
Tabel 3.9 Penafsiran nilai DLQ III-17
Tabel 3.10 Hasil Perhitungan DLQ Kota Dumai Berdasarkan PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2024..... III-18
Tabel 3.11 Tipologi Sektor berdasarkan nilai LQ dan DLQ..... III-21
Tabel 3.12 Hasil Analisa Gabungan LQ dan DLQ Sektor PDRB Kota Dumai Tahun 2024..... III-21
Tabel 3.13 IHK dan Tingkat Inflasi month to month (m-to-m), year to date (y-to-d) dan year on year (y-on-y) Kota Dumai menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Maret 2025..... III-22
Tabel 3.14 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2024..... III-24
Tabel 3.15 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ..... III-25
Tabel 3.16 Rasio Gini di Kota Dumai Tahun 2019 – 2024..... III-26
Tabel 3.17 Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2019-2024..... III-27
Tabel 3.18 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2019-2024 ..... III-28
Tabel 3.19 Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2019-2024..... III-29
Tabel 3.20 Realisasi Tahun 2023 – 2024, P APBD 2025 dan target Pendapatan Tahun 2026-2027 ..... III-45
Tabel 3.21 Realisasi dan Target Belanja Kota Dumai Tahun 2023 – 2026 ... III-50
Tabel 3.22 Rekap Pagu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2026 ..... III-51
Tabel 3.23 Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 – 2026..... III-64

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025..

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kota Dumai..... IV-6
Tabel 4.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Dumai Tahun 2024..... IV-20
Tabel 4.3 Jumlah usulan Masyarakat serta Perangkat daerah yang menjadi Tujuan usulan pada proses partisipatif IV-22
Tabel 4.4 Jumlah usulan Pokok-Pokok pikiran DPRD dan Perangkat Daerah Tujuan IV-22
Tabel 4.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Kota Dumai Tahun 2024) IV-23
Tabel 4.6 Sinkronisasi SPM Tahun 2025 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 ..... IV-23
Tabel 4.7 Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2026 ..... IV-25
Tabel 4.8 Prioritas, Tujuan, Sasaran, Outcome, Program dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2026 ..... IV-28
Tabel 4.9 Perbandingan Prioritas Tahun 2025 dan 2026 dan Sinkronisasi dengan Isu Strategis Pembangunan IV-65
Tabel 4.10 Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026, Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026 dan Target Indikator Kinerja Daerah IV-66
Tabel 4.11 Sinkronisasi Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2026 dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2026 ..... IV-71
Tabel 4.12 Sinkronisasi antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2026 dengan Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2026..... IV1-34
Tabel 4.13 Sikronisasi Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan Kota Dumai Tahun 2026..... IV1-73

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025

Tabel 5.1 Rekap Pagu Indikatif Renja Prangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2026..... V-1
Tabel 5.2 Pagu indikatif untuk setiap prioritas pembangunan daerah..... V-2
Tabel 5.3 Dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk Prioritas Pembangunan Provinsi Riau..... V-2
Tabel 5.4 Dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk prioritas pembangunan nasional..... V-3
Tabel 5.5 Pendanaan Indikatif untuk Penerapan Standard Pelayanan Minimal pada Tahun 2026..... V-4
Tabel 5.6 Pendanaan Indikatif dalam rangka penanganan Stunting Kota Dumai Tahun 2026..... V-5
Tabel 5.7 Pendanaan Indikatif dalam rangka Kemiskinan Ekstrim Kota Dumai Tahun 2026..... V-7
Tabel 5.8 Pendanaan Indikatif Dalam Rangka Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2026..... V-7

BAB VI **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Dumai Tahun 2026..... VI-1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Kota Dumai Tahun 2026..... VI-1

BAB VII PENUTUP

DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Grafik 2.1	Jumlah Penduduk (Jiwa) per Kecamatan Tahun 2019-2024.....	II-25
Grafik 2.2	Rata-rata kepadatan penduduk per kecamatan tahun 2019-2024 (jiwa/km^2).....	II-27
Grafik 2.3	Tren sex rasio kecamatan dikota Dumai tahun 2019-2024.....	II-28
Grafik 2.4	Struktur ekonomi kota Dumai tahun 2024	II-37
Grafik 2.5	Tingkat kemiskinan dan jumlah kemiskinan kota Dumai tahun 2019-2024.....	II-60
Grafik 2.6	Garis kemiskinan kota Dumai tahun 2019-2024	II-61
Grafik 2.7	Pencapaian angka kematian bayi kota Dumai tahun 2019-2024	II-101
Grafik 2.8	Perkembangan angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup dikota Dumai tahun 2019-2024.....	II-103
Grafik 2.9	Perkembangan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dikota Dumai tahun 2019-2024	II-106
Grafik 2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di RS kota Dumai tahun 2019-2023.....	II-111
Grafik 2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dikota Dumai tahun 2019-2023	II-112
Grafik 2.12	Cakupan desa atau kelurahan universal child immunization atau (UCI) dikota Dumai tahun 2019-2023	II-113
Grafik 2.13	Cakupan pelayanan tuberculosis (%) kota Dumai tahun 2019-2024	II-116
Grafik 2.14	Cakupan pelayanan Kesehatan ibu bersalin kota Dumai tahun 2020-2024.....	II-117
Grafik 2.15	Cakupan kunjungan bayi dikota Dumai tahun 2019-2024.....	II-118
Grafik 2.16	Cakupan pelayanan usia Pendidikan dasar dikota Dumai tahun 2019-2023.....	II-120
Grafik 2.17	Cakupan pelayanan usia lanjut dikota Dumai tahun 2019-2024	II-122
Grafik 2.18	Cakupan jaminan Kesehatan nasional (JKN) kota Dumai tahun 2019-2024.....	II-135

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KUANGAN DAERAH

Grafik 3.1	Struktur Ekonomi Kota Dumai Tahun 2024	III-7
Grafik 3.2	Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2019-2024	III-27
Grafik 3.3	Garis kemiskinan Kota Dumai Tahun 2019-2024	III-28
Grafik 3.4	Grafik Trend Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2019-2024	I II-29

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Dengan RKPD I-5
Gambar 1.2 Skedul Perencanaan dan Penganggaran Tahunan I-5

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Dumai II-3
Gambar 2.2 Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai II-21
Gambar 2.3 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai..... II-22
Gambar 2.4 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2024 ..... II-29
Gambar 2.5 Dimensi Peningkatan Kemampuan manusia secara langsung dalam Pembangunan Manusia..... II-62
Gambar 2.6 Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) Kota Dumai Berdasarkan Prioritas Komposit Tahun 2024 ..... II178
Gambar 2.7 Kerangka pengukuran IDSD 2024 ..... II251

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Gambar 3.1 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional..... III-25

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Gambar 4.1 Sinkronisasi Fokus Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Riau Tahun 2026 ke dalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2026 ..... IV-69

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2026

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB I

PENDAHULUAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang dimaksud adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas Walikota Dumai, Perangkat Daerah agar menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 diselaraskan dengan rumusan Prioritas Pembangunan Dearah serta didalamnya mengakomodir kebijakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi Prioritas Nasional.

Penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2026 ini sudah mengacu pada peraturan pokok yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kota Dumai Tahun 2026 disusun berpedoman RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2026, kebijakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi Prioritas Nasional, program strategis nasional, dan pedoman umum penyusunan RKPD. RKPD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sekaligus sebagai pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA dan PPAS tersebut akan disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif dan *bottom-up top-down*. Disamping hal tersebut, pendekatan secara substansi juga dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya (Holistik-tematik) dan dengan menyatukan beberapa kewenangan

kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah (integratif) serta dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan (Spasial). Kemudian proses penyusunannya juga tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pendekatan teknokratik, dan kerangka berpikir ilmiah digunakan untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para dengan pemangku kepentingan. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Dumai antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi. Sedangkan proses *top-down* antara lain diimplementasikan dalam bentuk Program *Dedicated* yaitu perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanan hingga proses evaluasi.

Penyusunan RKPD merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 105);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 5 Seri E);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Dumai Tahun 2026 disusun berpedoman pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Riau Tahun 2026, RKP Tahun 2026 dan program strategis nasional dengan tujuan terciptanya perencanaan yang selaras dan sinergi antar daerah-provinsi-pusat, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Adapun hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan tersebut dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2026 dengan RPJMD Tahun 2025-2029

RKPD Kota Dumai Tahun 2026 merupakan penjabaran tahap pertama RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 yang disusun secara simultan. Rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2026 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang tertuang di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 . Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Dumai tahun pertama pada tahun 2026 yang tertuang di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 adalah ***Penguatan SDM dan Infrastruktur Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan***. Secara teknis akan diwujudkan melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi Kota Dumai. Secara rinci, sasaran dan 4 (empat) prioritas pembangunan Kota Dumai tahun 2026 dapat dilihat pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2026. Sedangkan program-program yang direncanakan untuk mencapai prioritas pembangunan tahun 2026 dapat dilihat pada Bab V RKPD Kota Dumai Tahun 2026.



Gambar 1.1. Hubungan RPJMD Dengan RKPD
Sumber : Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017



Gambar 1.2 Skedul Perencanaan dan Penganggaran Tahunan
Sumber: Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

2. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2026 dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2026

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2026. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun pertama RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 dengan tema ***Perkuatan Fondasi Tranformasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan.*** Prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2026 adalah Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola dan Infrastruktur.

Secara umum sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2026 telah memperhatikan sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang telah tertuang di dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2026.

3. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2026 dengan RKP Tahun 2026 dan Program Strategis Nasional.

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2026 berpedoman pada Program Strategis Nasional dan RKP Tahun 2026. Tema RKP Tahun 2026 adalah ***Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif***. Untuk pencapaian tema yang telah ditetapkan, maka prioritas nasional serta program prioritas untuk masing-masing prioritas tersebut pada RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berlmalitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Zl, derrr Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatal Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Secara umum prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2026 telah mempedomani dan memperhatikan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang tertuang di dalam RKP Tahun 2026 dan program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2026 adalah:

1. Terwujudnya program pembangunan Pemerintah Kota Dumai yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta

5. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan:

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2026 sebagai salah satu referensi dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2026;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2026, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2026 dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Riau.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2026.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan di bawah ini:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Meyajikan kondisi umum geografis Kota Dumai, diantaranya: kondisi geografi Kota Dumai, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menyajikan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menyajikan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menyajikan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2023 dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian terget kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Mencantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan format Tabel T-C.19.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Menyajikan rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Menyajikan permasalahan prioritas daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. subbab ini menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Dumai.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan tahun 2026 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2026

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kota Dumai memuat sejarah. aspek geografi dan demografi, serta tiga aspek pencapaian kinerja sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaran pemerintah daerah. Ketiga aspek tersebut yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat (ekonomi dan sosial), aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah dan diuraikan sebagai berikut:

2.1. Kondisi Umum Daerah

Kota Dumai merupakan sebuah Kota yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Tercatat dalam sejarah, Dumai merupakan sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pantai timur Sumatera.

Nama Dumai menurut cerita rakyat tentang Puteri Tujuh berasal dari kata di lubuk dan umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena sering diucapkan cepat, lama kelamaan kata-kata tersebut bertaut menjadi d'umai dan selanjutnya menjadi dumai.

Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum romusha (pekerja paksa zaman penjajahan Jepang) dari Jawa. Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut: 1. Tahun 1945-1959, status Dumai tercatat sebagai desa; 2. Tahun 1959-1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecamatan Rupat; 3. Tahun 1963-1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupat dan berubah status menjadi kawedanan.

Berdasarkan PP No.8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.

Berdasarkan UU No.16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829). Dumai berubah status menjadi Kotamadya sehingga menjadi Kotamadya Dati II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Wali Kota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dumai mengalami beberapa kali peningkatan status, semasa bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, Dumai berstatus sebagai Kota Administratif yang kemudian ditingkatkan menjadi Kota Madya. Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, Dumai dimekarkan menjadi sebuah kota yang berdiri sendiri, berpisah dari Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya,

Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km2.

Filosofis dasar peningkatan status Dumai dalam pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan ialah untuk memperpendek rentang kendali, mempercepat tingkat pelayanan dan memperbesar peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disamping menangkap peluang pengembangan ekonomi.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi Kota Dumai perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi Karakteristik Lokasi dan Wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografis, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Dumai.

2.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah

Karakteristik lokasi dan wilayah menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografi, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kota Dumai.

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Dumai Memiliki wilayah daratan seluas kurang lebih 206.673,36 (dua ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh enam) wilayah perairan seluas 71.393 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar dengan luas per kecamatan seperti terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan
Kota Dumai Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Presentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Kelurahan
1	Bukit Kapur	Bukit Nenas	339,26	16,42	7
2	Medang Kampai	Teluk Makmur	163,49	7,91	4
3	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung	1.420,92	68,75	6
4	Dumai Barat	Purnama	36,16	1,75	4
5	Dumai Selatan	Bukit Datuk	66,08	3,20	5
6	Dumai Timur	Teluk Binjai	35,52	1,72	5
7	Dumai Kota	Laksamana	5,29	0,26	5
TOTAL			**2.066,72**	**100,00**	**36**

(Sumber : Perda Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039)

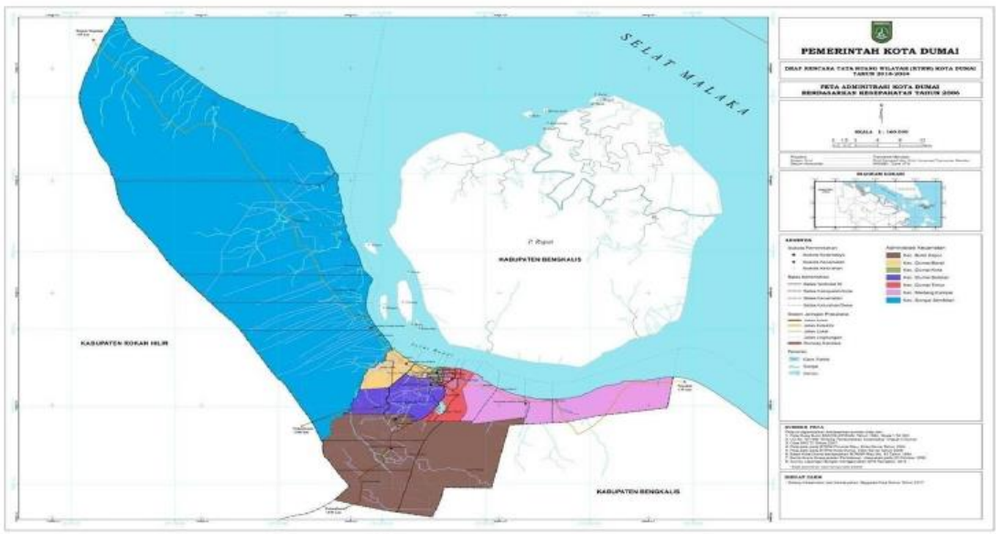
Secara administratif Kota Dumai berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Selat Rupat

Sebelah Timur : Kec.Bandar Laksamana, Kab.Bengkalis

Sebelah Selatan : Kec.Batin Solapan, Kab.Bengkalis

Sebelah Barat : Kec.Tanah Putih, Kec.Bangko, Kec.Batu Hampar, Kec.Rimba Melintang, Kec.Tanjung Melawan, Kab. Rokan Hilir.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Dumai
(Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang RTWR Kota Dumai Tahun 2019-2039)

Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai sehingga menjadi 5 (lima) Kecamatan. Pada tahun 2009, Kota Dumai kembali mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Bagan Besar, Kelurahan Bukit Kapur dan Kelurahan Sungai Geniot, maka saat ini terdapat 7 (tujuh) Kecamatan dan 36 (tiga puluh enam) kelurahan dengan rincian Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan

No	Wilayah Administrasi		
	Kecamatan		Kelurahan
1	Bukit Kapur	1	Bagan Besar
		2	Kayu Kapur
		3	Bukit Nenas
		4	Gurun Panjang
		5	Kampung Baru
		6	Bagan Besar Timur
		7	Bukit Kapur
2	Dumai Barat	1	Simpang Tetap Darul Ichsan
		2	Pangkalan Sesai
		3	Purnama
		4	Bagan Keladi
3	Dumai Kota	1	Dumai Kota
		2	Sukajadi
		3	Bintan
		4	Rimba Sekampung
		5	Laksamana
4	Medang Kampai	1	Pelintung

No	Wilayah Administrasi		
	Kecamatan		Kelurahan
		2	Guntung
		3	Teluk Makmur
		4	Mundam
5	Dumai Timur	1	Tanjung Palas
		2	Jaya Mukti
		3	Bukit Batrem
		4	Teluk Binjai
		5	Buluh Kasap
6	Dumai Selatan	1	Bumi Ayu
		2	Bukit Datuk
		3	Bukit Timah
		4	Ratu Sima
		5	Mekar Sari
7	Sungai Sembilan	1	Bangsal Aceh
		2	Basilam Baru
		3	Basilam Baru
		4	Batu Teritip
		5	Lubuk Gaung
		6	Geniot

(Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai No.01 Tahun 2019)

Berkenaan dengan batas daerah Kota Dumai dengan Kabupaten/Kota berbatasan telah selesai dengan di terbitkannya Permendagri Nomor 84 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai.

Untuk batas wilayah dalam daerah Kota Dumai (Batas antar Kelurahan maupun antar Kecamatan) saat ini masih dalam tahapan penetapan dan penegasan batas yang mana sebelumnya telah dilaksanakan pelacakan berdasarkan Nota penegasan batas tahun 2004, dari keseluruhan jumlah segmen batas dalam daerah kota Dumai yaitu sebanyak 70 segmen terdapat 13 segmen yang sudah diselesaikan dan 57 segmen yang belum dilanjutkan tahapannya kedalam Peraturan Wali Kota dan diantaranya masih berstatus batas maya. Selanjutnya dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi di tiap Kecamatan dan Kelurahan perlu dilanjutkan dengan penetapan batas yang jelas sesuai dengan kesepakatan dan pemasangan Pilar Batas antar kelurahan.

2) Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomis Kota Dumai terletak pada posisi antara 101° 0’ 38”-101° 43’ 33” Bujur Timur, 01° 26’ 50”-02° 15’ 40” Lintang Utara dan memiliki wilayah seluas 2.066,72 km2 (dua ribu enam puluh enam koma tujuh puluh dua) hektar.

3) Topografi

Secara topografi, hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter di atas permukaan laut (mdpl) seperti yang terlihat pada Tabel berikut. Memiliki kemiringan antara 0-3 %, hanya sebagian kecil merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 8-15%.

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/ Kota Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2024

No.	Kecamatan	Tinggi wilayah (mdpl) Altitude (m a.s.l)	Jarak ke Ibukota Kabupaten/ Kota (km)
1	Bukit Kapur	37	8
2	Medang Kampai	6	26
3	Sungai Sembilan	6	23
4	Dumai Barat	4	14
5	Dumai Selatan	3	17
6	Dumai Timur	2	16
7	Dumai Kota	1	17

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

Kota Dumai berada di tepi pantai selatan Selat Rupat dengan kondisi topografi yang relatif datar, khususnya di Kecamatan Dumai Kota, Dumai Barat dan Dumai Timur, sedangkan Kecamatan lainnya yaitu Bukit Kapur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan, kondisi topografinya sedikit bergelombang. Jika dilihat dari ketinggiannya, daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2% terdapat sekitar 41.032 Ha (64,90%); daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15% seluas 15.642 Ha (24,71%), daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% seluas 364 Ha (0,58%) dan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng >40% sekitar 6.200 Ha (9,81%) yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur.

Dari kondisi topografinya, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan. Selain untuk kawasan pembangunan kota. Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian. Hal ini juga didukung oleh kondisi keadaan tanah pada hamparan wilayah Kota Dumai yang memiliki 2 (dua) kelompok atau golongan tanah, yaitu: pertama jenis tanah Typic Tropaquepts atau Fluvisol Gleik dan jenis kedua adalah Hydric Trophemis atau Humic Histosol. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai.

Dari beberapa penelitian mengenai karakteristik tanah gambut di wilayah ini menunjukkan bahwa tanah gambut ini memiliki kedalaman hingga 3 m dan rata-rata kedalaman 0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

4) Geologi

Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi sebelah selatan. Umumnya struktur tanah terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Secara geologi pada medan dataran disusun oleh batuan sedimen berumur muda (Kuarter) berupa alluvium (Qp) dengan bahan penyusun lempung, pasir, kerikil, sisa tumbuhan (gambut) dan rawa gambut, sedangkan pada daerah perbukitannya disusun oleh batuan sedimen berumur tua (Tersier) dengan bahan penyusun batu lumpur kelabu berkarbon terbioturbasikan, batu pasir halus, umumnya kehalusan rendah sampai sangat rendah.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Terdapat dua kelompok atau golongan tanah, yaitu Typic Tropaquepts atau Fluvisol Gleik dan Hydric Trophemis atau Humic Histosol. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai ini. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah Kota Dumai ini rata-rata memiliki kedalaman 0,5 meter yang berarti tidak terlalu dalam dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju. Kendala struktur tanah di Kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan, khususnya di bagian wilayah Kota Dumai Lama (Dumai Barat dan Dumai Timur) ini adalah elevasi wilayahnya yang rata-rata hanya berkisar 2 meter di atas permukaan laut.

Terkait dengan pembangunan sistem drainase kota dan karakteristik pasang surut laut yang sangat berpengaruh terhadap muka air sungai maka diperlukan berbagai upaya, khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai. Untuk pengembangan kota, karakteristik kondisi lahan yang demikian berkemampuan rendah untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar. Hal ini berarti bahwa untuk membangun infrastruktur, akan memerlukan teknologi yang lebih maju dan biaya yang lebih besar, namun dengan kemajuan teknologi infrastruktur yang telah berkembang pesat saat ini, maka kendala kemampuan lahan tersebut bukan lagi menjadi kendala penting.

5) Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai.

Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor) pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem. Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai.

Di Kota Dumai terdapat 53 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai seperti yang tersaji pada Tabel dibawah ini. Sungai Bulu Ala, Sungai Senepis dan Sungai Mesjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

Tabel 2.4
Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Bukit Kapur	Sungai Besilang
2.	Medang Kampai	1. Sungai Puak 2. Sungai Kemeli Kecil 3. Sungai Pelintung 4. Sungai Kemeli 5. Sungai Beruang 6. Sungai Selinsing 7. Sungai Guntung 8. Sungai Mundam 9. Sungai Teluk Makmur 10. Sungai Beruang
3.	Sungai Sembilan	1. Sungai Nyirih 2. Sungai Siput 3. Sungai Bunian 4. Sungai Sepit 5. Sungai Perepat 6. Sungai Parit 7. Sungai Tiram 8. Sungai Pauh 9. Sungai Bakau Tua 10. Sungai Teluk Dalam 11. Sungai Teluk Kijuk 12. Sungai Tengar Besar 13. Sungai Tengar Kecil 14. Sungai Tawar Kecil 15. Sungai Sempit Besar 16. Sungai Sempit Kecil 17. Sungai Tembunan 18. Sungai Tianjung 19. Sungai Santa Hulu 20. Sungai Penempul 21. Sungai Geniot 22. Sungai Geniot Kecil 23. Sungai Buluhala 24. Sungai Teras 25. Sungai Penyengat 26. Sungai Ilir 27. Sungai Danau 28. Sungai Hulu 29. Sungai Sembilan 30. Sungai Mampu 31. Sungai Mampu Kecil 32. Sungai Nerbit Besar 33. Sungai Nerbit Kecil 34. Sungai Paul 35. Sungai Mesjid 36. Sungai Banain 37. Sungai Saliyo 38. Sungai Bulu Ala 39. Sungai Tambuan 40. Sungai Teritib 41. Sungai Selat Mati 42. Sungai Lubuk Gaung 43. Sungai Genjot
4.	Dumai Barat	Sungai Mesjid

No	Kecamatan	Nama Sungai
5.	Dumai Selatan	Sungai Mesjid
6.	Dumai Timur	Sungai Dumai
7.	Dumai Kota	Sungai Dumai

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

6) Klimatologi

Suhu menjadi salah satu variabel perubahan iklim. Suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif terhadap temperatur, panas dan dingin diukur dengan termometer. Menurut Tri Cahyono (2007) suhu adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu udara tertinggi di muka bumi merupakan daerah tropis dan makin ke kutub akan semakin dingin. Jika dilihat dari dataran, maka dataran terendah cenderung memiliki suhu yang tinggi dan semakin tinggi dataran suhu cenderung semakin turun. Pengukuran suhu dapat digunakan termometer, baik termometer maksimum dan termometer minimum. Biasanya pengukuran suhu dinyatakan dalam skala Celcius (C), Reaumur (R), Fahrenheit (F) dan Kelvin (K).

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan suhu udara pada tahun 2023 berkisar antara 22,8˚C-34,7˚C. dengan suhu tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan September yaitu 34,7˚C dan 34,6˚C dan suhu terendah terjadi pada bulan Januari dan Februari yaitu 22,8˚C.

Sedangkan kelembaban udara rata-rata di tahun 2023 sebesar 87,17% dengan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Desember 93% dan kelembaban terendah terjadi pada bulan April 72%. Perkembangan suhu udara dan kelembaban menurut bulan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5
Suhu dan Kelembaban Udara Kota Dumai Tahun 2023

No	Bulan	Suhu Udara (oC)			Kelembaban Udara (%)		
		Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
1	Januari	31,1	22,8	25,8	100	63	90,5
2	Februari	31,0	22,8	25,7	98	57	86,6
3	Maret	33,2	23,0	27,1	100	55	86,4
4	April	33,1	23,2	25,6	100	62	72,0
5	Mei	33,6	23,7	27,7	100	58	89,5
6	Juni	33,5	23,6	27,3	100	65	86,5
7	Juli	33,6	23,8	27,7	99	55	86,6
8	Agustus	34,7	23,2	27,5	100	62	92,0
9	September	34,6	22,9	27,6	98	54	85,1
10	Oktober	33,2	23,3	27,2	98	56	85,3
11	Nopember	32,6	24,0	27,1	99	67	92,0
12	Desember	31,4	24,0	27,0	99	75	93,5
Rata-Rata		**32,97**	**23,36**	**26,94**	**99,25**	**60,75**	**87,17**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jumlah hari hujan dari tahun 2019-2024 mengalami penurunan dari 159 hari pada tahun 2019 menjadi 199 hari hujan pada tahun 2024 dengan pertumbuhan setiap tahun sebesar 13,70%.

Jumlah hari hujan terbanyak pada tahun 2024 terjadi pada November sebanyak 25 hari dan paling sedikit terjadi bulan Juli sebanyak 9 hari. Perkembangan jumlah hari hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Hari Hujan di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Bulan	Jumlah Hari Hujan (Hari)						Pertumbuhan /Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Januari	10	13	15	8	14	19	13.70
Februari	5	13	6	15	13	11	17.08
Maret	12	8	11	12	11	12	0.00
April	11	15	20	14	13	22	14.87
Mei	19	7	19	10	16	17	-2.20
Juni	4	10	15	16	13	18	35.10
Juli	10	5	16	9	13	9	-2.09
Agustus	14	7	15	20	19	18	5.15
September	13	8	25	21	5	17	5.51
Oktober	22	23	13	20	22	17	-5.03
November	21	12	25	15	15	25	3.55
Desember	18	9	21	18	18	14	-4.90
Jumlah	**159**	**130**	**201**	**178**	**172**	**199**	**4.59**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun, 2025)

Sementara itu perkembangan jumlah curah hujan selama tahun 2019-2024 mengalami peningkatan dari 150,6 mm^3 pada tahun 2019 kemudian turun menjadi 186 mm^3 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,31%. Jumlah curah hujan terbanyak pada tahun 2024 terjadi pada bulan November yaitu 357 mm^3 sedangkan terkecil terjadi pada bulan Februari yaitu 43 mm^3. Kondisi klimatologi terutama curah hujan sangat mendukung pengembangan kegiatan sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Perkembangan jumlah curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Curah Hujan di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Bulan	Curah Hujan (MM)						Pertumbuhan /Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Januari	150,6	78,4	81	61,4	173,6	186	4,31
Februari	43	74,7	67,6	267,7	107,3	43	0,00
Maret	132	69,1	269	196,3	75,4	185	6,98
April	177	240,5	230,2	200,4	164,7	246	6,81
Mei	86	304,1	240,6	279,5	157,8	356	32,86
Juni	185	178,5	125,7	159,1	195,4	233	4,72
Juli	93	268	324,1	122,5	173,6	88	-1,10
Agustus	66	213,4	424,5	422,8	240,2	318	36,95
September	79	350,4	252,8	317,3	58,9	118	8,36
Oktober	347	153,5	430,6	286,9	308,2	340	-0,41
November	178	366,8	319	176	145,8	357	14,93

Bulan	Curah Hujan (MM)						Pertumbuhan /Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Desember	182,7	209,9	184	251,6	147,6	177	-0,63
Jumlah	**1.719**	**2.507**	**2.949**	**2.742**	**1.949**	**2.647**	**9,01**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

7) Penggunaan Lahan

Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya, Kawasan lindung yang terdiri dari kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya dan kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya dan ruang terbuka hijau (RTH). Sedangan kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan industry, kawasan pariwisata, kawasan pemukiman, kawasan peruntukkan lainnya dan kawasan pertanahan dan keamanan dapat dilihat pada Tabel yang tersaji dibawah ini. Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8
Peruntukan Penggunaan Lahan di Kota Dumai Tahun 2019-2039

No	Rencana Peruntukan Kawasan	Luas (ha)	Proporsi (%)
A, Kawasan Lindung			
1	Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya		
	a, Kawasan Hutan Lindung		
	b, Kawasan Bergambut		
2	Kawasan Perlindungan Setempat		
	a, Kawasan Taman Wisata Alam	3,567,61	1,73
	b, Sempada Pantai	279,83	0,14
	c, Sempadan Sungai	189,20	0,09
	d, Sempadan Danau	32,25	0,02
	e, Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH)	208,95	0,10
3	Kawasan Konservasi		-
	a, Suaka Alam		-
	b, Resapan Air		-
B, Kawasan Peruntukan Budidaya			-
1	Kawasan Hutan Produksi		-
	a, Kawasan Hutan Produksi Terbatas	11,851,26	5,74
	b, Kawasan hutan Produksi Tetap	121,234,68	58,72
	c, Kawasan Hutan Produksi dapat di Konversi	18,870,58	9,14
2	Kawasan Pertanian		-
	a, Kawasan Tanaman Pangan	10,368,75	5,02
	b, Kawasan KP2B		-
	c, Kawasan Hortikultura		-
	c, Kawasan Perkebunan	3,567,47	1,73
3	Kawasan Perikanan	1,051,04	0,51
4	Kawasan Pertambangan dan Energi		-
	a, Kawasan pertambangan mineral logam		-
	a, Kawasan pertambangan Batubara		-
5	Kawasan Industri	7,602,83	3,68
6	Kawasan Perdagangan Jasa	843,45	0,41
7	kawasan Peruntukan pergudangan	253,32	0,12
8	Kawasan Rencana Bandar Udara	670,28	0,32
9	Kawasan Pelabuhan	419,32	0,20
10	Kawasan Pendidikan	17,06	0,01
11	Kawasan Kesehatan	12,81	0,01
12	Kawasan Olahraga	56,79	0,03
13	Ruang Terbuka Non Hijau	14,78	0,01
14	Kawasan Pariwisata	216,89	0,11
15	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	36,11	0,02
16	Kawasan TPA	10,64	0,01
17	Kawasan Pemukiman		-
	a, Kawasan Pemumikan Perkotaan		-

No	Rencana Peruntukan Kawasan	Luas (ha)	Proporsi (%)
	1, Kawasan Perkantoran	49,93	0,02
	2, Kawasan Perumahan	25,051,00	12,13
	b, Kawasan Pemukiman Perdesaan		-
Total Perntukan Kawasan		206,476,83	100,00
C, Outline			
1	Luas Wilayah	206,673,36	
2	Lainnya	196,53	

(Sumber : Perda Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019, RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039)

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, meliputi:

a) Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, antara lain, kawasan lindung dan kawasan resapan air
b) Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan sungai,
c) Kawasan konversi, antara lain, kawasan taman wisata alam hutan wisata alam sungai dumai,
d) Kawasan rawan bencana alam, antara lain, Kawasan rawan banjir, kawasan rawan kebakaran dan kawasan rawan angin puting beliung,
e) Kawasan cagar budaya, antara lain kawasan makam leluhur dan kawasan makam putri tujuh,
f) Kawasan Ruang Terbuka Hijau antara lain, RTH Taman Kota, RTH tempat pemakaman umum, RTH lapangan olahraga, RTH sempadan pantai, RTH sempadan sungai, RTH sempadan danau, RTH jalur hijau jalan dan RTH sabuk hijau,

Kawasan Lindung yang terdapat di Kota Dumai terdiri dari:

A. Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu di sepanjang pantai yang ditetapkan sesuai peraturan, dikarenakan mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Pantai. Sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan memiliki dataran tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Penetapan sempadan pantai di Kota Dumai berada di sepanjang pantai utara dan selatan Kota Dumai.

B. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai adalah yang ditetapkan di Kota Dumai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai,

kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Kriteria sempadan sungai adalah:

- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar.
- Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan Perumahan dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi Sungai.
- Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan Perumahan dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi Sungai.

C. Kawasan Lindung Bakau

Kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata. Perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah kearah darat. Menurut Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut di samping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya. Kawasan pantai berhutan bakau di Kota Dumai terdapat di Tembawan, Kelurahan Batu Teritip dengan luas lahan 164 Ha, hutan bakau yang berada di Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai dengan luas lahan 39,5 Ha dekat dengan sungai Kembeli Besar dan Alur Sungai Pulau Bungkuk Dua. Sedangkan Hutan Bakau yang terdapat di kawasan muara Sungai Mesjid, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat dan Kelurahan Bangsal Aceh di Kecamatan Sungai Sembilan dengan luas lahan 227,50 Ha.

D. Kawasan Danau atau Waduk

Kawasan sekitar Danau atau waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Kawasan di sekitar danau atau waduk di Kota Dumai ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

1) Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi.
2) Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Danau Putri Tujuh merupakan danau alamiah yang terletak di kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dengan luas 30,61 Ha dan berada di Kawasan Pengembangan Bandara. Selain danau di Kota Dumai juga terdapat rawa di Kelurahan Bukit Batrem dan Tanjung Palas dengan luas 59,93 Ha.

Kawasan sekitar danau khususnya Danau Putri Tujuh di Kota Dumai telah dijadikan tempat wisata. Sebagai kawasan lindung danau dan waduk harus dijaga kelestariannya walaupun telah terjamah oleh kegiatan budidaya. Upaya penanganan untuk kawasan waduk dan danau adalah dengan cara pengawasan dan pembatasan pengembangan kawasan wisata danau yang bertujuan untuk menjaga kelestarian habitat dan ekosistem danau. Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk di wilayah Kota Dumai dilakukan untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.

E. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan air di Kota Dumai memiliki kriteria curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Perlindungan terhadap kawasan air di Kota Dumai dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai tahun 2019-2039 telah ditetapkan seluruh sungai memiliki sempadan sungai sebagai bagian dari kawasan lindung yang termasuk di dalam kategori kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya. Dari penetapan sempadan sungai secara keseluruhan di Wilayah Kota Dumai tersebut, maka Kota Dumai saat sekarang memiliki sempadan sungai seluas 24,300,000 m^2 Atau 24,3 Km^2,

F. Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kota Dumai tidak memiliki mata air secara khusus, namun terdapat pada setiap alur sungai yang kemudian membentuk sungai besar. Mata air di wilayah Kota Dumai berada pada hulu-hulu sungainya yang berjumlah 60 (enam puluh) sungai dengan 9 (sembilan) buah sungai besar.

G. Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri dari:

1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah, yaitu ruang terbuka hijau di luar kawasan perkotaan tetapi masih di dalam administrasi Kota Dumai. Di Kota Dumai ruang terbuka hijau wilayah meliputi kawasan suaka margasatwa di Kecamatan Sungai Sembilan dan Hutan Wisata di Kecamatan Bukit Kapur. Jika dibandingkan luas ruang terbuka hijau wilayah Kota Dumai dengan luas Kota Dumai, maka ruang terbuka hijau di Kota Dumai telah memenuhi syarat yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen).

2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan yaitu ruang terbuka hijau yang terdapat di kawasan perkotaan yang berupa area tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang terdapat di Kota Dumai berupa lapangan bola dan lapangan golf.

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan Perumahan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan Perumahan yaitu di setiap lingkungan-lingkungan Perumahan. Baik itu berupa pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, dan taman atap bangunan. Ruang terbuka hijau di Kota Dumai tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 3,555,64 Ha, Kecamatan Dumai Barat dengan luas 581,16 Ha dan Kecamatan Dumai Timur dengan luas lahan 27,76 Ha.

H. Kawasan Hutan Kota

Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Wali Kota Dumai. Struktur hutan wisata yang merupakan hutan kota di Kota Dumai ini adalah hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan. Hutan wisata Kota Dumai ini kawasannya tersebar di Kelurahan Bukit Timah dengan luas 229,1 Ha, Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Barat dengan Luas 290,2 Ha, Kelurahan Tanjung Pasal Kecamatan Bukit Kapur 189,8 Ha; Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 1,288 Ha. Sehingga total luas hutan wisata di Kota Dumai mencapai 2,741 Ha.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, Kawasan budidaya di Kota Dumai meliputi:

A. Kawasan Perumahan

Kawasan Perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pertanian yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, Kawasan Perumahan terdiri dari:

1) Perumahan Perkotaan

Perumahan perkotaan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi Perumahan di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian di perkotaan. Kawasan Perumahan di Kota Dumai terdapat di seluruh Kelurahan di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur.

2) Perumahan Pertanian

Perumahan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi Perumahan di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian di Pertanian. Kawasan Perumahan Pertanian di Kota Dumai terdapat di seluruh desa selain ibu kota Kecamatan.

B. Kawasan Pusat Pemerintahan

Terdiri dari Kawasan Perkantoran Tingkat Kota (Kompleks perkantoran lama dan Kompleks Perkantoran Wali Kota serta Kompleks Perkantoran DPRD yang berlokasi di Jalan Perwira, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur dengan luas lahan 100,000 m²) dan Kawasan Pusat Pemerintahan Kecamatan (Kecamatan Dumai Kota, Medang Kampai, Dumai Timur, Dumai Barat, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Sungai Sembilan.

C. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata di Kota Dumai meliputi jenis wisata alam, sejarah, agama, olahraga, dan tirta. Daerah wisata yang memanfaatkan naturalnya kondisi alam, diantaranya adalah kawasan konservasi untuk marga satwa (Harimau Sumatera) yang terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan, Pariwisata yang telah dikembangkan dan berbasiskan hutan wisata ada di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur. Wisata alam yang dipadukan dengan wisata budaya, dikembangkan di Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai yang di sekitarnya terdapat rumah-rumah tradisional/rumah tua berarsitektur Melayu. Pariwisata alam lainnya yang telah dikembangkan adalah Tasik Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur dan wisata budaya yakni yang terkait dengan legenda Makam Puteri Tujuh yang sekarang berada di Kawasan Kilang Operasi Pertamina Unit produksi II di Kota Dumai.

D. Kawasan Industri

Kawasan Industri yang ada di Kota Dumai adalah industri dasar, aneka industri dan industri kecil dan industri besar/sedang yang tersebar merata di setiap kecamatan. Industri besar berupa pengolahan kelapa sawit, dan pengolahan minyak bumi dan gas (MIGAS). Untuk kegiatan industri besar, Dumai memiliki industri kelapa sawit/CPO (PT, Bukit Kapur Reksa, PT, S,M,A,R,T, Corporation, PT, Sarana Sawitindo Utama, PT, Inti Benua Perkasatama, dan PT, Sarana Tempa Perkasa) yang banyak berdiri di sekitar pelabuhan dan pertambangan minyak bumi.

E. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan. Pemanfaatan ruang di Kota Dumai untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa diperuntukkan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang

berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

F. Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

G. Kawasan Militer Kota Dumai terletak di antara Kelurahan Bagan Besar dan Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 210,10 Ha. Di dalam konsepsi penataan ruang wilayah Kota Dumai, dipahami bahwa Kota Dumai telah memiliki kawasan militer yang telah eksisting, sejalan dengan perkembangan Kota Dumai, yakni : TNI-AD, TNI-AL, dan kepolisian. Sedangkan secara khusus TNI-AL memiliki pangkalan TNI-AL yang terletak di kawasan pelabuhan Kota Dumai.

H. Kawasan Migas dan Non Migas, yaitu: a. Kawasan Migas dan Non Migas yakni kawasan operasional PT Pertamina UP II Dumai dan rencana kawasan Pelabuhan terpadu yang terletak di antara Kelurahan Jayamukti dan Bukit Palas Kecamatan Dumai Timur dengan luas 247,09 Ha, b. Kawasan Migas dan Non Migas yakni kawasan operasional PT Pertamina Hulu Rokan yang terletak di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur dengan Luas 459,72 Ha.

I. Kawasan Bandar Udara Pinang Kampai-Dumai

Bandar Udara Pinang Kampai mempunyai arah landas pacu yaitu Airstrip 03-R/W21, yang berarti bahwa ujung-ujung landas pacu (runway) Bandar Udara Pinang Kampai ini mempunyai arah 30° dan 210°, yang bermakna bahwa daerah-daerah di daratan di dalam wilayah Kota Dumai yang berada di bawah permukaan udara yang berada langsung di masing -masing ujung landas pacu dari Bandar udara Pinang Kampai ini harus dibatasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di dalam aturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Pinang Kampai tersebut, demikian pula kawasan-kawasan yang berada di sisi kiri (sisi barat) dan sisi kanan (sisi timur) dari Bandar Udara Pinang Kampai ini berjarak masing-masing 15 Km dari sumbu landas pacu (Runway Center Line) harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Pinang Kampai tersebut.

J. Kawasan Pelabuhan di Kota Dumai meliputi pelabuhan laut yang dikelola oleh Pemerintah yaitu oleh PT. Pelabuhan Indonesia Regional I (mengoperasikan kegiatan pelabuhan untuk penumpang, dan juga bongkar muat barang untuk kepentingan Kota Dumai dan juga untuk kepentingan kota-kota di sekitar Kota Dumai); pelabuhan khusus yang dimiliki oleh PT. Pertamina maupun yang dimiliki PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai Pelabuhan khusus bongkar muat bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kepentingan ekspor. Selain itu Kota Dumai juga telah memiliki Pelabuhan

Khusus untuk bongkar muat *Crude Palm Oil* (CPO) yang dibangun oleh PT. Bukit Kapur Reksa (BKR), terdapat juga Pelabuhan untuk bongkar muat pupuk, khususnya pupuk NPK yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama, dimana pelabuhan yang berada di Pelintung tersebut khusus untuk kegiatan bongkar muat dan pemasaran daerah maupun ke luar negeri.

K. Kawasan Olahraga

Lapangan olahraga merupakan suatu bentuk ruang terbuka yang termasuk ruang terbuka non hijau, sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga. Lapangan olahraga dalam konteks stata ruang pada prinsipnya sangat didasari oleh aktivitas dari olah raga yang prasarananya direncanakan tersebut, yang memiliki spesifikasi-spesifikasi tertentu sehingga menjadi dasar perhitungan dimensi, perkerasannya dan batas-batas kawasan atau ruang yang harus disediakan.

L. Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan terdiri dari usaha perikanan laut dan usaha perikanan air tawar. Hasil Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai pada tahun 2024 mencapai 1.280.265 Kg, sedangkan hasil produksi untuk budidaya mencapai 292.442 Kg.

M. Kawasan Peternakan

Produksi ternak besar dan kecil pada tahun 2024 untuk jenis sapi berjumlah 7.876, kerbau 18 ekor dan kambing/domba 2.887 ekor, dan babi 3.572 ekor. Produksi ini merupakan hasil dari Pengembangan usaha yang terpadu antara peternakan dengan pertanian lahan kering. Mekanisme ini diharapkan mewujudkan adanya suatu hubungan yang menguntungkan, di mana sisa hasil dari tanaman pangan dapat dipergunakan untuk bahan makanan ternak dan limbah ternak merupakan pupuk organik untuk peningkatan kesuburan tanah.

N. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi penanaman: a. Pangan yang ada di Kota Dumai memproduksi sendiri komoditas yang berupa tanaman pangan yaitu berupa padi sawah, padi ladang, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. Tidak semua Kecamatan di Kota Dumai pada kondisi saat ini bisa memenuhi kebutuhan akan tanaman pangan, ada beberapa Kecamatan yang memproduksi komoditas tertentu dan ada beberapa Kecamatan yang tidak memproduksi komoditas tertentu. Untuk komoditas padi sawah hanya diproduksi di Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Timur, dan Dumai Selatan, b. Tanaman Sayuran di Kota Dumai pada kondisi sekaran pada umumnya bisa memenuhi kebutuhan akan sayuran di Kota Dumai. Hasil analisis menunjukkan produksi sayuran jenis tanaman petsai yang diproduksi di Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Barat, dan Dumai Selatan

menunjukkan produksi yang bisa memenuhi kebutuhan akan tanaman petsai Kota Dumai bahkan bisa diekspor. Tanaman bayam yang diproduksi hampir di semua Kecamatan di Kota Dumai, produksi tanaman bayam ini menurut analisis bisa memenuhi kebutuhan akan tanaman bayam di Kota Dumai, c. Tanaman buah-buahan yang ada di Kota Dumai adalah mangga, durian, pisang dan Nenas bisa untuk diekspor.

O. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Pertanian Lahan basah adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah. Kriteria untuk kawasan Pertanian Lahan Basah diantaranya memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan Pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional dan dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

P. Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan

Kawasan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri. Kota Dumai mempunyai 5 kawasan perkebunan yaitu:

1) Perkebunan Besar Negara/ swasta di Kelurahan Basilam Baru, Kelurahan Tanjung Penyembal, dan Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan dengan Luas 42.907.38 Ha.
2) Perkebunan Negara/ Swasta di Kelurahan di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Dumai Barat dengan Luas 1900.56 Ha.
3) Perkebunan Negara/ Swasta di Kelurahan Mundam, Kelurahan Tanjung Palas, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur dengan luas 456.73 Ha.
4) Perkebunan Negara/ swasta di Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur dengan Luas 12.915.63 Ha.
5) Perkebunan Negara/ swasta di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan luas 5.554.37 Ha.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi topografinya yang relative datar, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan karena hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah.

1) Potensi Pengembangan Pertanian (Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan,

Selain untuk kawasan pembangunan kota. Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian dan perkebunan karena lapisan tanah dominan yang terhampar di wilayah Kota

Dumai merupakan lapisan tanah gambut dengan kedalaman 0-0.5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan kodisi klimatologi, Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut (iklim tropis basah) dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2022 berkisar antara 82-92%. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun perikanan.

2) Potensi Pengembangan Industri dan Perdagangan

Berdasarkan kondisi geografis, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera, terlindungi oleh Pulau Rupat, sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan. Berdasarkan kondisi hidrologi, wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai kecuali pada sebagian wilayah yang lebih tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Di wilayah Kota Dumai terdapat 51 sungai besar dan kecil yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai, semuanya bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan.

3) Potensi Pengembangan Kawasan Perkotaan

Berdasarkan kondisi geologi, umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari tanah Podsolik merah kuning dari batuan endapan dan Alluvial serta tanah Organosol dan Gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kemampuan lahan di wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0 – 3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah Kota Dumai ini memiliki rata-rata kedalaman 0.5 meter dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di Kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan adalah elevasi wilayah khususnya di bagian wilayah Dumai Kota, Dumai Barat dan Dumai Timur yang hanya berkisar 0-3 meter di atas permukaan laut, hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat dan waktu tertentu sering terjadi banjir terutama pada saat air laut sedang pasang. Terkait hal tersebut, maka diperlukan berbagai upaya

khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana merupakan sesuatu atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

1) Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

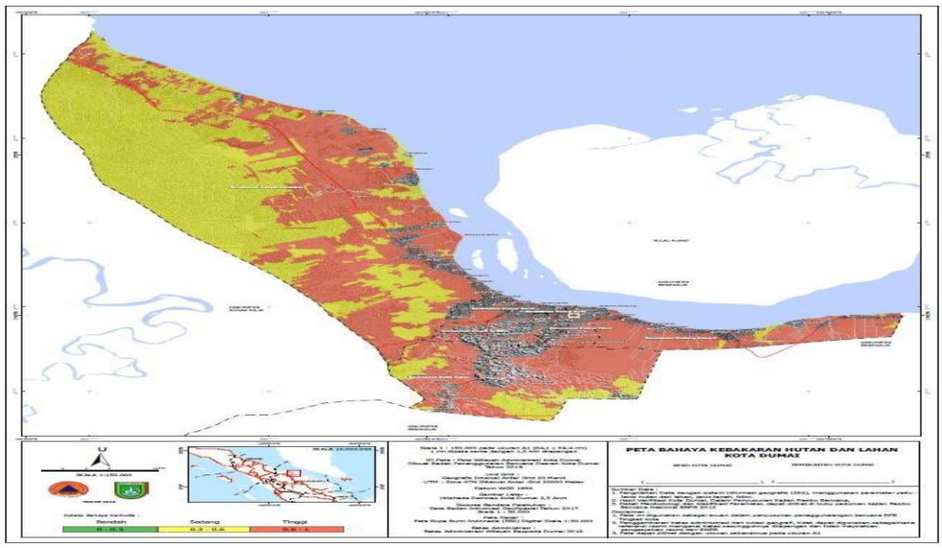
Di Kota Dumai potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya adalah kebakaran hutan dan terutama lahan diwilayah Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai sembilan. Kebakaran hutan dan lahan tersebut selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian dan perkebunan. Namun kebakaran hutan dan lahan dapat diantisipasi dengan menumbuhkan kewaspadaan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta masyarakat yang sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan selama periode 2019-2024 mengalami penurunan secara signifikan dimana bencana kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi pada tahun 2019 yaitu 109 kejadian dan kembali turun pada tahun 2023 sebanyak 40 kejadian kebakaran hutan dan lahan dan pada tahun 2024 kembali meningkat sebanyak 50 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Jika kejadian dilihat mengikut bulan pada tahun 2024, maka kejadian kebakaran hutan lahan terbanyak terjadi pada pada bulan Februari dengan 16 kejadian seperti yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan
Kota Dumai Tahun 2019-2024

No	Bulan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Januari	3	15	2	6	0	0
2	Februari	20	23	14	2	1	16
3	Maret	24	25	7	5	16	11
4	April	8	7	0	5	4	4
5	Mei	6	0	1	0	4	1
6	Juni	5	2	5	4	4	2
7	Juli	9	3	7	6	5	12
8	Agustus	14	3	3	1	3	0
9	September	14	1	5	0	1	1
10	Oktober	0	0	6	2	2	3
11	November	3	0	0	0	0	0
12	Desember	3	0	0	0	0	0
Jumlah Kejadian		**109**	**79**	**50**	**31**	**40**	**50**

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. 2025)



Gambar 2.2. Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai

Peta rawan bencana kebakaran ini dibuat sebagai rambu-rambu dalam antipasi atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jika dilihat dari peta rawan bencana kebakaran hutan dan lahan Kota Dumai diatas, terdapat wilayah yang rawan bencana kebakaran dari Tahun 2019 hingga Tahun 2024, data tersebut dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
Luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2019-2024

No	Kecamatan /Kelurahan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total Luas Kebakaran
1	**Kecamatan Bukit Kapur**	**32**	**1**	**11,5**	**2,7**	**13**	**99**	**159,2**
	Bukit Nenas	1	-	-	0,4	1	1	3,4
	Bagan Besar	2	-	-	-	1	-	3
	Bukit Kayu Kapur	2,5	1	1,5	-	3	1	9
	Gurun Panjang	26,5	-	10	2	8	97	143,5
	Kampung Baru	-	-	-	-		-	0
	Bagan Besar Timur				0,3		-	0,3
	Bukit Kapur				-		-	0
2	**Kecamatan Medang Kampai**	**112**	**21,4**	**12,51**	**10**	**82,85**	**14,4**	**253,16**
	Pelintung	-	5	-	9,5	66,25	3,5	84,25
	Guntung	33,5	3	1	-	0,5	2,5	40,5
	Teluk makmur	73,5	11,4	2,5	0,5	15,3	5,1	108,3
	Mundam	5	2	9,01	-	0,8	3,3	20,11
3	**Kecamatan Sungai Sembilan**	**103**	**90,8**	**133,4**	**7,8**	**10**	**16,8**	**361,8**
	Bangsal Aceh	51	35,5	4	0,5		15	106
	Lubuk Gaung	21,5	43	121,4	5,5	3,5	-	194,9
	Basilam Baru	25	-	-	-		-	25
	Batu Teritip	1	9,5	8,08	1,5	4,8	1,8	26,68
	Tanjung Penyembal	4,5	2,8	-	0,3	1	-	8,6
	Sungai Geniot				-	0,7	-	0,7
4	**Kecamatan Dumai Barat**	**14**	**14,5**	**3**	**2**	**2,2**	**0,8**	**36,5**
	Pangkalan Sesai	1	-	-	-		-	1
	Purnama	3	7,25	-	-		-	10,25
	Simpang Tetap Darul Ihsan	3,5	-	-	-		0,8	4,3
	Bagan Keladi	6,5	7,25	3	2	2,2	-	20,95
5	**Kecamatan Dumai Selatan**	**51,8**	**5**	**1**	**1,3**	**1,05**	**6,05**	**66,2**
	Mekar Sari	2,75	2	-	1	0,25	3,55	9,55
	Bukit Timah	15	1	0,25	0,1		0,8	17,15
	Bumi Ayu	2	0,5	-	-		-	2,5
	Bukit Datuk	7,5	1,5	0,5	0,3	0,8	84,43	12,1
	Ratu Sima	24,5	-	0,25	-		0,2	24,95
6	**Kecamatan Dumai Timur**	**42,3**	**6,3**	**8,5**	**28**	**10,75**	**97,1**	**htr**
	Teluk Binjai	18,8	4,75	8,5	-			32,05
	Buluh Kasap	-	1	-	-		-	1
	Jaya Mukti	-	0,25	-	-		-	0,25
	Tanjung Palas	-	-	-	28	7,95	86,6	122,55
	Bukit Batrem	23,5	0,3	-	-	2,8	10,5	37,1

No	Kecamatan /Kelurahan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total Luas Kebakaran
7	**Kecamatan Dumai Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**
	Rimba Sekampung	-	-	-	-		-	0
	Sukajadi	-	-	-	-		-	0
	Bintan	-	-	-	-		-	0
	Dumai Kota	-	-	-	-		-	0
	Laksamana	-	-	-	-		-	0
DUMAI		**355**	**138,95**	**169,94**	**51,7**	**119,85**	**234,15**	**1,069,59**

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, 2025)

Luas Kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 sebesar 355 Ha, mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 138,95 Ha dan 159,45 Ha di tahun 2021. Pada tahun 2023 luas kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan sebesar 119,85 Ha kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 234,15 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

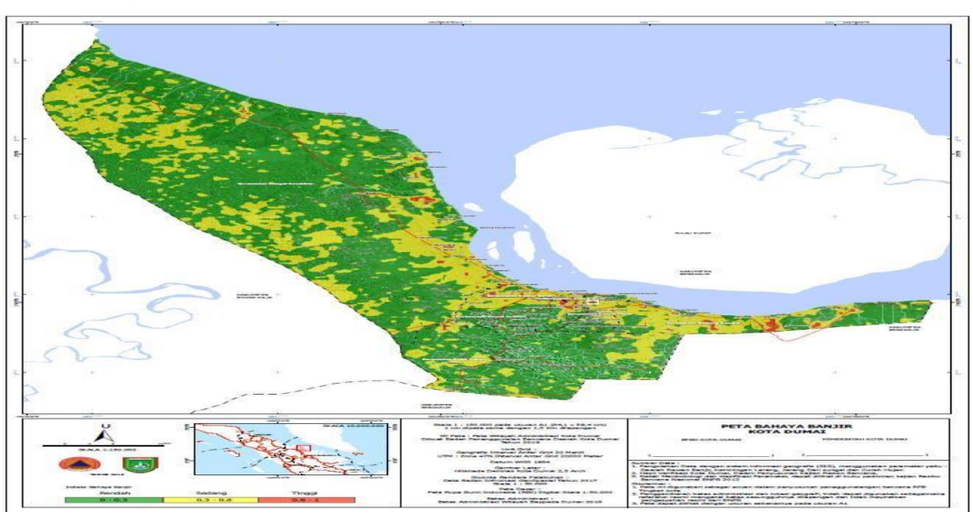
Tabel 2.11
Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Banyak Kejadian Kebakaran Rumah Penduduk	34 Kasus	20 Kasus	29 Kasus	48 Kasus	46 Kasus	-
Banyak Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan	355 Ha	138,95 Ha	159,45 Ha	51,7 Ha	119,85 Ha	234,15 Ha
Banyak kejadian Banjir	-	-	5 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	7 Lokasi

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun, 2025)

2) Kawasan Rawan Bencana Banjir

Selain bencana kebakaran hutan dan lahan, masalah banjir hingga saat ini masih menjadi persoalan utama di kawasan pinggiran Kota Dumai. Ketika hujan dan pasang laut naik, kondisi pinggiran kota dan sebagian jalan di tengah kota memprihatinkan. Jika dilihat dari peta rawan bencana banjir seperti yang tersaji pada gambar dibawah ini, maka Kecamatan yang memiliki rawan bencana banjir adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Barat. Hal itu disebabkan hampir sebagian besar daratan di Dumai merupakan lahan gambut, sehingga setiap hujan dan pasang, air selalu tertahan cukup lama.



Gambar 2.3. Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai

Pada tahun 2024 terdapat bencana banjir yang terjadi pada 7 lokasi di Kota Dumai. Dapat di duga terjadinya banjir disebabkan oleh intensitas curah hujan di wilayah Kota Dumai dan juga oleh pasang ROB.

2.1.1.4 Demografi

Secara umum data demografi sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penduduk seperti pembangunan rumah, ketersediaan air dan listrik serta kebutuhan lainnya terutama pelayanan umum. Hal ini penting untuk menentukan arah kebijakan sebagai upaya perlindungan terhadap Masyarakat. Sedangkan bagi keperluan dunia usaha untuk mengidentifikasikan target pasar barang dan jasa.

1) Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kota Dumai mengalami pertambahan dari 308.812 jiwa tahun 2019 menjadi 349.389 jiwa pada tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata penduduk selama periode 2019-2024 sebesar 2,50% per tahun. Penyumbang utama tingginya pertumbuhan penduduk adalah peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki yang tumbuh sebesar 2,56% per tahun sementara peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan sebesar 2,44% per tahun selama periode tahun 2019-2024, jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.12
Indikator Kependudukan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator Kependudukan	Tahun						Rata2 Pertum buhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	349.389	2.50
Laki-Laki (Jiwa)	158.287	162.769	166.049	170.201	173.758	179.604	2.56
Perempuan (Jiwa)	150.525	154.013	157.403	161.631	164.306	169.785	2.44
Sex Rasio	105,16	105,69	105,49	105,3	105,75	105,78	0.12
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	178,77	183,28	187,03	161	164	169	-1.12
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	1,82	2,58	2,11	2,59	3,31	3,35	
Luas Wilayah (Km2)	1.727,38	2.066,73	2.066,73	2.066,73	2.066,73	2.066,73	

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 3,35% dan pertumbuhan penduduk paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,82%. Selain angka kelahiran penduduk, pertumbuhan penduduk Kota Dumai tersebut disebabkan oleh adanya migrasi dari daerah lain baik antara kabupaten dan kota juga antar provinsi. Kondisi ini terjadi mengingat Kota Dumai merupakan salah wilayah yang sektor industri pengolahan yang mengalami perkembangan dengan pesat terutama industri pengolahan CPO dan industri lainnya.

2) Perkembangan Sebaran Penduduk

Data kependudukan mempunyai pengaruh penting dalam perencanaan wilayah. Dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penduduk merupakan subjek dan objek seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah karena setiap hasil pembangunan daerah harus dapat memberikan efek positif kepada penduduk baik langsung maupun tidak langsung (muta'ali, 2015). Lebih jauh muta'ali (2015) menjelaskan bahwa antara proses pembangunan dengan penduduk mempunyai hubungan timbal balik yang sangat kuat dalam konteks saling mempengaruhi.

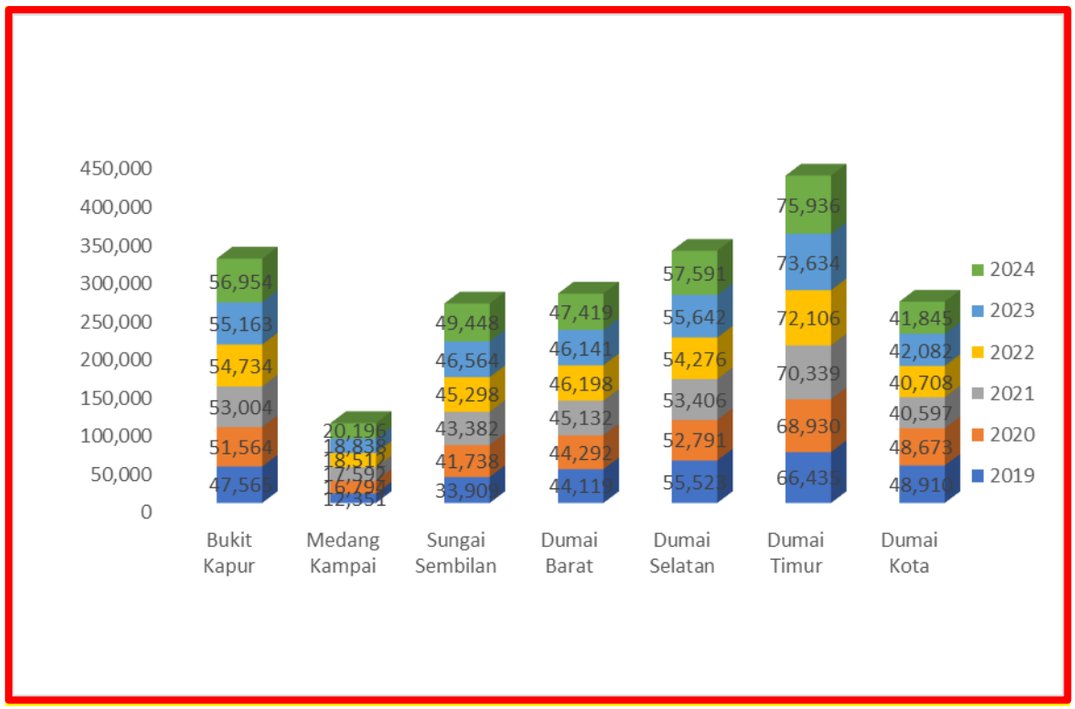
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kota Dumai pada tahun 2019-2024 dalam buku Kota Dumai Dalam Angka, total jumlah penduduk kota Dumai di tujuh kecamatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai ditahun 2024, secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 2.13
Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019-2024

Kecamatan	Perkembangan Jumlah Penduduk						Rata2 Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Bukit Kapur	47,565	51,564	53,004	54,734	55,163	56,954	3.67
Medang Kampai	12,351	16,794	17,592	18,512	18,838	20,196	10.33
Sungai Sembilan	33,909	41,738	43,382	45,298	46,564	49,448	7.84
Dumai Barat	44,119	44,292	45,132	46,198	46,141	47,419	1.45
Dumai Selatan	55,523	52,791	53,406	54,276	55,642	57,591	0.73
Dumai Timur	66,435	68,930	70,339	72,106	73,634	75,936	2.71
Dumai Kota	48,910	48,673	40,597	40,708	42,082	41,845	-3.07
Kota Dumai	**308,812**	**324,782**	**323,452**	**331,832**	**338,064**	**349,389**	**2.50**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

Jika dilihat pada tabel di atas diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk kota dumai pada selama kurun waktu 2019-2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama kurun waktu tersebut jumlah penduduk Kota Dumai bertambah sebanyak 40.577 jiwa yang tersebar kedalam 7 (tujuh) wilayah administrasi dengan kecamatan. Pertumbuhan rata-rata penduduk Kota Dumai selama kurun waktu tersebut adalah 2,50%. Adapun kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Dumai Timur. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Medang Kampai.



Grafik 2.1. Jumlah Penduduk (Jiwa) per Kecamatan Tahun 2019-2024

Dari grafik diatas terlihat bahwa trend jumlah penduduk setiap kecamatan terus meningkat. Trend penambahan ini tidak hanya saja terjadi karena faktor tingkat kelahiran tetapi juga faktor perpindahan penduduk, Data jumlah penduduk sangat berguna untuk menentukan ambang batas (treshold) penyediaan fasilitas/sarana dan prasarana pelayanan publik disuatu daerah ataupun untuk menjadi basis data dalam menganalisa kondisi kependuduk secara lebih spesifik.

3) Perkembangan Kepadatan Penduduk

Angka pertumbuhan penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan wilayah untuk menentukan rencana pembangunan baik ekonomi, sosial maupun sarana dan prasarana wilayah. Hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat pelayanan publik di tingkat kota maupun kecamatan. Seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Dumai selama kurun waktu 2019-2024 adalah 2,50%. Adapun kecamatan yang memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi selama kurun waktu 5 tahun adalah kecamatan Medang Kampai yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,33% dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 35,97%. Sedangkan kecamatan yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling rendah adalah kecamatan Dumai Kota yaitu -3,07% (jumlah penduduk berkurang). Penurunan pertumbuhan penduduk dikecamatan Dumai Kota terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -16,84%.

Tabel 2.14
Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bukit Kapur	2,24%	8,41%	2,79%	3,26%	3,77%	3,25%
Medang Kampai	1,74%	35,97%	4,75%	5,23%	6,69%	7,21%

Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sungai Sembilan	2,04%	23,09%	3,94%	4,42%	6,18%	6,19%
Dumai Barat	2,02%	0,39%	1,90%	2,36%	2,82%	2,77%
Dumai Selatan	1,71%	-4,92%	1,16%	1,63%	2,80%	3,50%
Dumai Timur	1,74%	3,76%	2,04%	2,51%	3,40%	3,13%
Dumai Kota	1,34%	-16,84%	-0,19%	0,27%	-0,43%	-0,56%
Kota Dumai	**1,82%**	**2,58%**	**2,11%**	**2,59%**	**3,31%**	**3,35%**

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

Menurut Todaro dan Smith (2011), pertumbuhan penduduk diatas 2% termasuk tinggi, Pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah sepert penyediaan kebutuhan pangan; penyediaan pelayanan kesehatan seperti rasio dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, rasio fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk; penyediaan pelayanan pendidikan bagi masyarakat seperti rasio jumlah fasilitas pendidikan terhadap jumlah penduduk, ketersediaan ruang kelas dan lain sebagainya (Muta'ali, 2015), Lebih jauh Todaro dan Smith (2011) berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk bukan hanya sekedar pertambahan atau pengurangan penduduk saja tetapi lebih sebagai menyelesaikan permasalahan terkait kesejahteraan dan pembangunan masyarakat dan upaya dalam menyediakan pelayanan sosial dan infrastruktur seperti perumahan yang layak, transportasi,sanitasi dan keamanan,

Todaro dan smith (2011) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk juga sangat erat kaitannya dengan ketenagakerjaan, distribusi pangan, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar serta kemiskinan,

Jika dilihat berdasarkan luasan wilayah setiap kecamatan, maka dalam kurun waktu 2019-2024, kecamatan dengan penduduk terpadat adalah kecamatan Dumai Kota yaitu 9.869 jiwa/km2, Artinya setiap 1 km2 kecamatan Dumai Kota dihuni oleh rata-rata 9.869 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan paling rendah adalah kecamatan Sungai Sembilan yaitu 35 jiwa/km2 yang artinya setiap 1 km2 kecamatan Sungai Sembilan dihuni rata-rata oleh 35 jiwa. Adapun luas wilayah yang digunakan adalah luas wilayah berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai.

Kepadatan penduduk tentu akan sangat mempengaruhi penataan ruang khususnya distribusi pemukiman penduduk (muta'ali, 2015). Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Kepadatan penduduk adalah sebagai berikut:

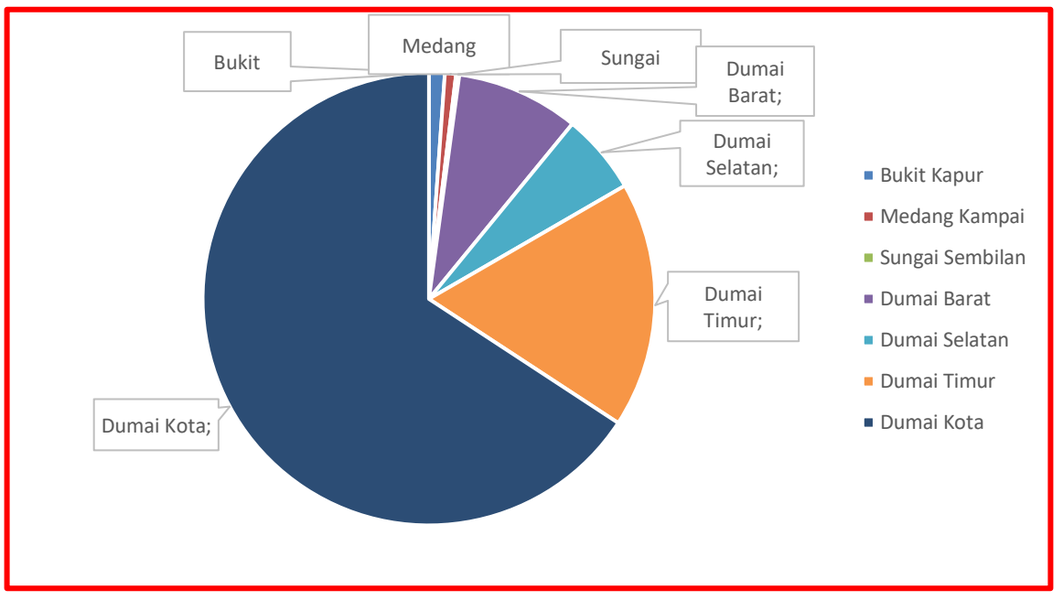
$$\textbf{\textit{Kepadatan Penduduk}} = \frac{\textit{Jumlah Penduduk Suatu Wilayah}}{\textit{Luas wilayah}}$$

Tabel 2.15
Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2019-2024

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) sesuai luasan RTRW						Rata-rata Pertumbuhan / Tahun
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Bukit Kapur	140,64	152,47	156,72	161,84	164	169	3,74

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) sesuai luasan RTRW						Rata-rata Pertumbuhan / Tahun
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Medang Kampai	76,04	103,39	108,31	113,97	111	119	9,37
Sungai Sembilan	23,88	29,40	30,55	31,90	33	35	7,95
Dumai Barat	1.257,02	1.261,95	1.285,88	1.316,25	1.281	1.317	0,94
Dumai Selatan	853,99	811,97	821,43	834,81	831	860	0,14
Dumai Timur	1.928,37	2.000,79	2.041,69	2.092,98	2.556	2.636	6,45
Dumai Kota	11.562,10	9.614,91	9.596,95	9.623,19	9.925	9.869	-3,12
Total	149,96	153,83	157,07	161,14	164	169	2,42

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka, 2025)



Grafik 2.2. Rata-rata Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2019-2024 (Jiwa/Km2)

Lebih jauh Muta'ali (2015) menjelaskan bahwa kepadatan penduduk sangat mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah baik secara positif maupun negatif. Kecamatan dengan kepadatan yang tinggi akan menjadi pusat kegiatan sebuah kota baik untuk pemukiman, sosial maupun ekonomi.

4) Perkembangan Sex Rasio Penduduk

Komposisi Penduduk suatu kota menggambarkan perbandingan-perbandingan penduduk dalam kaitannya dengan gender dan umur, Data sex ratio sangat berguna untuk pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan peran laki-laki dan perempuan secara proporsional dalam pembangunan daerah, seperti pendidikan yang berwawasan gender, Informasi terkait sex ratio juga penting diketahui untuk mempertimbangkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan rakyat daerah (Muta'ali (2015), Adapun rumus untuk menentukan sex ratio adalah sebagai berikut:

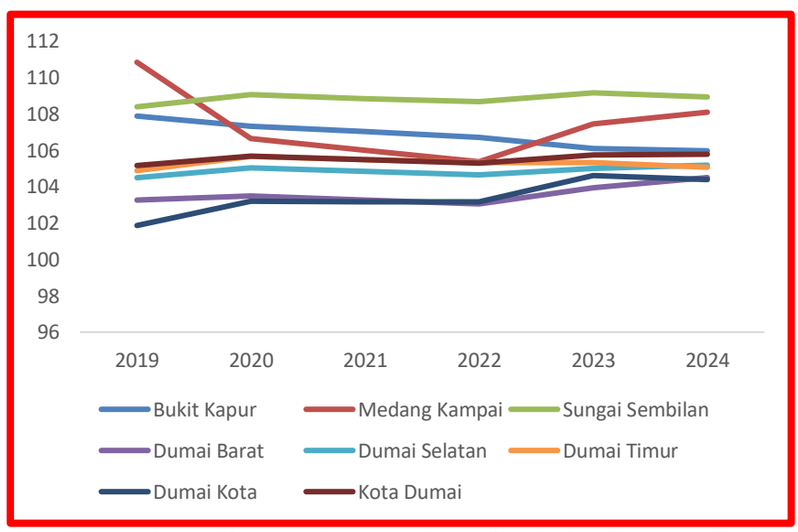
$$\mathbf{SR} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Penduduk\ Laki{-}Laki}}{\boldsymbol{Jumlah\ Penduduk\ Perempuan}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100}$$

Tabel 2.16
Perkembangan Sex Rasio Penduduk Tahun 2019-2024

Kecamatan	Sex Ratio					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bukit Kapur	107,88	107,33	107,02	106,72	106,10	105.97
Medang Kampai	110,84	106,64	106	105,37	107,44	108.08
Sungai Sembilan	108,39	109,05	108,85	108,66	109,16	108.94
Dumai Barat	103,26	103,48	103,26	103,05	103,95	104.5
Dumai Selatan	104,49	105,03	104,84	104,65	104,99	105.18
Dumai Timur	104,88	105,66	105,49	105,32	105,32	105.05
Dumai Kota	101,86	103,19	103,17	103,15	104,61	104.4
Kota Dumai	**105,16**	**105,69**	**105,49**	**105,3**	**105,75**	**105.78**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa Sex ratio pada kurun waktu 2019-2024 (perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan) disetiap hampir diseluruh kecamatan di Kota Dumai diatas 100. Jika diambil contoh pada tahun 2024, sex ratio kecamatan Bukit Kapur adalah 105.97, ini mengindikasikan bahwa didalam 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 105 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jika angka sex ratio ini dibawah 100 maka bisa saja akan menimbulkan berbagai masalah, karena ini mengindikasikan kekurangan penduduk laki-laki untuk melaksanakan pembangunan khususnya kegiatan pembangunan fisik.



Grafik 2.3. Tren Sex Rasio Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019–2024

5) Struktur Usia Penduduk

Struktur umur penduduk Kota Dumai menurut kelompok umur dan jenis kelamin sangat penting dilakukan analisis karena hal ini berkaitan dengan distribusi terhadap penduduk dalam usia kerja yang berimplikasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi karena jika penduduk usia kerja bertambah maka juga akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian serta akan mengurangi tingkat ketergantungan pada orang tua. Pada tahun 2024 jumlah penduduk yang berumur antara 0-14 tahun berjumlah 93.592 jiwa atau 26,86%. Umur 65 tahun hingga di atas 75 tahun sebanyak 15.578 jiwa atau 4,47%.

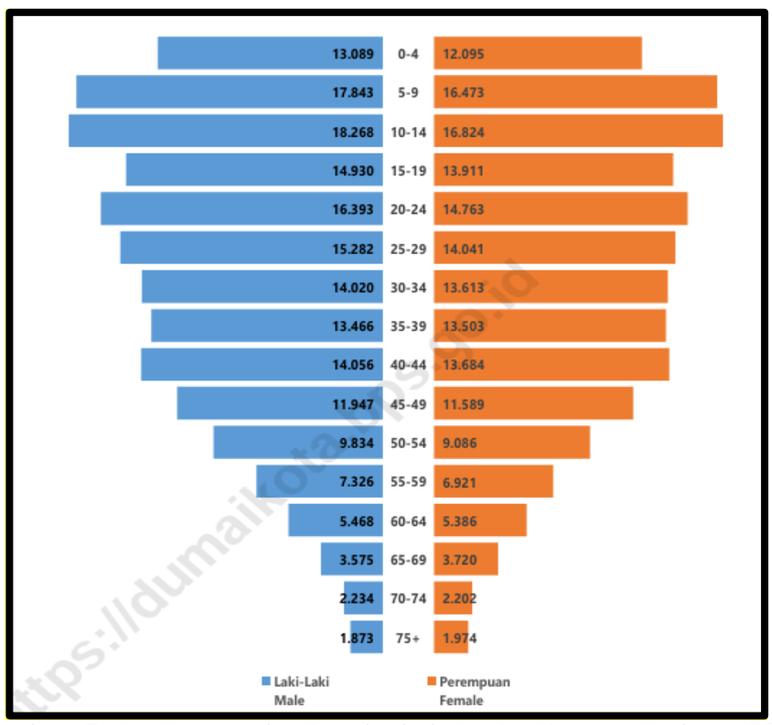
Sedangkan jumlah penduduk antara umur 15-64 tahun adalah 239.219 jiwa atau 68,66%.

Jika umur dikelompokkan menjadi kelompok umur tidak produktif (0–14 tahun dan 65–75+) dan produktif (15–64 tahun) pada tahun 2024. Maka rasio antara jumlah penduduk produktif sebesar 68,66% atau sebanyak 239.219 jiwa dan sebesar 31,34% atau sebanyak 109.170 jiwa tidak produktif. Kelompok umur tidak produktif (belum produktif) yaitu kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 93.592 jiwa atau 26,86% dan kelompok umur tidak produktif 65-75+ sebanyak 15.578 jiwa atau 4,47%.

Tingginya proporsi umur penduduk belum produktif atau usia dini dan usia sekolah sangat memerlukan perhatian dari aspek peningkatan akses kesehatan dan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan.

Selain itu pada kelompok umur tidak perodukif 65-75+ harus menjadi perhatian terutama terkait dengan peningkatan akses kesehatan melalui penyediaan pangan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan untuk berobat. Kurangnya kedua akses tersebut akan mempengaruhi penurunan kondisi kesehatan yang menyebabkan penurunan angka harapan hidup.

Oleh karena itu harus tetap memperhatikan kelompok umur ini karena lebih rentan terhadap penyakit sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana dan perbaikan pelayanan kesehatan dan penyediaan pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Struktur penduduk menurut kelompok umur Kota Dumai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah berikut.



Gambar 2.4. Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2024
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

6) Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk

Komposisi penduduk Kota Dumai dari kelompok usia (umur) akan dapat menggambarkan rasio ketergantungan/ Rasio beban tanggungan/ Dependancy Ratio yaitu suatu angka yang menunjukkan besar beban

tanggungan penduduk usia produktif (15-64 tahun) atas penduduk usia non produktif (< 15 tahun dan >64 tahun). Didalam bukunya, muta'ali (2015) menjelaskan bahwa Rasio ketergantungan berkaitan erat dengan Bonus Demografi yang diterjemahkan sebagai keuntungan ekonomi yang didapat dari turunnya rasio ketergantungan sebagai hasil dari proses perubahan komposisi penduduk dalam kelompok umur. Perubahan komposisi pendudukan menurut kelompok umur adalah perubahan dari penduduk usia non produktif ke penduduk usia produktif. Adapun rumus untuk menghitung Dependancy Ratio adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{DR} = \frac{\textit{Penduduk Non Produktif}}{\textit{Penduduk Produktif}}\ x\ \mathbf{100}$$

Selama periode 2019-2024, perkembangan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami pertumbuhan sebesar 2,96% per tahun dan usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) tumbuh sebesar 1,35% per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio ketergantungan sebesar -1,56% per tahun. Penurunan rasio ketergantungan tersebut yang disebabkan oleh laju pertumbuhan usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan usia tidak produktif. Hal tersebut dapat terjadi karena angka kelahiran atau fertilitas yang terus mengalami penurunan dan angka kematian atau mortalitas menjelang usia tidak produktif yaitu usia 64 tahun ke atas. Nilai *dependency ratio* Kota Dumai masuk kategori rendah selama periode 2019-2024 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.17
Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Jumlah Penduduk Produktif Non Produktif, Dependancy Ratio Dan Child Woman Ratio Kota Dumai Tahun 2019-2024

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan / Tahun
0-4	34,085	33,966	34,249	34,761	24,815	25,184	-5,87%
5–9	31,037	30,224	30,502	30,872	34,178	34,316	2,03%
10–14	27,494	27,870	28,178	28,682	34,589	35,092	5,00%
15–19	26,231	27,314	27,436	27,716	26,574	38,841	1,92%
20–24	24,554	27,734	28,022	28,376	29,936	31,156	4,88%
25–29	27,614	27,552	27,987	28,588	28,566	29,323	1,21%
30–34	26,157	26,371	26,768	27,265	26,749	27,633	1,10%
35–39	24,017	25,283	25,744	26,377	27,037	26,969	2,35%
40–44	22,183	22,967	23,438	23,975	27,092	27,740	4,57%
45–49	19,786	19,389	20,052	20,799	22,411	23,536	3,53%
50–54	15,779	15,108	15,754	16,507	18,156	18,920	3,70%
55–59	12,108	12,515	13,161	13,851	13,525	14,247	3,31%
60–64	8,315	9,020	9,619	10,318	10,205	10,854	5,47%
65-69	9,452	11,469	12,542	13,745	6,790	7,295	-5,05%
70-74					4,020	4,436	10,35%
75+					3,421	3,847	12,45%
Uraian	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
Non Produktif	102,068	103,529	105,471	108,060	107,813	110,170	1,54%
Produktif	206,744	213,253	217,981	223,772	230,251	239,219	2,96%
Dependancy Ratio	49,37	48,55	48,39	48,29	46,82	46,05	-1,56%
CWR	200	192	191	190	130	264	

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

Jika Dilihat dari di atas kecenderungan Dependancy Ratio (DR) Kota Dumai selama kurun waktu 2019-2024 terus menurun. Pada Tahun 2019 DR Kota Dumai adalah 49,37 yang artinya setiap 100 orang kelompok produktif harus menanggung 49 kelompok usia non produktif. Sedangkan mulai tahun 2020-2024 DR Kota Dumai lebih kecil dari 50 (<50) dengan nilai berturut adalah 48,55; 48,39; 48,29; 46,82; 46,05 yang artinya 100 orang kelompok produktif harus menanggung 46-48 kelompok usia non produktif.

Menurut muta'ali (2015), bonus demografi terjadi ketika komposisi penduduk masuk kedalam periode yang disebut dengan window of opprtunity, yaitu suatu waktu dimana rasio ketergantungan berada pada titik terendah, biasanya 50%, yang berarti bahwa jumlah penduduk usia kerja pada saat periode tersebut lebih dari dua kali lipat penduduk non usia kerja, Jika melihat nilai Dependancy Ratio/rasio ketergantungan kota Dumai maka berdasarkan penjelasan mut'ali (2015), pada tahun 2019-2024 Kota Dumai telah mengalami Bonus demografi. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah daerah terkait bonus demografi didalam konteks pembangunan daerah adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia baik kualitas kesehatan maupun kualitas pendidikan untuk meningkatkan daya saing kelompok umur produktif, penciptaan peluang kerja, peluang investasi,peluang usaha serta aspek-aspek perekonomian wilayah lainnya untuk menghadapi bonus demografi, (Muta'ali, 2015).

Informasi perhitungan tentang rasio anak terhadap perempuan (Child Woman Ratio = CWR), Rasio anak terhadap perempuan (CWR) adalah perbandingan antara anak dengan perempuan usia subur, yaitu suatu perbandingan antara jumlah anak usia dibawah 5 (lima) tahun terhadap perempuan usia subur (usia melahirkan atau usia produksi) yaitu pada usia 15-49 tahun (muta'ali, 2015), Muta'ali (2015) juga menjelaskan bahwa CWR memberikan informasi tentang tingkat kelahiran disuatu daerah, dimana semakin tinggi rasio anak terhadap perempuan maka semakin tinggi tingkat kelahiran, CWR digunakan jika data tentang kelahiran dan regitrasi kelahiran penduduk tidak ada, Adapun rumus perhitungan CWR adalah sebagai berikut :

$$\boldsymbol{CWR = \frac{P\,(0-4)}{Pf\,(15-49)}\; x\; K}$$

CWR = Rasio Anak terhadap Perempuan

P (0-4) = jumlah Penduduk dibawah usia 5 tahun

Pf (15-49) = Jumlah penduduk perempuan usia 15-49 tahun

K = Angka Konstanta = 1,000

Dari rumus perhitungan diatas didapat nilai CWR Kota Dumai sebesar:

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CWR	200	192	191	190	130	264

Nilai CWR Kota Dumai pada tahun 2019 adalah 200 sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi 264, hal ini berarti pada tahun 2024 di Kota Dumai setiap 1,000 wanita yang berumur 15-49 tahun terdapat 264 anak usia 0-4 tahun, angka ini masih terbilang cukup tinggi. Oleh sebab itu dalam perencanaan pembangunan daerah perlu dipertimbangkan penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan balita baik pendidikan, kesehatan, taman bermain dan lain sebagainya.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

Perhitungan dasar-dasar ekonomi wilayah pada umumnya didasarkan pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Secara umum terdapat 2 macam perhitungan PDRB yaitu PDRB atas dasar berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga Konstan (ADHK). PDRB (ADHB) digunakan untuk mengukur kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB (ADHK) digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi, dengan demikian PDRB merupakan salah satu alat ukur dan alat analisa untuk pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi. Hasil analisa PDRB terhadap ekonomi wilayah digunakan untuk melihat struktur perekonomian wilayah, kontribusi sektor terhadap perekonomian wilayah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, struktur perekonomian regional dan klassifikasi potensi perkembangan perekonomian wilayah (tipologi kalssen).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Adapun PDRB atas dasar berlaku tahun 2019-2024 Kota Dumai sebagai berikut :

Tabel 2.18
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Dumai Tahun 2019-2024

No	Sektor/Sub sector	NILAI PDRB ADHB (JUTA RUPIAH)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,923,589.42	2,079,109.40	2,303,167.25	2,452,756.78	2,616,278.48	2,851,570.00
2	Pertambangan dan Penggalian	128,171.90	129,553.49	132,990.46	139,352.95	151,508.49	159,030.00
3	Industri Pengolahan	20,867,983.78	21,772,852.25	24,294,167.07	27,839,955.31	30,032,692.95	31,824,120.00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	31,766.86	73,723.73	92,975.88	140,550.18	149,175.32	157,420.00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,327.47	5,604.43	6,038.04	6,599.65	7,857.29	9,150.00
6	Konstruksi	4,049,172.47	3,941,634.14	3,995,660.54	4,510,776.13	5,335,392.25	5,792,110.00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	573,600,897	525,818,852	5,873,683.29	6,349,996.34	6,847,745.54	7,601,090.00
8	Transportasi dan Pergudangan	1,055,618.11	72,659,229	757,618.13	889,949.98	1,002,207.32	1,128,030.00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	319,404.93	26,031,055	314,99.80	335,595.81	360,638.47	426,900.00
10	Informasi dan Komunikasi	418,394.91	45,723,742	478,073.42	500,687.76	529,335.31	576,450.00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	397,130.22	40,920,299	449,223.55	517,340.12	544,489.23	562,290.00
12	Real Estate	161,757.94	164,082.24	168,398.89	182,025.42	194,515.59	208,380.00
13	Jasa Perusahaan	2,057.23	1,631.94	1,650.72	1,738.00	1,926.43	2,060.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	587,758.74	590,244.82	605,346.83	667,050.56	702,392.18	767,360.00
15	Jasa Pendidikan	177,129.44	185,339.10	192,270.01	199,182.23	212,306.66	225,800.00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65,843.06	77,378.69	86,277.57	93,680.55	103,791.89	112,600.00
17	Jasa lainnya	220,031.06	181,04.05	193,571.52	225,572.10	242,032.48	263,750.00
PDRB		**36,147,146.52**	**36,313,730.07**	**39,946,107.96**	**45,052,809.86**	**49,034,285.87**	**52,668,100.00**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

Tabel 2.19
Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kota Dumai Tahun 2019-2024

No	Sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)						Rata-rata	Pergeseran
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.32	5.73	5.77	5.44	5.34	5.41	5.50	0.00
2	Pertambangan dan Penggalian	0.35	0.36	0.33	0.31	0.31	0.30	0.33	-0.03
3	Industri Pengolahan	57.73	59.96	60.82	61.79	61.25	60.42	60.33	0.01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.20	0.23	0.31	0.30	0.30	0.24	0.27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.15
6	Konstruksi	11.20	10.85	10.00	10.01	10.88	11.00	10.66	0.00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.87	14.48	14.70	14.09	13.97	14.43	14.59	-0.02
8	Transportasi dan Pergudangan	2.92	2.00	1.90	1.98	2.04	2.14	2.16	-0.06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.88	0.72	0.79	0.74	0.74	0.81	0.78	-0.02
10	Informasi dan Komunikasi	1.16	1.26	1.20	1.11	1.08	1.09	1.15	-0.01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.10	1.13	1.12	1.15	1.11	1.07	1.11	-0.01
12	Real Estate	0.45	0.45	0.42	0.40	0.40	0.40	0.42	-0.02
13	Jasa Perusahaan	0.0057	0.0045	0.0041	0.0039	0.0039	0.00	0.0037	-1.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1.63	1.63	1.52	1.48	1.43	1.46	1.53	-0.02
15	Jasa Pendidikan	0.49	0.51	0.48	0.44	0.43	0.43	0.46	-0.03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.18	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.03
17	Jasa lainnya	0.61	0.50	0.48	0.50	0.49	0.50	0.51	-0.04
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2024 dapat kita lihat terdapat 8 sektor yang kontribusinya diatas 1% dan 9 sektor yang kontribusinya dibawah 1% dalam pembentukan PDRB Kota Dumai tahun 2024.

Jika kita perhatikan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2019-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini adalah 5,32% dan mengalami kenaikan pada tahun 2020, 2021 dan 2024 menjadi 5,73%, 5,77%, dan 5,41%. Namun pada tahun 2022 dan 2023 kontribusi sektor ini mengalami penurunan menjadi 5,44% dan 5,34%. Artinya nilai produksi dari sektor ini terus mengalami perkembangan yang fluktuatif terhadap pembentukan PDRB kota Dumai. Jika kita lihat pergeseran kontribusi sektor ini cenderung positif yang mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ini mengalami peningkatan nilai produksi.

Adapun kontribusi sektor pertambangan dan penggalian termasuk sektor yang memiliki kontribusi dibawah 1% dalam pembentukan PDRB kota Dumai. Dalam kurun waktu 2019-2024 kontribusi sektor ini cenderung menurun. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini 0,35% dan pada tahun 2024 menjadi 0,30% dengan pergeseran dalam kurun waktu tersebut memiliki nilai negatif yang mengindikasikan kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan nilai produksi.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusi tertinggi diantara sektor-sektor pembentuk PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor industi terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai selama kurun waktu tahun 2019-2024 dengan kecenderungan meningkat

dengan rata-rata kontribusi selama kurun waktu tersebut adalah 60,33%. Pada tahun 2019 kontribusi sektor industri 57,73% dan pada tahun 2024 kontribusi sektor ini mengalami kenaikan menjadi 60,42% dengan pergeseran dalam kurun waktu tersebut memiliki nilai positif yang mengindikasikan kontribusi sektor ini mengalami peningkatan nilai produksi.

Sektor pengadaan listrik dan gas merupakan termasuk sektor dari yang memiliki kontribusi dibawah 1% terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai dengan rata-rata kontribusi 0,19%. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini adalah 0,09% dan pada tahun 2024 sektor ini berkontribusi 0,30%. Meskipun kontribusi sektor ini sangat kecil, kontribusi sektor ini cenderung naik dengan pergeseran memiliki nilai positif yang mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ini mengalami kenaikan nilai produksi.

Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang termasuk sektor yang memiliki dibawah kontribusi 1% dengan rata-rata kontribusi 0,02%. Kontribusi sektor ini cenderung konsisten selama kurun waktu 2019-2024 yaitu 0,01%-0,02% dengan pergeseran bernilai positif yang mengindikasi meskipun bernilai kecil namun nilai produksi nya cenderung meningkat.

Sektor konstruksi termasuk sektor yang memiliki kontribusi yang cukup besar. Sektor kontribusi mengalami perkembangan yang fluktuatif dalam kurun waktu 2019-2024. Pada tahun 2019 kontribusi sektor sebesar 11,20% dan pada tahun 2024 menjadi 11,00% dengan pergeseran memiliki nilai positif yang mengindikasikan kontribusi sektor mengalami peningkatan nilai produksi.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi yang cukup besar dengan kecendrungan terjadi penurunan terhadap pembentukan PDRB kota Dumai selama kurun waktu 2019-2024 dengan rata-rata kontribusi 14,59%. Kontribusi sektor ini pada tahun 2019 adalah sebesar 15,87% dan pada tahun 2024 menjadi 14,43%, Adapun pergeseran sektor ini bernilai negatif yang mengindikasi nilai produksinya cenderung menurun.

Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan selama kurun waktu tahun 2019-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini 2,92% dan pada tahun 2024 menurun menjadi 2,14%. Pegeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman memiliki kontribusi dibawah 1%. Dalam kurun waktu 2019-2024 kontribusi sektor ini cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi sekitar 0,78%. Pada tahun 2019 sektor ini berkontribusi pada pembentukan PDRB sebesar 0,88% dan pada tahun 2024 menjadi 0,81%. Pegeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Untuk kontribusi Sektor Informasi dan komunikasi cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi kurun waktu 2019-2024 sebesar 1,15%. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini 1,16% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 1,09%. Adapun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai positif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini meningkat.

Sektor jasa keuangan dan asuransi memiliki kontribusi yang cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2019-2024 sebesar 1,11%. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini sebesar 1,10% dan pada tahun 2024 kontribusi sektor ini turun menjadi 1,07%. Adapun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Selama kurun waktu 2019-2024, kontribusi sektor real estate memiliki kontribusi yang relatif kecil bagi pembentukan PDRB Kota Dumai dengan rata-rata share sebesar 0,42%. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini sebesar 0,45% dan pada tahun 2024 turun menjadi 0,40% dengan pergeseran bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksinya menurun.

Kontribusi sektor perusahaan bagi pembentukan PDRB Kota Dumai merupakan yang paling kecil dari 17 sektor PDRB selama kurun waktu 2019-2024. Pada tahun 2019 sektor ini berkontribusi 0,0057% dan pada tahun 2023 turun menjadi 0,0039% dengan pergeseran kontribusi bernilai negative yang mengindikasikan nilai produksinya menurun.

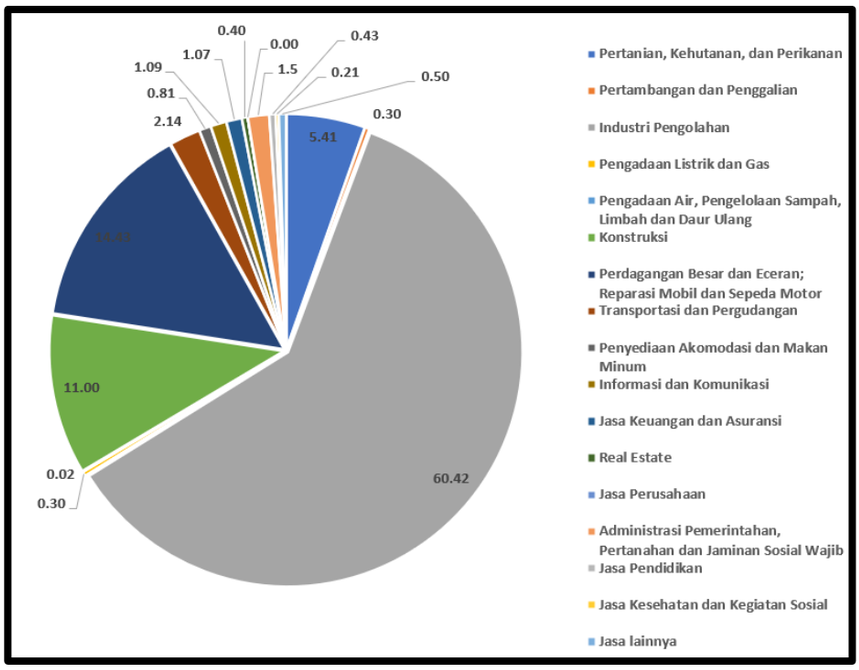
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memberi kontribusi pada pembentukan PDRB selama kurun waktu 2019-2024 diatas 1% namun cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi 1,53%. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini sebesar 1,63% dan pada tahun 2024 turun menjadi 1,50% dengan pergeseran kontribusi sektor bernilai negative. Hal ini mengindikasi nilai produksi dari sektor ini menurun.

Sektor jasa pendidikan memiliki kontribusi cenderung menurun selama kurun waktu tahun 2019-2024 dengan rata-rata share 0,46%. Pada Tahun 2019 sektor ini mampu berkontribusi sebesar 0,49% dan pada tahun 2024 kontribusinya turun menjadi 0,43% dengan pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negative. Hal ini mengindikasikan produksi sektor ini menurun.

Adapun Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki kontribusi yang cenderung meningkat dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2019-2024 sebesar 0,21%. Pada tahun 2018 kontribusi sektor ini adalah sebesar 0,18% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,21%. Meskipun konstribusi sektor ini tergolong kecil namun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai positif. Hal ini mengindikasikan meskipun kontribusi sektor ini sangat kecil namun nilai produksinya meningkat.

Untuk sektor jasa lainnya, kontribusi sektor ini juga relatif kecil namun cenderung turun dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2019-2024 sebesar 0,51%. Pada tahun 2019 sektor ini mampu berkontribusi

0,61% dan turun menjadi 0,60% pada tahun 2024 dengan pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksinya menurun.



Grafik 2.4. Struktur Ekonomi Kota Dumai Tahun 2024

Jika diperhatikan dari penjelasan dan gambar diatas, maka kontribusi sektor industri pengolahan dalam pembentukan PDRB Kota Dumai tahun 2024 sangat dominan dibanding sektor-sektor lainnya. Berdasarkan United nations for Industrial development organization (UNIDO), untuk menilai peran sektor industri pada suatu wilayah dapat lihat dari peran sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut (muta'ali, 2015):

1. Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB < 10% dikelompokkan sebagai wilayah non industri
2. Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB 10% - 20% dikelompokkan sebagai wilayah yang memasuki proses industrialisasi
3. Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB 20% - 30% dikelompokkan sebagai wilayah semi industri
4. Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB > 30% dikelompokkan sebagai wilayah industri

Jika kita lihat kontribusi sektor industri kota Dumai terhadap pembentukan PDRB kota Dumai dalam kurun waktu 2019-2024 diatas diatas 30%, maka kota Dumai termasuk kategori wilayah industri.

Menurut publikasi BPS, PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2014, tahun dasar yang digunakan adalah tahun dasar 2010. Adapun PDRB kota Dumai tahun 2019-2024 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Dumai Tahun 2019-2024

No	Sektor/Sub sektor	NILAI PDRB ADHK (JUTA RUPIAH)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,247,922.09	1,299,761.49	1,351,367.35	1,353,308.06	1,378,765.08	1,406,220.00
2	Pertambangan dan Penggalian	78,506.74	77,470.45	77,974.01	79,578.24	83,595.62	87,240.00
3	Industri Pengolahan	14,581,613.37	15,020,311.75	16,006,044.09	17,241,068.60	18,253,329.59	18,974,950.00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	19,141.15	45,610.20	57,810.02	82,598.92	82,991.31	87,140.00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,953.63	4,107.82	4,427.41	4,787.35	5,494.51	6,210.00
6	Konstruksi	2,458,034.29	2,383,801.65	2,384,993.55	2,502,103.89	2,756,162.91	2,977,320.00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,158,872.44	3,730,303.07	4,066,732.21	4,202,233.90	4,472,739.04	4,809,190.00
8	Transportasi dan Pergudangan	712,126.69	465,475.75	467,439.73	510,168.26	540,637.24	557,930.00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	180,830.95	145,576.33	173,379.44	181,306.44	191,156.71	218,800.00
10	Informasi dan Komunikasi	308,203.51	336,681.51	350,586.46	360,504.90	377,263.01	409,430.00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	270,745.90	280,070.73	292,581.59	307,308.22	317,259.29	324,200.00
12	Real Estate	108,656.18	110,427.27	113,298.38	119,365.05	124,232.65	130,530.00
13	Jasa Perusahaan	1,343.56	1,047.17	1,064.45	1,078.86	1,152.04	1,240.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	442,434.46	432,877.88	442,184.75	482,175.06	503,634.02	552,960.00
15	Jasa Pendidikan	107,280.30	108,792.95	111,567.17	114,003.35	119,608.27	125,500.00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40,219.13	46,099.16	50,856.60	53,089.96	56,886.89	60,910.00
17	Jasa lainnya	137,017.95	109,573.25	115,972.33	131,188.36	137,697.01	147,400.00
PDRB		**24,856,902.32**	**24,597,988.44**	**26,068,279.54**	**27,725,867.44**	**29,402,605.17**	**30,877,160.00**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

Menurut Muta'ali (2015) Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah ukuran yang utama dalam menggambarkan capaian pembangunan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Menurut Boediono (1999) dalam muta'ali (2015) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang,

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menghitung perubahan /pertambahan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tahun 2010 untuk menghilangkan pengaruh kenaikan harga, Suatu wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi jika PDRB atas dasar harga konstan yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya, Adapun rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebaga berikut :

$$\textbf{\textit{Pertumbuhan Ekonomi}} = \frac{(PDRBt - PDRB\ t-1)}{PDRB\ t-1} \textbf{\textit{x 100\%}}$$

$PDRB_t$ = PDRB ADHK tahun t
$PDRB_{t-1}$ = PDRB ADHK tahun t-1

Berdasarkan publikasi BPS kota Dumai, PDRB ADHK tahun dasar tahun 2010 menurut lapangan usaha Kota Dumai tahun 2023 adalah 29.402.605,17 (Juta Rupiah) sedangkan pada tahun 2024 adalah 30.877.160,00 (juta rupiah), maka pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$\textbf{\textit{Pertumbuhan Ekonomi}} = \frac{(30.877.160,00 - 29.402.605,17)}{29.402.605,17} \textbf{\textit{x 100\%}}$$

Pertumbuhan Ekonomi = 5,02%

Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai pada Tahun 2024 tidak setinggi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 namun tetap masih diatas 5%. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Dumai sebesar 6,05%. Sedangkan tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Dumai sebesar 5,02%. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin besar kemungkinan perkembangan suatu wilayah. Berdasarkan tabel berikut dapat dihitung pertumbuhan ekonomi Kota Dumai dalam kurun waktu 2019-2024, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2019-2024

No	Kategori	Pertumbuhan Ekonomi(%)						Rata-rata Pertumbuhan / Tahun
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,01	4,15	3,97	0,14	1,88	1,99	2.43
B	Pertambangan & penggalian	2,31	-1,32	0,65	2,06	5,05	4,36	2.16
C	industri pengolahan	7,18	3,01	6,56	7,72	5,87	3,95	5.42
D	Pengadaan listrik dan gas,	7,29	138,30	26,75	42,88	0,48	5	42.68
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6,18	4,05	7,79	8,13	14,77	12,94	9.54
F	Bangunan	4,15	-3,02	0,05	4,91	10,15	8,02	4.02
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	2,87	-10,30	9,02	3,33	6,44	7,52	3.20
H	Transportasi dan pergudangan	5,35	-34,64	0,42	9,14	5,97	3,2	-3.18

No	Kategori	Pertumbuhan Ekonomi(%)						Rata-rata Pertumbuhan / Tahun
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3,72	-19,49	19,10	4,57	5,43	14,46	4.81
J	Informasi dan komunikasi	7,21	9,24	4,13	2,83	4,65	8,53	5.88
K	Jasa keuangan dan asuransi	0,11	3,44	4,47	5,03	3,24	2,19	3.67
L	Real estate	5,29	1,63	2,60	5,35	4,08	5,07	3.75
M, N	Jasa perusahaan	7,20	-21,64	0,95	1,35	6,78	7,42	-1.03
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	2,32	-2,16	2,15	9,04	4,45	9,79	4.65
P	Jasa pendidikan	5,62	1,41	2,56	2,18	4,92	4,92	3.20
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	10,83	14,62	10,33	4,39	7,15	7,07	8.71
R, S, T, U	Jasa lainnya	8,79	-20,03	5,84	13,12	4,96	7,04	2.19
Pertumbuhan ekonomi		**5,60**	**1,04**	**5,98**	**6,36**	**6,05**	**5,02**	**5,40**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

Dari tabel diatas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Kota Dumai selama kurun waktu 2019-2024 terus berfluktuatif dimana pada tahun 2020 terjadi kontraksi akibat pandemi Covid 19 namun mulai tahun 2021-2023 tumbuh lagi dan pada tahun 2022 merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2019. Jika dianalisa dari pertumbuhan lapangan usaha, maka penyebab pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tidak setinggi tahun 2023 dapat dilihat bahwa lapangan usaha industri pengolahan tumbuh pada tahun 2024 tumbuh sebesar 3,2%, angka ini lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 5,97%.

Hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Dumai pada tahun 2024 karena sector industri pengolahan merupakan sector yang memiliki nilai PDRB tertinggi dari seluruh sektor pembentuk PDRB Kota Dumai. Pada suatu daerah, jika suatu sektor lapangan usaha yg memiliki kontribusi yg sangat dominan pada struktur ekonomi namun pertumbuhannya tidak setinggi tahun sebelumnya maka berpotensi besar menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tidak setinggi tahun sebelumnya.

2) Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, produktivitas wilayah dan struktur ekonomi wilayah baik struktur perekonomian regional maupun struktur perekonomian sektoral,

Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja perekonomian wilayah dan tujuan pembangunan wilayah, Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertambahan PDRB ADHK dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga, Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi tahun bersangkutan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, Adapun manfaat analisis pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Mengetahui kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu;
2. Menyusun tipologi perkembangan wilayah (tipologi klassen);
3. Dasar penyusunan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan sektoral atau regional;
4. Mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi;
5. Dasar untuk perumusan kebutuhan investasi;
6. Dasar pembuatan prakiraan bisnis dan target perekonomian wilayah.

Tabel 2.22
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral Kota Dumai Tahun 2019-2024

No	Kategori	Tahun						Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2.01	4.15	3.97	0.14	1.88	1.99	2.36
B	Pertambangan & penggalian	2.31	-1.32	0.65	2.06	5.05	4.36	2.19
C	Industri pengolahan	7.18	3.01	6.56	7.72	5.87	3.95	5.72
D	Pengadaan listrik dan gas,	7.29	138.3	26.75	42.88	0.48	5	36.78
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6.18	4.05	7.79	8.13	14.77	12.94	8.98
F	Bangunan	4.15	-3.02	0.05	4.91	10.15	8.02	4.04
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	2.87	-10.3	9.02	3.33	6.44	7.52	3.15
H	Transportasi dan pergudangan	5.35	-34.64	0.42	9.14	5.97	3.2	-1.76
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3.72	-19.49	19.1	4.57	5.43	14.46	4.63
J	Informasi dan komunikasi	7.21	9.24	4.13	2.83	4.65	8.53	6.10
K	Jasa keuangan dan asuransi	0.11	3.44	4.47	5.03	3.24	2.19	3.08
L	Real estate	5.29	1.63	2.6	5.35	4.08	5.07	4.00
M, N	Jasa perusahaan	7.2	-21.64	0.95	1.35	6.78	7.42	0.34
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	2.32	-2.16	2.15	9.04	4.45	9.79	4.27
P	Jasa pendidikan	5.62	1.41	2.56	2.18	4.92	4.92	3.60
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	10.83	14.62	10.33	4.39	7.15	7.07	9.07
R, S, T, U	Jasa lainnya	8.79	-20.03	5.84	13.12	4.96	7.04	3.29
Pertumbuhan ekonomi		**5.6**	**1.04**	**5.98**	**6.36**	**6.36**	**5.02**	**5.06**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

3) PDRB Perkapita

Pengembangan ekonomi wilayah merupakan sebuah runtutan perubahan perekonomian suatu wilayah yang menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat suatu wilayah dalam jangka panjang (arsyad, 1992 dalam muta'ali, 2015). Oleh sebab itu proses pembangunan wilayah disebut juga dengan proses pengembangan ekonomi wilayah karena output sebuah pembangunan wilayah secara umum adalah tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut.

Pendapatan perkapita didefiniskan sebagai pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap penduduk suatu wilayah yang dihasilkan dari membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk.

$$\textbf{PDRB perkapita}_{(ADHB)} = \frac{PDRB}{\sum Penduduk}$$

$$= \frac{52.670.000.000.000}{349.389}$$

= Rp. 150.748.878,76/Kapita

$$\textbf{PDRB perkapita}_{(ADHK)} = \frac{PDRB}{\sum Penduduk}$$

$$= \frac{30.877.160.000,000}{349.389}$$

= Rp. 88.374.734,18/Kapita

Secara umum, semakin tinggi nilai PDRB perkapita maka perekonomian wilayah tersebut akan semakin baik. Berdasarkan rumus perhitungan diatas, ternyata tingkat perekonomian suatu wilayah tidak hanya tergantung pada PDRB semata namun juga ditentukan oleh jumlah penduduk, dimana semakin banyak jumlah penduduk maka PDRB perkapita akan semakin rendah (muta'ali, 2015). Lebih jauh dijelaskan, PDRB/kapita tidak menggambarkan kondisi pendapatan masyarakat dan distribusi pendapatan secara riil.

Untuk mengukur peran perekonomian Kota Dumai tahun 2023 terhadap perekonomian Provinsi Riau, maka dapat dihitung melalui kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap PDRB Provinsi Riau dengan melihat distribusi peran ekonomi Kota Dumai dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\textbf{Share PDRB Kota Dumai} = \frac{PDRB\ Kota\ Dumai}{PDRB\ Provinsi\ Riau} x\ 100$$

$$= \frac{52.668.100.000.000}{1.112.481.620.000.000} x\ 100$$

= 4,73%

Dari Perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi Kota Dumai terhadap perkembangan PDRB Provinsi Riau sangat kecil, hanya 4,73%. Semakin besar persentase nilai PDRB suatu Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi, maka semakin besar peran Kabupaten/Kota tersebut dalam pembangunan ekonomi suatu Provinsi (muta'ali, 2015).

Salah satu metode untuk yang digunakan untuk menganalisis potensi perkembangan perekonomian wilayah dapat dilihat dari klasifikasi/tipologi perkembangan ekonomi wilayah. Adapun salah satu analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan alisis tipologi Klassen. Tipologi

klassen merupakan salah satu metode analisis untuk menentukan sejauh mana perkembangan perekonomian suatu wilayah melihat data pendapatan perkapia dan pertumbuhan ekonomi yang kemudian dikelompokkan menjadi klasifikasi wilayah (muta'ali, 2015). Lebih jauh muta'ali (2015) menjelaskan bahwa pengelompokan wilayah dengan tipologi klassen bisa dijadikan salah satu pedoman untuk merencanakan arah kebijakan pembangunan wilayah/daerah yang sesuai dengan karakter, potensi dan permasalahan wilayah.

Adapun kriteria tipologi klassen tersebut dapat dilihat pada tabel dbawah ini (sjafrizal, 1997, dalam muta'ali, 2015) :

Matrik Tipologi klassen perkembagan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi (r)	**PDRB perkapita (Y)**	
	Yi>Y	**Yi<Y**
ri>r	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah berkembang cepat
ri<r	Wilayah maju tapi tertekan	Wilayah relatif tertinggal

ri = Pertumbuhan ekonomi/PDRB Kabupaten/Kota

r = Pertumbuhan ekonomi/PDRB Provinsi

Yi = PDRB perkapita Kabupaten/Kota

Y = PDRB perkapita Provinsi

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS Provinsi Riau dan BPS Kota Dumai pada tahun 2023, maka dapat dilihat bahwa :

Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai Tahun 2024 = 5,02%

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau Tahun 2024 = 3,52%

PDRB perkapita Kota dumai Tahun 2024 = 150.748.878/Kapita

PDRB perkapitan Provinsi Riau Tahun 2024 = 165.350.000/Kapita

Dari data yang dipublikasikan oleh BPS dan dengan melihat tabel tipologi klassen diatas, maka kota Dumai pada tahun 2024 termasuk daerah dengan kriteria **berkembang cepat**. Incremental capital output ratio (ICOR) adalah suatu cara untuk melihat hubungan antara pembentukan modal tetap pada PDRB dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (muta'ali, 2015). Menurut harrod damar dalam muta'ali (2015), menerangkan bahwa terdapat hubungan antara nilai investasi yang ditanamkan dengan nilai output yang dihasilkan (pertumbuhan ekonomi) dengan kata lain perhitungan ICOR diperlukan untuk mengetahui besarnya kebutuhan investasi untuk menghasilkan suatu tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut susanti,dkk (2007) dalam muta'ali (2015) terdapat beberapa aspek pada ICOR sebagai berikut:

1. Besar kecilnya ICOR berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi
2. ICOR berbanding lurus dengan Pendapatan Perkapita
3. Nilai penggunaan investasi tiap sektor berbeda-beda

Adapun rumus perhitungan ICOR adalah sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\frac{I}{PDRB} x 100\%}{\Delta PDRB\ (\%)}$$

I/PDRB x 100% = Persentase investasi PDRB (%)

Δ PDRB = Laju pertumbuhan ekonomi (%)

Untuk memperoleh data persentase investasi PDRB dapat digunakan data PDRB atas dasar harga konstan menurut pengeluaran. Adapun data PDRB atas dasar harga konstan menurut pengeluaran secara resmi belum dipublikasikan oleh BPS Kota Dumai, namun data tersebut dapat diperkirakan dengan melihat persentase distribusi PDRB kota Dumai terhadap pembentukan PDRB Provinsi Riau menurut pengeluaran. Adapun hasil perkiraan perhitungan PDRB menurut pengeluaran kota Dumai Tahun 2019-2024.

Tabel 2.23
Perhitungan ICOR dan perkiraan kebutuhan investasi

Variabel	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	41,52%	41,37%	39,93%	40,12%	40,72%	39,39%
Perubahan Stok (%)	1,61%	2,54%	0,57%	0,38%	0,25%	0,25%
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60%	-1,04%	5,98%	6,36%	6,05%	5,02%
PDRB ADHK (Milyar Rp.)	24.856,900	24.598,000	26.068,290	27.725,870	29.402,610	30.877,160
ICOR	7,7	-42,16	6,77	6,37	6,73	7,90

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025, data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa persentase investasi terhadap PDRB tahun 2024 (pembentukan modal tetap bruto) adalah sebesar 39,39% dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 adalah sebesar 5,02%, maka ICOR Kota Dumai adalah:

$$ICOR = \frac{(39{,}39\% + 0{,}25)}{5{,}02\%} = 7{,}90$$

Sedangkan perhitungan nilai investasi sebagai berikut :

Investasi = ***ICOR x Pertumbuhan Ekonomi x PDRB ADHK***
= ***7,90 x 5,02% x Rp. 30.877.160.000.000***
= ***Rp. 12.245.260.000.000***

Dengan ICOR 7,90 berarti bahwa untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% dibutuhkan investasi sebesar Rp. 12.245.260 Juta. Pada umumnya nilai ICOR yang dianggap memiliki produktivitas investasi yang baik terhadap pertumbuhan berkisar antara 3-4, oleh sebab itu semakin tinggi nilai ICOR maka semakin tidak efisien penggunaan investasi disuatu wilayah. Sebaliknya ICOR yang rendah, menunjukkan semakin efisien penggunaan modal. Faktor yang mempengaruhi ICOR antara lain : sarana infrastruktur yang kurang memadai, ongkos produksi, tingginya biaya logistik, dan lain-lain.

Didalam analisa perkembangan ekonomi wilayah, terdapat 2 sektor pembangunan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Kedua sektor tersebut disebut sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah sektor yang mampu mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan, Sedangkan sektor-sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan, Sektor-sektor tidak mengekspor barang-barang, Ruang lingkup mereka dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal,

Menurut Glasson (1977) dalam Muta'ali (2015) dijelaskan bahwa semakin banyak sektor basis pada suatu daerah maka semakin banyak arus pendapatan yang masuk ke wilayah tersebut serta akan memicu naiknya permintaan barang dan jasa didalam wilayah tersebut, Sektor basis meiliki hubungan langsung dengan permintaan dari luar wilayah sedangkan sektor non basis tidak, Untuk mengetahui apakah suatu sektor tersebut termasuk kedalam sektor basis atau non digunakan analisa Location Quotient (LQ), Analisa ini didasarkan pada teori basis ekonomi, Analisa ini digunakan untuk menentukan sektor apa saja yang masuk sektor basis yang dapat mengekspor (ke luar daerah) dalam batas-batas perekonomian wilayah yang merupakan indikator untuk menunjukkan peranan suatu sektor dalam suatu daerah (Kabupaten/Kota) dibandingkan dengan peranan sektor yang sama didaerah acuan yang lebih luas (Provinsi), Secara matematis, analisa LQ dhitung dengan membandingkan peranan relatif sektor suatu wilayah terhadap nilai tambah total wilayah (PDRB) dengan peranan relatif sektor yang sama pada wilayah yang lebih luas (Provinsi atau Nasional), Adapun persamaan untuk menghitung LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ_{ij} = \frac{Xij/Xi}{RVj/RV}$$

Dimana,

LQ_{ij} = Indeks LQ sektor i di Kabupaten/Kota

X_{ij} = PDRB sektor i di Kabupaten/Kota

Xi = PDRB sektor i di Provinsi

RV_j = PDRB Kabupaten/Kota

RV = Total PDRB Provinsi

Tabel 2.24
Penafsiran Nilai LQ

Nilai LQ	Penafsiran		
	Sektor Basis/Unggulan/Potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar
LQ > 1	Sektor basis dan unggulan	Sektor terspesialisasi	Eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
LQ < 1	Sektor non basis dan non	Sektor tidak	Non eksport, belummampu melayani

Nilai LQ	Penafsiran		
	Sektor Basis/Unggulan/Potensial	**Tingkat Spesialisasi**	**Pelayanan Pasar**
	unggulan, tidak potensial	terspesialisasi	pasardalam dan luar daerah
LQ = 1	Sektor seimbang dengan wilayah acuan	Spesialisasi sama denganwilayah acuan	Non eksport, hanyamampu melayani pasardi dalam =wilayah

(Sumber : Muta'ali, 2015)

Berdasarkan persamaan untuk menghitung LQ, maka didapatkan hasil LQ Kota Dumai setiap sektor pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.25
Hasil Perhitungan LQ Kota Dumai Tahun 2024 Berdasarkan PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan Tahun 2010

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Xij) JutaRp	PDRB Provinsi Riau (Xi) Juta Rp	Xij / RVj	Xi/RV	LQ	Penafsiran		
							Sektor Basis/Unggulan/ Potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,406,220.00	152,698,390.00	0.04554	0.26731	0.17	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
2	Pertambangan dan Penggalian	87,240.00	81,020,060.00	0.00283	0.14183	0.02	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
3	Industri Pengolahan	18,974,950.00	182,856,220.00	0.61453	0.32011	1.92	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
4	Pengadaan Listrik dan Gas	87,140.00	478,450.00	0.00282	0.00084	3.37	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,210.00	80,340.00	0.00020	0.00014	1.43	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
6	Konstruksi	2,977,320.00	51,937,540.00	0.09642	0.09092	1.06	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,809,190.00	59,002,870.00	0.15575	0.10329	1.51	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
8	Transportasi dan Pergudangan	557,930.00	4,581,540.00	0.01807	0.00802	2.25	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	218,800.00	2,766,170.00	0.00709	0.00484	1.46	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
10	Informasi dan Komunikasi	409,430.00	7,057,790.00	0.01326	0.01236	1.07	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	324,200.00	5,563,130.00	0.01050	0.00974	1.08	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
12	Real Estate	130,530.00	5,511,750.00	0.00423	0.00965	0.44	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Xij) JutaRp	PDRB Provinsi Riau (Xi) Juta Rp	Xij / RVj	Xi/RV	LQ	Penafsiran		
							Sektor Basis/Unggulan/ Potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar
13	Jasa Perusahaan	1,240.00	29,880.00	0.00004	0.00005	0.77	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	552,960.00	10,238,710.00	0.01791	0.01792	1.00	Sektor seimbang dengan wilayah acuan	Spesialisasi sama denganwilayah acuan	Non eksport, hanyamampu melayani pasardi dalam =wilayah
15	Jasa Pendidikan	125,500.00	3,008,750.00	0.00406	0.00527	0.77	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	60,910.00	1,541,730.00	0.00197	0.00270	0.73	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
17	Jasa lainnya	147,400.00	2,860,250.00	0.00477	0.00501	0.95	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
PDRB		**30,877,160.00** (RVj)	**571,233,590.00** (RV)						

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025, data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa sektor yang menjadi sektor basis (nilai LQ>1) di Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sektor industri pengolahan
2. Sektor Pengadaan listrik dan gas
3. Sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang
4. Sektor konstruksi
5. Sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
6. Sektor transportasi dan pergudangan
7. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
8. Sektor Informasi dan komunikasi
9. Sektor jasa keuangan dan Asuransi

Sedangkan sektor non basis (LQ<1) di Kota Dumai pada tahun 2024 adalah :

1. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
2. Sektor pertambangan dan penggalian
3. Sektor real estate
4. Sektor jasa perusahaan
5. Sektor pendidikan
6. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial
7. Sektor jasa lainnya

Selanjutnya sektor seimbang dengan wilayah acuan (LQ=1) di Kota Dumai tahun 2024 adalah :

1. Sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa semakin besar nilai LQ setiap sektor maka semakin tinggi peluang suatu daerah untuk mengembangkan sektor-sektor yang menjadi sektor basis sehingga peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah dan peluang kerja akan semakin terbuka.

Untuk menyempurnakan analisa sektor basis ini, maka untuk mengetahui sektor basis dengan memlihat laju pertumbuhan masing-masing sektor dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri-sendiri selama kurun waktu tertentu (muta'ali, 2015) maka digunakan analisa Dynamic Location Quotient (DLQ). Adapun persamaan analisa Dynamic location Quotient adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{DLQ_{ij}} = \frac{(1+gij)/(1+gj)}{(1+Gi)/(1+G)}$$

Dimana,

DLQ_{ij} = Indeks Dynamic Location Quotient

g_{ij} = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di Kabupaten/Kota

g_j = Rata-rata laju pertumbuhan di Kabupaten/Kota

G_i = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di Provinsi

G = Rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi

Adapun penjelasan terkait nilai DLQ dapat dilihat pada tabel berikut:

Nilai LQ	PENAFSIRAN
DLQ > 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi Sektor i prospektif dan masih diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
LQ < 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi, Sektor i tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
LQ = 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota sebanding dengan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi

(Sumber : muta'ali, 2015, data diolah)

Adapun hasil perhitungan dari persamaan DLQ diatas, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.26
Hasil Perhitungan DLQ Kota Dumai Berdasarkan PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2024

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	(1+gij) /(1+gj)	(1+Gi) / (1+G)	DLQ	Penafsiran
		2023	2024	2023	2024						
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,378,765.08	1,406,220.00	149,361,110.00	152,698,390.00	1.99	2.23	0.50	0.72	0.69	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
2	Pertambangan dan Penggalian	83,595.62	87,240.00	80,730,220.00	81,020,060.00	4.36	0.36	0.89	0.30	2.96	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
3	Industri Pengolahan	18,253,329.59	18,974,950.00	176,290,050.00	182,856,220.00	3.95	3.72	0.82	1.05	0.79	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
4	Pengadaan Listrik dan Gas	82,991.31	87,140.00	447,200.00	478,450.00	5.00	6.99	1.00	1.77	0.56	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,494.51	6,210.00	77,470.00	80,340.00	13.02	3.70	2.33	1.04	2.24	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
6	Konstruksi	2,756,162.91	2,977,320.00	48,756,790.00	51,937,540.00	8.02	6.52	1.50	1.67	0.90	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,472,739.04	4,809,190.00	55,636,270.00	59,002,870.00	7.52	6.05	1.42	1.56	0.91	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	(1+gij) /(1+gj)	(1+Gi) / (1+G)	DLQ	Penafsiran
		2023	2024	2023	2024						
8	Transportasi dan Pergudangan	540,637.24	557,930.00	4,300,020.00	4,581,540.00	3.20	6.55	0.70	1.67	0.42	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	191,156.71	218,800.00	2,498,890.00	2,766,170.00	14.46	10.70	2.57	2.59	0.99	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
10	Informasi dan Komunikasi	377,263.01	409,430.00	6,561,680.00	7,057,790.00	8.53	7.56	1.58	1.90	0.84	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	317,259.29	324,200.00	5,491,870.00	5,563,130.00	2.19	1.30	0.53	0.51	1.04	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
12	Real Estate	124,232.65	130,530.00	5,307,410.00	5,511,750.00	5.07	3.85	1.01	1.07	0.94	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
13	Jasa Perusahaan	1,152.04	1,240.00	27,580.00	29,880.00	7.64	8.34	1.44	2.07	0.69	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	503,634.02	552,960.00	9,354,720.00	10,238,710.00	9.79	9.45	1.79	2.31	0.78	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
15	Jasa Pendidikan	119,608.27	125,500.00	2,881,480.00	3,008,750.00	4.93	4.42	0.99	1.20	0.82	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	(1+gij) /(1+gj)	(1+Gi) / (1+G)	DLQ	Penafsiran
		2023	2024	2023	2024						
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	56,886.89	60,910.00	1,445,970.00	1,541,730.00	7.07	6.62	1.34	1.69	0.80	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
17	Jasa lainnya	137,697.01	147,400.00	2,659,740.00	2,860,250.00	7.05	7.54	1.34	1.89	0.71	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
PDRB		**29,402,605.17**	**30,877,160.00**	**551,828,490.00**	**571,233,590.00**	**5.02**	**3.52**				
						(gj)	**(G)**				

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025, data diolah)

Berdasarkan tabel hasil perhitungan DLQ tahun 2024 maka dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan seluruh sektor PDRB di Kota Dumai pada tahun 2024 ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat dari Provinsi,

Jika analisa LQ digabungkan dengan analisa DLQ, maka dapat di kelompokkan sektor-sektor tersebut kedalam tipologi sektor.

Tipologi Sektor berdasarkan nilai LQ dan DLQ

	DLQ > 1	**DLQ < 1**
LQ > 1	Tipe I	Tipe III
	Sektor Basis, Prospektif	Sektor Basis, Tidak Prospektif
LQ < 1	Tipe II	Tipe IV
	Sektor Non Basis, Prospektif	Sektor Non Basis, Tidak Prospektif

(Sumber : muta'ali, 2015)

Adapun hasil analisa gabung LQ dan DLQ sektor PDRB tahun 2024 dan penafsirannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.27
Hasil Analisa Gabungan LQ dan DLQ sektor PDRB Kota Dumai Tahun 2024

NO	**LAPANGAN USAHA**	**2024**		
		LQ	**DLQ**	**PENAFSIRAN**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.17	0.69	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
2	Pertambangan dan Penggalian	0.02	2.96	Sektor Non-Basis, Prospektif
3	Industri Pengolahan	1.92	0.79	Sektor Basis, Tidak Prospektif
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.37	0.56	Sektor Basis, Tidak Prospektif
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.43	2.24	Sektor Basis, Prospektif
6	Konstruksi	1.06	0.90	Sektor Basis, Tidak Prospektif
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.51	0.91	Sektor Basis, Tidak Prospektif
8	Transportasi dan Pergudangan	2.25	0.42	Sektor Basis, Tidak Prospektif
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.46	0.99	Sektor Basis, Tidak Prospektif
10	Informasi dan Komunikasi	1.07	0.84	Sektor Basis, Tidak Prospektif
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.08	1.04	Sektor Basis, Prospektif
12	Real Estate	0.44	0.94	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
13	Jasa Perusahaan	0.77	0.69	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1.00	0.78	Sektor Seimbang, Tidak Prospektif
15	Jasa Pendidikan	0.77	0.82	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.73	0.80	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
17	Jasa lainnya	0.95	0.71	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025, data diolah)

4) Laju Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan indikator ekonomi makro yang mengindikasikan baik buruknya perekonomian suatu

daerah. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Terjadinya deflasi juga tidak selalu menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik jika angka inflasi suatu daerah stabil dan relatif rendah.

Perkembangan inflasi mikro menurut bulanan Kota Dumai tahun 2019-2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dimana pada tahun 2019 inflansi tertinggi pada bulan Mei sebesar 1,05 % dan deflasi tertinggi pada bulan September sebesar 0,79 % kemudian pada tahun 2024 inflansi tertinggi pada bulan Maret sebesar 0,90% dan deflasi tertinggi pada bulan Juli sebesar 0,65%. Tabel berikut menunjukkan perbandingan Perkembangan inflasi bulanan dan inflasi tahunan (Y on Y) Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2019-2024.

Tabel 2.28
Perkembangan Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y)Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Bulan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	-0,04	0,54	0,40	0,68	0,84	0,26
Februari	-0,32	0,21	-0,38	-0,38	-0,06	0,46
Maret	0,07	-0,05	-0,04	0,66	-0,02	0,90
April	0,35	-0,19	0,24	0,74	-0,16	-0,13
Mei	1,05	0,95	0,65	1,51	0,27	0,70
Juni	0,8	0,11	0,02	1,56	0,29	-0.04
Juli	0,41	-0,26	0,22	0,57	0,72	-0,65
Agustus	-0,25	-0,05	-0,26	-1,05	-0,11	-0,08
September	-0,79	-0,02	0,10	1,57	0,52	-0,23
Oktober	0,05	0,44	0,46	-0,59	-0,30	0,05
November	-0,12	0,37	0,36	0,17	0,80	0,45
Desember	0,07	0,8	-0,13	0,88	-0,03	0,66

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

Inflasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara mikro. Sementara itu perkembangan inflasi sektoral tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan mencapai 5,83% per tahun. Selanjutnya, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menempati urutan kedua yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,80% per tahun. Sedangkan rata-rata inflasi terendah selama tahun 2019-2024 adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib hanya sebesar 0,90% per tahun.

Secara teori, inflasi akan mengalami peningkatan jika meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta, harga bahan bakar naik, upah buruh naik dan bertambahnya uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap,

sedangkan uang yang beredar meningkat dua kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Namun berdasarkan data tabel di bawah ini rata-rata inflasi tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa inflasi sektoral, dimana semua sektor masuk dalam kategori inflasi ringan atau dibawah 10% dengan rata-rata sebesar 3,44% per tahun.

Tabel 2.29
Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai Tahun 2019-2024

No	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata/ Tahun
A	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	0,56	3,77	6,55	6,34	4,70	6,87	4.80
B	Pertambangan dan Penggalian	4,37	2,43	1,99	2,67	3,50	0,58	2.59
C	Industri Pengolahan	4,34	1,29	4,71	6,39	1,89	1,94	3.43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,36	-2,6	-0,5	5,80	5,63	0,50	2.37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,84	1,25	-0,04	1,08	3,73	3,04	1.98
F	Konstruksi	2,67	0,38	1,32	7,61	7,38	0,50	3.31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,99	2,20	2,46	4,62	1,32	3,24	2.80
H	Transportasi dan Pergudangan	2,89	5,30	3,83	7,63	6,27	9,07	5.83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,39	1,24	1,60	1,88	1,92	3,42	1.91
J	Informasi dan Komunikasi	2,63	0,04	0,41	1,85	1,03	0,34	1.05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,7	-0,39	5,09	9,64	1,95	1,06	3.17
L	Real Estate	0,38	-0,19	0,03	2,60	2,67	1,96	1.24
M,N	Jasa Perusahaan	3,49	1,78	-0,49	3,88	3,80	-0,65	1.97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,01	2,64	0,40	1,05	0,81	-0,50	0.90
P	Jasa Pendidikan	3,56	3,18	1,16	1,38	1,59	1,36	2.04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,57	2,53	1,07	4,01	3,4	1,32	2.82
R,S, T,U	Jasa lainnya	2,85	2,89	1,02	3,02	2,23	1,80	2.30
PDRB Dengan Migas		**3,49**	**3,49**	**1,52**	**3,8**	**6,05**	**2,28**	**3,44**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025, data diolah)

Inflasi tahun 2024 masih termasuk dalam kategori inflasi rendah karena masih kurang dari 10%. Namun demikian ada beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian terutama terkait dengan sektor yang inflasinya mendekati 10% seperti sektor Transportasi dan Pergudangan. Untuk menjaga gejolak inflasi (volatile food) melalui penguatan empat pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K); Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat, dan; Memperkuat koordinasi Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui pemantauan harga sehingga empat strategi tersebut dapat dijalankan terutama sinergi meningkatkan ketersediaan pangan melalui korporatisasi dan digitalisasi sumber-sumber pengembangan dan peningkatan produksi barang dan jasa.

1) Indeks Gini

Distribusi Pendapatan adalah ukuran yang mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah terhadap penduduknya (muta'ali, 2015). Distribusi pendapatan merupakan kriteria yang menunjukkan mengenai penyebaran pembagian pendapatan/kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya dalam wilayah tertentu.

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin.

Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna) (muta'ali, 2015). Artinya, semakin mendekati angka satu (1) nilai indeks gini maka tingkat ketimpangan penduduk semakin lebar (Perfect inequality). Menurut Oshima dalam Muta'ali (2015), nilai indeks gini dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

G>0,5 ketimpangan tinggi
0,35<G<0,5 ketimpangan sedang
G<0,35 ketimpangan ringan

Adapun rumus untuk menghitung indeks gini adalah sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum (X_{i+1} - Xi)(Y_i + Y_{i+1})$$

dimana,

G = Angka Gini Coefficient
Xi= Proporsi Jumlah tangga kumulatif dalam kelas i
Yi= Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Menurut muta'ali (2015), untuk menghitung indeks gini, maka dilakukan pengelompokkan penduduk sebagai berikut:

1. 20% penduduk yang menerima pendapatan tinggi dari jumlah penduduk
2. 40% penduduk yang menerima pendapatan menengah dari jumlah penduduk
3. 40% penduduk yang menerima pendapatan terendah
4. Atau penduduk dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu 20% termiskin, 20% kedua, 20% ketiga, 20% kempat dan 20% terkaya

Adapun hasil perhitungan dari persamaan indeks gini diatas adalah sebagai berikut

Tabel 2.30
Indeks Gini di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indeks Gini	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dumai	0,361	0,36	0,345	0,324	0,310	0,328

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2025)

Dari hasil pengolahan data dari statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2019 - 2024, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/ kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 masuk kategori ketimpangan rendah sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020 masuk kategori ketimpangan sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan antar penduduk di Kota Dumai semakin merata.

2) Perkembangan Kemiskinan

Proses pencapaian cita-cita pembangunan daerah selalu tidak pernah lepas dari kondisi kemiskinan. Dalam konteks pembangunan wilayah, kemiskinan menjadi salah satu indikator utama kinerja pembangunan, Evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah tingkat provinsi terhadap kinerja pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengurangi tingkat kemiskinan daerah, mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat dan ketimpangan wilayah. Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang dihadapi oleh setiap tingkatan pemerintahan. Menurut Munir (2002), kemiskinan sangat dipengaruhi oleh multi aspek dan dimensi, sehingga pandangan terhadap kemiskinan sangat dipengaruhi oleh sudut pandang yang dicermati. Lebih jauh munir (2002) menjelaskan bahwa kemiskinan dan kesenjangan memunculkan kesenjangan sosial didalam Masyarakat.

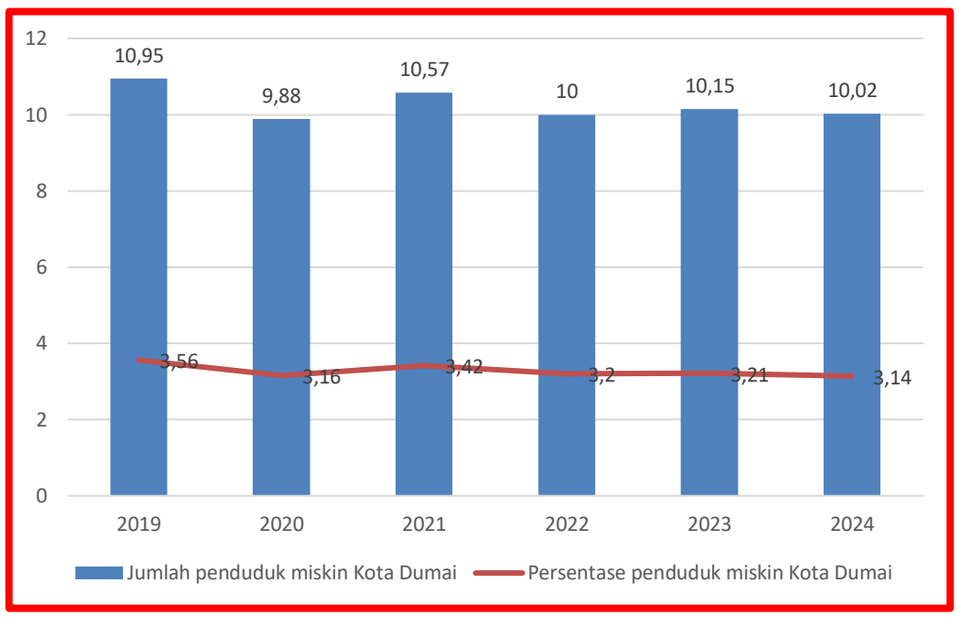
Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (poverty line) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (headcount) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statitik Kota Dumai, tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2019-2024 cenderung menurun dimana kenaikan hanya terjadi pada tahun 2021 sebagai akibat Pandemi Covid 19.

Tabel 2.31
Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	439.152	484.609	509.002	543.182	601.348	631.652
Jumlah penduduk miskin Kota Dumai	000 Jiwa	10,95	9,88	10,57	10,00	10,15	10,02
Persentase penduduk miskin Kota Dumai	(%)	3,56	3,16	3,42	3,20	3,21	3,14

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

Jika kita perhatikan tabel diatas, tingkat kemiskinan kota Dumai selama kurun waktu 2019-2024 cenderung menurun namun pada tahun 2021 tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kota Dumai naik 0,26 persen dari 3,16% menjadi 3,42% atau dari 9.880 jiwa menjadi 10.570 jiwa penduduk miskin. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0,07 persen dari 3,21% menjadi 3,14% atau dari 10.150 jiwa menjadi 10.020 jiwa penduduk miskin.



Grafik 2.5. Tingkat kemiskinan dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Sedangkan garis kemiskinan kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 631.652,00/kapita/bulan. Dapat dijelaskan bahwa garis kemiskinan digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. Menurut BPS dalam Muta'ali (2015), garis kemiskinan dihitung dari hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Adapun persamaan garis kemiskinan adalah sebagai berikut :

GK = GKM + GKNM

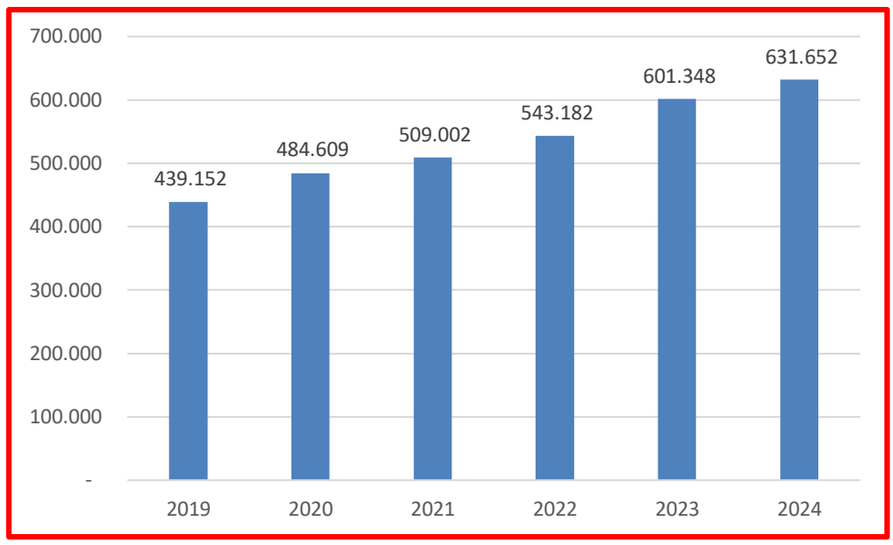
dimana,

GK = Garis kemiskinan

GKM = garis kemiskinan makanan

GKNM = garis kemiskinan non-makanan

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan dibawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh worldbank yaitu US$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk developing countries. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.



Grafik 2.6. Garis kemiskinan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Pada tabel berikut menyajikan data indeks kedalam kemiskinan/poverty gap index atau yang sering dinotasikan dengan P1. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Kemudian tabel yang sama juga menyajikan indeks keparahan kemiskinan/poverty severity index atau yang sering dinotasikan dengan P2. Indeks keparahan kemiskinan menjelaskan tentang kondisi penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskina, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2.32
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indeks	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	0,28	0,31	0,4	0,36	0,36	0,20
Indeks Keparahan Kemiskinan P2	0,05	0,05	0,07	0,27	0,06	0,03

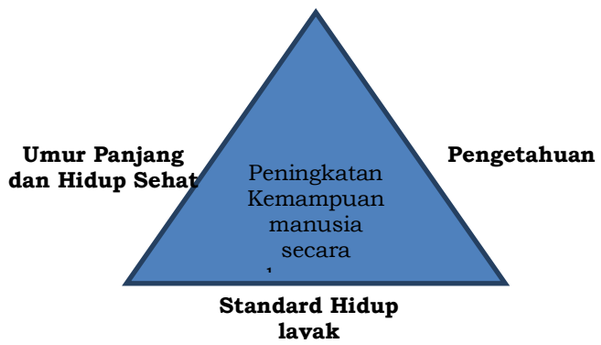
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut publikasi badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membidangi masalah program pembangunan negara-negara *(United Nation Development programme disingkat UNDP)*, dinyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan suatu proses perluasan pilihan-pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*). UNDP (2015) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan tujuan yang ingin dicapai dan proses yang harus dilalui dalam rangka meningkatkan kemampuan manusia secara langsung (*directly enhancing* human capabilities). Pembangunan manusia menyiratkan bahwa masyarakat harus mampu mempengaruhi proses-proses yang membentuk kehidupan mereka sendiri. Oleh sebab itu pembangunan manusia dapat juga didefinisikan sebagai pengembangan masyarakat melalui membangun kemampuan manusianya dengan cara

meningkatkan kehidupan mereka melalui partisipasi aktif dalam proses-proses yang membentuk kehidupan mereka. Sebagaimana yang tertuang dalam laporan UNDP tentang human development report pada tahun 2015, dalam konteks meningkatkan manusia secara langsung (*directly enhancing human capabilities)*, terdapat tiga (3) dimensi dasar yang mendukung proses peningkatan tersebut yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat; dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Ketiga dimensi ini akan membentuk sebuah indeks komposit yang disebut indeks pembangunan manusia (IPM).



Gambar 2.5. Dimensi Peningkatan Kemampuan manusia secara langsung dalam Pembangunan Manusia

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli *(purcashing power parity*) berbasis formula Rao.

Menurut UNDP, nilai minimum Pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli adalah 1.007.436 rupiah dan maksimum adalah 26.572.352 rupiah. Pengeluaran perkapita masyarakat kota Dumai pada tahun 2024 adalah Rp. 12.847.000,00. Tabel berikut menggambarkan perbandingan pengeluaran perkapita yang disesuaikan tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2019-2024.

Tabel 2.33
Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten/kota di Provinsi Riau
Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kuantan Singingi	10,820	10,243	10,309	10,647	10,945	11,182
Indragiri Hulu	10,738	10,202	10,260	10,472	10,957	11,333
Indragiri Hilir	10,382	9,954	9,945	10,234	10,659	11,050
Pelalawan	12,149	11,606	11,672	12,163	12,399	12,575
Siak	12,347	11,799	11,807	12,230	12,637	13,080
Kampar	11,232	10,796	10,858	11,394	11,662	12,034
Rokan Hulu	9,979	9,374	9,406	9,841	10,055	10,586
Bengkalis	11,753	11,331	11,415	11,857	12,153	12,321
Rokan Hilir	9,672	9,362	9,417	9,906	10,097	10,447
Kepulauan Meranti	8,358	7,790	7,780	8,246	8,613	8,988

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pekanbaru	15,206	14,433	14,360	14,804	14,983	15,212
Dumai	12,453	11,751	11,818	12,249	12,457	12,847
RIAU	**11,255**	**10,675**	**10,736**	**11,158**	**11,448**	**11,857**

(Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025 Pengeluaran Perkapita di Sesuaikan)

Pada tabel diatas terlihat bahwa pengeluaran perkapita yang disesuaikan masyarakat kota Dumai berada diatas rata-rata provinsi Riau, namun dibawah Kota Pekanbaru.

Pengeluaran perkapita yang disesuaikan merupakan salah satu Indikator yang dapat digunakan Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Indikator ini menggambarkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Semakin rendah nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang mengakibatkan semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa dan sebaliknya.

Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembagunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM dihitung melalui perhitungan rata geometrik terhadap Indeks Pendidikan, Indeks kesehatan dan Indeks Pengeluaran. Badan Pusat Statistik mengkalsifikasikan nilai IPM kedalam kategori:

1. Kelompok “sangat tinggi”: IPM = 80
2. Kelompok “tinggi”: 70 = IPM < 80
3. Kelompok “sedang”: 60 = IPM < 70
4. Kelompok “rendah”: IPM < 60

Indeks Pendidikan dihitung dengan menggunakan indeks harapan lama sekolah (HLS) dan indeks rata-rata lama sekolah (RLS) dengan rumus:

Adapun rumus menghitung indeks Harapan lama sekolah (I HLS) adalah;

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS\ min}{HLS\ maks - HLS\ min}$$

$$I_{HLS} = \frac{13{,}35 - 0}{18 - 0}$$

$$I_{HLS} = 0{,}742$$

Adapun rumus menghitung indeks rata-rata lama sekolah (I RLS) adalah;

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS\ min}{RLS\ maks - RLS\ min}$$

$$I_{RLS} = \frac{10{,}29 - 0}{15 - 0}$$

$$I_{RLS} = 0{,}686$$

Berdasarkan rumus diatas, maka Indeks Pendidikan dihitung dengan ;

$$I_{pendidikan} = \frac{I\,HLS + I\,RLS}{2} = = \frac{0{,}742+0{,}686}{2} = 0{,}714$$

Indeks kesehatan dihitung dengan menggunakan indeks angka harapan hidup (AHH) dengan rumus:

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH\,min}{AHH\,maks - AHH\,min} = \frac{71{,}78-20}{85-20}$$

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH\,min}{AHH\,maks - AHH\,min} = 0{,}797$$

Sedangkan untuk Indeks pengeluaran dihitung dengan rumus :

$$I_{Pengeluaran} = \frac{ln(pengeluaran) - ln\,(pengeluaran\,min)}{ln(pengeluaran\,maks) - ln\,(pengeluaran\,min)}$$

$$I_{Pengeluaran} = \frac{ln(12.847.000) - ln\,(1.007.436)}{ln(26.572.352) - ln\,(1.007.436)} = 0{,}7779$$

Dari seluruh perhitungan diatas, maka Indeks Pembangunan manusia (IPM) dapat dihitung dengan menggunakan Rumus :

$$\sqrt[3]{I\,Pendidikan\,x\,I\,Kesehatan\,x\,I\,Pengeluaran}\ \text{x}\ 100$$

$$\sqrt[3]{0{,}714x\ 0{,}797\ x0{,}7779\ x\ 100} = \mathbf{77{,}03}$$

Maka IPM Kota Dumai tahun 2024 = 77,03, berdasarkan klasifikasi IPM yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik, maka IPM Kota Dumai termasuk klasifikasi **tinggi**.

2) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang dapat bisa membaca dan menulis. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data BPS Kota Dumai, angka melek huruf dari tahun 2019-2024 menunjukkan tren yang sangat baik dengan pertumbuhan sebesar 0,11% per tahun atau naik 99,16% pada tahun 2019 menjadi 99,69% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai. Namun demikian masih terdapat penduduk yang masih buta huruf sebesar 0,31%pada tahun 2024 dengan kencenderungan penurunan dari 1.816 jiwa pada tahun 2019 turun menjadi 790 jiwa pada tahun 2024. Kondisi ini memerlukan perhatian terutama perlunya Pendidikan non formal untuk mengentaskan jumlah penduduk buta huruf tersebut. Perkembangan jumlah penduduk melek huruf dan buta huruf dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Perkembangan Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Melek Huruf
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Penduduk Melek Huruf	Satuan	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Penduduk	Jiwa	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	349.389	2,50
Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	Jiwa	216.196	224.722	230.523	237.517	236.714	254.797	3,34

Penduduk Melek Huruf	Satuan	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	%	70,01	69,26	71,27	71,58	71,97	73,14	0,82
Persentase Melek Huruf	%	99,16	99,51	99,3	99,32	99,16	99,69	0,11
Jumlah Penduduk Melek Huruf	Jiwa	214.380	223.621	228.909	235.902	234.726	254.007	3,45
Persentase Buta Huruf	%	0,84	0,49	0,7	0,68	0,84	0,31	-18,07
Jumlah Penduduk Buta Huruf	Jiwa	1.816	1.101	1.614	1.615	1.988	790	-15,34

(Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Dumai, 2025)

Untuk mengukur dimensi pengetahuan terdapat dua (2) indikator yang digunakan oleh UNDP yaitu harapan lama sekolah (*expected yeas of schooling)* dan rata-rata lama sekolah *(mean years of schooling)*. Harapan lama sekolah adalah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan definisi rata-rata lama sekolah adalah sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

3) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Menurut UNDP, Harapan lama sekolah masyarakat kota Dumai pada tahun 2024 adalah 13,35 tahun. Tabel berikut menggambarkan perbandingan harapan lama sekolah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2019-2024.

Tabel 2.35
Harapan lama sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014-2024

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (SP2010)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kuantan Singingi	13,32	13,33	13,34	13,36	13,37	13,38
Indragiri Hulu	12,35	12,36	12,46	12,58	12,59	12,60
Indragiri Hilir	11,90	11,91	11,93	12,19	12,20	12,21
Pelalawan	12,17	12,24	12,41	12,68	12,90	12,91
Siak	12,75	12,76	12,81	12,85	12,86	12,89
Kampar	13,45	13,46	13,55	13,59	13,60	13,61
Rokan Hulu	12,83	12,84	12,85	12,86	12,88	12,94
Bengkalis	12,86	12,87	12,88	13,16	13,34	13,44
Rokan Hilir	12,67	12,68	12,76	12,83	12,88	12,89
Kepulauan Meranti	12,81	12,82	12,83	12,84	12,86	12,87
Pekanbaru	15,37	15,54	15,55	15,56	15,58	15,84
Dumai	13,10	13,12	13,31	13,32	13,33	13,35
RIAU	**13,14**	**13,20**	**13,28**	**13,29**	**13,30**	**13,42**

(Sumber: BPS Provinsi Riau, Berita Resmi Statistik, IPM Provinsi Riau Tahun 2025)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa harapan lama sekolah masyarakat kota Dumai berada diatas rata-rata harapan lama sekolah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Meranti, namun dibawah Kabupaten Kuantan sengingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru.

Angka harapan lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

4) Rata-rata lama sekolah

Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun.

Menurut UNDP, rata-rata lama sekolah minimum adalah 0 tahun dan maksimum adalah 15 tahun. Rata-rata lama sekolah masyarakat kota Dumai pada tahun 2024 adalah 10,29 tahun. Tabel berikut menggambarkan perbandingan harapan lama sekolah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2019-2024.

Tabel 2.36
Rata-rata lama sekolah Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	Rata Rata Lama Sekolah (SP2010)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kuantan Singingi	8,58	8,59	8,75	8,76	8,90	9,14
Indragiri Hulu	8,17	8,38	8,39	8,40	8,42	8,43
Indragiri Hilir	7,22	7,23	7,24	7,26	7,31	7,32
Pelalawan	8,49	8,50	8,70	8,72	8,73	8,96
Siak	9,65	9,66	9,86	9,87	9,88	9,92
Kampar	9,25	9,26	9,27	9,39	9,40	9,58
Rokan Hulu	8,38	8,39	8,54	8,55	8,81	8,94
Bengkalis	9,41	9,69	9,70	9,71	9,73	9,74
Rokan Hilir	8,24	8,25	8,26	8,28	8,52	8,53
Kepulauan Meranti	7,51	7,70	7,84	7,88	7,99	8,12
Pekanbaru	11,43	11,68	11,92	11,93	11,94	11,96
Dumai	9,85	10,07	10,14	10,15	10,16	10,29
RIAU	**9,03**	**9,14**	**9,19**	**9,22**	**9,32**	**9,43**

(Sumber: BPS Provinsi Riau, Berita Resmi Statistik, IPM Provinsi Riau Tahun 2025)

Pada tabel terlihat bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat kota Dumai berada diatas rata-rata harapan lama sekolah provinsi Riau, namun dibawah Kota Pekanbaru.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Jika data

rata-rata lama sekolah ini diderivasi maka data ini juga bisa memberikan informasi tentang, partsipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijasah tertinggi yang dimiliki dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

5) Usia Harapan Hidup

Untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat seperti yang telah dijelaskan diatas, UNDP menggunakan data usia harapan hidup saat lahir *(life expectancy at birth)*. Usia harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.

Menurut UNDP, Usia Harapan Hidup saat lahir minimum adalah 20 tahun dan maksimum adalah 85 tahun. Usia harapan hidup saat lahir masyarakat Kota Dumai pada tahun 2023 adalah 71,78 tahun. Tabel berikut menggambarkan kondisi usia harapan hidup Kota Dumai tahun 2019-2024.

Tabel 2.37
Usia Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup (SP2010)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kuantan Singingi	68,44	68,55	68,60	68,87	69,13	69,44
Indragiri Hulu	70,20	70,25	70,26	70,48	70,69	70,86
Indragiri Hilir	67,66	67,85	67,98	68,31	68,62	68,70
Pelalawan	71,03	71,16	71,24	71,53	72,00	72,13
Siak	71,03	71,11	71,13	71,37	71,64	71,75
Kampar	70,64	70,76	70,83	71,12	71,42	71,56
Rokan Hulu	69,89	70,06	70,18	70,51	70,84	70,95
Bengkalis	71,11	71,20	71,24	71,50	71,79	71,92
Rokan Hilir	70,17	70,30	70,39	70,69	70,99	71,11
Kepulauan Meranti	67,53	67,68	67,78	68,09	68,41	68,48
Pekanbaru	72,22	72,34	72,41	72,70	73,02	73,21
Dumai	70,82	70,93	70,98	71,25	71,67	71,78
RIAU	71,48	71,60	71,67	71,95	72,24	72,52

(Sumber: BPS Provinsi Riau, Berita Resmi Statistik, IPM Provinsi Riau Tahun 2025)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa usia harapan hidup saat lahir masyarakat Kota Dumai berada dibawah rata-rata usia harapan hidup saat lahir Provinsi Riau serta berada dibawah kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diintervensi dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

6) Prevalensi Stunting

Stunting merupakan salah satu isu kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian utama, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif dan produktivitas mereka di kemudian hari. Oleh karena itu, pemerintah bersama berbagai pihak terkait terus berupaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting melalui berbagai program intervensi gizi, perbaikan sanitasi, serta peningkatan edukasi masyarakat. Untuk memahami efektivitas upaya yang telah dilakukan, berikut disajikan tren prevalensi stunting Kota Dumai

Tabel 2.38
Prevalensi Stunting Kota Dumai Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting	%	11,8	n/a	23	12,8	14,9	16,9

(Sumber: Survey Kesehatan Indonesia, 2025)

Prevalensi stunting di Kota Dumai pada tahun 2019 sebesar 11,8%. Pada tahun 2020 tidak dilakukan survei status gizi sehingga pada tahun 2020 Kota Dumai untuk data prevalensi stuntingnya tidak tersedia. Pada tahun 2021 prevalensi stunting di Kota Dumai sebesar 23%, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat positif menjadi 12,8%. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya atau intervensi yang berhasil dalam menanggulangi stunting. Prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 14,9% pada tahun 2023 dan 16,9% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penanganan stunting masih ada dan ada faktor-faktor baru yang mempengaruhi, atau efektivitas intervensi sebelumnya menurun.

7) Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu.

Tabel 2.39
Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Per Kecamatan
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Kecamatan	Angka Balita Gizi Buruk											
	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Absolut	/100	Absolut	/100	Absolut	/100	Absolut	/100	Absolut	/100	Absolut	/100
Dumai Kota	-	-	-	-	2,00	0,06	-	-	-	-	2	0.10
Dumai Timur	1,00	0.01	1,00	0.01	-	-	-	-	3	0,09	3	0.08
Dumai Selatan	1,00	0.15	-	-	-	-	2,00	0,06	3	0,10	6	0.31
Dumai Barat	3,00	0.06	-	-	-	-	7,00	0,26	2	0,07	4	0.25
Bukit Kapur	1,00	0.01	2,00	0,11	3,00	0,07	2,00	0,05	2	,0,05	1	0.04

Kecamatan	Angka Balita Gizi Buruk											
	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Absolut	/100	Absolut	/100	Absolut	/100	Absolut	/100	Absolut	/100	Absolut	/100
Sungai Sembilan	1,00	0.02	-	-	1,00	0,03	10,00	0,03	3	0,10	2	0.06
Medang Kampai	-	-	-	-	-	-	2,00	0,24	-	-	3	0.27
Kota Dumai	7,00	0.02	3,00	0,01	6,00	0,03	23,00	0,12	13	0,07	21	0.1

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, Tahun 2025)

Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi buruk pada balita dapat diantisipasi. Faktor- faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain, kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

Permasalahan kesehatan gizi masyarakat yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah stunting, Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1,000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. UNICEF mendefinisikan stunting sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi badan di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis). Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Selain mengalami pertumbuhan terhambat, stunting juga seringkali dikaitkan dengan penyebab perkembangan otak yang tidak maksimal.

Kementerian kesehatan telah menyusun strategi nasional dalam menurunkan stunting. Strateginya antara lain dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak yakni untuk anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan di antaranya pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0-23 bulan. Juga intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan

pembangunan di luar sektor kesehatan, antara lain, penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan dan gizi.

8) Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Adapun beberapa data dan informasi yang butuhkan terkait dengan ketenagakerjaan adalah Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan elastisitas kesempatan kerja (EKK).

Tabel 2.40
Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja (Jiwa)	150.323	146.586	144.465	148.506	156.790	158.478
Penduduk 15+ Tahun (Jiwa)	216.983	218.283	222.553	226.891	237.323	254.797
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,47%	8,19%	6,29%	5,38%	5,15%	4,66
Bekerja (Jiwa)	140.600	134.581	135.381	140.509	148.710	151.095
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,28	67,15	64,91	65,45	66,07	65,21
Pengangguran Terbuka (Jiwa)	9.723	12.005	9.084	7.997	8.080	7.383

(Sumber: Dumai Dalam Angka, 2025)

9) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan informasi tentang penduduk yang aktif bekerja setiap hari pada suatu waktu. TPAK juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif berkerja atau mencari pekerjaan. Jika angka TPAK kecil maka kemungkinan jumlah penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun yang mengurus rumah tangga. TPAK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{TPAK} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Angkatan\ Kerja}}{\boldsymbol{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ Kerja}}\ \boldsymbol{x}\ \boldsymbol{100\%}$$

Dari rumus perhitungan diatas, maka sebagai contoh dapat dihitung TPAK Kota Dumai Tahun 2024 adalah

$$\boldsymbol{TPAK} = \frac{158.478}{254.797}\ \boldsymbol{x}\ \boldsymbol{100\%}$$

$$\boldsymbol{TPAK} = \boldsymbol{65,21\%}$$

Tabel 2.41
Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)
Kota Dumai Tahun 2019-2029

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja (Jiwa)	150.323	146.586	144.465	148.506	156.790	158.478
Penduduk 15+ Tahun (Jiwa)	216.983	218.283	222.553	226.891	237.323	254.797
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,47	8,19	6,29	5,38	5,15	4,66
Bekerja (Jiwa)	140.600	134.581	135.381	140.509	148.710	151.095
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,28	67,15	64,91	65,45	66,07	65,21
Pengangguran Terbuka (Jiwa)	9.723	12.005	9.084	7.997	8.080	7.383

(Sumber: Dumai Dalam Angka, 2025)

Dari perhitungan tersebut TPAK kota Dumai Tahun 2024 adalah 65,21%, artinya dari 100 penduduk kota Dumai usia 15 tahun keatas, sebanyak 65 orang tersedia untuk memproduksi barang/jasa pada tahun 2023. Semakin Tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat dalam memproduksi barang/jasa di suatu wilayah (muta'ali, 2015), Adapun kriteria TPAK adalah sebagai berikut:

< 50 : TPAK rendah

51-70 : TPAK sedang

>70 : TPAK tinggi

Dari kriteria TPAK diatas, maka dapat disimpulkan bahwa TPAK kota Dumai termasuk sedang. Semakin tinggi angka TPAK mengindikasikan semakin tinggi pula ketersediaan tenaga kerja (labour supply) di Kota Dumai untuk memproduksi barang/jasa dalam konteks perekonomian wilayah.

10) Jumlah Penduduk Bekerja

Jumlah penduduk bekerja adalah jumlah penduduk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha ekonomi. Jumlah angkatan kerja mengalami pertumbuhan 1,06% per tahun. Sedangkan jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan dari 140.600 orang pada tahun 2019 menjadi 151.095 orang pada tahun 2024 atau mengalami pertumbuhan 1,45% per tahun.

Berikut disajikan Tabel mengenai perkembangan jumlah dan persentase penduduk yang bekerja dari Angkatan Kerja (AK) Kota Dumai dari Tahun 2017-2023,

Tabel 2.42
Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	PersentaseJumlah Angkatan Kerja yang Bekerja							Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Penduduk	Jiwa	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	349.389	2,50
Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	216.196	224.722	230.523	226.891	230.251	239.219	2,04
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	150.323	146.586	144.465	148.506	156.790	158.478	1,06
Jumlah Bekerja	Orang	140.600	134.581	134.581	140.509	148.710	151.095	1,45
Persentase TPAK	%	69,12	67,15	64,91	65,45	66,07	65,21	-1,16

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

Untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja dari Angkatan kerja yang ada maka kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang harus dilakukan meliputi: (a) pembinaan iklim bagi perluasan lapangan kerja, peningkatan efisiensi dan produktivitas, antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelatihan produktivitas, penciptaan iklim produktivitas di masyarakat melalui peningkatan fungsi kelembagaan produktivitas; (b) pendayagunaan tenaga kerja produktif, melalui program khusus bagi kelompok angkatan kerja tertentu, seperti tenaga kerja muda terdidik, penganggur dan setengah penganggur; (c) peningkatan kualitas tenaga kerja antara lain melalui pelatihan keterampilan dengan mengupayakan adanya kemitraan pelatihan tenaga kerja antara penyelenggara dan pengguna tenaga kerja, pengembangan kelembagaan pelatihan;dan (d) pengembangan kesejahteraan tenaga kerja melalui penciptaan hubungan industrial yang serasi dan didukung oleh perbaikan syarat kerja dan perlindungan tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita bekerja. Penduduk yang bekerja adalah yang sekurang-kurangnya bekerja satu jam salam seminggu secara terus-menerus sebelum pencacahan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan.

11) Tingkat Pengganggguran Terbuka (TPT)

Menurut Muta'ali (2015), pengangguran adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (*jobless*). Pengangguran dengan kategori seperti tersebut adalah pengangguran terbuka (*open unemployment*), Sedangkan Sukirno (2016) menjelaskan bahwa pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang masuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum dapat pekerjaan.

Pengangguran adalah salah satu masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi, politik dan sosial (Sukirno,2016). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) digunakan oleh pemerintah daerah untuk

merumuskan kebijakan tentang peluang pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program pemerintah dibidang ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga sebagai alat ukur untuk menetukan keberhasilan pembangunan perekonomian selain tingkat kemiskinan.

$$TPT = \frac{Jumlah\ Pengangguran}{Jumlah\ angkatan\ Kerja}\ x\ 100\%$$

Dari rumus perhitungan diatas didapat sebagai contoh perhitungan TPT kota Dumai Tahun 2024 adalah

$$TPT = \frac{7.383}{158.478}\ x\ 100\%$$
$$TPT = 4,66\%$$

Tabel 2.43
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Uraian	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)							Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Penduduk	Jiwa	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	349.389	2,50
Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	216.196	224.722	230.523	226.891	230.251	239.219	2,04
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	150.323	146.586	144.465	148.506	156.790	158.478	1,06
Jumlah Menganggur	Orang	9.726	12.005	12.005	7.997	8.080	7.383	-5,36
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	6,47	8,19	6,29	5,38	5,15	4,66	-6,35

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

Jika dilihat data tingkat pengagguran terbuka (TPT) yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik, maka selama kurun waktu 2019-2024 TPT kota Dumai mengalami penurunan yang signifikan namun pada tahun 2020 TPT Kota Dumai mengalami kenaikan yang juga signifikan akibat dampak ekonomi dari terjadinya pandemi Covid 19. Kenaikan TPT akan berimplikasi semakin besarnya potensi kerawanan sosial di dalam kehidupan masyarakat kota Dumai seperti naiknya tingkat kriminalitas. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi tingkat pengganguran terbuka, tingkat pengangaguran terbuka kota Dumai masih masuk kategori rendah. Adapun kriteria TPT adalah sebagai berikut (muta'ali, 2015) :

>70 : tinggi
51-69 : sedang
<50 : rendah

Tingkat Pengangguran terbuka dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.

12) Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kota Dumai menunjukkan perkembangan dengan kecenderungan peningkatan selama

periode 2019-2024. Pada tahun 2019 PDRB menurut harga berlaku per tenaga kerja sebesar Rp. 36.147,15 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 52.668,10 juta pada tahun 2024 dengan pertumbuhan 7,82% per tahun. Sementara laju pertumbuhan menurut PDRB harga konstan per tenaga kerja pada tahun 2019 sebesar Rp. 24.856,90 Juta kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp. 30.877,16 juta pada tahun 2024 dengan pertumbuhan 4,43% per tahun.

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja baik menurut harga berlaku dan harga konstan tidak terlepas dari terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa selama periode 2019-2024. Artinya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan lebih tinggi dari pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan yang lebih rendah dengan pertumbuhan sebesar 1,45% per tahun, Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja di Kota Dumai, 2019-2024 lihat tabel berikut.

Tabel 2.44
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kota Dumai
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan / Tahun (%)
1	PDRB HB Kota Dumai	RP. Juta	36.147,15	36.313,73	39.946,11	45.052,81	49.034,29	52.668,10	7,82
2	PDRB HK Kota Dumai	RP. Juta	24.856,90	24.597,99	26.068,58	27.725,87	29.402,61	30.877,16	4,43
3	Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	140.600	134.581	135.381	140.509	148.710	151.095	1,45
4	Rasio PDRB HB/TK	Rp. Juta/TK	0,26	0,27	0,30	0,32	0,33	0,35	6,04
5	Rasio PDRB HK/TK	Rp. Juta/TK	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20	2,57
6	Laju Pertumbuhan PDRB HB/TK	%	-0,59	4,95	9,35	8,67	2,84	5,72	-
7	Laju Pertumbuhan PDRB HK/TK	%	-3,94	3,38	5,35	2,48	0,20	3,36	-

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025, data diolah)

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Perkembangan Seni Budaya Kota Dumai berada pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku, mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Dumai yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras serta agama sehingga menjadikan kehidupan masyarakat Dumai yang berkembang dan semakin modern. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan tatanan dengan penerapan budaya melayu yang agamis ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial dan ketertiban umum termasuk dalam

pengembangan nilai budaya dari aspek pembangunan sarana dan prasarana dengan yang mengarah pada arsitektur melayu dalam pembangunan dan pengembangan perkotaan di Kota Dumai.

Di Kota Dumai terdapat Lembaga Adat Melayu dan Paguyuban berbagai suku bangsa di Indonesia. Peranan dan keberadaan Lembaga Adat Melayu di Kota Dumai belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diperlukan penguatan dan peningkatan peranan Lembaga Adat Melayu, serta kerja keras dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Dumai. Pada Tabel berikut disajikan data target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang berkaitan dengan seni budaya tahun 2024.

Tabel 2.45
Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2024

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja 2024	Realisasi sampai Tahun 2024	Capaian Kinerja
Sanggar Seni dan Budaya Yang Dibina	Sanggar	22	22	100
Jumlah Grup Kesenian	Buah	59	59	100
Jumlah Gedung Kesenian	Unit	1	0	0

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025)

Dari tabel di atas terlihat Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk sanggar seni dan budaya dari target 22 sanggar yang dibina terealisasi 22 sanggar yang dibina. Untuk jumlah grup kesenian dari target 59 grup kesenian terealisasi 59 grup. Sedangkan usulan pembangunan 1 (satu) gedung kesenian belum terealisasi. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Riau, jumlah grup kesenian di Dumai menempati urutan paling bawah, sama halnya dengan Pelalawan. Rendahnya jumlah grup seni budaya Melayu, minimnya sarana/prasarana seni budaya, belum maksimalnya peranan Lembaga Adat Melayu, dan pembelajaran seni budaya Melayu Riau di sekolah disebabkan oleh belum maksimalnya kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.

Festival seni dan budaya diselenggarakan secara rutin di Kota Dumai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya dimaksudkan untuk pelestarian seni dan budaya melayu serta penguatan karakter bangsa sehingga generasi muda dapat mengenali dan memahami kesenian dan kebudayaan nya sendiri serta dapat meneruskan ke generasi berikut nya antara lain: Festival Layang –layang, Lomba Gasing, Panggung Seni Rakyat, Lomba Pantuan dan Syair, Festival Kompang, Rebana dan Nasyid serta Lomba Masakan Kuliner.

Terdapat beragam jenis warisan budaya tak benda yang hidup dalam keseharian masyarakat melayu di Kota Dumai, antara lain pantun, gurindam, motif tenun, mantra-mantra semah, mendodoi anak, dialek melayu dumai serta warisan budaya tak benda lainnya seperti cerita rakyat yang telah turun temurun berkembang di masyarakat Kota Dumai.

Dalam masyarakat melayu di Kota Dumai, juga terdapat beberapa tradisi lisan lisan yang berkembang dan disampaikan secara turun temurun di tengah-tengah masyarakat. Adapun tradisi lisan dimaksud antara lain adalah cerita putri tujuh, misteri goa pelintung, panglima hitam,

bujang manjo, buah bakau belukar jin qunai, asal mula lubuk gaung, panglima jambul, tuk kedondong.

1) Perkembangan Olah Raga

Di Kota Dumai terdapat banyak klub olahraga yang bernaung dibawah KONI Dumai, Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berperan penting dalam membina klub-klub olahraga yang bernaung di bawah KONI Dumai tersebut agar dapat memajukan dan mengharumkan Kota Dumai melalui kompetisi/perlombaan yang diikuti. Oleh karena itu, perlu penguatan dan peningkatan peranan klub olahraga tersebut kedepannya.

Dari data tabel tersaji dibawah ini dapat dilihat bahwa pembinaan cabang olahraga dan klub olahraga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai. Di sisi lain, jika dilihat dari fasilitas olahraga, jumlah fasilitas olahraga di Kota Dumai masih sangat minim dibandingkan dengan yang ada wilayah lainnya di Provinsi Riau.

Tabel 2.46
Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor Dan Jumlah Klub Olahraga Kota Dumai Tahun 2019-2024

Kegiatan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah pembinaan cabang olahraga	Cabang	28	29	40	40	42	40	7.39%
Jumlah yang Dibina	Cabang	33	34	32	33	33	33	0.00%
Persentase Binaan	%	117.86	117.24	80	80	76	76	-8.40%
Jumlah klub olahraga	Klub	112	112	120	120	130	130	3.03%
Jumlah yang Dibina	Klub	112	112	120	120	130	130	3.03%
Persentase Binaan	%	100	100	100	100	100	100	0.00%

(Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, 2025)

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kota Dumai Tahun 2023 terdiri dari 15 indikator SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan sebagaimana pada Bab IV tentang pencapaian SPM Pendidikan.

Tabel 2.47
Capaian SPM Bidang Pendidikan Kota Dumai 2024

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu	Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM					**90,86%**
1	Pendidikan Anak Usia Dini				86,42%	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80%	
	A.Jumlah Yang Harus Dilayani	5.384	5.384	0	100%	
	Persentase Capaian Mutu Layanan Dasar (20%)				6,42%	

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu	Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM					**90,86%**
	B.Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi				32,09%	
2	Pendidikan Dasar				91,91%	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80%	
	A.Jumlah Yang Harus Dilayani	51.795	51.795	6	100%	
	Persentase Capaian Mutu Layanan Dasar (20%)				11,91%	
	B.Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi				59,53%	
3	Pendidikan Kesetaraan				94,24%	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80%	
	A.Jumlah Yang Harus Dilayani	2.407	2.407	0	100%	
	Persentase Capaian Mutu Layanan Dasar (20%)				14,24%	
	B.Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi				71,21%	

(Sumber: Laporan SPM Kota Dumai Tahun 2025)

(1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nilai PAUD ini mencerminkan rasio pendidikan bagi anak-anak, Semakin tinggi nilai, maka berarti semakin banyak pula jumlah siswa pada rentang usia PAUD yang bersekolah, baik di PAUD maupun TK, dengan jenjang usia antara 4-6 tahun. Berdasarkan data dari Pendidikan, tren perkembangan jumlah PAUD dan sederajat mengalami penurunan dibanding tahun 2023, jumlah PAUD/ TK dan sederajat sampai pada tahun 2024 berjumlah 99 sekolah dengan 6 sekolah negeri dan 93 sekolah swasta. Penurunan jumlah fasilitas Pendidikan tersebut diikuti dengan menurunnya jumlah siswa tahun 2024 menjadi 4.647 orang dengan rincian 420 siswa negeri dan 4.227 siswa swasta dan jumlah guru 577 orang, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.48
Perkembangan Jumlah Fasilitas, Siswa dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2024

Uraian	Negeri	Swasta
Jumlah Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini	6	93
Jumlah Peserta Didik (L/P)	420	4.227
Jumlah Guru Paud	57	520
Jumlah Tenaga Pendidik	6	71
Jumlah Rombel	24	343
Akreditasi A	2	10
Akreditasi B	4	53
Akreditasi C	0	42

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

Tabel 2.49
Rasio Pengawas terhadap Pemilik PAUD Tahun 2024

Uraian	Rasio Pengawas terhadap Pemilik PAUD
Pemilik PAUD	99
Pengawas PAUD	4
Rasio Pengawas/Pemilik	2,47

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

Tabel 2.50
Kualifikasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Jenjang Paud Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	PTK			
	Kepala Sekolah	Pendidik	Tenaga Penunjang	Total
SMA / sederajat	16	212	58	286
D1/D2	-	-	-	0
D3	-	-	-	0
D4/S1	79	203	14	296
S2	0	0	0	0
TOTAL	**95**	**415**	**72**	**582**

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

(2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Masih menurut BPS kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2019-2024 pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. APK Kota Dumai untuk jenjang SD/MI mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 95,81 menjadi 93,69 di tahun 2024, hal yang sama juga terjadi pada APK jenjang SMP/MT yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 84,50 menjadi 79,08 di tahun 2024 . Kondisi ini menggambarkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan Pendidikan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.51
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
APK SD/MI	%	108,33	108,86	107,05	93,19	95,81	93.69
APK SMP/MTs	%	89,16	88,66	92,32	83,07	84,50	79.08

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

(3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan

oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

Tabel 2.52
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
APM SD/MI/Paket A	%	98,93	99,00	98,95	88,04	88,04	86.68
APM SMP/MTs/Paket B	%	84,19	83,24	83,96	71,24	71,24	70.45

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, tren perkembangan Angka Partisipasi Murni dari tahun 2019-2024 fluktuatif dengan kecenderungan untuk APM SD/MI atau turun dari 98,93% tahun 2019 menjadi 86,08% di tahun 2024 dan APM SMP/MTs juga mengalami penurunan dari tahun 2019-2024, yang semula sebesar 84,19 di tahun 2019 menjadi 71,24 di tahun 2024.

Berfluktuatifnya APM ini juga dipengaruhi oleh menurunnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP. Menurunnya angka melanjutkan sekolah tentunya akan menurunkan nilai APM. Kondisi ini harus dicermati oleh Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendidikan, bahwa minat masyarakat untuk bersekolah semakin menurun, jumlah siswa yang bersekolah juga semakin menurun.

(4) Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah. Dengan data ini dapat dilihat jumlah siswa yang putus sekolah, selain itu yang paling utama adalah mencari penyebab mengapa angka putus sekolah naik dan turun. Dalam kurun waktu antara tahun 2019-2024, tren perkembangan angka putus sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya pertambahan.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), angka putus sekolah pada tahun 2019 sebesar 0,052%, namun pada tahun 2024 angka putus sekolah turun menjadi 0,011% dengan rata-rata penurunan angka putus sekolah selama tahun 2019-2024 sebesar 2,31%. Pada jenjang SMP juga demikian, pada tahun 2019 angka putus sekolah adalah sebesar 0,098%, namun pada tahun 2024 angka putus sekolah mengalami penurunan menjadi 0,009%.

Kecenderungan naiknya dan turunnya angka putus sekolah dalam beberapa tahun untuk semua jenjang pendidikan di Kota Dumai menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius mengenai minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, atau kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan menurun. Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai menyajikan angka partisipasi sekolah, yaitu proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan tersebut tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,052	0,096	0,422	2,18	2,33	0,011	- 2,31
Angka Putus Sekolah SMP/MTS	%	0,098	0,086	0,393	4,17	4,44	0,009	- 4,43

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

Beberapa kajian menunjukkan bahwa angka putus sekolah dapat setidaknya ada enam faktor penyebab terjadinya putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan dasar yaitu faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang mendukung, faktor budaya dan lokasi atau letak sekolah (Burhannudin dalam Prihatin, 2011), Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

a. Faktor ekonomi merupakan faktor pertama penyebab anak putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu, walaupun pemerintah telah mencanangkan Program Pendidikan Gratis dua belas tahun, namun belum berimplikasi secara maksimal terhadap penurunan jumlah anak putus sekolah.
b. Kurang perhatian orang tua merupakan faktor kedua. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua si anak sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Persentase anak yang tidak dan putus sekolah karena rendahnya kurangnya perhatian orang tua.
c. Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai merupakan faktor ketiga. Fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perangkat (alat, bahan, dan media) pembelajaran yang kurang memadai, buku pelajaran kurang memadai, dan sebagainya. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi siswa dapat menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah.
d. Minat anak untuk sekolah merupakan faktor keempat. Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh, fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Minat yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan misalnya tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah peranan lingkungan.

e. Budaya merupakan faktor kelima yang terkait dengan kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan. Perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa bersekolah pun anak-anak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh karena di desa jumlah anak yang bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya. Masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah.
f. Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor keenam yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasiyang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh.

(5) Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs

Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan, bila angka kelulusan tinggi maka proses pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan baik, dan apabila angka kelulusan rendah, maka banyak orang yang akan menjustifikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan pada satu institusi pendidikan tidak berlangsung dengan baik. Dalam rentang tahun 2019-2024, angka kelulusan untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Dumai sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.54
Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelulusan Sekolah SD/MI	%	100	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan Sekolah SMP/MTS	%	100	100	100	100	100	100

(Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

(6) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan siswa dari SD/MI ke SMP/MTs dalam rentang waktu 2019-2024 di Kota Dumai menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Angka melanjutkan tertinggi ada pada tahun 2020-2022 dengan nilai 94,52%. Pada tahun 2024 angka melanjutkan adalah sebesar 90,06%.

Angka melanjutkan ini menunjukkan kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurunnya tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Berikut disajikan table perkembangan angka melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai.

Tabel 2.55
Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTS	%	87,73	94,52	94,52	94,52	74,69	90,06	15,37

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

(7) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs serta Rasio Siswa terhadap Ruang Kelas

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10,000 penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, dari tahun 2019-2024, rasio ketersediaan sekolah dibanding dengan penduduk usia sekolah mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2019 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI menunjukkan angka 9,05. Angka ini menunjukkan ada sekitar 9 sekolah SD/MI untuk 10.000 penduduk. Pada tahun 2024 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah 27,7 hal ini berarti terdapat sekitar 27 sekolah SD/MI untuk setiap 10.000 penduduk. Untuk jenjang SMP rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTS antara tahun 2019-2024 menunjukkan pertumbuhan yang statis.

Sementara itu rasio siswa per ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD menunjukkan terjadinya perbaikan dari 32,69 siswa per kelas tahun 2019 menjadi 22,95 siswa per ruang kelas pada tahun 2024. Kondisi ini terjadi karena jumlah ruang kelas untuk jenjang SD pada tahun 2019 adalah sebanyak 1.167 ruang kelas bertambah menjadi 1.680 ruang kelas pada tahun 2024. Selanjutnya rasio siswa per ruang kelas untuk jenjang pendidikan SMP menunjukkan terjadinya perbaikan dari 29,76 siswa per kelas tahun 2019 menjadi 24,76 siswa per ruang kelas pada tahun 2024. Kondisi ini terjadi karena jumlah ruang kelas untuk jenjang SMP pada tahun 2019 adalah sebanyak 446 ruang kelas bertambah menjadi 542 ruang kelas pada tahun 2024. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SMP, 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai masih memenuhi SPM. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.56
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Siswa terhadap Ruang kelas di Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Kegiatan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Gedung SD/MI	Unit	107	107	108	108	113	118	1.98
Jumlah Penduduk Usia SD	Jiwa	118.275	114.105	122.815	118.895	127.213	42.609	-18.47
Rasio Ketersediaan SD/MI	Indek	9,05	9,38	8,79	9,08	8,73	27,7	25.07

Kegiatan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Gedung SMP/MI	Unit	36	37	38	38	41	61	11.12
Jumlah Penduduk Usia SMP	Jiwa	45.766	47.201	50.426	45.494	54.969	20.924	-14.49
Rasio Ketersediaan SMP/MI	Rasio	7,87	7,84	7,54	8,57	7,28	29,15	29.94
Jumlah Siswa SD	Orang	38.148	38.416	38.456	38.054	38.442	38.564	0.22
Jumlah RK SD	Orang	1.167	1.234	1.062	1.481	1.639	1.680	7.56
Rasio Siswa/RK SD	Indek	32,69	31,13	36	25,3	23,45	22.95	-6.83
Jumlah Siswa SMP	Orang	13.274	13480	13.316	13.394	13.418	13.781	0.75
Jumlah RK SMP	Orang	446	454	354	517	542	624	6.95
Rasio Siswa/RK SMP	Indek	29,76	29,69	38	25,9	24,76	22,08	-5.79

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

Rasio antara jumlah siswa per ruang kelas dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada, baik untuk jenjang SD maupun SMP tetap harus menjadi perhatian karena jumlah dan kualitas sekolahnya pun belum merata per Kecamatan di Kota Dumai. Minat sekolah penduduk usia sekolah di Kota Dumai masih tertuju pada sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan-Kecamatan di wilayah kota. Hal ini terjadi karena sekolah-sekolah tersebut lebih mudah untuk diakses. Disamping itu sarana dan prasarana pendukung di sekolah tersebut juga lebih lengkap dan lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran.

(8) Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik

Sarana prasarana sekolah merupakan salah satu komponen dalam pendidikan, yang juga merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh sekolah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah serta kurang adanya manajemen yang baik dari pengelola, seperti bangunan sekolah yang rusak, media pembelajaran yang kurang memadai, kurangnya ruang kelas sehingga terdapat satu rombongan belajar ditempatkan di ruang multimedia yang tidak sesuai dengan standar luas ruang kelas, kurangnya perencanaan dalam pengadaan fasilitas sehingga sering terjadi kegiatan pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan pengguna, pendistribusian sarana yang tidak merata, kurangnya penjagaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang telah dimiliki, dan lain sebagainya, Perkembangan kondisi ruang kelas SD tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.57
Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Kondisi Ruang Kelas SD	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Ruang Kelas	Unit	1.167	1.234	1.302	1.481	1.639	1.484	0,91
Baik	Unit	462	260	599	1.377	1.535	987	0,64
Rusak Ringan	Unit	603	734	685	102	102	167	1,64
Rusak Sedang	Unit	41	136	2	1	1	152	152
Rusak Berat	Unit	61	104	19	1	1	178	178
Rusak Total	Unit	0	0	0	0	0	0	0
Tingkat Baik	%	39,59	21,07	46,01	92,98	93,65	66,51	0,71

Kondisi Ruang Kelas SD	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Tingkat Rusak Ringan	%	51,67	59,48	52,61	6,89	6,22	11,25	1,81
Tingkat Rusak Sedang	%	3,51	11,02	0,15	0,07	0,06	10,24	170,67
Tingkat Rusak Berat	%	5,23	8,43	1,46	0,07	0,06	11,99	199,83
Tingkat Rusak Total	%	0	0	0	0	0	0	0

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak akan membantu dalam proses belajar mengajar, Proses belajar mengajar yang baik akan berdampak pada hasil pembelajaran yang baik. Dengan kondisi bangunan yang baik maka tentu saja akan membuat aktifitas belajar siswa menjadi tidak terganggu dan berjalan dengan baik. Pada tahun 2024 ruang kelas dalam kondisi baik hanya sebanyak 987 ruang kelas dari 1.484 ruang kelas atau sekitar 66,51%, artinya semakin bekurang ruang kelas dalam kondisi baik dibandingkan tahun 2023 sebesar 93,65%.

Berdasarkan data kondisi ruang kelas SD/MI didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak berat sebesar 11,99% pada tahun 2024. Oleh karena itu upaya melakukan perbaikan ruang kelas harus menjadi perioritas beberapa tahun kedepan. Namun demikian sejak tahun 2019-2024 tidak lagi terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak total.

(9) Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik

Berdasarkan data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik yang ada di Kota Dumai tahun selama tahun 2019-2024 berkisar antara 162 kelas ditahun 2019 dan mengalami perkembangan yang fluktuatif pada tahun 2024 sebanyak 254 ruang kelas. Sementara itu jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak ringan mengalami penurunan dari 240 ruang kelas tahun 2019 menjadi 133 ruang kelas tahun 2024.

Oleh karena Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pengambil kebijakan di Kota Dumai karena dapat mempengaruhi kelancaran proses belajar dan mengajar sehingga akan mempengaruhi hasil belajar siswa di Kota Dumai. Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru dan sekolah akan terkait secara langsung dalam hal penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana tersebut. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pendidikan. Hal ini dikarenakan tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus sehingga penggunaan sarana prasarana pendidikan akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Oleh karena secara tidak langsung sarana prasarana sekolah yang memadai dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Cynthia & Megan (2008), yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara kualitas fasilitas sekolah dan prestasi siswa terutama

dalam mata pelajaran eksakta. Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2019-2024 seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Kondisi Ruang Kelas SMP	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Ruang Kelas	Unit	446	454	468	517	542	546	1,01
Baik	Unit	162	40	187	469	494	254	0,51
Rusak Ringan	Unit	240	324	281	48	48	133	2,77
Rusak Sedang	Unit	33	72	0	0	0	92	92,00
Rusak Berat	Unit	11	18	0	0	0	67	67,00
Rusak Total	Unit	0	0	0	0	0	0	0
Tingkat Baik	%	36,32	8,81	39,96	90,72	91,14	46,52	0,51
Tingkat Rusak Ringan	%	53,81	71,37	60,04	9,28	8,86	24,36	2,75
Tingkat Rusak Sedang	%	7,4	15,86	0	0	0	16,58	16,58
Tingkat Rusak Berat	%	2,47	3,96	0	0	0	12,27	12,27
Tingkat Rusak Total	%	0	0	0	0	0	0	0

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

(10) Rasio Guru/Siswa SD/MI dan SMP/MTs

Angka rasio guru/siswa, merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini mencerminkan berapa jumlah siswa yang harus diajar oleh seorang guru. Idealnya memang dalam satu kelas dan terdapat seorang guru, jumlah siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu besar, karena akan menyulitkan siswa maupun guru tersebut.

Berdasarkan data *time series* dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, pada tahun 2019-2024 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rasio atauperbaikan untuk jenjang Pendidikan SD dari 18,23 siswa per seorang guru tahun 2019 menjadi 17,46 siswa per seorang guru tahun 2024. Demikian halnya dengan jenjang Pendidikan SMP mengalami penurunan dari 16,69 siswa per seorang guru tahun 2019 menjadi 14,88 siswa per seorang guru tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan bahwa percepatan pertumbuhan penambahan guru lebih tinggi dibandingkan dengan pertambahan jumlah siswa setiap tahunnya. Jelasnya lebih lanjut lihat Tabel berikut.

Tabel 2.59
Perkembangan Rasio Guru terhadap Muird SD/MI dan SMP/MTs diKota Dumai
Tahun 2019-2024

Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Siswa SD	Orang	38,148	38,416	38,456	38,054	38,442	38,564	0.22
Jumlah Guru SD	Orang	2,093	2,219	2,213	2,321	2,370	2,209	1.08
Rasio	Indek	18.23	17.31	17.38	16.4	16.21	17.46	-0.86
Jumlah Siswa SMP	Orang	13,274	13,480	13,780	13,355	13,418	13,781	0.75
Jumlah Guru SMP	Orang	820	938	932	919	909	926	2.46
Rasio	Indek	16.19	14.37	14.79	14.53	14.76	14.88	-1.67

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

Meskipun rasio guru per siswa untuk jenjang SD selama periode 2017-2023 memenuhi angka ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008. Namun demikian tetap perlu diantisipasi karena perkembangan daerah perkotaan banyak sekolah yang melaksanakan *double shift*.

Untuk jenjang SMP/MTs, rasio siswa guru dalam rentang waktu antara tahun 2019-2024 tren perkembangannya fluktuatif. Meskipun angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 (1:20). Artinya selama tahun 2019-2024 rasio siswa per guru masih memenuhi SPM pendidikan tersebut. Namun demikian perlu diantisipasi terkait sebaran jumlah siswa terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi sedikit. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan ketersediaan dan kualitas sekolah di daerah pinggiran.

Tabel 2.60
Rasio Guru terhadap Siswa Menurut Kecamatan di Kota Dumai
Tahun Ajaran 2023/2024

Kecamatan	Guru		Siswa		Rasio Guru/Siswa	
	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
Bukit Kapur	368	134	6494	1888	17,65	14,09
Medang Kampai	150	48	2468	741	16,45	15,44
Sungai Sembilan	377	133	5600	1707	14,85	12,83
Dumai Barat	261	134	4503	2035	17,25	15,19
Dumai Selatan	418	199	6658	3028	15,93	15,22
Dumai Timur	611	184	9868	2773	16,15	15,07
Dumai Kota	185	77	2851	1246	15,41	16,18
Kota Dumai	2370	909	38442	13418	16,22	14,76

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa distribusi guru belum merata per Kecamatan sesuai dengan distribusi siswa. Di kecamatan-kecamatan yang dekat dengan perkotaan rata-rata jumlah guru per sekolah untuk jenjang SD dan SMP memiliki beban rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang jauh dari perkotaan. Misalnya jenjang pendidikan SD di Kecamatan Bukit Kapur rasio guru terhadap siswa sebanyak 17,65 siswa. Hal ini juga terjadi karena tingginya minat penduduk usia sekolah di Kota Dumai untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang dekat dengan pusat kota.

(11) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Bersertifikasi

Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV berarti pengetahuan, pemahaman dan informasi yang diperoleh semakin terbuka luas, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas mengajar dan mendidik para guru. Peningkatan kualitas mengajar dan mendidik para guru diharapkan akan meningkatkan kualitas anak didik atau siswa serta lulusan, serta mempersiapkan siswa untuk semakin membuka wawasan pengetahuan yang lebih luas di era globalisasi ini.

Persentase guru SD yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dalam rentang waktu 2019-2024 di Kota Dumai menunjukkan peningkatan sebesar

0,64% per tahun. Sementara persentase guru SD bersertifikasi meningkat dengan pertumbuhan sebesar 3,30% atau naik dari 53,20% tahun 2019 menjadi 62,56% pada tahun 2024 atau bertambah dari 1.113 orang tahun 2019 menjadi 1.382 orang di tahun 2024.

Persentase guru SMP yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV tumbuh sebesar 1,26%, sementara persentase guru SMP bersertifikasi tumbuh sebesar 3,28% atau mengalami peningkatan dari 53,20% di tahun 2019 menjadi 62,53% pada tahun 2024 atau mengalami peningkatan dari 436 orang menjadi 579 orang. Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi Kota Dumai Tahun 2019-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Guru SD	Orang	2,093	2,219	2,213	2,321	2,301	2,209	1.08
Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	90.7	92.6	84.75	97.96	92.48	93.66	0.64
Guru SD Bersertifikasi	Orang	1,113	1,343	1,039	1,108	1,158	1,382	4.42
Persentase Guru SD Sertifikasi	%	53.2	60.52	46.96	47.74	50.33	62.56	3.30
Jumlah Guru SMP	Orang	820	938	932	919	898	926	2.46
Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	91.8	95.4	90.88	99.55	95.88	97.73	1.26
Guru SMP Bersertifikasi	Orang	436	449	445	439	464	579	5.84
Persentase Guru SMP Sertifikasi	%	53.2	47.85	47.8	47.79	51.67	62.53	3.28

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

(12) Angka Literasi

Literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis (Abidin, 2015). Kern (2000) mendefenisikan istilah literasi sebagai penggunaan praktik sosial, dan historis, budaya yang berpusat pada penciptaan dan interpretasi makna melalui teks. Literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan. Tingkatan literasi yang berkembang pada masa sekarang ini yaitu tingkatan literasi yang pertama adalah kemampuan aksesibilitas terhadap sumber-sumber bahan bacaan terpercaya, terlengkap, terkini. Kemudian tingkatan literasi yang kedua adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Dalam konteks ini pemahaman apa yang tersirat didapat melalui proses membaca. Tingkat literasi yang ketiga, literasi adalah kemampuan mengemukakan ide atau gagasan baru, inovasi baru, kreativitas baru hingga memiliki kemampuan menganalisis informasi. Sedangkan untuk tingkat literasi yang tertinggi adalah kemampuan menghasilkan barang dan jasa bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global.

Tabel 2.62
Rata-rata Kemampuan Literasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2021-2024

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2021	2022	2023	2024	
1	SD	Indeks	50,02	55,97	61,78	63,27	8,15
2	SMP	Indeks	63,38	66,65	72,12	74,65	5,61

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Tahun 2025)

Rata-rata indeks kemampuan literasi jenjang pendidikan SD di Kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 8,13% per tahun dari 50,02 pada tahun 2021 meningkat menjadi 63,27 tahun 2024. Pada jenjang SMP indeks kemampuan literasi di Kota Dumai juga mengalami peningkatan dari 63,38 tahun 2021 naik menjadi 74,65 di tahun 2024. Jika dilihat dari pertumbuhannya indeks literasi jenjang SMP lebih rendah yaitu 5,61% per tahun, namun indeks literasi jenjang SMP lebih tinggi dibandingkan jenjang SD. Sedangkan sebaran capaian kemampuan literasi rata-rata jenjang pendidikan SD dan SMP/PKBM tahun 2023 dengan capaian baik sebesar 47,84%, capaian sedang sebesar 48,43%, dan capaian kurang sebesar 3,73%. Sedangkan untuk tahun 2024 capaian baik sebesar 60,46%, capaian sedang sebesar 33,51%, dan capaian kurang sebesar 6,02%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.63
Persentase Kemampuan Literasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kota Dumai Tahun 2023-2024

Indikator	Satuan	2023			2024*		
		Baik	Sedang	Kurang	Baik	Sedang	Kurang
SD	%	44,07%	51,69%	4,24%	67,80%	27,97%	4,24%
SMP/ PKBM	%	51,61%	45,16%	3,23%	53,13%	39,06%	7,81%
Rata-rata	%	47,84%	48,43%	3,73%	60,46%	33,51%	6,02%

Keterangan * : Data Pemutakhiran Juli 2024
(Sumber: Rapor Pendidikan Kota Dumai, Kemendikbud 2025 (data diolah)

(13) Angka Numerasi

Berhitung adalah pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam berbagai situasi. Ini melibatkan pengakuan dan pemahaman peran matematika di dunia dan memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika secara sengaja. Angka, pengukuran dan geometri, statistik dan probabilitas adalah aspek umum dari pengalaman matematika kebanyakan orang dalam situasi pribadi, belajar, dan kerja sehari-hari. Yang tak kalah penting adalah peran penting yang dimainkan oleh aljabar, fungsi dan hubungan, logika, struktur matematika, dan bekerja secara matematis dalam pemahaman orang tentang dunia alam dan manusia, dan interaksi di antara mereka. Siswa dihadapkan pada pemahaman matematika yang semakin canggih dan halus, kelancaran, penalaran, pemodelan dan pemecahan masalah. Kemampuan ini memungkinkan siswa untuk menanggapi situasi

akrab dan asing dengan menggunakan matematika untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah secara efisien. Sekarang juga ada bukti bagus bahwa bidang pengembangan lainnya—seperti ketahanan dan ketekunan—mendukung pencapaian dalam berhitung juga (VCAA, 2017).

Numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi dalam kehidupan sehari-hari, dan kemampuan untuk menginterprestasikan informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Kemampuan ini ditunjukkan dengan kenyamanan terhadap bilangan dan cakap menggunakan keterampilan matematika secara praktis memenuhi tuntutan kehidupan. Kemampuan ini juga merujuk pada apresiasi dan pemahaman informasi yang dinyatakan secara matematis, misalnya grafik, table dan bagan.

Tabel 2.64
Rata-rata Kemampuan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP
Kota Dumai Tahun 2021-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2021	2022	2023	2024	
SD	Indeks	33,9	40,95	46,25	53,24	16,24
SMP	Indeks	63,38	66,65	62,96	64,39	0,53

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Tahun 2025)

Rata-rata indeks kemampuan numerasi jenjang pendidikan SD di Kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 16,24% per tahun dari 30,90 pada tahun 2021 meningkat menjadi 53,24 tahun 2024. Pada jenjang SMP indeks kemampuan literasi di Kota Dumai sebaliknya mengalami penurunan dari 63,38 tahun 2021 turun menjadi 64,39 di tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 0,53% per tahun. Sedangkan sebaran capaian kemampuan numerasi rata-rata jenjang pendidikan SD dan SMP/PKBM tahun 2023 dengan capaian baik sebesar 16,20%, capaian sedang sebesar 39,82%, dan capaian kurang sebesar 43,99%. Sedangkan untuk tahun 2024 capaian baik sebesar 37,75%, capaian sedang sebesar 49,15%, dan capaian kurang sebesar 13,10%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.65
Persentase Kemampuan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP
Kota Dumai Tahun 2023-2024

Indikator	Satuan	2023			2024*		
		Baik	Sedang	Kurang	Baik	Sedang	Kurang
SD	%	19,49%	45,76%	34,75%	36,44%	48,31%	15,25%
SMP	%	12,90%	33,87%	53,23%	39,06%	50,00%	10,94%
Rata-rata	%	16,20%	39,82%	43,99%	37,75%	49,15%	13,10%

Keterangan * : Data Pemutakhiran Juli 2024
(Sumber: Rapor Pendidikan Kota Dumai, Kemendikbud 2025 (data diolah)

2.1.3.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sementara itu bidang kesehatan merupakan unsur lain yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia masyarakat secara umum selain faktor kualias pendidikan adalah faktor kualitas kesehatan masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang mengambarkan ukuran dari

kualitas kesehatan masyarakat. Indikator tersebut adalah Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran, Angka Kematian Balita, Angka Usia Harapan Hidup, Persentase Balita Gizi Buruk.

Tabel 2.66
Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			90.01 %	
1 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**						89.98 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**71.64 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9936	8898	**1038**	**89.55 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18.34 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	91.70 %	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	9936	8901	**1035**	**89.58 %**	
	2 . Tablet tambah darah **(180 tablet x jumlah ibu hamil)**	Tablet	1788480	8901	**1779579**	**0.50 %**	
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	5000	5000	**0**	**100.00 %**	
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin **(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)**	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	9936	8901	**1035**	**89.58 %**	
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	9936	8901	**1035**	**89.58 %**	
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	11 . Gel USG **(untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)**	Botol	10	10	**0**	**100.00 %**	
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; **(angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"**	Orang	89	89	**0**	**100.00 %**	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat **(angka ideal dengan rasio**	Orang	173	173	**0**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	1:885 penduduk)						
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan **(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)**	Orang	304	304	**0**	**100.00 %**	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	35	35	**0**	**100.00 %**	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	**0**	**100.00 %**	
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) **(Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)**	Orang	9936	8901	**1035**	**89.58 %**	
2 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**						90.94 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**71.63 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9938	8898	**1040**	**89.54 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19.32 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	96.58 %	
	1 . Formulir partograf	Formulir	9938	8917	**1021**	**89.73 %**	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	9938	8917	**1021**	**89.73 %**	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) **(Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)**	Buku	9938	8917	**1021**	**89.73 %**	
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi **(angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)**	Orang	89	89	**0**	**100.00 %**	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan **(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)**	Paket	304	304	**0**	**100.00 %**	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat **(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)**	Orang	173	173	**0**	**100.00 %**	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	35	35	**0**	**100.00 %**	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	**0**	**100.00 %**	
3 .	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**						92.46 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang**	**Jumlah Total Yang**	**Yang Belum Terlayan**	**74.39 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
			Harus Dilayani	**Terlayani**	**i**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9537	8868	**669**	**92.99 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18.07 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	90.35 %	
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	9537	8868	**669**	**92.99 %**	
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	9537	8868	**669**	**92.99 %**	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	9537	8868	**669**	**92.99 %**	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	9537	8868	**669**	**92.99 %**	
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	0	0	**0**	**0.00 %**	
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	9537	8868	**669**	**92.99 %**	
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	89	89	**0**	**100.00 %**	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	304	304	**0**	**100.00 %**	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	173	173	**0**	**100.00 %**	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	35	35	**0**	**100.00 %**	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	28	28	**0**	**100.00 %**	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	**0**	**100.00 %**	
	14 . Kader Kesehatan	Orang	990	990	**0**	**100.00 %**	
4 .	**Pelayanan Kesehatan Balita**						74.43 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**58.14 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	35535	25823	**9712**	**72.67 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**16.29 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	81.46 %	
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	35535	25823	**9712**	**72.67 %**	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	35535	25823	**9712**	**72.67 %**	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	35535	25823	**9712**	**72.67 %**	
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	4769	4950	**-181**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	(sesuai standar 6-11 bulan)						
	5 . Vitamin A Merah **(sesuai standar 12-59 bulan)**	Kapsul	30766	25823	**4943**	**83.93 %**	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	4769	4950	**-181**	**100.00 %**	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	35535	25823	**9712**	**72.67 %**	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	35535	25823	**9712**	**72.67 %**	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	35535	25823	**9712**	**72.67 %**	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	35535	25823	**9712**	**72.67 %**	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	35535	25823	**9712**	**72.67 %**	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	35535	25823	**9712**	**72.67 %**	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	35535	25823	**9712**	**72.67 %**	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	89	89	**0**	**100.00 %**	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	304	304	**0**	**100.00 %**	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	173	173	**0**	**100.00 %**	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	**0**	**100.00 %**	
	20 . Guru PAUD	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**	
	21 . Kader Kesehatan	Orang	990	990	**0**	**100.00 %**	
5 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**						84.07 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**67.18 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	62722	52671	**10051**	**83.98 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**16.89 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	84.44 %	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku **(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)**	Buku	62722	52671	**10051**	**83.98 %**	
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan **(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)**	Buku	62722	52671	**10051**	**83.98 %**	
	3 . Kuesioner skrining kesehatan **(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)**	Dokumen	62722	52671	**10051**	**83.98 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah **(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)**	Formulir	10	10	**0**	**100.00 %**	
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah **(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)**	Formulir	10	10	**0**	**100.00 %**	
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah **(Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)**	Tablet	62722	52671	**10051**	**83.98 %**	
	7 . Alat Pemeriksaan Hb **(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)**	Alat	10	10	**0**	**100.00 %**	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 **(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)**	Strip	10	10	**0**	**100.00 %**	
	9 . Media promosi kesehatan **(Media khusus remaja sehat)**	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) **(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)**	Vaksin	62722	52671	**10051**	**83.98 %**	
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	89	89	**0**	**100.00 %**	
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	304	304	**0**	**100.00 %**	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	173	173	**0**	**100.00 %**	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	**0**	**100.00 %**	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	35	35	**0**	**100.00 %**	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	**0**	**100.00 %**	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
6 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**						90.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**72.20 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	221241	199682	**21559**	**90.26 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**17.79 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	88.96 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	10	10	**0**	**100.00 %**	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	10	10	**0**	**100.00 %**	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	10	10	**0**	**100.00 %**	
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	10	10	**0**	**100.00 %**	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	10	10	**0**	**100.00 %**	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	10	10	**0**	**100.00 %**	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	10	10	**0**	**100.00 %**	
	9 . Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	10	10	**0**	**100.00 %**	
	10 . Kuesioner PUMA **(Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)**	Dokumen	10	10	**0**	**100.00 %**	
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	30	0	**30**	**0.00 %**	
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	10	10	**0**	**100.00 %**	
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	221241	199682	**21559**	**90.26 %**	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	89	89	**0**	**100.00 %**	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	304	304	**0**	**100.00 %**	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	173	173	**0**	**100.00 %**	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	**0**	**100.00 %**	
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	**0**	**100.00 %**	
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**	
7 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**						98.46 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	24179	24311	**-132**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18.46 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	92.31 %	
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	10	10	**0**	**100.00 %**	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	89	89	**0**	**100.00 %**	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	304	304	**0**	**100.00 %**	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	173	173	**0**	**100.00 %**	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	**0**	**100.00 %**	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	**0**	**100.00 %**	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**	
8 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**						80.64 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**60.64 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	79271	60084	**19187**	**75.80 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %	
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) **(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)**	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	2 . Obat Hipertensi	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	3 . Tensimeter **(mengukur tekanan darah)**	Unit	10	10	**0**	**100.00 %**	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	10	10	**0**	**100.00 %**	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) **(peningkatan pengetahuan masyarakat)**	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	89	89	**0**	**100.00 %**	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	304	304	**0**	**100.00 %**	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	173	173	**0**	**100.00 %**	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	**0**	**100.00 %**	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	28	28	**0**	**100.00 %**	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	35	35	**0**	**100.00 %**	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	**0**	**100.00 %**	
9 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4172	4549	**-377**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %	
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	2 . Fotometer atau Glukometer **(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)**	Unit	10	10	**0**	**100.00 %**	
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	10	10	**0**	**100.00 %**	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	10	10	**0**	**100.00 %**	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) **(minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus;**	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)						
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	89	89	**0**	**100.00 %**	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	304	304	**0**	**100.00 %**	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	173	173	**0**	**100.00 %**	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	35	35	**0**	**100.00 %**	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	**0**	**100.00 %**	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	**0**	**100.00 %**	
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	21	21	**0**	**100.00 %**	
10 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**						95.56 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	529	566	**-37**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**15.56 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	77.78 %	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) **bentuk fisik atau elektronik)**	Buku	10	10	**0**	**100.00 %**	
	2 . Penyediaan Psikofarmaka **(pengobatan/medikasi)**	Jenus	10	10	**0**	**100.00 %**	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi **(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)**	Formulir	10	10	**0**	**100.00 %**	
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan **(pencatatan dan pelaporan)**	Formulir	10	10	**0**	**100.00 %**	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	10	10	**0**	**100.00 %**	
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	89	89	**0**	**100.00 %**	
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa **(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat**	Orang	10	10	**0**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	terlatih)						
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**	
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**	
11 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**						98.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6471	8016	**-1545**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18.67 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	93.33 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	2 . Reagen Zn TB	Kit	10	10	**0**	**100.00 %**	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	10	10	**0**	**100.00 %**	
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	10	10	**0**	**100.00 %**	
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	10	10	**0**	**100.00 %**	
	8 . Tuberkulin	Vial	10	10	**0**	**100.00 %**	
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	89	89	**0**	**100.00 %**	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	173	173	**0**	**100.00 %**	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	35	35	**0**	**100.00 %**	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28	28	**0**	**100.00 %**	
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	21	21	**0**	**100.00 %**	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**	
	15 . Kader Kesehatan	Orang	990	990	**0**	**100.00 %**	
12 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**						84.93 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus**	**Jumlah Total Yang Terlayan**	**Yang Belum Terlayani**	**66.93 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
			Dilayani	i			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	13070	10934	**2136**	**83.66 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**18.00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	90.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	10	10	**0**	**100.00 %**	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	10	10	**0**	**100.00 %**	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	89	89	**0**	**100.00 %**	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	304	304	**0**	**100.00 %**	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	173	173	**0**	**100.00 %**	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	21	21	**0**	**100.00 %**	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	28	28	**0**	**100.00 %**	
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	0	0	**0**	**0.00 %**	

(Sumber: Dinas Kesehatan, 2025)

(1) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

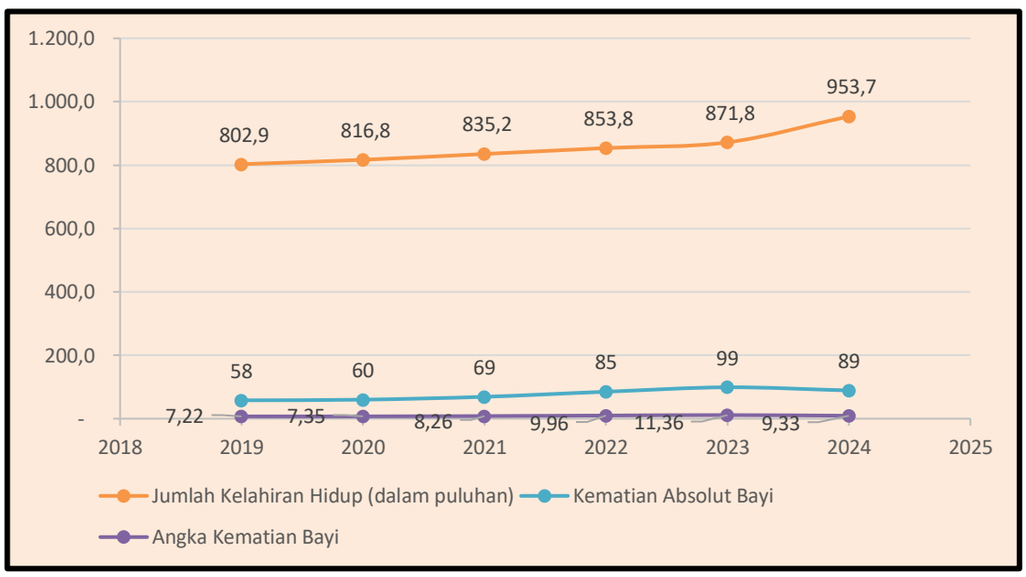
Kematian prenatal merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa tujuh hari setelah persalinan. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Angka Kematian Bayi sebanyak 7,22 bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2019 kemudian meningkat menjadi 9,33 bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2024 dengan pertumbuhan 5,26% per tahun. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2019-2024 pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.67
Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	8,029	8,168	8,352	8,538	8,718	9,537
Kematian Absolut Bayi	Bayi	58	60	69	85	99	89
Angka Kematian Bayi	/1000KH	7.22	7.35	8.26	9.96	11.36	9.33

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025)

Perkembangan tren Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran hidup di Kota Dumai menunjukkan perbaikan dengan peningkatan sebesar 5,26% per tahun, walaupun jumlah kelahiran bayi meningkat dengan pertumbuhan sebesar 3,50% per tahun atau bertambah dari 8.029 bayi tahun 2019 menjadi 9.537 bayi tahun 2024. Perkembangan trend Angka Kematian Bayi 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2019-2024 pada gambar berikut.



Grafik 2.7. Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai Tahun 2019-2024

Angka Kematian bayi/1.000 kelahiran per Kecamatan dari tahun 2019-2024 fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi ada Kecamatan Dumai Kota sebesar 17,56%. Pada tahun 2024 AKB/1.000 tertinggi ada di Kecamatan Dumai Kota sebesar 15,72/KH atau sebanyak 15 kematian absolut bayi.

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Penyebab kematian pada bayi umumnya didominasi oleh kasus Asfiksia, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Kelainan bawaan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua masih relatif kurang.

Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya

asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko kematian bayi waktu lahir.

Usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian bayi antara lain adalah meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemi, serta promosi pemberian ASI ekslusif dan pemantauan pertumbuhan bayi. Penyebab kematian bayi juga dapat dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua.

Pada tahun 2024 di Kota Dumai angka kematian bayi tertinggi ada di Kecamatan Dumai Kota sebesar 15,72/KH atau sebanyak 15 kematian absolut bayi. Angka kematian bayi tahun 2019-2024 per Kecamatan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai tahun 2024

Kecamatan	Angka Kematian Bayi (/1000 Kelahiran Hidup)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	
Dumai Kota	7	7	8	6,44	5	0,60	8	0,94	12	1,38	15	15,72	17.56
Dumai Timur	11	11	8	4,48	12	1,44	13	1,52	21	2,41	17	9.16	-3.59
Dumai Selatan	7	7	10	7,19	15	1,80	22	2,58	14	1,61	16	10.02	7.44
Dumai Barat	7	7	10	8,76	9	1,08	16	1,87	12	1,38	12	8.63	4.28
Bukit Kapur	13	13	10	7,87	13	1,56	15	1,76	21	2,41	10	6.04	-14.21
Sungai Sembilan	9	9	11	11,48	9	1,08	8	0,94	16	1,84	10	6.82	-5.40
Medang Kampai	4	4	3	7,94	6	0,72	3	0,35	3	0,34	9	14.42	29.24
Kota Dumai	58	58	60	7,35	69	8,26	85	9,96	99	11,36	89	9,33	-30.61

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2025)

(2) Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun per 1.000 penduduk. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

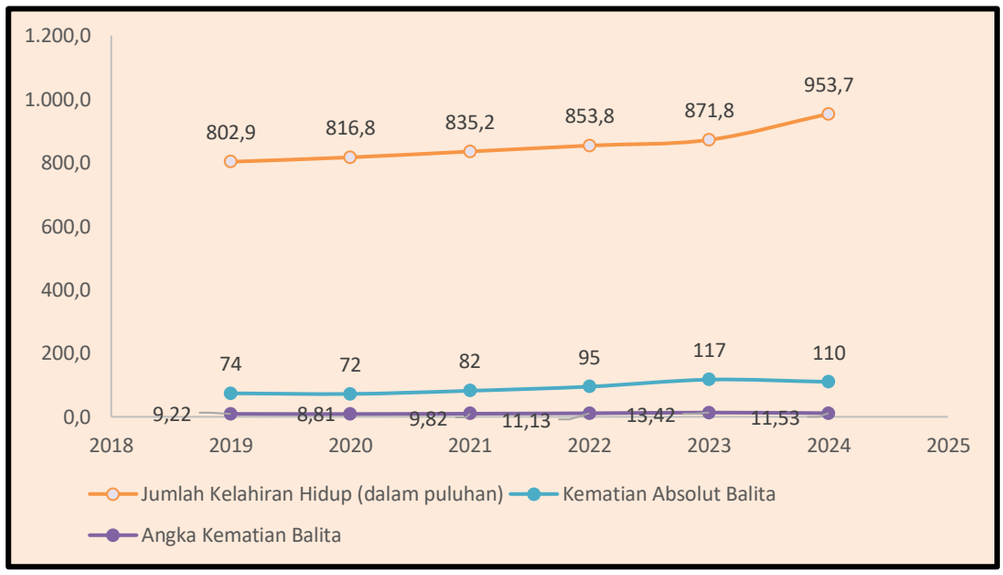
Tabel 2.69
Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	8,029	8,168	8,352	8,538	8,718	9,537
Kematian Absolut Balita	Balita	74	72	82	95	117	110

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Balita	/1000 KH	9.22	8.81	9.82	11.13	13.42	11.53

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025)

Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai dari tahun 2019-2024 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, dari 9,22/1000 kelahiran hidup tahun 2019 menjadi 11,53/1000 kelahiran hidup bayi di tahun 2024. Perkembangan tren Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup Kota Dumai menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,57% per tahun, seiring dengan bertambahnya kematian absolut balita dari 74 balita pada tahun 2019 bertambah menjadi 110 balita ditahun 2024. Perkembangan trend Angka Kematian Balita 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2019-2024 pada gambar berikut.



Grafik 2.8. Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian balita antara lain adalah meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu,menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemi, serta promosi pemberian ASI ekslusif dan pemantauan pertumbuhan balita.

Sementara itu Angka Kematian balita per Kecamatan di Kota Dumai dari selama tahun 2019-2024 fluktuatif. Perkembangan Angka kematian Balita tertinggi di Kecamatan Dumai Kota dengan pertumbuhan sebesar 23,92% per tahun. Usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian balita antara lain adalah meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit

menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemi, serta promosi pemberian ASI ekslusif dan pemantauan pertumbuhan balita. Perkembangan Angka kematian balita tahun 2019-2024 per kecamatan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Kecamatan	Angka Kematian Bayi (/1000 Kelahiran Hidup)											
	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH
Dumai Kota	7,00	5,74	9,00	7,25	7	0,84	8	0,94	17	1,95	16	16.77
Dumai Timur	13,00	7,39	10,00	5,60	13	1,56	15	1,76	24	2,75	23	12.40
Dumai Selatan	7,00	5,12	12,00	8,62	18	2,16	22	2,58	16	1,84	19	11.90
Dumai Barat	14,00	12,49	12,00	10,52	10	1,20	20	2,34	17	1,95	16	11.52
Bukit Kapur	17,00	13,60	13,00	10,23	16	1,92	17	1,99	23	2,64	15	9.07
Sungai Sembilan	11,00	11,69	13,00	13,57	12	1,44	9	1,05	16	1,84	11	7.51
Medang Kampai	5,00	13,44	3,00	7,94	6	0,72	4	0,47	4	0,46	10	16.03
Kota Dumai	74,00	9,22	72,00	8,81	82	9,82	95	11,13	117	13,42	110	11.53

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025)

(3) Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan maupun penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan.Indikator ini secara langsung digunakan untuk memantau kematian terkait dengan kehamilan.

AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan ibu dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang resiko yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan dan jarak Terlalu Dekat) dan juga 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk, dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Penyebab langsung kematian ibu antara lain: eklampsi, pendarahan, partus macet, infeksi, abortus dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain: penyakit infeksi seperti malaria, thypoid serta

penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya.

Angka kematian ibu melahirkan berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas.Meningkatnya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai. Warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatannya. Penyebab kematian ibu pada umumnya karena perdarahan dan eklampsi atau pre eklampsi. Perkembangan Angka Kematian Ibu dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

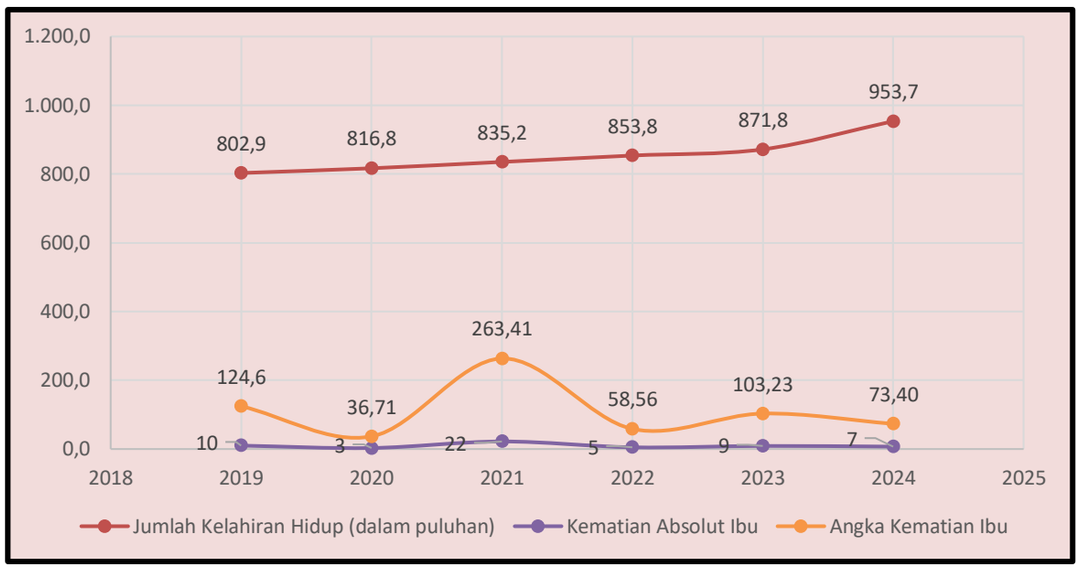
Tabel 2.71
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	8,029	8,168	8,352	8,538	8,718	9,537
Kematian Absolut Ibu	Ibu	10	3	22	5	9	7
Angka Kematian Ibu	/100.000KH	124.6	36.71	263.41	58.56	103.23	73.40

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan ibu dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan ibu balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Perkembangan Angka Kematian ibu di Kota Dumai dari tahun 2019-2024 menunjukkan kecenderungan penurunan dari 124,60/100.000 kelahiran hidup tahun 2019 menjadi 73,40/100.000 kelahiran hidup bayi di tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 10,04% per tahun.

Perkembangan tren Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup Kota Dumai menunjukkan peningkatan seiring dengan jumlah ibu melahirkan bertambah dengan pertumbuhan sebesar 3,50% per tahun atau bertambah dari 8.029 tahun 2019 bertambah menjadi 9.537 tahun 2024. Perkembangan trend Angka Kematian ibu 100.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2019-2024 pada Gambar dibawah ini.



Grafik 2.9. Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Data AKI/100.000 per kecamatan di Kota Dumai dari tahun 2019-2024 menunjukan bahwa pada tahun 2024 angka kematian ibu berasal dari Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 3 ibu, sedangkan untuk kecamatan Dumai Kota, Dumai Selatan, Dumai Barat dan Medang Kampai masing-masing sebanyak 1 ibu.

Hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi tenaga bidan dan perilaku ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan. Kriteria pencatatan data kematian ibu dan bayi di beberapa unit pelayanan kesehatan kadang berbeda-beda, seperti KTP ibu yang merupakan penduduk luar Kota Dumai atau KTP orang tua bayi yang masih Kota Dumai walaupun sudah lama pindah ke luar Kota Dumai ikut tercatat dalam registrasi salah satu penyumbang angka kematian di Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya perkembangan angka kematian ibu per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.72
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Kecamatan	Angka Kematian Bayi (/1000 Kelahiran Hidup)											
	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH
Dumai Kota	1	12,46	1	81,00	2	23,95	0	0,00	0	0,00	1	0.10
Dumai Timur	4	49,84	0	0,00	5	59,87	1	11,71	3	34,41	0	0.00
Dumai Selatan	1	12,46	0	0,00	2	23,95	1	11,71	2	22,94	1	0.10
Dumai Barat	1	12,46	0	0,00	3	35,92	1	11,71	1	11,47	1	0.10
Bukit Kapur	0	0,00	1	79,00	6	71,84	0	0,00	0	0,00	0	0.00
Sungai Sembilan	2	24,92	0	0,00	0	0,00	1	11,71	3	34,41	3	0.31
Medang Kampai	1	12,46	1	265,00	4	47,89	1	11,71	0	0,00	1	0.10
Kota Dumai	10	124,60	3	37,00	22,00	263,41	5,00	58,56	9,00	103,23	7	73,40

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025)

Hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi tenaga bidan dan perilaku ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan. Kriteria pencatatan data kematian ibu dan bayi di beberapa unit pelayanan kesehatan kadang berbeda-beda, seperti KTP ibu yang merupakan penduduk luar Kota Dumai

atau KTP orang tua bayi yang masih Kota Dumai walaupun sudah lama pindah ke luar Kota Dumai ikut tercatat dalam registrasi salah satu penyumbang angka kematian di Kota Dumai.

(4) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Pada tahun 2019-2020 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Dumai sebanyak 3 rumah sakit, tahun 2021-2022 sebanyak 4 rumah sakit, tahun 2023 sebanyak 5 rumah sakit. Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 6 rumah sakit di Kota Dumai, yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai tipe B yakni RSUD Kota Dumai, 1 rumah sakit milik BUMN tipe D yakni RS Pertamina, 1 rumah sakit milik TNI/POLRI yakni RS Bhayangkara yang mulai operasional sejak tahun 2007 (Rumah Sakit Pelabuhan sejak tahun 2007 sudah tidak operasional lagi dan berubah status menjadi Balai Pengobatan) dan 3 Rumah sakit swasta.

Rasio cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2019-2024 tersaji pada tabel dibawah ini. Dapat dilihat bahwa rasio cakupan pelayanan rumah sakit tahun 2019 adalah sebesar 0,009 dan pada tahun 2024 rasio rumah sakit meningkat menjadi 1,75. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan rasio cakupan pelayanan rumah sakit dari tahun 2019-2024. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani dan juga diiringi oleh penambahan pembangunan rumah sakit. Pada tahun 2024 per 1.000 jumlah penduduk Kota Dumai sebanyak 1,75 yang dapat dilayani oleh rumah sakit.

Tabel 2.73
Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Sakit	Unit	3	3	4	4	5	6
Jumlah Penduduk	Jiwa	308,812	316,782	321,238	328,378	338,064	343,597
Rasio Pelayanan Cakupan Rumah Sakit per 100,000 penduduk	Indek	0.009	0.001	0.001	0.012	1.50	1.75

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2025)

(5) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Dumai tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi. Jumlah dokter di Kota Dumai selama periode tahun 2019-2024 mengalami perkembangan fluktuasi, dari 134 dokter pada tahun 2019 menjadi 161 dokter pada tahun 2024.

Tabel 2.74
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokter	Orang	134	144	176	197	187	161
Jumlah penduduk	Jiwa	308,812	316,782	323,452	331,832	338,064	343,597
Rasio dokter per 1.000 penduduk	Indek	0.434	0.455	0.544	0.594	0.553	0.469
Seorang Dokter Melayani	Orang	2.305	2200	1.838	1.684	1.808	2.095

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2025)

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2024 adalah sebesar 0,469 yang artinya bahwa setiap 1.000 orang penduduk dilayani oleh 0,469 dokter. Dengan kata lain 1 orang dokter melayani 2.095 penduduk. Jumlah dokter di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuasi, ini disebabkan antara lain karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan.

Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya kriteria pendataan dokter praktek di rumah maupun di pusat pelayanan kesehatan, baik meliputi nama maupun alamatnya, sehingga dapat terjadi perhitungan ganda pada saat pendataan. Selain itu adanya pembatasan jumlah praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat menyebabkan data jumlah dokter mengalami penurunan. Selain itu pertambahan jumlah dokter lebih lambat dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk Kota Dumai, tidak dimbangi dengan pertambahan jumlah dokter sehingga yang melayani tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk. Namun demikian masuk kategori yang ditetapkan WHO bahwa seorang dokter maksimal melayani 2.500 penduduk per dokter.

(6) Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis dan para medis di Kota Dumai meliputi para dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat dan bidan. Peran tenaga medis di mata masyarakat dan dunia sangatlah penting. Tenaga medis memiliki peran sebagai garda terdepan dalam penanganan Kesehatan masyarakat. Hasil pendataan rasio tenaga medis per 1.000 orang penduduk Kota Dumai tahun 2019-2024, menunjukkan penurunan dari 4,44 tahun 2019 menjadi 4,28 pada tahun 2024, seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tenaga Kesehatan	Unit	1,370	1,179	1,146	1360	1,333	1,471
Jumlah Tenaga Medis	Orang	175	138	176	197	189	180
Jumlah Tenaga Para Medis	Orang	1,195	1,041	970	871	924	1,109
Jumlah penduduk	Jiwa	308,812	316,782	321,238	328,378	338,064	343,597

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio tenaga medis per 1000 penduduk	Indek	4.44	3.72	3.57	4.14	3.94	4.28

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025)

Jika dilhat trend ketersediaan tenaga medis dan para medis menunjukkan terjadinya peningkatan kapasitas dimana pada tahun 2019 seorang tenaga medis dan para medis melayani sebanyak 308.812 jiwa penduduk kemudian mengalami kenaikan menjadi 343.597 jiwa penduduk per seorang tenaga medis dan para medis tahun 2024.

Salah satu penyebab meningkatnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu adalah terbatasnya tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai khususnya tenaga medis yakni tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis baik di puskesmas maupun di RSUD Kota Dumai, Pada umumnya kasus kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu merupakan kasus kematian dengan rujukan ke rumah sakit.

Dengan ditetapkannya RSUD Kota Dumai menjadi rumah sakit rujukan regional oleh Pemerintah Pusat, maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien dari Kota Dumai namun juga pasien dari Kabupaten lain seperti dari Bengkalis dan Rokan Hilir. Pada tahun 2023 total tenaga medis yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak sebanyak 1.333 terdiri 46 orang dokter spesialis, 138 orang dokter umum dan 23 orang dokter gigi, namun pada tahun 2024 terjadi penambahan jumlah tenaga medis menjadi 1.471 orang yang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 47 orang, dokter umum sebanyak 114 orang dan dokter gigi sebanyak 19 orang. Dengan demikian pada tahun 2024 rasio dokter spesialis sebesar 13 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum sebesar 33 per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 5 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.76
Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai 2019-2024

Uraian Tenaga Kesehatan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter Spesialis	39	49	43	45	46	47
Dokter Umum	100	89	114	132	138	114
Dokter Gigi	22	26	19	20	23	19
Perawat	565	532	492	444	500	587
Bidan	536	415	413	427	424	453
Apoteker	65	63	20	25	29	32
Asisten Apoteker	-	-	45	48	51	46
Gizi	29	31	34	36	38	40

Uraian Tenaga Kesehatan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sanitasi	-	-	15	16	19	17
Kesehatan Masyarakat	-	-	46	39	44	59
Teknisi Medis	-	-	27	128	58	57

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025)

Jika dilihat rasio tenaga medis (dokter) dan paramedis menurut kecamatan menunjukkan bahwa terdapat semua kecamatan di Kota Dumai sudah memenuhi standar WHO yaitu 1.000 penduduk per seorang dokter, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 2.77
Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Ahli Lab Medik	Tenaga Penyuluh	Jumlah	Rasio Tenaga Kesehatan / Jumlah Penduduk
Bukit Kapur	55,910	18	3	47	70	7	5	5	4	159	2.84
Medang Kampai	19,658	7	1	33	19	2	3	2	1	68	3.46
Sungai Sembilan	48,258	12	1	26	50	4	2	3	3	101	2.09
Dumai Barat	46,515	20	4	32	68	6	6	5	9	150	3.22
Dumai Selatan	56,494	8	2	18	29	3	2	3	6	71	1.26
Dumai Timur	74,894	37	6	398	161	51	20	36	27	736	9.83
Dumai Kota	41,768	12	2	33	56	3	2	3	9	120	2.87
Kota Dumai	343,497	114	19	587	453	76	40	57	59	1,405	4.09

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025)

(7) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).

Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas perawatan dan rumah sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK (pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif).

Kasus komplikasi kebidanan yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2020-2024 berdasarkan data profil kesehatan Provinsi Riau menunjukkan bahwa di Kota Dumai dalam penangan komplikasi kebidanan sudah 100,00% sebagaimana Gambar berikut



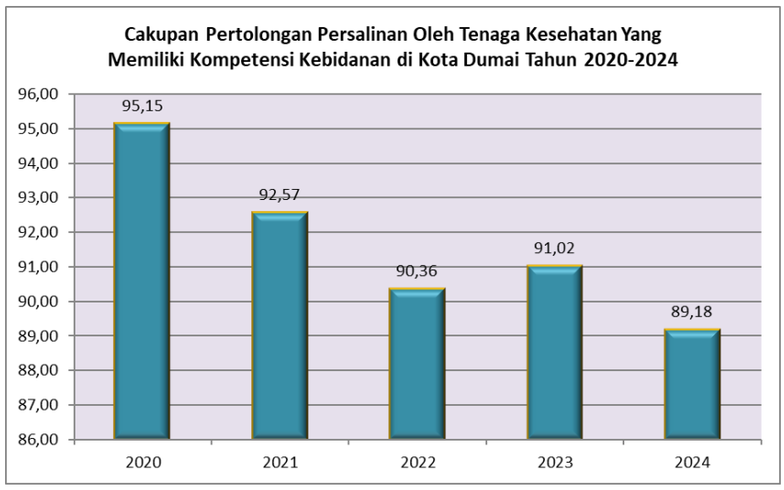
Grafik 2.10. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di RS Kota Dumai Tahun 2020-2024

(Sumber : Perda Nomor 8 Tahun 2025 Tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029)

(8) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu namun dipengaruhi pula oleh faktor yang lain, diantaranya adalah proses kelahiran/persalinan. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran.

Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, selama tahun 2019-2023 memiliki rata-rata petumbuhan yang cenderung menurun sebesar -1,79% per tahun. Berikut ini perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai.



Grafik 2.11. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2020-2024

(Sumber : Perda Nomor 8 Tahun 2025 Tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029)

Gambar diatas menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai berfluktuasi dari tahun 2020-2024. Dapat dilihat dari tahun 2020 pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mecapai 95,15% meningkat pada tahun 2024 angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sebesar 89,18%.

Jika dibandingkan dengan target indicator Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai yang menargetkan cakupan sebesar 90%, maka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai pada tahun 2020-2024 telah melebihi target nasional hanya sebesar 0,45%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya penduduk yang belum memilih tenaga kesehatan sebagai penolong kelahiran utama karena rendahnya kemampuan penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan

(9) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

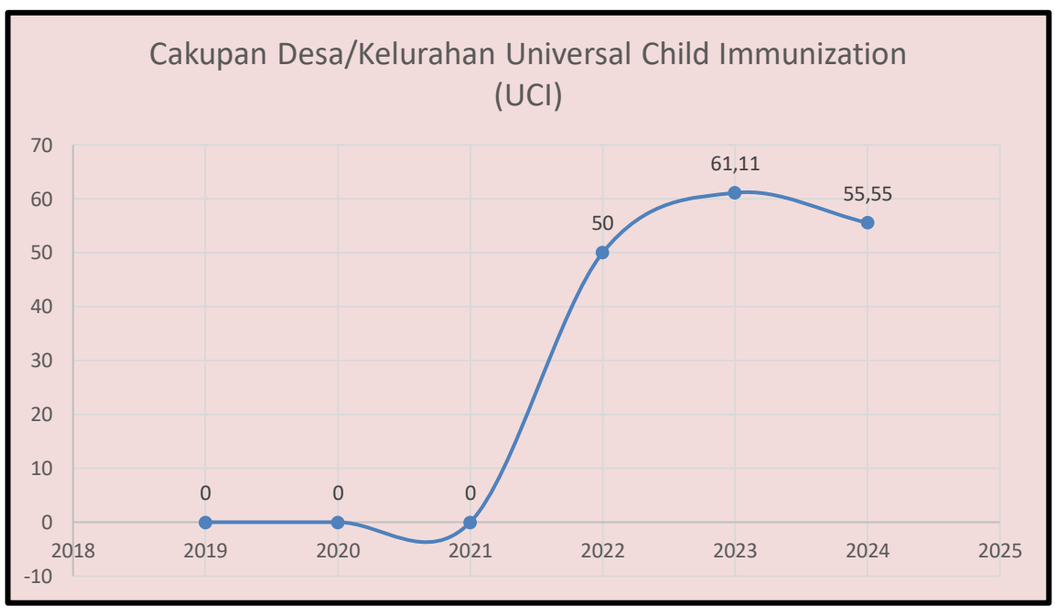
Untuk cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Dumai menunjukkan bahwa masyarakat Kota Dumai telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui Posyandu, Puskemas maupun Rumah Sakit.Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang.

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPTHBHib, 4 dosis , 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak rubella. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT.Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi kelas 1 SD sederajat diberikan vaksinasi 1 DT dan campak ruibella (MR), kelas 2 dan 5 Sd sederajat diberikan diberikan vaksinasi Td.

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi

meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis Td.Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis Td.

Kementerian Kesehatan menargetkan pada tahun 2019 seluruh desa/ kelurahan mencapai 100% UCI (Universal Child Immunization) atau 90% dari seluruh bayi di desa/kelurahan tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG, Hepatitis B, DPT-Hib, Polio dan campak. Imunisasi memberikan konstribusi besar dalam meningkatkan Human Development Index terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang. Berikut ini perkembangan cakupan kelurahan UCI di Kota Dumai. Berikut ini gambar cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Dumai tahun 2019-2024.



Grafik 2.12. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Dumai Tahun 2019-2023

Selama tahun 2019-2024, cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan yang sangat signifikan terutama pada tahun 2019-2021.Target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI, namu tidak sesuai dengan target disebabkan karena Pandemi Covid 19 tahun 2020. Dimana Posyandu balita tidak berjalan, sehingga cakupan kelurahan UCI tidak tercapai. Namun pada tahun berikutnya kelurahan UCI mengalami peningkatan dari 0% naik menjadi 50% ditahun 2022 dan terus mengalami peningkatan hingga 61,11% di tahun 2023 kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 55,55%. Angka ini masih jauh dari target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI sehingga perlu mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah Kota Dumai.

Jika dilihat cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Dumai menurut Kecamatan menunjukkan bahwa terdapat satu

Kecamatan yang mengalami pertumbuhan yang positif selama periode tahun 2019-2024 yaitu di Kecamatan Dumai Barat rata-rata sebesar 25,99% per tahun. Sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan realisa capaian cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

Tabel 2.78
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Menurut Kecamatan di Kota Dumai 2019-2024

Kecamatan	Cakupan UCI (%)												Pertumbuhan / tahun
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	Absolut	%Kelurahan	Absolut	%Kelurahan	Absolut	%Kelurahan	Absolut	%Kelurahan	Absolut	%Kelurahan	Absolut	%Kelurahan	
Dumai Kota	5	100	0	0	0	0	5	100	5	10	5	100	0.00
Dumai Timur	5	100	0	0	0	0	3	60,30	1	20	1	20	-27.52
Dumai selatan	1	20	0	0	0	0	0	0	3	60	1	20	0.00
Dumai Barat	0	0	0	0	0	0	2	50	2	50	4	100	25.99
Bukit Kapur	3	60	0	0	0	0	3	42,86	4	57.14	4	57.14	-0.97
Sungai Sembilan	0	0	0	0	0	0	4	66,67	5	83.33	4	66.67	0.00
Medang Kampai	4	100	0	0	0	0	0	0	2	50	1	25	-24.21
Kota Dumai	0	0	0	0	0	0	0	50	22	61.11	20	55.55	3.57

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2025)

Imunisasi BCG (Bacillus Celmette-Guerin) sebanyak 1 (satu) kali dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis.Imunisasi BCG diberikan segera setelah bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu) bulan di Posyandu.Imunisasi hepatitis-B sebanyak 1 (satu) kali untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan dan dapat menyebabkan pengerutan hati (sirosis) dan kanker hati. Imunisasi terhadap Balita merupakan bagian dari pelayanan kepada Balita, dimana persentase balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi di Kota Dumai.

Imunisasi Hepatitis B ini diberikan segera setelah lahir di sarana pelayanan kesehatan. Imunisasi DPT-HB sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberi kekebalan pada penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus dan Hepatitis B. Imunisasi ini pertama kali diberikan pada usia bayi 2 (dua) bulan. Kemudian imunisasi berikutnya selisihnya 4 minggu.Pada saat ini pemberian imunisasi DPT dan Hepatitis B dalam program imunisasi dilakukan bersamaan dengan menggunakan vaksin DPT-HB. Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan dari penyakit polio dan diberikan sebanyak 4 (empat) kali dengan jelang waktu (jarak) 4 minggu. Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak, diberikan pada bayi umur 9 bulan sebagaimana tersaji pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.79
Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi
Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai Tahun 2019–2024

Jenis Imunisasi	Tahun					Pertumbuhan / tahun
	2019	2021	2022	2023	2024	
BCG	84,59	67,00	90,04	83,90	79.18	-1.31
Campak	64,58	43,75	87,51	87,88	83.6	5.30

Jenis Imunisasi	Tahun					Pertumbuhan / tahun
	2019	2021	2022	2023	2024	
DPT 1, DPT 2 dan DPT 3	76,5	48,64	90,98	86,17	80.9	1.12
Polio 1. 2. 3 dan Polio 4	83,68	50,84	90,9	86,56	80.3	-0.82
Hepatitis B1. B2dan B3	81,74	48,64	90,98	88,70	96.75	3.43

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2025)

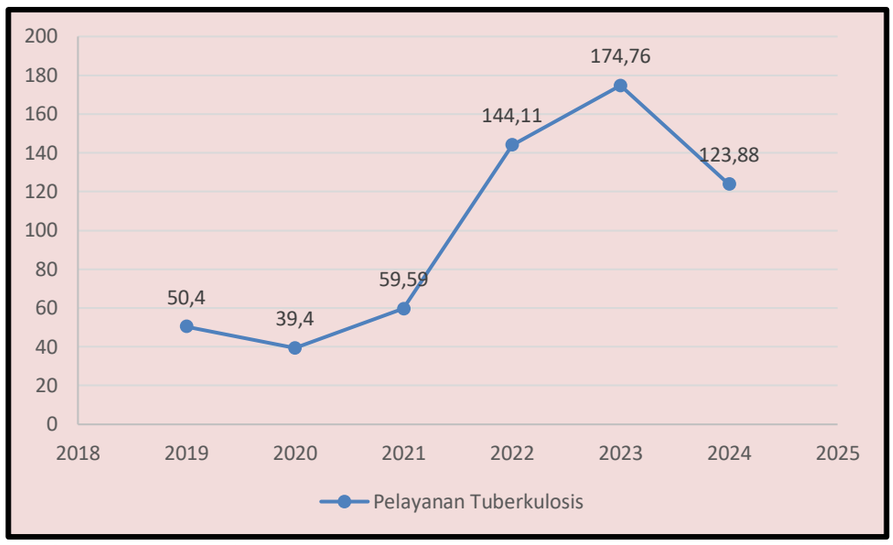
Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi di Kota Dumai dari 5 jenis imunisasi terdapat dua yang mengalami penurunan pertumbuhan yaitu jenis BCG dan Polio. Imunisasi jenis BCG di Kota Dumai mengalami pertumbuhan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,31% per tahun atau turun dari 84,59% pada tahun 2019 menjadi 79,18% pada tahun 2024, sedangkan Polio mengalami pertumbuhan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,82% per tahun atau turun dari 83,68% pada tahun 2019 menjadi 80,3% pada tahun 2024.

(10) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Untuk penanggulangan Tuberkukosis Pemerintah memberikan otoritas terhadap kabupaten/kota. Dalam penanggulangan tuberculosis, WHO telah menetapkan strategi, yang merupakan strategi cost-efektif yaitu strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang artinya pengobatanvjangka pendek dengan pengawasan minum obat langsung yang memberikan angka kesembuhan yang tinggi.

Setiap orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai stándar. Pelayanan orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis dilakukan minimal 1 kali dalam setahun berupa pemeriksaan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan dahak secara bakteriologis dan/ atau radiologis, edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan, melakukan rujukan jika diperlukan.

Cakupan pelayanan orang terduga Tuberkulosis di Kota Dumai tahun 2019-2024 sudah mulai membaik, peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2023 karena sudah melebihi 100% dan pada tahun 2024 cakupan pelayanan tuberkulosis di Kota Dumai sebesar 123,88%. Perkembangan di Kota Dumai dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Grafik 2.13. Cakupan Pelayanan Tuberkulosis (%) Kota Dumai Tahun 2019-2024
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025

Cakupan pelayanan orang terduga Tuberkulosis di Kota Dumai per Kecamatan tahun 2019-2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi ada di kecamatan Dumai Timur sebesar 33,63% per tahun atau mengalami peningkatan persentase dari 23,5% menjadi 100,13%. Meskipun sudah mengalami peningkatan pemerintah harus tetap meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kedepan cakupan yang masih rendah harus menjdi perioritas utama dalam pelayanan kesehatan. Cakupan layanan per kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019–2024

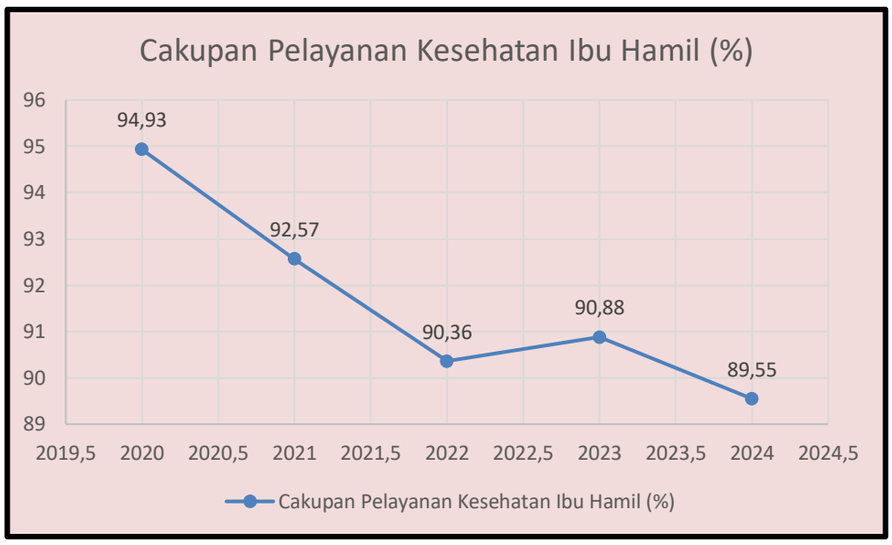
Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	Absolut	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Dumai Kota	575	55,1	686	58,4	731	59,14	1.826	142,21	1.535	121,25	1,125	114.91	15.84
Dumai Timur	346	23,5	320	17	667	31,46	1.446	69,69	1.734	86,1	1,473	100.13	33.63
Dumai selatan	568	69,7	392	36,9	1.348	113,18	3.284	226,64	3.369	207,06	1,888	142.70	15.41
Dumai Barat	562	59	491	43,1	644	48,68	2.472	199,84	4.052	342,23	1,194	124.63	16.13
Bukit Kapur	340	55,5	473	62,3	596	59,42	1.272	124,1	1.620	151,4	915	107.90	14.22
Sungai Sembilan	312	63	202	41,7	339	85,1	699	104,64	1.375	201,61	1,088	186.62	24.26
Medang Kampai	149	56,4	101	36,7	226	61,08	606	192,38	659	180,55	333	107.77	13.83
Kota Dumai	2.852	50,4	2.665	39,4	4.551	59,59	11.605	144,11	14.344	174,76	8,016	123.88	19.71

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025)

(11) Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan standar kepada ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin meliputi persalinan normal, persalinan komplikasi. Stándar persalinan normal yang dilakukan dengan Acuan Persalinan Normal (APN) yang dilakukan, sedangkan persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan

kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2019-2024 fluktuatif, belum mencapai target 100%.



Grafik 2.14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kota Dumai Tahun 2020-2024

(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025)

Dari grafik diatas dapat dilihat perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2020-2024 cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif dan belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan masih ada ibu bersalin yang tidak mau kefasilitas pelayanan kesehatan dan adanya mobilitas ibu bersalin karena factor budaya dimana ibu melakukan persalinan ditempat orang tuanya berada (luar wilayah Kota Dumai) sehingga tidak tercatat di MPDN/e-kohort (tidak terlaporkan) baik di fasilitas kesehatan maupun sesuai alamat wilayah kerja.

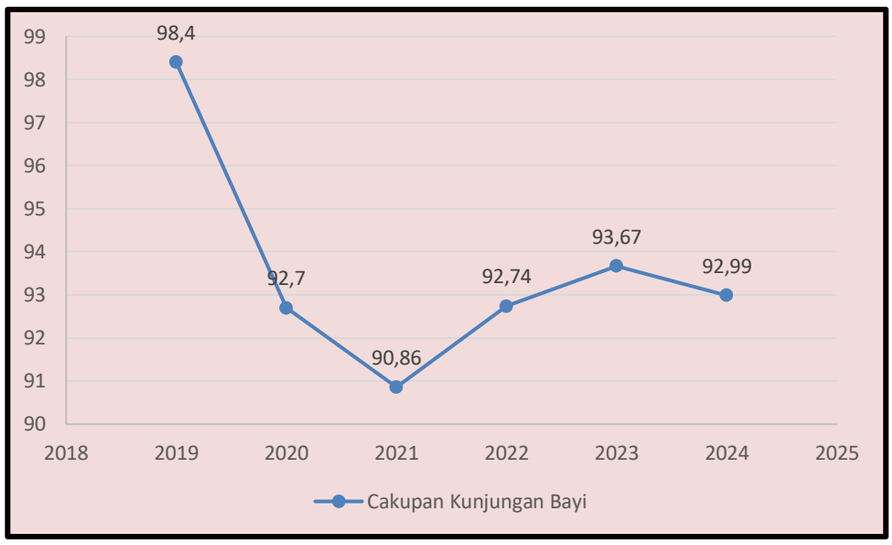
(12) Cakupan Kunjungan Bayi

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari–3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai diukur dari jumlah kedatangan ke pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dengan syarat:

a. Sampai dengan umur 1 tahun (12 bulan kurang 1 hari) sudah mendapat vitamin A sebanyak 1 kali
b. Penimbangan berat badan dilakukan minimal sebanyak 8 kali dalam 1 tahun
c. Melakukan pemeriksaan SDIDTK, yaitu pemantauan pertumbuhan perkembangan bayi (tercatat di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA)

Pada tahun 2019 cakupan kunjungan bayi sebesar 98,4% dan pada tahun 2024 sebesar 92,99%. Bila dibandingkan dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yakni sebesar 100%, maka angka tersebut belum mencapai target.



Grafik 2.15. Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2019-2024
(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025)

Perkembangan Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kota Dumai tahun 2019–2024 menunjukan trend yang fluktuatif. Berdasarkan kecamatan, pada tahun 2024 hanya Kecamatan Sungai Medang Kampai yang pencapaian cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahirnya di bawah 80%. Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru LahirMenurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019–2024

Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Dumai Kota	1.220	100,00	1.050	84,50	1.276	100,47	1.146	101,96	1.139	103,08	997	104.51	0.89
Dumai Timur	1.756	99,90	1.805	101,00	1.779	97,37	1.920	104,07	1.579	83,24	1,834	98.87	-0.21
Dumai selatan	1.348	98,60	1.341	96,40	1.377	96,84	1.363	96,74	1.438	100,63	1,510	94.61	-0.82
Dumai Barat	1.111	99,10	1.145	100,40	992	85,15	1.129	96,74	1.114	93,30	1,406	101.22	0.42
Bukit Kapur	1.155	92,40	1.021	80,30	1.048	80,55	1.162	82,41	1.360	95,57	1,449	87.6	-1.06
Sungai Sembilan	940	99,90	814	85,00	755	77,04	744	65,96	1.065	89,57	1,226	83.69	-3.48
Medang Kampai	370	99,50	397	105,00	362	93,54	454	99,78	471	97,92	446	71.47	-6.40
Kota Dumai	7.900	98,40	7.573	92,70	7.589	90,86	7.918	92,74	8.166	93,67	8,868	92.99	-1.12

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2025)

(13) Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Balita

Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Setiap balita (0-59 bulan) memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang meliputi pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul Vitamin A, pemberian imunisasi dasar lengkap, penimbangan

minimal 8 kali dalam setahun yang dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak.

Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Dumai selama periode 2017-2023 menunjukan fluktuasi dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 sebagai dampak pandemi COVID 19. Pada tahun 2024, dari pemantauan deteksi dini tumbuh kembang anak balita melalui pemantauan pertumbuhan balita di posyandu, diperoleh cakupan pelayanan kesehatan anak balita (12-59 bulan) sebesar 99,33% (25.823 anak balita). Pelayanan berdasarkan Kecamatan pada tahun 2024, capaian pelayanan tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Selatan sebesar 111,08% dan terendah Kecamatan Sungai Sembilan hanya mencapai 82,68%. Oleh karena itu kedepan untuk kecamatan yang cakupan pelayanannya masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan balita. Cakupan layanan per kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Lahir (%)												Pertumbuhan /Th
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Dumai Kota	5.026	99,2	4.766	74,5	3.178	48,57	3.930	84,19	5.360	94,12	2,670	97.98	6,36
Dumai Timur	7.247	99,3	7.638	82,9	2.081	22,1	6.629	86,51	8.368	85,6	5,621	103.4	50,13
Dumai selatan	5.608	98,7	5.686	74,6	2.460	33,56	5.830	99,59	6.334	85,95	4,530	111.08	25,91
Dumai Barat	4.587	98,5	4.648	79,1	2.397	39,9	4.666	96,25	5.474	89,01	3,461	98.88	16,11
Bukit Kapur	5.111	98,5	3.465	52,9	3.401	50,74	5.654	96,53	7.092	96,66	4,629	104.98	10,00
Sungai Sembilan	3.910	99,9	3.004	60,8	2.798	55,42	2.897	61,85	4.268	69,66	3,380	82.68	-5,94
Medang Kampai	1.529	99,2	1.720	88,3	868	43,55	1.854	98,04	1.276	51,51	1,532	86.95	4,00
Kota Dumai	33.018	99	30.927	73,5	17.183	39,92	31.460	88,71	38.172	84,96	25,823	99.33	11,64

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2025)

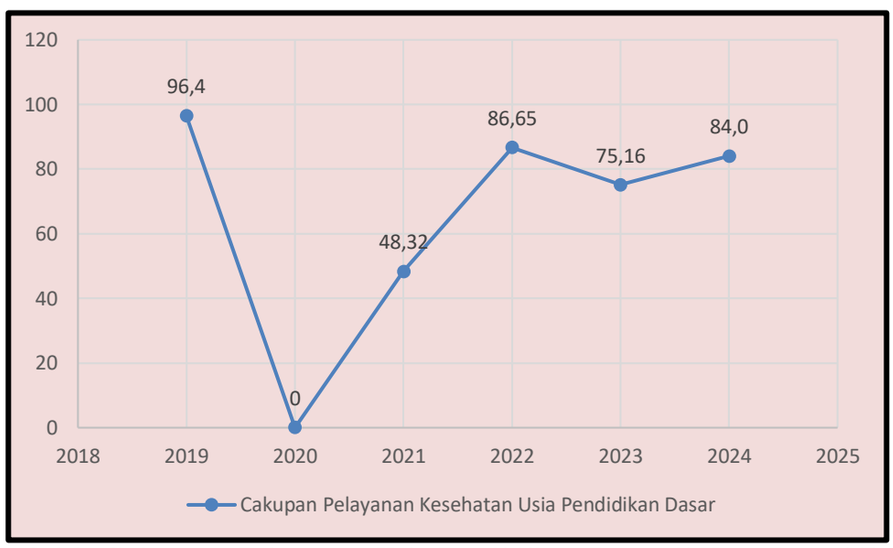
(14) Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Anak-anak merupakan kelompok besar masyarakat yang mempunyai tingkatan kesehatan lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya berdasarkan tingkat kesakitan. Meskipun demikian merupakan kelompok yang rawan terhadap penyakit dan merupakan dasar bagi pendidikan kesehatan selanjutnya. Usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan anak melalui pengelolaan di sekolah dengan program Trias UKS, yaitu menanamkan pengetahuan kesehatan pandangan dan kebiasaan hidup sehat untuk diri sendiri dan lingkungannya. Pelayanan kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan. Menciptakan lingkungan sekolah sehat dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Setiap anak pada usia pendidikan dasar usia 7 tahun – 15 tahun. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan luar satuan pendidikan dasar (pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LKPA) dan lainnya meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera. Tindak lanjut hasil skring kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan bila diperlukan, memberikan penyuluhan kesehatan.

Cakupan pelayanan usia pendidikan dasar di Kota Dumai tahun 2019-2024 cenderung mengalami penurunan, khususnya tahun 2020 disebabkan karena Pandemi Covid 19, dimana kegiatan sekolah dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau pembelajaran jarak jauh sehingga berakibat pada tidak dilaksanakannya pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar, namun kembali meningkat dan menjadi 84% pada tahun 2024. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar di Kota Dumai 2019-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Grafik 2.16. Cakupan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar di Kota Dumai Tahun 2019-2024

(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025)

Jika dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar per kecamatan di Kota Dumai dengan persentase tertinggi di tahun 2024 adalah Kecamatan Dumai Selatan sebesar 99,9% dan cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dsar terndah di kecamatan Bukit Kapur sebesar 57,7%. Oleh karena itu kedepan cakupan yang masih rendah harus menjdi perioritas utama dalam pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2019–2023

Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Dumai Kota	947	89,3	0	0	2.868	65,78	6.493	82,55	3.980	56,1	4,709	67.7	-5.39
Dumai Timur	2.080	97,7	0	0	5.047	55,88	10.721	83,02	10.867	93,57	12,996	96.0	-0.35
Dumai	2.461	98,	0	0	4.320	64,1	8.885	90,0	2.479	28,3	9,667	99.	0.36

Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
selatan		1				2		7		6		9	
Dumai Barat	1.388	97,1	0	0	2.639	39,65	7.561	92,53	3.122	38,26	7,921	96.3	-0.17
Bukit Kapur	2.100	96,9	0	0	4.136	54,9	9.121	92,41	10.920	114,9	6,323	57.7	-9.85
Sungai Sembilan	1.277	97,6	0	0	3.044	28,24	6.085	77,08	7.895	120,35	8,182	86.3	-2.43
Medang Kampai	602	91,9	0	0	1.218	39,8	2.919	91,62	2.134	62,56	2,873	73.8	-4.29
	10.855	96,4	0	0	23.272	48,32	51.785	86,65	41.397	75,16	52,671	84.0	-2.72

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2025)

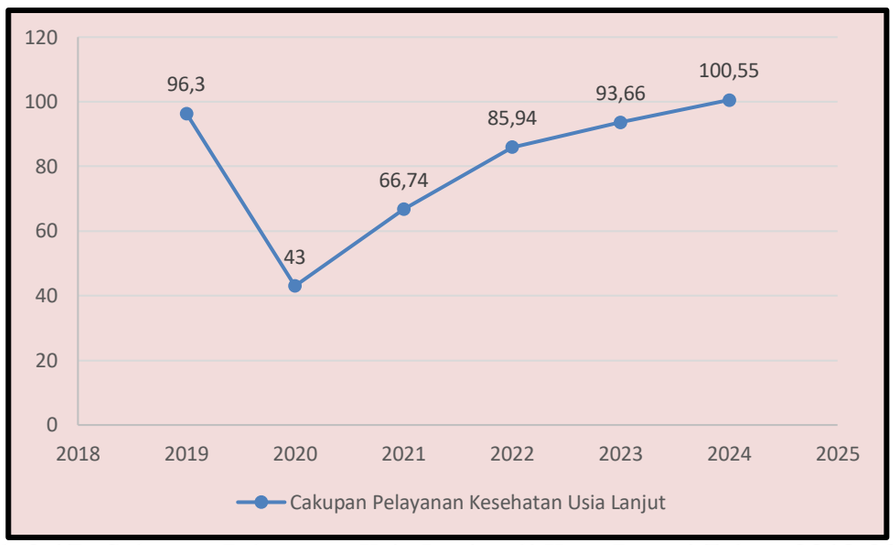
(15) Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut dibagi ke dalam 3 kategori yaitu Pelayanan kesehatan **geriatri** di masyarakat, Pelayanan kesehatan geriatri di masyarakat berbasis rumah sakit, dan Pelayanan kesehatan geriatri berbasis rumah sakit. Masalah kesehatan pada lanjut usia disebabkan oleh kemunduran sel-sel tubuh, sehingga fungsi dan daya tahan tubuh menurun serta faktor resiko terhadap penyakitpun meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh malnutrisi, gangguan keseimbangan, kebingungan mendadak. Selain itu, beberapa penyakit yang sering terjadi pada lanjut usia antara lain hipertensi, gangguan pendengaran dan penglihatan, demensia, osteoporosis, dan sebagainya.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis. Selain itu, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif. Pelayanan kesehatan lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia yang berkualitas melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat. Upaya yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain meningkatkan upaya kesehatan bagi lanjut usia di pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan Pelayanan Santun lanjut usia, meningkatkan upaya rujukan kesehatan bagi lanjut usia melalui pengembangan Poliklinik Geriatri Terpadu di Rumah Sakit, dan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi lanjut usia.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelayanan kesehatan standar pada usia lanjut dilakukan pada penduduk usia 60 tahun ke atas. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dalam bentuk edukasi, dan skrining kesehatan pelayanan kesehatan usia lanjut. Pelaksanaan skrining kesehatan pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal sekali dalam setahun meliputi pengukuran tinggi, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, anamnesa perilaku beresiko. Tindak lanjut skrining yaitu membuat rujukan dan melakukan penyuluhan kesehatan.

Berikut disajikan cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Dumai dari tahun 2019-2024. Cakupan layanan kesehatan pada usia lanjut di Kota mengalami penurunan akibat pandemic Covid-19 terutama pada tahun 2020 hanya mencapai 43% dan kembali meningkat menjadi 100,55% pada tahun 2024. Perkembangan cakupan layanan Kesehatan usia lanjut dapat dilihat pada gambar berikut.



Grafik 2.17. Cakupan Pelayanan Usia Lanjut di Kota Dumai Tahun 2019-2024
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025

Jika dilihat cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut menurut Kecamatan di Kota Dumai yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2019-2024 adalah Kecamatan Medang Kampai sebesar 4,16% per tahun dan yang mengalami pertumbuhan terendah adalah kecamatan Dumai Timur hanya sebesar 0,18%. Sedangkan pada tahun 2024 persentase cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut tertinggi adalah Kecamatan Dumai Barat sebesar 103,69% dan yang terendah ada di Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 96,88%. Dalam hal ini dibutuhkan bantuan pelaku rawat/pendamping/pramusila atau lazim disebut care giver. Oleh karenanya, peran care giver menjadi sangat penting dan perlu dikembangkan aturan, standar dan norma oleh pemerintah yang mengatur pemenuhan kebutuhan care giver termasuk pembinaan dan pemenuhan hak para care giver itu sendiri. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut menurut Kecamatan di Kota Dumai tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per Kecamatan
Kota Dumai Tahun 2019 – 2024

Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (%)												Pertumbuhan/Th
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Dumai Kota	2.114	98,4	973	44,5	1.608	71,91	1.874	94,69	1.871	96,1	3,884	100.00	0.32
Dumai Timur	3.067	99,1	1.586	50,4	1.734	53,87	2.784	85,66	2.828	84,65	5,237	100.00	0.18
Dumai selatan	2.332	96,8	864	35,3	1.512	60,36	2.062	83,04	2.237	88,84	4,635	99.00	0.45
Dumai Barat	1.869	94,7	878	43,7	1.265	61,59	1.827	88,86	2.251	107,09	3,626	103.69	1.83
Bukit Kapur	2.067	93,9	974	43,5	1.865	81,37	2.081	83,81	2.467	98,37	3,116	101.17	1.50
Sungai Sembilan	1.571	94,7	614	36,4	1.255	72,71	1.650	83,08	1.894	90,45	2,792	96.88	0.46

Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (%)												Pertumbuhan/Th
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Medang Kampai	595	90,8	302	45,3	580	85,17	646	80,55	834	98,58	1,021	111.34	4.16
Kota Dumai	13.615	96,3	6.191	43	9.819	66,74	12.924	85,94	14.382	93,66	24,311	100.55	9,40

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025)

(16) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kemiskinan dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan menderita gizi buruk, pengetahuan kesehatan kurang, perilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman buruk, biaya kesehatan tidak tersedia. Sebaliknya kesehatan mempengaruhi kemiskinan. Derajat kesehatan dapat menekan kemiskinan karena dengan masyarakat yang sehat produktivitas kerja meningkat, pengeluaran berobat rendah, investasi dan tabungan memada, tingkat pendidikan maju, tingkat fertilitas dan kematian rendah, stabilitas ekonomi mantap.

Salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan milik pemerintah adalah BPJS kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS kesehatan terdiri dari dua kelompok peserta yaitu Penerima Bantuan Iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Menurut undang – undang Penerima bantuan iuran (PBI) ditujukan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu. Pemerintah akan menanggung iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat dalam kelompok PBI tersebut. Dengan adanya program BPJS kesehatan, masyarakat miskin peserta BPJS kesehatan penerima bantuan iuran diharapkan akan lebih mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan derajat kesehatan masyarakat akan meningkat.

Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai. Pada tahun 2024 terdapat 218.198 peserta. Data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.85
Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Sumber Dana	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
APBD Kota Dumai	89.298	84.057	89.238	108.456	110.015	117.317	5.61%
APBN	62.249	74.766	75.857	85.175	103.498	100.881	10.14%
Jumlah	151.547	158.823	165.095	193.631	213.513	218.198	7.56%

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025)

Program Jaminan Kesehatan (Jamkesko) Kota Dumai dimulai sejak tahun 2009 dan teus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesko di Kota Dumai dikuatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III bagi penduduk Kota Dumai dan selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III selanjutnya diperbaharui Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Dumai bagi masyarakat Kota Dumai tahun 2019. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan jaminan kesehatan (JKN) di puskesmas, pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ke puskesmas dan pembayaran belanja premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan iuran (PBI) dari APBN maupun APBD tidak diperuntukkan seluruh masyarakat. Kartu Indonesia Sehat dari APBN dan APBD diperuntukkan untuk warga miskin kurang mampu yang memiliki NIK bagi yang mampu dianjurkan untuk mengurus sesuai ketentuan, yakni bayar premi. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan verifikasi dan validasi data PBI JKN yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan data agar terwujudnya ketepatan sasaran pemakai PBI-JKN di Kota Dumai. Perubahan data dimaksud seperti meninggal, pindah keluar kota atau telah menjadi mampu sehingga kuota yang kosong dapat dialihkan ke masyarakat lain yang tidak mampu.

(17) Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six)* dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat, Puskesmas mempunyai fungsi antara lain:

a. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
b. Pusat pemberdayaan masyarakat
c. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
d. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer

Sarana bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada yang merupakan bangunan hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena adanya pemekaran Kota Dumai, pada umumnya sudah berumur tua dan kondisinya sudah mulai rusak. Seluruh kelurahan di Kota Dumai telah memiliki poskeskel, namun masih ada sebanyak 9 poskeskel lagi yang belum memiliki bangunan sendiri (masih menumpang/menyewa). Karena minimnya anggaran di Dinas Kesehatan untuk melakukan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya termasuk poskeskel mengakibatkan tidak semua puskesmas dan jaringannya bisa dilakukan rehabilitasi secara maksimal. Dari 10 puskesmas, 13 puskesmas pembantu dan 24 poskeskel

yang ada pada umumnya kondisinya rusak ringan (di wilayah kerja puskesmas perkotaan seperti wilayah kerja puskesmas Dumai Kota, Dumai Barat, Jaya Mukti, Bumi Ayu, Purnama dan Bukit Kapur), sedang maupun berat (di wilayah kerja puskesmas pedesaan seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit Kayu Kapur dan Bukit Timah).

Tabel 2.86
Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2024

Kecamatan	Nama Puskesmas	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur
Dumai Timur	1. Jaya Mukti	1	0	0
Dumai Barat	2. Dumai Barat	1	0	0
	3. Purnama	1	0	0
Bukit Kapur	4. Bukit Kapur	0	1	10
	5. Bukit kayu Kapur	1	0	0
Sungai Sembilan	6. Sungai Sembilan	0	1	11
Medang Kampai	7. Medang Kampai	0	1	10
Dumai Kota	8. Dumai Kota	1	0	0
Dumai Selatan	9. Bumi Ayu	1	0	0
	10. Bukiit Timah	1	0	0

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, jumlah puskesmas yang ada di Kota Dumai sebanyak 10 unit terdiri dari 7 puskesmas non rawat inap dan 3 puskesmas rawat inap dengan total jumlah tempat tidur sebanyak 31 buah. Cakupan pelayanan puskesmas sampai tahun 2024 telah menjangkau seluruh Kecamatan di Kota Dumai seperti yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Adapun perkembangan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kota Dumai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai sudah mencapai standar per 100.000 orang penduduk. Tahun 2019 rasio puskesmas 3,24:100.000 artinya ada 3 pusksmas untuk 100.000 orang penduduk. Namun pada tahun 2024 turun menjadi rasio 2,91. Artinya ada 2 puskesmas untuk setiap 100.000. Jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.87
Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk
2019	308.812	10	3,24
2020	316.782	10	3,16
2021	323.452	10	3,09
2022	331.832	10	3,01
2023	338.064	10	2,96
2024	343,597	10	2.91

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025)

Cakupan efektif adalah sebagian dari manfaat kesehatan potensial, yang lebih kepada sistem kesehatan yang sesungguhnya diterima dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas puskesmas yang tersedia. Pelayanan yang berkualitas harus mempertimbangkan beberapa aspek dimensi

jumlah kualitas sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya safety/keamanan, patient focus (Pelayanan yang berfokus pada pasien). Technical kompetence (Kompetens teknis yang di miliki oleh pemberi layanan kesehatan).

Selama periode tahun 2019-2024 jumlah puskesmas di Kota Dumai statis tidak mengalami penambahan tetap sebanyak 10 unit. Namun karena jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga perkembangan rasio puskesmas per 100.000 penduduk cenderung menurun.

(18) Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu di Kota Dumai sampai dengan tahun 2023 sebanyak 12 unit yang tersebar di beberapa kelurahan. Jumlah puskesmas pembantu di Kota Dumai cenderung statis, sehingga rasio puskesmas per kecamatan juga statis. Pada tahun 2021 ada pengalihan fungsi Puskesmas Pembantu (Pustu) Rimba Sekampung di Kecamatan Dumai Kota menjadi Poskeskel Rimba Sekampung sehingga jumlah pustu berkurang menjadi 12 unit. Berikut sebaran Puskesmas Pembantu di Kota Dumai.

Tabel 2.88
Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2024

No.	Kecamatan	Nama Puskesmas Pembantu
1	Bukit Kapur	Pustu Gurun Panjang
		Pustu Kampung Baru
2	Medang Kampai	Pustu Pelintung
3	Sungai Sembilan	Pustu Suka Damai
		Pustu Kampung Sejati
		Pustu Simpang Pulai
		Pustu Basilam Baru
		Pustu Sungai Teras
		Pustu Bulu Hala
		Pustu Batu Teritip/Tianjung
		Pustu Sungai Sepit
4	Dumai Barat	Pustu Bagan Keladi
5	Dumai Selatan	-
6	Dumai Timur	-
7	Dumai Kota	-
8	Kota Dumai	-

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025)

Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari tahun 2019 sampai tahun 2024 jumlah puskesmas pembantu yang ada berkurang yang semula 13 pukesmas pembantu menjadi 12 pukesmas pembantu pada tahun 2024. Cakupan Puskesmas Pembantu seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Puskesmas	10	10	10	10	10	10

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Puskesmas Pembantu	13	13	12	12	12	12
Jumlah Seluruh Kecamatan	7	7	7	7	7	7
Rasio puskesmas per Kecamatan	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

(19) Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

a. Semua puskesmas harus memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam, kondisi saat ini baru 4 puskesmas di 4 Kecamatan yang memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam yaitu: puskesmas Medang Kampai, Sungai sembilan, Bukit kapur dan Dumai barat.
b. Puskesmas wajib memiliki kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana, kondisi saat ini di Kota Dumai rata- rata puskesmas baru memiliki ± 45% dari 100% kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana.

Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis dan terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai. Kondisi di atas menyebabkan petugas kesehatan sulit dalam menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan masyarakatpun sulit mengakses sarana pelayanan kesehatan.

Dengan kondisi wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan yang luas dan juga memiliki daerah sulit dijangkau, serta kondisi jalan dan infrastruktur lainnya yang belum memadai mempengaruhi akses masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan rujukan ke RSUD Kota Dumai khususnya pasien gawat darurat atau rujukan kasus maternal neonatal resti dan komplikasi. Meskipun ada tersedia puskesmas keliling air (speedboat), namun karena jumlahnya hanya 1 unit dan muatannya juga terbatas, maka belum bisa melayani seluruh pasien rujukan khususnya yang berada di daerah sulit. Tidak jarang kasus kematian pasien rujukan terjadi di perjalanan sebelum tiba di rumah sakit karena medan yang sulit sehingga jarak tempuh menjadi lama.

Disamping itu, masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Misalnya, masih ada puskesmas yang belum memiliki IPAL, generator set (Genset), sarana air bersih (SAB) seperti sumur bor dalam. Masih ada puskesmas yang tidak memiliki ambulans padahal seluruh puskesmas telah mempunyai pelayanan kegawatdaruratan (UGD),

sedangkan puskesmas yang memiliki ambulans kondisinya sudah mulai rusak.

Tabel 2.90
Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2024

No	Lokasi	Jenis	Pengadaan Tahun
A	**Pengadaan IPL**		
1	Laboratorium Dinas Kesehatan	IPAL	2015
2	Puskesmas Bukit Kapur	IPAL MRC 10	2016
3	Puskesmas Medang Kampai	IPAL MRC 10	2016
4	Puskesmas Sungai Sembilan	IPAL MRC 10	2016
5	Puskesmas Dumai Kota	IPAL BARTEC	2017
6	Puskesmas Jayamukti	IPAL BARTEC	2017
7	Puskesmas Dumai Barat	IPAL BARTEC	2017
8	Puskesmas Bukit Timah	IPAL Bio Wash 5m3	2020
9	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	IPAL FLASH TIPE ECO 1 5M3	2021
10	Puskesmas Purnama	IPAL FLASH TIPE ECO 3 5M3	2021
B	**Pengadaan IPL SW 100**		
1	Puskesmas Medang Kampai	Steril Wave 100	2019
2	Puskesmas Purnama	Steril Wave 100	2019
C	**Pengadaan IPAL**		
1	Laboratorium	IPAL FLASH TIPE ECO 3 3-10M3	2021

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025)

Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai statis pada tahun 2024. Seluruh puskesmas sudah memiliki IPAL termasuk Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.

Meskipun 2 dari 10 puskesmas se Kota Dumai telah memiliki alat pengolah sampah medis yakni SW 100, permasalahan pengelolaan sampah medis baik di puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan mandiri di Kota Dumai masih menjadi kendala utama karena belum tersedia di Kota Dumai. Padahal permasalahan pengelolaan sampah medis merupakan salah satu prioritas Nasional.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan hampir miskin tahun 2023 sebesar 151.547 orang khusus jaminan untuk masyarakat miskin berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jamkesmas dan Jamkesda ini merupakan jaminan kesehatan yang sama-sama diperuntukkan bagi warga miskin.namun, ruang lingkup berbeda. JAMKESMAS adalah program yang ruang lingkupnya lebih luas yang diperuntukan untuk warga miskin di seluruh indonesia. Sesuai namanya, Jamkesda ini diberikan kepada warga miskin oleh pemerintah daerah suatu kabupaten atau provinsi.

Dari 10 puskesmas hanya puskesmas Dumai Barat yang belum memiliki genset. Ada 4 puskesmas yang sudah memiliki genset tapi belum memiliki rumah genset yakni puskesmas Bumi Ayu, puskesmas Bukit Timah, puskesmas Purnama dan puskesmas Bukit Kayu Kapur. Selain itu ada 2 puskesmas yang belum memiliki sumur bor dalam yakni puskesmas Bumi Ayu dan puskesmas Bukit Kayu Kapur.

Tabel 2.91
Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor
Dalam Tahun 2024

No	Nama Puskesmas	Jenis Sarana		Keterangan
		Genset + Rumah	Sumur Bor Dalam	
1.	Dumai Kota	2017/2018	2017	
2.	Dumai Barat	-	2017	Sumur bor tidak berfungsi
3.	Sungai Sembilan	2017/2019	2017	Sumur bor tidak berfungsi
	Sungai Sembilan		2021	
4.	Bukit Kapur	2017/2019	2017	Sumur bor tidak
	Bukit Kapur		2022	
5.	Medang Kampai	2017/2019	2017	Sumur bor tidak berfungsi
	Medang Kampai		2021	
6.	Jaya Mukti	2017/2019	2017	
7.	Bumi Ayu	2021	-	Tanpa rumah genset
8.	Bukit Timah	2021	2019	Sumur bor sudah dipernaiki tahun 2022. Tanpa rumah genset
9.	Purnama	2021	2019	Tanpa rumah genset
10.	Bukit Kayu Kapur	2021	-	Tanpa rumah genset

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025)

(20) Penyakit Menular dan Tidak Menular

Potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi akan meningkatkan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko. Adanya peningkatan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko dari Tahun 2021 (0,011%). Tahun 2022 (0,093%) dan pada tahun 2023 jumlah kasus HIV di Kota Dumai secara kumulatif ada 74 kasus dengan prevalensi rate 0,022% terhadap penduduk beresiko HIV di Kota Dumai. Jumlah remaja usia 15-24 tahun yg telah mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS diKota Dumai sejak tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023 secara berurutan berjumlah 587 jiwa, 1.162 jiwa dan 1.118 jiwa . pada tahun 2023 prevalensi HIV di Kota Dumai 0,02% dengan jumlah kasus HIV 74 penderita dari estimasi 7.400 penduduk yang beresiko.

Kota Dumai merupakan daerah beresiko malaria, merupakan ciri khas daerah tropis dengan hutan bakau, dan letak geografis Kota Dumai yang berbatasan dengan daerah endemis malaria yaitu kabupaten rohil dan Kabupaten bengkalis. Walaupun Kota Dumai sudah eliminasi malaria namun tetap dilakukan penguatan surveilans agar tidak terjadi KLB. Angka kesakitan malaria Kota Dumai Tahun 2023 0,015 per 1000 penduduk dari target 1/1000 penduduk, dengan jumlah kasus 5 penderita malaria.

Permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai yang menjadi perhatian setiap tahunnya adalah penyakit DBD, yang merupakan penyakit potensial terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa). Penyakit DBD sering menyerang anak – anak dan sering menyebabkan kematian. Angka kesakitan demam berdarah dengue pada tahun 2023 mengalami peningkatan kasus yang sangat signifikan ada 664 kasus dengan insidens rate (angka kesakitan sebesar 196,41/100.000) dari 186 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan PE DBD & lavarsidasi selektif

untuk 664 kasus dengan melakukan Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk.

Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai, namun kasus DBD belum bisa ditekan secara maksimal. Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti seperti perubahan cuaca yang ekstrim yang berakibat adanya banjir, tingkat mobilitas penduduk masih tinggi, belum tersedianya sarana pembuangan air limbah (SPAL) dan sarana pembuangan sampah yang memenuhi standar dan ± 80% penduduk Kota Dumai masih menggunakan bak/drum sebagai tempat penampungan air, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD. Kondisi ini menjadikan Kota Dumai sebagi daerah endemis penyakit Demam Berdarah dan bila tidak dilakukan upaya-upaya secara intensif dapat terjadi peningkatan kasus dan potensial menimbulkan KLB.

Upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus. Selain itu perlu juga didukung oleh ketersediaan peralatan fogging yang cukup dan layak. Saat ini peralatan fogging yang tersedia jumlahnya terbatas dan kondisinya sudah banyak yang rusak karena terlalu sering digunakan.

Penyakit TB paru merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Menurut data WHO pada 2015, Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia terkait masalah tuberculosis Dengan kasus terbanyak di negara India, kemudian diikuti oleh Indonesia, Tiongkok, Filipina, Pakistan, Nigeria dan Afrika Selatan.

Permasalahan penyakit TB di Kota Dumai makin kompleks, karena masih banyak penyakit TB yang belum terdeteksi di masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami gejala TB dan juga relevansi terhadap risiko terkena TB dan semakin meningkatnya kasus TB yang resistan (MDR Multy drug Resistan). Pada tahun 2023 Kasus penemuan TB di Kota Dumai yaitu ada 904 kasus yang ditemukan di Kota Dumai, untuk diobati sehingga dapat memutuskan rantai penularan di Kota Dumai. Pada tahun 2023 angka kesembuhan TB Paru sebesar 90,83% dari 904 kasus TB BTA (+) yg mengalami kesembuhan ada 812 kasus

Penyebab Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan, yang merupakan permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai. Diare

dapat terjadi karena keracunan makanan, infeksi kuman, dan stres. Angka kesakitan diare semua umur di Kota Dumai selama tahun 2023 sebanyak 3.180 penderita atau IR IR 9,41/1000.

Gaya hidup sehat bisa mencegah hadirnya berbagai penyakit tidak menular. Hipertensi dan Diabetes malitus. Pada tahun 2023 Hipertensi tercatat 2.280 Penderita (0,67%) dan Diabetes Melitus tercatat 758 Penderita (0,22%) perlu menjadi perhatian karena jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi komplikasi lebih berat yang menyebabkan kematian dan beban biaya pengobatan yang sangat besar. Berdasarkan penyebab kematian di Kota Dumai tahun 2023, pada umumnya penyebab kematian didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM) seperti Diabetes Militus, Asma, Kecelakaan, Stroke, Hypertensi dan kanker. Penyakit tidak menular (PTM) umumnya dipengaruhi oleh keadaan demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya seperti meningkatnya umur harapan hidup, adanya kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan seperti pencemaran udara dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta makin tingginya paparan faktor resiko seperti merokok, pola aktifitas fisik (kurang olah raga), pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat. Sebagian besar penderita tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk saat ini perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, perlu mendapatkan layanan cepat. Pada tahun 2023 Kota Dumai melakukan pelayanan kesehatan jiwa 481 (97,60%). Screening, pemeriksaan leher rahim pada tahun 2023 dilaksanakan pada 402 (0,85%) dari sasaran 47.244 wanita kelompok usia reproduktif 30 – 50 tahun dengan IVA positif sebanyak 21 kasus (5,2%) dan terdapat tumor 1 kasus (0,3%).

Selama satu dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Kota Dumai sedang mengalami tripple burden penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit-penyakit tidak menular (PTM) mulai mendominasi pola penyakit rawat jalan terbesar baik di rumah sakit maupun puskesmas seperti penyakit Hipertensi, Diabetes Mellitus, Gastritis, dan penyakit jantung. Sedangkan penyakit menular baik itu penyakit menular berbasis lingkungan seperti DBD, Malaria, TB Paru dan penyakit menular seksual seperti HIV AIDS masih tetap merupakan permasalahan kesehatan utama di Kota Dumai. Disamping itu penyakit neglected diseases seperti kusta dan filariasis masih terus dilakukan pengendalian dan pencegahan. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah tidak ditemukan lagi kecuali campak.

(21) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Persentase rumah tangga yang mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meningkat, namun pencapaiannya masih jauh dari target

yang ditetapkan. Salah satu indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang pencapaiannya rendah adalah perilaku merokok. Konsumsi rokok meningkat secara pesat dari tahun ke tahun dan saat ini Indonesia merupakan negara nomor 3 (tiga) dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan III (bulan September) tahun 2015 Propinsi Riau, pada kelompok makanan, pengeluaran untuk tembakau dan sirih menempati urutan ke tiga tertinggi setelah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi termasuk minuman beralkohol, dan pengeluaran untuk padi-padian. Ini menunjukan bahwa konsumsi rokok telah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan dan merupakan epidemi yang mengancam terutama di bidang kesehatan karena menyebabkan penyakit jantung dan kanker yang dapat berujung pada kematian. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan kesehatan perokok dan orang lain yang terpapar asap rokok, tetapi mengancam ekonomi keluarga masyarakat miskin. Ironisnya, pelaku konsumsi rokok tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada remaja dan anak sekolah, Hal ini sebagai dampak dari maraknya iklan di media penyiaran dan media luar ruang serta pemberian sponsor oleh industri tembakau. Berbagai upaya untuk pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan di Kota Dumai telah dilakukan salah satunya melalui penetapan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 11 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Dumai, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan, Meskipun Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Nomor 7 Tahun 2011.

Pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok telah ditetapkan, namun masih banyak dijumpai orang yang merokok di angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang lainnya yang notabene telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ini menunjukan kebijakan pengendalian dampak konsumsi rokok belum didukung oleh semua pihak. Oleh sebab itu, upaya pengendalian dampak konsumsi rokok harus dilaksanakan secara komprehensif sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) lainnya yang pencapaiannya juga rendah adalah perilaku memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Salah satu penyebab masih tingginya angka kesakitan malaria dan DBD adalah karena masih rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Padahal upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD dan Malaria adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus.

(22) Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan

Walaupun ketersediaan obat dan vaksin cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya masih belum

sesuai standar. Penggunaan obat generik sudah cukup tinggi, tetapi penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh masih rendahnya penerapan formularium dan pedoman penggunaan obat secara rasional. Di lain pihak, penduduk yang mengetahui tentang seluk-beluk dan manfaat obat generik, masih sangat sedikit, Pengetahuan masyarakat tentang obat secara umum juga masih belum baik.

Berdasarkan Laporan Indikator Peresepan di Puskesmas Tahun 2022 ditemukan beberapa puskesmas belum menggunakan obat secara rasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan obat-obatan antibiotik yang tinggi pada kasus ISPA Non Pneumoni masih di bawah angka batas rasional (20%). Demikian juga penggunaan obat-obatan antibiotik yang tinggi pada kasus Diare Non Spesifik di puskesmas Bukit jaya mukti (15,39%) sudah melebihi angka batas rasional (8%).

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada kegiatan pengawasan obat dan makanan:

a. Apotik

   Ditemukannya tidak tertibnya pengadministrasian kartu stok obat, ditemuannya penyimpanan obat yang bercampur dengan produk bukan obat di dalam lemari pendingin, ditemukannya penyimpanan obat tidak dengan wadah asli, dan ditemukannya penjualan produk jamu tanpa izin edar POM. Masih ada ditemukan yang tidak memiliki apoteker penanggung jawab yakni 1 apotik dari 41 apotik yang ada.

b. Toko Obat

   Penemuan paling banyak adalah toko obat tidak memiliki izin atau izin toko obat yang sudah mati dan belum diperpanjang, tidak tertibnya pengadministrasian surat pesanan dan faktur pembelian obat, ditemukannya produk obat yang sudah kadaluarsa, ditemukannya penjualan obat keras (obat daftar G), dan ditemukannya penjualan produk jamu dan kosmetik tanpa izin edar POM. Masih banyak ditemukan toko obat yang tidak memiliki Asisten Apoteker penanggung jawab yakni sebanyak 22 toko obat dari 30 toko obat yang ada.

c. Toko Makanan dan Minuman

   Permasalahan-permasalahan yang ditemukan paling banyak adalah kurangnya kebersihan toko dan kerapian penataan/penyusunan barang sehingga terlihat berantakan yang bisa mempengaruhi mutu produk, ditemukannya produk pangan luar negeri tanpa izin edar POM, ditemukannya produk pangan rumah tangga tanpa izin edar IRTP, ditemukannya produk berbahan kimia berdekatan dengan produk makanan, ditemukannya penjualan obat berlogo biru, ditemukannya produk pangan yang rusak dan kadaluarsa, ditemukannya produk pangan frozen menggunakan izin IRTP dan

ditemukannya penjualan kosmetik tanpa izin edar POM. Pada tahun 2019, jumlah toko makanan minuman yang ada di Kota Dumai sebanyak 198 sarana.

d. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan paling banyak adalah IRTP tidak memiliki kelengkapan dokumen produksi seperti tidak mencatat jumlah bahan yang digunakan, jumlah yang produksi, jumlah yang diedarkan sehingga tidak bisa menelusuri bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; ruang produksi yang sempit dan kebanyakan bergabung dengan dapur untuk memasak kebutuhan dibersihkan; tidak tersedianya sarana pembersihan/pencucian sesuai standar.

Selain itu, mutu sarana produksi makanan umumnya masih belum baik, akibat kurang efektifnya pengawasan dan pembinaan. Masih ada ditemukan IRTP dan jajanan anak sekolah yang masih menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam proses pengolahan makanan dan minumannya seperti formalin, boraks dan bahan pewarna berbahaya.

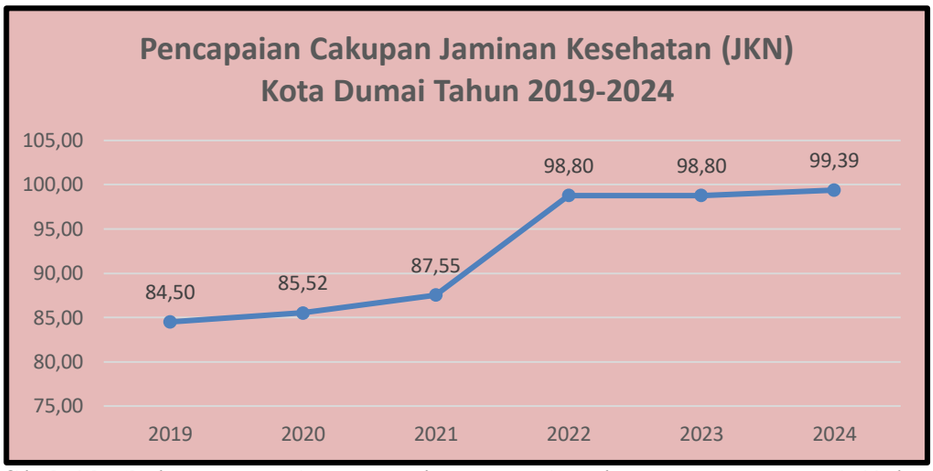
(23) Jaminan Kesehatan

Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 218.198 orang yang terdiri dari Peserta PBI APBN sebanyak 100.881 orang dan peserta PBI APBD sebanyak 117.317 orang.

Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah bukan saja memenuhi kewajiban pemerintah tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu. Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Dumai telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rujukan di puskesmas-puskesmas se Kota Dumai yakni sebanyak 234.966 pasien rawat jalan, sebanyak 19.491 pasien rawat inap dan sebanyak 43.373 pasien rujukan.

Pertumbuhan penduduk Kota Dumai ditandai dengan adanya window opportunity di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif. Jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2024 adalah 349.389 orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,26% pertahun berdasarkan hasil dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai 2024, maka jumlah penduduk Kota Dumai diperkirakan akan meningkat pada tahun selanjutnya. Demikian juga masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin dan mendekati miskin bertambah, dan ini menyebabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka. Cakupan jaminan

kesehatan di Kota Dumai pada tahun 2024 sebesar 99,39%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah.



Grafik 2.18. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Tahun 2019-2024.

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025)

(24) Penyelarasan Arah Kebijakan Kota Dumai dalam mendukung Prioritas Provinsi Riau tahun 2026 dalam Program Riau Sehat

Kelengkapan penyelarasan arah Kebijakan Pemerintahan Kota Dumai dalam mendukung prioritas Provinsi Riau tahun 2026, dalam Program Riau Sehat dengan rincian kegiatan meliputi:

a. Penguatan *Universal Health Coverage* dan Peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Riau:
   - Budget Sharing Premi Penduduk yang Didaftarkan ke dalam Program JKN segmen PBPU dan BP Pemda sebanyak 100.567 Jiwa
   - Premi Penduduk yang Didaftarkan kedalam Program JKN segmen PBPU dan BP Pemda sebanyak 35.312 Jiwa
   - Dukungan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang Belum Memiliki Jaminan Kesehatan ….Jiwa (Rp.) (bagi penduduk Kota Dumai yg belum memiliki jaminan kesehatan dan akan berobat dengan menujukkkan KK atau KTP akan dilayani secara Gratis)
   - Dukungan biaya rujukan untuk pasien tidak mampu (transport/ akomodasi/makan minum) Rp. 564.983.800

b. Penanganan stunting dan wasting agar menyampaikan data, meliputi:
   - Penyediaan PMT Balita gizi buruk/bumil: Rp. 161.393.750
   - Penyediaan PMT lokal Puskesmas: kegiatan ini menggunakan dana DAK NON FISIK (masih menunggu Pagu)
   - Penyediaan layanan terkait intervensi spesifik dan sensitif: kegiatannya adalah monitoring dan evaluasi program gizi ke puskesmas yang ada di Kota Dumai

c. Penguatan posyandu, agar menyampaikan data, meliputi:
   - Pelatihan kader posyandu sebanyak: 1.360 Orang pada 201 Posyandu
   - Peningkatan sarpras posyandu: tersedianya antropometri
   - Dukungan operasional posyandu: Rp 4.59.0505.406,43 untuk posyandu yang berada 7 kecamatan di Kota Dumai

d. Peningkatan layanan Fasyankes, agar menyampaikan data, meliputi:

- Peningkatan sarpras Pustu, PKM, RSUD terdiri atas 10 puskesmas dengan 1 Rumah Sakit Umum Daerah dan 12 PUSTU
- Pembangunan Pustu, PKM, RSUD (tidak ada pembangunan pustu, puskesmas dan RSUD)

e. Pencegahan wabah dan penyakit menular, meliputi:
- Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, BMHP skrining
- skrining TBC dilakukan kepada kontak erat penderita TB aktif, pasien HIV, Pasien DM, Anak Gizi Buruk, Penghuni Lapas, Penghuni Panti Sosial, orang dengan gejala TB dan Lingkungan Kumuh
- monev investigasi kontak dilakukan pemeriksaan TCM/Tuberkulin, dan pemberian TPT
- Pelatihan petugas kesehatan dalam penanggulangan wabah penyakit menular

f. Peningkatan kapasitas tenaga medis, meliputi:
- Tugas belajar/beasiswa dokter/nakes : terdapat 64 orang yang sedang melaksanakan tugas belajar

g. GERMAS, agar menyampaikan data, meliputi:
- Regulasi (pangan sehat, dll)
  1. Surat edaran Wali Kota Dumai Nomor 26 Tahun 2025 tentang Senam Bersama dan *Car Free Day*
  2. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Dumai
- Edukasi dan pembinaan (sekolah, lingkungan sehat)
  - melakukan penyuluhan ke sekolah dan masyarakat
- Deteksi dini penyakit
  - Dengan melaksanakan Screening penyakit tidak menular

2.1.3.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

Terdapat beberapa indikator dalam urusan pekerjaan umum yakni indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari Ibukota Kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat).

Tabel 2.92
Capaian SPM Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu	Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM					**57,94%**
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari–hari				15,88%	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				13,15%	
	A.Jumlah Yang Harus Dilayani	323.452	53.152	270.300	16,43%	
	Persentase Capaian Mutu Layanan Dasar (20%)				2,73%	
	B.Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu	Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM					**57,94%**
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic				100%	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80%	
	A.Jumlah Yang Harus Dilayani	323.452	323.452	0	100%	
	Persentase Capaian Mutu Layanan Dasar (20%)				20%	
	B.Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi				100%	

(Sumber: Laporan SPM Kota Dumai Tahun 2025)

(1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, dicapai salah satunya dengan membangun konektivitas untuk mencapai keseimbangan. Selain itu untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri dan konektivitas serta membangun sistem dan jaringan transportasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap didapatkan dari formula panjang jalan kondisi baik (Km) ditambah panjang jalan kondisi sedang (Km) dibagi dengan panjang jalan seluruhnya (Km). Perhitungan proporsi panjang jaringan jalan mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Tabel 2.93
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Uraian	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang jalan kondisi baik	Km	420,31	401,15	401,15	530,84	549,48	524.162
Panjang Jalan kondisi sedang	Km	161,8	172,8	172,8	145,04	86,65	67.843
Kondisi Jalan Mantap	**Km**	**582,11**	**573,95**	**573,95**	**675,88**	**636,13**	**592.005**
Panjang jalan kondisi rusak ringan	Km	35,78	42,78	42,78	172,27	158,79	147.158
Panjang jalan kondisi rusak berat	Km	580,35	581,51	581,51	350,09	403,31	329.419
Kondisi Jalan Tidak Mantap	**Km**	**616,13**	**624,29**	**624,29**	**522,36**	**562,1**	**476.577**
Panjang jalan seluruhnya	Km	1198,24	1198,24	1198,24	1198,24	1198,24	1068.58
Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	48.58	47.90	47.90	56.41	53.09	55.40

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2025)

Melihat tren yang terjadi di Kota Dumai, proporsi kondisi jalan mantap menunjukan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan naik dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2024. Pada tahun 2019

proporsi jalan kondisi mantap sebesar 48,58% dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 55,40%.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap diukur untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani pergerakan lalu lintas. Pada Tabel tersaji kondisi jalan di Kota Dumai per kecamatan pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2.94
Kondisi Jalan di Kota Dumai Per Kecamatan Tahun 2023-2024

Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Kondisi Jalan							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Bukit Kapur	171,67	66,87	76,28	91,96	42,74	7,00	5,65	20,32	44,62
Dumai Barat	180,58	99,57	93,41	88,21	24,99	19,37	17,74	9,16	19,25
Dumai Kota	61,26	52,55	56,17	59,95	5,71	3,60	3,33	2,92	1,42
Dumai Selatan	132,42	102,01	100,02	90,09	11,24	8,25	6,87	8,06	11,07
Dumai Timur	142,32	107,42	110,90	97,58	19,49	14,27	13,55	9,44	7,94
Medang Kampai	291,86	56,2	58,69	41,56	12,54	26,36	12,25	40,64	23,26
Sungai Sembilan	218,14	46,23	52,51	54,82	28,33	7,81	8,46	81,73	51,24

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2025)

Pada tahun 2024 panjang jaringan jalan di Kota Dumai dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 51,28% menjadi 49,05% pada tahun 2024. Dengan panjang jalan kondisi baik di tahun 2023 sepanjang 547,956 Km menjadi 524,162 Km di tahun 2024.

1) Rasio Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat

Indikator rasio panjang jalan dilalui roda empat didapatkan dari hasil pembagian antara jumlah panjang jalan (km) dengan jumlah penduduk. Berikut adalah tabel yang menampilkan hitungan indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai.

Tabel 2.95
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang jalan seluruhnya (km)	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1,068.58
Jumlah Penduduk	303.292	316.782	323.452	330.471	338.064	349.389
Rasio Panjang jalan dengan Jumlah Penduduk	3,99	3,7	3,7	3,63	3,52	3.06

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2025)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator rasio panjang jalan yang dilalui roda empat berfluktuatif dari 3,99 pada tahun 2019 menjadi 3,06 di tahun 2024.

2) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk (Realisasi)

Formula yang digunakan untuk penghitungan rasio tempat ibadah persatuan penduduk adalah dengan membagi antara indikator jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dan kemudian dikalikan dengan bilangan 1000.

Tabel 2.96
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2019 – 2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,92	1,87	1,83	1,83	1.89	1.95
Masjid	221	235	235	235	252	283
Mushola	231	236	236	236	283	292
Gereja Kristen	81	81	81	83	85	89
Gereja Katolik	6	6	6	7	6	6
Pura	1	1	1	1	1	1
Vihara	7	7	7	7	7	7
Klenteng	47	26	26	37	4	4

(Sumber: Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Dumai, 2025)

Hasil yang ditunjukkan oleh indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Salah satu penyebabnya diduga adanya perubahan jumlah tempat ibadah dari tahun ke tahunnya, namun fluktuasi rasio tempat ibadah tersebut tidak selalu sebanding dengan jumlah tempat ibadah karena ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu jumlah penduduk Kota Dumai yang selalu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai jumlah tempat ibadah di kota dumai pada tahun 2024 sebanyak 682 unit yang terdiri dari Mesjid, Mushola, Gereja Prostetan/Katolik, Pura, Vihara, Kelenteng sehingga di dapatkan bahwa dengan jumlah penduduk Kota Dumai 349.389 jiwa artinya untuk persatu unit rumah ibadah menampung 512 orang,

Hingga tahun 2024 rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai masih sangat kecil, yakni 1,95. Namun, sebenarnya ada ukuran lain yang harus diperhatikan yaitu luas tempat ibadah karena biasanya satu tempat ibadah dapat menampung banyak umat. Selain itu, tempat ibadah juga dapat dipakai berkali-kali dalam satu hari sehingga memungkinkan para umat untuk bergantian dalam menggunakannya.

3) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Indikator rumah tangga pengguna air bersih didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Air minum/air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sumber-sumber air yang digunakan oleh rumah tangga sebagai sumber air minum/air bersih antara lain: air kemasan/isi ulang, sumur bor/pompa/leding, sumur terlindung, air hujan, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sumber utama air minum semakin mudah. Disisi lain juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait penggunaan air bersih untuk kesehatan juga semakin meningkat.

Satu-satunya perusahaan daerah yang menyelenggarakan fungsi memproduksi air minum di Kota Dumai adalah PDAM. Pelanggan pengguna air bersih PDAM Kota Dumai menunjukkan angka yang naik seperti yang tersaji pada Table dibawah ini.

Tabel 2.97
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah tangga pelanggan air bersih PDAM	279	672	1,052	4,348	8,780	12,256
Jumlah rumah tangga	91,553	94,441	82,478	83,898	82,958	84,516
Persentase Rumah tangga pengguna air (%)	0,30%	0,71%	1,28%	5,18%	13,94%	18,08%

(Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tahun 2025)

Dari Tabel di atas diketahui bahwa jumlah pelanggan air bersih PDAM di Kota Dumai tahun 2019-2024 mengalami peningkatan, semula 279 rumah tangga pada tahun 2019 menjadi 12.256 rumah tangga pada tahun 2024. Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

4) Penyediaan Sumber Air Baku

Pelayanan air minum penduduk perkotaan di Kota Dumai dilakukan oleh PDAM Kota Dumai. Untuk mencukupi kebutuhan air penduduk perkotaan di Kota Dumai, PDAM memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Mesjid. Air baku ini diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jalan Jenderal Sudirman Dumai dengan sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Di Kota Dumai terdapat 4 Skema SPAM yang terdiri dari :

1. SPAM KPBU Kota Dumai (Kapasitas 450 lpd (Unsolicited))
   Sumber Air Baku SPAM KPBU Kota Dumai berasal dari Sungai Masjid, Kapasitas IPA : 450 LPD dibagi 3 tahapan yaitu Tahap 1.a IPA paket baja 50 LPD telah selesai tahun 2019 dan telah beroperasi, Tahap 1.b IPA Beton 200 lpd telah selesai dibangun tahun 2022 dan telah beroperasi dan Tahap 2 IPA Beton 200 LPD direncanakan akan mulai dibangun pertengahan tahun 2024, SPAM KPBU Kota Dumai telah memiliki Izin pengambilan air baku (SIPPA) melalui SK Menteri PUPR RI nomor 1145,6/KPTS/M/2029 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dumai Tirta Bersemai Untuk Usaha Air Minum Di Sungai Masjid Kota Dumai Provinsi Riau.

2. SPAM HFNF NUWSP (Kapasitas 50 lpd)
   Sumber Air Baku SPAM HFNF NUWSP berasal dari Sungai Masjid. Kapasitas IPA terpasang 50 LPD dengan Teknologi membran Hollow Fiber Nano Filter (HFNF) dan merupakan bantuan Bank Dunia melalui Program NUWSP (2021). SPAM HFNF NUWSP telah memiliki Izin pengambilan air baku (SIPPA) melalui SK Menteri PUPR RI nomor 1145,6/KPTS/M/2019 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber

Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dumai Tirta Bersemai Kota Dumai Untuk Usaha Air Minum Di Sungai Masjid Kota Dumai Provinsi Riau.

3. SPAM Regional Durolis

   Sumber Air Baku SPAM REGIONAL DUROLIS berasal dari : Sungai Rokan Kabupaten Rokan Hilir. Kapasitas : IPA Tahap I 400 LPD Dimana Kota Dumai mendapat air curah sebesar 150 LPD di tahun 2022. SPAM Regional Durolis merupakan SPAM kewenangan Provinsi yang kelola oleh UPT Air Minum Provinsi Riau dengan wilayah pelayanan air minum di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Dumai. Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis dengan total rencana pembangunan IPA sebesar 1,500 LPD yang dibagi dalam IV tahapan pembangunan. (Tahap I IPA Kap. 400 LPD, tahap IPA Kap,II 400 LPD. Tahap III IPA Kap. 400 LPD dan Tahap IV IPA Kap. 300 LPD) dimana Tahap I IPA Kapasitas 400 LPD telah selesai dibangun di Tahun 2022 dan mulai beroperasi dengan target layanan air minum untuk Kota Dumai sebesar 12.000 SR akan tetapi kondisi eksisting saat ini air curah yang mengalir ke Kota Dumai hanya mampu sebesar 80 LPD dikarenakan adanya permasalahan pada jaringan pipa distribusi dari Offtake SPAM Melawai ke Offtake Reservoar Booster (RB) KM. 9 Mekar Sari Kota Dumai.

4. SPAM B TO B Wilayah Pelayanan Medang Kampai (Kapasitas 125 lpd)

   Sumber Air Baku SPAM B TO B berasal dari Sungai Kemeli. Kapasitas : IPA membrane Hollow Fiber Nano Filter (HFNF) Kapasitas 125 LPD progres saat ini masih dalam tahap konstruksi akhir. SPAM B TO B telah memiliki Izin pengambilan air baku (SIPPA) melalui SK Menteri PUPR RI nomor 1058/KPTS/M/2023 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dumai Tirta Bersemai Kota Dumai Untuk Usaha Air Minum Di Sungai Kumeli Kota Dumai Provinsi Riau.

5) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Kondisi sanitasi Kota Dumai saat ini masih perlu peningkatan dan perbaikan. Dalam hal perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dari tahun ke tahun mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 ditargetkan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan BABS. Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Kesehatan telah berupaya meningkatkan sanitasi lingkungan baik dalam bentuk sarana dan prasarana fisik maupun bentuk pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.98
Perkembangan Penyediaan Sanitasi Rumah Tangga
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Jenis Imunisasi	Tahun				
	2019	2021	2022	2023	2024
Persentase perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	5,08	7,17	7,3	3,5	-
Persentase kepemilikan jamban Cubluk	1,50	1,72	2,39	2,63	2,22
Persentase kepemilikan Tangki Septik individual	94,93	92,83	95,49	-	83,2
Persentase pengolahan air limbah domestic system komunal	-	-	-	-	-
Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	1	1	1	1

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2025)

Masyarakat di Kota Dumai saat ini masih didapati memiliki jamban cubluk dimana air limbah domestiknya belum diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Namun telah terjadi penurunan kepemilikan jamban cubluk dari tahun ke tahun karena adanya program pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa tangki septik individual dan komunal.

Kota Dumai saat ini sudah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) namun belum beroperasi dikarenakan belum terbentuknya kelembagaan serta Perda Air Limbah Domestik. Diharapkan jika beroperasi pengolahan air limbah domestik masyarakat akan maksimal dan mengurangi dampak pemcemaran lingkungan akibat limbah domestik khususnya limbah tinja manusia.

2.1.3.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

(1) Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu :

a) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (*sufficient living space*);
b) memiliki akses terhadap air minum layak;
c) memiliki akses terhadap sanitasi layak;
d) ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton / genteng / seng / kayu / sirap; dinding terluas berupa tembok / plesteran, anyaman bambu / kawat, kayu / papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer / granit / keramik / parket / vinil / karpet / ubin / tegel / teraso / kayu / papan / semen / bata merah.

Dengan menggunakan variabel terkait, dapat dihitung persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau pada tahun 2024 yaitu sebesar 91,55%. Sejak tahun 2019,

rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi kriteria : kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita, memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan ketahanan bangunan. Di bawah ini data terkait persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kota Dumai.

Tabel 2.99
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	78,61	82,31	84,76	75,63	81,3	86,16

(Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025)

Ketersediaan air minum layak merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Kota Dumai, kondisi akses rumah tangga terhadap air minum layak masih menjadi tantangan utama seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan wilayah perkotaan, dan keterbatasan sumber daya air baku. Rumah tangga di Kota Dumai memperoleh sumber air minum dari berbagai alternatif diantaranya sumber air minum layak yang meliputi air perpipaan melalui sambungan rumah PDAM, sumur terlindung, air isi ulang yang memenuhi standar, serta sumber mata air terlindung. Berikut data terkait persentase rumah tangga berdasarkan sumber air minum bersih dan persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum layak.

Tabel 2.100
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang berdasarkan Sumber Air Minum Bersih	87,9	90,7	90,39	94,05	86,9	97,66

(Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau, 2025)

Tabel 2.101
Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Terhadap Air Minum Layak di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak	87,42	88,25	89,76	90,07	90,47	92,24

(Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau, 2025)

(2) Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin

Kepemilikan rumah layak huni masih belum mampu didapatkan oleh sebagian masyarakat, terlihat jelas dengan adanya permukiman-permukiman kumuh bahkan di wilayah kota besar. Masih banyak warga

negara yang belum memiliki akses mendapatkan haknya atas rumah yang layak huni akibat keterbatasan finansial. Sebetulnya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negara terhadap perumahan yang layak, baik pembangunan rumah secara langsung melalui BUMN, kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah, mendorong keterlibatan pihak swasta melalui legislasi dan pemberian insentif, hingga kemudahan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan.

Pada tahun 2024 jumlah rumah tangga Kota Dumai yaitu 107.537, jika diasumsikan satu rumah tangga sama dengan satu rumah. Namun data dimana jumlah rumah layak huni dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 yaitu 20.242 unit, sehingga angka rasio rumah layak huni Kota Dumai tahun 2024 yaitu 18,82%. Berikut tabel perkembangan tingkat kepemilikan rumah layak huni penduduk dan bagi rumah tangga miskin Kota Dumai.

Tabel 2.102
Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tangga	71.480	73.305	75.234	77.181	79.151	107.537
Jumlah Penduduk	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	349.389
Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga termasuk Miskin	18.945	19.349	19.469	19.855	20.133	20.242
Rasio Rumah Layak Huni	26,37	26,40	25,88	25,73	25,44	18,82

(Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025)

(3) Jumlah Kawasan Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah rawan banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Dari data yang yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai, diketahui Luas wilayah produktif/Area Peruntukan Lain (APL) non hutan di Kota Dumai adalah seluas 51.146,39 Ha. Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai RTRW adalah 202.199 Ha. Sedangkan luas wilayah rawan banjir adalah 20.653,87 Ha. Sehingga perbandingan antara Luas APL dan Luas kawasan budidaya kurang lebih sebesar 25,29%.

Berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 050.13/576/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Dumai, pada tahun 2024 kawasan kumuh di Kota Dumai yaitu sebesar 165,32 Ha. Jumlah Rumah tidak layak huni Kota Dumai pada tahun 2024 yaitu sebanyak 7.664 Unit berdasarkan update data e-rtlh.

Tabel 2.103
Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun						Sumber Data
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Kawasan Kumuh (Ha)	38,45	33,75	Tahap I: 0	191,88	191,88	165,32	Tahap I (tuntas): SK Walikota Dumai Nomor 922 tahun 2021
			Tahap II: 216,73				Tahap II (sedang ditangani): SK Walikota Dumai Nomor 050.13/576/2024
Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	1,412	1,068	948	562	284	175	Olah data LKIP Dinas Perkim Tahun 2024
		9,724	9,739	9,353	7,773	7,664	Update data e-rtlh

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025)

(4) Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Formula yang didapatkan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2019 berdasarkan luas kawasan kumuh Kota Dumai yang telah tertata dari luas kawasan kumuh 216,73 Ha. Berdasarkan Rancangan Perda Kota Dumai tentang RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 luas permukiman Kota Dumai yaitu 27.687,63 Ha sehingga dengan menggunakan variabel terkait dapat disampaikan rasio permukiman layak huni Kota Dumai yaitu 0,99. Hal ini tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Dumai untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Dumai sehingga menghasilkan permukiman yang lebih tertata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, luas permukiman Kota Dumai yaitu 27.687,63 Ha. Pada tahun 2024, luas kawasan kumuh di Kota Dumai yaitu 165,32 Ha. Dengan menggunakan variabel terkait, didapatkan persentase luas permukiman yang tertata di Kota Dumai yaitu 99,40%. Hal ini tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Dumai untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Dumai sehingga menghasilkan permukiman yang lebih tertata. Adapun lokasi lingkungan dan permukiman kumuh perkotaan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan
Kota Dumai Tahun 2024

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)
Bintan	Dumai Kota	Bintan	7.38
Kota Jadi	Dumai Kota	Dumai Kota, Sukajadi	18.58
Rimbas	Dumai Kota	Rimba Sekampung	10.76
Palas	Dumai Timur	Tanjung Palas	6.21
STDI Sesai	Dumai Barat	Pangkalan Sesai, Simpang Tetap Darul Ihsan	27.65
Bagan Nama	Dumai Barat	Bagan Keladi, Purnama	19.36
Ratu Sima	Dumai Selatan	Ratu Sima	0

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)
Bukit Sari	Dumai Selatan	Mekar Sari, Bukit Timah	19.29
Lubuk Penyembal	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung, Tanjung Penyembal	17.15
Guntung Mundam Makmur	Medang Kampai	Guntung, Teluk Makmur, Mundam	38.94
Total			**165.32**

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025)

SPM Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 pada lampiran II dengan mutu pelayanan yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

Pada tahun 2024, penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota dilaksanakan pada 10 unit rumah, dengan persentase capaian mutu yaitu 100%.

Tabel 2.105
Capaian SPM Perumahan Rakyat Kota Dumai Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu	Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM					**100%**
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Morban Bencana Kab/Kota				100%	
	Tidak Terjadi Bencana					
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Tekena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				100%	
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah				80%	

(Sumber: Laporan SPM Kota Dumai Tahun 2025)

(5) Prasarana dan Sarana Utilitas

Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas merupakan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan dan acuan dalam penerapan program-program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

Meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas pada kawasan perkotaan ini perlu untuk disikapi dan diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah terkait. Hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena tersebut dapat membangkitkan banyak permasalahan perkotaan terutama yang terkait dengan ketersediaan dukungan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir perkembangan kawasan perkotaan akan menimbulkan permasalahan antara lain: (a) tidak meratanya penyediaan infrastruktur perkotaan, dan (b) tidak tersedianya lingkungan permukiman yang layak, tidak terkendalinya pembangunan

permukiman pada daerah-daerah non-permukiman, dan (d) terjadinya permukiman kumuh.

Tabel 2.106
Perkembangan Penyediaan Jalan Lingkungan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020*)	2021	2022	2023	2024
Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di Kecamatan (%)	3,95	0,26	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Jalan Lingkungan Terbangun	129	129	129	144	161	179
Jumlah Drainase Ligkungan Terbangun	29	33	33	39	40	43

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025)

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai telah berkontribusi dalam rangka pembangunan/peningkatan infrastruktur dasar di Kota Dumai di antaranya melalui pembangunan jalan (semenisasi) dan drainase lingkungan. Pada tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan sebanyak 15 ruas jalan lingkungan dan 6 titik drainase lingkungan. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung kegiatan masyarakat terutama di kawasan permukiman untuk dapat mengakses ke berbagai lokasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan sosial di Kota Dumai.

1) Rasio Bangunan ber-IMB

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dari tahun 2018 sampai dengan 2022 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah di terbitkan sebanyak 971 IMB dan PBG dengan rincian sebagai berikut, tahun 2018 sebanyak 236 IMB. Tahun 2019 sebanyak 308 IMB, tahun 2020 sebanyak 208 IMB, tahun 2021 sebanyak 131 IMB dan Tahun 2022 sebanyak 88 PBG, berkas permohonan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai (DPMPTSP) seluruhnya telah diterbitkan tidak ada yang ditolak berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada bahwasanya berkas yang masuk ke DPMPTSP berdasarkan SOP berkas telah lengkap. Sejak Tahun 2023 terkait perizinan pada Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mengeluarkan lagi izin semenjak menggunakan System Online Single Submission (OSS).

2.1.3.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

(1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja merupakan perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada variabel rasio jumlah polisi pamong praja menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Rasio jumlah polisi pamong praja dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000, dengan demikian kita akan mengetahui berapa besar pekerjaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja, bila melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Dumai dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dari 2,96 satpol PP per 10,000 penduduk tahun 2019 menjadi 4,26 satpol PP per 10.000 penduduk tahun 2024. Kenaikan rasio satpol pp per 10.000 penduduk sampai tahun 2024 tersebut masih dianggap belum memenuhi rasio jumlah pamong praja per 10.000 jumlah penduduk yang semakin bertambah terus menerus sehingga terjadi ketidakseimbangan rasio jumlah pamong praja di Kota Dumai. Pada Tahun 2024, Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja mengalami kenaikan dikarenakan adanya perekrutan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) yang berstatus Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK).

Tabel 2.107
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Polisi Pamong Praja	89	98	111	122	127	149	10.86
Jumlah penduduk per 10.000*	30,06	31,68	32,35	33,18	33,81	34,93	3,05
Rasio jumlah pamong praja	2,96	3,09	3,43	3,68	3,76	4,26	7,55

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2025)

(2) Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Berdasarkan Permendagri No, 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri No.62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, target nasional pelaksanaan patroli siaga trantibum adalah sebanyak 3 kali dalam sehari. Cakupan patroli petugas Satpol PP Kota Dumai dari dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.108
Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	80	97,25	100	100	100	100	4.56

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2025)

Tabel 2.109
Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Tahun 2024

No.	Nama	SKPD
1	YUDA PRATAMA PUTRA,S.STP	SATPOL PP
2	ALDI LUBIS, S.Sos, M.IP	SATPOL PP
3	ADI IRWANTO, S.Sos	SATPOL PP
4	DARMANSYAH, S.Sos, M.IP	SATPOL PP

No.	Nama	SKPD
5	ARMEN, S.H, M.si	SATPOL PP
6	AHMAD SAPAWI, S.H	SATPOL PP
7	GANDA PRAWIRANATA, S.STP, M.Si	SATPOL PP
8	MUHAMMAD ARIF RUFLIANDI, SH,M.M	SATPOL PP
9	IBNU ROYAN, S.Sos, M.Si	DINAS PERDAGANGAN
10	BELLY MARINDRA, SH	DINAS PERDAGANGAN
11	ONI SASTRAWAN, ST	DISKOPAR
12	INDRA JAYA, SH	KELURAHAN BANGSAL ACEH
13	MOHD. NASRUN, S.Sos	KELURAHAN BANGSAL ACEH
14	IRAWAN SUKMA, AP, M.Si	BPBD
15	HERMAN SUSILO, SH	INSPEKTORAT
16	OKTO PERMADI, S.Sos	DINAS PERHUBUNGAN
17	H. ZULKIFLI, SH	DINAS PERHUBUNGAN
18	ISHAK	DINAS PERHUBUNGAN
19	SURYANTO, S.Sos	DINAS PERHUBUNGAN
20	EFENDI, A.Md,PKB	DINAS PERHUBUNGAN
21	FIRMAN, Amd, LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN
22	MISPANTIYONO	DINAS PERHUBUNGAN
23	MELFEDRY	BAPENDA
24	HERI SUPRAPTO,S.Sos	PEMADAM KEBAKARAN
25	YULJEFRI, SE	KECAMATAN DUMAI KOTA
26	MOHAMMAD SOBIRIN	KECAMATAN DUMAI KOTA
27	DISKOMINFOTIKSAN	DISKOMINFOTIKSAN
28	ANDI AZIZ, SH	DINAS PERINDUSTRIAN
29	TENGKU SAADIAH	DINSOS
30	AMRIZAL ANARA	DKPKB
31	RAHMAN SYAHPUTRA,A.Md	KELURAHAN BATU TERITIB
32	MUHAMMAD YUNUS	SEKRETARIAT DAERAH KOTA
33	EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si	KESBANGPOL
34	IRDA RISMA, ST	KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL
35	HARYATI, SE,MAP,AK,CA	BPKAD

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2025)

(3) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) merupakan perbandingan antara pelanggaran K3 yang terselesaikan dengan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP.

Berdasarkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Dumai pada tahun 2019 ada sebanyak 166 kasus dan pada tahun 2024 kasus pelanggaran K3 di Kota Dumai berhasil diselesaikan sebanyak 1.866 kasus. Sedangkan dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi kenaikan kasus pelanggaran k3 yang sangat besar seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.110
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	166	178	238	1.164	1.755	1886	62.59

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun, 2025)

Tabel 2.111
Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kota Dumai Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu	Total Pencapaian
	Kategori Pencapaian SPM TRANTIBUM					**93,33%**
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab/Kota (TRANTIBUM)				93,33%	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80%	
	A.Jumlah Yang Harus Dilayani	168	168	0	100%	
	Persentase Capaian Mutu Layanan Dasar (20%)				13,33%	
	B.Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi				66,67%	

(Sumber: Laporan SPM Kota Dumai Tahun 2025)

(4) Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, petugas Linmas yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat pada tahun 2019-2023 adalah sebanyak 1.600. Karena interaksi dengan masyarakat, maka anggota Linmas bertugas untuk membantu tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.597	1.598	1.599	1.599	1600	1984

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun, 2025)

(5) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan perbandingan antara 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru dengan 1 Wilayah kerja kabupaten /Kota. Adapun realisasi cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) adalah sebesar 30%. Cakupan ini adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra Bencana, Pada saat Bencana, Pasca Bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinir.

(6) Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari rentang waktu tahun 2019-2024 menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2019 kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sabanyak 9 kegiatan dan meningkat menjadi 22 kegiatan di tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 19,57% per tahun. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.113
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	9	16	22	17	21	22	19.57

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun, 2025)

(7) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Dumai dari rentang tahun 2019-2024 berjumlah 1 (satu) kegiatan. Anggaran untuk kegiatan pembinaan politik daerah Kota Dumai dari tahun 2019-2023 tidak tersedia. Data Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut:

Tabel 2.114
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan pembinaan politik daerah	-	-	-	-	-	1

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025)

(8) Resiko Bencana Kebakaran Permukiman

Salah satu permasalahan yang sampai saat ini menjadi isu penting untuk ditangani dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah meningkatnya resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman, Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya manajemen pengurangan resiko bencana, khususnya kebakaran rumah penduduk/permukiman, Untuk Kota Dumai angka kejadian bencana kebakaran rumah penduduk/permukiman pada tahun 2019 terdapat 34 kasus kebakaran rumah, dan menurun secara signifikan di tahun 2020 menjadi 20 kasus, Pada tahun 2021 terjadi sebanyak 29 kasus rumah yang terbakar lalu pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 48 kasus, kemudian pada tahun 2023 menurun sebanyak 46 kasus, Banyaknya kejadian bencana di Kota Dumai selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.115
Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Banyak Kejadian Kebakaran Rumah Penduduk	34 Kasus	20 Kasus	29 Kasus	48 Kasus	46 Kasus	-
Banyak Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan	355 Ha	138,95 Ha	159,45 Ha	51,7 Ha	119,85 Ha	234,15 Ha
Banyak kejadian Banjir	-	-	5 Lokasi	0 Lokasi	0	7

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					Lokasi	Lokasi

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun, 2025)

(9) Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat adalah perbandingan antara Jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang di tindak lanjuti dengan jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima. Untuk tahun 2024, jumlah laporan dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diterima sebanyak 70 laporan dan yang ditindak lanjuti sebanyak 70, capaian kinerja sebesar 100%.

Untuk indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan), diperoleh dari perbandingan Jumlah Pelanggaran K3 yang di selesaikan dibandingkan dengan Jumlah Pelanggaran K3 dimana dalam tahun 2024 jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan sebanyak 802 kasus dari 802 kasus pelanggaran yang ditemukan, capaian kinerja 100%.

(10) Persentase Penegakan PERDA

Persentase penegakan PERDA merupakan perbandingan antara Jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan dibandingkan dengan jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi, pada tahun 2024 jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan sebanyak 12 dari 12 Peraturan Daerah yang memuat sanksi tersedia, capaian kinerja 100%

Rendahnya capaian kinerja Persentase Penegakan Peraturan Daerah disebabkan:

a. Belum maksimalnya koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar SKPD pemangku peraturan daerah yang memuat ketentuan sanksi pidana,sehingga didalam penegakan perda terkesan tidak berjalan dengan maksimal dilapangan.
b. Perlu segera dibentuk tim terpadu percepatan penegakan peraturan daerah kota dumai yang didalamnya terdiri dari seluruh SKPD pemangku perda yang memuat ketentuan sanksi pidana.
c. Perlu segera melakukan pendataan perda yang tidak berlaku lagi atau perda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan waktu saat ini, sehingga dalam melaksanakan penegakan perda yang memuat ketentuan sanksi pidana bisa lebih fokus dan terarah.

2.1.3.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Program dan Kegiatan dibidang sosial yang terkait dengan pengentasan kemiskinan adalah program perlindungan dan jaminan sosial pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota. Dalam memperbaiki layanan dan administrasi program bantuan sosial di masyarakat. Pemerintah pusat melaksanakan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kegiatan ini bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui dinas sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi data penduduk miskin yang layak mendapatkan bantuan. Proses pemadanan data masih berlangsung hingga saat ini dan akan terus disempurnakan secara berkala mengingat sifat data yang dinamis.

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI, penerapan SPM merupakan acuan dalam target pencapaian kesejahteraan sosial, pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota,

Pencapaian SPM Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebesar 100% dari 5 (lima) capaian Indikator SPM. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos nomor 8 tahun 2012).

Tabel 2.116
Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu	Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM					**93,58%**
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				96,92%	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80%	
	A.Jumlah Yang Harus Dilayani	212	212	0	100%	
	Persentase Capaian Mutu Layanan Dasar (20%)				16,92%	

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu	Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM					**93,58%**
	B.Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi				84,62%	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti				91,67%	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80%	
	A.Jumlah Yang Harus Dilayani	6	6	0	100%	
	Persentase Capaian Mutu Layanan Dasar (20%)				11,67%	
	B.Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi				58,33%	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				92,31%	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80%	
	A.Jumlah Yang Harus Dilayani	108	108	0	100%	
	Persentase Capaian Mutu Layanan Dasar (20%)				12,31%	
	B.Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi				61,54%	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				95%	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80%	
	A.Jumlah Yang Harus Dilayani	56	56	0	100%	
	Persentase Capaian Mutu Layanan Dasar (20%)				15%	
	B.Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi				75%	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota				92%	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80%	
	A.Jumlah Yang Harus Dilayani	317	317	0	100%	
	Persentase Capaian Mutu Layanan Dasar (20%)				12%	
	B.Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi				60%	

(Sumber: Laporan SPM Kota Dumai Tahun 2025)

1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sebagai berikut.

Tabel 2.117
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Penyandang	2020	2021	2022	2023	2024
1	Disabilitas Sensorik	111	105	47	141	3
2	Disabilitas Fisik	34	25	31	12	156
3	Disabilitas Intelektual	149	57	10	2	0
4	Disabilitas Mental	26	22	53	23	44
5	Disabilitas Ganda	27	66	32	24	9
	Total	**347**	**275**	**173**	**202**	**212**

(Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025)

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berikut :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat
3. Penyediaan permakanan
4. Penyediaan Sandang
5. Penyediaan alat bantu
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
9. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
10. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
11. Layanan rujukan
12. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan

2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti, Jumlah anak terlantar 6 orang

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berikut :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan permakanan
3. Penyediaan Sandang
4. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social
6. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
7. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga

8. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
9. Layanan rujukan
10. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar
11. Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan

3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, Jumlah 108 Orang

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berikut :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat
3. Penyediaan permakanan
4. Penyediaan Sandang
5. Penyediaan alat bantu
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
9. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
10. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
11. Layanan rujukan
12. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan

4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, Jumlah 56 Orang

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berikut :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat
3. Penyediaan permakanan
4. Penyediaan Sandang
5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social
7. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
8. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
9. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
10. Layanan rujukan
11. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan

5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berikut :

1. Penyediaan permakanan
2. Penyediaan Sandang
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
5. Pelayanan dukungan Psikososial

Tabel 2.118
Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kota Dumai

No	Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bencana Sosial	42	27	36	144	222	313
2	Bencana Alam	12	66	1222	123	246	4
	Total	**54**	**93**	**1258**	**267**	**468**	**317**

(Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025)

Saat ini sebutan PMKS berubah menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang pengertiannya adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos nomor 5 tahun 2019. Perubahan sebutan PMKS menjadi PPKS dilakukan mulai tahun 2022. Data PPKS pada Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2019-2024 tersaji pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.119
Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun						Satuan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial							
Penduduk rawan Sosial dan Sarana							
1), Anak Jalanan	0		0	0	0	0	Jiwa
2), Gepeng (Gembel dan Pengemis)	12	10	0	48	93	57	Jiwa
3), Fakir Miskin	18,794	21008	41419	47,346	44,779	46,789	KK
4), Bayi Terlantar	307	307	307	0	0	0	Jiwa
5), Anak Terlantar	2132	25	5	7	16	7	Jiwa
6), Lanjut Usia Terlantar	571	423	303	1,21	1,714	1571	Jiwa
7), Penyandang Cacat Jiwa	425	347	186	595	460	111	Jiwa
8), Penyandang Cacat Ganda	0	0	0	34	112	21	Jiwa
9), Tuna Susila	0	0	0	0	0	0	Jiwa
10), Bekas Narapidana	0	0	0	4	0	0	Jiwa
11), Pengidap HIV/AIDS	0	0	0	15	0	0	Jiwa
12), Korban Penyalahgunaan NAPZA	196	196	0	0	0	0	Jiwa
Jumlah Panti Asuhan	13	13	12	12	0	11	
1), Panti Sosial	12	12	11	11	11	11	Buah

Uraian	Tahun						Satuan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Asuhan Anak							
2), Panti Sosial Bina Remaja	0	0	0	0	0	0	Buah
3), Panti Sosial Tresna Wirda	1	1	1	1	1	1	Buah
Rumah singgah	1	1	1	1	1	1	Buah
Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun (RPSSS)	0	0	0	0	0	1	Buah
Jumlah PPKS	83012	80299	43247	49206	47,174	48,556	Orang
1), PPKS Yang Tertangani	131	250	106	132	141	106	Orang
2), PPKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	79016	78,862	41,419	47,346	44,779	46,789	Orang
3), PPKS Yang Diberikan Bantuan	14,016	18,214	31,019	24,702	26,567	23,664	KK
4), Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	73,81	94,07	70,75	52,17	59	50,58	%
5) Persentase PPKS yang tertangani	24,56	27,04	46,9	100	100	100	%
1), Karang Taruna	33	33	33	33	36	28	KT
2), Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	7	7	7	7	7	7	Orang
3), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	66	66	66	72	74	74	Orang
4), Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	52	51	48	48	46	41	Orang
5), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	11	11	11	11	11	11	LKS
6), Pekerja Sosial dan Pendamping PKH	30	30	30	25	24	24	Orang
7), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1	1	1	Lembaga
8), Keluarga Pioner	0	0	0	0	1	0	Buah
9), Wahana Kesejahteran Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	4	4	4	4	4	4	Buah
10), Penyuluh Sosial	11	11	11	11	11	11	Orang
11), Wanita Pemimpin Kesjahteraan Sosial	0	0	0	0	0	0	Orang

(Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025)

(1) PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial

Adapun jenis PPKS yang ditetapkan oleh kementrian sosial sebanyak 26 jenis, tahun 2024 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai hanya 8 jenis yang masuk ke dalam data PPKS adalah sebagai berikut :

1), Anak Terlantar

2), Lanjut Usia Terlantar

3), Penyandang Disabilitas Terlantar

4), Gelandangan

5), Pengemis

6), Korban Bencana Alam

7), Korban Bencana Sosial

8), Fakir Miskin

Pada Tahun 2024 jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sejumlah 46,789 Penerima Manfaat yang terdata di DTKS.

(2) Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial dan yang tertangani

Penerima bantuan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2024 sebanyak 23.664 Penerima Manfaat (PM) dari jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 46.789 Penerima Manfaat dengan persentase 50,58 % dan Jumlah PPKS yang tertangani pada tahun 2024 sebanyak 106 jiwa dari 106 jiwa dengan persentase sebesar 100 % dari jumlah PPKS yang seharusnya tertangani.

(3) Jumlah Penduduk yang terdata pada DTKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI diaplikasikan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), melalui aplikasi ini pengelolaan data dari daerah diusulkan melalui Musyawarah Kelurahan (MUSKEL) dan disahkan oleh Walikota. Untuk Kota Dumai jumlah penduduk yang terdaftar di DTKS dan mendapatkan bantuan dari Kementrian Sosial RIF dapat dilhat pada table berikut ini.

Tabel 2.120
Jumlah Penduduk yang terdaftar pada DTKS

Tahun	Jumlah DTKS		Jenis Bantuan		
	Jiwa	KK	PBI	PKH	BPNT
2022	147,628	47,526	79,140	8,009	12,909
2023	136,101	44,779	93,156	6,820	12,282
2024	132,112	46,789	90,232	6,786	11,252

(Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2025)

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

(1) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi pembangunan, Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK dapat dipengaruhi oleh tingkat upah karena tingkat upah dapat mempengaruhi orang untuk masuk atau tidak ke pasar tenaga kerja, dimana tingkat jika upah tinggi maka makin banyak masyarakat akan masul ke dalam pasar tenaga kerja dan secara otomatis meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Oleh karena itu upaya pemerintah Kota Dumai dalam rangka meningkatkan TPAK adalah dengan kebijakan upah minimum kota.

Dalam mengimplementasikan Kebijakan tentang Upah Minimum Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai harus memiliki kesiapan kelembagaan mulai dari pengsosialisasian kebijakan, prosedur pelaksanaannya dan sistem pengawasan serta penindakan. Komitmen Birokrasi dan Komitmen dan perusahaan untuk melaksanakan kebijakan

yang sesuai dengan aturan yang berlaku, akan menghasilkan kinerja yang baik sehingga kebijakan ini akan terlaksana seoptimal mungkin.

Sementara dari sisi perusahaan atau pengusaha dengan adanya UMK tersebut mengharapakan terjadinya peningkatan kinerja dan perbaikan upah. Perbaikan upah berarti penigkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang kemudian pada gilirannya secara makro mendorong perusahaan untuk menambah produksi.

Oleh karena itu pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai harus terus melakukan pengawasan dan hendaknya dilakukan secara merata dengan mengontrol seluruh perusahaan yang ada di Kota Dumai dengan inisiatif sendiri tanpa menunggu laporan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.121
Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,28	67,15	64,91	65,45	65,45	65,21
PHK	28	19	17	3	22	5
Kasus PHK	17	19	17	3	22	5
Orang Terkena PHK	28	49	24	4	28	5
Rata-rata Kebutuhan HidupMinimum	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa surveyuntuk kebutuhan hidup individuminimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa surveyuntuk kebutuhan hidup individuminimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa surveyuntuk kebutuhan hidup individuminimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	PP 78 Tahun 2015 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan oleh PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, PP 18 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Hidup Layak juga sudah tidak berlaku lagi	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa surveyuntuk kebutuhan hidup individuminimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917)
Rata-rata Upah Minimum	3,118,453,9	3,383,834,3	3,383,834,3	3,414,160,9	3,723,278,98	4,118,669,61
L, Usaha Angkutan, Penggundangan dan Komunikasi	Berdasarkan UU No 7 Tahun1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Berdasarkan UU No 7 Tahun1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Berdasarkan UU No 7 Tahun1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Berdasarkan UU No 7 Tahun1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2022 yang ada tidak pernah disampaikan	Berdasarkan UU No 7 Tahun1981 tentang wajib Lapor	Berdasarkan UU No 7 Tahun1981 tentang wajib Lapor
L, Usaha Bangunan	sda	sda	sda	sda	sda	sda
L, Usaha Industri Pengolahan	sda	sda	sda	sda	sda	sda
L, Usaha Jasa Kemasyarakatan	sda	sda	sda	sda	sda	sda
Keuangan Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	sda	sda	sda	sda	sda	sda
L, Usaha Listrik, Gas dan Air	sda	sda	sda	sda	sda	sda

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
L, Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dari Hotel	sda	sda	sda	sda	sda	sda
L, Usaha Pertambangan dan Penggalian	sda	sda	sda	Berdasarkan UU No 7 Tahun1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2022 yang ada tidak pernah disampaikan	sda	sda
L, Usaha Pertanian, Perhutanan, Perburuhan dan Perikanan	sda	sda	sda	sda	sda	sda

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025)

(2) Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Dalam rangka mengatasi dan menanggulangi pengangguran. Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan salah satu alternatif strategis yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Dumai, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai. Penempatan tenaga kerja AKAD ini memiliki berbagai dimensi kepentingan, bagi tenaga kerja itu sendiri merupakan hak untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara bagi Pemerintah Kota Dumai sebagai penyelenggara program ini bertujuan untuk mengurangi angka pengggangguran di daerah dan memperluas kesempatan kerja. Daftar pencari kerja yang terdata pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai. Terjadi peningkatan penempatan seiring dengan terbuka luasnya informasi lowongan kerja seperti yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.122
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Pencari Kerja Yang Mendaftar	5,531	4,878	3,065	2,627	1,832	1,610	-24,14
Pencari Kerja Yang Ditempatkan	1,524	5,474	129	320	765	343	-15,83
Rasio Pencari Kerja yang Ditempatkan	27,55%	112,22%	4,21%	12,18%	41,76%	21,30%	10,95

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025)

(3) Jumlah Pengangguran Terbuka

Sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 30% angkatan kerja. Sekitar 70% angkatan kerja tetap bekerja di sektor pertanian dan sektor informal lainnya. Keberhasilan Pemerintah menekan laju inflasi dan tingkat bunga patut terus ditingkatkan. Namun, itu saja tidak cukup mengatasi pengangguran. Manfaatnya baru dinikmati sekelompok kecil pengusaha besar dan menengah. Pengusaha kecil dan pekerja keluarga atau pekerja mandiri di sektor informal belum menikmatinya secara signifikan. Oleh sebab itu, untuk 5 tahun yang akan datang, kebijakan penanggulangan pengangguran harus diarahkan pada: pertama, meningkatkan daya serap sektor formal dengan mendorong dunia usaha yang bersifat padat karya seperti agrobisnis dan industri kecil.

Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Data jumlah pengangguran terbuka selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.123
Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Laki-laki	5,513	6,961	6,412	5,696	5,799	5.169	-0,01
Perempuan	4,210	5,044	2,672	2,301	2,281	2.214	-0,12
Jumlah	**9,723**	**12,005**	**9,084**	**7,997**	**8,080**	7.383	2,77

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

Perkembangan jumlah pengangguran terbuka di Kota Dumai penduduk laki-laki mengalami penurunsn dari 5.513 orang ditahun 2019 meningkat menjadi 5.169 orang pada tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 0,01% per tahun. Sedangkan untuk perkembangan jumlah pengangguran terbuka penduduk perempuan mengalami penurunan dari 4.210 tahun 2019 menjadi 2.214 orang tahun 2024 dengan penurunan sebesar 0,12 per tahun. Sedangkan secara keseluruhan jumlah pengangguran terbuka menglami penurunan sebesar 0,05 per tahun.

Pada saat yang sama, akses pengusaha kecil dan pekerja mandiri memperoleh pelatihan serta kompetensi SDM untuk itu harus ditingkatkan dengan tetap menekankan ketrampilan untuk berwirausaha sebagai prioritas dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

(4) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha yang biasa terjadi adalah masalah upah minimum. Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Di Kota Dumai setiap perselisihan 100% dapat diselesaikan baik secara bipartit, PB maupun anjuran sehingga tidak menimbulkan dampak berkepanjangan. Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha mengalami fluktuasi selama periode tahun 2019-2024 cenderung mengalami penurunan sebesar 16,41% atau dari 49 di tahun 2019 menjadi 20 pada tahun 2024. Data selengkapnya mengenai angka perselisihan buruh dan pengusaha dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.124
Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha	49	38	55	17	42	20	-16,41

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2025)

(5) Rasio Lulusan S1, S2 dan S3

Tingkat pendidikan tenaga kerja dapat diukur dari persentase Angkatan Kerja Kota Dumai yang berasal dari Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2019-2024 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan SLTA ke bawah. Pendidikan dan Keterampilan rendah, menurut BPS Tahun 2024, jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas (tenaga kerja) Kota Dumai yang berpendidikan SMP ke bawah sebanyak 55.183

orang. Kesan kalah sebelum bertanding cukup memberikan warna bagi tenaga kerja di daerah ini untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar, Keberpihakan terhadap tenaga kerja tempatan perlu, tetapi harus diberikan secara propesional dengan tetap mempertimbangkan aspek persingan yang sehat.

Dengan data tersebut, kebijakan ketenagakerjaan khususnya untuk menekan angka pengangguran di Kota Dumai, maka sebagian besar angkatan kerja berpendidikan rendah tersebut harus dipersiapkan menjadi pekerja mandiri atau menciptakan kesempatan kerja melalui usaha-usaha kecil, Untuk itu perlu ditingkatkan latihan kewirausahaan dengan dukungan penyediaan modal usaha mandiri dan usaha kecil.

Persentase jumlah penduduk pekerja dengan lulusan S1/ S2 / S3 mengalami penurunan sebesar 0,02% per tahun atau turun dari 736 orang tahun 2019 menjadi 664 orang tahun 2024 dengan rasio penurunan dari 0,24% tahun 2019 menjadi 0,19% tahun 2024. Perkembangan Rasio Jumlah Lulusan Sarjana S1, S2 dan S3 terhadap Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.125
Perkembangan Rasio Jumlah Lulusan Sarjana S1 dan S2 terhadap Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2019 – 2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Lulusan S1 / S2 / S3	736	811	844	632	677	664	-0,02
Jumlah Penduduk	308,812	316,782	323,452	331,832	338,064	349.389	0,02
Persentase Pekerja Lulusan S1 / S2 / S3 (%)	0,24	0,26	0,26	0,19	0,20	0,19	1,40

(Sumber: BPS Kota Dumai, 2025)

Dengan berbagai latar belakang tersebut, tentu menjadi suatu potensi sumber daya manusia yang besar, yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna memajukan pembangunan daerah khususnya Kota Dumai kedepan. Lulusan perguruan tinggi merupakan salah satu sumber potensial untuk memberikan kontribusi, bukan hanya lapangan pekerjaan atau pendanaan, tetapi juga kontribusi pemikiran dan tenaga pengajar serta program magang atau pelatihan eksternal, terutama di lembaga pemerintah dan dunia usaha yang selama ini telah memberikan konstribusi nyata dalam pembangunandaerah.

Tabel 2.126
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2021-2024

Pendidikan tertinggi	2021					2022					2023					2024				
	Angkatan Kerja					Angkatan Kerja					Angkatan Kerja					Angkatan Kerja				
	Bekerja		Penganguran terbuka		Jumlah Total	Bekerja		Penganguran terbuka		Jumlah Total	Bekerja		Penganguran terbuka		Jumlah Total	Bekerja		Penganguran terbuka		Jumlah Total
	Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	
TidakPernah Sekolah/Belum Tamat SD/Tamat Sekolah Dasar	27.340	20,19	1.693	18,64	29.033	33.211	23,64	1.181	14,77	34.392	32.934	23,25	191	21,59	34.844	32.112	21,25	951	12,88	33.063
Sekolah Menengah Pertama	21.091	15,58	475	5,23	21.566	23.709	16,87	1.121	14,02	24.830	23.642	16,69	988	11,17	24.630	21.097	13,96	1.023	13,86	22.120
Sekolah Menengah Atas	34.120	25,2	2.109	23,22	36.229	41.144	29,28	1.823	22,8	42.967	34.874	24,62	2.073	23,43	36.947	74.394	49,24	4.357	59,01	78.751
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	26.599	19,65	2.722	29,96	29.321	23.931	17,03	2.504	31,31	26.435	25.875	18,27	2.351	26,58	28.226					
Diploma I/II/III/Akademi	7.091	5,24	629	6,92	7.720	6.249	4,45	132	1,65	6.381	7.569	5,34	260	2,94	7.829	23.492	15,55	1.052	14,25	25.544
Universitas	19.140	14,14	1.456	16,03	20.596	12.265	8,73	1.236	15,46	13.501	16.749	11,82	1.264	14,29	18.013					
Jumlah/Total	135.381	100	9.084	100	144.465	140.509	100	7.997	100	148.506	141.643	100	8.846	100	150.489	151.095	100	7.383	100	158.478

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

Persentase perkembangan jumlah tenaga kerja yang dilatih Kota Dumai mengalami pertumbuhan sebesar 19,09 % per tahun selama periode tahun 2019-2024. Jika dilihat dari persentase perkembangan jumlah tenaga kerja yang dilatih pada tahun 2019 sebesar 25,81%, tahun 2020-2021 tidak ada pelatihan yang disebabkan covid-19 dan kembali diadakan tahun 2022 dengan persentase 71,43% dari yang mendaftar dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 32,05% tenaga kerja yang dilatih dari 156 orang pendaftar. Kemudian di tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 100% tenaga kerja yang dilatih dari 115 orang pendaftar. Lebih jelasnya lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.127
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Pendaftar Pelatihan Berbasis Masyarakat	186	0	0	147	156	115	-9,17
Tenaga Kerja yang dilatih	48	0	0	105	50	115	19,09
Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih	25,81%	0	0	71,43%	32,05%	100%	31,12

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2025)

(6) Perlindungan Pekerja Rentan

Pemerinyah Kota Dumai berupaya memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakatnya, hal ini dibuktikan dengan komitmen Pemerintah Kota Dumai dengan menganggarkan dana APBD Tahun 2024 melalui APBD Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai kepada pekerja rentan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) orang yang telah di daftarkan ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan dengan total anggaran Rp. 2.016.000.000. Pekerja rentan yang diamkasud diantaranya seperti pedagang, nelayan, imam masjid, gharim, petani dan lain-lain.

Ini menunjukkan bahwa pemerintah kota telah memprioritaskan perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Berdasarkan informasi yang didapat melalui BPJS Ketenagakerjaan Cab. Dumai, telah terdapat 14 orang penerima manfaat dari peserta pekerja rentan yang telah meninggal dunia dan ssudah klaim manfaat dari program tersebut.

Pelaksanaan pelrindungan pekerja tersebut juga sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Walikta Dumai Nomor 122 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tanggal 20 Desember 2022, Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kota Dumai Nomor 415.4/KS/NK/2023/025 dan Nomor PER/24/102023, tanggal 20 Oktober 2023 serta Keputusan Walikota Dumai Nomor 560/967/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor

560/18/2024 tentang Penetapan Nama-Nama Pekerja Rentan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai pada Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejatheraan Pekerja Tahun Anggaran 2024, tanggal 18 September 2024.

2.1.3.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

(1) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di beberapa instansi yang ada di Kota Dumai cenderung mengalami peningkatan yang diukur dalam persentase partisipasi perempuan di angkatan pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada angkatan pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.

Data yang diterima dari BKPSDM Kota Dumai jika dilihat dari tahun 2019 hingga tahun 2024 merupakan angka yang bervariasi. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya terdapat pegawai yang sudah memasuki masa pensiun, meninggal dunia, perpindahan pegawai ke luar daerah, dan terbatasnya kuota penerimaan CPNS di Kota Dumai, serta kecilnya formasi yang dibutuhkan. Dari data tersebut sudah memperlihatkan adanya kesetaraan gender di Kota Dumai dimana jumlah pegawai di lembaga pemerintah sudah diisi oleh laki - laki dan perempuan, meskipun dari data yang ada memperlihatkan bahwa jumlah pegawai perempuan lebih besar dari jumlah pegawai laki-laki.

Data partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (PNS) yang diterima dari BKPSDM menunjukkan angka yang sangat bervariasi mulai dari tahun 2019 s/d 2024. Penurunan jumlah pegawai di lembaga pemerintah dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya pegawai yang telah memasuki masa pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke luar daerah. Sementara penerimaan pegawai perempuan pada tahun berkenaan, belum memenuhi kuota yang diinginkan. Namun jika dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai di lembaga pemerintah menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun bahkan porsi keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah lebih besar dibanding laki-laki.

Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta lebih disebabkan karena besarnya tuntutan ekonomi dan life syle yang membuat perempuan harus mandiri dan tangguh, ditambah kesempatan yang lebih besar dan lebih sering terbuka pada lembaga swasta dibanding lembaga

pemerintah (PNS). Dari data tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender tidak saja terjadi di lembaga pemerintah bahkan juga di lembaga swasta.

Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Hingga saat ini, target 30% anggota parlemen diisi oleh perempuan belum tercapai.

Berikut disajikan data partisipasi perempuan yang bekerja di beberapa instansi pemerintah dan Lembaga DPRD di Kota Dumai.

Tabel 2.128
Partisipasi Perempuan di Instansi Pemerintah, Lembaga DPRD dan Swasta Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pegawai di Lembaga Pemerintah	Orang	4.087	3.946	3.936	3.950	3.785	3.785
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah PNS	Orang	2.684	2.615	2.642	2.681	2.575	2.575
Partisipasi perempuan dilembaga Swasta	%	65,67	66,27	67,12	67	76,64	76,64
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	13,33	6,67	6,67	7	6,67	6,67

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025)

(2) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja.

Partisipasi angkatan kerja perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2019 partisipasi angkatan kerja perempuan dari yang semula 11.198 pada naik menjadi 51.196 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 35,52% per tahun. Pasca fase pandemi covid-19, perempuan umumnya lebih banyak bekerja di sektor yang membutuhkan kontak fisik yang tinggi seperti penyediaan makan dan minum, tenaga kebersihan dan sebagainya. Berikut data partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Dumai tahun 2019-2024.

Tabel 2.129
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota DumaiTahun 2019-2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	11.198	49.437	5.481	51.223	48.355	51.196	35,52

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025)

(3) Cakupan Kekerasan Seksual

Maraknya penggunaan gadget di kalangan remaja yang membuat remaja semakin mudah mengakses konten negatif sehingga banyak laporan mengenai seks bebas bagi remaja. Data pelaku seks bebas bagi remaja setiap tahunnya terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya telah melakukan sosialisasi terkait perilaku seks bebas di kalangan masyarakat bahkan ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat SMP hingga SMA.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2019 jumlah pelaku seks bebas bagi remaja di sebanyak 14 orang dan meningkat tahun 2024 menjadi 50 orang dikarenakan kelemahan pengawasan perilaku seks bebas anak dan remaja. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja sebesar 19 orang pada tahun 2019 dan naik menjadi 50 pada tahun 2024 disebabkan kurang disiplinnya pola pengasuh anak di lingkungan keluarga, data disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.130
Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja	Orang	14	9	4	23	62	50	28.99%
Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja	Orang	19	15	3	56	62	50	21.35%

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025)

(4) Pengarusutamaan Gender

Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena

kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

5) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Beberapa kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP pada tahun 1990 tersebut menekankan bahwa pada hakikatnya pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Selain sebagai pelaku, perempuan dan laki-laki sekaligus sebagai pemanfaat hasil akhir dari pembangunan. Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang ada di Kota Dumai.

Tabel 2.131
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,82	90,86	90,66	90,72	90,72	91,35
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	56,78	52,97	52,97	52,54	52,58	52,20
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,39	0,31	0,41	0,46	0,41	0,28
Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	%	na	4,57	5,82	10,37	12,05	8,17
Persentase Anak Korban KekerasanYang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	%	0,11	0,06	0,09	0,1	0,09	0,09
Rasio kekerasan terhadap perempuan. termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	9,53	10,29	19,69	19,77	12,27	17,32

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025)

Pencapaian keberhasilan kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender atau

yang difokuskan kepada perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) diukur dari 3 sektor yaitu : 1. Sektor pendidikan, berbicara terkait dengan rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; 2. Sektor kesehatan berbicara tentang angka harapan hidup; dan 3. Sektor ekonomi berbicara tentang pengeluaran perkapita, IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Perkembangan IPG Kota Dumai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun masih berasa di bawah 100.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, Peran aktif dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumberdaya ekonomi. Upaya untuk meningkatkan capaian IPG dan IDG tidak hanya bisa dilakukan oleh perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja tetapi harus ada keterlibatan dari seluruh perangkat daerah yang ada serta lembaga masyarakat dan dunia usaha. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terbentuk oleh tiga komponen, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga. IDG dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Dari data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Kota Dumai bahwa Indeks Pemberdayaan Perempuan di Kota Dumai tahun 2019 sebesar 56,78. Selanjutnya menurun pada tahun 2024 menjadi 52,20. Salah satu penyebab menurun atau meningkatnya IDG adalah fluktuasi capaian indikator pembentuk yaitu partisipasi perempuan di parlemen. Seperti diketahui walaupun kuota perempuan ditetapkan sebesar 30%, namun penetapan keterwakilan perempuan di parlemen masih bergantung pada pemimpin partai politik. Selain itu masyarakat belum menunjukkan simpati untuk memilih perempuan sebagai wakil rakyatnya di DPRD.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana ketimpangan gender memengaruhi pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Semakin tinggi IKG, semakin besar ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian pembangunan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Dumai masih menunjukkan

ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa aspek, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau. Dari data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Kota Dumai bahwa Indeks Ketimpangan Gender Kota Dumai tahun 2019 sebesar 0,39. Selanjutnya menurun pada tahun 2024 menjadi 0,28.

Anggaran responsif gender diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender secara menyeluruh yang dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan Gap Analysis Patway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) pada setiap perangkat daerah. Persentase anggaran responsive gender (ARG) pada belanja langsung APBD Kota Dumai yang dimulai tahun 2020 telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya hingga pada tahun 2024 telah mencapai 8,15%. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan sosialisasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diikuti oleh 37 perangkat daerah. Selain itu juga dilakukan pendampingan PPRG di 7 Kecamatan Kota Dumai. Kegiatan dimaksud bertujuan memberikan pedoman bagi para perencana setiap perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender.

Tabel 2.132
Jumlah Program/ Kegiatan PUG Pada Perangkat Daerah yang Sudah di Evaluasi Melalui ARG di Kota Dumai Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Belanja Operasi + Modal (Non Belanja Pegawai) Pada APBD Tahun 2024	Jumlah ARG Belanja Operasi + Modal (Non Belanja Pegawai) APBD Tahun 2024	Persentase
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	367.727.234.473,00	860.000.000,00	0,23
2	Dinas Kesehatan	410.147.163.181,00	1.573.408.167,00	0,38
3	Dinas Pekerjaan Umum	280.655.690.209,00	11.148.769.000,00	3,97
4	Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Pemukiman	14.452.948.162,00	1.600.000.000,00	11,07
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.347.583.220,00	68.982.000,00	0,61
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.355.609.800,00	115.673.366,00	1,57
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44.484.704.673,00	1.147.821.955,00	2,58
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	20.000.669.600,00	8.845.363.360,00	44,23
9	Dinas Tenaga Kerja	6.960.759.280,00	315.000.000,00	4,53
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.634.612.160,00	971.042.000,00	12,72
11	Dinas Lingkungan Hidup	23.827.398.360,00	6.323.408.918,00	26,54
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8.080.450.336,00	1.172.564.640,00	14,51
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.124.437.840,00	447.403.800,00	7,31
14	Dinas Perhubungan	81.768.809.720,00	50.320.302.684,00	61,54
15	Dinas Komunikasi dan Informatika,statistik dan persandian	13.939.993.240,00	913.874.400,00	6,56
16	Dinas Koperasi, Usaha	7.397.167.500,00	276.419.360,00	3,74

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Belanja Operasi + Modal (Non Belanja Pegawai) Pada APBD Tahun 2024	Jumlah ARG Belanja Operasi + Modal (Non Belanja Pegawai) APBD Tahun 2024	Persentase
	Kecil dan Menengah,dan Perindustrian			
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.159.732.640,00	221.197.000,00	2,18
18	Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata	9.578.541.520,00	1.079.325.800,00	11,27
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.117.687.120,00	290.023.102,00	5,67
20	Dinas Perikanan	7.656.805.660,00	366.227.000,00	4,78
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.384.172.440,00	972.644.300,00	4,35
22	Dinas Perdagangan	8.872.538.549,00	69.634.000,00	0,78
23	Sekretariat Daerah Kota Dumai	106.997.624.903,00	60.289.039.700,00	56,35
24	Sekretariat DPRD	57.607.737.187,00	2.319.003.300,00	4,03
25	Badan Pendapatan Daerah	37.925.159.858,00	900.000.000,00	2,37
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.399.801.391,00	197.330.600,00	1,73
27	Inspektorat	14.569.856.440,00	608.700.000,00	4,18
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	88.410.790.019,00	148.502.000,00	0,17
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.387.688.966,00	130.787.744,00	1,77
30	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.849.689.550,00	100.991.780,00	3,54
31	Dinas Pemadam Kebaran	6.782.878.115,00	100.000.000,00	1,47
32	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	9.293.003.178,00	775.600.300,00	8,35
33	Rumah Sakit Umum Daerah	263.615.360.581,00	11.345.948.684,00	4,30
34	Kecamatan Dumai Barat	8.407.466.982,00	804.000.000,00	9,56
35	Kecamatan Dumai Timur	10.954.563.660,00	55.105.800,00	0,50
36	Kecamatan Bukit Kapur	10.992.632.520,00	91.757.279,00	0,83
37	Kecamatan Medang Kampai	7.503.475.560,00	37.791.600,00	0,50
38	Kecamatan Dumai Selatan	9.967.700.004,00	120.000.000,00	1,20
39	Kecamatan Dumai Kota	10.548.084.760,00	47.420.400,00	0,45
40	Kecamatan Sungai Sembilan	10.099.785.808,00	80.000.000,00	0,79
	Total	**2.050.988.009.165,00**	**167.251.064.039,00**	**8,15**

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025)

Meningkatnya persentase anak korban kekerasan yang ditangani UPT Perlindungan Perempuan dan Anak karena tingkat pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap anak sudah mulai baik dan besarnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan ke UPT PPA jika ditemukan kasus kekerasan. Selain itu layanan yang diberikan sedapat mungkin bisa memberikan respon yang cepat terhadap kasus-kasus yang dialami korban melalui penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, serta telah adanya Hotline Center di Kota Dumai sehingga masyarakat dapat langsung menghubungi jika terdapat kasus kekerasan.

Berikut beberapa indikator yang mengambarkan perkembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Dumai selama kurun waktu 2019-2024, antara lain:

Tabel 2.133
Indikator Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Dumai 2019-2024

Indikator	Tahun						Ket
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Rasio KDRT	0,01	0,019	0,02	0,01	-	0,0004	UPT
Cakupan perempuan korban kekerasan terlatih (%)	6,07	100	100	100	-	0	Bidang PHP
Jumlah SDM yang terlatih KTP/KTA (orang)	150	60	61	45	30		
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penangan pengaduan oleh pertugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	93,8	96,3	94,7	100	100	100	UPT
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di puskesmas mampu KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit (%)	91,42	-	-	-	-	-	Bidang PHP
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu (%)	18	-	-	-	-	-	UPT
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyediaan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	92	64,7	91,67	66,66	92,59	94,89	
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100	100	
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	0,78	0	0	0	2,29	0	
Cakupan layanan terintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	82	100	100	100	100	100	
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (%)	97,48	99,5	100,68	97,8	99,63	98,85	Bidang Data
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (%)	115,9	113,35	105,83	100,69	94,42	81,92	
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (%)	136,87	137,7	95,52	121,49	123,06	67,64	
Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi (%)	Na	Na	Na	Na	83,23	Na	
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun (%)	99,55	99,42	99,62	99,62	98,97	100,00	
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor non pertanian (%)	0,08	88,3	91,5	89,71	91,59	100	Bidang PKHPKK
Persentase SDM terlatih KTP/KTA (%)	57,14	100	100	100	100	100	UPT
Cakupan perempuan korban KDRT yang terlatih (%)	6,07	100	100	-	-	100	
Persentase perangkat daerah yang responsif gender (%)	61,8	97,29	100	100	100	360	Bidang PKHPKK
Cakupan puskesmas ramah anak (%)	100	100	100	100	100	45	Bidang PHA PA
Cakupan sekolah ramah anak (%)	37	37	59	75,5	75,5	100	
Jumlah taman bermain ramah anak	1	2	2	3	3	5	
Jumlah ruang bermain ramah anak	17	17	17	20	20	20	
Cakupan kelurahan layak anak (%)	100	100	100	89	89	100	
Cakupan Kecamatan layak anak (%)	100	100	100	100	100	100	
Cakupan forum anak tingkat kelurahan (%)	100	100	100	33	4	100	

Indikator	Tahun						Ket
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Cakupan forum anak tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100	
Jumlah kader kami berlian	200	250	300	340	360	360	
Jumlah informasi layak anak (ILA)	34	34	34	45	45	45	

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Tahun 2025)

2.1.3.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

(1) Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) dibagi dengan jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama ini perlu menjadi perhatian karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang, Persentase ketersediaan pangan utama di Kota Dumai dari tahun 2019-2024 tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.134
Ketersediaan Pangan Utama Kota DumaiTahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	2,26	6,98	21,88	11,42	33,41	45,35	82,18

(Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2025)

Persentase ketersediaan pangan utama meningkat darri 2,26% tahun 2019 naik menjadi 45,35% diathun 2024. Penurunan terjadi di tahun 2022 yang disebabkan oleh rendahnya produksi beras di Kota Dumai yang salah satunya disebabkan oleh banjir yang merupakan kejadian tahunan yang harus dihadapi oleh para petani. Disisi lain keterbatasan lahan pertanian untuk proses produksi menjadi kendala yang sangat mempengaruhi rendahnya ketersediaan pangan utama (beras) di Kota Dumai. Lahan yang sempit membuat hasil produksi tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat akan konsumsi beras di Kota Dumai.

Bahan pangan utama (beras) persentasenya diambil dari rata-rata stok akhir data penerimaan dan penyaluran beras perum BULOG ditambah dgn produksi beras Kota Dumai per jumlah penduduk Kota Dumai. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan.

Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa ada 2 komoditi pangan (ubi kayu dan buah-buahan) yang ketersediaannya surplus, dengan kata lain kebutuhan pangan masyarakat Dumai terhadap komoditi tersebut dapat terpenuhi, bahkan kedua komoditi tersebut berpotensi untuk diekspor ke daerah lain. Ubi kayu masih menjadi komoditi utama untuk Kota Dumai karena kebutuhan bahan baku untuk indutri rumah tangga pembuatan kerupuk cabe masih cukup potensial. Sebagian besar masyarakat mengkonsumsi ubi kayu dari hasil olahannya seperti keripik, jajanan dan lain sebagainya. Selanjutnya komoditi buah-buahan jika dilihat dari jumlah total produksi di Kota Dumai juga mengalami surplus, produksi buah-buahan di Kota Dumai didominasi oleh nenas sebagai komoditi unggulan dengan jumlah produksi yang cukup besar.

Selain dua komoditi tersebut, komoditi lain masih mengalami defisit. Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Dumai pasokan pangan didatangkan dari daerah tetangga baik kabupaten tetangga maupun provinsi tetangga. Secara umum pasokan pangan tersebut berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Tabel 2.135
Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2024

No	Komoditi Pangan	Produksi	Kebutuhan Konsumsi	Pasokan Pangan	Keterangan
1	Beras	4,006,41	25,409,59	- 21,403,18	Defisit
2	Jagung	110,11	126,78	- 16,67	Defisit
3	Kedelai	10,29	1,600,08	- 1,589,79	Defisit
4	Kacang tanah	4,05	73,94	- 69,89	Defisit
5	Kacang Hijau	-	55,27	- 55,27	Defisit
6	Ubi jalar	-	398,25	- 398,25	Defisit
7	Ubi kayu	3,003,60	1,980,31	1,023,29	Surplus
8	Sagu	-	4,84	- 4,84	Defisit
9	Buah-buahan	13,749,06	8,657,74	5,091,32	Surplus
10	Sayuran	817,4	12,934,29	- 12,116,89	Defisit
11	Daging sapi	-	1,386,19	- 1,386,19	Defisit
12	Daging ayam	-	2,916,51	- 2,916,51	Defisit
13	Telur	-	3,020,24	- 3,020,24	Defisit
14	Ikan	1,430,09	8,912,26	- 7,482,17	Defisit

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2025)

Tingginya ketergantungan impor pangan khususnya terhadap komoditi beras dikarenakan kebutuhan konsumsinya di tingkat masyarakat sangat tinggi. Hal ini terbukti dari besarnya konsumsi beras masyarakat Dumai pada tahun 2024 (91,18 kg/kapita/tahun) yang melebihi rata-rata tingkat konsumsi beras dunia yaitu sebesar 60 kg/kapita/tahun. Meskipun angka tersebut masih berada di diatas rata-rata tingkat konsumsi beras nasional 79,08 kilogram/kapita/tahun. Tingginya impor beras ini terjadi karena belum optimalnya penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan lokal. Dengan kata lain, masyarakat masih beranggapan bahwa beras merupakan makanan pokok dimana kebutuhannya tidak dapat digantikan oleh pangan lokal lainnya. Berikut adalah tabel pencapaian skor pola harapan pangan Kota Dumai.

Tabel 2.136
Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Skor PPH	82,10	82,85	83,00	82,90	87,90	87,90	1,37

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai, 2025)

Disisi lain, rendahnya produksi pangan khususnya beras terjadi karena terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Sementara untuk menambah luasan kawasan pertanian ini sangat sulit dikarenakan kebanyakan lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian merupakan kawasan hutan.

Agar luas kawasan pertanian ini ke depannya tidak semakin berkurang, maka sebaiknya lahan pertanian yang ada ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi atau berkelanjutan. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka tidak dialih fungsikan ke sektor non pertanian. Jumlah alih fungsi lahan dari Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian Berdasarkan data dari Dinas Ketahahan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, pada tahun 2017 berjumlah sebesar 2,774 seperti yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

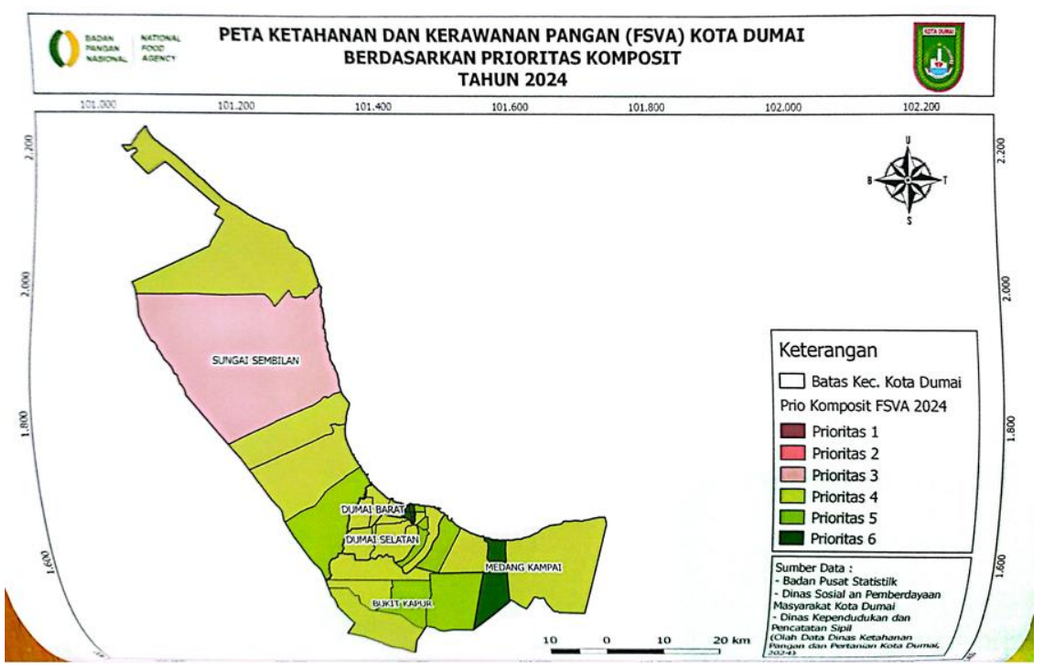
Tabel 2.137
Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2017–2024

Indikator	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dari Pertanian menjadi non pertanian	2.774,30	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025)

Sebagian besar lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat merupakan lahan pinjaman dari pihak ketiga seperti perusahaan, badan usaha dan lainnya. Sehingga jika nantinya masa pinjamnya telah habis lahan akan diminta oleh yang punya dan lahan tersebut statusnya bukan kawasan pertanian jika dilihat di RTRW. Pada awalnya perhitungan yang dilakukan berupa pengurangan luas lahan pertanian tahun sebelum dikurangi tahun berjalan, namun hal ini kurang relevan karena lahan tersebut belum ditetapkan dan tidak berada di kawasan pertanian menurut RTRW.

Berikut ini gambar peta ketahanan dan kerawanan pangan Kota Dumai Tahun 2024:



Gambar 2.6. Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) Kota Dumai Berdasarkan Prioritas Komposit Tahun 2024

(2) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Konsumsi energi dari umbi-umbian sebagai salah satu pangan utama masih cukup rendah sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi sehingga terjadi peningkatan peralihan konsumsi pangan padi-padian (beras) ke konsumsi umbi-umbian dan pati (sagu) sebagai salah satu usaha diversifikasi pangan di Provinsi Riau. Hal ini sangat potensial dilaksanakan karena:

a. Potensi produksi pangan pokok padi sudah semakin terbatas karena lahan untuk pengembangan sangat terbatas dan jumlah penduduk semakin meningkat;
b. Komoditi sagu memiliki potensi produksi yang tinggi sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pangan alternatif;
c. Sagu sudah menjadi makanan budaya masyarakat Riau sehingga dapat dikembangkan dan disosialisasikan dengan cepat di masyarakat;
d. Sudah dimulainya pengembangan pangan alternatif sagu di Provinsi Riau;
e. Komitmen pemerintah untuk mengangkat komoditi ini menjadi titik awal kebangkitan sagu sebagai pangan alternatif sumber karbohidrat,

Konsumsi energi penduduk kota dumai tahun 2024 adalah sebesar 2.044 kkal/kap/hari (97,00% AKE) konsumsi energi penduduk kota dumai berada pada kategori baik dan sudah memenuhi jumlah konsumsi energi minimal hidup sehat, aktif, dan produktif, Sedangkan konsumsi protein penduduk kota dumai adalah sebesar 62,30 gr/kap/hari (109,3%AKP), Konsumsi protein tersebut tergolong kategori baik (konsumsi protein > 100%).

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pemerintah bertanggungjawab atas tercukupinya pangan bagi setiap individu. Demikian pula bahwa UU RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan wajib untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana, tentunya terutama dari sisi pangan. Terkait dengan hal itu maka Pemerintah Kota Dumai harus memiliki cadangan pangan.

2.1.3.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Pada dasarnya tanah mempunyai makna dan nilai strategis yang tinggi, baik dari sisi historis, politik, sosial budaya, terlebih ekonomi karena di dalamnya tidak saja terdapat aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik serta hukum, sedangkan banyak pihak memiliki kepentingan terhadap tanah, sehingga tanah merupakan sumber daya yang rawan konflik. Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi terutama dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tanah-tanah yang ada di Kota Dumai dimungkinkan untuk dimanfaatkan, baik untuk dipakai sendiri atau disewakan, dilepaskan kepada Pemerintah, maupun Pihak Swasta yang berbadan hukum. Untuk

menjaga suasana tetap kondusif maka ketika terjadi konflik/ permasalahan terkait pertanahan, perlu adanya fasilitasi dari Pemerintah Kota Dumai agar tidak menjurus ke hal-hal yang bersifat kekerasan. Adapun konflik/permasalahan pertanahan yang sedang ditangani oleh Pemerintah Kota Dumai, khususnya melalui Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan berikut :

Tabel 2.138
Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani Tahun 2024

No	Objek Permasalahan	Progress	Keterangan
1	Pembahasan lanjutan tentang surat permohonan mediasi oleh Saudara ALmizar selaku penerima kuasa dari Nurhayati, S.H. (surat kepemilikian lahan No. 80/AJB/BK/1984) terkait sengketa lahan yang bersangkutan dengan pihak sepadan (Doni Samuel Sembiring)	Sudah Selesai (ditutup dengan Berita Acara)	Undangan Rapat Nomor 005.34/DISPERTARU-PN/2024
2	Adanya dugaan penyerobotan lahan perkebunan sawit oleh pihak lain (H.Syarifudin)	Sedang dalam proses penanganan mediasi	Undangan Rapat Nomor 005.33/ DISPERTARU-PN/2024
3	Mediasi antara Kelompok Tani Bumi Harapan dan Kelompok Tani Nusantara terkait sengketa tanah pertanian	Mediasi sudah dilakukan antara Kelompok tani, namun salah satu kSelompok tani tidak menghadiri undangan mediasi tersebut sehingga tidak ada titik temu antar ke dua pihak kelompok tani	Undangan Rapat Nomor 100/1/PEM tanggal 3 September 2024 dan Undangan Rapat Nomor 800/148/SEKR-TU
4	Mediasi permasalahan tanah di RT.03 Kelurahan Bukit Nenas A.n Irwandi dan Rahmalina dengan Firman Sibuea	Sedang dalam proses penanganan mediasi pada tingkat Kecamatan	Undangan Rapat Nomor 100/1/PEM tanggal 4 September 2024
5	Koordinasi dan Persamaam Presepsi Permasalahan Tanah di wilayah RT.07 Kelurahan Kampung Baru	Sudah Selesai	Undangan Rapat Nomor 100/1/PEM tanggal 15 Oktober 2024
6	Koordinasi serta pembahasan permohonana penerbitan Alas Hak Atas Tanah di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai.	Sedang dalam peroses penanganan	Undangan Rapat Nomor 500.17.15/DISPERTARU-PN/2024

(Sumber : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tahun 2025)

Dari tabel diatas Terdapat 6 (enam) penanganan konflik sengketa pertanahan pada bidang pertanahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun 2024. Dari laporan dan undangan yang masuk pada bidang pertanahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, penanganan konflik sengketa pertanahan sebagian besar sudah selesai dan terdapat berita acara kesepakatan serta sebagian lagi dalam tahap proses penanganan. Sedangkan untuk luas lokasi dan luas lahan pertanahan yang sedang ditangani pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.139
Luas Lokasi dan Luas Lahan Pertanahan yang Sedang Ditangani Tahun 2023

No	Lokasi	Luas Total (M^2)	Luas Lahan (M^2) yang masuk TWA	Jumlah Pemilik	
				Kelompok	Orang/ instansi
1	Kel,Kampung Baru	4.544 m^2	-	-	1
2	Kel, Bagan Besar	12.192 m^2	-	1	1
3	Kel,Bukit Nenas	Belum Diketahui	-	1	-

No	Lokasi	Luas Total (M²)	Luas Lahan (M²) yang masuk TWA	Jumlah Pemilik	
				Kelompok	Orang/ instansi
4	Kel,Mundam	Belum Diketahui	-	-	1
Total		**16.736 m²**	**-**	**2**	**3**

(Sumber : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tahun 2025)

Penyelesaian kasus permasalahan pertanahan yang sesuai kewenangan Kabupaten/Kota yang telah selesai diatasi, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.140
Permasalahan Pertanahan yang Sudah Diselesaikan Tahun 2024

No	Objek Permasalahan	Keterangan
1	Pembahasan lanjutan tentang surat permohonan mediasi oleh Saudara ALmizar selaku penerima kuasa dari Nurhayati, S.H. (surat kepemilikian lahan No. 80/AJB/BK/1984) terkait sengketa lahan yang bersangkutan dengan pihak sepadan (Doni Samuel Sembiring)	Sudah Selesai
2	Koordinasi dan Persamaam Presepsi Permasalahan Tanah di wilayah RT.07 Kelurahan Kampung Baru	Sudah Selesai

(Sumber : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tahun 2025)

2.1.3.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

(1) Indek Kualitas Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Imdeks kualitas lingkungan hidup menjelaskan bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

a. Kualitas Air Tanah

Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alamai kepermukaan tanah melalui pancaran atau rembesan, Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air tanah diantaranya yaitu :

1. Iklim

   Unsur-unsur iklim yang berpengaruh terhadap kualitas air secara langsung misalnya : curah hujan, tekanan udara, penguapan (evaporasi) dan temperature.
2. Geologi Kandungan unsur kimia dalam air sangat tergantung pada formasi geologi tempat dilaluinya air.
3. Vegetasi

   Vegetasi yang telah mati akan membusuk dan akan mengeluarkan unsur-unsur hara seperti : N, P, K dan sebagainya, yangs elalu siap dilarutkan dan dibawa oleh air.
4. Aktivitas Manusia

   Kegiatan manusia dalam bidang industry, pertambangan, pertanian maupun dalam kehidupan manusia sehari-hari telah banyak menghasilkan limbah yang menimbulkan masalah pencemaran air. Kualitas air tanah yang diproduksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai

kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang tinggi. Bahan buangan organik ini berasal dari limbah industri yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal.

Kualitas air tanah yang diproduksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang tinggi seperti yang dapat dilihat pada Tabel berikut. Bahan buangan organik ini berasal dari limbah industri yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal.

Tabel 2.141
Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter																			
	pH					Kekeruhan (NTU)					Warna (PtCo)					Besi (mg/L)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Air Sumur Kel. Tanjung Palas	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Air Sumur Kel. Teluk Makmur	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Air Sumur Kel. Bukit Kapur	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	-	-				-	-				-	-				-	-			
Air Sumur Kel. Dumai Barat	-	-				-	-				-	-				-	-			
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan	6,55	6,64				13	-				234	-				23.636	<0,06			
Air Sumur Kec. Dumai Kota	-	6,72	6,85				-	2,2			-	-	3,1					3,1		
Air Sumur Kec. Dumai Timur	-	-	6,79					2,4					3,3					1,04		
Air Sumur Kel. Tanjung Palas	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-		

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter																			
	pH					Kekeruhan (NTU)					Warna (PtCo)					Besi (mg/L)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Air Sumur Kel. Teluk Makmur	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Air Sumur Kel. Bukit Kapur	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	-	-				-	-				-	-								
Air Sumur Kec. Dumai Barat	-	-				-	-				-	-								
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan	23.636	<0,06				-	<0,00				0,4	-								
Air Sumur Kec. Dumai Kota	-	<0,06	<0,001		5.64	-	<0,001	0,48		15.6	-	-			6.7					0.2
Air Sumur Kec. Dumai Timur			<0,001		5.91			0,46		18.6					202					0.891
Air Sumur Kec. Dumai Selatan	-	-			5.86	-	-			0.49	-	-			0.97					0.054
Air Sumur Kec. Dumai Barat	-	-			7.35	-	-			13.3	-	-			4.5					0.096
Air Sumur Kec. Sungai Sembilan	-	-			6.61	-	-			43.1	-	-			6.19					2.507

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter																			
	pH					Kekeruhan (NTU)					Warna (PtCo)					Besi (mg/L)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Air Sumur Kec. Medang Kampai	-	-			3.74	-	-			0.69	-	-			9.3					1.592
Air Sumur Kec. Bukit Kapur	-	-			6.48	-	-			4.05	-	-			3.58					0.042

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2025)

Pengambilan sampel air sumur dilaksanakan pada September 2024. Sampel dianalisis oleh laboratorium terakreditasi dan teregistrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Baku Mutu Air Sumur mengacu pada Bab II Tabel 3. Parameter air untuk keperluan hiegien dan sanitasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Dari hasil uji diketahui sampel air sumur Kecamatan Dumai Timur melebihi baku mutu untuk parameter pH, NTU, warna dan besi.

Untuk mengetahui suatu air telah tercemar dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya yang dapat langsung dilihat dengan mata telanjang dan dapat dirasakan oleh panca indra secara langsung, adapun ciri fisik dari air yang menandakan air tersebut telah tercemar antara lain adalah air tersebut berwarna atau tidak jernih, berbau, dan berasa. Faktor-faktor yang mengakibatkan pencemaran air antara lain adalah sampah organik, limbah industri, pertambangan, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, peternakan dan perikanan, limbah pertanian, tumpahan minyak di laut, detergen, batubara dan perusakan hutan.

Tabel 2.142
Ambang Batas Baku Mutu Air Sumur Tahun 2019-2024

Parameter	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
Ph		6,5-9		6,5-9		6,5-9		6,5-9		6,5-8,5		6,5-8,5
Kekeruhan	NTU	25	NTU	25	NTU	25	NTU	25	Skala NTU	>3	Skala NTU	>3
Warna	TCU	50	TCU	50	TCU	50	TCU	50	Skala TCU	10	Skala TCU	10
Besi	mg/L	1	mg/L	1	mg/L	1	mg/L	1	mg/L	0,1	mg/L	0,1
Kadmium	mg/L	0,005	mg/L	0,005	mg/L	0,005	mg/L	0,005	-	-	-	-
Nitrat	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	20	mg/L	20
KMNO4	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10	-	-	-	-

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025)

Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, pada tahun 2019-2024 kualitas air hujan di Kota Dumai bersifat asam, hal ini disebabkan oleh kontaminasi atmosfer yang berasal dari tingginya pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas pabrik maupun asap kendaraan.

b. Kualitas Air Laut dan Air Sungai di Kota Dumai

Pertambahan penduduk, banyaknya jenis usaha dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Kota Dumai menyebabkan semakin banyak limbah yang dihasilkan sehingga mempengaruhi kualitas air di Kota Dumai. Wilayah Kota Dumai berada di pesisir pantai (laut) sehingga berperan menjadi tempat pembuangan akhir dari berbagai limbah cair industri dan limbah domestik. Wilayah pesisir ini menjadi pilihan lokasi bagi para pengusaha industri karena pesisir pantai Kota Dumai berpotensi

besar untuk dijadikan sebagai pelabuhan, sehingga memudahkan pengusaha dalam mendistribusikan hasil olahannya. Tingginya aktifitas industri di wilayah pesisir ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di daerah pesisir yang salah satunya tergambar dari penurunan kualitas air di wilayah pesisir.

Kualitas air sungai dan drainase di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut. Disamping itu juga dipengaruhi oleh limbah dari kegiatan domestik, doorsmer, hotel, klinik, dll yang tidak melalui proses pengelolaan dan pengolahan limbah cair. Dari hasil pengujian air sungai seperti yang tersaji pada Tabel, disimpulkan bahwa ada beberapa parameter yang melebihi ambang batas baku mutu.

Tabel 2.143
Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai Kota Dumai Tahun 2021-2024

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu 2021	Ambang Batas Baku Mutu 2022	Ambang Batas Baku Mutu 2023	Ambang Batas Baku Mutu 2024
BOD	mg/L	12	12	12	12
COD	mg/L	25	25	25	25
P	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2
pH		6 – 9	6 – 9	6 – 9	6 – 9
DO	mg/L	4	4	4	4
NO3	mg/L	10	10	10	10
Nitrit	mg/L	0,06	0,06	0,06	0,06

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025)

(2) Indek Kualitas Udara

Kota Dumai beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara antara 20,5˚C - 35,8˚C. Data suhu Kota Dumai tahun 2024 bersumber dari stasiun AQMS (Air Quality Monitoring System) yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai (Kompleks Perkantoran Walikota Dumai), Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Pada tahun 2024 2019 rata-rata suhu 27,30 ˚C kemudian terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024 menjadi 27,75˚C. Secara umum rata-rata suhu udara di Kota Dumai selama kurun waktu 2019-2024 mengalami penurunan 0,33% per tahun dan masih berada dalam kondisi normal.

Tabel 2.144
Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota DumaiTahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Suhu rata-rata (˚C)	27,30	27,11	27,12	26,77	26,94	27,75

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025)

Pada tahun 2019 suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Januari setinggi 28 ˚C dan terendah di bulan April dan November 26,70 ˚C. sedangkan pada tahun 2024, suhu udara tertinggi terjadi di bulan September yaitu setinggi 28,7˚C dengan suhu udara terndah pada bulan November yaitu 26,9˚C. Perkembangan suhu udara setiap bulan selama tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 2.145
Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	28	27,4	26,2	26,5	31,12	27.25
Februari	27,8	27,5	27,1	26,5	26,91	28.1
Maret	27,7	27,8	26,8	27,4	27,56	28.3
April	26,7	26,6	26,7	27,2	32,7	28.3
Mei	27,2	27,8	27,4	27,7	33,25	28.2
Juni	27,4	27,1	27,3	26,2	27,92	27.7
Juli	27,6	26,8	27,6	27,2	28,3	28
Agustus	27,4	27,8	26,9	26,7	27,14	27
September	27,4	26,3	26,7	26,7	27,72	28.7
Oktober	26,8	27,2	27,2	26,5	26,81	27.3
November	26,7	26,7	29,1	26,5	27,05	26.9
Desember	26,9	26,3	26,4	26,1	27,02	27
Rata-rata	27,3	27,11	27,12	26,77	28,63	27.75

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2025)

Pengujian kualitas udara ambien tahun 2024 menggunakan metode passive sampler. Pengambilan sampel dilakukan selama 14 hari. Sampel kemudian dianalisa oleh laboratorium terakreditasi dan teregistrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Hasil pengukuran terhadap beberapa parameter seperti yang tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.146
Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2024

Titik Pengujian Sampel	Tahun 2024						
	Nilai Parameter Yang Diuji						
	SO2	CO	NO2	O3	Pb	HC	TSP
	µg/N m3	µg/Nm 3	µg/Nm 3	µg/Nm 3	µg/Nm 3	µg/Nm 3	µg/Nm 3
Hotel The Zuri	7.04		7.42				
Kantor Kodim	6.2		7.56				
Jalan Marlan Jaya	4.33		4.79				
Taman Lepin							
PT. Kresijaya Adhikarya	12.75		18				
Jalan Daeng Tuagek	7.57		9.7				
Kawasan Industri Dumai	11.95		17.95				
Jalan Abdul Rapkan	5.2		5.07				
Jalan MH Thamrin	7.6		9.92				

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025)

Hanya ada dua parameter yang mendekati ambang batas baku mutu yaitu TSP (ambang batas baku mutu debu total/TSP 230 mg/Nm3). Tingginya nilai TSP berdampak terhadap gangguan pernapasan manusia, menurunkan jarak pandang dan menghalangi sinar matahari, serta berdampak terhadap kerusakan beberapa material.

(3) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi suatu negara pada tahun yang sama. Emisi aktual yang dimaksud adalah banyaknya emisi yang dihasilkan setelah adanya intervensi aksi dan kebijakan PRK, yang didapat dari pengurangan antara baseline emisi dengan potensi penurunan emisi pada tahun tersebut. Sedangkan output aktivitas ekonomi negara menggunakan data Pendapatan Domestik Bruto (PDB) konstan tahun 2010.

Capaian Intensitas emisi GRK Provinsi didapat dari angka/nilai penurunan emisi GRK tahun tertentu dibagi Produk Domestik Regional Bruto tahun yang sama. Persentase penurunan intensitas emisi GRK didapat dari data capaian intensitas emisi GRK provinsi pada tahun tertentu dibandingkan dengan data Intensitas Emisi GRK baseline (tahun initial 2010). Capaian penurunan intensitas emisi GRK Provinsi Riau Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.147
Capaian Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau terhadap Baseline Tahun 2010-2024

Tahun	PENURUNAN EMISI TAHUNAN	PENURUNAN EMISI KUMULATIF	% PENURUNAN INTENSITAS EMISI TERHADAP BASELINE
2010	0,00%	0,00%	0,00%
2011	5,90%	2,94%	9,20%
2012	9,67%	5,15%	18,07%
2013	13,40%	7,15%	25,18%
2014	17,10%	9,09%	30,06%
2015	20,69%	11,00%	32,76%
2016	24,20%	12,84%	38,26%
2017	27,63%	14,61%	43,57%
2018	31,12%	16,39%	47,30%
2019	34,59%	18,17%	51,14%
2020	37,98%	19,90%	54,02%
2021	36,53%	21,21%	55,39%
2022	38,28%	22,46%	58,44%
2023	44,01%	23,94%	63,37%
2024	46,95%	25,39%	66,90%

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, 2025)

Berdasarkan tabel, capaian penurunan emisi GRK tahunan Provinsi Riau dalam duapuluh tahun terakhir sebesar 46.95%, sedangkan secara kumulatif capaian penurunan emisi GRK sebesar 25.39%. Penurunan emisi GRK Provinsi Riau terbesar disumbang dari sektor forest and other land use (FOLU) sebesar 25.78%, lahan gambut sebesar 29.02%, pertanian sebesar 19.79%, peternakan sebesar 21.58%. selanjutnya persentase penurunan intensitas emisi GRK terhadap baseline tahun 2024 sebesar 66.90%.

(4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan jumlah penduduk berdampak kepada peningkatan laju pembangunan di berbagai sektor. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang terjadi di beberapa wilayah. Meningkatnya

jumlah penduduk menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya lingkungan baik secara kuantitas maupun kualitas. Salah satu parameter untuk melihat kondisi kualitas lingkungan hidup di suatu daerah adalah IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). IKLH merupakan indeks yang diperoleh dari berbagai parameter kualitas lingkungan, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Sumber data IKLH Kota Dumai diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kota Dumai masih belum memiliki data IKLH yang lengkap karena keterbatasan pengolahan data, sehingga hanya di tahun 2022 dan 2024 saja yang representatif. Kualitas lingkungan di Kota Dumai menunjukkan kemajuan substansial dalam lima tahun terakhir, terutama pada indeks komposit kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang melonjak dari 11,88 pada 2020 menjadi 67,56 pada 2024. Indeks kualitas udara mulai menurun perlahan sejak 2022, nilainya masih relatif tinggi (>87), yang berarti kualitas udara Dumai tergolong baik. Sebaliknya, indeks kualitas air sempat menurun di 2023, yang bisa disebabkan oleh tekanan pencemaran air limbah domestik atau aktivitas industri, namun kembali pulih pada 2024. Kualitas lahan menunjukkan tren yang stabil dan membaik dengan capaan 58,52 di tahun 2024.

Secara keseluruhan, kualitas lingkungan hidup di Kota Dumai mengalami perbaikan yang konsisten dan positif, mencerminkan efektivitas kebijakan dan program lingkungan yang telah dijalankan. Capaian indeks yang semakin mendekati nilai ideal menunjukkan bahwa Dumai bergerak menuju kota dengan ekosistem yang lebih sehat dan layak huni, meskipun masih terdapat tantangan, terutama dalam pengelolaan air dan pengendalian kualitas udara jangka panjang. Untuk menjaga tren ini, upaya preventif berbasis data dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan perlu terus ditingkatkan agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem kota. Data IKLH di Kota Dumai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.148
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020—2024

No	Indeks	Tahun					R/Tahun
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks Kualitas Air	-	-	50	45,6	50,83	0,83
2.	Indeks Kualitas Udara	-	91,37	92,7	89,7	87,97	-1,26
3.	Indeks Kuliatas Lahan	54,25	54,94	53,3	57	58,52	1,91
4.	Indeks Kualitas lingkunngan Hidup	11,88	49,04	68,05	66,66	67,56	54,43

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Dumai 2025-2029)

(5) Persentase Penanganan Sampah

Formula yang dipergunakan untuk menghitung persentase penanganan sampah adalah merupakan hasil bagi antara volume tempat sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Tidak dijelaskan secara terperinci yang tertulis dalam

mengenai definisi volume sampah yang ditangani, apakah memiliki pengertian volume sampah yang dibuang ke TPA atau volume sampah yang diolah. Data yang tertulis dalam tabel dibawah ini merupakan data jadi mengenai persentase penanganan sampah yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

Tabel 2.149
Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penanganan sampah (%)	56	57	66.42	49.5	66.77	68.25
Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	55,350.79	56,358.19	57,812.72	59,029.99	63,763.68	62,706.45
Sampah Terkelola	38,580.32	39,235.13	37,720.20	38,229.01	38,925.06	40,108.21
Persentase Sampah Terkelola	69.70%	69.62%	65.25%	64.76%	61.05%	63.96%

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2025)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan indikator persentase penanganan sampah di Kota Dumai menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dari kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2024, yakni dari 56% di tahun 2019 meningkat menjadi 68,25% di tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,80%.

(6) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk telah dibahas pada salah satu indikator dalam pokok bahasan pekerjaan umum. Terdapat kesamaan diantara keduanya, yakni didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut Tabel mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai yang menunjukkan pada tahun 2019 rasio seebsar 20 TPS per satuan penduduk kemudian mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 22 TPS per satuan penduduk dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,41% per tahun.

Tabel 2.150
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	20	20	20	22	31	32

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2025)

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko.

Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup; Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut ileh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA); Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup

(7) Sekolah Adiwiyata

Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang menerapkan hidup peduli lingkungan. Sekolah Adiwiyata bertujuan menyadarkan warga sekolah akan lingkungan sehingga dapat turut bertanggung jawab dalam penyelamatan lingkungan. Di samping itu, sekolah Adiwiyata juga menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah sebagai tempat kegiatan pembelajaran.

Tabel 2.151
Jumlah Sekolah Adiwiyata di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sekolah Adiwiyata	0	0	1	1	6	7

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2025)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2019-2020 tidak ada sekolah yang mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata, kemudian pada tahun 2021-2022 masing-masing satu sekolah yang mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata, Pada tahun 2023 terdapat 6 sekolah yang mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata diantaranya adalah SDN 003 Bangsal Aceh, SDN 020 Jaya Mukti, SDN 019 Pangkalan Sesai, SDN 006 Bangsal Aceh, SDN 021 Tanjung Palas dan SDN 026 Sukajadi. Kemudian pada tahun 2024 terdapat 7 sekolah di Kota Dumai yang mendapat penghargaan sekolah adiwiyata.

2.1.3.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

(1) Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah).

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pembaharuan data pada tahun 2025 terkait penduduk yang telah memiliki KTP. Dapat dilihat dari tabel di bawah pada tahun 2019 rasio penduduk yang ber KTP sebesar 96%, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 99,5%.

Tabel 2.152
Kepemilikan KTP Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kepemilikan KTP (%)	94,82	96	96,21	96,65	99,01	99,53

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2025)

(2) Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Provinsi

Data mengenai ketersediaan *database* kependudukan skala nasional berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah ada sejak tahun 2010. Database kependudukan di Kota Dumai dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang dijalankan secara online dan terpadu. Melalui program tersebut, *database* kependudukan di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel berikut secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut.

Tabel 2.153
Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala ProvinsiTahun 2019-2024

Indikator	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan database kependudukan skalanasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2025)

(3) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

KTP diberlakukan dalam skala nasional yang bertujuan sebagai pengenal yang mengandung keterangan domisili yang sah. Masa berlaku KTP adalah seumur hidup. Setiap warga negara hanya diperbolehkan mempunyai satu KTP. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai.

Tabel 2.154
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2025)

Melalui data kependudukan tersebut, Ditjen Dukcapil sedang menyiapkan peradaban baru Indonesia dengan data penduduk yang kuat berbasis *single identity number* (SIN). Sehingga setiap penduduk hanya memiliki satu identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Implementasi SIN tersebut, sejalan dengan sistem yang diamanatkan undang-undang, yaitu *one data policy*. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan data kependudukan milik Kemendagri sebagai satu-satunya data yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dan online oleh instansi-instansi terkait sebagai *Single Identity Number.*

Tabel 2.155
Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Dokumen Kependudukan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Jenis Kerjasama	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pemanfaatan data kependudukan	2 OPD	3 OPD	3 OPD	8 OPD	10 Opd	13 Opd
Pelayanan dokumen Kependudukan (KIA dan Akta kelahiran)	2 OPD	2 OPD	3 OPD	8 OPD	10 Opd	13 Opd

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2025)

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya peningkatan OPD yang melakukan kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan dalam rangka pelayanan dan perencanaan OPD yang bersangkutan. Meningkatnya pemanfatan data kependudukan dan dokumen KIA dan Akta Kelahiran oleh OPD dari tahun 2019 sebanyak 2 OPD, meningkat hingga tahun 2024 sebanyak 13 OPD.

Tabel 2.156
Jumlah Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Dumai Tahun 2019-2024

Rincian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki KIA	%	25.6	30.2	41.85	42.28	34.97	54.06	14,53

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2025)

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting dokumen kependudukan. Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dari tahun 2019-2024 naik dari 25,6% pada tahun 2019 menjadi 54,06% tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,53% per tahun

2.1.3.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Beberapa indikator terkait aspek pemberdayaan masyarakat diantaranya: (1) Jumlah kelompok binaan PKK; (2) Posyandu aktif; (3) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat; dan (4) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.157
Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jumlah kelompok binaan PKK	%	99	99	99	100	100	100
Jumlah PKK	PKK	41	41	44	44	586	1645
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100
Jumlah Posyandu	Posyandu	196	197	197	198	198	201
Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase LSM yang Dibina	%	90	90	90	100	-	-
Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	%	97	97	97	100	100	100

(Sumber : Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2025)

(1) Persentase PKK Aktif

Tahun 2024 terdapat 1,645 PKK aktif dengan persentase jumlah kelompok binaan PKK pada tersebut adalah sebesar 100%, Tim penggerak PKK harus lebih lagi memotivasi atau mendorong masyarakat untuk mau terlibat dalam semua kegiatan yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan bagi Lembaga PKK.

(2) Persentase LSM di Bina

Munculnya gerakan sosial masyarakat sipil yang berlangsung di negara berkembang dapat dipandang sebagai alternatif pendekatan perubahan sosial yang dominan (*mainstream approach*) atau lebih dikenal dengan perubahan sosial yang direkayasa oleh negara melalui apa yang disebut dengan pembangunan. Peran pemerintah Kota Dumai dalam pembinaan LSM sangat baik hal tersebut dapat dilihat dari persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina selama kurun waktu 2017-2023 sudah mencapai 100%.

(3) Persentase Posyandu Aktif

Salah satu program kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini adalah pelaksanaan Posyandu yang beraktivitas hingga di ruang lingkup desa yang memberikan pelayanan kesehatan bagi anak-anak dan juga para lansia. Posyandu memiliki peran yang sangat penting untuk pengawasan pertumbuhan dan juga perkembangan bagi anak yang masih berusia di bawah 3 tahun. Periode pertumbuhan anak pada 3 tahun pertamanya adalah periode emas alias yang paling penting terutama untuk pertumbuhan intelektual, mental, fisik, dan juga pertumbuhan dan perkembangan emosional anak. Faktor pendukung pertumbuhan anak yang baik adalah asupan gizi yang cukup, menjaga kebersihan, dan juga tak lupa mendapatkan imunisasi. Selain itu pemberian vitamin A juga penting yang

ditambah dengan pelayanan kesehatan yang bermutu. Jumlah posyandu pada tahun 2024 sebanyak 201 posyandu dengan persentase posyandu aktif sebesar 100%.

(4) Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain. Persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2022 sampai saat ini adalah sebesar 100%.

2.1.3.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(1) Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai selama periode tahun 2020-2024 adalah sebesar 3,32% akibat adanya pertambahan jumlah penduduk dari 338,064 Jiwa tahun 2023 menjadi 349.389 jiwa pada tahun 2024. Jumlah penduduk laki-laki di Kota Dumai pada tahun 2024 sebanyak 179.604 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 169.785 jiwa.

(2) Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Sedangkan ASFR adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umur nya. Seperti yang dijelaskan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.158
Total Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2021 – 2024

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur (Jiwa)	Jumlah Kelahiran Tahun 2021	Jumlah Kelahiran Tahun 2022	Jumlah Kelahiran Tahun 2023	Jumlah Kelahiran Tahun 2024	ASFR
15-19	16,429	158	144	169	114	6,94
20-24	11,957	1,506	1,414	1,304	1057	88,40
25-29	11,412	2,799	2,056	2,088	1704	149,32
30-34	11,265	2,074	1,750	1,500	1371	121,70
35-39	12,142	967	1,010	877	742	61,11
40-44	10,973	227	187	185	214	19,50
45-49	12,061	19	19	25	13	1,08
Jumlah	**86,239**	**7,750**	**6,580**	**6,148**	**5,215**	**666,85**

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025)

(3) Cakupan Peserta KB Aktif

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan

peserta KB aktif adalah proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Table di bawah ini menunjukkan pencapaian peserta KB Aktif (MCPR) yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini disebabkan pengguna, peminat, dan pengetahuan masyarakat terhadap pemakaian kontrasepsi semakin meningkat, masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi untuk ber-KB, serta menjarangkan kelahiran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar lebih sejahtera dan bahagia.

Tabel 2.159
Cakupan Peserta KB Aktif Kota DumaiTahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan peserta KB aktif	32,836	35,923	34,475	23,490	30,301	34,015

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025)

(4) Cakupan Contraseptive Prevalence Rate (CPR) Per Kecamatan, PUS bukan peserta KB, unmetneed dan PUS yang bukan target Program KB

Cakupan pemakaian kontrasepsi di Kota Dumai pada tahun 2020 adalah 75,5% (35.923 orng peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Dumai Selatan yaitu 4.831 PUS (80,2%). Pada tahun 2021 adalah 74,9% (36.132 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Dumai Selatan yaitu 5.032 PUS (82,4%), pada tahun 2022 adalah 53,8% (23.490 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Sungai Sembilan yaitu 3.990 PUS (61,7%), Selanjutnya capaian pada tahun 2023 adalah 66% (30.301 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Dumai Kota yaitu 4.023 PUS (77,1%), pada tahun 2024 adalah 70,3% (34.015 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di Kecamatan Dumai Barat yaitu 5.034 PUS (77,1%).

Sedangkan cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2020 adalah 11.652 PUS (24,5%) dengan angka unmeetneed tertinggi yang harus diintervensi yaitu di Kecamatan Dumai Kota 18,1% dengan jumlah 1.212 PUS. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2021 adalah 12.122 PUS (25,1%) dengan angka unmeetneed tertinggi yang harus di intervensi yaitu di Kecamatan Dumai Kota 16% dengan jumlah 1.069 PUS. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2022 adalah 20.150 PUS (46,2%) dengan angka unmeetneed tertinggi yang harus di intervensi yaitu ada 2 kecamatan, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Barat, Dimana kecamatan dumai timur 33,5% dengan jumlah 3.141 PUS dan kecamatan dumai barat 33,5% dengan jumlah 2.098 PUS.

Tahun 2023 cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB adalah 15.598 PUS (34%) dengan angka unmeetneed tertinggi yang harus diintervensi yaitu Kecamatan Bukit Kapur 16,7% dengan jumlah 1.451 PUS. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2024 adalah 14.342 PUS (29,7%) dengan angka unmeetneed

tertinggi yang harus di intervensi yaitu di Kecamatan Dumai Timur 9,2% dengan jumlah 948 PUS.

Tabel 2.160
Cakupan Contraseptive Prevalence Rate (CPR), PUS bukan peserta KB, Unmetneed dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan Tahun 2020-2024

KECAMATAN	PUS					CPR										PUS BUKAN PESERTA KB									
						PESERTA AKTIF					%					JUMLAH					%				
											PA / PUS / x 100										PUS BUKAN PESERTA KB / PUS x100				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Dumai Kota	6680	6680	4290	5218	4807	5117	5267	2601	4023	3424	76,60	78,85	60,63	77,10	71,23	1563	1413	1689	1195	1383	23,4	21,2	39,4	22,9	28,8
Dumai Timur	9984	10008	9364	9881	10294	7852	7810	4088	6083	6729	78,65	78,04	43,66	61,56	65,37	2132	2198	5276	3798	3565	21,4	22,0	56,3	38,4	34,6
Dumai Barat	8441	8761	6255	6217	6648	5897	5973	3152	4288	5034	69,86	68,18	50,39	68,97	75,72	2544	2788	3103	1929	1614	30,1	31,8	49,6	31,0	24,3
Dumai Selatan	6027	6104	6277	6448	7598	4831	5032	3602	4049	5315	80,16	82,44	57,38	62,79	69,95	1196	1072	2675	2399	2283	19,8	17,6	42,6	37,2	30,0
Bukit Kapur	3493	3797	8245	8669	8772	2705	3024	4414	5356	6388	77,44	79,64	53,54	61,78	72,82	788	773	3831	3313	2384	22,6	20,4	46,5	38,2	27,2
Medang kampai	6272	6079	2741	2691	3439	4886	4242	1643	1802	2119	77,90	69,78	59,94	66,96	61,62	1386	1837	1098	889	1320	22,1	30,2	40,1	33,0	38,4
Sungai Sembilan	6678	6825	6468	6775	6799	4635	4784	3990	4700	5006	69,41	70,10	61,69	69,37	73,63	2043	2041	2478	2075	1793	30,6	29,9	38,3	30,6	26,4
Kota Dumai	**47575**	**48254**	**43640**	**45899**	**48357**	**35923**	**36132**	**23490**	**30301**	**34015**	**75,51**	**74,88**	**53,83**	**66,02**	**70,34**	**11652**	**12122**	**20150**	**15598**	**14342**	**24,5**	**25,1**	**46,2**	**34,0**	**29,7**

KECAMATAN	UNMET NEED										PUS YANG BUKAN TARGET PROGRAM KB									
	JUMLAH					%					HAMIL dan IAS					%				
						UNMET NEED / PUS x 100										HAMIL dan IAS / PUS x 100				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Dumai Kota	1212	1069	1053	368	321	18,1	16,0	24,5	7,1	6,7	851	844	919	658	633	12,7	12,6	21,4	12,6	13,2
Dumai Timur	1015	1208	3141	1268	948	10,2	12,1	33,5	12,8	9,2	1117	990	2138	1749	1736	11,2	9,9	22,8	17,7	16,9
Dumai Barat	1383	1336	2098	942	437	16,4	15,2	33,5	15,2	6,6	1161	1452	1085	571	648	13,8	16,6	17,3	9,2	9,7
Dumai Selatan	625	507	1381	899	541	10,4	8,3	22,0	13,9	7,1	571	565	1314	936	972	9,5	9,3	20,9	14,5	12,8
Bukit Kapur	547	581	2384	1451	587	15,7	15,3	28,9	16,7	6,7	241	242	1598	1093	1048	6,9	6,4	19,4	12,6	11,9
Medang kampai	623	912	456	249	270	9,9	15,0	16,6	9,3	7,9	763	925	720	412	509	12,2	15,2	26,3	15,3	14,8
Sungai Sembilan	893	789	1360	800	302	13,4	11,6	21,0	11,8	4,4	1150	1252	1424	792	728	17,2	18,3	22,0	11,7	10,7
Kota Dumai	**6298**	**6402**	**11873**	**5977**	**3406**	**13,2**	**13,3**	**27,2**	**13,0**	**7,0**	**5854**	**6270**	**9198**	**6211**	**6274**	**12,3**	**13,0**	**21,1**	**13,5**	**13,0**

(5) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan, Adapun untuk keluarga sejahtera I memiliki kriteria sebagai berikut :

a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik;
d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah,

Tabel 2.161
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai
Tahun 2017-2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan /Tahun
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Keluarga	54.982	89.573	70.537	71.282	71.282	78.508	10,57
Keluarga PraSejahtera	6.369	6.369	3.803	0	0	0	-44,76
Keluarga Sejahtera I	30.371	0	0	591	591	396	-44,33

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025)

Data pada tabel di atas merupakan hasil pendataan yang dilakukan setiap lima tahun sekali dan dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya. Dari data tersebut dapat diketahui jumlah keluarga kurang mampu dan keluarga beresiko stunting yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dan pemberian bantuan.

2.1.3.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pada pokok bahasan mengenai perhubungan akan dibahas secara terinci indikator-indikator seperti jumlah arus penumpang umum, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakaan angkutan umum, serta pemasangan rambu-rambu.

(1) Jumlah Arus Penumpang Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Tabel dibawah ini menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2.162
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terminal	Berangkat	0	0	5.680	7.474	120.848	195.279
	Datang	0	0	4.906	5.925	106.649	210.815
Pelabuhan	Berangkat	134.526	24.587	46.886	48.750	155.081	120.120
	Datang	115.611	24.691	4.693	24.490	96.178	135.498
Bandara	Berangkat	53.547	14.082	292	223	39	0
	Datang	54.748	14.957	260	22	39	0
Jumlah keberangkatan (Orang)		188.073	38.669	52.858	56.447	155.120	120.120
Jumlah Kedatangan (Orang)		170.359	39.648	9.859	30.637	96.217	135.498
Jumlah keberangkatan (%)		52,47	49,37	84,28	64,82	61,72	46,99
Jumlah Kedatangan (%)		47,53	50,63	15,72	35,18	38,28	53,01

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui Terminal, Pelabuhan dan Bandara dalam rentang waktu 2019-2024 berfluktuasi. Apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (Pelabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun 2019-2024 jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal dan bandar udara. Dan pada tahun 2023 Bandara secara resmi tidak melayani untuk komersil sehingga tidak ada arus penumpang yang melalui Bandar Udara.

(2) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Adanya pelabuhan laut, udara, dan terminal bis dapat dikatakan menjadi salah satu sarana perhubungan yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah. Kota Dumai memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu “pintu masuk” bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan ini.

Dari Tabel dibawah diketahui bahwa terdapat masing-masing satu unit pelabuhan penumpang yakni Pelindo, satu unit pelabuhan Ro-ro, satu unit bandara yakni Pinang Kampai, serta satu unit terminal penumpang yakni yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping dari keempat tersebut masih terdapat beberapa pelabuhan dan terminal di Kota Dumai, diantaranya tiga unit pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Caltex/ Chevron yang khusus untuk mengangkut minyak mentah dan BBM. Pelabuhan Pertamina yang juga dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK. Selain itu juga terdapat terminal barang yang terletak di Bukit Jin, Jalan Kelurahan Bukit Datuk.

Tabel 2.163
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BisTahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pelabuhan Penumpang	2	2	2	2	2	2
Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1	1
Bandara	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang	1	1	1	1	1	1

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat dua unit pelabuhan penumpang yakni Pelabuhan Pelindo, satu unit Pelabuhan Ro-Ro, satu unit bandara yakni Bandara Pinang Kampai, serta satu unit terminal penumpang yakni Terminal Penumpang Tipe A yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping itu masih terdapat beberapa pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Pertamina yang dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK.

(3) Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang

Beberapa aspek yang mempengaruhi angkutan umum dan barang adalah keberadaan terminal atau pelabuhan, angkutan umum dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tabel dibawah menggambarkan kondisi aspek-aspek tersebut.

Tabel 2.164
Aspek Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Terminal Type C	0	0	0	0	0	0
Angkutan Kota (Oplet)	35	35	35	35	32	32
Becak Motor	53	54	54	54	54	54
Angkutan Online	251	0	0	274	252	360
Pelabuhan Rakyat	9	9	9	9	9	9
Jumlah Kecelakaan	64	53	71	81	99	79
Jumlah Pelanggaran	12.395	9.941	5.465	6.083	3.221	3.388

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

Dari Tabel tersebut diatas diketahui bahwa kondisi angkutan kota (oplet), becak motor serta pelabuhan rakyat yang ada di Kota Dumai tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2023 serta untuk kondisi jumlah angkutan online yang terdata di Kota Dumai pada Tahun

2024 sebanyak 360 unit. Sedangkan untuk data jumlah kecelakaan dan jumlah pelanggaran selama 2 tahun terakhir tidak dapat disajikan disebabkan data resmi dikeluarkan oleh Polresta Dumai bukan Dinas Perhubungan Kota Dumai.

(4) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi peningkatan sebanyak 2.268 Kir pada tahun 2022, terjadinya peningkatan tersebut dikarenakan pengujian KIR tidak terikat batasan administrasi sehingga kendaraan dari luar kota dapat melakukan pengujian KIR di Kota Dumai. UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor pun terus meningkatkan akreditasi serta kapasitas SDM Penguji, meskipun di tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.165
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	9700	9952	1728	3.996	3664	624

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

(5) Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa kepemilikan Kir angkutan umum menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan penurunan dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.166
Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.456	9.708	9.369	2.661	4.121	624

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

(6) Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor, penerangan jalan umum, dan bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang. Waktu yang butuhkan untuk pengujian kenderaan bermotor, lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Dumai sejak tahun 2019-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.167
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Menit)	28	28	28	30	30	30

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai memilik fungsi pelaksanaan dan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan uji petik dan ram cek serta pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pengujian berkala uji emisi gas buang kendaraan yang tidak dijasakan termasuk sepeda motor serta pelaksanaan dan penyelenggaraan numpang uji kendaraan bermotor dari luar daerah. Waktu yang butuhkan untuk pengujian kendaraan bermotor pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor yakni 30 menit.

(7) Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Pengujian kendaraan bermotor tersebut berada di bawah otoritas Dinas Perhubungan (Dishub) dan biasanya diterapkan pada kendaraan-kendaraan pelat kuning atau angkutan umum. Jika suatu kendaraan umum tidak lolos uji kir, maka kendaraan tersebut tak boleh beroperasi untuk mengangkut penumpang dan diharuskan untuk memperbaiki bagian-bagian yang tidak lolos dalam uji kir. Dari tabel dibawah besarnya biaya pengujian KIR yang ditetapkan dari tahun 2019 hingga tahun 2024 adalah sebesar Rp 40,000,- dan belum ada perubahan hingga saat ini.

Tabel 2.168
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Rp.)
di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Rupiah)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

(8) Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu

Dapat disampaikan bahwa jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun 2019 sebanyak 88 unit; tahun 2020 sebanyak 340 unit; tahun 2021 sebanyak 1422 unit; dan tahun 2022 sebanyak 266 unit; tahun 2023 sebanyak 739 unit, tahun 2024 sebanyak 856 unit, persentase pertumbuhan pemasangan rambu-rambu di Kota Dumai pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 15,83%.

Tabel 2.169
Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu
di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Rambu-Rambu Lalin	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pemasangan Rambu-rambu Jalan	Unit	88	340	1.422	266	739	856
Persentase Pertumbuhan pemasangan Rambu-rambu	%	-69	-27	12	-21	-3	15.83

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

(9) Penerangan Jalan Umum (PJU)

Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari sehingga mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan. Fungsi utama lampu penerangan

jalan umum (PJU) adalah memberikan pencahayaan buatan bagi pengguna jalan sehingga mereka merasa aman dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari. Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan barang-barang elektronik yang rentan atau dapat dikatakan memiliki umur pakai yang pendek, sehingga kegiatan perbaikan dan pemeliharaan mutlak dibutuhkan. Perbaikan dapat meliputi perbaikan jaringan, penggantian lampu yang mati, atau pun pengecekan kondisi PJU. Berikut disajikan perkembangan penyediaan PJU di Kota Dumai tahu 2019-2024.

Tabel 2.170
Perkembangan Penyediaan PJU Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ruas Jalan Dengan Sarana Penerangan Jalan Umum	412 Ruas Jalan	435 Ruas Jalan	445 Ruas Jalan	470 Ruas Jalan	528 Ruas Jalan	746 Ruas Jalan
Jumlah PJU Terbangun	20 Lokasi	23 Lokasi	10 Lokasi	25 Lokasi	58 Lokasi	218 lokasi

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti terlihat dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah ruas jalan yang telah dilengkapi dengan sarana penerangan jalan umum, begitu juga dengan jumlah PJU yang terbangun pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan komitmen Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mendukung Program Khidmat Penerangan.

Tabel 2.171
Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan yang Telah dikeluarkan
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Izin Trayek	1	0	1	1	0	0
Izin Usaha	3	6	7	5	0	0

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai terkait Izin Trayek Angkutan Kota dan Izin Usaha Angkutan Karyawan, dalam rentang waktu 2019-2024 izin trayek dan usaha yang dikelurkan cenderung fluktuatif disebabkan perusahaan pengguna jasa angkutan kurang selektif dalam memilih penyedia jasa angkutan karyawan yang memiliki izin usaha sehingga perlu dilakukan peningkatan pengawasan.

Tabel 2.172
Pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL)
di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelanggaran	35	42	26	148	181	139

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Dumai dalam rentang waktu 2019-2014

mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2024 hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Dumai serta seringnya dilakukan penertiban/pengawasan terhadap angkutan barang di jalan guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di jalan.

2.1.3.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

(1) Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daearah baik dalam manajemen internal organisasi maupun dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan hak setiap orang atas informasi publik, seperti tertuang pada UUD Tahun 1945 pasal 28F dan Perwako Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah juga merupakan salah satu hak yang didapatkan rakyat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, sekaligus cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Data aplikasi fungsional yang telah diterapkan pada Perangkat Daerah di Kota Dumai pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.173
Aplikasi Fungsional yang Digunakan Perangkat Daerah
Kota Dumai Tahun 2024

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
I	**Layanan Publik**		
1	Sistem Informasi Pendidikan	Dapodik	Disdikbud KotaDumai
		PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)	Disdikbud KotaDumai
		Dapodik	Disdikbud KotaDumai
		PIP (Program Indonesia Pintar)	Disdikbud KotaDumai
2	Sistem Informasi Kesehatan	ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dinkes Kota Dumai
		Sistem Informasi Hepatitis dan PISP Indonesia (SIHEPI)	Dinkes Kota Dumai
		e-KOHORT	Dinkes Kota Dumai
		Eppgbm	Dinkes Kota Dumai
		Pilar Data Esensia	RSUD Kota Dumai
		Pcare BPJS	Dinkes Kota Dumai
		SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis)	Dinkes Kota Dumai
		SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)	Dinkes Kota Dumai
		SITKO (Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga)	Dinkes Kota Dumai
		SIMKESWA (Sistem Kesehatan jiwa)	Dinkes Kota Dumai

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
		ASPAK (Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan)	Dinkes Kota Dumai
		SIPNAP (SISTEM PELAPORAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA)	Dinkes Kota Dumai
		e-monev HSP	Dinkes Kota Dumai
		e-monev TFU	Dinkes Kota Dumai
		SPPIRT	Dinkes Kota Dumai
		SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan)	Dinkes Kota Dumai
		Registrasi Fasyankes	Dinkes Kota Dumai
		SATU SEHAT	Dinkes Kota Dumai
		SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS)	Dinkes Kota Dumai
		SISMAL (Sstem Informasi Malaria)	Dinkes Kota Dumai
		Kescatin	Dinkes Kota Dumai
		e-monev PKAM	Dinkes Kota Dumai
3	Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optimal-Sistem Informasi Daerah Binaan	SIKDA-OPTIMA. (Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optima)	Dinkes Kota Dumai
		SIDARBIN (Sistem InformasiDaerah Binaan)	Dinkes Kota Dumai
		SIPGAR (Sistem Informasi Kebugaran)	Dinkes Kota Dumai
		ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan)	Dinkes Kota Dumai
4	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	SITANJAKMAS Sistem Informasi dan Pendataan Kesejahteraan Masyarakat	Dinsospm Kota Dumai
		BANSOS SIAGA	Dinsospm Kota Dumai
		SIKS-NG	Dinsospm Kota Dumai
6	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	BAPPEDA Kota Dumai
		KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)	BAPPEDA Kota Dumai
		E-Monev (Elektronik Monitoring dan Evaluasi)	BAPPEDA Kota Dumai
7	Sistem Informasi Penanaman Modal/Perizinan	OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP Kota Dumai
		SIPERI (Sistem Informasi Perizinan)	DPMPTSP Kota Dumai
		Antrean Online MPP Kota Dumai	DPMPTSP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	MATAHAR1	Bapenda Kota Dumai
		SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)	Bapenda Kota Dumai

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
		E-BILLING (Sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat nomor Kode Billing pajak)	Bapenda Kota Dumai
		E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)	Bapenda Kota Dumai
		SISMIOP (Sistem Manajemen Infromasi Objek Pajak)	Bapenda Kota Dumai
		E-BPHTB (Sistem pembayaran, pelaporan, pelayanan, dan pengawasan BPHTB elektronik)	Bapenda Kota Dumai
		Dashboard QRIS BRK Syariah	Bapenda Kota Dumai
9	CCTV Online	cctv.dumaikota.go.id	Dishub Kota Dumai
II	**Administrasi dan Manajemen Umum**		
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	e-BMD (Barang Milik Daerah)	BPKAD Kota Dumai
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	MATAHAR1	Bapenda Kota Dumai
		SIMGAJI	BPKAD Kota Dumai
		Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia	Bapenda Kota Dumai
		SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)	Bapenda Kota Dumai
3	Sistem Informasi Pengadaan	Aplikasi SPSE v4 (lpse.dumaikota.go.id)	Bagian Adm. Pembangunan Setdako Dumai
4	Sistem Informasi Pembangunan	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	BAPPEDA Kota Dumai
		Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) E-Database	BAPPEDA Kota Dumai
5	Sistem Informasi Legislasi	1. ILDIS v3 (jdih-dprd.dumaikota.go.id)	Setwan KotaDumai
		2. jdih.dumaikota.go.id	Bagian Hukumdan HAM Setdako Dumai
6	Sistem Informasi Kearsipan	JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	DISPERSIP Kota Dumai
		SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Dispersip Kota Dumai, Diskominfotiksan Kota Dumai
7	Sistem Informasi Perpustakaan	iDumai : portal & aplikasi perpustakaan digital yang berisikan beragam buku digital/ebook	DISPERSIP Kota Dumai
		INLISLite Versi 3	DISPERSIP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Aplikasi WBS (wbs.dumaikota.go.id)	Inspektorat
		E-LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	
		E-SAKIP (Sistem Informasi Akuntabiltas KinerjaInstansi Pemerintah)	

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
		Halo Inspektur (halo-inspektur.dumaikota.go.id)	
9	Sistem Aplikasi Perkantoran	SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Dispersip Kota Dumai, Diskominfotiksan Kota Dumai
		Aplikasi e-Presensi	BKPSDM Kota Dumai, Diskominfotiksan Kota Dumai
10	Sistem Administrasi Kependudukan	SiLAWO (Sistem Layanan Adminduk Warga secara Online)	Disdukcapil Kota Dumai
		SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Disdukcapil Kota Dumai
		IKD (Idenstitas Kependudukan Digital)	Disdukcapil Kota Dumai
III	**Administrasi Legislasi**		
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	jdih.dumaikota.go.id	Bagian Hukum Setdako Dumai
IV	**Manajemen Keuangan**		
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	BAPPEDA Kota Dumai
		e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
		SIPD Penatausahaan	BPKAD Kota Dumai
2	BPKAD.	SIMGAJI	BPKAD Kota Dumai
	Bappeda. Biro AP. Biro Organisasi dan Dispenda	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD KotaDumai
VI	**Manajemen Kepegawaian**		
1	Sistem Informasi Kepegawaian	SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	BKPSDM Kota Dumai
		e-Kinerja	BKPSDM Kota Dumai
		SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)	BKPSDM Kota Dumai
		SIAP (Sistem Informasi Arsip Pegawai)	BKPSDM Kota Dumai
		SI-ASN	BKPSDM Kota Dumai

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Setdako Dumai Tahun 2025)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa belum semua perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik.

(2) Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Kota Dumai ada sejak tahun 2002, dan berisikan informasi tentang fasilitas kota. Pemerintahan, pelayanan, dan informasi-informasi aktual yang selalu di-*update* hampir setiap hari. Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota Dumai ini selalu menayangkan informasi terbaru dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Dumai ini hanya dengan memantau *website* ini.

Tabel 2.174
Website Milik Pemerintah Daerah di Kota DumaiTahun 2019-20249

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2025)

(3) Indeks SPBE Kota Dumai

Capaian indeks SPBE pada tahun 2024 sebesar 3,90 dengan predikat baik. Nilai indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Untuk mewujudkan tatakelola pemrintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya, dilakukan evaluasi system pemerintah berbasis elektronik tahun 2024 untuk memperoleh nilai indeks dan prediket system pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah.

Target SPBE dapat tercapai karena dukungan Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan beberapa sub kegiatan antara lain : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik dan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah.

Tabel 2.175
Capaian Indeks SPBE di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Uraian	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Indeks SPBE	Indeks	2,54	2,25	2,56	2,63	3,34	3,90

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025)

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dan Perwako Dumai Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemeraintah Daerah Tahun 2022 dimana Kementerian PAN-RB mengamanatkan Pemerintah Daerah agar dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE menjadi lebih terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta bermanfaaat bagi masyarakat, pelaku usaha, Aparatur Sipil Negara, dan instansi pemerintah. Proses Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan melalui Aplikasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (https://tauval.spbe.go.id).

Pemerintah Daerah Kota Dumai telah mengikuti Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sejak tahun 2018. Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai membuat Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat menjadi acuan untuk meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kota Dumai. Pemantauan dan Evaluasi SPBE ini bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE Pemerintah Daerah, serta peningkatan layanan digital nasional dalam kerangka reformasi birokrasi yang berdampak.

Tabel 2.176
Data Kebutuhan Jaringan Internet 2019 – 2024

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2019	24 OPD	36 OPD	200 Mbps Internasional
2020	32 OPD	37 OPD 10 Puskesmas 24 Kel	200 Mbps Internasional 500 Mbps Domestik
2021	36 OPD	37 OPD 10 Puskesmas 24 Kel	200 Mbps Internasional 500 Mbps Domestik
2022	90 Akses Internet	108 Akses Internet 37 OPD 10 Puskesmas 24 Kel	300 Mbps Internasional
2023		221 Akses Internet	
2024	37 OPD 36 Kel	158 Akses Internet yang Terkoneksi 10 Puskesmas 35 Kel	1000 Mbps Internasional Fastlink 500 Mbps Domestik Fastlink 1000 Mbps MIX Telkom(Backup)

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, & Persandian Kota Dumai Tahun 2025)

Pada tahun 2024, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal penyediaan layanan internet kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah. Peningkatan pemenuhan layanan internet selama tahun berjalan sangat signifikan dan menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja Diskominfotiksan dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Sampai dengan tahun 2024, Diskominfotiksan telah berhasil memenuhi kebutuhan layanan internet bagi 37 OPD, 10 Puskesmas, serta 35 kelurahan yang tersebar di berbagai wilayah. Capaian ini tidak hanya memperkuat infrastruktur digital pemerintah daerah, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan.

Meskipun pencapaian tersebut tergolong sangat baik, Diskominfotiksan tetap berupaya untuk menyempurnakan jangkauan layanan. Hingga saat ini, masih terdapat satu kelurahan yang belum terlayani, yaitu Kelurahan Sungai Geniot. Namun, upaya percepatan

pemenuhan kebutuhan infrastruktur internet di kelurahan tersebut telah masuk dalam rencana kerja tahun berjalan, dan diharapkan dapat segera terealisasi demi pemerataan akses teknologi informasi di seluruh wilayah kota/kabupaten. Dengan semangat terus berbenah dan inovatif, Diskominfotiksan berkomitmen untuk mewujudkan sistem pemerintahan digital yang merata dan inklusif, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung transformasi digital daerah secara berkelanjutan.

2.1.3.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

(1) Koperasi Aktif

Pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Fungsi dari Koperasi adalah sebagai sarana pendukung perekonomian dan usaha mikro kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekomonian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Pertumbuhan koperasi aktif dari tahun 2019-2024 mengalami peningkatan atau naik dari 190 unit tahun 2019 menjadi 222 tahun 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.177
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2019-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	Unit	225	245	271	288	310	330
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	190	163	163	180	202	222
3	Persentase Koperasi Aktif	%	84,44	66,53	60,1	62,5	65,17	67,27

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2025)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan koperasi aktif di Kota Dumai perkembangannya sangat fluktuatif, namun secara rata-rata kecenderungannya meningkat sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.178
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2019-2024

No	Kecamatan	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bukit Kapur	Unit	14	13	12	12	12	12
2	Medang Kampai	Unit	11	9	8	11	12	13
3	Sungai Sembilan	Unit	39	44	50	57	72	88
4	Dumai Barat	Unit	15	17	14	14	13	17
5	Dumai selatan	Unit	28	23	17	17	19	19
6	Dumai Timur	Unit	41	30	32	35	37	43
7	Dumai Kota	Unit	39	42	27	25	28	30
8	Binaan Provinsi	Unit	0	0	0	7	7	0
9	Binaan Noasional	Unit	0	0	0	2	2	0
Kota Dumai		**Unit**	**190**	**163**	**163**	**180**	**202**	**222**

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2025)

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah koperasi aktif tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai sembilan atau bertambah dari 39 Unit pada tahun 2019 menjadi 88 unit pada tahun 2024 dan pada tahun 2023 jumlah koperasi yang aktif bertambah, dari tahun

sebelumnya dikarenakan adanya Koperasi Binaan Provinsi dan Binaan Nasional. Koperasi tersebut menpunyai peranan sebagai berikut:Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan/penghasilan, menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, turut mencerdaskan bangsa, mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang baik perseorangan maupun warga masyarakat, menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.

Tabel 2.179
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Usaha Mikro dan Kecil	Unit	16,324	16,116	6,515	8,779	11,274	12,534

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2025)

Pada tahun 2019 terdapat 16.324 UMKM kemudian pada tahun 2024 jumlah UMKM di Kota Dumai pengalami penurunan yang signifikan yakni naik menjadi 12.534 UMKM jika dibandingkan tahun sebelumnya. Data Pertumbuhan UMKM mengalami Penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2020 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah khususnya bidang UMKM menggunakan Data SIKP (sistem informasikredit program) untuk mengetahui UMKM yang aktif dan yang tidak aktif.

Adapun jumlah pendamping UMKM Kota Dumai dari tahun 2019-2024 hanya berjumlah 7 orang, dengan 1 Kecamatan 1 orang pendamping. Apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Kota Dumai pada tahun 2024 sebanyak 12.534 UMKM, maka jumlah pendamping ini belum memadai dengan rasio 1: 1.790. Adapun rincian jumlah pendamping per tahun tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.180
Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil
di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023*	2024
Jumlah Pendamping UKM	Orang	7	7	7	7	7	7

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Tahun 2025)

Selanjutnya Rekapitulasi perkembangan jumlah UMKM Kota Dumai Tahun 2023. Berdasarkan rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai tahun 2019-2023 mengalami perkembangan fluktuasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.181
Rekapitulasi Perkembangan UMKM Menurut Kecamatan
di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Kecamatan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dumai Barat	2.837	591	891	1.196	1.556	1.736
Dumai Timur	3.231	679	957	1.279	1.636	1.816
Bukit Kapur	2.182	620	892	1.220	1.573	1.753
Medang Kampai	1.656	671	938	1.277	1.636	1.816
Dumai Selatan	1.497	680	953	1.269	1.629	1.809

Kecamatan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dumai Kota	2.701	690	962	1.308	1.667	1.847
Sungai Sembilan	2.030	682	922	1.230	1.577	1.757
Jumlah	14.874	4.613	6.515	8.779	11.274	12.534

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Tahun 2025)

2.1.3.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

(1) Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya kegiatan investasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal di Kota Dumai dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor didalam menanamkan usahanya di Kota Dumai. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Dari tahun 2019-2024, jumlah investor PMDN dan PMA menunjukkan perkembangan yang positif, Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.182
Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perusahaan PMA/PMDN	135	142	279	290	356	331
Jumlah TKI/TKA	1176	1495	2704	3998	2499	795
Rasio Daya Serap Tenaga kerja	8,71	10,53	9,69	13,79	7,02	3,2

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025)

(2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

PMA (Penanaman Modal Asing) merupakan pembentukan modal bisnis di Indonesia yang ditujukan untuk investor asing, dengan sepenuhnya menggunakan modal asing atau sebagian dengan investor domestik. PMDN merupakan bentuk entitas bisnis terpopuler dan paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional di Kota Dumai mengalami perkembangan yang yang fluktuatif selama periode 2019 – 2024. Nilai investasi PMA tahun 2019 sebesar Rp. 3.699.939.000.000 kemudian turun menjadi Rp.2.750.961.828.217 juta tahun 2024. Nilai investasi PMDN tahun 2019 sebesar Rp. 2.237.451.800.000 kemudian naik menjadi Rp.7.473.162.700.000 tahun 2024. Berikut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada Tabel berikut.

Tabel 2.183
Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PMA (Rp. Trl)	3.699.939.000.000	5.844.192.480.000	8.709.022.640.000	6.647.653.285.000	2.740.817.920.000	2,750,961,828,217
PMDN (Rp. Trl)	2.237.451.800.000	7.117.105.500.000	1.444.720.200.000	6.411.175.100.000	1.789.228.800.000	7,473,162,700,000
Jumlah	5.937.390.800.000	12.961.297.980.000	10.153.742.840.000	13.058.828.385.000	4.530.046.720.000	10,224,124,528,217

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025)

(3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio daya serap tenaga kerja di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuatif dengan perkembangan naik-turun. Jumlah perusahaan tidak menentukan jumlah tenaga kerja yang tinggi juga di Kota Dumai, karena ada beberapa perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi ada perusahaan yang hanya menyerap tenaga kerja yang sedikit. Perusahaan PMDN dan PMA ini juga melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Tabel 2.184
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perusahaan PMA/PMDN	135	142	279	290	356	331
Jumlah TKI/TKA	1176	1495	2704	3998	2499	795
Rasio Daya Serap Tenaga kerja	8,71	10,53	9,69	13,79	7,02	3,2

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025)

(4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan setiap tahunnya seperti yang tersaji pada tabel di bawah. Pada tahun 2019-2024 Kota Dumai mengalami peningkatan nilai investasi PMA tahun 2019 sebesar Rp.2.390.904.980.000 kemudian naik menjadi Rp.2.750.961.828.217 juta tahun 2024. Nilai investasi PMDN tahun 2019 sebesar Rp.2.007.203.800.000 kemudian naik menjadi Rp.7.473.162.700.000 tahun 2024. Peningkatan nilai investasi yang tinggi menyiratkan bahwa kondisi wilayah Kota Dumai memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

Tabel 2.185
Nilai Realisasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PMA (Rp. Juta)	2,390,904,980,000	1,635,027,800,000	3,699,939,000,000	5,844,192,480,000	8,709,022,640,000	2,750,961,828,217
PMDN (Rp.Juta)	2,007,203,800,000	371,285,600,000	2,237,451,800,000	7,117,105,500,000	1,444,720,200,000	7,473,162,700,000
Jumlah	4,398,108,780,000	2,006,313,400,000	5,937,390,800,000	12,961,297,980,000	10,153,742,840,000	10,224,124,528,217

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025)

2.1.3.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

(1) Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan dan kerjasama dalam aksi- aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipasif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2019 adalah 3 kegiatan dan pada tahun 2024 berjumlah 3 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam Pembangunan. Berikut disajikan tabel yang menggambarkan jumlah organisasi dan kegiatan kepemudaan di Kota Dumai selama kurun waktu 2019-2024.

Tabel 2.186
Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah organisasi pemuda	47	47	47	55	55	55
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3	3	2	4	4	3

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025)

Adapun rincian organisasi pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.187
Data Organisasi Pemuda Kota Dumai yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan Kota Dumai Tahun 2024

No	Nama Organisasi
1	DPD AMPI (ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA) KOTA DUMAI
2	DPD ANGKATAN MUDA SATUAN KARYA ULAMA INDONESIA KOTA DUMAI
3	DPD AMTI (ANGKATAN MUDA THAREKAT INDONESIA KOTA DUMAI
4	DPD BKPRMI (BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MESJID INDONESIA KOTA DUMAI
5	DPD GMPI (GENERASI MUDA PEMBANGUNAN INDONESIA KOTA DUMAI
6	FATAYAT NAHDLATUL ULAMA KOTA DUMAI
7	PW GERAKAN PEMUDA ANSOR KOTA DUMAI
8	DPD GENERASI MUDA KOSGORO KOTA DUMAI
9	PD GENERASI MUDA FKPPI KOTA DUMAI
10	DPD GERAKAN MAHASISWA KOSGORO KOTA DUMAI
11	DPD GENERASI MUDA MKGR KOTA DUMAI
12	DPW GENERASI MUDA PERSATUAN KOTA DUMAI
13	DPD GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA KOTA DUMAI
14	DPD GENERASI MUDA KIARA KOTA DUMAI
15	PD GARUDA KPPRI KOTA DUMAI
16	DPD GERAKAN PEMUDA INDONESIA KOTA DUMAI

No	Nama Organisasi
17	DPD GENERASI MUDA GAKARI KOTA DUMAI
18	DPD KESATUAN ANGKATAN MUDA SRIWIJAYA KOTA DUMAI
19	DPD PATRIOT BELA BANGSA
20	PW IPPNU (IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA) KOTA DUMAI
21	PW IPNU (IKATAN PUTRA NAHDLATIL ULAMA) KOTA DUMAI
22	PW IRM (IKATAN REMAJA MUHAMMADIYAH) KOTA DUMAI
23	DPD IPTI (IKATAN PEMUDA TARBIYAH ISLAMIAH) KOTA DUMAI
24	DPD IMM (IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH) KOTA DUMAI
25	IKATAN PUTRA PUTRI INDONESIA KOTA DUMAI
26	DPD ANGKATAN MUDA PARTAI GOLKAR
27	DPD MPI (MAHASISWA PEMBANGUNAN INDONESIA) KOTA DUMAI
28	PW NA (NASYIATUL AISYAH) KOTA DUMAI
29	DD PM (PEMUDA PANCA MARGA) KOTA DUMAI
30	SATMA PEMUDA PANCASILA KOTA DUMAI
31	PW PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA DUMAI
32	DPD KELUARGA BESAR PEMUDA JUSTITIA KOTA DUMAI
33	DD PEMUDA DEMOKRAT INDONESIA KOTA DUMAI
34	DPD PEMUDA ISLAM KOTA DUMAI
35	DKD GARDA BANGSA KOTA DUMAI
36	DPD GMMP (GARDA MUDA MERAH PUTIH) KOTA DUMAI
37	PC HIMPUNA MAHASISWA AL WASHLIYAH KOTA DUMAI
38	PC IKATAN MAHASISWA AL WASHLIYAH KOTA DUMAI
39	DPW BM PAN (BARISAN MUDA PENEGAK AMANAT NASIONAL) PROVINSI RIAU
40	PW GPK (GERAKAN PEMUDA KABAH) KOTA DUMAI
41	DPD AMII (ANGKATAN MUDA ISLAM INDONESIA) KOTA DUMAI
42	PW PMII (PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA) KOTA DUMAI
43	PW AMK (ANGKATAN MUDAH KABAH) KOTA DUMAI
44	PD GMKI (GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA) KOTA DUMAI
45	DPD PEMUDA HKTI KOTA DUMAI
46	DPD GENERASI MUDA KARYA PEMBANGUNAN
47	PD KBPPP (KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLISI) KOTA DUMAI
48	DPD PUAN (PEREMPUAN AMANAT NASIONAL) KOTA DUMAI
49	DPD GMII (GERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA) KOTA DUMAI
50	SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA DUMAI
51	DD GERAKAN MUDA NURANI RAKYAT KOTA DUMAI
52	DPD BARISAN PEMUDA PEMBAHARUAN KOTA DUMAI
53	DPD IPSS (IKATAN PEMUDA SULAWESI SELATAN) KOTA DUMAI
54	DPD IPMR (IKATAN PEMUDA MINANG RIAU) KOTA DUMAI
55	DPD BARISAN MUDA DAMAI SEJAHTERA KOTA DUMAI

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025)

(2) Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kota Dumai pada tahun 2019-2023 berjumlah 29 organisasi, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebanyak 40 organisasi olahraga, data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah, pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat. Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pembinaan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan pembinaan olahraga. Namun begitu yang selalu menjadi kendala dan pembinaan adalah fasilitas sarana dan prasarana latihan atlit belum memadai.

Tabel 2.188
Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah organisasi olahraga	29	29	29	29	29	40

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025)

(3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2019 adalah 3 kegiatan dan pada tahun 2024 berjumlah 3 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan,

Tabel 2.189
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3	3	2	2	3	3

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025)

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai, rendahnya kegiatan kepemudaan ini ternyata berdampak terhadap tingginya penggunaan narkoba di kalangan pemuda di Kota Dumai.

(4) Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2019 sebanyak 3 kegiatan dan naik menjadi 9 kegiatan pada tahun 2024, data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Tabel 2.190
Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kegiatan olahraga	3	4	3	4	7	9

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025)

(5) Jumlah wirausaha muda pemula, pemuda kader, dan pemuda pelopor

Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) pada tahun 2024 sebanyak 109.588 orang sedangkan jumlah wirausaha muda pemula pada tahun 2019 sebanyak 3 orang dan meningkat ditahun 2020 sebanyak 60 orang sedangkan pada tahun 2021 tidak ada. Pada tahun 2024 jumlah wirausaha muda pemula meningkat menjadi 72 orang. Untuk pemuda kader pada tahun 2019 berjumlah 12 dan menurun ditahun 2024 menjadi 3 orang. Untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.191
Jumlah Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Kota Dumai Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wirausaha Muda Pemula	3	60	0	22	72	72
Pemuda Pelopor	2	1	0	0	0	0

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pemuda Kader	12	7	0	4	9	3

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025)

(6) Jumlah Cabang Olahraga, Pelatih, Atlit, dan Prestasi Olahraga

Jumlah cabang olah raga pada tahun 2019 sebanyak 35 orang dan meningkat ditahun 2024 sebanyak 40 orang sedangkan jumlah pelatih yang bersertifikasi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 30 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.192
Jumlah Cabang Olahraga, Pelatih, Atlit, dan Prestasi Olahraga
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cabor yang dilakukan pembinaan	35	36	40	40	40	40
Pelatih yang Bersertifikasi	30	30	30	30	30	30
Jumlah Pelatih	45	13				30
Atlit Pelajar yang dibina		8	1			
Seluruh Atlit Pelajar						52
Atlit yang berprestasi Tk. Provinsi, Nasional, Internasional		77		6	5	2
Prestasi Olahraga yang dimenangkan		14		12	2	2

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025)

2.1.3.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

(1) Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi

Ketersediaan data statistik yang terintegasi melaui implementasi teknologi informasi sangat membantu dalam perencanaan pembangunan baik bagi pemerintah maupun pihak swasta. Namun demikian banyak faktor-faktor yang sangat berpengaruh di dalamnya yakni pengguna computer, dukungan dari manajemen, transfer pengetahuan dari konsultan teknologi informasi sendiri, desain bisnis proses, struktur organisasi dan budaya yang ada pada sebuah lembaga. Meskipun keuntungan dari sistem teknologi informasi dilihat secara signifikan dan jelas, namun biaya dari pengimplementasian sistem teknologi informasi ini sangat besar.

(2) Tersedianya Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Kota

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku “Kota Dumai Dalam Angka” telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2019-2024 tersedia dapat diakses secara online, namun demikian waktu ketersediaannya belum sesuai dengan waktu kebutuhan penggunaan data untuk perencanaan.

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku buku “PDRB Kota Dumai” telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2019-2024 tersedia dapat diakses secara online, namun demikian

waktu ketersediaannya belum sesuai dengan waktu kebutuhan penggunaan data untuk perencanaan.

Tabel 2.193
Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Buku "Kota Dumai Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB Kota Dumai"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-

(Sumber: BPS Kota Dumai dan Bappeda Kota Dumai Tahun 2025)

Terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah urusan statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, di Diskominfotiksan kota Dumai berdasarkan Pepres nomor 39 tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Perwako nomor 67 tahun 2021 tentang Satu Data Kota Dumai, maka urusan statistik sektoral sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2019 sampai dengan saat ini. Dalam proses kegiatan statitik sektoral tersebut Diskominfotiksan menggunakan rumah data yang sudah teritegrasi secara nasional melalui aplikasi "Open Data" dengan link https://opendata,dumaikota,go,id/.

Tabel 2.194
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Dumai Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	65%	75%	75%	75%	100%	100%

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025)

2.1.3.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka pemda bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Hal ini mengingat dibandingkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih besar muatan tuntutan keterbukaan informasinya bagi publik.

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah

merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*),keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Namun demikian Kota Dumai pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan Sebagian masih dilakukan secara manual.

Ketidakmerataan penggunaan teknologi infromasi di semua OPD menyebabkan pelaksanaan urusan persandian persandian belum terlaksana secara maksimal. Hal ini yang menyebabkan timbulnya subjektivitas persandian yang terbatas pada tujuan menjaga kerahasiaan informasi semata.

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagiamana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.

Pengelolaan dan penerapan persandian Pemerintah Daerah Kota Dumai sudah dilakukan pada tahun 2019 sesuai Perwako nomor 44 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik. Terkait pelaksanaan Sertifikat Elektronik sudahpun terlaksana mulai tahun 2019 sampai dengan saat ini sudah terealisasi sejumlah 37 OPD yang ada di Kota Dumai.

Tabel 2.195
Capaian Kinerja Urusan Persandian Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	65%	75%	75%	75%	75%	75%

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025)

Kemudian terkait dalam pengaman informasi persandian pada tahun 2024 telah terpenuhi Web Application Firewall (WAF).

Tabel 2.196
Laporan Web Application Firewall (WAF) tahun 2022-2024

Uraian	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Attacks	Kali	6.069	8.84	5408
Hackers	Kali	950	5.321	11940

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2025)

2.1.3.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

(1) Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Jumlah penyelengaraan festival seni dan budaya yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2019-2024 menunjukkan angka yang stabil. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 5 kegiatan sedangkan pada tahun 2023 berjumlah 6 kegiatan kemudian pada tahun 2024 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 5 kegiatan. Adapun bentuk dari penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahun 2019-2024 adalah panggung seni rakyat, festival lampu colok, festival layang dan gasing, festival masakan tradisional, dan malam resepsi kenegaraan. Ini membuktikan bahwa upaya penyelenggaran fesitival seni dan budaya yang diwujudkan melalui festival dan lomba mulai menumbuhkan minat dan antuasisme masyarakat dalam melestarikan kebudayaan melayu.

Tabel 2.197
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2019 - 2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	5	5	5	5	6	5

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

(2) Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Sesungguhnya potensi karya seni dan budaya Melayu yang sejatinya direvitalisasi masih sangat banyak. Basis budaya Melayu yang berada pada aliran sungai sebagai tempat peradaban budaya Melayu masa lalu harus menjadi sumber revitalisasi dan inventarisasi. Sungai besar harus menjadi fokus dalam pelestarian budaya melayu, terutama budaya lisan dan karya seni budaya Melayu lainnya. Hal ini mengingat generasi tua yang tahu persis tentang budaya lisan dan karya seni budaya Melayu sudah mulai berangsur-angsur termakan usia tua.

(3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Dumai dimaknai sebagai pola pikir kebudayaan daerah dari sebuah kota yang religius, multikultural, kreatif, dan inovatif atau pola pikir kebudayaan manusia Dumai, yang memiliki ciri-ciri religius, multikultural, kreatif, dan inovatif dan menjaga nilai nilai budaya. Dari hasil pendataan lapangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) terdiri dari tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, masih bisa ditemukan di Kota

Dumai. Berikut tabel yang menyajikan Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2024

Tabel 2.198
Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2024

No.	Jenis	Kondisi Faktual		
		Sering dituturkan	Jarang dituturkan	Tidak dituturkan
	Tradisi Lisan			
1.	Dongeng			
	1) Putri Tujuh	√		
	2) Misteri Goa Pelintung	√		
	3) Panglima Hitam	√		
	4) Bujang Manjo	√		
	5) Buah Bakau Belukap Jin Qunai	√		
	6) Asal Mula Nama Lubuk Gaung	√		
	7) Parit Hukum	√		
2.	Pantun			
	1) Pantun Nasehat	√		
	2) Jenaka	√		
	3) Muda Mudi	√		
	4) Hantaran Belanja	√		
3.	Cerita Rakyat			
	1) Lubuk Sebetir	√		
4.	Senandung			
	1) Syair Lagu Melayu	√		
	Manuskrip			
1.	Hikayat			
	1) Silsilah keturunan Sultan Abdul Djalil Rahmad Syah (1931)	√		
2.	Serat			
	1) Pembagian Hasil Pertanian dari Kerajaan Siak	√		
	2) Penetapan Bulan Puasa	√		
3.	Naskah			
	1) Besluit no 16	√		
	2) Besluit no 60	√		
	3) Besluit no 183	√		
	4) SK Bupati Bengkalis No. 28/Desa/1962 tgl 19 Sept 1962	√		
	5) SK Camat no. 1/Pd.P/Ds- 65.	√		
	6) Lampiran SK Bupati Bengkalis No.90/B/PD/1954 tgl. 9 Okt 1954	√		
	Adat Istiadat			
1.	Aturan adat yang berkaitan dengan lingkungan			
	1) Pantang Larang	√		
2.	Aturan adat yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan			
	1) Meminang	√		
	2) Mengantar tanda	√		
	3) Mengantar belanja	√		
	4) Menegak bangsal	√		
	5) Menggantung	√		
	6) Berandam	√		
	7) Berinai curi	√		
	8) Akad nikah	√		
	9) Tepuk tepung tawar	√		
	10) Berarak pengantin	√		
	11) Silat pengantin	√		
	12) Pantun Pembuka	√		
	13) Duduk bersanding	√		
	14) Makan adab	√		
	15) Mandi taman	√		
	16) Perkawinan melayu	√		
	17) Perkawinan	√		
	18) Petang megang	√		
	19) Semah Kampung (beratip kampong)	√		

No.	Jenis	Kondisi Faktual		
		Sering dituturkan	Jarang dituturkan	Tidak dituturkan
	Ritus			
1.	Perayaan			
	1) Khitanan	√		
	2) Khatam Quran	√		
	3) Petang megang	√		
2.	Peringatan kelahiran			
	1) Mengayun anak	√		
	2) Akikah	√		
	3) Menujuh bulan	√		
	4) Tanggal pusat	√		
	5) Mencukur rambut	√		
3.	Upacara Perkawinan			
	1) Menantar tande	√		
	2) Meminang	√		
	3) Mengantar belanja	√		
	4) Berandam	√		
	5) Menggantung	√		
	6) Makan beradap	√		
	7) Berinai curi	√		
	8) Akad nikah	√		
	9) Tepuk tepung tawar	√		
	10) Berarak	√		
	11) Mandi taman	√		
4.	Upacara Kematian			
	1) Ziarah kubur 2) Menujuh hari	√		
5.	Ritual penyehatan			
	1) Semah laut	√		
	2) Nabur bunga di laut	√		
	3) Semah kampung (beratip kampong)	√		
	Pengetahuan Tradisional			
1.	Kerajinan			
	1) Tenun	√		
	2) Anyam	√		
2.	Busana			
	1) Teluk belanga	√		
	2) Cekak musang	√		
	3) Kebaya Labuh	√		
	4) Gunting cino	√		
	5) Baju kurung	√		
	6) Tanjak	√		
3.	Metode penyehatan			
	1) Buang Tetemas	√		
	2) Jemput Semangat	√		
	3) Bekam	√		
	4) Urut	√		
	5) Shinsei	√		
	6) Tidak nafsu makan	√		
	7) Mimisan	√		
	8) Masuk angin	√		
	9) Sakit kepala	√		
	10) Panas dalam	√		
	11) Sariawan	√		
	12) Migren	√		
	13) Radang tenggorokan	√		
	14) Tekanan darah rendah	√		
	15) Tekanan darah tinggi	√		
	16) Kencing kurang lancar	√		
	17) Asma (sesak napas)	√		
	18) Ambeyen	√		
	19) Sakit pinggang	√		
	20) Asam urat	√		
	21) Susah buang air besar	√		
	22) Keputihan	√		
	23) Masuk angin pada anak	√		

No.	Jenis	Kondisi Faktual		
		Sering dituturkan	Jarang dituturkan	Tidak dituturkan
	24) Muntah, mual, perut	√		
	25) Perut kembung	√		
	26) Diare	√		
	27) Mata merah	√		
	28) Cacingan	√		
	29) Cacar air	√		
	30) Keseleo	√		
	31) Typus	√		
	32) Rematik	√		
	33) Rambut rontok	√		
	34) Kolesterol	√		
	35) Bintik hitam pada wajah	√		
	36) Kokoloteun	√		
	37) Jerawat	√		
	38) Batuk	√		
	39) Batuk 100 hari	√		
	40) Batuk berlendir	√		
	41) Pilek pada anak	√		
	42) Luka tergores	√		
	43) Luka berdarah	√		
	44) Penurun panas	√		
	45) Obat bengkak	√		
	46) Menghentikan	√		
	Pendarahan	√		
	47) Tergores pisau	√		
	48) Obat bau badan	√		
	49) Agar tubuh rambut	√		
	50) Agar warna rambut hitam dan lebat	√		
	51) Sakit perut	√		
4.	Jamu/ramuan tradisional			
	1) Rempah ratus	√		
5.	Makanan dan minuman tradisional			
	1) Asam pedas	√		
	2) Kurmak	√		
	3) Kepurun	√		
	4) Hasidah	√		
	5) Bolu kemojo	√		
	6) Kue bingko	√		
	7) Laksamana mengamuk	√		
	8) Air mata pengantin	√		
	9) Kue bangkit	√		
	10) Otak naga	√		
	Teknologi Tradisional			
1.	Alat Tangkap			
	1) Jala	√		
	2) Lukah	√		
2.	Arsitektur/ Ornamen			
	1) Selembayung	√		
3.	Perkakas Pertanian			
	1) Arit	√		
	2) Parang	√		
	3) Tangguk	√		
	4) Lukah	√		
	5) Tugal	√		
	Seni			
1.	Seni Musik			
	1) Gambus	√		
	2) Marwas	√		
	3) Accordion	√		
	4) Biola	√		
	5) Gendang Bebano	√		
	6) Kompang	√		
	7) Rebana	√		
	8) Gendang Panjang	√		
	9) Budak tanjung palas	√		
	10) Lagu Laila canggung	√		
2.	Seni Tari			

No.	Jenis	Kondisi Faktual		
		Sering dituturkan	Jarang dituturkan	Tidak dituturkan
	1) Tari Persembahan	√		
	2) Tari olang-olang	√		
	3) Tari purti tujuh	√		
	4) Joget mak inang	√		
	5) Tari Langgam	√		
	6) Zapin senarak	√		
	7) Tari kreasi daerah parit hukum	√		
	8) Zapin api	√		
	9) Zapin semarak	√		
3.	Seni Rupa			
	1) Pucuk rebung	√		
	2) Lebah begayut	√		
	3) Awan berarak	√		
	4) Pucuk paku	√		
4.	Seni Sastra			
	1) Syair	√		
	2) Puisi	√		
	3) Monolog	√		
5.	Seni Teater			
	1) Teater Bangsawan	√		
	Bahasa			
1.	Bahasa Indonesia			
	1) Bahasa Indonesia	√		
2.	Bahasa Daerah			
	1) Bahasa Melayu Riau	√		
	2) Bahasa Batak	√		
	3) Bahasa Bugis	√		
	4) Bahasa Indonesia	√		
	5) Bahasa Jawa	√		
	6) Bahasa Minang	√		
	7) Bahasa Aceh	√		
	8) Bahasa Palembang	√		
	9) Bahasa Sunda	√		
	10) Bahasa China	√		
	Permainan Rakyat			
1.	Permainan Tradisional			
	1) Lulu cina buta	√		
	2) Bakiak/ Terompa Panjang	√		
	3) Pok pok pisang	√		
	4) Congkak	√		
	5) Gasing	√		
	6) Guli	√		
	7) Patok lele	√		
	8) Porok	√		
	9) Bakiak	√		
	10) Laying-layang	√		
	11) Setatak	√		
	12) Tarik Tambang	√		
	13) Tonggak dingin	√		
	14) Galah Panjang	√		
	15) Ban senebu	√		
	16) Senangkup	√		
	Olahraga Tradisional			
1.	Seni Musik			
	1) Silat	√		
	2) Sepak Takraw	√		

(Sumber: Naskah PPKD Kota Dumai 2025-2029, 2025)

(4) Objek Pemajuan Kebudayaan

Tabel 2.199
Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Dumai

No	Objek	Jenis	Keterangan
1,	Manuskrip	1. Surat Penebangan Hutan atau membuka lahan sekitar tahun 1900 2. Surat dari SultanKerajaan Siak 3. Penetapan Bulan Puasa	Ditemukan pada abad ke – 19
2,	Tradisi Lisan	1. Putri Tujuh 2. Misteri Goa Pelintung 3. Panglima Hitam 4. Bujang Manjo 5. Buah Bakau Belukap Jin 6. Asal Mula Lubuk Gaung	Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang
3,	Adat Istiadat	1. Meminang 2. Mengantar Tanda 3. Mengantar Belanja 4. Menegakkan Bangsal 5. Menggantung 6. Berandam 7. Berinai Curi 8. Akad Nikah 9. Tepuk Tepung Tawar Berarak Pengantin 10. Silat Pengantin 11. Pantun Pembuka 12. Duduk Bersanding 13. Makan Adab 14. Mandi Taman 15. Perkawinan Melayu 16. Perkawinan 17. Petang Megang 18. Semah Kampung	Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Kurang Berkembang
4,	Ritus	1. Cukur Rambut Anak 2. Mengantar Talam 3. Menujuh Hari (Tahlilan) 4. Penanggalan Pusat 5. Perayaan 6. Semah Laut	Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang
5,	Pengetahuan Tradisional	1. Pengobatan Tradisional Ada 46 jenis pengobatan diantaranya Tidak Nafsu makan, Mimisan, Masuk Angin, Panas Dalam, Sakit Kepala dan lain sebagainya 2. Busana Tradisional Teluk Balango, Cekak Musang, Kebaya Labuh, Gunting Cino, Baju Kurung 3. Jemput Semangat Membangkitkan Semangat 4. Makanan dan Minuman Kurma, Kepurun, Hasidah, Kue Bingka, Laksamana Mengamuk, Air Mata Pengantin, Kue Bangkit	Kurang Berkembang Berkembang Berkembang
6,	Teknologi Tradisional	1. Cangkul 2. Arit 3. Parang 4. Kapak 5. Tangguk 6. Lukah 7. Tugal	Peralatan yang digunakan pada bidang Pertanian dan Perikanan
7,	Seni	1. Sanggar Cik Sima, Sanggar Laksmana Melayu, Sri Kencana, Tuah Betong, Bunga Raya, Cik Minah Sayang, Tuah Pesisir, Engku Hamidah, Young Mude, Merak Seroja, Nyiur Gading, Bunga Keris, Siti Laut, Sri Pelintung, Sri Bintang, Teater Titik, Putri Pepuyu, Sri Mayang, Teater Biduk Bertuah, Teater Padepokan Bambu, Teater Bendera, 2. Mufti Edan, Alm Nurham Yahya, Abdul Hamid 3. Seni Musik Tradisional Akordion, Rebana, Bebano, Kompang, Gambus, Marwas, Gendang Panjang 4. Karya Musik Tradisional Budak Tanjung Palas, Musik Lagu Putri Tujuh, Musik Lagu Laila Canggung 5. Seni Tari Putri Tujuh, Zapin Senarak, Joget, Mak Inang, Tari Langgam, Tari Olang-olang, Tari Kreasi Daeraj Parit Hukum, Zapin Api Zapin Semarak 6. SeniTeater	1. Sanggar Tari 2. Seniman Pencipta Lagu 3. Berkembang 4. Berkembang 5. Berkembang Kurang Berkembang 6. Berkembang

No	Objek	Jenis	Keterangan
		Syair, Puisi, Monolog, Teater Bangsawan, Pertunjukan Teater	
8,	Bahasa	1. Melayu, Indonesia, Inggris, Minang, Bugis 2. Batak	1. Berkembang 2. Kurang Berkembang
9,	Permainan Rakyat	Lulu Cina Buta, Bakiak, Congklak, Gasing, Estatak, Layang-layang, Tarik tambang, Tongkat Dingin, Guli, Patok Lele, Gala Panjang, Ban Senebu, Senangkup,	Berkembang
10,	Olahraga Tradisional	Pencak Silat	

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2025)

(5) Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan prikehidupannya dilindungi oleh Undang-undang dari bahaya kepunahan. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, Bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan kebudayaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah ilmu pengetehuan pendidikan agama atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Tabel 2.200
Objek Diduga Cagar Budaya Kota Dumai Tahun 2024

NO	CAGAR BUDAYA	KLASIFIKASI OBYEK	KECAMATAN	KONDISI OBJEK Terawat/ kurang terawat/ tidak terawat
1	Makam Datuk Pawang Lion	Struktur	Medang Kampai	Terawat
2	Tapak Harimau Sakti	Struktur	Medang Kampai	Terawat
3	Batu Seludung	Struktur	Medang Kampai	tidak terawat
4	Makam putri tujuh	Struktur	Dumai Timur	Terawat
5	Bekas benteng	Struktur	Dumai Barat	Tidak ada lagi
6	Makam Simpan (kompleks chevron I)	Struktur	Dumai Selatan	Terawat
7	Makam Datuk Tabrani	Struktur	Dumai Selatan	tidak terawat
8	Makam H Jalal	Struktur	Dumai Kota	Tidak ada lagi
9	Kompleks makam Kerabat Tujuh	Situs	Dumai Kota	Terawat
10	Makam Syaikh Sayyid Aziz Ibrahim	Struktur	Sungai Sembilan	Terawat
11	Makam Panglima Delau	Struktur	Medang Kampai	tidak terawat
12	Makam Panglima Pandak	Struktur	Medang Kampai	tidak terawat
13	Makam Tuk Kedondong	Struktur	Dumai Barat	Terawat
14	Makam Syech Umar	Struktur	Dumai Barat	Terawat
15	Batu Beranak	Benda	Dumai Barat	Terawat
16	Pesanggrahan Putri Tujuh	Bangunan	Dumai Timur	Terawat
17	Makam Siti Laut	Struktur	Dumai Barat	Terawat
18	Keris 1	Benda	Dumai Barat	Terawat
19	Keris 2	Benda	Dumai Barat	Terawat
20	Keris 3	Benda	Dumai Barat	Terawat
21	Keris 4	Benda	Dumai Barat	Terawat
22	Keris kecil	Benda	Dumai Barat	Terawat
23	Mangkok 1	Benda	Dumai Barat	Terawat
24	mangkok 2	Benda	Dumai Barat	Terawat
25	Kendi 1	Benda	Dumai Barat	Terawat

NO	CAGAR BUDAYA	KLASIFIKASI OBYEK	KECAMATAN	KONDISI OBJEK Terawat/ kurang terawat/ tidak terawat
26	Kendi 2	Benda	Dumai Barat	Terawat
27	Meriam	Benda	Dumai Selatan	Terawat
28	Tepak Sirih	Benda	Dumai Barat	Terawat
29	Cepu	Benda	Dumai Barat	Terawat
30	Payung kecil	Benda	Dumai Barat	Terawat
31	Pedang panjang	Benda	Dumai Barat	Terawat
32	Keris tikam bayang	Benda	Dumai Kota	Terawat
33	Keris tahta naga siak	Benda	Dumai Kota	Terawat

(Sumber: Naskah PPKD Kota Dumai 2025-2029, 2025)

Tabel 2.201
Cagar Budaya Kota Dumai Tahun 2024

NO	CAGAR BUDAYA	KLASIFIKASI OBYEK	NO. SURAT KEPUTUSAN	KONDISI OBYEK
				Terawat/Kurang Terawat/Tidak Terawat
	CAGAR BUDAYA			
1	Batu Nisan Perempuan Komplek Makam Putri Tujuh	Situs		Terawat
2	batu Nisan Laki-laki Komplek Makam Tujuh	Situs	Kpts. Wali Kota Dumai No.430/1219/2024	Terawat
3	Makam Syech Umar	Situs	SK Wako : 925/2021	Terawat
4	Batu Beranak	Situs	SK Wako : 925/2021	Terawat
5	Keuntungan	Situs	SK Wako : 925/2021	Terawat
6	Makam Pawang Lion	Situs	SK Wako : 925/2021	Terawat
7	Tapak Harimau Sakti	Situs	SK Wako : 925/2021	Terawat

(Sumber: Naskah PPKD Kota Dumai 2025-2029, 2025)

2.1.3.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

(1) Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2019 hingga tahun 2024 cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah perpustakaan sebanyak 19 perpustakaan kemudian naik menjadi 264 pada tahun 2024 dimana adanya perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.202
Jumlah Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Kota Dumai Tahun 2024

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan	Jumlah Pustakawan	Jumlah Yang Sudah Terakreditasi
I	**Perpustakaan Umum**	**34**	**97**	**6**	**1**
	Perpustakaan Kab/Kota	1	17	6	1
	Perpustakaan Kecamatan	6	7	0	0
	Perpustakaan Desa/Kelurahan	15	49	0	0
	Taman Bacaan Masyarakat	12	24		0
II	**Perpustakaan Sekolah**	**210**	**394**	**0**	**28**
	Perpustakaan SD (Negeri/Swasta)	108	214	0	11
	Perpustakaan SMP (Negeri/Swasta)	38	100	0	9
	Perpustakaan SMA (Negeri/Swasta)	16	32	0	5
	Perpustakaan SMK (Negeri/Swasta)	16	16	0	2

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan	Jumlah Pustakawan	Jumlah Yang Sudah Terakreditasi
	Perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah	7	7	0	
	Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah	16	16	0	1
	Perpustakaan Madrasah Aliyah	9	9	0	
III	**Perpustakaan Perguruan Tinggi**	**7**	12	2	
IV	**Perpustakaan Khusus**	**13**	**29**	**0**	**0**
	Perpustakaan Instansi/OPD	8	11		
	Perpustakaan Rumah Ibadah				
	Perpustakaan Pondok Pesantren	5	18		
Total		**264**	**532**	**8**	**29**

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2025)

(2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan Kota Dumai tahun 2019 sd 2024 mengalami peningkatan yang fluktuatif sebanyak 37.710 pengunjung ditahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 9.100 pengunjung. Pada tahun 2021 sd 2024 pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan kembali. Sedangkan untuk jumlah anggota perpustakaan dari tahun ketahun mengalami peningkatan seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.203
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	37.710	9.100	11.630	33.301	33.418	33.672
Jumlah Anggota Perpustakaan	132	90	97	253	6.716	7.400

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2025)

(3) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kota Dumai dari rentang waktu tahun 2019-2024 sebanyak 54.976, baik melalui pembelian buku oleh perpustakaan daerah sendiri maupun hibah buku keperpustakaan daerah oleh pihak lain. Tetapi ada hibah buku langsung oleh pihak lain keperpustakaan kelurahan maupun keperpustakaan rutan. Pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan mendapat penambahan buku berupa *e-book* yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus sebanyak 2.460 eksemplar sehingga tahun 2022 jumlah buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai sebanyak 54.723 eksemplar.

Tabel 2.204
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	53,557	53.557	54.202	54.202	54.723	54.976

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	0	0	0	64,6	0	64,46
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	0	0	61,87	68,42	70
Nilai Pengawasan Kearsipan	60,14	63,01	30,92	36,55	45,65	35,01

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2025)

(4) Nilai Pengawasan Kearsipan

Berdasarkan uraian hasil pengawasan kearsipan yang dinilai secara eksternal, maka dapat disimpulkan bahwwa penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 35,01 dengan kategori "C" (Kurang). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan bahwa Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi dari nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dan nilai hasil pengawasan kearsipan internal, dimana nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal yang diperoleh adalah sebesar 21,01. Adapun rincian hasil penilaian tersaji dalam tabel di bawah.

Tabel 2.205
Rekapitulasi Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal
Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024

Aspek/Komponen	Nilai Standar	Nilai Perolehan	Bobot Aspek	Nilai Aspek
Aspek Kebijakan	1100	800	15%	10,91%
Aspek Pembinaan	1900	570	25%	7,50%
Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan Retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun	800	270	10%	3,38%
Aspek Pengelolaan Arsip Statis	2200	640	30%	8,73%
Aspek Sumber Daya Kearsipan	2400	540	20%	4,50%
TOTAL NILAI/NILAI STANDAR/SKOR	**8400**	**2820**	**35,01**	
KATEGORI	**C (KURANG)**			

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2025)

(5) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi atau kemampuan membaca dan menulis masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 menegaskan bahwa IPLM menjadi salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan.

Tabel 2.206
Indeks Pembangunan Literasi
Kota Dumai Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator	Tahun	
	2023	2024
Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,51	0,50
Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	0,23	0,31
Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	1,00	1,00
Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari	0,05	0,09
Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	1,00	1,00
Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	1,00	1,00
Jumlah anggota Perpustakaan	1,00	1,00
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	68,42	70,00

(Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Dumai menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Nilai IPLM tercatat sebesar 68,42 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 70,00 pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh beberapa indikator pendukung. Dari sisi pemerataan layanan perpustakaan, terjadi sedikit penurunan dari 0,51 pada tahun 2023 menjadi 0,50 di tahun 2024. Namun demikian, terdapat perbaikan pada indikator ketercukupan koleksi perpustakaan, yang meningkat signifikan dari 0,23 menjadi 0,31, sehingga mampu memperkuat ketersediaan bahan bacaan bagi masyarakat. Indikator rasio ketercukupan tenaga perpustakaan tetap berada pada angka 1,00, menunjukkan bahwa tenaga pengelola perpustakaan sudah sesuai standar. Begitu juga dengan indikator perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan jumlah anggota perpustakaan, yang konsisten berada pada nilai 1,00 baik pada tahun 2023 maupun 2024.

Sementara itu, tingkat kunjungan masyarakat per hari mengalami peningkatan positif dari 0,05 pada 2023 menjadi 0,09 pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat sedikit penurunan pada pemerataan layanan, peningkatan pada indikator koleksi, kunjungan masyarakat, serta konsistensi indikator lainnya berkontribusi pada kenaikan nilai IPLM. Hal ini menandakan adanya perkembangan positif dalam pembangunan literasi masyarakat di Kota Dumai.

2.1.3.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

(1) Dokumen Arsip yang tersimpan di Perpustakaan

Pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan. Kegiatan pengelolaan arsip secara baku yang dilakukan oleh perangkat daerah yang ada di Kota Dumai, berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk persentase arsip daerah yang dapat dikelola seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.207
Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokumen Arsip	3.503	3.549	3.549	3.549	3.549	3.399

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2025)

(2) Arsip Vital dan Statis yang Tersimpan

Tabel 2.208
Arsip Vital dan Statis Kota Dumai yang Tersimpan tahun 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Arsip Vital (dokumen)	Tidak ada di kegiatan	6	-	-	-	-
Jumlag Arsip Statis (dokumen)	-	40	-	-	-	-

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2025)

2.1.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

(1) Produksi Perikanan Laut

Kota Dumai memiliki laut yang cukup berpotensi sebagai wadah produksi perikanan laut, Perikanan laut di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki produksi perikanan laut yang memiliki banyak jenis ikan dan produksi perikanan laut yang tinggi setiap tahunnya, Kota Dumai memiliki beragam jenis perikanan laut yang memiliki produksi yang besar setiap tahunnya dibandingkan dengan perikanan budidaya,

AKI merupakan indikator kinerja untuk melihat peningkatan konsumsi ikan di Kota Dumai, Hal yang perlu dilakukan kedepannya dalam peningkatan AKI adalah peningkatan ketersediaan ikan pasaran, penguatan distribusi dan stabilisasi harga ikan, peningkatan aksesibilitas/keterjangkauan ikan pada rumah tangga yang tingkat konsumsi ikannya masih rendah, dan peningkatan preferensi konsumsi ikan untuk meningkatkan motivasi makasi ikan, Hal ini dilakukan karena budaya makan ikan di Kota Dumai belum terbentuk, serta pelu dilakukan promosi dan edukasi yang konsisten, Angka konsumsi ikan per kapita tahun 2024 di Kota Dumai sebesar 44,83% masih sama dengan angka konsumsi ikan pada tahun 2023, Angka konsumsi ikan ini baru mencapai 74,72% dari target Nasional sebesar 60 kg perkapita pertahun,

Tabel 2.209
Jumlah Produksi Perikanan, Cakupan Konsumsi Ikan dan Cakupan Binaan Kelompok Nelayan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan/ Tahun (%)
Angka Konsumsi Ikan (Kg per Perkapita)	45,51	44,75	45,19	49,64	44,83	44,83	-0,30
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	329,78	293,78	311,77	382,69	344,07	292,44	-2,37
Cakupan Binaan Kelompok Nelayan (kelompok)	29	29	32	18	23	25	-2,92

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan/ Tahun (%)
Cakupan Binaan Kelompok Pembudidayaan Ikan (kelompok)	31	34	37	31	47	44	7,26
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	1.426,74	978,52	710,57	1.020,3	1.057,43	1.280,27	-2,14

(Sumber: Dinas Perikanan, 2025)

Salah satu IKU Dinas Perikanan Kota Dumai adalah angka konsumsi ikan (AKI), AKI merupakan tingkat konsumsi masyarakat Kota Dumai selama stau tahun terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per kapita per tahun, Manfaat dari AKI adalah (1) menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di wilayah Kota Dumai, (2) mengetahui pola konsumsi masyarakat dan analisis preferensi konsumen di Kota Dumai, dan (3) mengetahui sumbangan ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani, Sumber data yang digunakan dalam perhitungan AKI di Kota Dumai adalah konsumsi di rumah tangga, konsumsi luar rumah tangga (hotel, restoran, catering, asrama, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, dan lain sebagainya), dan konsumsi tidak tercatat (produk olahan perikanan, seperti nugget ikan, bakso ikan, mpek-mpek, siomay, otak-otak, dan lain-lain),

Angka Konsumsi Ikan merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat selama 1 tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar, Kenaikan angka konsumsi ikan tidak lepar dari gencarnya kampanye Gemarikan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan, Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dalam rangka peningkatan status gizi masyarakat untuk membentuk bangsa yang sehat, kuat dan cerdas,

Pada tahun 2024 target Cakupan bina kelompok nelayan sebanyak 22 Kelompok dengan realisasi sebanyak 25 kelompok, dimana 23 kelompok lama dan penambahan 2 kelompok baru, Kegiatan ini dilakukan oleh tenaga penyuluh pns dan non pns Dinas Perikanan,

Target cakupan bina kelompok pembudidaya ikan pada tahun 2024 adalah sebanyak 37 kelompok dengan realisasi sebanyak 44 kelompok, Sama dengan pembinaan terhadap kelompok nelayan, pembinaan dan pendampingan pada kelompok budidaya juga dilakukan oleh penyuluh PNS dan Non PNS, Selain memberikan pendampingan, juga melakukan sharing ilmu pengetahuan dan teknologi,

Saat ini Sondong menjadi salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya karena dapat merusak ekosistem laut, Pelarangan penggunaan sondong tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,

Akibat adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, banyak nelayan dumai mengalihkan pengunaan

alat tangkapnya dengan Jaring, Namun hasil yang didapat tidak sebanding dengan hasil penangkapan menggunakan alat tangkap sondong, Selain dari pergantian alat penangkapan ikan yang digunakan, salah satu faktor produksi perikanan laut Kota Dumai menurun adalah adanya perbaikan pola mendata statistik yang berdasarkan kawasan tempat melelangkan atau menjual ikan seperti tidak mendata lagi ikan yang masuk ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang pengelolaannya berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Untuk lebih jelasnya produksi perikanan laut Kota Dumai Tahun 2019-2024, Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut,

Tabel 2.210
Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2019-2024

No	Jenis Ikan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tenggiri	404.013	49.878	68.62	82.477	89.300	96,256
2	Parang-parang	12.297	16.387	39.853	56.903	33.062	39,268
3	Senangin	12.537	52.841	59.808	87.120	78.677	133,623
4	Kakap hitam/putih	8.690	13.397	25.673	57.009	48.045	48,039
5	Gulama	2.223	15.127	14.296	11.546	3.073	3,390
7	Lomek	5.825	73.12	139.087	201.051	261.736	258,753
8	Biang	0	79.018	96.364	166.302	179.927	166,386
9	Pari	23.155	30.635	18.156	38.016	20.749	32,699
10	Bawal	3.364	4.126	10.635	4.307	1.309	826
11	Ikan lainnya	276.160	119.168	166.353	256.260	257.187	394,751
12	Udang lainnya	271.592	252.652	71.723	59.309	84.368	106,274
Jumlah		**1.019.856**	**706.349**	**710.568**	**1.020.300**	**1.057.433**	**1.280.265**

(Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai, 2025)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi perikanan laut kota Dumai Tahun 2024 adalah sebanyak 1.280.265 Ton. Adapun jenis ikan yang paling besar volumenya adalah ikan lainnya diikuti dengan ikan lomek, biang, senangin, dan udang. Data yang didapat diperoleh dari nelayan kota Dumai, kemudian data tersebut di input ke dalam satu data dan divalidasi bertahap oleh kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

(2) Produksi Perikanan Budidaya

Selain produksi perikanan tangkap, juga dilakukan pendataan terhadap produksi perikanan budidaya. Data tersebut diperoleh dari hasil pendataan lapangan yang dilakukan kepada pembudidaya ikan di Kota Dumai. Ada 9 (sembilan) jenis ikan yang merupakan produksi perikanan budidaya, yaitu ikan mas, ikan nila, gurami, lele, patin, bawal, bandeng, udang (windu wanname) dan kepiting. Berdasarkan Tabel dibawah ini, produksi perikanan budidaya tertinggi adalah ikan lele, diikuti dengan udang vanname, ikan nila, patin, gurami, dan bawal.

Perkembangan produksi perikanan budidaya juga mengalami fluktuatif sejak dari tahun 2019-2024 seperti disajikan pada tabel dibawah berikut. Pada Tahun 2019 produksi perikanan budidaya mencapai 302.070 Kg, pada tahun 2020 turun menjadi 293.786 Kg, kemudian mengalami perkembangan produksi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hingga tahun 2022 produksi perikanan budidaya di Kota Dumai mencapai 382.694 Kg, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 344.072 Kg dan tahun 2024 sebesar 292.442 Kg.

Tabel 2.211
Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2019 – 2024

No	Jenis Ikan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ikan Mas	-	-	-	-	-	-
2	Ikan Nila	345	9.660	1.416	17.230	9.000	28,805
3	Gurami	318	373	400	2.462	1.300	297
4	Lele	275.500	164.964	204.930	260.641	233.574	203,820
5	Patin	7.760	2.942	1.078	3.485	2.225	5,429
6	Bawal	-	-	-	5	-	200
7	Bandeng	-	-	94	247	-	-
8	Udang (Windu/ Wanname)	18.147	11.061	103.851	98.624	97.933	53.891
9	Kepiting	-	-	-	-	40	-
Jumlah		**302.070**	**293.786**	**311.769**	**382.694**	**344.072**	**292.442**

(Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai, 2025)

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pengembangan Budidaya Perikanan Berbasis Keunggulan Daerah di Provinsi Riau, dijelaskan bahwa pada tahun 2020, ada 4 (empat) komoditas unggulan, yaitu udang vanname, bandeng, kakap, dan nila salin. Kemudian diperbaharui pada tahun 2022 menjadi 5 (lima) komoditas unggulan, yaitu udang vanname, bandeng, kakap, nila saling dan kepiting bakau. Berita Acara kesepakatan tersebut dibuat sebagai dasar acuan daerah untuk pengembangan sentra perikanan unggulan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa salah satu komoditas unggulan yaitu ikan nila salin mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan dari 9.000 kg pada tahun 2023 menjadi 28.805 kg pada tahun 2024.

Budidaya ikan nila menjadi salah satu sektor yang diminati oleh pembudidaya ikan. Hal ini dikarenakan ikan nila memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan pesat serta waktu panen yang singkat. Selain itu, kan nila dapat hidup dikondisi kepadatan tinggi, tahan terhadap penyakit, respon terhadap pakan, baik itu pakan buatan maupun pakan alami.

Selain ikan nila, udang vanname juga menjadi salah satu komoditas unggulan yang diminati oleh pembudidaya ikan. Sentra Budidaya udang vanname di Kota Dumai berada di Kecamatan Sungai sembilan dan sebagian kecil Kecamatan Medang Kampai. Kedua lokasi tersebut menjadi daerah sentra budidaya udang vanname dikarenakan kondisi lingkungan yang sangat mendukung, salah satunya kondisi air (salinitas dan tingkat keasaman (pH) air) yang sesuai untuk berbudidaya udang vanname.

Pada Tabel diatas dapat dilihat, ada beberapa komoditas yang hasil produksinya 0 (nol) atau tidak ada. Data tersebut benar dan sesuai dengan data lapangan dan telah divalidasi secara nasional melalui aplikasi satudata KKP. Tidak adanya data produksi pada komoditas tertentu dikarenakan beberapa faktor, yaitu (1) kelompok yang melakukan pembudidayaan komoditas tersebut tidak lagi melakukan aktivitas pembudidayaan ikan, (2) jumlah permintaan yang rendah terhadap komoditas tersebut mengakibatkan pembudidaya mengalami kerugian dan tidak dapat menutupi biaya operasional selama proses pembesaran, (3) tidak adanya pembaharuan ilmu tentang budidaya terhadap komoditas

tertentu, dan (4) rendahnya kualitas komoditas lokal dibandingkan dengan komoditas sejenis yang didatangkan dari daerah sekitar atau daerah luar lainnya.

2.1.3.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Kota Dumai. Sektor ini memiliki relasi yang kuat dengan sektor-sektor lainya dan memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian daerah,sehingga sektor pariwisata dikembangkan menjadi salah satu potensi daerah.

(1) Jenis Destinasi Wisata

Pariwisata merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan/jasa yang disediakan oleh pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Keberadaan potensi pariwisata yang unik dan menarik di suatu daerah seharusnya dapat dimanfaatkan melalui pengembangan pariwisata yang baik. Kota Dumai memiliki 4 jenis Portofolio produk yaitu wisata alam, wisata agama, wisata olahraga dan wisata kuliner. Adapun jenis-jenis wisata tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.212
Jenis Destinasi Wisata Alam Kota Dumai Tahun 2024

No.	Wisata Alam	Lokasi
1	Pantai Puak Teluk Makmur	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
2	Pantai Purnama	Jl. Cut Nyak Dien - Purnama
3	Pantai Kapten Erwin	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
4	Pantai Bahar	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
5	Pantai Panorama	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
6	Pantai Koneng	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
7	Pantai Bahtera	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
8	Pantai Legenda	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
9	Pantai Pohon Binjai	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
10	Pantai Wan Mas	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
11	Pantai Salam lestari	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
12	Pantai Kampung mundam Wak Ngah	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
13	Pantai Pesona batu purnama	Jl. Stell Purnama
13	Hutan Wisata	Jl. Raya Dumai Bukit Jin
14	Danau Bunga Tujuh	Jl. Raya Dumai Bukit Jin
15	Hutan Bakau UNRI	Komp. Kampus Universitas Riau Purnama
16	Wisata Sungai Mesjid	Komp. Kampus Universitas Riau Purnama
17	Kuala sungai Dumai	Jl. Syekh Umar
18	Pesona Bukit Seludung	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
19	Wisata Bandar Bakau	Jl. Nelayan Dumai
20	Kampung Teratai	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai Duri)
21	Rumah Pohon	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai Duri)
22	Kampung Lamo Pulai Bungkuk	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
23	Kampung Wisata Pesisir	Jl. Cendrawasih (Kel. Laksamana
24	Taman Putri Zara	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
25	Taman Wisata Bukit Gelanggang	Jl. H.R. Soebrantas
26	Penakaran Harimau Senepis	Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan
27	Embung Bukit Cahaya	Jl. Raya Dumai Bukit Jin
28	Sungai Dumai (Wisata Air)	Jl. Budi Kemuliaan
29	Telaga Tirta Bukit Datuk	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025)

Tabel 2.213
Jenis Destinasi Wisata Kota Dumai Tahun 2024

No	Wisata Alam	Lokasi	No	Wisata Agama	Lokasi
1	Pantai Puak Teluk Makmur	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)	1	Dumai Islamic Center (DIC)	Jl. HR. Soebrantas
2	Pantai Purnama	Jl. Cut Nyak Dien - Purnama	2	Masjid Raya Al Manan	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai

No	Wisata Alam	Lokasi	No	Wisata Agama	Lokasi
					Duri)
3	Pantai Kapten Erwin	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)	3	Pura	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai Duri)
4	Pantai Bahar	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)	4	Kelenteng Hoch Liong Kiong	Jl. Kelakap Tujuh
5	Pantai Panorama	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)	5	Wisata Religi Rumah Suluk	Sungai Sembilan
6	Pantai KONENG	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)	6	Mesjid Terapung Pantai Puak Teluk Makmur	-
7	Pantai Bahtera	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)	**No**	**Wisata Olah Raga**	**Lokasi**
8	Pantai Legenda	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)	1	Lapangan Golf PTGC	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)
9	Pantai Pohon Binjai	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)	2	Kolam Renang Bukit Datuk	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)
10	Pantai Wan Mas	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)	3	Kolam Pancing Patra	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)
11	Pantai Salam lestari	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)	4	Wisata mancing Wak Ngah Kampung Mundam	
12	Pantai Kampung mundam Wak Ngah	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)	**No**	**Wisata Belanja**	**Lokasi**
13	Pantai Pesona batu purnama	Jl. Stell Purnama	1	Ramayana Plaza	Jl. Jend. Sudirman
13	Hutan Wisata	Jl. Raya Dumai Bukit Jin	2	Citimall	Jl. Raya Bukit Datuk
14	Danau Bunga Tujuh	Jl. Raya Dumai Bukit Jin	3	Pasar Bunda Sri Mersing/Pasar Pulau payung	Jl. Diponegoro
15	Hutan Bakau UNRI	Komp. Kampus Universitas Riau Purnama	4	Pasar Senggol	Jl. Jend. Sudirman
16	Wisata Sungai Mesjid	Komp. Kampus Universitas Riau Purnama	5	Pasar lepin	Jl. Jend. Sudirman
17	Kuala sungai Dumai	Jl. Syekh Umar			
18	Pesona Bukit Seludung	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)	**No**	**Wisata Kuliner**	**Lokasi**
19	Wisata Bandar Bakau	Jl. Nelayan Dumai	1	DEKRANASDA Kota Dumai	Jl. Jend. Sudirman No. 55
20	Kampung Teratai	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai Duri)		(Bolu Kemojo. Dodol. Keripik.dll)	
21	Rumah Pohon	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai Duri)	2	Wisata Kuliner Ombak (menyediakan	Jl. Sultan Hasanuddin/Jl. Ombak
22	Kampung Lamo Pulai Bungkuk	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)		berbagai jenis makanan.	
23	Kampung Wisata Pesisir	Jl. Cendrawasih (Kel. Laksamana	3	Oleh- oleh khas Dumai (kerupuk cabe)	Jl. Pulau Mampu (dekat pasar P. Payung
24	Taman Putri Zara	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)	4	Dendeng Pucuk ubiFatmawati	Jl. Tenaga - Sultan Syarif Qasim
25	Taman Wisata Bukit Gelanggang	Jl. H.R. Soebrantas	5	Restoran dan Rumah Makan	

No	Wisata Alam	Lokasi	No	Wisata Agama	Lokasi
26	Penakaran Harimau Senepis	Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan	6	Wisata Kuliner Kelakap Tujuh	
27	Embung Bukit Cahaya	Jl. Raya Dumai Bukit Jin	7	Wisata Kuliner Dock Yard	
28	Sungai Dumai (WisataAir)	Jl. Budi Kemuliaan	8	Kuliner Janur KuningJayamukti	Jl. Janur Kuning
29	Telaga Tirta Bukit Datuk	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)	9	Kampung Kuliner Bukit Gelanggang	Jl. Jend. Sudirman

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025)

(2) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisata dari tahun 2019-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel berikut. Jumlah kunjungan wisata tertinggi terjadi pada tahun 2024 seiring dengan meningkatnya daya tarik dan jenis pariwisata yang ada di Kota Dumai yaitu sebesar 108.800 orang. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024 yaitu wisata domestik sebanyak 95.300 orang sedangkan wisata mancanegara angkanya sebanyak 13.500 orang. Data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Tabel 2.214
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wisatawan Domestik	81.202	39.325	39.325	123.541	78.481	95.300
Wisatawan Mancanegara	12.908	3.834	3.834	5.113	6.031	13.500
Jumlah	94.110	43.159	43.159	28.654	84.512	108.800

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025)

2.1.3.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

(1) Produktivitas Padi

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai di pengaruhi oleh besarnya luas panen dan produktivitas. Luas panen padi dan bahan pangan utama lainnya dipengaruhi oleh jumlah luas tanam pada lahan sawah maupun lahan bukan sawah serta indeks pertanaman, sedangkan produktivitas padi dan palawija tergantung cara tanam, pemeliharaan tanaman dan atau paket teknologi yang dilakukan oleh petani di Kota Dumai. Peningkatan produkitivitas padi dan palawija cenderung mengalami naik turun pada setiap tahunnya.

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2019-2024. Produktivitas Padi pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,30 ton per hektar. Luas panen tahun 2024 juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 dari 1.997,22 Ha menjadi 1.199 Ha. Hal ini dikarenakan terjadinya banjir di Kota Dumai pada awal tahun 2024.

Tabel 2.215
Produktivitas Tanaman Padi Di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Luas Panen (Ha)	279,39	1,216,20	1,097,22	2,927,54	1,997,23	1,199,00	33,82%
Rasio Produktivitas Padi (Ton/Ha)	3,35	3,47	3,47	3,50	3,70	3,40	0,30%

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2025)

(2) Luas, Produksi dan Produktivitas Perkebunan

Berdasarkan kondisi topografi, kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang. Kondisi ini membuat lahan di Kota Dumai berpotensi untuk pengembangan tanaman perkebunan. Adapun luas areal perkebunan menurut jenis tanaman di Kota Dumai tersaji pada Tabel dibawah ini. Dari tabel terlihat bahwa jenis tanaman perkebunan yang dominan dikembangkan di Kota Dumai adalah kelapa sawit. Hasil produksi dari perkebunan kelapa sawit ini digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan kelapa sawit yang ada di Dumai.

Secara total Luas Panen dan Produksi tanaman perkebunan pada tahun 2024 mengalami peningkatan kecuali kakao. Tanaman perkebunan masih didominasi oleh Kelapa Sawit, Karet, Kelapa dan kakao. Jika dilihat dari komoditinya luas panen kelapa sawit masih menjadi komoditi primodana untuk perkebunan, penambahan luas tanam setiap tahunnya selalu ada meskipun tidak ada bantuan dari pemerintah. Untuk kakao saat ini sudah mulai diminati petani karena merupakan tanaman perkebunan yang tidak membutuhkan lahan yang luas, cukup di tanaman disela-sela tanaman lain atau di lahan pekarangan. Harga jual kakao pun sangat baik. Jika dilihat dari produksi maka semua komoditi menurun produksinya walaupun tidak terlalu signifikan.

Tabel 2.216
Luas, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Menurut JenisTanaman di Kota Dumai Tahun 2019-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Luas Panen**							
	Kelapa Sawit	Ha	38,569,00	38,665,50	38,755,00	38,805,00	90,163,50	90,283,00
	Karet	Ha	2,449,00	2,448,00	2,449,00	2,448,00	1,735,00	1,741,00
	Kelapa	Ha	1,495,00	1,481,50	1,476,00	1,473,00	510,00	498,50
	Kakao	Ha	26,50	24,50	12,94	26,00	25,50	26,50
2	**Produksi**							
	Kelapa Sawit	Ton	82,248,17	82,544,47	83,283,38	84,292,00	114,931,14	135,215,64
	Karet	Ton	1,839,88	1,850,44	1,871,91	1,920,00	1,437,64	1,554,68
	Kelapa	Ton	874,15	876,98	882,12	877,00	283,56	298,26
	Kakao	Ton	11,39	11,66	24,50	14,00	13,42	13,68
3	**Produktivitas**							
	Kelapa Sawit	Ton/ha	2,13	2,13	2,15	2,17	1,27	1,50

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Karet	Ton/ha	0,75	0,76	0,76	0,78	0,83	0,89
	Kelapa	Ton/ha	0,58	0,59	0,60	0,60	0,56	0,60
	Kakao	Ton/ha	0,43	0,48	1,89	0,54	0,53	0,52

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2025,

Selain kelapa sawit, areal perkebunan di Kota Dumai ditanami karet, kelapa, dan kakao. Tanaman perkebunan selain kelapa sawit di Kota Dumai yang dominan adalah Karet, sedangkan untuk jenis tanaman perkebunan lainnya pada umumnya ditanam pada lahan pekarangan sekitar rumah seperti kelapa dan kakao. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan maka perlu dilakukan peremajaan tanaman. Peremajaan tanaman ini difokuskan untuk tanaman perkebunan yang sudah tua dan atau perkebunan yang ditanami dengan bibit yang tidak unggul.

(3) Populasi dan Produksi Ternak

Populasi dan Produksi ternak menurut jenis ternak di Kota Dumai Tahun 2024 secara umum mengalami fluktuatif, terdapat beberapa satu jenis ternak yang mengalami penurunan dan peningkatan. Untuk Populasi ternak ayam kampung mengalami kenaikan signifikan dari 23.444 ekor pada tahun 2023 menjadi 40.882 pada tahun 2024. Sedangkan populasi ternak sapi potong dan kerbau juga mengalami kenaikan populasi walaupun tidak terlalu signifikan. Ayam ras pedaging mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 2.013.000 ekor pada tahun 2023 menjadi 316.099 ekor pada tahun 2024. Produksi daging dan telur tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 202 juga mengalami kenaikan, yaitu produksi daging sapi potong dan kambing/domba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.217
Populasi dan Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kota Dumai
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Populasi Ternak**								
	Sapi Potong	Ekor	5.117	1.362	5.166	8.095	7.600	7.876	9,01
	Kerbau	Ekor	51	1	24	30	19	26	-12,61
	Kambing/Domba	Ekor	4.264	-	4.652	4.641	4.269	3.084	-6,27
	Ayam Kampung	Ekor	16.941	17.260	17.742	23.444	23.444	40.882	19,27
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	916.492	1.714.000	2.034.000	2.013.000	2.013.000	316.099	-19,18
	Itik	Ekor	2.733	2.818	3.000	6.004	6.004	3.493	5,03
2	**Produksi Daging**								
	Sapi Potong	Kg	3.026	1.362	3.382	3.111	4.702	12.378	32,54
	Kerbau	Kg	7	1	2	1	1	-	-
	Kambing/Domba	Kg	913	-	1.003	830	1.676	189,75	-26,96

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Ayam Kampung	Ton	444	454	16,87	14,76	14,77	11,69	-51,68
	Telur Ayam Kampung	Butir	166.957	170.103	519.141	763.396	777.627	466.046	22,79
	Ayam Ras Pedaging	Ton	1.100	2.056	1.938	2.319	1,932,48	1.053,46	-0,86
	Daging Itik	Ton	5,46	2,81	4,75	1,00	1,02	0,48	-38,51
	Telur Itik	Kg	19,12	19,71	569,14	7,95	44,85	-	-

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2025)

Upaya peningkatan produksi daging dan telur harus terus dilakukan dalam rangka memenuhi keburuhan protein masyarakat. Berdasarkan tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kemenkes RI, Standar angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia adalah sekitar 56-59 gram per hari untuk perempuan dan 62-66 gram per hari untuk laki-laki. Hal tersebut berguna dalam rangka mengganti sel yang sudah mati dan mengangkut berbagai zat ke seluruh tubuh, dan membantu pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yag rusak.

(4) Penyakit Ternak / Zoonosis

Dalam upaya peningkatan produktivitas usaha peternakan tidak terlepas dari penyakit ternak yang dapat mempengaruhi populasi dari ternak masyarakat yang ada di Kota Dumai. Ada tiga pengelompokan penyakit ternak yaitu kasus hewan menular zoonosis, kasus hewan menular non zoonosis serta kasus cemaran pada pangan asal hewan.

Jika melihat data yang ada dari tahun 2017-2024 maka secara umum kasus penyakit hewan cenderung turun setiap tahunnya. Pada tahun 2016 kasus hewan menular zoonosis sebanyak 35 kasus sedangkan pada tahun 2024 hanya 1 kasus yaitu Rabies 1 kasus. Kasus hewan menular non zoonosis pada tahun 2016 sebanyak 35 kasus tahun 2024 hanya ada 6 kasus yaitu Penyakit Mulut dan Kuku 2 kasus dan Penyakit Jembrana 4 kasus. Untuk kasus cemaran pada pangan asal hewan tahun 2016 sebanyak 3 kasus pada tahun 2024 hanya 0 kasus. Kedepannya upaya penanggulangan penyakit hewan akan dimaksimalkan secara berkala agar jika ada kasus-kasus penyakit hewan terbaru dapat di tanggulangi secara cepat dan tepat sehingga dapat melindungi ternak masyarakat.

(5) Penyuluh Pertanian

Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, harus banyak yang dibenahi dan salah satu hal pentingnya adalah kualitas sumber daya manusia, karena jika dilihat masalah utama petani adalah rendahnya pengetahuan dan kreativitas dari petani agar pembangunan pertanian terus berkembang. Begitu pentingnya peran penyuluh pertanian membuat pemerintah mengambil langkah untuk lebih memberdayakan para penyuluh. Peran penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Peran penyuluh pertanian dapat dikatakan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kualitas petani saat ini. Penyuluh berperan sebagai perantara dan penghubung informasi untuk

petani maupun dari petani. Penyuluh menyampaikan informasi dari balai pengkajian maupun peneliti ke petani dan menyampaikan aspirasi dari petani ke pembuat kebijakan. Karena di sini penyuluh langsung terjun ke petani dan masyarakat sehingga akan lebih mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya.

Perkembangan jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Dumai pada tahun 2024 masih seperti tahun 2023 kecuali untuk Penyuluh Kontrak terdapat penambahan sebanyak 1 orang. Jika dilihat dari jumlah kelurahan di Kota Dumai sebanyak 36 kelurahan maka idealnya jumlah penyuluh pertanian sebanyak 36 orang, hal ini mengacu pada himbaun menteri pertanian dimana idealnya satu keluarahan/desa terdapat satu orang penyuluh pertanian hal ini untuk memudahkan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok tani yang ada wilayah tersebut. Jika dilihat dari jumlah kelurahan yang ada maka Kota Dumai masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian sebanyak tujuh orang. Kedepannya diharapkan kekurangan tenaga penyuluh ini dapat segera terpenuhi baik dari PNS, PPPK maupun penyuluh kontrak. Untuk gambaran kondisi jumlah penyuluh pertanian dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.218
Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Dumai Tahun 2019 – 2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	KJF Penyuluh	2	2	2	1	1	1
2	Kepala Balai Penyuluh Pertanian	6	6	6	6	6	6
3	PPL PNS	7	7	5	9	9	9
4	PPL THL-TBPP	5	5	5	0	0	0
5	PPL Kontrak	3	3	3	6	6	7
6	PPPK	0	0	0	7	7	7
Jumlah		23	23	23	29	29	30

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2025)

Jumlah kelompok tani tahun 2024 di Kota Dumai sebanyak 544 kelompok Tani atau meningkat 6,04% dari tahun 2023. Dari jumlah tersebut masih terdapat 34 kelompok tani yang belum memiliki kelas kelompok, hal ini dikarenakan kelompok tersebut termasuk baru dibentuk dan belum mencapai usian satu tahun. Setelah satu tahun berdiri dan beraktivitas maka akan dilakukan penilaian terhadap kelompok tersebut yang nantinya akan dikelompokkan kedalam kelas kelompoknya.

Tabel 2.219
Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok
Kota Dumai Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani (Poktan)	Jumlah Kelas Kelompok				
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Belum Memiliki Kelas
Bukit Kapur	146	123	16	1	0	6
DumaiBarat	43	37	5	0	0	1
Dumai Kota	11	9	2	0	0	0
Dumai Selatan	37	28	6	0	0	3

Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani (Poktan)	Jumlah Kelas Kelompok				
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Belum Memiliki Kelas
Dumai Timur	59	58	1	0	0	0
MedangKampai	54	36	8	0	0	10
Sungai Sembilan	194	147	33	0	0	14
TOTAL	**544**	**438**	**71**	**1**	**0**	**34**

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2025)

Adapun Jumlah Kelompok Tani yang Telah Dibina dan diberi bantuan pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2023. Pada tahun 2024 sebanyak 186 Kelompok sedangkan 2023 sebanyak 172 Kelompok. Bantuan yang diberikan kepada kelompok antara lain hibah sarana produksi pengembangan tanaman baik perkebunan, tanaman pangan, hortikultura maupun pertanian tanaman pekarangan. Ada juga bantuan Alat dan menin pertanian, bibit ternak maupun bantuan pelatihan bagi anggota kelompok tani.

Tabel 2.220
Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah DibinaTahun 2019-2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Kelompok Tani yang Telah Dibina	140	173	197	166	172	186	5,85%

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2025)

(6) Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB ADHB dan ADHK.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Dumai fluktuatif dari tahun ke tahun dengan kecenderungan meningkat dengan rata-rata sebesar 0,34% per tahun pada PDRB ADHB dan -0,20% per tahun pada PDRB ADHK. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya kecenderungan sektor lain yang mengalami peningkatan kontribusi baik disebabkan oleh peningkatan harga maupun oleh peningkatan produksi barang dan jasa yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor pertanian, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.221
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Konstribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan PDRB- ADHB	5.32	5.73	5.77	5.44	5.34	5.41	0.34%
Konstribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan PDRB-ADHK	2.01	4.15	3.97	0.14	1.88	1.99	-0.20%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

2.1.3.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100.

Pengguna listrik rumah tangga di Kota Dumai tahun 2019-2024 mengalami kenaikan secara fluktuatif, pengguna listrik tahun 2019 sebesar 111,21% kemudian pada tahun 2020 pengguna listrik bertambah dari 114,70%, hingga tahun 2024 sebesar 126,50%. Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Pada Tabel terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Kota Dumai telah teraliri aliran listrik.

Tabel 2.222
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RT pelanggan pengguna listrik	79.890	84.082	88.384	91.419	97.276	136.039
Jumlah rumah tangga	71.840	73.305	75.234	77.181	79.151	107.537
Persentase Rumah tangga pengguna listrik (%)	111,21	114,70	117,48	118,45	122,90	126,50

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025)

Kemudian sektor lain pada sub urusan ini adalah sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB kontribusi sektor penggalian di Kota Dumai hanya terdapat pada sub sektor penggalian. Adapun kontribusi subsektor penggalian di Kota Dumai selama kurun waktu tahun 2019-2024 relatif mengalami peningkata dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 13,65%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.223
Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Sektor	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Pertambangan dan Penggalian	%	2.30	-1.32	0.65	2.06	5.05	4.36	13.65%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

2.1.3.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

(1) Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Dumai. Namun demikian selama tahun 2019-2024 terjadinya penurunan kontribusi sektor tersebut sebesar -1,88% atau turun dari 15,87% tahun 2019 menjadi 14,43% tahun 2024 pada PDRB ADHB sedangkan pada PDRB ADHK mengalami peningkatan dari 2,89% tahun 2019 menjadi 7,52% tahun 2024. Tabel berikut menjelaskan kontribusi

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2019-2024.

Tabel 2.224
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan / Tahun(%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Perdagangan Besar dan Eceran; ReparasiMobil dan Sepeda Motor PDRB ADHB	15,87	14,48	14,70	14,09	13,97	14,43	-1,88
Perdagangan Besar dan Eceran; ReparasiMobil dan Sepeda Motor PDRB ADHK	2,89	-10,30	9,02	3,33	6,44	7,52	21,08

(Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

(2) Ekspor Bersih

Nilai ekspor Kota Dumai berfluktuatif dari 2019-2024. Nilai ekspor tahun 2019 mencapai USD 4.409,78 juta kemudian naik menjadi USD 11.637,15 juta pada tahun 2024. Nilai ekspor membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Berikut tabel ekspor bersih perdagangan Kota Dumai.

Tabel 2.225
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Net Ekspor Barang dan Jasa (USD Juta)	4,409.78	3,961.57	7,480.15	9,161.79	10,387.08	11,637.15

(Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

Dari tabel di atas dapat dilihat ekspor bersih perdagangan di Kota Dumai selalu bernilai positif, hal tersebut karena kegiatan ekspor di Kota Dumai memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan impor.

2.1.3.3.6. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

(1) Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Dumai selama tahun 2019-2024, dimana pada tahun 2019 sebesar 57,73% kemudian naik menjadi 60,42% tahun 2024 pada PDRB ADHB dengan pertumbuhan sebesar 0,92% per tahun sedangkan pada PDRB ADHK turun dari 7,17 tahun 2019 menjadi 3,95% tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar -11,24%.

Kondisi ini menggambarkan terjadinya percepatan pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa serta harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor lainnya. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Dumai dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel 2.226
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Industri Pengolahan PDRB - ADHB	57.73	59.96	60.82	61.79	61.25	60.42	0.92
Industri Pengolahan PDRB - ADHK	7.17	3.01	6.56	7.72	5.87	3.95	-11.24

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

(2) Pertumbuhan Industri

Sektor industri pengolahan di Kota Dumai mengalami pertumbuhan dengan tren menurun dari 7,17% pada tahun 2019 menjadi 3,95% pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -11,24% per tahun. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.227
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Industri Pengolahan	7.17	3.01	6.56	7.72	5.87	3.95	-11.24

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif dalam dekade terakhir menjadi alternatif solusi sekaligus strategi global dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global. Pada tahun 2024 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif berjumlah 239 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, ini disebabkan karena sudah banyaknya pelaku usaha meningkatkan kreatifitas disetiap kelurahan, Sesuai yang tersaji pada tabel dibawah Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai,

Tabel 2.228
Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2024

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
I. Industri Kerajinan				
1	Kerajinan Tenun	7	Tempat Air Mineral	Kel, Purnama
			Tempat tisu	Kel, Bagan Keladi
			Tempat telur	Kel, Stdi
			Kain songket	Kel, Laksamana
			Tepak sirih	Kel, Rimba Sekampung
			Tempat buah	Kel, Bukit Timah
2	Kerajinan Kristal	14	Tempat Air Mineral	Kel, Purnama
			Gehal	Kel, Bagan Keladi
			Tempat telur	Kel, Bintan
			Bunga Kristal	Kel, Rimba Sekampung
			Tepak sirih	Kel, Bukit Datuk
			Tempat buah	
			Tempat tisu	
3	Kerajinan Manik-Manik	4	Tempat tisu	Kel, Bukit Datuk
			Tempat bunga	Kel, Bagan Besar
			Tempat Air Mineral	Kel, Ratu Sima

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
				Kel, Basilam baru
4	Kerajinan Buah Para danKelapa	5	Alas Kaki	Kel, Mundam
			Hiasan dinding	Kel, Purnama
				Kel, Bagan Keladi
5	Kerajinan Pembuatan Bunga dan Bros Jilbab	2	Bunga	Kel, Rimba Sekampung
			Hiasan jilbab	Kel, Ratu Sima
6	Kerajinan Anyaman Pandan	4	Tikar	Kel, Mundam
				Kel, Basilam Baru
7	Kerajinan Limbah Plastik	2	Bunga	Kel, Rimba Sekampung
			Tas	Kel, Sukajadi
8	Kerajinan plastic tali rafia	8	Bunga	Kel, Mundam
9	Kerajinan Bordir	25	Topi	Kel, Jaya Mukti
			Pakaian	Kel, Buluh Kasap
			Lambang	Kel, Teluk Binjai
			Mukena	Kel, Bintan
			Jilbab	Kel, Ratu Sima
				Kel, Purnama
				Kel, Bukit Datuk
				Kel, Sukajadi
10	Kerajinan Konveksi	70	Kemeja	Kel, Sukajadi
			Pakaianolah Raga	Kel, Buluh Kasap
			Celana	Kel, Bintan
			Jas	Kel, Purnama
			Bajukaos	Kel, Dumai Kota
			Gorden	Kel, Rimba Sekampung
			Pakaian	Kel, Jaya Mukti
				Kel, Bukit Nenas
				Kel, Pelintung
				Kel, Lubuk Gaung
				Kel, Basilam Baru
				Kel, Ratu Sima
				Kel, Kayu Kapur
				Kel, Bagan Besar
				Kel, Bukit Timah
				Kel, Mekar Sari
11	Kerajinan Limbah Kayu dan Bambu	7	Kapal	Kel, Ratu Sima
			Sovenir	Kel, Mundam
			Meja	Kel, Kayu Kapur
			Bunga	Kel, Dumai Kota
12	Kerajinan Batik	11	Kain Panjang	Kel, Purnama
			Bahan Baju	Kel, Bagan Keladi
			Hiasan Dinding	Kel, Pangkalan Sesai
13	Kerajinan Rotan	3	Kursi, Meja,Fertisi	Kel, Bintan
			Keranjang Parsel	Kel, Dumai Kota
			Dll	
14	Kerajinan Lidi Sawit	7	Lampu Hias	Kel, Kayu Kapur
			Piring	Kel, Basilam Baru
			Tempat Buah	
15	Kerajinan Boneka	1	Boneka	Kel,Rimba Sekampung
16	Kerajinan Perabot	15	Perabot	Kec, Dumai selatan
17	Kerajinan Gerabah	11	Batu Alam	Kel, Bukit Datuk
			Pusara	Kel, Bagan Besar
II. Industri Percetakan Dan Advertising				
18.	Ind, Percetakan	18	Barang Cetakan	Kel, Telukbinjai
				Kl, Rimbasekampng
				Kel, Sukajadi
				Kel, Dumai Kota
19.	Ind, Advertising	25	Baleho	Kel, Bintan

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
			Neon Bok	Kel, Sukajadi
			Spanduk	Kel, Laksamana
			Stempel	Kel, Jayamukti
			Plakat	
			Cendramata/Pamplet	
			Banner	
Jumlah Pengrajin		**239**		

(Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Tahun 2025)

2.1.3.4. Fokus Urusan Penunjang

2.1.3.4.1. Bidang Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai tahun 2025 – 2045 telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2025-2045. Peraturan daerah ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Dumai untuk melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029 sehingga dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD merupakan Penjabaran program RPJMD ke dalam bentuk dokumen satu tahunan. Dokumen RKPD menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kota Dumai setiap tahunnya. RKPD Kota Dumai disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 lampiran V dan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah. RKPD Kota Dumai ditetapkan dengan Peraturan Walikota setiap tahunnya.

2.1.3.4.2. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang binwas pemerintahan daerah, Penelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan Penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selama dalam kurun waktu 2016 – 2022 pelaksanan bidang urusan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan masih terbatas pada melakukan identifikasi terhadap inovasi-inovasi oleh perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Adapun beberapa inovasi yang pernah diangkat pada penilaian penghargaan Pembangunan Daerah oleh Bappenas adalah :

Tabel 2.229
Inovasi Daerah pada Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
Tahun 2019-2025

No	Uraian	Perangkat Daerah	Tahun
1	Inovasi KPBU air minum	Dinas PUPR	2019
2	Inovasi SIDARBIN	Dinas Kesehatan	2020

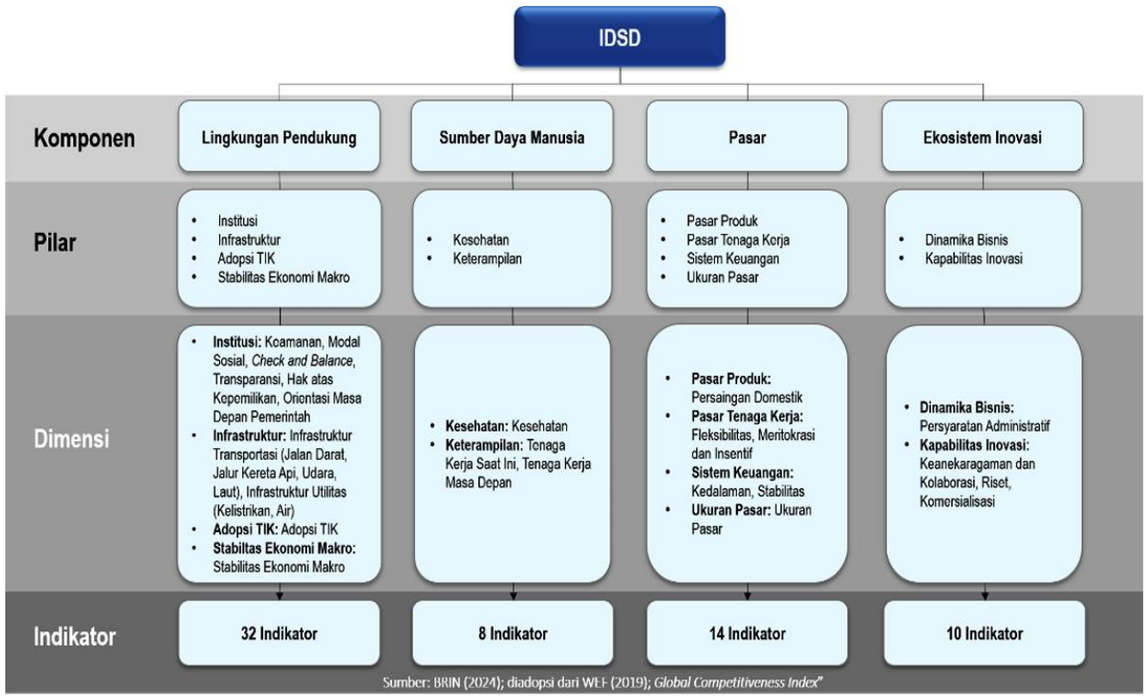
No	Uraian	Perangkat Daerah	Tahun
3	Isolasi Mandiri	Dinas Kesehatan	2021
4	Sipeka	BPBD	2022
5	SAPAAT	DKPP	2023
6	DigiLoka	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	2024
7	Oplet Sipai	Dinas Kesehatan	2025

(Sumber: Bappedalitbang Kota Dumai, 2025)

Pengukuran IDSD 2024 ini mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum (WEF). Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran agar relevan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data. Pada IDSD 2024 ini dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator dan cara penghitungan skor sehingga lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah. Sebagai informasi, skor nasional IDSD (berdasarkan rata-rata skor seluruh provinsi) adalah sebesar 3,43 dari skala 5.

Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (basic requirement factors), faktor penguat efisiensi (efficiency enhancers), dan faktor inovasi dan kecanggihan (innovation and sophistication factors). Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam tiga komponen awal pembentuk daya saing.

Dalam perjalanannya, konsep dasar daya saing ini mengalami penyesuaian, terutama dengan menguatnya tuntutan untuk fokus pada kapasitas adaptasi terhadap perubahan lingkungan dalam hal ini TIK dan respon terhadap guncangan (shock), baik internal maupun eksternal yang diindikasikan oleh kestabilan ekonomi makro. Penyesuaian ini menyebabkan komponen daya saing yang semula tiga diperluas menjadi empat komponen dasar daya saing yang diadopsi menjadi kerangka pengukuran IDSD 2024, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini tetap dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Untuk tetap menjaga objektivitas pengukuran, seluruh data pada IDSD 2024 masih menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.



Gambar 2.7. Kerangka pengukuran IDSD 2024
(Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional, 2024)

Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai kerangka konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Perincian dimensi dan indikator pembentuk daya saing diuraikan pada penjelasan pilar.

Tabel 2.230
Skor Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024



3,35
SKOR IDSD 2024
PROVINSI RIAU



6
kab/kota
≥ skor provinsi

NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	**4,18**	**2,97**	**3,47**	**3,99**	**3,76**	**3,91**	**2,57**	**3,03**	**2,76**	**4,35**	**3,06**	**3,13**	**3,43**
PROV. RIAU	**4,30**	**3,02**	**3,68**	**4,40**	**3,94**	**4,00**	**1,07**	**2,90**	**2,11**	**4,86**	**3,29**	**2,59**	**3,35**
RATA-RATA KAB/KOTA	**4,47**	**3,28**	**4,28**	**3,75**	**3,83**	**3,95**	**2,77**	**3,16**	**1,78**	**4,73**	**3,60**	**1,77**	**3,45**
KUANTAN SINGINGI	4,61	3,40	4,18	3,83	3,68	4,23	1,90	2,73	1,02	4,54	3,73	1,84	3,31
INDRAGIRI HULU	4,46	2,42	4,03	3,77	3,81	4,05	3,85	2,72	1,67	4,65	4,65	1,57	3,47
INDRAGIRI HILIR	4,45	3,03	4,05	3,54	3,64	3,78	4,43	2,84	1,39	4,83	4,44	1,39	3,48
PELALAWAN	4,45	3,67	3,95	4,00	3,92	4,06	1,33	2,94	2,02	4,72	3,32	1,43	3,32
SIAK	4,72	3,65	4,30	3,72	3,89	3,99	1,19	3,44	1,06	4,90	4,05	1,01	3,33
KAMPAR	4,50	3,71	4,29	3,57	3,87	4,09	1,66	2,97	1,54	4,89	3,19	1,89	3,35
ROKAN HULU	4,48	3,65	4,40	3,28	3,82	4,03	2,48	2,79	1,79	4,58	3,96	1,79	3,42
BENGKALIS	4,46	3,59	4,23	3,80	3,90	3,72	2,17	3,09	1,46	5,00	3,28	1,95	3,39
ROKAN HILIR	4,55	3,30	4,45	3,39	3,84	3,81	1,42	3,38	1,14	4,82	3,60	1,36	3,26
KEPULAUAN MERANTI	4,31	2,91	4,33	3,29	3,62	3,66	3,05	3,31	0,81	4,26	2,44	1,11	3,09
PEKANBARU	4,27	3,11	4,93	4,51	4,01	4,02	5,00	4,47	3,93	5,00	3,53	3,79	4,21
DUMAI	4,39	2,98	4,16	4,28	3,89	4,00	4,71	3,25	3,52	4,59	2,96	2,15	3,74

Dari beberapa dimensi tersebut diatas, telah dipetakan pilar andalan yang diharapkan dapat menghasilkan produk unggulan daerah yang

kompetitif dan berdaya saing tinggi, Dimana hasil pengukuran dari penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Dumai adalah sebagai berikut :

a. Komponen Lingkungan Pendukung, Komponen ini berasal dari Pilar Institusi dengan nilai indeks 4,39, kemudian Pilar Infrastruktur dengan nilai indeks 2,89, Pilar Adobsi TIK dengan nilai indeks adalah 4,16, dan Pilar Stabilitas Ekonomi Makro dengan nilai Indeks adalah 3,89,
b. Komponen Sumber Daya Manusia, Komponen ini berasal dari Pilar Kesehatan dengan nilai indeks 3,89 dan Pilar Keterampilan dengan nilai indeks 4,00.
c. Komponen Pasar, Komponen ini berasal dari Pilar Pasar Produk dengan nilai indeks 4,71 dan Pilar Pasar Tenaga Kerja dengan nilai indeks 3,25, Pilar Sistem Keuangan dengan nilai indeks 3,5296 serta Pilar Ukuran Pasar dengan nilai indeks 4,59,
d. Komponen Ekosistem Inovasi, Komponen ini berasal dari Pilar Dinamisme Bisnis dengan nilai indeks 2,96, Pilar Kapabilitas Inovasi dengan nilai indeks 2,15,

Pada Tahun 2024 Skor IDSD Nasional sebesar 3,43, dan skor IDSD provinsi Riau sebesar 3,35 Skor IDSD Kota Dumai sebesar 3,74. Jika dibandingkan dengan skor IDSD Tahun 2023, terjadi kenaikan pada skor IDSD Kota Dumai. Terdapat beberapa pilar yang skornya mengalami kenaikan, yaitu pilar 2 (infrastruktur); pilar 3 (adopsi TIK); pilar 4 (stabilitas ekonomi makro); Pilar 6 (ketrampilan); Pilar 7 (pasar produk); Pilar 9 (sistem keuangan); Pilar 10 (ukuran pasar); Pilar 11 (dinamisme bsinis) dan Pilar 12 (kapabilitas inovasi). Sedangkan penurunan skor terdapat pada Pilar 5 (kesehatan) dan Pilar 8 (pasar tenaga kerja). Pilar dengan skor sangat rendah, yaitu 1) Pilar 2 : Infrastruktur (2,98); 2) Pilar 11 : Dinamisme Bisnis (2,96); dan 3) Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi (2,15).

Tabel 2.231
Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau
Tahun 2022-2024

No	KABUPATEN / KOTA	2022			2023			2024		
		Peringkat	Nilai	Kategori	Peringkat	Nilai	Kategori	Peringkat	Nilai	Kategori
KATEGORI PROVINSI										
1	RIAU	16	50,94	Inovatif	15	53,52	Inovatif	18	53,63	Inovatif
KATEGORI KABUPATEN										
1	PELALAWAN	112	53,39	Inovatif	49	58,21	Inovatif	46	65,70	Sangat Inovatif
2	INDRAGIRI HILIR	11	67,63	Sangat Inovatif	22	63,72	Sangat Inovatif	59	62,46	Sangat Inovatif
3	KAMPAR	97	54,49	Inovatif	117	50,62	Inovatif	93	58,05	Inovatif
4	SIAK	210	44,70	Inovatif	274	37,12	Inovatif	104	56,87	Inovatif
5	INDRAGIRI HULU	251	40,89	Inovatif	206	44,15	Inovatif	151	51,25	Inovatif
6	KUANTAN SINGINGI	165	48,42	Inovatif	156	47,67	Inovatif	169	49,09	Inovatif

No	KABUPATEN / KOTA	2022			2023			2024		
		Peringkat	Nilai	Kategori	Peringkat	Nilai	Kategori	Peringkat	Nilai	Kategori
7	ROKAN HULU	148	50,36	Inovatif	166	46,80	Inovatif	180	47,75	Inovatif
8	ROKAN HILIR	306	30,51	Kurang Inovatif	279	36,87	Inovatif	273	38,63	Inovatif
9	BENGKALIS	218	44,17	Inovatif	231	42,59	Inovatif	283	37,78	Inovatif
10	KEPULAUAN MERANTI	249	40,95	Inovatif	133	48,97	Inovatif	333	27,15	Kurang Inovatif
KATEGORI KOTA										
1	PEKANBARU	2	70,57	Sangat Inovatif	15	62,86	Sangat Inovatif	19	68,34	Sangat Inovatif
2	DUMAI	76	41,03	Inovatif	72	42,38	Inovatif	47	54,70	Inovatif

(Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 400.10.11- 4898 Tahun 2025)

Perolehan nilai Indeks Inovasi Daerah Kota Dumai pada tahun 2024 masih dalam kategori inovatif. Namun peringkat Kota Dumai mengalami kenaikan yaitu peringkat 47 yang sebelumnya pada tahun 2023 berada pada peringkat 72. Pelaporan inovasi daerah Kota Dumai didukung oleh Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif, dimana pada kegiatan tersebut memuat pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk penguatan kapasitas inovasi pada perangkat daerah serta Asistensi/Pendampingan kepada setiap Perangkat Daerah dalam pemenuhan bukti dukung indikator yang diperlukan dalam pelaporan inovasi yang telah dilaksanakan perangkat daerah.

2.1.3.4.3. Bidang Keuangan Daerah

Indikator pada aspek keuangan antara lain persentase peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2019 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.232
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	Rp. Milyar	291,62	378,8	366,69	464	566,03	604,72
Pajak Daerah	Rp. Milyar	141,15	165,26	185,98	226,33	358,51	400
Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	10,31	17,08	12,54	21,7	58,4	11,57
Retribusi Daerah	Rp. Milyar	31,1	32,67	23,78	32,21	43,13	51,54
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	1,37	5,05	-27,21	35,45	33,9	19,50
Penerimaan PBB	Rp. Milyar	82,25	91,4	97,36	134,83	161,19	278,80
Persentase Peningkatan PBB	%	10,49	11,12	6,52	38,49	19,55	72,96

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025)

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2024 senilai Rp. 604,72 milyar meningkat dari 291,62 milyar tahun 2019. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD Kota Dumai tahun 2024 adalah sebesar 400 milyar naik dari 141,15 milyar tahun 2019. Sedangkan untuk perkembangan penerimaan retribusi daerah dari tahun 2024 senilai Rp. 51,54 milyar naik dari 31,1 milyar tahun 2019. Untuk penerimaan PBB, pada tahun 2019 senilai 82,25 milyar naik menjadi 278,80 milyar pada tahun 2024, persentase peningkatan penerimaan PBB pada tahun 2019 sebesar 10,49% naik menjadi 72,96% di tahun 2024.

2.1.3.4.4. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator pada aspek kepegawaian antara lain: (1) Persentase pelanggaran disiplin; (2) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; (3) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.

Pasca disahkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka indikator kinerja terkait aspek kepegawaian diantaranya: (1) Persentase pelanggaran disiplin; (2) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; (3) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah. Adapun jumlah ASN yang mendapat teguran karena melakukan pelanggaran disiplin selama periode 2019-2024 dan jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2019-2024 tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 2.233
Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM)
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ASN yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	1	5	4	6	6	7
Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM)						
- PIM II	5	0	0	2	9	3
- PIM III	11	0	0	34	26	0
- PIM IV	20	0	0	0	0	0

(Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2025)

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka setiap PNS harus berusaha memahami peraturan tersebut agar dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan disiplin PNS agar tidak terjadi pelanggaran disiplin. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Sehingga apabila PNS tidak mentaati peraturan tersebut maka akan dijatuhi hukuman disiplin yang terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah ASN Kota Dumai yang melakukan pelanggaran disiplin dari tahun 2019 sampai 2024 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah ASN Kota Dumai yang melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 1 orang. Kemudian jumlah ini mengalami kenaikan pada tahun berikutnya menjadi 5 orang di tahun 2020 dan berkurang menjadi 4 orang ASN pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 6 orang. Begitu pula pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan yaitu 6 orang. Selanjutnya pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 7 orang.

Dari data tersebut, pada umumnya jumlah pelanggaran disiplin ASN Kota Dumai mengalami penurunan walaupun terdapat trend peningkatan pada tahun berikutnya Sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan disiplin dan profesionalisme PNS Kota Dumai agar pelanggaran disiplin mengalami penurunan.

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Pelatihan struktural tersebut terdiri atas kepemimpinan pratama, administrator dan pengawas.

Selama periode 2019-2024 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural untuk peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai, Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Salah satu jenis Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang merupakan jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan jabatan lain yang

setara dengan jabatan eselon II. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang dilakukan pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (pejabat eselon II) Kota Dumai tahun 2019-2024 mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan adanya perubahan nomenklatur, rotasi mutasi, pensiun dan meninggal dunia. Pada tabel terlihat bahwa masih terdapat kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama pada beberapa perangkat daerah tiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah jabatan pimpinan tinggi sebanyak 29 orang dan meningkat menjadi 34 orang di tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 5,17% per tahun. Proses seleksi perlu dilakukan dengan tujuan mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang lowong tersebut agar tidak menganggu kinerja perangkat daerah. Selama periode 2019-2023 jumlah pejabat eselon II di Kota Dumai tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.234
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pejabat Eselon II	29	24	30	32	34	37

(Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2025)

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu tujuan dari UU tersebut adalah membangun Aparatur Sipil Negara yang professional. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan public, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk melihat sejauh mana tujuan ini tercapai maka perlu ditetapkan indikator tingkat profesionalitas ASN berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam peraturan dijelaskan bahwa Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

a. Kualifikasi

   Diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai meliputi Pendidikan S-3 sampai dengan Pendidikan dibawah SLTA;

b. Kompetensi

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar/workshop/konferensi/setara;

c. Kinerja

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;

d. Disiplin

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi tidak pernah dijatuhi hukuma disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Tabel 2.235
Jumlah Pegawai Negeri Sipil per Jenjang Jabatan Kota Dumai Tahun 2024

Jenis	Jumlah PNS
Jabatan Tinggi Pratama	34
Jabatan Administrator	157
Jabatan Pengawas	352
Jabatan Fungsional Ahli Utama	5
Jabatan Fungsional Ahli Madya	412
Jabatan Fungsional Ahli Muda	967
Jabatan Funsional Ahli Pertama	577
Jabatan funsional Penyelia	152
Jabatan Fungsional Mahir	91
Jabatan Funsional Terampil	78
Jabatan Fungsional Pemula	10
Jabatan Pelaksana	902
Jabatan Struktural	543
Jabatan Fungsional	2.292
Pelaksana	902
S3	3
S2	445
S1/D4/Sederajat	2.332
D3/Sederajat	475
D1/D2/SMA/SMK/Sederajat	471
SD/SMP/Sederajat	11
Laki-Laki	1.197
Perempuan	2.540
Keseluruhan	**3.737**

(Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2025)

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Indikator dimensi kualifikasi adalah riwayat jenjang pendidikan formal teraKhir yang dicapai oleh PNS yang terdiri dari

S-3, S-2, S-1/D-IV, D-III, D-II/D-I/SLTA,/Sederajat, dibawah SLTA dengan bobot 25%. Untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan. Indikator dimensi kompetensi adalah riwayat pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal dan non klasikal dengan bobot 40%. Pelatihan klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.

Pelatihan klasikal dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, kursus, penataran, bimbingan teknis dan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya. Sedangkan pelatihan non klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan atau pembelajaran di luar kelas mencakup di tempat kerja (experiential learning), pembelajaran melalui hubungan sosial (social learning) dan pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel (flexible learning). Pelatihan non klasikal dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan jarak jauh, e-learning, belajar mandiri, coaching, mentoring, benchmarking, magang, detasering, pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/BUMN/BUMD, bimbingan ditempat kerja, komunitas belajar, outbond. Indikator dimensi kinerja adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) dengan bobot 30%.

Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target. Sedangkan PKP meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan. Indikator dimensi disiplin adalah data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima dengan bobot 5% yang terdiri dari hukuman disiplin ringan yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis, hukuman disiplin sedang meliputi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan sedangkan hukuman disiplin berat meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

IP ASN Kota Dumai Tahun 2024 sebesar 79,66 dengan kategori sedang yang terdiri dari dimensi kualifikasi sebesar 21,37, dimensi kompetensi 27,70, dimensi kinerja 25,59 dan dimensi disiplin 5,00. Adanya perubahan

kebijakan dari BKN sehingga nilai IP per jenjang jabatan tidak dapat diperoleh datanya.

2.1.3.4.5. Bidang Pengawasan

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Dumai merupakan salah satu indikator pada aspek pengawasan. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Riau atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*resultoriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Dumai. Adapun hasil penilaian SAKIP Kota Dumai tahun 2019-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.236
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai
Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	61,15	61,33	63,77	64,20	64,99	65,48
Predikat	B	B	B	B	B	B

(Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Dumai Tahun, 2025)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Agar terwujud pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Indikator lainnya pada aspek pengawasan adalah persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan jumlah dokumen yang direview setiap tahunnya. Kedua indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai mulai tahun 2016. Berdasarkan data dari Inspektorat Kota Dumai, pada tahun 2019 persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 68,03%, naik menjadi 82,75% pada tahun 2024.

Jumlah rekomendasi temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau tahun 2024 adalah sebanyak 80 rekomendasi, sudah ditindaklanjuti sesuai

dengan rekomendasi sebanyak 6. Sedangkan jumlah rekomendasi temuan Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebanyak 261 rekomendasi, sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 161.

Tabel 2.237
Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2019-2024

Uraian	Persentase Rekomnedasi yang Selesai						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	68,03	72,48	83,72	86,09	85,07	82,75	5,92

(Sumber: Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2025)

2.1.3.4.6. Sekretariat Daerah (Administrasi Pemerintahan)

Salah satu permasalahan dari aspek administrasi pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Dumai sampai saat ini adalah belum ditetapkannya garis batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis dengan Peraturan Menteri, maupun garis batas wilayah antar Kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai.

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang "Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis".

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai, daerah berkewajiban untuk menentukan batas secara pasti dilapangan, yang selanjutnya hasil penentuan batas tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk Peraturan Menteri, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Guna untuk memenuhi amanat tersebut Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Tata Batas melalui Surat Keputusan Wali Kota Dumai No, 299/PEM/2001 dan Surat Keputusan Wali Kota Dumai No. 365 Tahun 2004 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai. Terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melakukan pembahasan tentang batas, baik batas daerah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis maupun dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Dari tahun 2017-2021 upaya penyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai, untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor: 40/BA-PERM/BAD,I/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Sedangkan untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tapal Batas antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditandatangani bersama dan

berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitive dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis adalah sepanjang 63.614.489 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah sepanjang 100.242.098 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan pada Kelurahan Batu Teritip.

Kesepakatan tentang batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir maupun Kabupaten Bengkalis memang sudah menghasilkan beberapa kesepakatan, tetapi sampai saat ini permasalahan batas wilayah tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri, bahkan masih terjadi negosiasi-negosiasi terkait penetapan batas wilayah tersebut.

Dalam hal batas wilayah antar kelurahan dan antar Kecamatan, sampai saat ini belum secara keseluruhan dilakukan penegasan batas, namun untuk tertib administrasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai selesai.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah membahas beberapa indiklator terkait dengan fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus infrastruktur wilayah, fokus iklim investasi dan Focus SDM.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah menguraikan tentang kinerja indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, nilai tukar petani, produktivitas total daerah, rasio perdagangan terhadap PDRB, rasio LDR.

(1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Per Kapita

Perkembangan pengeluaran konsumsi RT per kapita Kota Dumai selama tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut yang memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Dumai terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2019–2024 pengeluaran konsumsi rumah tangga pada harga berlaku terus mengalami peningkatan Rp 39,11 juta/Kapita tahun 2019 meningkat menjadi Rp 47,95 juta/kapita pada tahun 2024. Selama periode ini, rata- rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi RT per kapita sebesar 4,16% per tahun.

Demikian juga halnya dengan rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita pada harga konstan selama periode 2019-2024 juga mengalami

peningkatan. Pada tahun 2019, rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita harga konstan sebesar Rp 24,67 juta/Kapita dan meningkat menjadi Rp, 25,63 juta/kapita pada tahun 2024. Selama periode tersebut rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Dumai meningkat sebesar 0,77% per tahun.

Tabel 2.238
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
PDRB-ADHB								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	12,078,38	12,243,57	12,879,91	14,400,69	15,567,63	16.754,68	6,76
Konsumsi RT Per Kapita	Rp. Juta	39,11	38,65	39,68	43,67	46,05	47,95	4,16
PDRB-ADHK								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	7,619,07	7,510,02	7,736,89	8,172,73	8,556,29	8.955,40	3,28
Konsumsi RT Per Kapita	Rp. Juta	24,67	23,71	23,92	24,86	25,31	25,63	0,77

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka 2025 dan Olahan)

(2) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan RT per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan pendekatan untuk mengetahui pendapatan seseorang. Pendekatan ini digunakan karena data riil pendapatan perorangan sulit didapatkan. Dengan data pengeluaran per kapita ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui. Pada PDRB ADHB pengeluaran, rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan RT masyarakat Kota Dumai sebesar Rp. 1,77 juta/kapita/bulan tahun 2019 kemudian meningkat menjadi Rp. 1,89 juta/kapita/bulan tahun 2023 atau naik sebesar 1,65% per tahun.

Sedangkan besaran pengeluaran konsumsi pangan RT mengalami dengan peningkatan dari Rp. 1,49 juta/kapita/bulan tahun 2019 kemudian meningkat menjadi Rp. 2,06 juta/kapita/bulan tahun 2023 dengan pertumbuhan 8,44% per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio pengeluaran konsumsi non pangan RT dari 54,33% pada tahun 2019 menjadi 47,89% pada tahun 2023 atau turun sebesar -3,11% pertahun.

Sementara itu pada PDRB ADHK pengeluaran, rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan RT masyarakat Kota Dumai sebesar Rp. 1,16 juta/kapita/bulan tahun 2019 kemudian menurun menjadi Rp. 1,13 juta /kapita/bulan tahun 2023 atau atau turun sebesar 0,65% per tahun. Sedangkan besaran pengeluaran konsumsi pangan RT mengalami dengan peningkatan dari Rp. 0,89 juta/kapita/bulan tahun 2019 kemudian meningkat menjadi Rp. 1,04 juta/kapita/bulan tahun 2023 dengan pertumbuhan 3,97% per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio pengeluaran konsumsi non pangan RT dari 56,55% pada tahun 2019 menjadi 52,11% pada tahun 2023.

Kondisi ini menggambarkan terjadinya peningkatan rasio belanja kebutuhan pangan dibandingkan dengan pengeluaran non pangan RT

seperti pakaian, alas kaki dan jasa perawatan perumahan dan perlengkapan rumah tangga, kesehatan dan pendidikan, transportasi dan komunikasi, restoran dan hotel dan lainnya setiap bulan berikut tabel rata-rata pengeluaran per kapita sebulan Kota Dumai.

Tabel 2.239
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan dan Pangan Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2019-2023

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
PDRB-ADHB							
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	12,078.38	12,243.57	12,879.91	14,400.69	15,567.63	6.55
Pengeluaran Konsumsi Pangan	Rp. Milyar	5,516.40	5,953.83	6,323.99	7,050.42	8,112.06	10.12
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	Rp. Milyar	6,561.98	6,289.74	6,509.02	7,441.89	7,455.57	3.24
Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi	%	54.33	51.37	50.54	51.68	47.89	-3.11
Konsumsi Non Pangan RT	Rp. Juta/Kapita /Bulan	1.77	1.65	1.68	1.87	1.89	1.65
Konsumsi Pangan RT	Rp. Juta/Kapita /Bulan	1.49	1.57	1.63	1.77	2.06	8.44
PDRB-ADHK							
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	7,619.07	7,510.02	7,736.89	8,172.73	8,566.29	2.97
Pengeluaran Konsumsi Pangan	Rp. Milyar	3,310.98	3,452.29	3,346.81	3,564.78	4,102.40	5.50
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	Rp. Milyar	4,308.31	4,057.25	4,390.00	4,685.15	4,463.89	0.89
Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi	%	56.55	54.02	56.74	57.33	52.11	-2.02
Konsumsi Non Pangan RT	Rp. Juta/Kapita /Bulan	1.16	1.07	1.13	1.18	1.13	-0.65
Konsumsi Pangan RT	Rp. Juta/Kapita /Bulan	0.89	0.91	0.86	0.9	1.04	3.97

(Sumber: PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran 2017-2023 dan Olahan)

Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan per kapita agar rasio pengeluaran konsumsi RT non pangan dapat ditingkatkan disamping menjaga stabilitas harga pangan agar rasio pengeluaran konsumsi pangan RT dapat diturunkan tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

(1) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan

dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan peritungan rasio Panjang jalan per jumlah kenderaan. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan Kota Dumai sepanjang 1.068,58 Km. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Berikut tabel yang menyajikan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai.

Tabel 2.240
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Komponen	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan (JK)	Km	1,397,503	1,198,24	1,198,24	1,198,24	1,198,24	1,068.58
Mobil Penumpang	Unit	14,680	14,796	14,768	17,405	18,621	27.823
Bus	Unit	101	98	101	137	135	327
Truk	Unit	6,572	6,343	6,366	6,636	7,242	14.034
Sepeda Motor	Unit	62,578	58,836	59,293	61,235	65,173	75.850
Jumlah	Unit	83,931	80,073	80,528	85,413	91,717	118.034
Rasio Kenderaan Per Panjang Jalan	Unit/ Km	60,06	66,83	67,21	71,28	76,09	110,46

(Sumber: Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, 2025)

Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai dalam rentang waktu tahun 2019-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yakni dari 60 Unit/Km di tahun 2019 menjadi 110 Unit/Km pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah kendaran yang terdaftar setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.

(2) Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Dari Tabel berikut dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2019-2024 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (pelabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun 2019-2024 jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan kapal lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat).

Tabel 2.241
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) MaupunKeluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terminal	Berangkat	0	0	5.680	7.474	0	0
	Datang	0	0	4.906	5.925	0	0
Pelabuhan	Berangkat	134.526	24.587	46.886	48.750	155.081	120.120
	Datang	115.611	24.691	4.693	24.490	96.178	135.498
Bandara	Berangkat	53.547	14.082	292	223	39	0
	Datang	54.748	14.957	260	22	39	0
Jumlah keberangkatan (Orang)		188.073	38.669	52.858	56.447	155.120	120.120
Jumlah Kedatangan (Orang)		170.359	39.648	9.859	30.637	96.217	135.498
Jumlah keberangkatan (%)		52,47	49,37	84,28	64,82	61,72	46,99
Jumlah Kedatangan (%)		47,53	50,63	15,72	35,18	38,28	53,01

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025)

Persentase keberangkatan mengalami penurunan, pada tahun 2019 sebesar 52,47% dan pada tahun 2024 sebesar 46,99% dibandingkan dengan persentase kedatangan pada tahun 2019 sebesar 47,53% dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 53,01%, hal ini disebabkan telah pulihnya kondisi sejak pembatasan kegiatan sejak pandemi Covid 19.

(3) Ketaatan Terhadap RTRW

Dalam pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Namun dalam laporan antara ini hanya akan dibahas lima dari enam indikator tersebut, karena indikator ketaatan terhadap RTRW tidak ditemukan datanya.

Dari data yang yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif di Kota Dumai adalah seluas 50.844,42 Ha. Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai draf RTRW adalah 202,199 Ha. Sedangkan luas wilayah kebanjiran adalah 20.653,87. Serta luas wilayah perkotaan Kota Dumai hanya sebesar 44.952,37 Ha atau 23 % dari seluruh wilayah budidaya di Kota Dumai (Draf RTRW).

(4) Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif yang digunakan dalam analisis terdiri dari data sektor pertanian dari sub sektor tanaman pangan terdiri dari padi, Sementara dari sub sektor perkebunan seperti komoditas Kelapa Sawit Karet, Kelapa dan Kakao.

Rasio luas wilayah produktif di Kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 6,21% atau naik dari 21,09% pada tahun 2019 menjadi 27,30% pada tahun 2024. Tabel berikut ini menyajikan data luas wilayah produktif sektor pertanian Kota Dumai tahun 2019- 2024.

Tabel 2.242
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Dumai Tahun 2019-2024

Uraian	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Wilayah Produktif	Hektar	42,639	42,847	43,3	43,244	64,809	64,809
Luas Seluruh Budidaya	Hektar	202,199	202,199	202,199	202,199	237,367	237,367
Rasio	%	21,09	21,19	21,41	21,39	27,3	27,3

(Sumber: Dinas Pertanian dan Bappeda Kota Dumai, 2025)

(5) Luas Wilayah Industri

Peruntukan lahan kawasan industri Kota Dumai selama tahun 2019-2039 sebagai dalam dokumen RTRW, dengan pemanfaatan selama periode 2016-2020 seluas 2.911,43 hektar yang terdiri dari Kawasan industri PT,KID, Kawasan Lubuk Gaung, Pertamina dan Pertamina Hulu Rokan yang didalamnya kawasan industri besar dan kecil menengah. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasrana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Sedangkan peruntukan industri adalah lahan yang diperuntukan untuk kegiatan industri lainnya. Berikut disajikan Luas Wilayah Industri di Kota Dumai tahun 2019-2024.

Tabel 2.243
Persentase Luas Wilayah Industri Kota Dumai Tahun 2019-2024

Uraian	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Wilayah Industri	Hektar	7.602,83	7.602,83	7.602,83	7.602,83	7.602,83	7.602,83
Luas Kawasan Industri Produktif	Hektar	2.911,43	2.911,43	2.911,43	2.911,43	2.911,43	2.911,43
Luas Seluruh Budidaya	Hektar	202.199	202.199	202.199	202.199	202.199	202.199
Rasio Wilayah Industri	%	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Rasio Kawasan Industri Produktif	%	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29

(Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025)

Peruntukan luas wilayah industri di Kota Dumai seluas 7.602,83 Ha. Luas Kawasan peruntukan industri tersebut akan digunakan untuk pengembangan industri besar. Kawasan peruntukan Industri merupakan sektor usaha yang menunjang dalam sistem agribisnis, sebagian besar industri merupakan industri yang mendukung pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan seperti hasil produksi kelapa sawit dan migas. Sampai saat ini belum ada revisi dokumen RTRW, sehingga Luas Kawasan Industri Kota Dumai setiap tahunnya masih sama.

(6) Jumlah Restoran Usaha Jasa Makanan/ Minum

Selain akomodasi penginapan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Pemerintah Kota Dumai juga giat mendorong masyarakat untuk mendirikan usaha kuliner. Lokasi restoran merupakan pilihan utama yang mempengaruhi konsumen dan membuat keputusan pemilihan kuliner. Selain tempat yang strategis, fasilitas dan sarana penunjang wisata seperti arena bermain, spot-spot khusus untuk selfi yang

saat ini paling digemari wisatawan. Berdasarkan pada tabel berikut menunjukkan pertumbuhan jumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe pada tahun 2019 berjumlah 533 unit, mengalami penurunan menjadi 90 unit pada tahun 2024. Pertambahan unit usaha kuliner makanan dan minum di wilayah ini didorong oleh peningkatan sektor ekonomi lainnya. Berikut perkembangan data jumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe Kota Dumai tahun 2019-2024.

Tabel 2.244
Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kota Dumai Tahun 2019-2024

Uraian	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Restoran/Rumah Makan/Warung/Kafe	Unit	533	458	539	550	575	90

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2025)

(7) Penginapan/Hotel

Hotel merupakan sarana penting untuk mendukung kegiatan ekonomi Kota Dumai, antara lain kegiatan perdagangan dan pariwisata. Pada tahun 2024 hotel yang terdapat di Kota Dumai berjumlah 37 unit. Jumlah hotel terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Kota. Berikut tabel banyaknya hotel di Kota Dumai.

Tabel 2.245
Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Dumai Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hotel Bintang dan Non Bintang	36	37	40	40	37	37
2	Jumlah Kamar	1.292	1.471	1.479	1.507	1.512	1.501
3	Jumlah Tempat Tidur	1.925	2.212	2.187	2.170	2.243	2.203

(BPS Kota Dumai, Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

(1) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Dumai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, angka kriminalitas Kota Dumai mencapai 594 kasus. Kondisi tersebut semakin menurun angkanya hingga tahun 2024 menjadi 404 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.246
Angka Kriminalitas di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Angka kriminalitas	594	515	515	519	481	404	-7.42
Diselesaikan	468	412	413	451	410	384	-3.88
% Diselesaikan	78.79	80	80.19	86.9	85.24	95.05%	-58.67

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

Upaya penurunan angka kriminalitas diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi karena Menurut Mauro dan Carmeci (2007), kejadian kriminalitas dapat mengakibatkan kondisi ekonomi yang buruk secara terus-menerus termasuk investasi. Selain itu, kriminalitas dapat pula

menyebabkan terjadinya jebakan kemiskinan (*poverty trap*) yang mengakibatkan perekonomian berada dalam dua ekuilibrium yang berbeda, yakni kriminalitas yang tinggi dan produksi yang rendah, dan pendapatan yang tinggi dengan tingkat kriminalitas yang rendah (Mehlum et al, 2005).

(2) Lama Proses Perijinan

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari), Berdasarkan Peraturan WaliKota Dumai Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, terdapat 74 jenis izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan lama proses perijinan 3 hari kerja seperti yangtersaji pada tabel dibawah.

Tabel 2.247
Lama Proses Perijinan di Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2024

Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
Pendaftaran Penanaman Modal	3 hari
Izin Prinsip Penanaman Modal	3 hari
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3 hari
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3 hari
Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	3 hari
Izin Lokasi	3 hari
Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	3 hari
Izin Klinik	3 hari
Izin Klinik Gigi	3 hari
Izin Penyelenggaraan Optical	3 hari
Izin Apotik	3 hari
Izin Toko Obat	3 hari
Izin Laboratorium	3 hari
Izin Rumah Bersalin	3 hari
Izin Praktek Terapi Wicara	3 hari
Izin Praktek Fisioterapis	3 hari
Izin Praktek Bidan	3 hari
Izin Dokter Spesialis	3 hari
Izin Dokter Umum	3 hari
Izin Dokter Gigi	3 hari
Izin Praktek Perawat Gigi	3 hari
Izin Refraksionis Opician	3 hari
Izin Pengobatan Tradisional	3 hari
Izin Depot Air Isi Ulang	3 hari
Izin Operasional Rumah Sakit	3 hari
Izin Praktek Perawat Mandiri	3 hari
Izin Praktek Tukang Gigi	3 hari
Izin Praktek Apoteker	3 hari
Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	3 hari
Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan BermotorUmum	3 hari
Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	3 hari
Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	3 hari
Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	3 hari
Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	3 hari
Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	3 hari
Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai dan Kartu Pengawasan Angkutan TaksiDalam Wilayah Kota Dumai	3 hari
Perpanjagan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	3 hari
Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	3 hari
Izin Masuk Kota	3 hari
Tanda Daftar Usaha Pariwisata	3 hari
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 hari
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 hari
Tanda Daftar Gudang (TDG)	3 hari
Izin Usaha Industri (IUI)	3 hari
Izin Usaha Toko Modern	3 hari

Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3 hari
Izin Usaha Perkebunan	3 hari
Izin Pengelolaan Sarang Burung Wallet	3 hari
Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P)	3 hari
Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	3 hari
Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	3 hari
Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	3 hari
Izin Penggunaan Tower Crane	3 hari
Izin Penggunaan Bejana Tekan	3 hari
Izin Penggunaan Instalasi Listrik	3 hari
Izin Penggunaan Motor Diesel	3 hari
Izin Penggunaan Penyalur Petir	3 hari
Izin Lingkungan (AMDAL)	3 hari
Izin Lingkungan (UKP-UPL)	3 hari
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL)	3 hari
Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	3 hari
Izin Pembuangan Air Limbah	3 hari
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan	3 hari
Izin Turap	3 hari
Izin Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	3 hari
Izin Usaha Peternakan	3 hari
Izin Pendirian Sekolah Swasta (IPSS)	3 hari
Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLNF)	3 hari
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3 hari
Izin Penggunaan Racun Api	3 hari
Izin Reklame/Spanduk	3 hari
Izin Warnet	3 hari
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	3 hari
Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)	3 hari

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025)

Data perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Dumai dariTahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.248
Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019-2024

No	Jenis Izin	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	-	-	-	-	-	
2	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	-	-	-	-	-	
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	2	1	41	-	-	
4	TDP PO	-	-	-	-	-	
5	TDP CV	-	-	-	-	-	
6	TDP PT, Non Berbadan Hukum	-	-	-	-	-	
7	TDP PT, Berbadan Hukum	-	-	-	-	-	
8	TDP PT, Perubahan	-	-	-	-	-	
9	TDP Koperasi	-	-	-	-	-	
10	TDP Perusahaan Lain	-	-	-	-	-	
11	Tanda Daftar Gudang(TDG)	-	-	1	2	-	
12	Tanda Daftar Industri (TDI)	-	-	-	-	-	
13	Izin Usaha Industri (IUI) (500 jt-15 M)	1	-	1	-	-	
14	Izin Lokasi	21	25	15	-	-	
15	Izin Lingkungan	9	6	9	5	-	
16	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	309	208	131	88	215	245
17	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara	-	-	-	-	-	
18	Izin Praktek Dokter	-	-	-	-	160	165
19	Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	-	
20	Izin Berkelompok Dokter Spesiali-okter GigiSpesialis	-	-	-	-	-	
21	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	30	17	45	43	56	77
22	Izin Penyelenggaraan Optical	6	1	3	15	-	
23	Izin Apotik	13	9	13	16	-	
24	Izin Toko Obat	10	3	5	13	-	
25	Izin Praktek Laboratorium	-	-	-	-	-	
26	Izin Klinik/Balai Pengobatan	-	-	-	-	1	
27	Izin Klinik	7	12	2	3	-	
28	Izin Klinik Pemerintah Daerah	1	-	-	3	1	
29	Izin Rumah Bersalin	-	-	-	-	-	
30	Izin Praktek Terapi Wicara	-	-	-	1	-	2

No	Jenis Izin	2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	Izin Praktek Fisioterapis	2	-	5	6	10	15
32	Izin Praktek Bidan	18	60	91	326	167	281
33	Izin Usaha Perikanan	-		-	-	;-	
34	Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	-		-	-	-	
35	Izin Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)	-		-	-	-	
36	Izin Usaha Penyelenggaraan BengkelUmum	-		-	-	-	
37	Izin Racun Api	-		-	-	39	
38	Izin Penggunaan Racun Api	104	73	43	39	39	2
39	Izin Minuman Beralkohol	-	-	-	-	-	
40	SIUP-Minuman BeralkoholGol B dan C	5	1	1	5	-	
41	Izin Reklame	42	16	-	-		
42	Surat Izin Praktek Dokter Umum & Spesialis	162	106	-	-	228	258
43	Izin Praktek Dokter Spesialis	25	19	29	55	68	93
44	Izin Praktek Dokter Umum	110	63	90	123	160	165
45	Izin Usaha Transportasi	-	-	-	-	-	
46	Izin Panti Pijat	-		-	-	-	
47	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	140	168	31	-	-	
48	Izin Usaha Industri Perkebunan	-	-	-	-	-	
49	Izin Pendidikan Non Formal	-	-	-	-	6	4
50	Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan Formal (IPPSPF)	4	4	3	-	7	4
51	Izin Pengambilan Air	-		-	-	-	
52	Izin Galian C TanahTimbun	-		-	-	-	
53	Izin Ketenagalistrikan Sendiri	-		-	-	-	
54	Sertifikat Laik Operasi	-		-	-	-	
55	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal(IPLPNF)	-	-	-	-	-	
56	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	7	10	3	-	6	4
57	Taman kanak-kanak	-	-	-	-	5	4
58	Surat Penangkapan Ikan	-	-	-	-	-	
59	Surat Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	
60	Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)	9	-	-	-	-	
61	SIUP Cabang	-	-	-	-	-	
62	Izin Restoran/Rumah Makan	-	22	9	50	-	
63	Izin Karoke	-	-	-	27	-	
64	Izin Salon	-	-	-	15	-	
65	Izin Permainan	-	-	-	-	-	
66	Legalisasi Izin Usaha Perdagangan	-	-	-	-	-	
67	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	-	-	-	-	
68	Izin Pendirian Sekolah Swasta	-	-	-	-	-	
69	Izin Klinik Rawat Jalan	-	-	-	-	-	
70	Izin Dokter Gigi	-	-	-	-	-	
71	Izin Praktek Dokter Gigi	22	22	8	29	31	48
72	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	5	2	-	-	-	6
73	Izin Praktek Perawat Gigi	1	-	-	18	-	
74	Izin Praktek Perawat Mandiri	4	91	96	171	338	439
75	Izin Perawat	-	-	-	-	-	
76	Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	-	-	-		-	
77	Izin Pengobatan Tradisional	2	1	-	-	-	
78	Izin Depot Air Isi Ulang	1	3	1	36	-	
79	izin Praktek Tukang Gigi	15	-	-	16	-	15
80	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	-	-	-	-	-	
81	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	21	26	21	1870	3650	
82	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya danBeracun (TPS LB3)	2	-	-	-	-	
83	Izin Pembuangan Air Limbah	-	-	-	-	-	
84	Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	215	245
85	Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP)	51	43	14	-	-	
86	Pendaftaran PenanamanModal	-	-	-	-	-	
87	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPT)	7	49	57	34	35	

No	Jenis Izin	2019	2020	2021	2022	2023	2024
88	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga(SPP-IRT)	47	59	51	2	-	
89	Surat Keterangan Pembangunan PerumahanSehat Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1	-	-	-	-	
Jumlah		**1217**	**1120**	**819**	**3011**	**5437**	**2068**

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025)

(3) Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Jumlah pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Kota Dumai mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan peraturan perpajakan. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat, saat ini menjadi pajak daerah, antara lain PBB dan pajak BPHTB. Besar kecilnya hasil pajak dan retribusi daerah akan mempengaruhinya besaran Pendapatan Asli Daerah yang nantinya akan mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembangunannya.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

(1) Kualitas Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

(2) Persentase Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar

negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari periode 2019 – 2024. Pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 2.562 orang, pada tahun 2024 meningkat menjadi 2.712 orang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.249
Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah lulusan S1/S2/S3	2.562	2.629	2.734	2.772	2.703	2.712
Jumlah PNS Kota Dumai	4.087	3.946	3.938	3.950	3.785	3.718
Persentase Pekerja Lulusan S1/S2/S3	63%	67%	69%	70%	71%	73%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka 2025)

(3) Tingkat atau Rasio Ketergantungan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) merupakan beban atau tanggungan dalam pembangunan. Sedangkan usia produktif (14-64 tahun) merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi ditunjang pula dengan sarana dan prasarana pembangunan.

Tabel 2.250
Persentase Rasio Ketergantungan di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Umur Produktif (15-64)	218,957	213,253	217,981	223,772	230,251	239,219	1.79
Umur Belum Produktif (0-14)	91,741	92,060	92,929	94,315	93,582	94,592	0.61
Umur Tidak Produktif (> 64)	16,618	11,469	12,542	13,745	14,231	15,578	-1.28
Persentase Umur Produktif	66.89	67.32	67.39	67.44	68.11	68.47	0.47
Rasio Ketergantungan	49.49	48.55	48.39	48.29	46.82	46.05	-1.43
Jumlah Penduduk	327,316	316,782	323,452	331,832	338,064	349,389	1.31

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka 2025, Data diolah)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Dumai pada tahun 2019 adalah 49,49% yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 49 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 49,49% ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda dan penduduk tua. Sedangkan pada tahun 2024 rasio ketergatungan hanya 46,05%. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terjadinya perbaikan dari rasio ini dengan penurunan pertumbuhan sebesar -1,43% per tahun. Walaupun demikian penduduk usia kerja di Kota Dumai masih menanggung beban hampir separuh dari jumlah penduduk umur belum dan tidak produktif.

(4) Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja, tabel dibawah ini rasio penduduk yang bekerja di Kota Dumai tahun 2019 sebesar 150.525 pekerja dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 151.095 pekerja, dengan pertumbuhan sebesar 0,08% per tahun. Namun demikian kesempatan dan peluang kerja harus diciptakan agar memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi pada masyarakat dan daerah.

Tabel 2.251
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	308,812	316,782	323,446	331,832	338,064	349,389	2.50
Angkatan Kerja	158,287	162,769	144,465	148,506	156,790	158,478	0.02
Jumlah Bekerja	150,525	154,013	135,381	140,509	148,710	151,095	0.08

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka 2025, Data diolah)

Perkembangan trend prostif terhadap persentase jumlah orang bekerja secara sosial akan membuat adanya aktifitas, menantang dan memberi sarana untuk mengembangkan diri sendiri, memberi rasa bangga, identitas, dan pencapaian pribadi, memungkinkan bersosialisasi, membangun kontak, dan mencari dukungan, memberi penghasilan untuk menghidupi diri sendiri dan menjelajahi minat, bangun keterampilan dan pengetahuan, dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental, meningkatnya kebahagiaan karena rasa memiliki, mengurangi angka kriminalitas dan meningkatkan keamanan dari penghasilan tetap dan dapat diandalkan, menambah riwayat pekerjaan memperkuat resume

untuk peluang kerja di masa depan, peningkatan harga diri karena tujuan sehari-hari dan kontribusi kepada masyarakat. Secara ekonomi akan mengurangi angka pengangguran, meningkatan produktivitas ekonomi wilayah dan pengembangan teknologi dan skill serta dapat meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD sampai tahun 2024

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan IV diukur melalui analisa kinerja pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah. Analisa kinerja pecapaian program dan kegiatan tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program. Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan IV (ke empat) program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 pada tiap Perangkat Daerah dengan target yang harus dicapai pada tahun 2024 dalam satuan persentase.

Tabel 2.252
Penilaian Realisasi Kinerja OPD

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator kegiatan menjadi Nilai dari kegiatan (nilai Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari rata-rata capaian keseluruhan kinerja kegiatan pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap Perangkat Daerah.

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2025 berdasarkan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Dumai selengkapnya tersaji pada lampiran dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2026.

Berdasarkan evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025 sampai pada Triwulan I masuk kategori berkinerja Sangat Rendah (16,19%) dengan kategori penyerapan anggaran Sangat Rendah (13,85%). Tabel berikut menunjukkan rata-rata realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Tahun Berjalan (Triwulan I) setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Dumai secara keseluruhan. Selanjutnya perkembangan pencapaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 Perangkat Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.253
Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Berjalan

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN RKPD TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI S.D TW I TAHUN 2025 (Rp)	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2025	
				K	RP
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	167.374.594.124,00	775.418.764,00	1,21%	0,46%
2	DINAS KESEHATAN	78.106.379.301,00	5.757.835.057,00	10,39%	7,37%
3	RSUD	49.679.613.762,00	16.893.801.655,00	40,13%	34,01%
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	281.355.196.592,86	64.620.962.183,02	23,05%	22,97%
5	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	184.838.423.280,00	30.703.723.082,40	27,42%	16,61%
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.536.928.203,09	1.520.267.625,40	15,86%	14,43%
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.037.019.500,00	283.300.000,00	28,38%	27,32%
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	905.162.760,57	351.938.438,00	39,27%	38,88%
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	201.080.000.000,00	18.000.000,00	0,01%	0,01%
10	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	21.865.927.000,00	849.708.040,00	11,04%	3,89%
11	DINAS TENAGA KERJA	3.704.200.000,00	-	0,00%	0,00%
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	889.205.116,00	-	0,00%	0,00%
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	5.376.652.144,06	267.060.000,00	4,98%	4,97%
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	35.714.245.627,00	3.056.463.461,00	8,98%	8,56%
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	430.985.500,00	-	1,23%	0,00%
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.851.910.000,00	109.800.000,00	7,57%	2,26%
17	DINAS PERHUBUNGAN	85.410.290.225,00	21.662.804.235,00	27,55%	25,36%
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	8.830.000.000,00	1.477.584.710,00	16,88%	16,73%
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1.345.907.473,25	238.535.800,00	18,34%	17,72%
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	562.522.682,28	-	0,00%	0,00%
21	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	5.955.606.783,00	55.260.000,00	6,15%	0,93%
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13.332.964.488,00	59.300.000,00	3,25%	0,44%
23	DINAS PERIKANAN	2.130.518.020,00	84.250.000,00	4,93%	3,95%
24	DINAS PERDAGANGAN	2.778.943.074,00	850.052.816,11	33,85%	30,59%
25	SEKRETARIAT DAERAH	139.703.207.584,18	24.476.984.053,00	24,13%	17,52%
26	SEKRETARIAT DPRD	26.360.883.800,00	2.094.176.582,00	8,23%	7,94%
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.685.396.186,00	792.936.584,00	34,12%	29,53%
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	62.209.966.984,00	22.107.165.870,00	20,92%	35,54%
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.897.955.246,00	227.067.040,00	8,15%	7,84%
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.583.502.000,00	63.829.950,00	1,33%	0,84%

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN RKPD TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI S.D TW I TAHUN 2025 (Rp)	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2025	
				K	RP
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
31	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	342.264.363,00	-	0,00%	0,00%
32	INSPEKTORAT DAERAH	7.381.900.000,00	845.140.785,00	34,06%	11,45%
33	KECAMATAN DUMAI BARAT	188.509.360,50	26.550.000,00	15,86%	14,08%
34	KECAMATAN DUMAI TIMUR	3.298.046.065,00	54.010.000,00	1,71%	1,64%
35	KECAMATAN BUKIT KAPUR	4.237.353.325,00	222.501.740,00	6,19%	5,25%
36	KECAMATAN DUMAI KOTA	5.581.097.996,00	45.173.000,00	1,39%	0,81%
37	KECAMATAN DUMAI SELATAN	177.726.010,00	-	0,00%	0,00%
38	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	2.666.293.632,00	41.617.500,00	1,56%	1,56%
39	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	6.381.105.700,00	-	0,89%	0,00%
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.491.833.917,00	41.926.000,00	0,49%	0,44%
JUMLAH		**1.449.280.237.824,79**	**200.675.144.970,93**	**16,19%**	**13,85%**

Secara rinci, realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2025 disajikan pada tabel TC. 19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Dumai yang menjadi lampiran pada dokumen ini.

Adapun faktor pendorong Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan prioritas adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Peraturan perundangan-undangan yang menjadi panduan;
2. Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam mempercepat pelaksanaan APBD;
3. Koordinasi yang baik dengan pihak terkait;
4. Transparansi dalam komunikasi, informasi dan sumber data;
5. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Selain beberapa faktor pendorong di atas, Pemerintah Daerah secara terus menerus melakukan koordinasi melalui Pihak Internal dan Eksternal dalam rangka upaya untuk mempercepat pencapaian realisasi anggaran Tahun 2025 sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan prioritas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Adanya kendala proses keterlambatan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah, antara lain ketidaksesuaian dalam penyusunan anggaran kas, pergeseran anggaran dan rasionalisasi anggaran;
2. Proses pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan namun pencairan (termin) tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena

realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak terealisasi 100,00% sehingga pencairan kegiatan tidak tepat waktu dan menjadi tunda bayar Tahun 2024. Hal ini mengakibatkan capaian realisasi keuangan tidak sesuai dengan capaian kinerja yang telah dilaksanakan;

3. Jumlah SDM yang terbatas tidak sebanding dengan beban kerja yang harus dilakukan.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab :

1. Melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapai Perangkat Daerah
2. Melakukan evaluasi capaian Pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan pada setiap perangkat daerah terhadap rencana kegiatan dan realisasinya, jadwal pelaksanaan kegiatan serta target indikator kinerja
3. Melakukan komunikasi atau koordinasi dengan pihak-pihak terkait kendala yang dihadapi dalam melaksanalan kegiatan
4. Membuat laporan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah
5. Melakukan penyesuaian anggaran tahun berikutnya dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kegiatan yang relevan

2.2.2 Realisasi RPJMD Kota Dumai Tahun 2024

Capaian Kinerja terhadap IKU RPJMD pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Dumai tahun 2024 Tertuang dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.254
Realisasi Pelaksanaan RPJMD Kota Dumai Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian	Keterangan
Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu							
Misi 1	**Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri**						
	Mewujudkan Perekonomian Yang Mandiri Dan Masyarakat Yang Sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,36-5,07	5,02	100	BAPPEDA / BPS
	Meningkatnya Perekonomian Dan Daya Saing Daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	30,25-30,45	30,88	100	BAPPEDA / BPS
		Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	52,42-53,37	52,67	100	BAPPEDA / BPS
		PDRB Perkapita ADHK	Rp. Juta	90,83-91,45	92,72	100	BAPPEDA / BPS
		PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	157,42-160,27	158,15	100	BAPPEDA / BPS
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,314-0,340	0,301	100	BAPPEDA / BPS
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,89-5,27	4,66	100	BAPPEDA / BPS
		Tingkat Kemiskinan	%	2,93-3,07	3,14	97,77	BAPPEDA / BPS
	Meningkatnya Ketahanan	Indeks Ketahanan	Indeks	73,66	76,30	100	DKPP

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Pangan Daerah	Pangan					
Misi 2	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu**						
	Membangun Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saing Dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,72-75,95	77,03	100	BAPPEDA
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,790-0,791	0,797	100	BAPPEDA
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,714-0,717	0,714	100	BAPPEDA
	Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,769-0,773	0,778	100	BAPPEDA
	Meningkatnya penerapan budaya melayu	Persentase objek pemajuan kebudayaan melayu yang mendapatkan perlindungan	Persentase	92,35	89,79	97,22	DISDIK BUDAYA
Misi 3	**Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas**						
	Mewujudkan Infrastrtuktur Dan Ruang Kota Dumai Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan	Persentase Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Dumai yang Berkualitas	%	60,23	55,03	91,37	DINAS PU dan DISPERTARU
	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	%	64,72	53,73	83,02	DINAS PU
	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah Yang Konsisten	Persentase Pemanfaan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan	%	50,26	50,26	100	DISPERTARU
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	61,76	67,56	100	DINAS LH
		Cakupan pelayanan persampahan	%	65,7	61,10	93	DINAS LH
Misi 4	**Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik**						
	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	100	BAGIAN ORGANISASI
	Meningkatnya Akuntabiltas Pemerintah Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun,	Opini	WTP	WTP	100	BPKAD
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B	B	100	BAGIAN ORGANISASI
		Indeks Manajemen Resiko	Indeks	3	3,306	110,2 %	INSPEKTORAT
	Meningkatnya Kualitas	Indeks Kepuasan	Indeks	85,65	89,78	100	BAGIAN ORGANISASI

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Pelayanan Publik	Masyarakat					
		Indeks Layanan SPBE	Indeks	3	3,90	100	DINAS KOMINFO
		Indeks Inovasi Daerah	Skor	35,00-60,00	54,70	100	BRIDA

(Sumber : LKPJ Kota Dumai Tahun 2025)

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.1.1 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- Rendahnya daya saing SDM dalam berkompetisi di era keterbukaan, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas, kreativitas dalam penguasaan IPTEK, serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang memiliki nilai tambah.
- Menurunnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP yang terlihat dari Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kota Dumai sebesar 81,92% pada tahun 2024 yang cenderung menurun sebesar 0,40%;
- Ketimpangan dalam kemampuan literasi dan numerasi di Kota Dumai, baik di jenjang SD maupun SMP.
- Ketimpangan dalam rasio guru terhadap siswa dan variasi kualifikasi guru di seluruh kecamatan, menunjukkan adanya ketimpangan dalam ketersediaan, distribusi, dan kualitas pendidikan.
- Masih terdapat sekolah yang menerapkan sistem double shift dalam proses belajar mengajar.
- Belum optimalnya layanan perpustakaan serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar.
- Berdasarkan data Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Dumai tahun 2021 hingga 2024, terdapat masih rendahnya APS pada kelompok usia 5–6 tahun. Meskipun terjadi peningkatan APS 5-6 tahun dari 50,90% pada tahun 2023 menjadi 55,87% pada tahun 2024, tingkat partisipasi pada kelompok usia ini masih tergolong rendah dibandingkan kelompok usia lainnya yang secara umum telah menunjukkan capaian yang tinggi dan stabil.

2) Kesehatan

- Belum optimalnya rasio tenaga kesehatan dan sebaran yang tidak merata.
- Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kota Dumai masih belum memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku.

- Kesulitan akses pelayanan kesehatan di beberapa wilayah, terutama di Kecamatan Sungai Sembilan, Kelurahan Batu Teritip, akibat keterbatasan transportasi, listrik, dan jaringan komunikasi.
- Tingginya prevalensi kasus penyakit tidak menular seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus, Penyakit Jantung, dan Stroke.
- Meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS dan kasus kanker, jantung, stroke, serta uronefrologi (KJSU).
- Belum optimalnya pencapaian prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Tingginya risiko banjir di Kota Dumai akibat topografi yang rendah dan pengaruh pasang surut laut.
- Masih terbatas nya akses penyediaan air minum bagi penduduk dan rendahnya kualitas air.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi rumah tangga miskin di Kota Dumai.
- Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh dan masih rendahnya kualitas PSU.
- Adanya risiko kebakaran di kawasan permukiman.

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- Belum optimalnya pelaksanaan ketertiban dan ketentraman umum di Kota Dumai, ditandai dengan rendahnya rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, kualitas patroli Satpol PP yang belum sepenuhnya efektif, dan kurangnya peningkatan jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- Meningkatnya kasus pelanggaran K3 yang belum teratasi dengan baik.

6) Sosial

- Laju penurunan kemiskinan yang melambat, meningkatnya ketimpangan dan keparahan di antara penduduk miskin, serta kenaikan garis kemiskinan yang melebihi laju inflasi, sehingga membebani masyarakat miskin dengan biaya hidup yang semakin tinggi.
- Stagnasi lembaga kesejahteraan sosial dan menurunnya jumlah pendamping PKH, mengakibatkan program kesejahteraan sosial di Kota Dumai belum berjalan efektif.

2.3.1.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

- Rendahnya kompetensi pencari kerja di Kota Dumai menyebabkan banyak lowongan pekerjaan tidak terisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

- Belum optimalnya pengoperasian Rumah Terampil untuk pelatihan kerja, disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan di Kota Dumai.
- Belum optimalnya cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberian kesempatan kerja, terlihat dari cakupan jaminan ketenagakerjaan yang masih rendah.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Menurunnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencerminkan rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan politik.
- Meningkatnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan masih terjadinya ketimpangan gender di Kota Dumai.

3) Pangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lain yang berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
- Laju penurunan kemiskinan yang melambat, meningkatnya ketimpangan dan keparahan di antara penduduk miskin, serta kenaikan garis kemiskinan yang melebihi laju inflasi, sehingga membebani masyarakat miskin dengan biaya hidup yang semakin tinggi.
- Stagnasi lembaga kesejahteraan sosial dan menurunnya jumlah pendamping PKH, mengakibatkan program kesejahteraan sosial di Kota Dumai belum berjalan efektif.

4) Pertanahan

- Belum jelasnya penyelesaian sengketa pada lahan konsesi dan kawasan hutan yang menyebabkan konflik pertanahan antara masyarakat lokal dan perusahaan.

5) Lingkungan Hidup

- Masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan, yang mengindikasikan belum optimalnya upaya mitigasi dan pengendalian risiko bencana.
- Terjadinya degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan efek gas rumah kaca yang berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup.
- Indeks risiko bencana Kota Dumai masih dalam kategori kelas risiko sedang, khususnya dalam menghadapi kebakaran hutan

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan, masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP dan layanan yang belum merata di semua kecamatan.

- Belum maksimalnya pemanfaatan dan integrasi database kependudukan, sehingga data penduduk kurang akurat dan tidak terintegrasi dengan baik dalam sistem layanan publik.

7) Pemberdayaan Masyarakat

- Belum optimalnya peningkatan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti PKK, Posyandu, dan LSM, sehingga pencapaian kuantitas yang tinggi belum sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Kurangnya pemahaman pasangan usia subur terhadap informasi metode kontrasepsi yang aman dan efektif, serta manfaat jangka panjang dari pengendalian kelahiran.
- Rendahnya cakupan kesadaran tentang Keluarga Berencana (KB) pada PUS, dengan penurunan dari 75,51% pada tahun 2020 menjadi 70,34% pada tahun 2024.
- Akses dan kualitas pelayanan KB yang belum maksimal dan masih tingginya unmet need.

9) Perhubungan

- Minimnya ketersediaan moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.
- Kurangnya infrastruktur pendukung untuk angkutan umum, seperti terminal, halte, dan fasilitas penunjang lainnya.
- Kurangnya perlengkapan dan prasarana jalan yang memadai, termasuk pedestrian, alat penerangan jalan, rambu lalu lintas, dan fasilitas keselamatan jalan lainnya.
- Meningkatnya pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) kendaraan angkutan barang, serta meningkatnya jumlah kecelakaan akibat ruas jalan yang bersinggungan dengan aktivitas masyarakat.

10) Komunikasi dan Informatika

- Masih terbatasnya fasilitas dan SDM teknologi informasi serta komunikasi dalam mendukung pelayanan publik.
- Belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik, tata kelola, dan ekosistem eGovernment.
- Kurangnya pemahaman, kesadaran, dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Terjadinya penurunan persentase koperasi aktif, penurunan jumlah UMKM, dan rendahnya rasio kredit UMKM terhadap PDRB.

12) Penanaman Modal

- Pertumbuhan investasi asing (PMA) dan penurunan rasio daya serap tenaga kerja masih rendah.

13) Kepemudaan dan Olah Raga

- Belum maksimalnya prestasi olahraga di Kota Dumai, menunjukkan kurangnya pembinaan dan pengembangan bakat olahraga di kalangan pemuda.

14) Statistik

- Masih rendahnya integrasi, penyebarluasan, dan kualitas data statistik sektoral, menyebabkan kurang akuratnya data yang mendukung pengambilan kebijakan publik di Kota Dumai.

15) Persandian

- Kurangnya pemahaman, kesadaran, dan tata kelola terkait persandian dan keamanan informasi, yang berdampak pada rentannya data pemerintah terhadap risiko kebocoran informasi dan serangan siber.

16) Kebudayaan

- Terdapat objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di Kota Dumai yang perlu mendapatkan perlindungan lebih baik.
- Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi terkait kebudayaan, yang mengakibatkan kurangnya promosi dan pengembangan potensi budaya lokal.
- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengurangi kohesi sosial di masyarakat.

17) Perpustakaan

- Belum optimalnya layanan perpustakaan, serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar, menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat dan terbatasnya akses informasi.
- Kurangnya inovasi dalam layanan perpustakaan, termasuk digitalisasi koleksi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan bacaan.

18) Kearsipan

- Belum optimalnya layanan kearsipan, serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar di Kota Dumai.
- Belum maksimalnya pemanfaatan dan integrasi sistem kearsipan digital, yang mengakibatkan kesulitan dalam pencarian dan pengelolaan dokumen pemerintahan.
- Rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan aparatur tentang pentingnya kearsipan, yang berdampak pada rendahnya tingkat keamanan dan kelengkapan dokumen-dokumen penting daerah.

2.3.1.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pilihan

1) Perikanan

- Masih rendahnya konsumsi ikan pada rumah tangga di Kota Dumai, menunjukkan perlunya peningkatan edukasi gizi masyarakat dan promosi konsumsi hasil laut lokal.

2) Pariwisata

- Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, menyebabkan potensi pariwisata lokal belum tergarap maksimal.
- Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan tata kelola destinasi pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif.

3) Pertanian

- Terbatasnya SDM pertanian dalam mendukung pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan.
- Terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lain, mempengaruhi ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi lokal.
- Perubahan iklim global yang berdampak negatif terhadap kualitas lahan dan produksi pertanian, menghambat peningkatan produktivitas komoditas pertanian lokal.

4) Perdagangan

- Belum optimalnya ekspor perdagangan dan akses pangsa pasar internasional, sehingga produk lokal sulit bersaing di pasar global.
- Belum optimalnya penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri, serta belum lancarnya distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok.
- Belum optimalnya perlindungan konsumen, terutama pada penggunaan UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapan).
- Belum optimalnya ekspor perdagangan dan akses pangsa pasar terhadap pasar internasional.
- Belum optimalnya penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri, serta belum lancarnya distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok.

5) Perindustrian

- Peran sektor industri pengolahan pada PDRB Kota Dumai masih dominan, namun pertumbuhan kontribusinya cenderung stagnan dan masih rendahnya peran industri kecil mennegah dalam rantai pasok industri pengolahan.

2.3.1.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Penunjang

1) Administrasi Pemerintahan

- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan untuk mendukung transformasi ekonomi, sosial, dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Dumai.
- Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, sehingga pelayanan publik belum merata di semua kecamatan.

2) Perencanaan Pembangunan

- Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah berbasis risiko di Kota Dumai.

3) Keuangan

- Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, yang berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

4) Kepegawaian

- Belum optimalnya penerapan merit sistem dalam kebijakan manajemen ASN, sehingga masih terjadi ketimpangan dalam penempatan dan pengembangan karir ASN.
- Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN Kota Dumai, menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur sipil negara.

5) Pengawasan

- Perlunya penguatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal.
- Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengakibatkan kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- Masih kurangnya pendampingan pelaksanaan pembangunan, berdampak pada kurang efektifnya realisasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

2.3.1.2 Pemusatan Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual yang dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif terhadap masyarakat dan daerah.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka secara umum permasalahan pembangunan daerah di Kota Dumai dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
2. Demografi
3. Ekonomi
4. Tata Kelola
5. Keamanan dan Stabilitas Daerah
6. Pemanfaatan Ruang
7. Lingkungan Hidup

2.3.1.3 Hasil Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan diklasifikasikan menjadi permasalahan pokok dan permasalahan, serta akar penyebab masalahnya. Perumusan masalah dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2025–2029 meramu dari evaluasi capaian kinerja urusan pemerintahan hingga tahun 2024 yang kemudian digabungkan dengan telaah visi-misi kepala daerah terpilih.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa permasalahan utama daerah dijawab dengan visi dan permasalahan pokok daerah dijawab dengan misi. Oleh karena itu telaah visi misi kepala daerah terpilih dijadikan dasar perumusan permasalahan pokok daerah. Visi misi kepala daerah terpilih, merefleksikan permasalahan pokok kota yang hendak diprioritaskan dalam kurun 2025-2029. Permasalahan pokok daerah Kota Dumai yang diprioritaskan yaitu:

1. **Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menghambat daya saing Kota Dumai.** Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kota Dumai, terlihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat yang belum optimal. Hal ini menghambat terciptanya masyarakat yang tangguh, kreatif, dan mampu bersaing di era globalisasi. Menurunnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP yang terlihat dari Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kota Dumai sebesar 81,92% pada tahun 2024 yang cenderung menurun sebesar 0,40% dan belum optimalnya pengoperasian Rumah Terampil untuk pelatihan kerja akibat terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan.
2. **Ketidakmerataan pertumbuhan penduduk yang mengancam keberlanjutan pembangunan.** Kota Dumai menghadapi tantangan dalam mengatasi pertumbuhan penduduk yang tidak merata dan pengelolaan migrasi penduduk yang belum efektif. Akibatnya, terjadi tekanan pada layanan publik dan infrastruktur kota, serta munculnya kesenjangan sosial di masyarakat. Permasalahan ini diperkuat dengan data menurunnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan meningkatnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
3. **Melambatnya pertumbuhan perekonomian Kota Dumai yang berdampak pada rendahnya produktivitas**. Perekonomian Kota Dumai masih menghadapi kendala dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari Terjadinya penurunan persentase koperasi aktif, penurunan jumlah UMKM, dan rendahnya rasio kredit UMKM terhadap PDRB. Pertumbuhan investasi asing (PMA) dan penurunan rasio daya serap tenaga kerja masih rendah.
4. **Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak pada efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.** Masih terdapat birokrasi yang panjang, kurangnya transparansi, dan minimnya kolaborasi antar lembaga, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal dan tidak merata. Kondisi ini tercermin

dari Belum optimalnya penerapan merit sistem dalam kebijakan manajemen ASN, sehingga masih terjadi ketimpangan dalam penempatan dan pengembangan karir ASN. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengakibatkan kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah serta masih kurangnya pendampingan pelaksanaan pembangunan, berdampak pada kurang efektifnya realisasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

5. **Ancaman terhadap keamanan dan stabilitas daerah.** Keamanan dan stabilitas daerah di Kota Dumai masih menghadapi tantangan, antara lain belum optimalnya pelaksanaan ketertiban dan ketentraman umum yang ditandai dengan rendahnya rasio Polisi Pamong Praja 4,21 per 10.000 penduduk, kualitas patroli Satpol PP yang belum sepenuhnya efektif, dan kurangnya peningkatan jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), meningkatnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang belum teratasi dengan baik. Selain itu dalam peningkatan kualitas pangan dan energi, terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lain yang berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Rendahnya pemenuhan kebutuhan pangan dari sisi produksi lokal, dan belum optimalnya penanganan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan.
6. **Kualitas infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang belum optimal**. Pemanfaatan ruang dan tata kota di Kota Dumai belum optimal dalam mendukung pengembangan wilayah yang terencana dan berkelanjutan. Masih terdapat masalah dalam penataan infrastruktur, penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, serta kurangnya ruang publik yang memadai bagi masyarakat. Kondisi ini tercermin dari Minimnya ketersediaan moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Kurangnya infrastruktur pendukung untuk angkutan umum, seperti terminal, halte, dan fasilitas penunjang lainnya. Kurangnya perlengkapan dan prasarana jalan yang memadai, termasuk pedestrian, alat penerangan jalan, rambu lalu lintas, dan fasilitas keselamatan jalan lainnya. Meningkatnya pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) kendaraan angkutan barang, serta meningkatnya jumlah kecelakaan akibat ruas jalan yang bersinggungan dengan aktivitas masyarakat. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh dan masih rendahnya kualitas PSU.
7. **Adanya kerentanan daerah terhadap bencana dan kerusakan lingkungan.** Indeks risiko bencana Kota Dumai masih dalam kategori kelas risiko sedang. Beberapa permasalahan yang harus dipecahkan terkait dengan kondisi lingkungan hidup di Kota Dumai adalah tingkat pencemaran dan pengelolaan limbah yang belum memadai,

masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan, yang mengindikasikan belum optimalnya upaya mitigasi dan pengendalian risiko bencana. Selain itu masih terjadinya degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan efek gas rumah kaca yang berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup

TABEL T-C. 19

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KOTA DUMAI
TAHUN 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN**																					
	3.31.2.17.3.302.2	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah Perencanaan Pembangunan Industri**	**4**	**Dokumen**	**6.413.200.000,00**			-	**4**	**Dokumen**	**313.801.175,00**	**0,35**	**10.800.000,00**	**35,00%**	**3,44%**	**0,35**	**10.800.000,00**	**8,75%**	**0,17%**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
	3.31.2.17.3.302.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi rencana Pembangunan Industri kab/Kota**	Jumlah penyusunan dan Evaluasi rencana Pembangunan Industri kab/Kota	**4**	**Dokumen**	**6.413.200.000,00**			-	**4**	**Dokumen**	**313.801.175,00**	**0,35**	**10.800.000,00**	**35,00%**	**3,44%**	**0,35**	**10.800.000,00**	**8,75%**	**0,17%**		
	3.31.2.17.3.302.2.010001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	1	Dokumen	1.210.000.000,00				1	Dokumen	223.194.725,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	3.31.2.17.3.302.2.010002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah dokumen tentang kebijakan percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1	Dokumen	739.200.000,00				1	Dokumen	22.631.237,50	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	3.31.2.17.3.302.2.010003	Koodinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinas, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	844.000.000,00				1	Dokumen	32.817.965,50	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	3.31.2.17.3.302.2.010005	Koodinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Koordinas, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	3.620.000.000,00				1	Dokumen	35.157.247,00	0,35	10.800.000,00	35,00%	30,72%	0,35	10.800.000,00	35,00%	0,30%		
	3.31.2.17.3.302.2	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**JUMLAH PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**12**	**Dokumen**	**844.200.000,00**			-	**5**	**Dokumen**	**22.200.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	3.31.2.17.3.302.2.01	**Penertiban izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha industri (IPUI), izin Usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan kab/kota**	**Jumlah Penertiban izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha industri (IPUI), izin Usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan kab/kota**	**12**	**Dokumen**	**844.200.000,00**			-	**5**	**Dokumen**	**22.200.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.31.2.17.3.302.2.010004	Fasilitasi Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penertiban perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dg Sistem Inline Single Submission Risk Base	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan sektor perindustrian dalam rangka penertiban perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi melalui siinas yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan skala usaha industri keil dan industri menengah selain bidang usaha	12	Dokumen	844.200.000,00				5	Dokumen	22.200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	3.31.2.17.3.304.2	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**2**	**Dokumen**	**685.800.000,00**			**-**	**3**	**Dokumen**	**71.732.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
	3.31.2.17.3.304.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri IUI, IPUI,IUKI dan IPKIKewenangan Kab/Kota**	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri IUI, IPUI,IUKI dan IPKIKewenangan Kab/Kota	**2**	**Dokumen**	**685.800.000,00**			**-**	**3**	**Dokumen**	**71.732.000,00**	-	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
	3.31.2.17.3.304.2.010001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri,Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kab/Kota melalui SINas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan analisis data industri melalui SIINas	1	Dokumen	343.250.000,00				2	Dokumen	46.292.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	3.31.2.17.3.304.2.010003	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kab/kota dalam penyampaian data ke SIInas	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri untuk kabupaten kota dalam penyampaian data ke SIInas	1	Dokumen	342.550.000,00				1	Dokumen	25.440.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Persentase peningkatan jumlah proyek investasi**	**100**	**%**	**4.025.945.200,00**	**54**	**%**	**394.145.581,00**	**46**	**%**	**198.171.340,28**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**54,00**	**394.145.581,00**	**54,00%**	**9,79%**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
		Penetapan Pemberian Fsilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perusahaan yang Diberikan Fasilitasi Kemudahan Pengembangan Investasi**	**9**	**Dokumen**	**1.670.000.000,00**	**45**	**Perusahaan**	**257.016.314,00**	**45**	**Perusahaan**	**65.681.340,28**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**45,00**	**257.016.314,00**	**100,00%**	**15,39%**		
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4	Dokumen	770.000.000,00	1	Dokumen	257.016.314,00	1	Dokumen	41.248.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	257.016.314,00	25,00%	33,38%		
		Rekomendasi Kebijakan Sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinnya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	4	Dokumen	900.000.000,00			-	15	Dokumen	24.433.340,28	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Jumlah buku profil potensi investasi di kota Dumai yang disediakan**	**7**	**Dokumen**	**2.355.945.200,00**	**1**	**Dokumen**	**137.129.267,00**	**1**	**Dokumen**	**132.490.000,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**137.129.267,00**	**14,29%**	**5,82%**		
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah praturan(perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	2	Dokumen	1.200.935.200,00	1	Dokumen	51.396.267,00	1	Dokumen	94.504.200,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	51.396.267,00	50,00%	4,28%		
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	5	Dokumen	1.155.010.000,00	2	Dokumen	85.733.000,00	1	Dokumen	37.985.800,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2,00	85.733.000,00	40,00%	7,42%		
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase Laporan Penyelenggaraan Promosi/Investasi**	**50**	**%**	**3.059.548.950,00**	**19**	**%**	**264.373.640,00**	**31**	**%**	**144.184.100,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**19,00**	**264.373.640,00**	**38,00%**	**8,64%**		
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan penyelenggaraan promosi investasi**	**9**	**Dokumen**	**3.059.548.950,00**	**1**	**Laporan**	**264.373.640,00**	**1**	**laporan**	**144.184.100,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**264.373.640,00**	**11,11%**	**8,64%**		
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaan Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti dan diselenggarakan	5	Dokumen	2.439.389.800,00	1	Dokumen	203.843.640,00	1	Dokumen	79.851.600,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	203.843.640,00	20,00%	8,36%		
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	620.159.150,00	1	Dokumen	60.530.000,00	1	Dokumen	64.332.500,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	60.530.000,00	25,00%	9,76%		
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Investasi yang masuk pada tahun berjalan**	**5**	**%**	**5.582.375.598,00**	**30**	**%**	**839.662.750,00**	**30**	**%**	**121.207.702,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**30,00**	**839.662.750,00**	**100,00%**	**15,04%**		
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah perusahaan yang dilakukan pengendalian penanaman modal**	**330**	**pelaku usaha**	**5.582.375.598,00**	**190**	**Perusahaan**	**839.662.750,00**	**190**	**Perusahaan**	**121.207.702,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**190,00**	**839.662.750,00**	**57,58%**	**15,04%**		
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	165	pelaku usaha	1.622.999.650,00	8	Kegiatan Usaha	29.499.650,00	8	Kegiatan Usaha	38.435.500,00	0,00	-	0,00%	0,00%	8,00	29.499.650,00	4,85%	1,82%		
		Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha	jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	525	pelaku usaha	2.220.563.090,00	264	Pelaku Usaha	664.489.350,00	264	Pelaku Usaha	41.765.302,00	0,00	-	0,00%	0,00%	264,00	664.489.350,00	50,29%	29,92%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengawasan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data,profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan;serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	265	kegiatan usaha	1.738.812.858,00	50	Kegiatan Usaha	145.673.750,00	50	Kegiatan Usaha	41.006.900,00	0,00	-	0,00%	0,00%	50,00	145.673.750,00	18,87%	8,38%		
	3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara**	**100**	**%**	**47.445.925.226,00**			**14.496.316.333,88**	**100**	**%**	**150.702.574,00**	**0,25**	**35.000.000,00**	**25,00%**	**23,22%**	**0,25**	**14.531.316.333,88**	**0,25%**	**30,63%**	**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Destinasi Pariwisata**	**Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota**	**10**	**dokumen**	**1.029.392.000,00**		**dokumen**	**104.538.269,00**			**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**104.538.269,00**	**0,00%**	**10,16%**		
	3.26.02.2.01.0002	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	10	dokumen	1.029.392.000,00	2	dokumen	104.538.269,00				-	-	0,00%	0,00%	2,00	104.538.269,00	20,00%	10,16%		
	3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/Kota**	**150**	**unit**	**42.462.554.639,00**		**unit**	**13.972.331.324,88**	**9**	**Unit**	**63.720.658,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**13.972.331.324,88**	**0,00%**	**32,91%**		
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/Kota	150	unit	42.462.554.639,00	41	unit	13.972.331.324,88	9	Unit	63.720.658,00	-	-	0,00%	0,00%	41,00	13.972.331.324,88	27,33%	32,91%		
	3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara**	**110**	**unit**	**3.953.978.587,00**		**unit**	**419.446.740,00**	**20**	**sarana**	**86.981.916,00**	**0,40**	**35.000.000,00**	**40,00%**	**40,24%**	**0,40**	**454.446.740,00**	**0,36%**	**11,49%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	100	unit	3.469.720.521,00	19	unit	231.491.240,00				-	-	0,00%	0,00%	19,00	231.491.240,00	19,00%	6,67%		
	3.26.02.2.03.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	10	dokumen	484.258.066,00	4	dokumen	187.955.500,00	20	sarana	86.981.916,00	0,40	35.000.000,00	40,24%	40,24%	4,40	222.955.500,00	44,02%	46,04%		
	3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase pengembangan pemasaran pariwisata**	**100**	**%**	**6.035.834.345,00**		**%**	**2.788.051.107,00**	**3**	**Dokumen**	**125.546.850,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**2.788.051.107,00**	**0,00%**	**46,19%**		
	3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata**	**Jumlah bahan promosi dan informasi kepariwisataan, Jumlah pameran yang diikuti, Jumlah peserta yang mengikuti lomba**	**30**	**dokumen**	**6.035.834.345,00**		**dokumen**	**2.788.051.107,00**	**3**	**Dokumen**	**125.546.850,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**2.788.051.107,00**	**0,00%**	**46,19%**		
	3.26.03.2.01.0002	Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	20	dokumen	2.694.500.073,00	900	dokumen	548.777.579,00	3	Dokumen	125.546.850,00	-	-	0,00%	0,00%	900,00	548.777.579,00	100,00%	20,37%		
	3.26.03.2.01.0001	Penguatan promosi melalui media cetak, eletronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media	10	dokumen	3.341.334.272,00	5	dokumen	2.239.273.528,00				-	-	0,00%	0,00%	5,00	2.239.273.528,00	50,00%	67,02%		
	3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif**	**100**	**%**	**3.979.669.520,00**	**100**	**%**	**1.135.114.349,00**	**100**	**%**	**488.805.000,00**	**0,10**	**5.280.000,00**	**10,00%**	**1,08%**	**100,10**	**1.140.394.349,00**	**100,00%**	**28,66%**		
	3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM pariwisata dan eknomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya**	**11.100**	**orang**	**3.979.669.520,00**		**orang**	**1.135.114.349,00**	**1.180**	**orang**	**488.805.000,00**	**0,10**	**5.280.000,00**	**10,00%**	**1,08%**	**0,10**	**1.140.394.349,00**	**0,00%**	**28,66%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.26.05.2.01.0001	Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah SDM pariwisata dan eknomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	6.600	orang	700.000.000,00	100	orang	129.978.500,00				-	-	0,00%	0,00%	100,00	129.978.500,00	1,52%	18,57%		
	3.26.05.2.01.0002	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	1800	orang	675.379.920,00	868	orang	687.791.449,00				-	-	0,00%	0,00%	868,00	687.791.449,00	48,22%	100,00%		
	3.26.5.2.01.0006	Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	2.700	orang	2.604.289.600,00	55	orang	317.344.400,00	1.180	orang	488.805.000,00	0,10	5.280.000,00	10,00%	1,08%	55,10	322.624.400,00	2,04%	12,39%		
	3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase realisasi pelayanan dokumen SKA**	**5**	**%**	**216.204.764,00**	**5**	**%**	**85.177.764,00**	**5**	**%**	**27.800.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**5,00**	**85.177.764,00**	**100,00%**	**39,40%**	**DINAS PERDAGANGAN**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	3.30.02.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di**	**Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**15**	**Laporan**	**60.000.000,00**	**4**	**Laporan**	**12.280.000,00**	**5**	**Laporan**	**10.300.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4,00**	**12.280.000,00**	**26,67%**	**20,47%**		
	3.30.02.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	15	Laporan	60.000.000,00	4	Laporan	12.280.000,00	5	Laporan	10.300.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	4,00	12.280.000,00	26,67%	20,47%		
	3.30.02.07	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit**	**Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal**	**15000**	**SKA**	**156.204.764,00**	**6.000**	**Dokumen**	**72.897.764,00**	**3.000**	**Dokumen**	**17.500.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**6.000,00**	**72.897.764,00**	**40,00%**	**46,67%**		
	3.30.02.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	15000	Dokumen	156.204.764,00	6.000	Dokumen	72.897.764,00	3.000	Dokumen	17.500.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	6.000,00	72.897.764,00	40,00%	46,67%		
	3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman**	**100**	**%**	**13.332.427.253,00**	**100**	**%**	**10.132.585.655,92**	**100**	**%**	**2.151.059.934,00**	**0,45**	**850.052.816,11**	**45,00%**	**39,52%**	**100,45**	**10.982.638.472,03**	**100,00%**	**82,38%**		
	3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman**	**3**	**Pasar**	**12.526.305.253,00**	**6**	**Unit**	**10.050.631.455,92**	**3**	**Unit**	**2.090.421.872,00**	**0,45**	**850.052.816,11**	**45,00%**	**40,66%**	**6,45**	**10.900.684.272,03**	**100,00%**	**87,02%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3	Unit	12.526.305.253,00	6	Unit	10.050.631.455,92	3	Unit	2.090.421.872,00	0,45	850.052.816,11	45,00%	40,66%	6,45	10.900.684.272,03	100,00%	87,02%		
	3.30.03.2.01	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat**	**15**	**Dokumen**	**806.122.000,00**	**7**	**Dokumen**	**81.954.200,00**	**2**	**Dokumen**	**60.638.062,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**7,00**	**81.954.200,00**	**46,67%**	**10,17%**		
	3.30.03.2.01.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Dokumen	470.122.000,00	6	Dokumen	50.952.300,00	1	Dokumen	11.420.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	6,00	50.952.300,00	50,00%	10,84%		
	3.30.03.2.01.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3	Dokumen	336.000.000,00	1	Dokumen	31.001.900,00	1	Dokumen	49.218.062,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	31.001.900,00	33,33%	9,23%		
	3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Volume Ekspor**	**1,5**	**%**	**598.388.580,00**	**1,50**	**%**	**192.887.980,00**	**1,5**	**%**	**168.310.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,50**	**192.887.980,00**	**100,00%**	**32,23%**		
	3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada**	**Jumlah Pelaku Usaha yang Melaksanakan Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor dan Unggulan di Tingkat Kabupaten/Kota**	**67**	**Pelaku Usaha**	**598.388.580,00**	**45**	**Pelaku Usaha**	**192.887.980,00**	**11**	**Pelaku Usaha**	**168.310.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**45,00**	**192.887.980,00**	**67,16%**	**32,23%**		
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2	Pelaku Usaha	278.000.000,00			-	1	Pelaku Usaha	101.250.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	30	Pelaku Usaha	278.000.000,00	10	Pelaku Usaha	150.499.400,00	10	Pelaku Usaha	67.060.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	10,00	150.499.400,00	33,33%	54,14%		
	3.30.05.2.01.0006	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	35	Pelaku Usaha	42.388.580,00	35	Pelaku Usaha	42.388.580,00			-	-	-	0,00%	0,00%	35,00	42.388.580,00	100,00%	100,00%		
	3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/ penyuluhan**	**16,67**	**%**	**2.404.623.961,00**	**2803**	**Unit**	**551.202.936,00**	**1157**	**Unit**	**172.714.500,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2.803,00**	**551.202.936,00**	**100,00%**	**22,92%**		
	3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP yang Ditera/Tera Ulang, Pengawasan dan Penyuluhan**	**4474**	**Unit**	**2.404.623.961,00**	**2803**	**Unit**	**551.202.936,00**	**1157**	**Unit**	**172.714.500,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2.803,00**	**551.202.936,00**	**62,65%**	**22,92%**		
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4474	Unit	1.365.011.000,00	2.803	Unit	420.310.835,00	1.157	Unit	136.972.500,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2.803,00	420.310.835,00	62,65%	30,79%		
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3100	Orang	1.039.612.961,00	2.483	Orang	130.892.101,00	900	Orang	35.742.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2.483,00	130.892.101,00	80,10%	12,59%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase pelaku usaha yang ikut promosi produk dalam negeri**	**14**	**%**	**568.072.771,00**	**14**	**%**	**142.369.840,00**	**14**	**%**	**104.899.032,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**14,00**	**142.369.840,00**	**100,00%**	**25,06%**		
	3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**30**	**UMKM**	**568.072.771,00**	**9**	**UMKM**	**142.369.840,00**	**10**	**UMKM**	**104.899.032,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**9,00**	**142.369.840,00**	**30,00%**	**25,06%**		
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15	UMKM	297.683.631,00	5	UMKM	91.401.200,00	5	UMKM	40.620.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	5,00	91.401.200,00	33,33%	30,70%		
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15	UMKM	270.389.140,00	4	UMKM	50.968.640,00	5	UMKM	64.279.032,00	0,00	-	0,00%	0,00%	4,00	50.968.640,00	26,67%	18,85%		
	4.1.2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100**	**%**	**270.822.609.000,00**	**100**	**%**	**113.141.165.673,00**	**100**	**%**	**42.466.118.900,00**	**0,15**	**4.733.914.198,00**	**15,00%**	**11,15%**	**100,15**	**117.875.079.871,00**	**100,00%**	**43,52%**	**SEKRETARIAT DAERAH**	
	4.1.2.2	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase meningkatnya kuliatas penyelenggaraan tata pemerintahan**	**15**	**Dokumen**	**9.257.784.000,00**	**9**	**Dokumen**	**2.442.646.460,00**	**3**	**Dokumen**	**296.990.600,00**	**0,28**	**83.508.500,00**	**28,00%**	**28,12%**	**9,28**	**2.526.154.960,00**	**61,87%**	**27,29%**		
	4.1.2.2.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5	Dokumen	4.007.784.000,00	3	Dokumen	962.771.350,00	1	Dokumen	107.852.000,00	0,25	7.200.000,00	25,00%	6,68%	3,25	969.971.350,00	65,00%	24,20%		
	4.1.2.2.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Kewilayahan	5	Dokumen	2.800.000.000,00	3	Dokumen	827.052.964,00	1	Dokumen	93.404.400,00	0,25	13.390.000,00	25,00%	14,34%	3,25	840.442.964,00	65,00%	30,02%		
	4.1.2.2.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	5	Dokumen	2.450.000.000,00	3	Dokumen	652.822.146,00	1	Dokumen	95.734.200,00	0,25	62.918.500,00	25,00%	65,72%	3,25	715.740.646,00	65,00%	29,21%		
	4.1.2.2	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat**	**15**	**Dokumen**	**254.504.825.000,00**	**9**	**Dokumen**	**108.241.810.596,00**	**3**	**Dokumen**	**41.322.000.000,00**	**0,15**	**4.597.905.698,00**	**15,00%**	**11,13%**	**9,15**	**112.839.716.294,00**	**61,00%**	**44,34%**		
	4.1.2.2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	5	Dokumen	68.939.700.000,00	3	Dokumen	34.301.097.213,00	1	Dokumen	13.076.000.000,00	0,25	1.259.034.071,00	25,00%	9,63%	3,25	35.560.131.284,00	65,00%	51,58%		
	4.1.2.2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5	Dokumen	63.380.000.000,00	3	Dokumen	40.921.757.397,00	1	Dokumen	11.561.000.000,00	0,25	1.676.440.100,00	25,00%	14,50%	3,25	42.598.197.497,00	65,00%	67,21%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.1.2.2.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5	Dokumen	122.185.125.000,00	3	Dokumen	33.018.955.986,00	1	Dokumen	16.685.000.000,00	0,25	1.662.431.527,00	25,00%	9,96%	3,25	34.681.387.513,00	65,00%	28,38%		
	4.1.2.2	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**30**	**Kasus**	**3.635.000.000,00**	**9**	**Kasus**	**1.341.864.728,00**	**30**	**Kasus**	**407.543.700,00**	0,15	52.500.000,00	15,00%	12,88%	9,49	1.394.364.728,00	31,63%	38,36%		
	4.1.2.2.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum Daerah yang di susun	5	Dokumen	1.015.000.000,00	1	Dokumen	480.851.136,00	1	Dokumen	151.242.700,00	0,25	19.250.000,00	25,00%	12,73%	1,25	500.101.136,00	25,00%	49,27%		
	4.1.2.2.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi	30	Kasus	1.740.000.000,00	9	Kasus	541.585.381,00	6	Kasus	154.630.000,00	0,25	15.750.000,00	25,00%	10,19%	9,59	557.335.381,00	31,96%	32,03%		
	4.1.2.2.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi"	5	Dokumen	880.000.000,00	1	Dokumen	319.428.211,00	1	Dokumen	101.671.000,00	0,25	17.500.000,00	25,00%	17,21%	1,25	336.928.211,00	25,00%	38,29%		
	4.1.2.2	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah**	**15**	**Dokumen**	**3.425.000.000,00**	**9**	**Dokumen**	**1.114.843.889,00**	**3**	**Dokumen**	**439.584.600,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**9,00**	**1.114.843.889,00**	**60,00%**	**32,55%**		
	4.1.2.2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama	5	Dokumen	1.551.792.830,00	3	Dokumen	529.929.060,00	1	Dokumen	365.271.600,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	529.929.060,00	60,00%	34,15%		
	4.1.2.2.2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama	5	Dokumen	1.135.000.000,00	3	Dokumen	347.521.918,00	1	Dokumen	26.960.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	347.521.918,00	60,00%	30,62%		
	4.1.2.2.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan	5	Laporan	738.207.170,00	3	Laporan	237.392.911,00	1	Laporan	47.353.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	237.392.911,00	60,00%	32,16%		
	4.1.3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan**	**100**	**%**	**23.527.300.000,00**	**100**	**%**	**12.718.024.941,00**	**100**	**%**	**2.116.851.530,00**	**0,35**	**712.734.800,00**	**35,00%**	**33,67%**	**100,35**	**13.430.759.741,00**	**100,00%**	**57,09%**		
	4.1.3.2	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian**	**100**	**%**	**3.975.000.000,00**	**100**	**%**	**1.714.221.577,00**	**100**	**%**	**466.745.900,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**1.714.221.577,00**	**100,00%**	**43,13%**		
	4.1.3.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD"	3	BUMD	1.280.000.000,00	3	Dokumen	743.230.615,00	1	Dokumen	268.950.525,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	743.230.615,00	100,00%	58,06%		
	4.1.3.2.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5	Laporan	1.257.000.000,00	3	Laporan	456.376.547,00	1	Laporan	97.179.925,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	456.376.547,00	60,00%	36,31%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.1.3.2.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5	Dokumen	1.438.000.000,00	3	Dokumen	514.614.415,00	1	Dokumen	100.615.450,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	514.614.415,00	60,00%	35,79%		
	4.1.3.2	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan**	**15**	**Dokumen**	**8.766.500.000,00**	**9**	**Dokumen**	**5.202.353.976,00**	**3**	**Dokumen**	**483.302.828,80**	**0,15**	**53.950.000,00**	**15,00%**	**11,16%**	**9,15**	**5.256.303.976,00**	**61,00%**	**59,96%**		
	4.1.3.2.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5	Dokumen	3.220.000.000,00	3	Dokumen	2.004.330.123,00	1	Dokumen	109.100.928,80	0,25	16.500.000,00	25,00%	15,12%	3,25	2.020.830.123,00	65,00%	62,76%		
	4.1.3.2.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendaliandan Evaluasi Program Pembangunan	5	Laporan	2.896.500.000,00	3	Laporan	1.714.559.837,00	1	Laporan	178.761.900,00	0,25	21.950.000,00	25,00%	12,28%	3,25	1.736.509.837,00	65,00%	59,95%		
	4.1.3.2.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5	Laporan	2.650.000.000,00	3	Laporan	1.483.464.016,00	1	Laporan	195.440.000,00	0,25	15.500.000,00	25,00%	7,93%	3,25	1.498.964.016,00	65,00%	56,56%		
	4.1.3.2	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pengadaan Barang & Jasa di Kota Dumai**	**100**	**%**	**8.375.800.000,00**	**100**	**%**	**4.957.167.618,00**	**100**	**%**	**1.007.492.801,20**	**0,65**	**646.474.800,00**	**65,00%**	**64,17%**	**100,65**	**5.603.642.418,00**	**100,00%**	**66,90%**		
	4.1.3.2.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5	Dokumen	2.770.300.000,00	3	Dokumen	1.592.257.528,00	1	Dokumen	395.939.001,20	0,72	281.520.000,00	72,00%	71,10%	3,25	1.873.777.528,00	65,00%	67,64%		
	4.1.3.2.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Dokumen	3.500.000.000,00	3	Dokumen	2.631.119.025,00	1	Dokumen	542.396.800,00	0,67	364.954.800,00	67,29%	67,29%	3,25	2.996.073.825,00	100,00%	85,60%		
	4.1.3.2.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pen0gadaan Barang dan Jasa	32	Orang	2.105.500.000,00	11	Orang	733.791.065,00	4	Orang	69.157.000,00	-	-	0,00%	0,00%	11,15	733.791.065,00	34,85%	34,85%		
	4..1.3.2	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap pemantauan kebijakan sumber daya alam**	**15**	**Dokumen**	**2.410.000.000,00**	**9**	**Dokumen**	**844.281.770,00**	**3**	**Dokumen**	**159.310.000,00**	**0,10**	**12.310.000,00**	**10,00%**	**7,73%**	**9,10**	**856.591.770,00**	**60,67%**	**35,54%**		
	4..1.3.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan dibidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	5	Dokumen	820.000.000,00	3	Dokumen	241.932.140,00	1	Dokumen	55.070.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	241.932.140,00	60,00%	29,50%		
	4..1.3.2.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5	Dokumen	870.000.000,00	3	Dokumen	362.006.470,00	1	Dokumen	51.400.000,00	0,25	7.060.000,00	25,00%	13,74%	3,25	369.066.470,00	65,00%	42,42%		
	4..1.3.2.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan dibidang energi dan air	5	Dokumen	720.000.000,00	3	Dokumen	240.343.160,00	1	Dokumen	52.840.000,00	0,25	5.250.000,00	25,00%	9,94%	3,25	245.593.160,00	65,00%	34,11%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan**	**100**	**%**	**5.108.720.848,00**	**100**	**%**	**1.328.742.980,00**	**100**	**%**	**1.010.000.000,00**	**0,16**	**90.303.800,00**	**16,00%**	**8,94%**	**100,16**	**1.419.046.780,00**	**100,00%**	**27,78%**	**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan Daerah Kabupatem/Kota**		**2**	**Dokumen**	**20.000.000,00**			-	**1**	**Dokumen**	**10.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2	Dokumen	20.000.000,00			-	1	Dokumen	10.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan**	**100**	**%**	**5.088.720.848,00**	**100**	**%**	**1.328.742.980,00**	**100**	**%**	**1.000.000.000,00**	**0,16**	**90.303.800,00**	**16,00%**	**9,03%**	**100,16**	**1.419.046.780,00**	**100,00%**	**27,89%**		
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	368	Orang	2.463.762.308,00	147	Orang	943.331.400,00	74	Orang	500.000.000,00	0,18	90.303.800,00	18,06%	18,06%	147,16	1.033.635.200,00	39,99%	41,95%		
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	35	Orang	268.937.440,00	14	Orang	84.718.200,00	7	Orang	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	14,00	84.718.200,00	40,00%	31,50%		
	1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	29196	Keluarga	1.176.021.100,00	15.627	Keluarga	150.693.380,00	6.933	Keluarga	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	15.627,00	150.693.380,00	53,52%	12,81%		
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24	Lembaga	1.000.000.000,00	2	Lembaga	150.000.000,00	11	Lembaga	300.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	150.000.000,00	8,33%	15,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.02.02.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejah teraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Sertifikat	180.000.000,00				10	Sertifikat	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal**	**100**	**%**	**116.586.000,00**	**100**	**%**	**7.750.000,00**	**100**	**%**	**10.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**7.750.000,00**	**100,00%**	**6,65%**		
	1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal**	**100**	**%**	**116.586.000,00**	**100**	**%**	**7.750.000,00**	**100**	**%**	**10.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**7.750.000,00**	**100,00%**	**6,65%**		
	1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	50,00	Orang	116.586.000,00	20	Orang	7.750.000,00	10	Orang	10.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	7.750.000,00	40,00%	6,65%		
	1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial**	**100**	**%**	**10.734.536.387,00**	**100**	**%**	**4.691.235.222,00**	**100**	**%**	**1.689.650.000,00**	**0,10**	**142.689.400,00**	**0,10%**	**8,44%**	**100,10**	**4.833.924.622,00**	**100,00%**	**45,03%**		
	1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**100**	**%**	**9.474.536.387,00**	**100**	**%**	**4.691.235.222,00**	**100**	**%**	**1.287.500.000,00**	**0,10**	**100.642.000,00**	**10,00%**	**7,82%**	**100,10**	**4.791.877.222,00**	**100,00%**	**50,58%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	720,00	Orang	1.350.634.540,00	350	Orang	846.532.000,00	210	Orang	350.000.000,00	0,73	66.642.000,00	72,86%	19,04%	350,73	913.174.000,00	48,71%	67,61%		
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	520,00	Orang	412.521.000,00	200	Orang	64.361.000,00	110	Orang	27.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	200,00	64.361.000,00	38,46%	15,60%		
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	376,00	Orang	600.000.000,00	193	Orang	184.655.000,00	85	Orang	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	193,00	184.655.000,00	51,33%	30,78%		
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	520,00	Orang	323.983.300,00	200	Orang	47.135.700,00	110	Orang	55.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	200,00	47.135.700,00	38,46%	14,55%		
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	520,00	Orang	1.404.097.860,00	200	Orang	500.715.813,00	110	Orang	250.000.000,00	0,28	34.000.000,00	28,18%	13,60%	200,28	534.715.813,00	38,52%	38,08%		
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	175,00	Orang	220.000.000,00			-	50	Orang	30.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran,Surat Nikah , dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	30,00	Orang	55.000.000,00			-	5	Orang	5.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.060.4.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30,00	Orang	95.000.000,00			-	10	Orang	5.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	370,00	Orang	85.000.000,00			-	120	Orang	10.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	2450,00	Orang	3.828.540.300,00	2.100	Orang	2.697.329.358,00	120	Orang	150.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2.100,00	2.697.329.358,00	85,71%	70,45%		
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	335,00	Orang	218.992.500,00	150	Orang	53.850.000,00	120	Orang	25.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	150,00	53.850.000,00	44,78%	24,59%		
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	480,00	Orang	880.766.887,00	150	Orang	296.656.351,00	110	Orang	180.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	150,00	296.656.351,00	31,25%	33,68%		
	1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial**	**100**	**%**	**1.260.000.000,00**			**-**	**100**	**%**	**402.150.000,00**	**0,10**	**42.047.400,00**	**10,46%**	**10,46%**	**0,10**	**42.047.400,00**	**0,10%**	**3,34%**		
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30,00	Orang	70.000.000,00			-	10	Orang	20.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Giz Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30,00	Orang	540.000.000,00			-	10	Orang	200.750.000,00	0,70	8.447.400,00	70,00%	4,21%	0,70	8.447.400,00	2,33%	1,56%		
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30,00	Orang	70.000.000,00			-	10	Orang	15.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30,00	Orang	490.000.000,00			-	10	Orang	146.400.000,00	0,35	33.600.000,00	35,00%	22,95%	0,35	33.600.000,00	1,17%	6,86%		
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	30,00	Orang	30.000.000,00			-	5	Orang	5.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30,00	Orang	30.000.000,00			-	10	Orang	5.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3,00	Dokumen	30.000.000,00			-	1	Dokumen	10.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**100**	**%**	**48.969.513.488,00**	**100**	**%**	**10.532.679.800,00**	**100**	**%**	**15.519.000.000,00**	**0,10**	**15.050.000,00**	**10,00%**	**1,00%**	**100,10**	**10.547.729.800,00**	**100,00%**	**21,54%**		
	1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Persentase anak terlantar yang dipelihara**	**100**	**%**	**693.718.069,00**	**100**	**%**	**15.560.000,00**	**100**	**%**	**95.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**15.560.000,00**	**100,00%**	**2,24%**		
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	45,00	Orang	260.000.000,00	1	Orang	-	10	Orang	15.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	-	2,22%	0,00%		
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	45,00	Orang	225.000.000,00	1	Orang	3.530.000,00	10	Orang	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	3.530.000,00	2,22%	1,57%		
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50,00	Orang	208.718.069,00	6	Orang	12.030.000,00	10	Orang	30.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	6,00	12.030.000,00	12,00%	5,76%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang terdata**	**100**	**%**	**48.275.795.419,00**	**100**	**%**	**10.517.119.800,00**	**100**	**%**	**15.424.000.000,00**	**0,23**	**15.050.000,00**	**23,00%**	**1,00%**	**100,23**	**10.532.169.800,00**	**100,00%**	**21,82%**		
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	682.744	Orang	691.883.419,00	275.009	Orang	151.811.300,00	135.761	Orang	150.000.000,00	0,23	15.050.000,00	23,00%	10,03%	275.009,23	166.861.300,00	40,28%	24,12%		
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	91.590	Keluarga	300.000.000,00	30.530	Keluarga	32.027.000,00	30.530	Keluarga	74.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	30.530,00	32.027.000,00	33,33%	10,68%		
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial Kesejahteraan keluarga kewenangan kab/kota	21.504	Keluarga	46.783.912.000,00	7.892	Keluarga	10.333.281.500,00	5.876	Keluarga	15.000.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	7.892,00	10.333.281.500,00	36,70%	22,09%		
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	500.000.000,00			-	20	Orang	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.13.4	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahnya**	**100**	**%**	**1.753.438.000,00**	**100**	**%**	**170.889.900,00**	**100**	**%**	**500.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**170.889.900,00**	**100,00%**	**9,75%**		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.4.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar**	**100**	**%**	**1.753.438.000,00**	**100**	**%**	**170.889.900,00**	**100**	**%**	**500.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**170.889.900,00**	**100,00%**	**9,75%**		
	2.13.4.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	144	Dokumen	781.721.000,00	72	Dokumen	18.585.100,00	36	Dokumen	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	72,00	18.585.100,00	50,00%	2,38%		
	2.13.4.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	180	Dokumen	971.717.000,00	72	Dokumen	152.304.800,00	36	Dokumen	300.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	72,00	152.304.800,00	40,00%	15,67%		
	2.13.5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang aktif**	**100**	**%**	**8.537.267.191,00**	**100**	**%**	**2.683.018.214,00**	**100**	**%**	**2.250.000.000,00**	**0,25**	**494.502.840,00**	**0,25%**	**21,98%**	**100,25**	**3.177.521.054,00**	**100,00%**	**37,22%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.13.5.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**	**100**	**%**	**8.537.267.191,00**	**100**	**%**	**2.683.018.214,00**	**100**	**%**	**2.250.000.000,00**	**0,25**	**494.502.840,00**	**0,25%**	**21,98%**	**100,25**	**3.177.521.054,00**	**100,00%**	**37,22%**		
	2.13.5.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	180	Dokumen	5.047.912.191,00	72	Dokumen	1.724.363.505,00	36	Dokumen	1.200.000.000,00	0,30	388.989.340,00	30,00%	32,42%	72,30	2.113.352.845,00	40,17%	41,87%		
	2.13.5.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	144	Lembaga	1.010.000.000,00	72	Lembaga	289.120.034,00	36	Lembaga	250.000.000,00	0,15	20.440.000,00	15,00%	8,18%	72,15	309.560.034,00	50,10%	30,65%		
	2.13.5.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	108	Dokumen	250.000.000,00	36	Dokumen	41.657.780,00	36	Dokumen	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	36,00	41.657.780,00	33,33%	16,66%		
	2.13.5.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	180	Laporan	829.355.000,00	72	Laporan	219.592.551,00	36	Laporan	300.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	72,00	219.592.551,00	40,00%	26,48%		
	2.13.5.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	108	Laporan	600.000.000,00	36	Laporan	96.780.200,00	36	Laporan	250.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	36,00	96.780.200,00	33,33%	16,13%		
	2.13.5.2.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	200,00	Keluarga	400.000.000,00	100	Keluarga	150.719.307,00	50	Keluarga	100.000.000,00	0,50	47.400.000,00	50,00%	47,40%	100,50	198.119.307,00	50,25%	49,53%		
	2.13.5.2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	200,00	Keluarga	400.000.000,00	100	Keluarga	160.784.837,00	50	Keluarga	100.000.000,00	0,50	37.673.500,00	50,00%	37,67%	100,50	198.458.337,00	50,25%	49,61%		
	2.7.2	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD**	**100**	**%**	**355.000.000,00**	**100**	**%**	**116.281.272,00**	**100**	**%**	**100.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**116.281.272,00**	**100,00%**	**32,76%**	**DINAS TENAGA KERJA**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	2.7.2.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Persentase Sinkronisasi perencanaan kebutuhan pelatihan dg Rencana Tenaga Kerja**	**75**	**%**	**355.000.000,00**	**100**	**%**	**116.281.272,00**	**75**	**%**	**100.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**116.281.272,00**	**100,00%**	**32,76%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.7.2.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Dokumen	125.000.000,00	1	Dokumen	76.210.000,00				-	-	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**76.210.000,00**	**100,00%**	**60,97%**		
	2.7.2.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	40	Orang	230.000.000,00	20	Orang	40.071.272,00	40	Orang	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	40.071.272,00	50,00%	17,42%		
	2.7.3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan**	**100**	**%**	**4.520.000.000,00**	**30**	**%**	**1.449.837.158,00**	**10**	**%**	**525.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**30,00**	**1.449.837.158,00**	**30,00%**	**32,08%**		
	2.7.3.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi**	**250**	**Orang**	**3.870.000.000,00**	**199**	**Orang**	**1.264.555.908,00**	**10**	**Orang**	**400.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**199,00**	**1.264.555.908,00**	**79,60%**	**32,68%**		
	2.7.3.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	250	Orang	2.083.600.000,00	199	Orang	1.164.605.908,00	10	Orang	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	199,00	1.164.605.908,00	79,60%	55,89%		
	2.7.3.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	30	Lembaga	200.000.000,00							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.7.3.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4	Unit	1.586.400.000,00	4	Unit	99.950.000,00	4	Unit	300.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	4,00	99.950.000,00	100,00%	6,30%		
	2.7.3.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Peningkatan pemahaman ttg regulasi LPKS**	**100**	**%**	**150.000.000,00**	**100**	**%**	**38.450.000,00**			-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**38.450.000,00**	**100,00%**	**25,63%**		
	2.7.3.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20	Lembaga	150.000.000,00	71	Lembaga	38.450.000,00			-	-	-	0,00%	0,00%	71,00	38.450.000,00	100,00%	25,63%		
	2.7.3.2.03	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Peningkatan pemahaman ttg perizinan pd LPKS**	**100**	**%**	**150.000.000,00**	**100**	**%**	**42.770.500,00**			-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**42.770.500,00**	**100,00%**	**28,51%**		
	2.7.3.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	20	Perizinan	150.000.000,00	10	Perizinan	42.770.500,00			-	-	-	0,00%	0,00%	10,00	42.770.500,00	50,00%	28,51%		
	2.7.3.2.04	**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase Produktivitas pada perusahaan kecil**	**100**	**%**	**150.000.000,00**	**100**	**%**	**62.589.400,00**	**100**	**%**	**50.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**62.589.400,00**	**100,00%**	**41,73%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.7.3.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20	Perusahaan	150.000.000,00	40	Perusahaan	62.589.400,00	1	Perusahaan	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	40,00	62.589.400,00	100,00%	41,73%		
	2.7.3.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja**	**25**	**%**	**200.000.000,00**	**25**	**%**	**41.471.350,00**	**25**	**%**	**75.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**25,00**	**41.471.350,00**	**100,00%**	**20,74%**		
	2.7.3.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1	Dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	41.471.350,00	1	Dokumen	75.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	41.471.350,00	100,00%	20,74%		
	2.7.4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase penempatan tenaga kerja**	**45**	**%**	**3.875.000.000,00**	**90**	**%**	**1.108.724.047,00**	**35**	**%**	**470.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**90,00**	**1.108.724.047,00**	**100,00%**	**28,61%**		
	2.7.4.2.01	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan**	**40**	**%**	**2.750.000.000,00**	**100**	**%**	**869.302.489,00**	**40**	**%**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**869.302.489,00**	**100,00%**	**31,61%**		
	2.7.4.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	20	Orang	200.000.000,00			-			-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.7.4.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100	Orang	250.000.000,00			-			-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.7.4.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300	Orang	200.000.000,00	500	Orang	49.612.280,00	300	Orang	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	500,00	49.612.280,00	100,00%	24,81%		
	2.7.4.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	50	Orang	200.000.000,00	30	Orang	-	20	Orang	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	30,00	-	60,00%	0,00%		
	2.7.4.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	480	Orang	1.900.000.000,00	205	Orang	819.690.209,00	50	Orang	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	205,00	819.690.209,00	42,71%	43,14%		
	2.7.4.2.02	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengawasan dan Pengendalian LKPTS**	**100**	**%**	**125.000.000,00**			**-**			**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
	2.7.4.2.02.0001	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	20	Perusahaan	125.000.000,00			-			-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.7.4.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Angkutan Orang**	**85**	**%**	**500.000.000,00**	**100**	**%**	**224.792.636,00**	**85**	**%**	**150.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**224.792.636,00**	**100,00%**	**44,96%**		
	2.7.4.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	dan/atau Barang	2	Dokumen	150.000.000,00	5	Dokumen	207.183.636,00	2	Dokumen	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	5,00	207.183.636,00	100,00%	100,00%		
	2.7.4.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	antar Kota dalam 1	3.000	Orang	100.000.000,00	200	Orang	17.609.000,00			-	-	-	0,00%	0,00%	200,00	17.609.000,00	6,67%	17,61%		
	2.7.4.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	(satu) Daerah	50	Orang	250.000.000,00			-	50	Orang	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.7.4.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) didaerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten/Kota**	**85**	**%**	**500.000.000,00**	**100**	**%**	**14.628.922,00**	**85**	**%**	**70.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**14.628.922,00**	**100,00%**	**2,93%**		
	2.7.4.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon PekerjaMigran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	70	Orang	170.000.000,00	20	Orang	14.628.922,00	70	Orang	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	14.628.922,00	28,57%	8,61%		
	2.7.4.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	50	Orang	170.000.000,00			-			-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.7.4.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	70	Orang	160.000.000,00			-	25	Orang	20.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.7.5	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan**	**100**	**%**	**1.595.000.000,00**	**100**	**%**	**3.312.341.588,00**	**95**	**%**	**2.609.200.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**3.312.341.588,00**	**100,00%**	**100,00%**		
			Menurunnya Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	**35**	**%**		**90**	**%**		**35**	**%**		-	-	**0,00%**		**90,00**	-	**100,00%**			
	2.7.5.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang**	**Persentase pelaksanaan pembinaan hubungan industrial**	**85**	**%**	**750.000.000,00**	**100**	**%**	**594.978.695,00**	**85**	**%**	**130.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**594.978.695,00**	**100,00%**	**79,33%**		
	2.7.5.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50	Perusahaan	200.000.000,00	65	Perusahaan	98.714.345,00	20	Perusahaan	15.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	65,00	98.714.345,00	100,00%	49,36%		
	2.7.5.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25	Perusahaan	150.000.000,00	30	Perusahaan	58.962.450,00	10	Perusahaan	15.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	30,00	58.962.450,00	100,00%	39,31%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.7.5.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan – Dewan Pengupahan	5	Laporan	400.000.000,00	11	Laporan	437.301.900,00	5	Laporan	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	11,00	437.301.900,00	100,00%	100,00%		
	2.7.5.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial**	**100**	**%**	**845.000.000,00**	**100**	**%**	**2.717.362.893,00**	**100**	**%**	**2.479.200.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**2.717.362.893,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2.7.5.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	55	Perkara	200.000.000,00	70	Perkara	64.838.081,00	20	Perkara	20.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	70,00	64.838.081,00	100,00%	32,42%		
	2.7.5.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubangan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	50	Perkara	120.000.000,00	90	Perkara	75.439.520,00	50	Perkara	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	90,00	75.439.520,00	100,00%	62,87%		
	2.7.5.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	29	Asosiasi dan Serikat Pekerja	115.000.000,00	2	Asosiasi dan Serikat Pekerja	49.988.992,00	29	Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	49.988.992,00	6,90%	43,47%		
	2.7.5.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	250.000.000,00	1	Lembaga	4.515.000,00	1	Lembaga	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	4.515.000,00	100,00%	1,81%		
	2.7.5.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	16.000	Orang	160.000.000,00	21.500	Orang	2.522.581.300,00	16.000	Orang	2.300.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	21.500,00	2.522.581.300,00	100,00%	100,00%		
	2.17.2.17.3.304.2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**JUMLAH PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**114**	**Koperas**	**2.664.000.000,00**			-	**110**	**Unit usaha**	**47.508.217,75**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	-	-		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.2.17.3.304.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang wilayah**	**Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah kab/kota**	**114**	**Koperas**	**2.664.000.000,00**			-	**110**	**Unit usaha**	**47.508.217,75**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	-	-		
	2.17.2.17.3.304.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	47	Koperas	1.332.000.000,00				45	Unit usaha	23.808.217,75	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-		
	2.17.2.17.3.304.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan pengawasan Koeprasi yang wilayah keanggotaannya daerah kab/kota	Jumlah Koperas yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasani	67	Koperas	1.332.000.000,00				65	Unit usaha	23.700.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.2.17.3.304.2	**PROGRAM PENIALAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**JUMLAH PENIALAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**56**	**Koperasi**	**2.138.200.000,00**			**-**	**53**	**Unit usaha**	**101.217.835,50**	0,30	**26.091.000,00**	**30,00%**	**25,78%**	**0,30**	**26.091.000,00**	**0,54%**	**1,22%**	**DINAS KOP**	
	2.17.2.17.3.304.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 daerah**	**Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 daerah**	**56**	**Koperasi**	**2.138.200.000,00**			**-**	**53**	**Unit usaha**	**101.217.835,50**	0,30	**26.091.000,00**	**30,00%**	**25,78%**	**0,30**	**26.091.000,00**	**0,54%**	**1,22%**		
	2.17.2.17.3.304.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian kesehatan	27	Koperasi	1.504.020.000,00				26	Unit usaha	57.280.185,50	0,45	21.901.000,00	45,00%	38,23%	0,45	21.901.000,00	1,67%	1,46%		
	2.17.2.17.3.304.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja, Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	29	Koperasi	634.180.000,00				27	Unit usaha	43.937.650,00	0,35	4.190.000,00	35,00%	9,54%	0,35	4.190.000,00	1,21%	0,66%		Tunda bayar 2024
	2.17.2.17.3.305.2	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**JUMKAH PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**75**	**Orang**	**1.742.400.000,00**			**-**	**70**	**orang**	**117.002.450,00**	0,45	**40.235.000,00**	**45,00%**	**34,39%**	**0,45**	**40.235.000,00**	**0,60%**	**2,31%**		
	2.17.2.17.3.305.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota**	**Jumlah Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota**	**75**	**Orang**	**1.742.400.000,00**			**-**	**70**	**orang**	**117.002.450,00**	0,45	**40.235.000,00**	**45,00%**	**34,39%**	**0,45**	**40.235.000,00**	**0,60%**	**2,31%**		
	2.17.2.17.3.305.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yangmemahami Pengetahuan Perkoperasian	75	Orang	1.742.400.000,00				70	orang	117.002.450,00	0,45	40.235.000,00	45,00%	34,39%	0,45	40.235.000,00	0,60%	2,31%		
	2.17.2.17.3.306.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		**100**	**Keluarga**	**464.100.000,00**			**-**	**100**	**Keluarga**	**96.318.087,00**	**0,20**	**1.410.000,00**	**20,00%**	**1,46%**	**0,20**	**1.410.000,00**	**0,20%**	**0,30%**		
	2.17.2.17.3.306.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota**		**100**	**Keluarga**	**464.100.000,00**			**-**	**100**	**Keluarga**	**96.318.087,00**	**0,20**	**1.410.000,00**	**20,00%**	**1,46%**	**0,20**	**1.410.000,00**	**0,20%**	**0,30%**		
	2.17.2.17.3.306.2.01.0002	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup	100	Keluarga	464.100.000,00				100	keluarga	96.318.087,00	0,20	1.410.000,00	20,00%	1,46%	0,20	1.410.000,00	0,20%	0,30%		Tunda bayar 2024
	2.17.2.17.3.307.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**JUMLAH PEMBERDAYAAN USAHA MENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**2180**	**Unit Usaha**	**8.192.000.000,00**			**-**	**1688**	**Unit Usaha**	**445.575.098,00**	**0,35**	**137.199.800,00**	**35,00%**	**30,79%**	**0,35**	**137.199.800,00**	**0,02%**	**1,67%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.2.17.3.307.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan**	**Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan**	**2180**	**Unit Usaha**	**8.192.000.000,00**			**-**	**1688**	**Unit Usaha**	**445.575.098,00**	**0,35**	**137.199.800,00**	**35,00%**	**30,79%**	**0,35**	**137.199.800,00**	**0,02%**	**1,67%**		
	2.17.2.17.3.307.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	70	Unit Usaha	165.500.000,00				63	Unit usaha	71.151.600,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.17.2.17.3.307.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	300	Unit Usaha	3.770.310.000,00				250	orang	33.728.437,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.17.3.307.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan standarisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40	Usaha Mikro	1.217.845.000,00				35	Unit usaha	38.914.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.17.2.17.3.307.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30	Usaha Mikro	993.000.000,00				25	Unit usaha	118.631.265,00	0,75	84.099.800,00	75,00%	70,89%	0,75	84.099.800,00	2,50%	8,47%		
	2.17.2.17.3.307.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro terdata	1680	Unit Usaha	993.000.000,00				1260	Unit usaha	165.630.660,00	0,45	53.100.000,00	45,00%	32,06%	0,45	53.100.000,00	0,03%	5,35%		
	2.17.2.17.3.307.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	60	Unit Usaha	1.052.345.000,00				55	orang	17.519.136,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.17.2.17.3.308.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**JUMLAH PENGEMBANGAN UMKM**	**250**	**Unit Usaha**	**2.982.000.000,00**			**-**	**200**	**Unit Usaha**	**130.552.610,00**	0,30	**22.800.000,00**	**30,00%**	**17,46%**	**0,30**	**22.800.000,00**	**0,12%**	**0,76%**		
	2.17.2.17.3.308.2.01	**Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan sekala usaha menjadi usaha kecil**	**Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan sekala usaha menjadi usahakecil**	**250**	**Unit Usaha**	**2.982.000.000,00**			**-**	**200**	**Unit Usaha**	**130.552.610,00**	0,30	**22.800.000,00**	**30,00%**	**17,46%**	**0,30**	**22.800.000,00**	**0,12%**	**0,76%**		
	2.17.2.17.3.308.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapat fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.	250	Unit Usaha	2.982.000.000,00				200	Unit usaha	130.552.610,00	0,30	22.800.000,00	30,00%	17,46%	0,30	22.800.000,00	0,12%	0,76%		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**	**100**	**%**	**12.922.336.388,00**	**100**	**%**	**5.326.948.180,00**	**100**	**%**	**1.207.504.694,00**	**0,05**	**7.800.000,00**	**5,00%**	**1,00%**	**100,05**	**5.334.748.180,00**	**100,00%**	**41,28%**	**DAN PERTANIAN**	URUSAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	**Jumlah luas pengembangan tanaman pangan dan hortikultura**	**18**	**Laporan**	**7.922.891.388,00**	**7**	**Laporan**	**3.314.670.864,00**	**3**	**Laporan**	**640.091.880,00**	**0,05**	**7.800.000,00**	**5,00%**	**1,22%**	**7,05**	**3.322.470.864,00**	**39,17%**	**41,94%**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**	
		PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	18	Laporan	7.922.891.388,00	6	Laporan	2.924.760.705,00	3	Laporan	580.818.880,00	0,05	7.800.000,00	5,00%	1,34%	6,05	2.932.560.705,00	33,61%	37,01%		
		PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga				120	Keluarga	99.990.241,00	120	Keluarga	59.273.000,00	-	-	0,00%	0,00%	120,00	99.990.241,00	0,00%	0,00%		
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga pangan	Jumlah Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1	Laporan	289.919.918,00				-	-	0,00%	0,00%	1,00	289.919.918,00	0,00%	0,00%		
		PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	**JUMLAH PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA**			-	**2**	**Dokumen**	**78.811.000,00**	**1**	**Dokumen**	**16.050.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**78.811.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Candangan Pangan Kabupaten/ Kota				2	Dokumen	78.811.000,00	1	Dokumen	16.050.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	78.811.000,00	0,00%	0,00%		
		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA	**Jumlah Kelompok Tani yang diberi bantuan pada kelurahan stunting**	**9**	**Dokumen**	**4.999.445.000,00**	**5**	**Dokumen**	**1.933.466.316,00**	**1**	**Laporan**	**551.362.814,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**5,00**	**1.933.466.316,00**	**55,56%**	**38,67%**		
		PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3	Dokumen	1.457.202.000,00	2	Dokumen	281.736.000,00				-	-	0,00%	0,00%	2,00	281.736.000,00	66,67%	19,33%		
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6	Laporan	3.542.243.000,00	2	Laporan	1.651.730.316,00	1	Laporan	551.362.814,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	1.651.730.316,00	33,33%	46,63%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1	Laporan					-	-	0,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase Penyediaan Sarana Pengembangan Tanaman Pekarangan pada daerah stunting**	**100**	**%**	**1.920.276.500,00**	**100**	**%**	**317.595.914,00**	**100**	**%**	**51.113.400,06**	**0,10**	**5.200.000,00**	**10,17%**	**10,17%**	**100,10**	**322.795.914,00**	**100,00%**	**16,81%**		
		PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	**Jumlah Dokumen Ketahanan dan Kerentanan pangan**	**6**	**Dokumen**	**1.920.276.500,00**	**2**	**Dokumen**	**317.595.914,00**	**1**	**Dokumen**	**51.113.400,06**	**0,10**	**5.200.000,00**	**10,17%**	**10,17%**	2,10	**322.795.914,00**	**35,03%**	**16,81%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang Dimutahirkan	6	Dokumen	1.920.276.500,00	2	Dokumen	317.595.914,00	1	Dokumen	51.113.400,06	0,10	5.200.000,00	10,17%	10,17%	2,10	322.795.914,00	35,03%	16,81%		
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar**	**100**	**%**	**1.720.157.000,00**	**100**	**%**	**254.532.300,00**	**100**	**%**	**630.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**254.532.300,00**	**100,00%**	**14,80%**		
		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Jumlah Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan segar**	**20**	**Dokumen**	**1.720.157.000,00**	**12**	**Dokumen**	**254.532.300,00**	**8**	**Dokumen**	**630.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**12,00**	**254.532.300,00**	**60,00%**	**14,80%**		
		PENGUATAN KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota Yang Dibina	20	Dokumen	1.000.157.000,00	4	Dokumen	109.981.000,00	4	Dokumen	-	-	-	0,00%	0,00%	4,00	109.981.000,00	20,00%	11,00%		
		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten / kota	20	Dokumen	720.000.000,00	8	Dokumen	144.551.300,00	4	Dokumen	630.000,00	-	-	0,00%	0,00%	8,00	144.551.300,00	40,00%	20,08%		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Sarana Pertanian**	**100**	**%**	**12.260.418.988,00**	**100**	**%**	**4.835.590.374,00**	**100**	**%**	**1.250.466.700,00**	**0,12**	**153.920.000,00**	**12,31%**	**12,31%**	**100,12**	**4.989.510.374,00**	**100,00%**	**40,70%**		URUSAN PERTANIAN
		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	**Peningkatan produksi perkebunan**	**40**	**Dokumen**	**3.611.736.807,00**	**12**	**Dokumen**	**2.279.290.068,00**	**8**	**Dokumen**	**173.973.200,00**	**0,63**	**110.150.000,00**	**63,31%**	**63,31%**	**12,63**	**2.389.440.068,00**	**31,58%**	**66,16%**		
		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS,	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	20	Laporan	1.411.736.807,00	8	Laporan	304.781.000,00	4	Laporan	29.368.000,00	-	-	0,00%	0,00%	8,00	304.781.000,00	40,00%	21,59%		
		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	20	Laporan	2.200.000.000,00	4	Laporan	1.974.509.068,00	4	Laporan	144.605.200,00	0,76	110.150.000,00	76,17%	76,17%	4,76	2.084.659.068,00	23,81%	94,76%		
		PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME	**Jumlah Pelaksanaan Peningkatan SDG dan Pengembangan/ Pemeliharaan tanaman di KPT**	**5**	**Dokumen**	**1.993.747.500,00**	**2**	**Dokumen**	**379.425.100,00**	**1**	**Dokumen**	**157.001.000,00**	**0,05**	**6.270.000,00**	**5,00%**	**3,99%**	**2,05**	**385.695.100,00**	**41,00%**	**19,35%**		
		PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	5	Dokumen	1.993.747.500,00	2	Dokumen	379.425.100,00	1	Dokumen	157.001.000,00	0,05	6.270.000,00	5,00%	3,99%	2,05	385.695.100,00	41,00%	19,35%		
		PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA	**JUMLAH PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-	**12**	**Dokumen**	**137.886.200,00**	**12**	**Dokumen**	**112.550.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**12,00**	**137.886.200,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		PENGAWASAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK, BAHAN PAKAN/PAKAN/TANAMAN SKALA KECIL	Pengawasan Mutu Benih/bibit Ternak, Bahan Pakan / pakan / Tanaman Skala Kecil				12	Laporan	137.886.200,00	12	Laporan	112.550.000,00	-	-	0,00%	0,00%	12,00	137.886.200,00	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN	**Populasi Ternak**	**8.900**	**Ekor**	**3.875.307.640,00**	**2380**	**Ekor**	**1.627.555.806,00**	**1260**	**Ekor**	**358.535.860,00**	**0,10**	**29.100.000,00**	**10,00%**	**8,12%**	**2.380,10**	**1.656.655.806,00**	**26,74%**	**42,75%**		
		PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK	Jumlah Benih/ Bibit Ternak Yang Beredar	850	Ekor	2.154.876.000,00	280	Ekor	1.000.426.239,00	160	Ekor	178.767.760,00	0,10	15.600.000,00	10,00%	8,73%	280,10	1.016.026.239,00	32,95%	47,15%		
		PENGENDALIAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	Jumlah Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Tersedia	8050	Ekor	1.720.431.640,00	2100	Ekor	627.129.567,00	1100	Ekor	179.768.100,00	0,10	13.500.000,00	10,00%	7,51%	2.100,10	640.629.567,00	26,09%	37,24%		
		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU)	**Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Untuk Masyarakat**	**120**	**Ekor**	**2.779.627.041,00**	**40**	**Ekor**	**411.433.200,00**	**20**	**Ekor**	**448.406.640,00**	**0,05**	**8.400.000,00**	**5,00%**	**1,87%**	**40,05**	**419.833.200,00**	**33,38%**	**15,10%**		
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/ Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	120	Ekor	2.779.627.041,00	40	Ekor	411.433.200,00	20	Ekor	448.406.640,00	0,05	8.400.000,00	5,00%	1,87%	40,05	419.833.200,00	33,38%	15,10%		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian**	**100**	**%**	**12.754.108.015,00**	**100**	**%**	**3.022.936.013,00**	**100**	**%**	**745.088.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**3.022.936.013,00**	**100,00%**	**23,70%**		
		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persiapan dan Pengelolaan LP2B**	**10**	**Dokumen**	**3.750.000.000,00**			**-**			**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN /LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B, DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B	LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN /LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B, DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B YANG DIKELOLA	5	Dokumen	3.250.000.000,00							-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%		
		PENYUSUNAN PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN / LP2B	PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN / LP2B	5	Dokumen	500.000.000,00							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Jumlah luas pengembangan prasarana pertanian**	**150**	**Ha**	**300.000.000,00**			**-**			**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		PENGENDALIAN DN PEMANFAATAN KAWASAN PERTANIAN	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	150	Ha	300.000.000,00							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	**Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun dan Diadakan**	**139**	**Unit**	**8.704.108.015,00**	**34**	**Unit**	**3.022.936.013,00**	**22**	**Unit**	**745.088.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**34,00**	**3.022.936.013,00**	**24,46%**	**34,73%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	139	Unit	8.704.108.015,00	34	Unit	3.022.936.013,00	22	Unit	745.088.000,00	-	-	0,00%	0,00%	34,00	3.022.936.013,00	24,46%	34,73%		
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular**	**100**	**%**	**5.526.928.000,00**	**100**	**%**	**2.167.537.091,00**	**100**	**%**	**497.107.777,00**	**0,10**	**31.440.000,00**	**10,00%**	**6,32%**	**100,10**	**2.198.977.091,00**	**100,00%**	**39,79%**		
		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN	**Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis dan Non Zoonosis**	**60**	**Laporan**	**1.665.777.100,00**	**24**	**Laporan**	**470.672.841,00**	**12**	**Laporan**	**71.091.720,00**	**0,15**	**8.000.000,00**	**15,00%**	**11,25%**	**24,15**	**478.672.841,00**	**40,25%**	**28,74%**		
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	60	Laporan	1.665.777.100,00	24	Laporan	470.672.841,00	12	Laporan	71.091.720,00	0,15	8.000.000,00	15,00%	11,25%	24,15	478.672.841,00	40,25%	28,74%		
		PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Jumlah Tersedianya data peredaran ternak dan produk ternak**	**60**	**Laporan**	**1.400.837.800,00**	**24**	**Laporan**	**228.453.168,00**			**195.593.199,00**	**0,10**	**17.360.000,00**	**10,00%**	**8,88%**	**24,10**	**245.813.168,00**	**40,17%**	**17,55%**		
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPH)	Jumlah Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan dan / Atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	60	Laporan	1.400.837.800,00	24	Laporan	228.453.168,00	12	Laporan	195.593.199,00	0,10	17.360.000,00	10,00%	8,88%	24,10	245.813.168,00	40,17%	17,55%		
		PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MUDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner**	**60**	**Laporan**	**1.230.156.550,00**	**24**	**Laporan**	**1.032.376.844,00**	**12**	**Laporan**	**117.277.097,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**24,00**	**1.032.376.844,00**	**40,00%**	**83,92%**		
		PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	60	Laporan	1.230.156.550,00	24	Laporan	1.032.376.844,00	12	Laporan	117.277.097,00	-	-	0,00%	0,00%	24,00	1.032.376.844,00	40,00%	83,92%		
		PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan**	**60**	**Laporan**	**1.230.156.550,00**	**36**	**Laporan**	**436.034.238,00**	**24**	**Laporan**	**113.145.761,00**	**0,10**	**6.080.000,00**	**10,00%**	**5,37%**	**36,10**	**442.114.238,00**	**60,17%**	**35,94%**		
		PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	60	Laporan	1.230.156.550,00	24	Laporan	377.913.514,00	12	Laporan	100.477.386,00	0,10	6.080.000,00	10,00%	6,05%	24,10	383.993.514,00	40,17%	31,22%		
		PEMBINAAN PENERAPAN PERSYARATAN HIGIENE SANITASI PADA UNIT USAHA PRODUK HEWAN	JUMLAH PEMBINAAN PENERAPAN PERSYARATAN HIGIENE SANITASI PADA UNIT USAHA PRODUK HEWAN				12	Laporan	58.120.724,00	12	Laporan	12.668.375,00	-	-	0,00%	0,00%	12,00	58.120.724,00	0,00%	0,00%		
		PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEJAHTERAAN HEWAN	JUMLAH PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEJAHTERAAN HEWAN			-			-			-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		PENDAMPINGAN PENERAPAN UNIT KESEJAHTERAAN HEWAN	Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**	**100**	**%**	**4.300.461.230,00**	**100**	**%**	**1.430.861.540,00**	**100**	**%**	**386.368.440,00**	**0,15**	**51.200.000,00**	**15,00%**	**13,25%**	**100,15**	**1.482.061.540,00**	**100,00%**	**34,46%**		
		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	**Jumlah Tersedianya Tenaga Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun;**	**325**	**Ha**	**4.300.461.230,00**	**100**	**Ha**	**1.430.861.540,00**	**60**	**Ha**	**386.368.440,00**	**0,15**	**51.200.000,00**	**15,00%**	**13,25%**	100,15	**1.482.061.540,00**	**30,82%**	**34,46%**		
		PENCEGAHAN, PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN, DAN GANGGUAN USHAA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	325	Ha	4.300.461.230,00	100	Ha	1.430.861.540,00	60	Ha	386.368.440,00	0,15	51.200.000,00	15,00%	13,25%	100,15	1.482.061.540,00	30,82%	34,46%		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan**	**100**	**%**	**4.984.900.470,00**	**100**	**%**	**2.074.642.238,00**	**100**	**%**	**1.238.373.133,00**	**0,05**	**17.500.000,00**	**5,00%**	**1,41%**	**100,05**	**2.092.142.238,00**	**100,00%**	**41,97%**		
		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	**Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina**	**239**	**Unit**	**4.984.900.470,00**	**81**	**Unit**	**2.074.642.238,00**	**49**	**Unit**	**1.238.373.133,00**	**0,05**	**17.500.000,00**	**5,00%**	**1,41%**	**81,05**	**2.092.142.238,00**	**33,91%**	**41,97%**		
		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30	Unit	2.802.200.470,00	12	Unit	1.067.380.320,00	6	Unit	478.752.133,00	0,05	17.500.000,00	5,00%	3,66%	12,05	1.084.880.320,00	40,17%	38,72%		
		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	Unit	1.358.400.000,00	60	Unit	820.015.418,00	35	Unit	534.535.000,00	-	-	0,00%	0,00%	60,00	820.015.418,00	30,00%	60,37%		
		PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARAAN DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	9	Unit	824.300.000,00	2	Unit	135.221.000,00	1	Unit	71.728.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	135.221.000,00	22,22%	16,40%		
		PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK PETANI	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk				1	Unit	12.529.500,00	1	Unit	77.268.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	12.529.500,00	0,00%	0,00%		
		PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani Yang Terbentuk dan Beroperasi				6	Unit	39.496.000,00	6	Unit	76.090.000,00	-	-	0,00%	0,00%	6,00	39.496.000,00	0,00%	0,00%		
3.25.03		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Cakupan kelompok nelayan terbina**	**100**	**%**	**6.125.000.000,00**	**100**	**%**	**1.951.554.065,00**			**186.796.000,00**	**0,15**	**26.500.000,00**	**15,00%**	**14,19%**	**100,15**	**1.978.054.065,00**	**100,00%**	**32,29%**	**DINAS PERIKANAN**	URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan**	**Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah perairan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya**	**2**	**Dokumen**	**765.000.000,00**	**3**	**unit**	**437.000.300,00**			**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**3,00**	**437.000.300,00**	**100,00%**	**57,12%**		
3.25.03.2.01.0002		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3	Unit	520.000.000,00	2	unit	407.650.300,00				-	-	0,00%	0,00%	2,00	407.650.300,00	66,67%	78,39%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3	Unit	245.000.000,00	1	Unit	29.350.000,00				-	-	0,00%	0,00%	1,00	29.350.000,00	33,33%	11,98%		
	3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya**	**26**	**Kelompok**	**5.360.000.000,00**	**25**	**Kelompok**	**1.514.553.765,00**	**24**	**Kelompok**	**186.796.000,00**	**0,10**	**26.500.000,00**	**10,00%**	**14,19%**	**25,10**	**1.541.053.765,00**	**96,54%**	**28,75%**		
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	460	Orang	1.650.000.000,00	60	Orang	374.719.400,00			-	-	-	0,00%	0,00%	60,00	374.719.400,00	13,04%	22,71%		
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	26	Kelompok	2.260.000.000,00	25	Kelompok	456.324.265,00	24	Kelompok	186.796.000,00	0,17	26.500.000,00	16,67%	14,19%	25,17	482.824.265,00	96,80%	21,36%		
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan PenDanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	15	Unit Usaha	1.450.000.000,00	7	Unit Usaha	683.510.100,00			-	-	-	0,00%	0,00%	7,00	683.510.100,00	46,67%	47,14%		
	3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Cakupan kelompok aktif budidaya terbina**	**100**	**%**	**19.931.631.400,00**	**100**	**%**	**6.388.719.088,00**	**100**	**%**	**1.762.534.320,00**	**0,05**	**57.750.000,00**	**5,00%**	**3,28%**	**100,05**	**6.446.469.088,00**	**100,00%**	**32,34%**		
	3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya**	**43**	**Kelompok**	**6.752.000.000,00**	**20**	**Kelompok**	**2.079.733.950,00**	**20**	**Kelompok**	**325.216.620,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**20,00**	**2.079.733.950,00**	**46,51%**	**30,80%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	43	Kelompok	4.727.000.000,00	23	kelompok	1.459.531.800,00	8	Kelompok	282.605.000,00	-	-	0,00%	0,00%	23,00	1.459.531.800,00	53,49%	30,88%		
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	43	Kelompok	360.000.000,00	20	Kelompok	57.370.800,00				-	-	0,00%	0,00%	20,00	57.370.800,00	46,51%	15,94%		
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan PenDanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	21	Unit Usaha	635.000.000,00	16	Unit Usaha	500.500.000,00				-	-	0,00%	0,00%	16,00	500.500.000,00	76,19%	78,82%		
	3.25.03.2.02.0004	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	40	Kelompok	1.030.000.000,00	20	Kelompok	62.331.350,00	20	Kelompok	42.611.620,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	62.331.350,00	50,00%	6,05%		TUNDA BAYAR
	3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Dokumen/laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**5**	**Dokumen**	**13.179.631.400,00**	**4**	**Dokumen**	**4.308.985.138,00**	**1**	**Dokumen**	**1.437.317.700,00**	**0,05**	**57.750.000,00**	**5,00%**	**4,02%**	**4,05**	**4.366.735.138,00**	**81,00%**	**33,13%**		
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	3.961.731.400,00	1	Unit	2.789.341.868,00	1	Unit	718.165.400,00	0,05	29.400.000,00	5,00%	4,09%	1,05	2.818.741.868,00	100,00%	71,15%		
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Unit	2.151.000.000,00	1	unit	138.769.650,00				-	-	0,00%	0,00%	1,00	138.769.650,00	20,00%	6,45%		
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5	Dokumen	1.696.000.000,00	4	Dokumen	412.067.546,00	1	Dokumen	147.075.000,00	-	-	0,00%	0,00%	4,00	412.067.546,00	80,00%	24,30%		
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	400	Orang	1.610.000.000,00	500	Orang	309.327.600,00	250	Orang	169.847.000,00	0,20	26.500.000,00	20,00%	15,60%	500,20	335.827.600,00	100,00%	20,86%		
	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	4	Dokumen	3.760.900.000,00	3	Dokumen	659.478.474,00	1	Dokumen	402.230.300,00	0,01	1.850.000,00	1,00%	0,46%	3,01	661.328.474,00	75,25%	17,58%		
	3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**PERSENTASE WILAYAH SAMPEL AKI**	**100%**	**%**	**4.499.292.295,00**	**2**	**Dokumen**	**683.568.235,00**	**1**	**Dokumen**	**181.187.700,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**683.568.235,00**	**100,00%**	**15,19%**		
	3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**5**	**Dokumen**	**1.947.020.000,00**	**2**	**Dokumen**	**484.848.485,00**	**1**	**Dokumen**	**15.578.200,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**484.848.485,00**	**40,00%**	**24,90%**		
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5	Dokumen	1.947.020.000,00	2	Dokumen	484.848.485,00	1	Dokumen	15.578.200,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	484.848.485,00	40,00%	24,90%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah dokumen penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**Dokumen**	**2.552.272.295,00**	**0,28**	**Ton**	**198.719.750,00**	**0,15**	**Ton**	**165.609.500,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,28**	**198.719.750,00**	**5,60%**	**7,79%**		
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Ton	2.552.272.295,00	0,28	Ton	198.719.750,00	0,15	Ton	165.609.500,00	-	-	0,00%	0,00%	0,28	198.719.750,00	14,00%	7,79%		
JUMLAH PRIORITAS (I) PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN						**580.235.397.368,00**			**210.737.063.769,80**			**81.972.299.099,59**		**7.669.373.654,11**				**218.406.437.423,91**				
															RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**24,13%**	**9,36%**				
															PREDIKAT KINERJA		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**24,13%**	**9,36%**				
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				
2.	**PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU**																					
	01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**88**	**%**	**392.823.229.438,00**	**88**	**%**	**157.946.600.680,00**	**88**	**%**	**67.946.439.302,00**	**0,10**	**5.210.335.057,00**	**10,00%**	**7,67%**	**88,10**	**163.156.935.737,00**	**100,00%**	**41,53%**	**DINAS KESEHATAN**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**12**	**Sarana**	**138.279.951.620,00**	**12**	**Sarana**	**50.658.928.728,00**	**12**	**Sarana**	**15.626.924.313,00**	**0,15**	**1.999.898.457,00**	**15,00%**	**12,80%**	**12,15**	**52.658.827.185,00**	**100,00%**	**38,08%**		
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah pusat kesehatan masyarakat yang dibangun	5	unit	49.538.894.000,00	1	Unit	6.646.320.587,00	1	Unit	759.139.807,00	0,70	498.106.807,00	70,00%	65,61%	1,70	7.144.427.394,00	34,00%	14,42%		
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	17	unit	7.984.274.000,00	2	Unit	1.173.508.024,00	2	Unit	670.832.906,00	0,30	199.950.000,00	30,00%	29,81%	2,30	1.373.458.024,00	13,52%	17,20%		
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Kesehatan yang Di bangun	12	unit	4.800.000.000,00	2	Unit	9.978.900,00	2	Unit	237.888.600,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	9.978.900,00	16,67%	0,21%		
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	10	unit	6.350.217.550,00	4	Unit	1.667.341.000,00	4	Unit	254.856.000,00	0,80	199.950.000,00	80,00%	78,46%	4,80	1.867.291.000,00	48,00%	29,41%		
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	504	unit	17.361.000.000,00	83	Unit	3.315.560.900,00	83	Unit	1.065.818.500,00	0,30	308.350.000,00	30,00%	28,93%	83,30	3.623.910.900,00	16,53%	20,87%		
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	10	unit	9.088.926.783,00	5	Unit	3.601.298.783,00	5	Unit	34.981.650,00	1,00	34.981.650,00	100,00%	100,00%	6,00	3.636.280.433,00	60,00%	40,01%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	47 unit	11.897.308.870,00	21 Unit	4.233.629.870,00	21 Unit	479.634.000,00	0,45	199.900.000,00	45,00%	41,68%	21,45	4.433.529.870,00	45,64%	37,26%		
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga kesehatan	Jumlah sarana dan prasaranaRumah Dinas Tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	10 unit	1.710.000.000,00	1 Unit	189.935.000,00	1 Unit	9.965.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	189.935.000,00	10,00%	11,11%		
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	557 unit	10.657.798.232,00	114 Unit	7.200.532.497,00	114 Unit	2.797.632.400,00	0,20	499.750.000,00	20,00%	17,86%	114,20	7.700.282.497,00	20,50%	72,25%		
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan alat uji dan Kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintainance center	290 unit	547.515.000,00	285 Unit	181.261.000,00	285 Unit	136.606.000,00	0,45	58.910.000,00	45,00%	43,12%	285,45	240.171.000,00	98,43%	43,87%		
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	10 unit	979.000.000,00	36 Unit	372.114.652,00	36 Unit	118.182.000,00	-	-	0,00%	0,00%	36,00	372.114.652,00	100,00%	38,01%		
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, bahan habis pakai, Bahan medis habis Pakai, Vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	4 paket	17.284.792.185,00	4 paket	21.817.832.015,00	4 paket	8.989.654.450,00	-	-	0,00%	0,00%	4,00	21.817.832.015,00	100,00%	100,00%		
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	Jumlah Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	10 paket	80.225.000,00	10 Paket	249.615.500,00	10 Paket	71.733.000,00	-	-	0,00%	0,00%	10,00	249.615.500,00	100,00%	100,00%		
	1.02.02.2.02	**Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10 Puskesmas**	**227.885.185.611,00**	**10 Puskesmas**	**86.884.001.464**	**10 Puskesmas**	**51.011.312.072,00**	**0,10**	**3.137.603.600,00**	**10,00%**	**6,15%**	**10,10**	**90.021.605.064,00**	**100,00%**	**39,50%**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.773 orang	1.816.053.900,00	9938 org	443.088.020,00	9.938 org	92.670.000,00	-	-	0,00%	0,00%	9.938,00	443.088.020,00	100,00%	24,40%		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalain yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.329 orang	1.538.704.444,00	9938 org	368.178.916,00	9.938 org	120.788.000,00	-	-	0,00%	0,00%	9.938,00	368.178.916,00	100,00%	23,93%		
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.885	1.101.682.682,00	9537 or	337.994.480,00	9.537 or	79.464.000,00	-	-	0,00%	0,00%	9.537,00	337.994.480,00	100,00%	30,68%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36.905	1.484.611.300,00	25998 org	530.688.300,00	25.998 org	70.777.800,00	-	-	0,00%	0,00%	25.998,00	530.688.300,00	70,45%	35,75%		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	62.192	1.323.267.400,00	62722 org	167.291.800,00	62.722 org	68.866.000,00	-	-	0,00%	0,00%	62.722,00	167.291.800,00	100,00%	12,64%		
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	213.297	1.124.872.550,00	221241 org	201.974.880,00	221.241 org	244.980.000,00	-	-	0,00%	0,00%	221.241,00	201.974.880,00	100,00%	17,96%		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15.650	723.389.000,00	24179 org	257.706.300,00	24.179 org	25.500.050,00	-	-	0,00%	0,00%	24.179,00	257.706.300,00	100,00%	35,62%		
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73.949	689.993.500,00	79271 org	125.862.600,00	79.271 org	66.438.000,00	-	-	0,00%	0,00%	79.271,00	125.862.600,00	100,00%	18,24%		
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73.949	1.121.725.900,00	4172 org	889.819.721,00	4.172 org	65.907.115,00	-	-	0,00%	0,00%	4.172,00	889.819.721,00	5,64%	79,33%		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	3.892	592.776.500,00	529 org	154.024.300,00	529 org	52.842.000,00	-	-	0,00%	0,00%	529,00	154.024.300,00	13,59%	25,98%		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	544	1.631.250.700,00	6471 org	543.385.528,00	6.471 org	1.117.085.750,00	-	-	0,00%	0,00%	6.471,00	543.385.528,00	100,00%	33,31%		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	8.014	2.200.317.500,00	13070 org	909.012.660,00	13.070 org	301.732.600,00	-	-	0,00%	0,00%	13.070,00	909.012.660,00	100,00%	41,31%		
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	9.413	10.776.002.708,00	1 Dokumen	8.592.416.503,00	1 Dokumen	295.903.582,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	8.592.416.503,00	0,01%	79,74%		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 dokumen	9.359.276.746,00	1 Dokumen	2.816.107.856,00	1 Dokumen	2.280.445.800,00	0,25	570.078.000,00	25,00%	25,00%	1,25	3.386.185.856,00	100,00%	36,18%		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				47.202.000,00	1 Dokumen	24.216.800,00	-	-	0,00%	0,00%	-	47.202.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4 dokumen	3.346.453.600,00	4 Dokumen	1.901.728.105,00	5 Dokumen	151.104.900,00	-	-	0,00%	0,00%	4,00	1.901.728.105,00	100,00%	56,83%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 dokumen	1.754.034.006,00	1 Dokumen	770.306.676,00	1 Dokumen	221.782.200,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	770.306.676,00	100,00%	43,92%		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 dokumen	3.534.874.180,00	1 Dokumen	1.121.378.949,00	1 Dokumen	282.826.149,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	1.121.378.949,00	100,00%	31,72%		
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 orang	32.600.000,00	12 orang	54.506.000,00			-	-	0,00%	0,00%	12,00	54.506.000,00	100,00%	100,00%		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 dokumen	5.250.913.500,00	1 Dokumen	1.965.713.666,00	1 Dokumen	624.130.750,00	0,55	341.665.500,00	55,00%	54,74%	1,55	2.307.379.166,00	100,00%	43,94%		
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 dokumen	167.823.854.336,00	1 Dokumen	63.275.570.247,00	1 Dokumen	43.816.257.095,00	0,10	2.143.869.600,00	10,00%	4,89%	1,10	65.419.439.847,00	100,00%	38,98%		
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 paket	13.900.000,00	1 paket	4.568.000,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	4.568.000,00	100,00%	32,86%		
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1 dokumen	119.999.704,00	1 dokumen	44.673.300,00	1 Dokumen	22.441.361,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	44.673.300,00	100,00%	37,23%		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen	1.500.000,00	1488 org	6.700.000,00	1 Dokumen	80.767.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.488,00	6.700.000,00	100,00%	100,00%		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	6.325.000,00	1 laporan	8.550.000,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	8.550.000,00	100,00%	100,00%		
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah Public safety center (PSC119) tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	1 unit	9.725.300.900,00	1 Unit	1.076.778.589,00	1 Unit	646.628.920,00	0,15	81.990.500,00	15,00%	12,68%	1,15	1.158.769.089,00	100,00%	11,91%		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1481 orang	485.855.555,00	1488 org	68.603.988,00	1488 org	100.105.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.488,00	68.603.988,00	100,00%	14,12%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	560 orang	160.000.000,00	609 org	41.575.000,00	609 org	31.971.200,00	-	-	0,00%	0,00%	609,00	41.575.000,00	100,00%	25,98%		
	1.02.02.2.02.0042	Pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan malaria	2 orang	144.900.000,00	2 org	107.335.080,00	2 org	12.650.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	107.335.080,00	100,00%	74,08%		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 dokumen	750.000,00	1 dokumen	51.260.000,00	1 dokumen	113.030.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	51.260.000,00	100,00%	100,00%		
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi**	**13 Sarana**	**1.782.704.658,00**	**13 Sarana**	**500.204.915,00**	**13 Sarana**	**97.350.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**13,00**	**500.204.915,00**	**100,00%**	**28,06%**		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	8 dokumen	1.782.704.658,00	8 Dokumen	500.204.915,00	8 Dokumen	97.350.000,00	-	-	0,00%	0,00%	8,00	500.204.915,00	100,00%	28,06%		
	1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan**	**103 Sarana**	**24.875.387.549,00**	**103 Sarana**	**19.903.465.573,00**	**103 Sarana**	**1.210.852.917,00**	**0,10**	**72.833.000,00**	**10,00%**	**6,02%**	**103,10**	**19.976.298.573,00**	**100,00%**	**80,31%**		
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan tindaklanjuti perizinannya	18 unit	270.829.000,00	18 Unit	92.620.000,00	20 Unit	53.142.000,00	-	-	0,00%	0,00%	18,00	92.620.000,00	100,00%	34,20%		
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	75 unit	526.248.623,00	75 Unit	239.818.800,00	107 Unit	30.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	75,00	239.818.800,00	100,00%	45,57%		
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan	11 unit	23.210.559.926,00	11 Unit	19.260.742.773,00	11 Unit	985.652.717,00	-	-	0,00%	0,00%	11,00	19.260.742.773,00	100,00%	82,98%		
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	2 dokumen	867.750.000,00	2 Dokumen	310.284.000,00	2 Dokumen	142.058.200,00	0,55	72.833.000,00	55,00%	51,27%	2,55	383.117.000,00	100,00%	44,15%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	01.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar**	**85 %**	**27.548.655.700,00**		**5.269.658.743,00**		**3.027.798.799,00**	**0,20**	**547.500.000,00**	**20,00%**	**18,08%**	**0,20**	**5.817.158.743,00**	**0,24%**	**21,12%**		
	1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan**	**140 tempat**	**404.500.000,00**	**140 tempat**	**118.682.400,00**	**140 tempat**	**35.850.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**140,00**	**118.682.400,00**	**100,00%**	**29,34%**		
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktek tenaga kesehatan	1 dokumen	404.500.000,00	1 Dokumen	118.682.400,00	1 Dokumen	35.850.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	118.682.400,00	100,00%	29,34%		
	1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK**	**10 Puskesmas**	**26.493.254.900,00**	**10 Puskesmas**	**3.964.183.750,00**	**10 Puskesmas**	**2.503.961.799,00**	**0,23**	**547.500.000,00**	**23,00%**	**21,87%**	**10,23**	**4.511.683.750,00**	**100,00%**	**17,03%**		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	325 orang	25.038.826.500,00	125 org	3.608.000.000,00	125 org	2.342.900.000,00	0,23	547.500.000,00	23,37%	23,37%	125,23	4.155.500.000,00	38,53%	16,60%		
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	2 dokumen	1.454.428.400,00	2 Dokumen	356.183.750,00	2 Dokumen	161.061.799,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	356.183.750,00	100,00%	24,49%		
	1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Jumlah kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**	**24 kegiatan**	**650.900.800,00**	**24 kegiatan**	**1.186.792.593,00**	**5 kegiatan**	**487.987.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**24,00**	**1.186.792.593,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	1.02.03.2.02.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	850 orang	650.900.800,00	150 Orang	1.186.792.593,00	150 Orang	487.987.000,00	-	-	0,00%	0,00%	150,00	1.186.792.593,00	17,65%	100,00%		
	01.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan**	**85 %**	**6.880.671.873,00**	**85 %**	**2.645.669.016,00**	**85 %**	**572.050.500,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**85,00**	**2.645.669.016,00**	**100,00%**	**38,45%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan**	**118 Sarana**	**1.552.225.000,00**	**118 Sarana**	**455.900.900,00**	**118 Sarana**	**37.867.500,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**118,00**	**455.900.900,00**	**100,00%**	**29,37%**		
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	3 dokumen	1.552.225.000,00	3 dokumen	455.900.900,00	3 Dokumen	37.867.500,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	455.900.900,00	100,00%	29,37%		
	1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan**	**250 Sarana**	**1.194.890.315,00**	**250 Sarana**	**646.442.826,00**	**250 Sarana**	**192.259.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**250,00**	**646.442.826,00**	**100,00%**	**54,10%**		
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dokumen	1.194.890.315,00	1 dokumen	646.442.826,00	1 Dokumen	192.259.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	646.442.826,00	100,00%	54,10%		
	1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M**	**4 dokumen**	**1.818.606.234,00**	**4 dokumen**	**548.415.315,00**	**4 dokumen**	**90.359.200,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**4,00**	**548.415.315,00**	**100,00%**	**30,16%**		
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4 dokumen	1.818.606.234,00	4 dokumen	548.415.315,00	4 Dokumen	90.359.200,00	-	-	0,00%	0,00%	4,00	548.415.315,00	100,00%	30,16%		
	1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**jumlah dokumen pelaksanaan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**1 dokumen**	**743.553.824,00**	**1 dokumen**	**346.052.475,00**	**1 dokumen**	**77.144.800,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**346.052.475,00**	**100,00%**	**46,54%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 dokumen	743.553.824,00	1 dokumen	346.052.475,00	1 Dokumen	77.144.800,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	346.052.475,00	100,00%	46,54%		
	1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**jumlah dokumen pelaksanaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**1 dokumen**	**1.571.396.500,00**	**1 dokumen**	**648.857.500,00**	**1 dokumen**	**174.420.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**648.857.500,00**	**100,00%**	**41,29%**		
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	30 unit	1.571.396.500,00	30 unit	648.857.500,00	30 Unit	174.420.000,00	-	-	0,00%	0,00%	30,00	648.857.500,00	100,00%	41,29%		
	01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Rasio posyandu per 1000 balita**	**4,68 1000balita**	**7.279.116.700,00**	**4,68 1000balita**	**4.151.485.672,00**	**4,68 1000balita**	**695.686.700,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4,68**	**4.151.485.672,00**	**100,00%**	**57,03%**		
	1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelurahan siaga aktif**	**36 kelurahan**	**3.791.839.500,00**	**36 kelurahan**	**2.988.061.000,00**	**36 kelurahan**	**243.758.800,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**36,00**	**2.988.061.000,00**	**100,00%**	**78,80%**		
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	6 dokumen	3.791.839.500,00	6 dokumen	2.988.061.000,00	6 Dokumen	243.758.800,00	-	-	0,00%	0,00%	6,00	2.988.061.000,00	100,00%	78,80%		
	1.02.05.2.02	**Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota**	**jumlah rumah tangga yang melaksanakan PHBS**	**42579 rumah tangga**	**1.194.998.400,00**	**38262 rumah tangga**	**224.784.210,00**	**38262 rumah tangga**	**169.660.200,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**38.262,00**	**224.784.210,00**	**89,86%**	**18,81%**		
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat	42579 RT	1.194.998.400,00	38262 keluarga	224.784.210,00	38262 keluarga	169.660.200,00	-	-	0,00%	0,00%	38.262,00	224.784.210,00	89,86%	18,81%		
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**	**197 posyandu**	**2.292.278.800,00**	**201 posyandu**	**938.640.462**	**202 posyandu**	**282.267.700,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**201,00**	**938.640.462,00**	**100,00%**	**40,95%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	197 posyandu	2.292.278.800,00	3 Dokumen	938.640.462,00	3 Dokumen	282.267.700,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	938.640.462,00	1,52%	40,95%		
	01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uapaya Kesehatan Masyarakat**	**86 %**	**-**		**439.822.338,00**		**418.337.950,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**439.822.338,00**	**0,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02	**Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10 Puskesmas**	**-**	**10 Puskesmas**	**438.022.338**	**10 Puskesmas**	**418.337.950,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00**	**438.022.338,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			455 orang	9.240.000,00	619 orang	37.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	455,00	9.240.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2873 orang	16.500.000,00	4123	11.550.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2.873,00	16.500.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					28943 orang	13.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					35 orang	15.029.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			333 orang	2.400.000,00	330 orang	600.000,00	-	-	0,00%	0,00%	333,00	2.400.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 dokumen	114.181.500,00	1 dokumen	103.260.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	114.181.500,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 dokumen	1.050.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 dokumen	6.375.000,00	1 dokumen	5.250.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	6.375.000,00	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 dokumen	6.510.000,00	1 dokumen	7.153.950,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	6.510.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					13111 orang	6.900.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 dokumen	123.900.000,00	1 dokumen	34.575.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	123.900.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 dokumen	87.665.838,00	1 dokumen	144.770.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	87.665.838,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 dokumen		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 orang		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Sarana	-	1 dokumen	1.800.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	1.800.000,00	100,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 dokumen	69.450.000,00	1 dokumen	5.550.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	69.450.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah orang yang dapat dilayani dengan imunisasi					1 dokumen	28.350.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Rasio posyandu per 1000 balita**	**4,68 1000balita**	**-**	**4,68 1000balita**	**4.050.000,00**	**4,68 1000balita**	**190.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4,68**	**4.050.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**	**197 posyandu**	**-**	**201 posyandu**	**4.050.000**	**202 posyandu**	**190.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**201,00**	**4.050.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 dokumen	4.050.000,00	1 dokumen	190.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	4.050.000,00	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uapaya Kesehatan Masyarakat**	**86 %**	-		**677.600.029,00**		**711.363.750,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	**677.600.029,00**	**0,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02	**Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10 Puskesmas**	-	**10 Puskesmas**	**677.600.029**	**10 Puskesmas**	**711.363.750,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**10,00**	**677.600.029,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1002 orang	22.100.000,00	962 orang	42.900.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.002,00	22.100.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4709 orang	28.500.000,00	6763 orang	27.200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	4.709,00	28.500.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4462 orang	37.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					88 orang	8.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1125 orang	20.000.000,00	995 orang	15.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.125,00	20.000.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 dokumen	125.531.000,00	1 dokumen	209.890.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	125.531.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 dokumen	4.250.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen	14.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	25.000.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 dokumen	37.200.000,00	1 dokumen	32.773.750,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	37.200.000,00	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					26439 orang	4.400.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 dokumen	146.850.000,00	1 dokumen	66.050.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	146.850.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 dokumen	148.294.029,00	1 dokumen	170.550.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	148.294.029,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 dokumen	10.275.000,00	1 dokumen	11.550.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	10.275.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 orang	500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 dokumen	19.950.000,00	1 dokumen	7.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	19.950.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 dokumen	93.900.000,00	1 dokumen	2.400.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	93.900.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah orang yang dapat dilayani dengan imunisasi	1 Sarana	-		-	2386 orang	55.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Rasio posyandu per 1000 balita**	**4,68 1000balita**	**-**	**4,68 1000balita**	**17.325.000,00**	**4,68 1000balita**	**7.390.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4,68**	**17.325.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**	**197 posyandu**	**-**	**201 posyandu**	**17.325.000**	**202 posyandu**	**7.390.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**201,00**	**17.325.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 dokumen	17.325.000,00	1 dokumen	7.390.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	17.325.000,00	0,00%	0,00%		
	01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uapaya Kesehatan Masyarakat**	**86 %**	**-**	**86 %**	**490.419.025,00**	**86 %**	**474.684.650,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**86,00**	**490.419.025,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02	**Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10 Puskesmas**	**-**	**10 Puskesmas**	**449.559.025**	**10 Puskesmas**	**474.684.650,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00**	**449.559.025,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			587 orang	3.200.000,00	555 orang	7.400.000,00	-	-	0,00%	0,00%	587,00	3.200.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3509 orang	6.500.000,00	3505 orang	18.200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3.509,00	6.500.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2141 orang	7.400.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					45 orang	15.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			811 orang	8.100.000,00	588 orang	8.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	811,00	8.100.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 dokumen	171.331.801,00	1 dokumen	194.552.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	171.331.801,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 dokumen	950.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	15.000.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 dokumen	9.500.000,00	1 dokumen	18.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	9.500.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					13580 orang	1.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 dokumen	76.300.000,00	1 dokumen	50.520.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	76.300.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 dokumen	94.267.224,00	1 dokumen	107.162.650,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	94.267.224,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 dokumen		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 orang		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 dokumen	24.500.000,00	1 dokumen	7.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	24.500.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Sarana	-	1 dokumen	40.860.000,00	1 dokumen	700.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	40.860.000,00	100,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah orang yang dapat dilayani dengan imunisasi					2071 orang	20.600.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Rasio posyandu per 1000 balita**	**4,68 1000balita**	**-**	**4,68 1000balita**	**3.300.000,00**	**4,68 1000balita**	**2.987.350,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4,68**	**3.300.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**	**197 posyandu**	**-**	**201 posyandu**	**3.300.000**	**202 posyandu**	**2.987.350,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**201,00**	**3.300.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 dokumen	3.300.000,00	1 dokumen	2.987.350,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	3.300.000,00	0,00%	0,00%		
	01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uapaya Kesehatan Masyarakat**	**86 %**	**-**	**86 %**	**426.932.275,00**	**86 %**	**451.238.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**86,00**	**426.932.275,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02	**Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10 Puskesmas**	**-**	**10 Puskesmas**	**426.932.275**	**10 Puskesmas**	**451.238.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00**	**426.932.275,00**	**100,00%**	**0,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			741 orang	2.530.000,00	781 orang	23.400.000,00	-	-	0,00%	0,00%	741,00	2.530.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4842 orang	13.250.000,00	5219 orang	16.200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	4.842,00	13.250.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1643 orang	21.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					51 orang	7.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			520 orang	4.000.000,00	430 orang	4.600.000,00	-	-	0,00%	0,00%	520,00	4.000.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 dokumen	153.957.275,00	1 dokumen	144.732.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	153.957.275,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 dokumen	1.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10.000.000,00	1 dokumen	10.700.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	10.000.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 dokumen	11.500.000,00	1 dokumen	21.665.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	11.500.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					17167 orang	3.400.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 dokumen	96.400.000,00	1 dokumen	15.200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	96.400.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 dokumen	80.250.000,00	1 dokumen	115.141.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	80.250.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 dokumen	4.600.000,00	1 dokumen	5.700.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	4.600.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 orang	900.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 dokumen	2.150.000,00	1 dokumen	4.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	2.150.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 dokumen	48.295.000,00	1 dokumen	4.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	48.295.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah orang yang dapat dilayani dengan imunisasi	1 Sarana	-		-	2803 orang	50.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Rasio posyandu per 1000 balita**	**4,68 1000balita**	**-**	**4,68 1000balita**	**7.350.000,00**	**4,68 1000balita**	**5.940.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4,68**	**7.350.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**	**197 posyandu**	**-**	**201 posyandu**	**7.350.000**	**202 posyandu**	**5.940.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**201,00**	**7.350.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 dokumen	7.350.000,00	1 dokumen	5.940.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	7.350.000,00	0,00%	0,00%		
	01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uapaya Kesehatan Masyarakat**	**86 %**	**-**	**86 %**	**750.283.006,00**	**86 %**	**832.237.800,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**86,00**	**750.283.006,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02	**Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10 Puskesmas**	**-**	**10 Puskesmas**	**663.133.006**	**10 Puskesmas**	**832.237.800,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00**	**663.133.006,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1243 orang	18.000.000,00	1472 orang	108.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.243,00	18.000.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			8182 orang	18.750.000,00	9807 orang	82.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	8.182,00	18.750.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3629 orang	9.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					76 orang	16.200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1088 orang	6.150.000,00	572 orang	10.950.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.088,00	6.150.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 dokumen	225.791.252,00	1 dokumen	249.210.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	225.791.252,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 dokumen	3.450.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 dokumen	15.750.000,00	1 dokumen	11.250.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	15.750.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 dokumen	22.020.000,00	1 dokumen	32.017.500,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	22.020.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					31872 orang	4.050.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 dokumen	121.800.000,00	1 dokumen	19.930.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	121.800.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 dokumen	128.071.754,00	1 dokumen	163.935.500,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	128.071.754,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 dokumen		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 orang	319.800,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 dokumen	19.650.000,00	1 dokumen	17.100.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	19.650.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Sarana	-	1 dokumen	87.150.000,00	1 dokumen	5.400.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	87.150.000,00	100,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah orang yang dapat dilayani dengan imunisasi					5553 orang	98.625.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Rasio posyandu per 1000 balita	**4,68 1000balita**	-	**4,68 1000balita**	**0,00**	**4,68 1000balita**	**9.495.500,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**4,68**	-	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah posyandu mandiri	**197 posyandu**	-	**201 posyandu**	-	**202 posyandu**	**9.495.500,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**201,00**	-	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 dokumen	9.495.500,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uapaya Kesehatan Masyarakat**	**86 %**	-	**86 %**	**588.327.552,00**	**86 %**	**687.183.500,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**86,00**	**588.327.552,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02	**Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10 Puskesmas**	-	**10 Puskesmas**	**588.327.552,00**	**10 Puskesmas**	**687.183.500,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**10,00**	**588.327.552,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1113 orang	4.260.000,00	1101 orang	7.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.113,00	4.260.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			6750 orang	19.750.000,00	6740 orang	30.600.000,00	-	-	0,00%	0,00%	6.750,00	19.750.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3887 orang	9.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					70 orang	9.300.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1463 orang	6.300.000,00	869 orang	9.700.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.463,00	6.300.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 dokumen	151.061.475,00	1 dokumen	311.160.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	151.061.475,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 dokumen	6.050.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 dokumen	17.500.000,00	1 dokumen	17.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	17.500.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 dokumen	22.500.000,00	1 dokumen	28.329.500,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	22.500.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					25642 orang	1.900.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 dokumen	139.950.000,00	1 dokumen	59.200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	139.950.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 dokumen	116.146.077,00	1 dokumen	139.327.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	116.146.077,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 dokumen	6.000.000,00	1 dokumen	4.817.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	6.000.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 orang	150.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 dokumen	26.400.000,00	1 dokumen	5.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	26.400.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 dokumen	78.460.000,00	1 dokumen	900.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	78.460.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah orang yang dapat dilayani dengan imunisasi	1 Sarana	-		-	3946 orang	45.650.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Rasio posyandu per 1000 balita**	**4,68 1000balita**	**-**	**4,68 1000balita**	**7.975.000,00**	**4,68 1000balita**	**2.915.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4,68**	**7.975.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**	**197 posyandu**	**-**	**197 posyandu**	**7.975.000**	**197 posyandu**	**2.915.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**197,00**	**7.975.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 dokumen	7.975.000,00	1 dokumen	2.915.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	7.975.000,00	0,00%	0,00%		
	01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uapaya Kesehatan Masyarakat**	**86 %**	**-**	**86 %**	**495.878.193,00**	**86 %**	**476.384.500,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**86,00**	**495.878.193,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02	**Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10 Puskesmas**	**-**	**10 Puskesmas**	**449.378.193,00**	**10 Puskesmas**	**476.384.500,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00**	**449.378.193,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			382 orang	6.600.000,00	502 orang	18.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	382,00	6.600.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			6750 orang	17.250.000,00	3010 orang	24.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	6.750,00	17.250.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1616 orang	6.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					30 orang	15.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			425 orang	4.350.000,00	378 orang	6.900.000,00	-	-	0,00%	0,00%	425,00	4.350.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 dokumen	132.791.355,00	1 dokumen	161.022.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	132.791.355,00	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 dokumen	3.600.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 dokumen	12.000.000,00	1 dokumen	13.950.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	12.000.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 dokumen	32.350.000,00	1 dokumen	14.302.500,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	32.350.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					11132 orang	8.400.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 dokumen	97.950.000,00	1 dokumen	26.130.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	97.950.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 dokumen	84.286.838,00	1 dokumen	125.380.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	84.286.838,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 dokumen		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 orang		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 dokumen	15.300.000,00	1 dokumen	18.600.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	15.300.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Sarana	-	1 dokumen	46.500.000,00	1 dokumen	4.200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	46.500.000,00	100,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah orang yang dapat dilayani dengan imunisasi					1728 orang	30.900.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Rasio posyandu per 1000 balita**		-		**0,00**	**1 dokumen**	**9.160.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**		-		**0,00**	**1 dokumen**	**9.160.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 dokumen	9.160.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uapaya Kesehatan Masyarakat**	**86 %**	-	**86 %**	**415.001.000,00**	**86 %**	**511.932.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**86,00**	**415.001.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02	**Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10 Puskesmas**	-	**10 Puskesmas**	**415.001.000,00**	**10 Puskesmas**	**511.932.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**10,00**	**415.001.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			816 orang	2.600.000,00	781 orang	10.450.000,00	-	-	0,00%	0,00%	816,00	2.600.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4412 orang	10.500.000,00	4811 orang	14.150.000,00	-	-	0,00%	0,00%	4.412,00	10.500.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2017 orang	18.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					47 orang	7.200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			383 orang	8.200.000,00	389 orang	8.200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	383,00	8.200.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 dokumen	137.109.000,00	1 dokumen	187.620.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	137.109.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 dokumen	1.300.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 dokumen	11.900.000,00	1 dokumen	8.400.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	11.900.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 dokumen	34.550.000,00	1 dokumen	63.319.250,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	34.550.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					16890 orang	6.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 dokumen	65.050.000,00	1 dokumen	30.472.250,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	65.050.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 dokumen	74.867.000,00	1 dokumen	117.540.500,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	74.867.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 dokumen	1.650.000,00	1 dokumen	5.580.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	1.650.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 orang	100.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 dokumen	7.200.000,00	1 dokumen	9.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	7.200.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 dokumen	61.375.000,00	1 dokumen	4.200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	61.375.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah orang yang dapat dilayani dengan imunisasi	1 Sarana	-		-	2818 orang	20.400.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Rasio posyandu per 1000 balita**	**4,68 1000balita**	-	**4,68 1000balita**	**6.200.000,00**	**4,68 1000balita**	**3.046.500,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4,68**	**6.200.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**	**197 posyandu**	-	**197 posyandu**	**6.200.000**	**197 posyandu**	**3.046.500,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**197,00**	**6.200.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 dokumen	6.200.000,00	1 dokumen	3.046.500,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	6.200.000,00	0,00%	0,00%		
	01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uapaya Kesehatan Masyarakat**	**86 %**	-	**86 %**	**635.266.447,00**	**86 %**	**660.035.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**86,00**	**635.266.447,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02	**Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10 Puskesmas**	-	**10 Puskesmas**	**635.266.447,00**	**10 Puskesmas**	**660.035.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**10,00**	**635.266.447,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1833 orang	13.000.000,00	1968 orang	39.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.833,00	13.000.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			12996 orang	17.500.000,00	13566 orang	24.700.000,00	-	-	0,00%	0,00%	12.996,00	17.500.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					6269 orang	36.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					125 orang	21.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1473 orang	8.300.000,00	1500 orang	5.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.473,00	8.300.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 dokumen	214.588.000,00	1 dokumen	140.560.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	214.588.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 dokumen	300.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 dokumen	21.900.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	21.900.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 dokumen	21.525.000,00	1 dokumen	57.725.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	21.525.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0021□	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					48478 orang	7.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 dokumen	172.500.000,00	1 dokumen	74.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	172.500.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 dokumen	101.593.447,00	1 dokumen	167.690.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	101.593.447,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 dokumen	4.360.000,00	1 dokumen	6.810.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	4.360.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 dokumen	22.900.000,00	1 dokumen	5.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	22.900.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 dokumen	37.100.000,00	1 dokumen	2.700.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	37.100.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah orang yang dapat dilayani dengan imunisasi	1 Sarana	-		0,00	7291 orang	60.450.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Rasio posyandu per 1000 balita**		-	**4,68 1000 balita**	**0,00**	**4,68 1000 balita**	**7.650.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**4,68**	-	**0,00%**	**0,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**		-	**201 posyandu**	**0,00**	**202 posyandu**	**7.650.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**201,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 dokumen	7.650.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uapaya Kesehatan Masyarakat**	**86 %**	-	**86 %**	**569.716.083,00**	**86 %**	**582.941.500,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**86,00**	**569.716.083,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02	**Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**10 Puskesmas**	-	**10 Puskesmas**	**507.736.083,00**	**10 Puskesmas**	**582.941.500,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**10,00**	**507.736.083,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			726 orang	12.960.000,00	868 orang	34.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	726,00	12.960.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1481 orang	12.750.000,00	5989 orang	13.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.481,00	12.750.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2132 orang	19.200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					46 orang	9.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1 dokumen	18.900.000,00	407 orang	6.450.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	18.900.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 dokumen	192.216.000,00	1 dokumen	221.785.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	192.216.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 dokumen	3.750.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 dokumen	16.050.000,00	1 dokumen	10.950.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	16.050.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 dokumen	8.850.000,00	1 dokumen	21.295.500,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	8.850.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					19496 orang	7.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 dokumen	79.350.000,00	1 dokumen	32.580.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	79.350.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 dokumen	101.380.083,00	1 dokumen	149.856.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	101.380.083,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 orang	225.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 dokumen	3.300.000,00	1 dokumen	10.050.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	3.300.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Sarana	-	1 dokumen	61.980.000,00	1 dokumen	3.900.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	61.980.000,00	100,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah orang yang dapat dilayani dengan imunisasi					3260 orang	37.800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Rasio posyandu per 1000 balita**	**4,68 1000 balita**	**-**	**4,68 1000balita**	**750.000,00**	**4,68 1000balita**	**9.291.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4,68**	**750.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**	**197 posyandu**	**-**	**201 posyandu**	**750.000**	**202 posyandu**	**9.291.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**201,00**	**750.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-	1 dokumen	750.000,00	1 dokumen	9.291.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	750.000,00	0,00%	0,00%		
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase dukungan untuk pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**	**93 %**	**93.731.571.585,00**	**93 %**	**159.334.825.759,27**	**93 %**	**49.657.788.662,00**	**0,34**	**16.893.801.655,00**	**34,02%**	**34,02%**	**93,34**	**176.228.627.414**	**100,00%**	**100,00%**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.2.01	**Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kab/Kota**	**Jumlah Unit Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia**	**202 Unit**	**89.995.021.585,00**	**802 Unit**	**143.200.364.647,27**	**229 Unit**	**46.817.581.576,00**	**0,36**	**16.835.345.155,00**	**36,00%**	**35,96%**	**802,36**	**160.035.709.802**	**100,00%**	**100,00%**		
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	39.500.000.000,00	10 Unit	15.854.914.270,13	1 Unit	931.398.775,00	1,00	931.398.775,00	100,00%	100,00%	11,00	16.786.313.045	100,00%	42,50%		
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	269.921.585,00					0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	133.100.000,00					0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4 Unit	3.400.000.000,00	18 Unit	6.473.382.439,64	8 Unit	3.706.241.978,00	0,38	1.621.341.978,00	43,75%	43,75%	18,38	8.094.724.418	100,00%	100,00%		
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	242.000.000,00					0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	110 Unit	25.000.000.000,00	727 Unit	71.746.202.576,00	110 Unit	17.856.500.000,00	0,55	9.796.500.000,00	55,00%	54,86%	727,55	81.542.702.576	100,00%	100,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	24 Unit	750.000.000,00	20 Unit	150.000.000,00	50 Unit	500.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	20,00	150.000.000	83,33%	20,00%		
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	60 Unit	700.000.000,00	27 Unit	750.873.734,00	60 Unit	2.562.315.100,00	0,58	1.567.815.100,00	61,19%	61,19%	27,58	2.318.688.834	45,97%	100,00%		
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	20 Paket	20.000.000.000,00	51 Paket	48.224.991.627,50	12 Paket	21.261.125.723,00	0,25	2.918.289.302,00	25,00%	13,73%	51,25	51.143.280.930	100,00%	100,00%		
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penyediaan**	**3 Dokumen**	**2.216.550.000,00**	**5 Dokumen**	**13.813.166.112,00**	**1 Dokumen**	**1.723.150.586,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**5,00**	**13.813.166.112**	**100,00%**	**100,00%**		
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	166.550.000,00					0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.500.000.000,00	3 Dokumen	10.487.765.847,00	1 Dokumen	1.679.008.017,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	10.487.765.847	100,00%	100,00%		
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	2.507.346.886,00			0,00	-	0,00%	0,00%	2,00	2.507.346.886	100,00%	100,00%		
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	350.000.000,00	1 Unit	818.053.379,00	1 Unit	44.142.569,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	818.053.379	100,00%	100,00%		
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Jumlah Dokumen Penyelenggara**	**1 Dokumen**	**1.420.000.000,00**	**2 Dokumen**	**2.268.615.000,00**	**1 Dokumen**	**1.067.056.500,00**	**1,00**	**58.456.500,00**	**100,00%**	**5,48%**	**3,00**	**2.327.071.500**	**100,00%**	**100,00%**		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1.420.000.000,00	2 Dokumen	2.268.615.000,00	1 Dokumen	1.067.056.500,00	1,00	58.456.500,00	100,00%	5,48%	**3,00**	**2.327.071.500**	100,00%	100,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.03.0003	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Dalam Pener**	**1 Dokumen**	**100.000.000,00**	**3 Dokumen**	**52.680.000,00**	**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**3,00**	**52.680.000**	**100,00%**	**52,68%**		
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	52.680.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	52.680.000	100,00%	52,68%		
	1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Presentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan**	**93 %**	**2.250.000.000,00**	**93 %**	**12.419.699.143,00**	**93 %**	**21.825.100,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**93,00**	**12.419.699.143**	**100,00%**	**100,00%**		
	1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan yang tersedia**	**100 %**	**1.250.000.000,00**	**181 Orang**	**11.515.099.012,00**		**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**181,00**	**11.515.099.012**	**100,00%**	**100,00%**		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	21 Orang	1.250.000.000,00	181 Orang	11.515.099.012,00			-	-	0,00%	0,00%	181,00	11.515.099.012	100,00%	100,00%		
	1.02.03.2.03	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan yang tersedia**	**100 %**	**1.000.000.000,00**	**410 Orang**	**904.600.131,00**	**15 Orang**	**21.825.100,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**410,00**	**904.600.131**	**100,00%**	**90,46%**		
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	110 Orang	1.000.000.000,00	410 Orang	904.600.131,00	15 Orang	21.825.100,00	-	-	0,00%	0,00%	**410,00**	**904.600.131**	100,00%	90,46%		
	2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalan pembangunan Daerah melalui Kampung KB**	**80 %**	**970.800.000,00**	**52,00 %**	**1.238.234.230,00**	**52 %**	**819.000.000,00**	**0,10**	**45.000.000,00**	**10,00%**	**5,49%**	**52,10**	**1.283.234.230,00**	**65,13%**	**100,00%**	**DUK DAN KELUARGA BERENCANA**	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkanRancangan Induk Pengendalian Penduduk	**54 %**		**60,00 %**		**60 %**		-	-	**0,00%**		**60,00**	-	**100,00%**			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Cangkupan institusi yang teradvokasi program bangga kencana**	**2 Laporan**	**819.000.000,00**	**4 Laporan**	**836.881.853,00**	**2,00 Laporan**	**819.000.000,00**	**0,10**	**45.000.000,00**	**10,00%**	**5,49%**	**0,10**	**881.881.853,00**	**5,00%**	**100,00%**	**DINAS PENGENDALIAN PENDU**	
			Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**2 Laporan**															
	2.14.02.2.01.0009	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (ProgramKKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dokumen)	1 Dokumen	294.000.000,00	2,00 Dokumen	258.174.769,00	1 Dokumen	294.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	258.174.769,00	100,00%	87,81%		
	2.14.02.2.01.0020	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, JalurNonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan PendidikanKependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	45 Satuan Pendidikan	525.000.000,00	47,00 Dokumen	578.707.084,00	45 Satuan Pendidikan	525.000.000,00	0,10	45.000.000,00	10,00%	8,57%	47,10	623.707.084,00	100,00%	100,00%		
	2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Dokumen**	**151.800.000,00**	**5,00 Dokumen**	**401.352.377,00**		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**5,00**	**401.352.377,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1 Laporan	88.800.000,00	2,00 laporan	148.747.240,00			-	-	0,00%	0,00%	2,00	148.747.240,00	100,00%	100,00%		
	2.14.02.2.02.0011	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	3.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1 Laporan	42.600.000,00	2,00 laporan	102.000.000,00			-	-	0,00%	0,00%	2,00	102.000.000,00	100,00%	100,00%		
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2 Dokumen	17.400.000,00	5,00 Dokumen	150.605.137,00			-	-	0,00%	0,00%	5,00	150.605.137,00	100,00%	100,00%		
	2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun**	**2,48 %**	**2.274.926.677,00**	**3,0 %**	**8.357.817.301,00**		**1.584.450.000,00**	**0,12**	**64.800.000,00**	**12,00%**	**4,09%**	**3,12**	**8.422.617.301,00**	**100,00%**	**100,00%**		
			UKP	**22 Tahun Usia**		**22,80 Tahun Usia**						**0,00%**		**22,80**		**100,00%**			
			ASFR 15-19	**9,8 %**		**8,0 %**						**0,00%**		**8,00**		**81,63%**			
	2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**6 Laporan**	**462.383.331,00**	**11,00 Laporan**	**2.406.473.400,00**		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**11,00**	**2.406.473.400,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2 Laporan	79.364.505,00	6,00 Laporan	236.125.000,00			-	-	0,00%	0,00%	6,00	236.125.000,00	100,00%	100,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	12 Laporan	100.900.000,00	36,00 Laporan	1.009.433.400,00			-	-	0,00%	0,00%	36,00	1.009.433.400,00	100,00%	100,00%		
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	12 Laporan	117.735.977,00	31,00 Laporan	663.390.000,00			-	-	0,00%	0,00%	31,00	663.390.000,00	100,00%	100,00%		
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	4 Dokumen	100.900.000,00	9,00 Dokumen	367.100.000,00			-	-	0,00%	0,00%	9,00	367.100.000,00	100,00%	100,00%		
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	2 Dokumen	5.045.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	12 Organisasi	58.437.849,00	34,00 Organisasi	130.425.000,00			-	-	0,00%	0,00%	34,00	130.425.000,00	100,00%	100,00%		
	2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah PKB/PLKB yang melakukan penyuluhan**		**642.193.346,00**		**734.586.712,00**		**525.000.000,00**	**0,12**	**64.800.000,00**	**12,34%**	**12,34%**	**0,12**	**799.386.712,00**	**0,00%**	**100,00%**		
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**3 Laporan**		**3,00 Laporan**		**2 Laporan**		**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**3,00**	**-**	**100,00%**	**0,00%**		
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	199 Orang	67.193.346,00	627,00 Orang	323.400.000,00			-	-	0,00%	0,00%	627,00	323.400.000,00	100,00%	100,00%		
	2.14.03.2.02.0005	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	1 Organisasi	50.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program BanggaKencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan danPengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KeluargaBerencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	3 Laporan	525.000.000,00	2,00 Laporan	411.186.712,00	2 Laporan	525.000.000,00	0,60	64.800.000,00	60,00%	12,34%	2,60	475.986.712,00	86,67%	90,66%		
	2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**30 %**	**1.059.450.000,00**		**4.864.257.189,00**		**1.059.450.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**4.864.257.189,00**	**0,00%**	**100,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta PelaksanaanPelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**4 laporan**		**8,00 Laporan**		**4,0 Laporan**		-	-	**0,00%**	**0,00%**	**8,00**	-	**100,00%**	**0,00%**		
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	4 Laporan	282.520.000,00	6,00 Laporan	170.303.091,00	4 Laporan	282.520.000,00	-	-	0,00%	0,00%	6,00	170.303.091,00	100,00%	60,28%		
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1226 Orang	282.520.000,00	2.822,00 Orang	1.622.720.898,00	1200 Orang	282.520.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2.822,00	1.622.720.898,00	100,00%	100,00%		
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (unit)	7 Unit	211.890.000,00	35,00 Unit	2.983.766.000,00	7 Unit	211.890.000,00	-	-	0,00%	0,00%	35,00	2.983.766.000,00	100,00%	100,00%		
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	30 Laporan	282.520.000,00	34,00 Laporan	87.467.200,00	28 Laporan	282.520.000,00	-	-	0,00%	0,00%	34,00	87.467.200,00	100,00%	30,96%		
	2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB**	**1 Laporan**	**110.900.000,00**	**3 Laporan**	**352.500.000,00**		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**3,00**	**352.500.000,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1 Dokumen	10.000.000,00	2,00 Dokumen	12.050.000,00			-	-	0,00%	0,00%	2,00	12.050.000,00	100,00%	100,00%		
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	7 Kampung	100.900.000,00	21,00 Kampung	340.450.000,00			-	-	0,00%	0,00%	21,00	340.450.000,00	100,00%	100,00%		
	2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**85 %**	**1.135.423.185,00**	**80 %**	**4.037.759.605,00**		**2.448.460.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**80,00**	**4.037.759.605,00**	**94,12%**	**100,00%**		
	2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB**	**100 %**								**0,00%**	**0,00%**	-	**4.037.759.605,00**	**0,00%**	**100,00%**		
			Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	**100 %**								**0,00%**		-		**0,00%**			
			Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	**100 %**								**0,00%**		-		**0,00%**			
			Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	**100 %**								**0,00%**		-		**0,00%**			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**3 Laporan**		**9 Laporan**		**4 Laporan**		-		**0,00%**		**9,00**		**100,00%**			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (MenjadiOrang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (laporan)	3 Laporan	282.520.000,00	4,00 Laporan	217.780.850,00	3 Laporan	282.520.000,00	-	-	0,00%	0,00%	4,00	217.780.850,00	100,00%	77,09%		
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan PerencanaaanKehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	33 Keluarga	100.900.000,00	66,00 Keluarga	146.143.300,00	33 Keluarga	100.900.000,00	-	-	0,00%	0,00%	66,00	146.143.300,00	100,00%	100,00%		
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) (Laporan)	2 Laporan	282.520.000,00	3,00 Laporan	64.950.550,00	2 Laporan	282.520.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	64.950.550,00	100,00%	22,99%		
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (unit)	5 Unit	50.000.000,00	45,00 Unit	592.325.000,00			-	-	0,00%	0,00%	45,00	592.325.000,00	100,00%	100,00%		
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	140 Orang	282.520.000,00	366,00 Orang	432.119.993,00	133 Orang	1.782.520.000,00	-	-	0,00%	0,00%	366,00	432.119.993,00	100,00%	100,00%		
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	432 Orang	136.963.185,00	1.296,00 Orang	2.584.439.912,00			-	-	0,00%	0,00%	1.296,00	2.584.439.912,00	100,00%	100,00%		
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan Seluruh Jenjang**	**104.949 Unit**	**534.069.453.863,98**	**104.949 Unit**	**312.241.246.531,96**	**100 %**	**160.979.920.974,00**	**0,01**	**775.418.764,00**	**1,00%**	**0,48%**	**104.949,01**	**313.016.665.295,96**	**100,00%**	**58,61%**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Dikelola**	**59.865 Unit/Ruang/Orang**	**300.216.511.493,00**	**70.444 Unit/Ruang/Orang**	**196.719.133.513,46**	**9.870 Unit/Ruang/Orang**	**109.177.165.303,00**	**0,01**	**46.868.525,00**	**1,00%**	**0,04%**	**70.444,01**	**196.766.002.038,46**	**100,00%**	**65,54%**		
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	2.200.000.000,00	2 Unit	1.842.280.293,91			-	-	0,00%	0,00%	2,00	1.842.280.293,91	66,67%	83,74%		
	1.01.02.2.01.0002	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	5.031.667.542,00	9 Ruang	5.008.771.249,27			-	-	0,00%	0,00%	9,00	5.008.771.249,27	100,00%	99,54%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	18 Ruang	6.300.000.000,00	7 Ruang	1.331.713.271,61	5 ruang	2.100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	7,00	1.331.713.271,61	38,89%	21,14%		
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	14 Ruang	1.648.435.000,00	6 Ruang	512.569.771,45			-	-	0,00%	0,00%	6,00	512.569.771,45	42,86%	31,09%		
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	12 Ruang	4.100.000.000,00	-				-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	65 Unit	12.200.000.000,00	63 Unit	15.319.142.320,85	16 unit	4.500.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	63,00	15.319.142.320,85	96,92%	100,00%		
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	3.250.000.000,00	6 Unit	1.466.584.410,25	2 unit	496.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	6,00	1.466.584.410,25	46,15%	45,13%		
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang	2.600.000.000,00	1 Ruang	117.054.000,00	4 ruang	960.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	117.054.000,00	7,69%	4,50%		
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	1.680.500.000,00	3 Ruang	201.983.600,00			-	-	0,00%	0,00%	3,00	201.983.600,00	20,00%	12,02%		
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	2.010.580.000,00	2 Ruang	160.580.000,00	2 ruang	400.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	160.580.000,00	16,67%	7,99%		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	11 Unit	1.360.000.000,00			4 unit	400.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	140 Paket	5.012.195.600,00	255 Paket	2.931.841.000,00	49 paket	1.980.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	255,00	2.931.841.000,00	100,00%	58,49%		
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	15 Paket	1.800.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	42 paket	400.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	20.000.000,00	6,67%	1,11%		
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15.000 Peserta Didik	3.008.737.338,00	63.150 Peserta Didik	2.082.293.200,00			-	-	0,00%	0,00%	63.150,00	2.082.293.200,00	100,00%	69,21%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	300 Paket	2.100.000.000,00	120 Paket	5.683.205.600,00			-	-	0,00%	0,00%	120,00	5.683.205.600,00	40,00%	100,00%		
	1.01.02.2.01.0023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	300 Paket	1.938.140.735,00	216 Paket	1.934.186.226,00			-	-	0,00%	0,00%	216,00	1.934.186.226,00	72,00%	99,80%		
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar								-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	12.000 Peserta Didik	4.500.000.000,00	1.500 Peserta Didik	2.043.521.148,00	3744 Peserta didik	1.500.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.500,00	2.043.521.148,00	12,50%	45,41%		
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1068 Orang	24.127.600.000,00	1274 Orang	17.992.335.902,00	356 orang	8.586.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.274,00	17.992.335.902,00	100,00%	74,57%		
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	666 Orang	6.100.000.000,00	1707 Orang	3.464.721.610,00	1225 orang	2.000.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.707,00	3.464.721.610,00	100,00%	56,80%		
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	113 Satuan Pendidikan	6.750.000.000,00	385 Satuan Pendidikan	4.933.443.130,00	113 Satuan pendidikan	2.986.209.782,00	-	-	0,00%	0,00%	385,00	4.933.443.130,00	100,00%	73,09%		
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	113 Satuan Pendidikan	109.604.160.000,00	287 Satuan Pendidikan	99.111.316.976,00	113 Satuan pendidikan	37.022.612.021,00	-	-	0,00%	0,00%	287,00	99.111.316.976,00	100,00%	90,43%		
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	666 Orang	1.200.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	6 Ruang	2.115.997.000,00	2 Ruang	338.203.871,07			-	-	0,00%	0,00%	2,00	338.203.871,07	33,33%	15,98%		
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1.300.000.000,00			2 ruang	450.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	694 orang	1.649.936.920,00	282 orang	429.102.500,00	290 orang	500.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	282,00	429.102.500,00	40,63%	26,01%		
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	333 Konten Digital	1.800.000.000,00	136 Konten Digital	367.641.300,00	290 Konten Digital	500.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	136,00	367.641.300,00	40,84%	20,42%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	666 Orang	1.649.978.820,00	258 Orang	348.810.585,00	290 orang	500.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	258,00	348.810.585,00	38,74%	21,14%		
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	111 Dokumen	6.637.932.301,00	4 Dokumen	2.361.269.201,00	3 Dokumen	2.000.000.000,00	0,10	41.868.525,00	10,00%	2,09%	4,10	2.403.137.726,00	3,69%	36,20%		
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	9 Dokumen	2.111.287.700,00	2 Dokumen	590.203.100,00	3 Dokumen	600.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	590.203.100,00	22,22%	27,95%		
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	325 Komunitas	1.851.178.300,00	19 Komunitas	230.219.900,00	113 Komunitas	600.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	19,00	230.219.900,00	5,85%	12,44%		
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan Infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	8 Paket	1.200.000.000,00			1 Paket	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	9 Kegiatan	2.300.725.300,00	2 Kegiatan	1.025.619.800,00	2 Kegiatan	600.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	1.025.619.800,00	22,22%	44,58%		
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	23000 Buku	1.610.000.000,00			1.000 Buku	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2700 Paket	6.750.000.000,00			1.332 paket	2.519.478.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	43 Ruang	15.147.961.000,00	5 Ruang	3.592.608.699,57	65 ruang	22.621.785.500,00	-	-	0,00%	0,00%	5,00	3.592.608.699,57	11,63%	23,72%		
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	65 Unit	13.000.000.000,00	26 Unit	2.789.901.047,51	58 unit	3.000.000.000,00	0,10	5.000.000,00	10,00%	0,17%	26,10	2.794.901.047,51	40,15%	21,50%		
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1124 Orang	2.984.446.700,00	552 Orang	870.015.918,00	312 Orang	400.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	552,00	870.015.918,00	49,11%	29,15%		
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	113 Satuan Pendidikan	4.341.863.237,00	101 Satuan Pendidikan	1.299.705.043,00	113 Satuan pendidikan	1.500.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	101,00	1.299.705.043,00	89,38%	29,93%		
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	90 Ruang	25.243.188.000,00	61 Ruang	16.318.288.838,97	50 ruang	7.905.580.000,00	-	-	0,00%	0,00%	61,00	16.318.288.838,97	67,78%	64,64%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					220 Peserta didik	999.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia					51 Paket	750.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Menerima Biaya Personil**	**29.158 Unit/Ruang**	**176.290.712.382,11**	**15.868 Unit/Ruang**	**98.697.952.954,12**	**5.418 Unit/Ruang**	**39.847.341.161,00**	**0,01**	**395.221.473,00**	**1,00%**	**0,99%**	**15.868,01**	**99.093.174.427,12**	**54,42%**	**56,21%**		
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Peserta Didik	2 Unit	4.400.000.000,00	1 Unit	987.527.300,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	987.527.300,00	50,00%	22,44%		
	1.01.02.2.02.0002	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 RKB	12.589.822.676,00	18 RKB	12.314.561.268,45			-	-	0,00%	0,00%	18,00	12.314.561.268,45	100,00%	97,81%		
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	13 Ruang	4.222.851.786,00	5 Ruang	624.749.915,00	1 ruang	300.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	5,00	624.749.915,00	38,46%	14,79%		
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	15 Ruang	1.844.362.878,00	3 Ruang	286.631.095,00			-	-	0,00%	0,00%	3,00	286.631.095,00	20,00%	15,54%		
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.650.000.000,00			1 ruang	300.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	13 Ruang	4.483.873.752,00	2 Ruang	1.428.330.530,00	1 ruang	300.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	1.428.330.530,00	15,38%	31,85%		
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	3 Ruang	1.200.000.000,00	1 Ruang	8.929.950,00		-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	8.929.950,00	33,33%	0,74%		
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	1.845.000.000,00	4 Unit	953.226.870,00	1 unit	230.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	4,00	953.226.870,00	44,44%	51,67%		
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	9 Unit	1.589.263.140,00			-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	730.000.000,00			-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	34 Unit	8.069.231.797,00	36 Unit	16.883.852.691,49	21 unit	2.200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	36,00	16.883.852.691,49	100,00%	100,00%		
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	3.218.394.000,00	10 Ruang	1.716.350.840,00	6 ruang	750.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	10,00	1.716.350.840,00	71,43%	53,33%		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	800.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	1.414.183.228,00	3 Ruang	33.995.440,00			-	-	0,00%	0,00%	3,00	33.995.440,00	50,00%	2,40%		
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1.914.183.228,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang	600.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	1.624.863.840,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	600.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Unit	4.894.334.722,11			42 unit	2.060.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	934 Paket	2.335.224.400,00			300 paket	800.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	1.000.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6500 Peserta Didik	2.000.000.000,00			2.000 Peserta didik	1.000.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	1.158.621.000,00	11 Paket	1.215.021.000,00			-	-	0,00%	0,00%	11,00	1.215.021.000,00	100,00%	100,00%		
	1.01.02.2.02.0036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	-	109.974.480,00	13500	109.974.480,00			-	-	0,00%	0,00%	13.500,00	109.974.480,00	0,00%	100,00%		
	1.01.02.2.02.0037	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	-	247.186.100,00	44	246.518.105,00			-	-	0,00%	0,00%	44,00	246.518.105,00	0,00%	99,73%		
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	480 Peserta Didik	3.094.340.500,00	280 Peserta Didik	351.835.700,00	300 Peserta didik	384.749.500,00	-	-	0,00%	0,00%	280,00	351.835.700,00	58,33%	11,37%		
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	780 Orang	15.548.800.000,00	843 Orang	12.786.439.766,00	260 orang	5.282.400.000,00	-	-	0,00%	0,00%	843,00	12.786.439.766,00	100,00%	82,23%		
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	600 Orang	3.732.098.055,00	662 Orang	512.119.567,00	236 orang	400.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	662,00	512.119.567,00	100,00%	13,72%		
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	41 Satuan Pendidikan	4.300.000.000,00	42 Satuan Pendidikan	873.224.033,00	41 Satuan pendidikan	400.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	42,00	873.224.033,00	100,00%	20,31%		
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	41 Satuan Pendidikan	50.471.580.000,00	85 Satuan Pendidikan	45.536.661.902,00	41 Satuan pendidikan	15.762.890.000,00	0,15	67.483.073,00	15,00%	0,43%	85,15	45.604.144.975,00	100,00%	90,36%		
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	132 Orang	600.000.000,00			48 orang	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300 Orang	588.666.800,00	48 Orang	84.463.800,00	130 orang	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	48,00	84.463.800,00	16,00%	14,35%		
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	72 Konten Digital	627.393.600,00	6 Konten Digital	15.293.000,00	130 Konten Digital	184.749.500,00	-	-	0,00%	0,00%	6,00	15.293.000,00	8,33%	2,44%		
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	600.000.000,00	138 Orang	101.756.500,00	100 orang	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	138,00	101.756.500,00	46,00%	16,96%		
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9 Dokumen	2.768.996.600,00	1 Dokumen	107.421.000,00	3 Dokumen	2.007.802.661,00	0,25	327.738.400,00	25,00%	16,32%	1,25	435.159.400,00	13,89%	15,72%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	9 Dokumen	858.706.300,00			3 Dokumen	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	72 Komunitas	800.000.000,00	43 Komunitas	105.559.100,00	24 Komunitas	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	43,00	105.559.100,00	59,72%	13,19%		
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	9 Kegiatan	709.806.900,00	1 Kegiatan	57.334.400,00	2 Kegiatan	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	57.334.400,00	11,11%	8,08%		
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	41 Satuan Pendidikan	1.300.000.000,00			24 Satuan pendidikan	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 Ruang	7.700.000.000,00	3 Ruang	1.091.663.401,18	14 ruang	4.800.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	1.091.663.401,18	13,64%	14,18%		
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	450 Orang	618.258.600,00	76 Orang	54.511.300,00	120 Orang	184.749.500,00	-	-	0,00%	0,00%	76,00	54.511.300,00	16,89%	8,82%		
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	12500 Buku	350.000.000,00	Buku		1.000 Buku	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5500 Paket	9.450.000.000,00			518 paket	1.000.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Ruang	5.823.769.000,00	2 Ruang	210.000.000,00		-	-	-	0,00%	0,00%	2,00	210.000.000,00	12,50%	3,61%		
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	150 Paket	1.406.925.000,00	Paket		50 paket	400.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan Infrastruktur TIK	Tersedianya Infrastruktur TIK	4 Paket	400.000.000,00			1 paket	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Dikelola**	**13.712 Unit**	**41.710.906.765,87**	**5.684 Unit**	**12.257.513.798,38**	**2.672 Unit**	**8.330.197.252,00**	**0,01**	**49.200.000,00**	**1,00%**	**0,59%**	**5.684,01**	**12.306.713.798,38**	**41,45%**	**29,50%**		
	1.01.02.2.03.0001	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	248.162.200,00	2 Unit	248.162.200,00			-	-	0,00%	0,00%	2,00	248.162.200,00	100,00%	100,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	2.282.836.992,00	18 Unit	2.007.705.800,00	1 unit	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	18,00	2.007.705.800,00	100,00%	87,95%		
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	1 Unit	130.000.000,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	130.000.000,00	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0004 (beda sama diranhir)	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	600.000.000,00	1 Unit	102.272.000,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	102.272.000,00	33,33%	17,05%		
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	15 Paket	410.000.000,00	4 Paket	95.000.000,00			-	-	0,00%	0,00%	4,00	95.000.000,00	26,67%	23,17%		
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	6 Paket	450.000.000,00	2 Paket	50.000.000,00			-	-	0,00%	0,00%	2,00	50.000.000,00	33,33%	11,11%		
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.100 Peserta Didik	2.100.000.000,00			500 Peserta didik	500.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	30 Paket	710.000.000,00	6 Paket	558.427.000,00			-	-	0,00%	0,00%	6,00	558.427.000,00	20,00%	78,65%		
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1.500 Peserta Didik	1.000.000.000,00	4.000 Peserta Didik	384.000.000,00			-	-	0,00%	0,00%	4.000,00	384.000.000,00	100,00%	38,40%		
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	99 Orang	4.500.000.000,00	22 Orang	1.289.600.000,00	571 orang	2.020.800.000,00	0,10	49.200.000,00	10,00%	2,43%	22,10	1.338.800.000,00	22,32%	29,75%		
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	363 Orang	1.062.154.909,87	993 Orang	1.875.363.697,00	350 orang	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	993,00	1.875.363.697,00	100,00%	100,00%		
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	3.450.000.000,00	301 Satuan Pendidikan	1.222.423.948,00	13 Satuan pendidikan	1.000.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	301,00	1.222.423.948,00	100,00%	35,43%		
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	13 Satuan Pendidikan	9.240.570.000,00	118 Satuan Pendidikan	3.673.237.240,00	13 Satuan pendidikan	3.239.144.302,00	-	-	0,00%	0,00%	118,00	3.673.237.240,00	100,00%	39,75%		
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	363 Konten Digital	300.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	363 Orang	260.000.000,00			120 orang	80.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9 Dokumen	1.616.322.700,00	1 Dokumen	4.020.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	4.020.000,00	11,11%	0,25%		
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	9 Dokumen	350.655.600,00	3 Dokumen	146.926.070,00	3 Dokumen	96.526.148,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	146.926.070,00	33,33%	41,90%		
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	500.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	39 Komunitas	300.000.000,00			50 komunitas	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	1.000.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	900 Peserta Didik	450.000.000,00			750 Peserta Didik	119.929.841,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	3000 Buku	200.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	300.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	363 Orang	600.000.000,00	211 Orang	113.556.140,00	300 orang	150.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	211,00	113.556.140,00	58,13%	18,93%		
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	2.630.204.364,00	1 Unit	356.819.703,38			-	-	0,00%	0,00%	1,00	356.819.703,38	50,00%	13,57%		
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4500 Paket	6.750.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	400.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	umlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					4 Unit	275.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia					1 paket	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar					50 Satuan pendidikan	198.796.961,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dikelola**	**2214 Unit/Peserta Didik**	**15.851.323.223,00**	**418 Unit/Peserta Didik**	**4.566.646.266,00**	**169 Unit/Peserta Didik**	**3.625.217.258,00**	**0,08**	**284.128.766,00**	**8,00%**	**7,84%**	**418,08**	**4.850.775.032,00**	**18,88%**	**30,60%**		
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	9 Unit	600.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.04.0002	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	9 Unit	710.884.507,00	8 Unit	605.994.000,00			-	-	0,00%	0,00%	8,00	605.994.000,00	88,89%	85,25%		
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik NonFormal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	250 Peserta Didik	1.300.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.04.0012	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	370	392.329.366,00	370 Peserta Didik	261.094.966,00			-	-	0,00%	0,00%	370,00	261.094.966,00	100,00%	66,55%		
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	57 Orang	1.254.800.000,00	15 Orang	138.600.000,00	19 orang	556.400.000,00	0,65	284.128.766,00	65,00%	51,07%	15,65	422.728.766,00	27,46%	33,69%		
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	310.000.000,00			20 orang	79.998.723,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Satuan Pendidikan	559.089.350,00	1 Satuan Pendidikan	102.007.300,00	11 Satuan pendidikan	99.043.654,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	102.007.300,00	9,09%	18,25%		
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	11 Satuan Pendidikan	6.644.220.000,00	21 Satuan Pendidikan	3.249.250.000,00	11 Satuan pendidikan	2.214.740.000,00	-	-	0,00%	0,00%	21,00	3.249.250.000,00	100,00%	48,90%		
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9 Dokumen	600.000.000,00			2 Dokumen	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	300 Paket	60.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	900 Buku	30.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	200.000.000,00			1 ruang	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	440.000.000,00	3 Ruang	209.700.000,00	2 ruang	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	209.700.000,00	100,00%	47,66%		
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	900.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	400.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	200 Peserta Didik	100.000.000,00			100 peserta didik	50.034.881,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	500.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	200.000.000,00			2 paket	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	400.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa NonFormal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa NonFormal/Kesetaraan yang Tersedia	11 Paket	250.000.000,00			1 Paket	25.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase tersusunnya dan terlaksananya kurikulum muatan lokal**	**1360 Dokumen**	**3.830.377.487,00**	**299 Dokumen**	**784.262.382,00**	**100 %**	**890.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**299,00**	**784.262.382,00**	**21,99%**	**20,47%**		
	1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun**	**1360 Dokumen**	**3.830.377.487,00**	**299 Dokumen**	**784.262.382,00**	**369 Dokumen**	**890.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**299,00**	**784.262.382,00**	**21,99%**	**20,47%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	3 Dokumen	695.089.500,00	1 Dokumen	201.492.182,00	1 Dokumen	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	201.492.182,00	33,33%	28,99%		
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	441 Buku	1.205.070.800,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	900 Orang	1.170.217.187,00	298 Orang	582.770.200,00	368 orang	690.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	298,00	582.770.200,00	33,11%	49,80%		
	1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/ penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	4 Buku	200.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	10 Dokumen	360.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	2 Dokumen	200.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap satuan pendidikan**	**5 Orang**	**738.603.600,00**	**2 Orang**	**48.825.631,00**	**100 %**	**200.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**48.825.631,00**	**40,00%**	**6,61%**		
	1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan**	**Jumlah peserta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan**	**5 Orang**	**738.603.600,00**	**2 Orang**	**48.825.631,00**	**1 Orang**	**200.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**48.825.631,00**	**40,00%**	**6,61%**		
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	438.603.600,00	2 Dokumen	48.825.631,00	1 Dokumen	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	48.825.631,00	66,67%	11,13%		
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribasian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2 Laporan	300.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Lembaga yang telah memiliki izin**	**14 Dokumen**	**1.600.000.000,00**				-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	1.01.05.2.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat**	**5 Dokumen**	**600.000.000,00**				-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen	200.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3 Dokumen	400.000.000,00		-				-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.05.2.02	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang diselenggarakan Masyarakat**	**9 Dokumen**	**1.000.000.000,00**		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3 Dokumen	300.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3 Dokumen	300.000.000,00		-	-		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3 Dokumen	400.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2 08 02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG di Kota Dumai**	**0,3 %**	**647.500.000,00**	**45 %**	**1.202.934.496**	**45 %**	**403.740.456,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**45,00**	**1.202.934.496,00**	**100,00%**	**100,00%**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 02	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan**	**Persentase pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pad lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota**	**1 dokumen**	**224.500.000,00**	**100 %**	**408.433.096**	**100 %**	**63.789.990,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**408.433.096,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2 08 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	95.000.000,00	14 dokumen	166.185.025		-	-	-	0,00%	0,00%	14,00	166.185.025,00	100,00%	100,00%		
	2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarustamaan Gender(PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	37 perangkat daerah	65.000.000,00	81 perangkat daerah	68.211.575	90 orang	48.199.990	-	-	0,00%	0,00%	81,00	68.211.575,00	100,00%	100,00%		
	2 08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten / Kota	37 perangkat daerah	64.500.000,00	74 perangkat daerah	174.036.496	50 orang	15.590.000	-	-	0,00%	0,00%	74,00	174.036.496,00	100,00%	100,00%		
	2 08 02 2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota**	**1 dokumen**	**117.000.000,00**	**15 Dokumen**	**304.243.800**	**1 dokumen**	**64.330.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**15,00**	**304.243.800,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	107.000.000,00	9 Dokumen	182.802.300	1 dokumen	64.330.000	-	-	0,00%	0,00%	9,00	182.802.300,00	100,00%	100,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	3 organisasi	10.000.000,00	1 organisasi	121.441.500		-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	121.441.500,00	33,33%	100,00%		
	2 08 02 2.02 0002	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan**	**1 lembaga**	**306.000.000,00**	**4 lembaga**	**490.257.600**	**1 lembaga**	**275.620.466**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4,00**	**490.257.600,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sdumber Daya Lembaga Penyedia Laynana Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	150 orang	153.000.000,00	150 orang	284.944.600	150 orang	125.628.846	-	-	0,00%	0,00%	150,00	284.944.600,00	100,00%	100,00%		
	2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	jumlah dokumen dokumentasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perrempuan kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	153.000.000,00	6 dokumen	205.313.000	1 dokumen	149.991.620	-	-	0,00%	0,00%	6,00	205.313.000,00	100,00%	100,00%		
	2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Meningkatnya perlindungan bagi perempuan**	**0,6 %**	**460.000.000,00**	**90 %**	**646.906.100**	**50 %**	**72.920.000**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**90,00**	**646.906.100,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2 08 03 2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota**	**3 dokumen**	**180.000.000,00**	**17 Dokumen**	**234.753.850**	**3 dokumen**	**32.420.000**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**17,00**	**234.753.850,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap peremuan kewenangan kabupaten/kota	3 dokumen	140.000.000,00	9 dokumen	163.799.300	3 dokumen	32.420.000	-	-	0,00%	0,00%	9,00	163.799.300,00	100,00%	100,00%		
	2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	37 perangkat daerah	40.000.000,00	37 perangkat daerah	70.954.550		-	-	-	0,00%	0,00%	37,00	70.954.550,00	100,00%	100,00%		
	2 08 03 2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi**	**55 layanan**	**162.000.000,00**	**96 Layanan**	**184.547.400**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**96,00**	**184.547.400,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarkat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	25 orang	27.000.000,00	12 Orang	65.068.400		-	-	-	0,00%	0,00%	12,00	65.068.400,00	48,00%	100,00%		
	2 08 03 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	80 layanan	135.000.000,00	70 Layanan	119.479.000		-	-	-	0,00%	0,00%	70,00	119.479.000,00	87,50%	88,50%		
	2 08 03 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota**	**4 dokumen**	**118.000.000,00**	**14 Dokumen**	**227.604.850**	**2 dokumen**	**40.500.000**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**14,00**	**227.604.850,00**	**100,00%**	**100,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	20 orang	42.000.000,00	30 Orang	107.568.450	20 orang	25.500.000	-	-	0,00%	0,00%	30,00	107.568.450,00	100,00%	100,00%		
	2 08 03 2.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spesifik	20 orang	34.000.000,00	20 Orang	57.548.700		-	-	-	0,00%	0,00%	20,00	57.548.700,00	100,00%	100,00%		
	2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pengutan jejaraing antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	42.000.000,00	10 Dokumen	62.487.700	1 dokumen	15.000.000	-	-	0,00%	0,00%	10,00	62.487.700,00	100,00%	100,00%		
	2 08 04	**PROGRMA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Menurunnya jumlah perkawinan usia anak**	**0,55 %**	**57.000.000,00**	**170 %**	**44.238.200**	**60 %**	**17.380.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**170,00**	**44.238.200,00**	**100,00%**	**77,61%**		
	2 08 04 2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen hasil kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender(KG) dan Hak anak tingkat daerah kabupaten/kota**	**2 dokumen**	**57.000.000,00**	**8 Dokumen**	**44.238.200**	**1 dokumen**	**17.380.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**8,00**	**44.238.200,00**	**100,00%**	**77,61%**		
	2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	57.000.000,00	2 Dokumen	44.238.200	1 dokumen	17.380.000	-	-	0,00%	0,00%	2,00	44.238.200,00	100,00%	77,61%		
	2 08 05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak**	**0,5 %**	**203.000.000,00**	**105 %**	**413.455.062**	**45 %**	**235.337.800**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**105,00**	**413.455.062,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2 08 05 2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengumpulan,pengolahan analisis dan penyajian data terpilah gender dan anak dalam kelembagaan data di kota Dumai**	**6 dokumen**	**203.000.000,00**	**12 Dokumen**	**413.455.062**	**4 dokumen**	**235.337.800**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**12,00**	**413.455.062,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	3 dokumen	101.000.000,00	5 dokumen	175.676.061	1 dokumen	124.544.800	-	-	0,00%	0,00%	5,00	175.676.061,00	100,00%	100,00%		
	2 08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	3 dokumen	102.000.000,00	7 dokumen	237.779.001	3 dokumen	110.793.000	-	-	0,00%	0,00%	7,00	237.779.001,00	100,00%	100,00%		
	2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Meningkatnya capaian skor kota layak anak**	**0,9 %**	**472.000.000,00**	**230 %**	**720.861.139**	**85 %**	**64.336.700**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**230,00**	**720.861.139,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2 08 06 2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha, yang mendapatkn advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, mediia dan dunia usaha**	**100 organisasi**	**162.000.000,00**	**124 organisasi**	**429.111.839**	**12 organisasi**	**11.015.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**124,00**	**429.111.839,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebojakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	100 organisasi	102.000.000,00	124 organisasi	209.396.175	12 organisasi	7.415.000	-	-	0,00%	0,00%	124,00	209.396.175,00	100,00%	100,00%		
	2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	2 dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	219.715.664	1 dokumen	3.600.000	-	-	0,00%	0,00%	1,00	219.715.664,00	50,00%	100,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2 08 06 2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota**	**5 dokumen**	**310.000.000,00**	**26 Dokumen**	**291.749.300**	**5 dokumen**	**53.321.700**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**26,00**	**291.749.300,00**	**100,00%**	**94,11%**		
	2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	205.000.000,00	42 dokumen	127.021.700	1 dokumen	32.877.700	-	-	0,00%	0,00%	42,00	127.021.700,00	100,00%	61,96%		
	2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	2 dokumen	105.000.000,00	71 dokumen	164.727.600	2 dokumen	20.444.000	-	-	0,00%	0,00%	71,00	164.727.600,00	100,00%	100,00%		
	2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Meningkatnya perlindungan khusus anak**	**0,8 %**	**508.000.000,00**	**90 %**	**364.860.872**	**70 %**	**95.490.160**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**90,00**	**364.860.872,00**	**100,00%**	**71,82%**		
	2 08 07 2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen hasil kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkuo daerah kabupaten/kota**	**3 dokumen**	**70.000.000,00**	**47 Dokumen**	**64.965.000**		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**47,00**	**64.965.000,00**	**100,00%**	**92,81%**		
		Penguatan Kerja sama lintas perangkat daerah	Jumlah kegiatan Pencegahan KtA	1 kegiatan	70.000.000,00	7 kegiatan	64.965.000		-	-	-	0,00%	0,00%	7,00	64.965.000,00	100,00%	92,81%		
	2 08 07 2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota**	**7 layanan**	**303.000.000,00**	**26 layanan**	**214.687.300**	**7 layanan**	**60.295.160**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**26,00**	**214.687.300,00**	**100,00%**	**70,85%**		
	2 08 07 2.02 05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	110 orang	73.000.000,00	171 orang	20.260.000	110 orang	50.077.760	-	-	0,00%	0,00%	171,00	20.260.000,00	100,00%	27,75%		
	2 08 07 2.02 06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	55 layanan	230.000.000,00	17 orang	194.427.300	7 layanan	10.217.400	-	-	0,00%	0,00%	17,00	194.427.300,00	30,91%	84,53%		
	2 08 07 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota**	**7 dokumen**	**135.000.000,00**	**21 Dokumen**	**85.208.572**	**1 dokumen**	**35.195.000**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**21,00**	**85.208.572,00**	**100,00%**	**63,12%**		
	2 08 07 2.03 06	Peningkatan Kapasitam SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat dan penanganan AMPK	45 orang	135.000.000,00	9 Dokumen	85.208.572	45 orang	35.195.000	-	-	0,00%	0,00%	9,00	85.208.572,00	20,00%	63,12%		
	2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**	**100 %**	**7.928.173.801,00**	**100 %**	**2.773.498.301,00**	**100 %**	**472.714.126,00**	**0,10**	**9.700.000,00**	**10,00%**	**2,05%**	**100,10**	**2.783.198.301,00**	**100,00%**	**35,11%**	**A DAN PARIWISATA**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah peserta mancing**	**460 orang**	**3.818.173.801,00**	**280 orang**	**1.342.615.901,00**	**60 orang**	**202.714.126,00**	**0,10**	**5.280.000,00**	**10,00%**	**2,60%**	**280,10**	**1.347.895.901,00**	**60,89%**	**35,30%**	**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAG**	
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan	300 orang	2.402.972.791,00	120 orang	577.730.110,00			-	-	0,00%	#DIV/0!	120,00	577.730.110,00	40,00%	24,04%		Adanya pemutakhiran kode rekening
	2.19.02.2.01.0009	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan	160 orang	1.415.201.010,00	160 orang	764.885.791,00			-	-	0,00%	0,00%	160,00	764.885.791,00	100,00%	54,05%		Adanya pemutakhiran kode rekening
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda					60 orang	202.714.126,00	0,10	5.280.000,00	10,00%	2,60%	0,10	5.280.000,00	0,00%	0,00%		
	2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat kabupaten/kota dari**	**322 orang**	**4.110.000.000,00**	**28 orang**	**1.430.882.400,00**	**80 orang**	**270.000.000,00**	**0,10**	**4.420.000,00**	**10,00%**	**1,64%**	**28,10**	**1.435.302.400,00**	**8,73%**	**34,92%**		
	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	Seluruh Kabupaten/Kota	310 orang	1.157.000.000,00	25 orang	223.522.400,00			-	-	0,00%	0,00%	25,00	223.522.400,00	8,06%	19,32%		
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	yang difasilitasi dalam	12 dokumen	2.953.000.000,00	3 dokumen	1.207.360.000,00			-	-	0,00%	0,00%	3,00	1.207.360.000,00	25,00%	40,89%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota					80 orang	270.000.000,00	0,10	4.420.000,00	10,00%	1,64%	0,10	4.420.000,00	0,00%	0,00%		
	2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**kepemudaan yang difasilitasi**	**100 %**	**23.241.818.414,00**		**10.994.822.227,00**	**1 tahun**	**4.717.838.233,00**	**0,10**	**5.280.000,00**	**10,00%**	**0,11%**	**0,10**	**11.000.102.227,00**	**0,10%**	**47,33%**		
	2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**dalam pengembangan**	**15 unit**	**10.363.850.306,00**	**4,00 unit**	**3.727.329.001,00**	**1 tahun**	**4.090.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**4,00**	**3.727.329.001,00**	**26,67%**	**35,96%**		
	2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Dunia Usaha	organisasi kepemudaan	10 unit	10.218.118.287,00	3 unit	3.680.584.001,00	1 tahun	4.090.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	3.680.584.001,00	30,00%	36,02%		
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	tingkat kabupaten/kota	5 dokumen	145.732.019,00	1 unit	46.745.000,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	46.745.000,00	20,00%	32,08%		
	2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah cabor yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa**	**125 orang**	**3.822.486.815,00**	**41 unit**	**1.802.086.876,00**	**25 Kegiatan**	**211.214.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**41,00**	**1.802.086.876,00**	**32,80%**	**47,14%**		
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	125 orang	3.822.486.815,00	41 unit	1.802.086.876,00	25 Kegiatan	211.214.000,00	-	-	0,00%	0,00%	41,00	1.802.086.876,00	32,80%	47,14%		
	2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah olahraga rekreasi yang terlaksana**	**65 dokumen**	**9.055.481.293,00**	**34 dokumen**	**5.465.406.350,00**	**11 lembaga**	**416.624.233,00**	**0,10**	**5.280.000,00**	**10,00%**	**1,27%**	**34,10**	**5.470.686.350,00**	**52,46%**	**60,41%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	55 dokumen	2.385.358.338	32 orang	967.894.950,00	11 lembaga	222.684.233,00	0,10	5.280.000,00	10,00%	2,37%	32,10	973.174.950,00	58,36%	40,80%		
	2.19.03.2.05.0004	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olaharaga rekreasi yang memadai	10 unit	6.670.122.955	2 orang	4.497.511.400,00	1 unit	193.940.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	4.497.511.400,00	20,00%	67,43%		
	2.23.2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan yang telah dibina sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)**	**100 %**	**4.889.423.340,00**	**100 %**	**1.302.649.155,00**	**100 %**	**12.758.500.000,00**	**0,25**	**44.600.000,00**	**25,00%**	**0,35%**	**100,25**	**1.347.249.155**	**100,00%**	**27,55%**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
	2.23.2.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Jumlah perpustakaan yang di kelola**	**246 Perpustakaan**	**3.577.215.200,00**	**35 Perpustakaan**	**929.787.447,00**	**12 Perpustakaan**	**12.523.500.000,00**	**0,25**	**44.600.000,00**	**25,00%**	**0,36%**	**35,25**	**974.387.447**	**14,33%**	**27,24%**		
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 layanan	155.000.000,00					0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	432.130.900,00	1 Perpustakaan	302.130.900,00	1 perpustakaan	12.000.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	302.130.900	100,00%	69,92%		
	2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	15 eksemplar	25.000.000,00					0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kab/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional	50 Perpustakaan	695.272.600,00	30 perpustakaan	181.670.091,00	10 perpustakaan	200.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	30,00	181.670.091	60,00%	26,13%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	9 Perpustakaan	133.282.800,00	4 perpustakaan	23.282.800,00	1 perpustakaan	10.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	4,00	23.282.800	44,44%	17,47%		
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang	285.000.000,00					0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	1.255.336.800,00	1 layanan	369.382.200,00	1 layanan	196.000.000,00	0,25	44.600.000,00	25,00%	22,76%	1,25	413.982.200	100,00%	32,98%		
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	850 eksemplar	200.000.000,00					0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1150 eksemplar	222.500.000,00	250 eksemplar	49.629.356,00	300 eksemplar	57.500.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	250,00	49.629.356	21,74%	22,31%		
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	Jumlah Data Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	173.692.100,00	1 dokumen	3.692.100,00	1 dokumen	60.000.000	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	3.692.100	33,33%	2,13%		
	2.23.2.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Jumlah Pemustaka**	**15000 Orang**	**1.312.208.140,00**	**9000 Orang**	**372.861.708,00**	**3000 Orang**	**235.000.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**9000,00**	**372.861.708**	**60,00%**	**28,41%**		
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	28 lokus	815.000.000,00	14 lokus	288.164.468,00	7 lokus	200.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	14,00	288.164.468	50,00%	35,36%		
	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	100.000.000,00					0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	15 orang	183.789.940,00	3 orang	33.789.940,00			0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	33.789.940	20,00%	18,39%		
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	9 Perpustakaan	108.418.200,00	6 perpustakaan	50.907.300,00	3 perpustakaan	35.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	6,00	50.907.300	66,67%	46,95%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung Kegiatannya	9 orang	105.000.000,00					0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	2.23.3	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase naskah kuno yang diakuisisi/ dialihmediakan (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai**	**100 %**	**872.398.124,00**	**100 %**	**32.278.124,00**		**0,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**32.278.124**	**100,00%**	**3,70%**		
	2.23.3.2.0.1	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Laporan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah**	**4 Laporan**	**452.398.124,00**	**2 Laporan**	**32.278.124,00**		**0,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**32.278.124**	**50,00%**	**7,13%**		
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	12 orang	234.950.124,00	4 orang	24.830.124,00			0,00	-	0,00%	0,00%	4,00	24.830.124	33,33%	10,57%		
	2.23.03.2.01.0001	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Diadidayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	3 eksemplar	217.448.000,00	1 eksemplar	7.448.000,00			0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	7.448.000	33,33%	3,43%		
	2.23.3.2.02	**Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Jumlah Laporan Koleksi Budaya Etnis yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**1 informasi**	**420.000.000**	-	-		-	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	1 pengguna	210.000.000,00					0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	2.23.03.2.02.0002	Pengelolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan	2 laporan	210.000.000,00					0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 Kecamatan**	**100 %**	**990.669.000,00**	**100 %**	**230.383.630,00**	**100 %**	**154.159.608,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**230.383.630,00**	**100,00%**	**23,26%**	**DINAS PERDAGANGAN**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah**	**17 Laporan**	**185.000.000,00**	**2 Laporan**	**13.623.000,00**	**5 Laporan**	**35.110.700,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**13.623.000,00**	**11,76%**	**7,36%**		
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	15 Laporan	135.000.000,00	2 Laporan	13.623.000,00	5 Laporan	35.110.700,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2,00	13.623.000,00	13,33%	10,09%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	50.000.000,00		-		-	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat**	**48 Laporan**	**720.669.000,00**	**12 Laporan**	**216.760.630,00**	**5 Laporan**	**119.048.908,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**12,00**	**216.760.630,00**	**25,00%**	**30,08%**		
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	28 Laporan	325.669.000,00	13 Laporan	104.982.550,00		19.410.500,00	0,00	-	0,00%	0,00%	13,00	104.982.550,00	46,43%	32,24%		
	3.30.04.2.02.0002	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20 Laporan	395.000.000,00	8 Laporan	111.778.080,00	5 Laporan	99.638.408,00	0,00	-	0,00%	0,00%	8,00	111.778.080,00	40,00%	28,30%		
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**21 Laporan**	**85.000.000,00**		-		-	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	21 Laporan	85.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase pengembangan dan pelestarian kebudayaan**	**327 Dokumen**	**15.467.567.638,00**	**9 Dokumen**	**8.413.263.764,00**	**100 %**	**4.569.975.172,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**9,00**	**8.413.263.764,00**	**2,75%**	**54,39%**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelembagaan pengelolaan kebudayaan di masyaraka**	**327 Objek/Orang**	**8.159.442.454,00**	**9 Objek/Orang**	**1.964.286.995,00**	**156 Objek/Orang**	**899.978.656,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**9,00**	**1.964.286.995,00**	**2,75%**	**24,07%**		
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	27 Objek	6.859.442.454,00	9 Objek	1.964.286.995,00	6 Objek	699.999.558,00	-	-	0,00%	0,00%	9,00	1.964.286.995,00	33,33%	28,64%		
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	300 Orang	1.300.000.000,00			150 orang	199.979.098,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional**	**20 Objek**	**4.133.639.284,00**	**15 Objek**	**2.362.996.651,00**	**22 Objek**	**1.149.996.516,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**15,00**	**2.362.996.651,00**	**75,00%**	**57,17%**		
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	18 Objek	3.883.639.284,00	15 Objek	2.362.996.651,00	2 Objek	999.996.641,00	-	-	0,00%	0,00%	15,00	2.362.996.651,00	83,33%	60,84%		
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2	250.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		tidak ada di ranhir

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan					20 Sertifikat	149.999.875,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat**	**502 Objek**	**3.174.485.900,00**	**582 Objek**	**4.085.980.118,00**	**2 Objek**	**2.520.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**582,00**	**4.085.980.118,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	2.000.000.000,00			2 Objek	2.520.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	500 Objek	1.174.485.900,00	582 Objek	4.085.980.118,00			-	-	0,00%	0,00%	582,00	4.085.980.118,00	100,00%	100,00%		
	2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Partisipasi dan Pelaksanaan Event Seni Budaya Tradisional**	**300**	**820.805.793,00**	**50 Dokumen**	**76.577.000,00**	**100 %**	**149.995.687,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**50,00**	**76.577.000,00**	**16,67%**	**9,33%**		
	2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga pelaku kesenian terbina**	**300 Dokumen**	**820.805.793,00**	**50 Dokumen**	**76.577.000,00**	**50 Dokumen**	**149.995.687,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**50,00**	**76.577.000,00**	**16,67%**	**9,33%**		
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	300 Dokumen	820.805.793,00	50 Dokumen	76.577.000,00	50 orang	149.995.687,00	-	-	0,00%	0,00%	50,00	76.577.000,00	16,67%	9,33%		
	2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Sejarah Lokal yang Dilestarikan**	**202 Orang/Dokumen**	**800.000.000,00**	-	-	**100 %**	**284.742.385,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sejarah lokal yang dibina**	**202 Orang/Dokumen**	**800.000.000,00**	-	-	**101 Orang/Dokumen**	**284.742.385,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	200 Orang	600.000.000,00			100 orang	184.749.035,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2 Dokumen	200.000.000,00		-	1 Dokumen	99.993.350,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan Melalui Peraturan Kepala Daerah**	**18 Dokumen**	**1.650.000.000,00**	**5 Dokumen**	**15.013.880,00**	**100 %**	**299.959.906,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**5,00**	**15.013.880,00**	**27,78%**	**0,91%**		
	2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penetapan cagar Budaya Kota Dumai**	**18 Objek/Dokumen**	**1.650.000.000,00**	**5 Objek/Dokumen**	**15.013.880,00**	**8 Objek/Dokumen**	**299.959.906,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**5,00**	**15.013.880,00**	**27,78%**	**0,91%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	12 Objek	700.000.000,00	5 Objek	15.013.880,00	6 Objek	149.989.128,00	-	-	0,00%	0,00%	5,00	15.013.880,00	41,67%	2,14%		
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	6 Dokumen	950.000.000,00			2 Objek	149.970.778,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
JUMLAH PRIORITAS (2) PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU					**1.134.141.186.218,98**		**701.244.022.592,23**		**319.004.914.270,00**		**23.596.435.476,00**				**724.840.458.068,23**				
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	**24,13%**	**7,40%**						
											PREDIKAT KINERJA	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**24,13%**	**7,40%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
3.	**PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI**																		
	1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan**	**11,79 %**	**45.100.000.000,00**	**100,00 %**	**67.264.175.115,16**	**100 %**	**43.780.000.000,00**	**0,35**	**15.279.850.679,00**	**35,00%**	**34,90%**	**100,35**	**82.544.025.794,16**	**100,00%**	**100,00%**	**DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah**	**Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM**	**4320 SR**	**45.100.000.000,00**	**9.906 SR**	**67.264.175.115,16**	**5580 SR**	**43.780.000.000,00**	**0,35**	**15.279.850.679,00**	**35,00%**	**34,90%**	**6732,35**	**82.544.025.794,16**	**100,00%**	**100,00%**		
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5 Dokumen	600.000.000,00	3 Dokumen	1.414.358.648,00	5 Dokumen	600.000.000,00	0,30	119.900.000,00	30,00%	19,98%	3,30	1.534.258.648,00	66,00%	255,71%		
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	320 Unit	2.700.000.000,00	424 Unit	2.863.838.885,65	320 Unit	2.700.000.000,00	0,35	598.374.100,00	35,00%	22,16%	424,35	3.462.212.985,65	132,61%	128,23%		
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4000 SR	33.750.000.000,00	6.732 SR	62.799.323.781,51	4.000 SR	33.750.000.000,00	0,40	12.908.007.745,00	40,00%	38,25%	6732,40	75.707.331.526,51	168,31%	224,32%		
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	200.000.000,00	-	-	1 Unit	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	51 Lembaga	620.000.000,00	-	-	25 Lembaga	500.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang	30.000.000,00	-	-	100 Orang	30.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	16 Unit	7.200.000.000,00	21 Unit	186.653.800,00	15 Unit	6.000.000.000,00	0,28	1.653.568.834,00	28,00%	27,56%	21,28	1.840.222.634,00	132,97%	25,56%		
	1.03.03.2.01.0030	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	100 %						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	#DIV/0!		
	1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**100 %**	**7.754.900.000,00**	**100 %**	**1.725.701.977,00**	**100 %**	**6.462.670.726,00**	**0,10**	**548.716.000,00**	**10,00%**	**8,49%**	**100,10**	**2.274.417.977,00**	**100,10%**	**29,33%**		
	1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah**	**Jumlah Unit Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**7.754.900.000,00**	**100 %**	**1.725.701.977,00**	**7.000 Rumah Tangga**	**6.462.670.726,00**	**0,10**	**548.716.000,00**	**10,00%**	**8,49%**	**100,10**	**2.274.417.977,00**	**100,10%**	**29,33%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	4 Dokumen	1.000.000.000,00	2 Dokumen	425.912.601,00	3 Dokumen	900.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	425.912.601,00	50,00%	42,59%		
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	215 Rumah Tangga	1.720.000.000,00	702 Rumah Tangga	622.840.110,00	142 Rumah Tangga	2.520.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	702,00	622.840.110,00	100,00%	36,21%		
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	900.000.000,00	1 Unit	156.541.400,00	2 Unit	306.059.835,00	0,10	19.706.000,00	10,00%	6,44%	1,10	176.247.400,00	100,00%	19,58%		
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	8800 Rumah Tangga	985.500.000,00	11.593 Rumah Tangga	328.407.866,00	7.000 Rumah Tangga	354.600.600,00	0,25	81.010.000,00	25,00%	22,85%	11593,42	409.417.866,00	100,00%	41,54%		
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	649.400.000,00	1 Unit	192.000.000,00	1 Unit		0,25	448.000.000,00	25,00%	0,00%	1,25	640.000.000,00	100,00%	98,55%		
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	1.000.000.000,00			1 Unit	2.382.010.291,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	5 MA^3/Hari	1.500.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	1.03.05.2.01.0037	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	45 %						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung**	**5 %**	**56.000.000.000,00**	**5 %**	**281.453.910.912,28**	**0**	**108.000.000.000,00**	**0,15**	**13.525.693.956,77**	**15,00%**	**12,52%**	**5,15**	**294.979.604.869,05**	**100,00%**	**100,00%**		
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat	10 Kegiatan	56.000.000.000,00	10 Kegiatan	281.453.910.912,28	10 Kegiatan	108.000.000.000,00	0,15	13.525.693.956,77	15,00%	12,52%	10,15	294.979.604.869,05	100,00%	100,00%		
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),	150 Dokumen	1.000.000.000,00	446 Dokumen	1.070.439.850,00	150 Dokumen	1.000.000.000,00	0,04	40.000.000,00	4,00%	4,00%	448,22	1.110.439.850,00	100,00%	100,00%		
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan	5 Dokumen	40.000.000.000,00	35 Dokumen	264.259.344.788,90	5 Dokumen	92.000.000.000,00	0,10	9.516.266.196,75	10,34%	10,34%	35,10	273.775.610.985,65	100,00%	100,00%		
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	15 Bangunan Gedung	15.000.000.000,00	27 Bangunan Gedung	16.124.126.273,38	15 Bangunan Gedung	15.000.000.000,00	0,26	3.969.427.760,02	26,46%	26,46%	27,26	20.093.554.033,40	100,00%	100,00%		
	1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penataan Bangunan dan lingkungan**	**100 %**	**5.000.000.000,00**	**100 %**	**631.951.950,00**	**100 %**	**5.000.000.000,00**	**0,10**	**377.620.890,00**	**10,00%**	**7,55%**	**100,10**	**1.009.572.840,00**	**100,10%**	**20,19%**		
	1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**5 Lokasi**	**5.000.000.000,00**	**1 Lokasi**	**631.951.950,00**	**5 Lokasi**	**5.000.000.000,00**	**0,10**	**377.620.890,00**	**10,00%**	**7,55%**	**1,10**	**1.009.572.840,00**	**22,00%**	**20,19%**		
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.000.000.000,00	2 Dokumen	415.549.950,00	200,00% Dokumen	1.000.000.000,00	0,45	377.620.890,00	45,00%	37,76%	2,45	793.170.840,00	100,00%	79,32%		
	1.03.09.2.01.0008	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam	4 Dokumen	1.000.000.000,00		-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	4 Kawasan	2.000.000.000,00	1 Kawasan	216.402.000,00	2 Dokumen	4.000.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	216.402.000,00	25,00%	10,82%		
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2 Dokumen	1.000.000.000,00		-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	1.03.09.2.01.0008	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan dengan Peruntukkannya	Persentase kesesuaian Pemanfaatasn ruang dengan peruntukkannya	50,26059157 %						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	#DIV/0!		
	1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**PERSENTASE PENINGKATAN LUAS WILAYAH BANJIR YANG DITANGANI**	**75,14 %**	**110.500.000.000,00**	**51,91 %**	**123.753.256.521,36**	**62,98 %**	**113.742.907.834,00**	**0,21**	**23.431.366.514,01**	**21,00%**	**20,60%**	**52,12**	**147.184.623.035,37**	**69,36%**	**100,00%**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Pengendalian Air yang Dioptimalkan**	**415 KM**	**108.500.000.000,00**	**415,00 KM**	**120.254.357.521,36**	**415 KM**	**113.196.110.834,00**	**0,21**	**23.243.767.514,01**	**21,00%**	**20,53%**	**415,21**	**143.498.125.035,37**	**100,00%**	**100,00%**		
	1 03 02 2.01 0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	5 Dokumen	5.500.000.000,00	21 Dokumen	1.882.187.189,00	5 Dokumen	2.940.570.999,00	0,37	1.096.516.320,00	37,00%	37,29%	21,37	2.978.703.509,00	100,00%	54,16%		
	1 03 02 2.01 0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	7.000.000.000,00	4 Unit	798.010.000,00	1 Unit	2.797.598.000,00	0,10	198.799.000,00	10,00%	7,11%	4,10	996.809.000,00	100,00%	14,24%		TB
	1 03 02 2.01 0107	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	2.000.000.000,00	1 KM	97.113.900,00		-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	97.113.900,00	100,00%	4,86%		
	1 03 02 2.01 0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	5 KM	44.500.000.000,00	3,58 KM	10.191.750.326,90	5 KM	34.067.982.643,00	0,10	2.455.195.969,41	10,00%	7,21%	3,68	12.646.946.296,31	73,52%	28%		
	1 03 02 2.01 0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	5 Unit	5.000.000.000,00	- -	0,00		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1 03 02 2.01 0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	2 Unit	10.000.000.000,00	24 Unit	11.807.211.478,46		-	-	-	0,00%	0,00%	24,00	11.807.211.478,46	100,00%	100,00%		
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,5 KM	5.000.000.000,00	- -	0,00		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	10 KM	10.000.000.000,00	12,49 KM	12.305.070.637,00	10 KM	3.329.445.370,00	0,53	1.756.481.370,00	53,00%	52,76%	13,02	14.061.552.007,00	100,00%	100,00%		
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	25 Unit	4.500.000.000,00	61 Unit	3.162.119.152,00	25 Unit	4.230.972.000,00	0,30	1.264.125.000,00	30,00%	29,88%	61,30	4.426.244.152,00	100,00%	98,36%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 03 02 2.01 0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	400 KM	15.000.000.000,00	1.835 KM	80.010.894.838,00	400 KM	65.829.541.822,00	0,25	16.472.649.854,60	25,00%	25,02%	1.834,81	96.483.544.692,60	100,00%	100,00%		
	1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**2 KM**	**2.000.000.000,00**	**6 KM**	**3.498.899.000,00**	**2 KM**	**546.797.000,00**	**0,35**	**187.599.000,00**	**35,00%**	**34,31%**	**6,35**	**3.686.498.000,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	1 03 02 2.02 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	2.000.000.000,00	61,41 KM	3.498.899.000,00	2 KM	546.797.000,00	0,35	187.599.000,00	35,00%	34,31%	61,76	3.686.498.000,00	100,00%	100,00%		
	1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**4 %**	**48.000.000.000,00**	**4 %**	**59.236.802.016,00**	**4 %**	**38.529.298.913,00**	**0,28**	**10.672.437.188,43**	**28,00%**	**27,70%**	**4,28**	**69.909.239.204,43**	**100,00%**	**100,00%**		
	1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara**	**21 Sistem Drainase Perkotaan**	**48.000.000.000,00**	**14 Sistem Drainase Perkotaan**	**59.236.802.016,00**	**21 Sistem Drainase Perkotaan**	**38.529.298.913,00**	**0,28**	**10.672.437.188,43**	**28,00%**	**27,70%**	**14,28**	**69.909.239.204,43**	**67,99%**	**100,00%**		
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1 Dokumen	380.030.182,00		-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	380.030.182,00	100,00%	38,00%		
	1 03 06 2.01 0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	17 Sistem Drainase Perkotaan	40.000.000.000,00	23,24 Sistem Drainase Perkotaan	45.238.129.574,00	17 Sistem Drainase Perkotaan	35.523.110.413,00	0,27	9.587.704.688,43	27,00%	26,99%	23,51	54.825.834.262,43	100,00%	100,00%		
	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi		-	5,4483 KM	6.624.308.960,00		-	-	-	0,00%	0,00%	5,45	6.624.308.960,00	0,00%	0,00%		
	1 03 06 2.01 0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	4 Sistem Drainase Perkotaan	7.000.000.000,00	1 Sistem Drainase Perko	6.994.333.300,00	4 Sistem Drainase Perkotaan	3.006.188.500,00	0,40	1.084.732.500,00	40,00%	36,08%	1,14	8.079.065.800,00	28,50%	100,00%		
	1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP**	**66,42 %**	**165.896.141.202,00**	**61,41 %**	**447.546.546.921,84**	**63,92 %**	**128.921.093.845,86**	**0,24**	**30.517.158.480,58**	**24,00%**	**23,67%**	**61,65**	**478.063.705.402,42**	**92,81%**	**100,00%**		
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik**	**25 KM**	**147.900.000.000,00**	**50,00 KM**	**447.546.546.921,84**	**25 KM**	**116.981.294.077,86**	**0,26**	**30.517.158.480,58**	**26,09%**	**26,09%**	**50,26**	**478.063.705.402,42**	**100,00%**	**100,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 03 10 2.01 0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	20 Dokumen	2.000.000.000,00	2 Dokumen	99.567.000,00	20 Dokumen	597.785.450,00	0,20	97.785.450,00	20,00%	16,36%	2,20	197.352.450,00	11,00%	9,87%		
	1 03 10 2.01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM	700.000.000,00	4 Dokumen	302.132.600,00	2 KM	600.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	4,00	302.132.600,00	100,00%	43,16%		
	1 03 10 2.01 0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	25 KM	109.000.000.000,00	131,15 KM	341.152.521.136,91	25 KM	93.356.364.759,04	0,26	25.742.643.916,32	26,00%	27,57%	131,41	366.895.165.053,23	100,00%	100,00%		
	1 03 10 2.01 0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		-	1 KM	28.694.851.965,00			-	-	0,00%	0,00%	0,94	28.694.851.965,00	0,00%	0,00%		
	1 03 10 2.01 0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1 KM	500.000.000,00	- -	0,00			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1 03 10 2.01 0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	12 KM	15.000.000.000,00	16 KM	32.774.162.922,78	12 KM	12.814.916.452,80	0,15	1.675.022.468,50	15,00%	13,07%	16,15	34.449.185.391,28	100,00%	100,00%		
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		-	4,4 KM	25.365.226.031,26			-	-	0,00%	0,00%	4,40	25.365.226.031,26	0,00%	0,00%		
	1 03 10 2.01 0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	20 Jembatan	17.700.000.000,00	50 Jembatan	12.040.535.065,40	4 Jembatan	6.797.927.018,68	0,40	2.525.957.634,52	40,00%	37,16%	50,40	14.566.492.699,92	100,00%	82,30%		
	1 03 10 2.01 0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	12 Jembatan	3.000.000.000,00	52 Jembatan	7.117.550.200,49	12 Jembatan	2.814.300.397,34	0,20	475.749.011,24	20,00%	16,90%	52,20	7.593.299.211,73	100,00%	100,00%		
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (UPT)**	**Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)**	**3 KM**	**17.996.141.202,00**		**0,00**	**- -**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
	1 03 10 2.01 0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3 KM	12.000.000.000,00	- -	0,00	- -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1 03 10 2.01 0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	10 Jembatan	1.496.141.202,00	- -	0,00	- -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1 03 10 2.01 0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	15 Jembatan	3.000.000.000,00	- -	0,00	- -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1 03 10 2.01 0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,5 KM	1.500.000.000,00	- -	0,00	- -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (UPT WILAYAH I KELAS A)**	**Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)**		**-**		**0,00**	**1,00 KM**	**4.188.931.743,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun					3,00 KM	4.106.431.743,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1 03 10 2.01 0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun					15,00 Jembatan	82.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1 03 10 2.01 0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (UPT WILAYAH II KELAS A)**	**Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)**		**-**		**0,00**	**1 KM**	**1.754.101.800,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	0,00%	**0,00%**		
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun					0,25 KM	1.688.101.800,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1 03 10 2.01 0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun					2 Jembatan	66.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1 03 10 2.01 0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (UPT WILAYAH III KELAS A)**	**Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)**		**-**		**0,00**	**1,00 KM**	**5.996.766.225,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun					0,25 KM	5.840.766.225,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1 03 10 2.01 0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun					5,00 Jembatan	156.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1 03 10 2.01 0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**PERSENTASE PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**85,00 %**	**3.800.000.000,00**	**15 %**	**300.739.129,00**	**65 %**	**161.896.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**15,00**	**300.739.129,00**	**17,65%**	**7,91%**		
	1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan**	**60 Orang**	**500.000.000,00**	**60 Orang**	**184.062.129,00**	**60 Orang**	**136.241.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**60,00**	**184.062.129,00**	**100,00%**	**36,81%**		
	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan		-	1 Kegiatan	3.610.000,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	3.610.000,00	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 03 11 2.01 0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	60 Orang	200.000.000,00	60 Orang	67.090.329,00	60 Orang	106.363.000,00	-	-	0,00%	0,00%	60,00	67.090.329,00	100,00%	33,55%		
	1.03.11.2.01.0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	300.000.000,00	1 Lembaga	113.361.800,00	1 Lembaga	29.878.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	113.361.800,00	100,00%	37,79%		
	1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**1.200.000.000,00**	**1 Dokumen**	**74.817.000,00**	**1 Dokumen**	**25.655.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**74.817.000,00**	**100,00%**	**6,23%**		
	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		-	1 Laporan	38.817.000,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	38.817.000,00	0,00%	0,00%		
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	450.000.000,00	- -	0,00			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	300.000.000,00	- -	0,00			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	0 Dokumen	-	1 Dokumen	36.000.000,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	36.000.000,00	0,00%	0,00%		
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	450.000.000,00	- -	0,00	1,00 Dokumen	25.655.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.03.11.2.03	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**2 Laporan**	**1.500.000.000,00**	**1 Laporan**	**3.720.000,00**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**3.720.000,00**	**50,00%**	**0,25%**		
	1.03.11.2.03.01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan dan SOP Penyelenggaraan IUJK Nasional	- Dokumen	-	1 Dokumen	2.470.000,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	2.470.000,00	0,00%	0,00%		
	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	750.000.000,00	- -	0,00			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	- Dokumen	-	1 Dokumen	1.250.000,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	1.250.000,00	0,00%	0,00%		
	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	1 Dokumen	750.000.000,00	- -	0,00			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib usaha, Tertib Penyelengaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**1 Laporan**	**600.000.000,00**	**1 Laporan**	**38.140.000,00**		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**38.140.000,00**	**100,00%**	**6,36%**		
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	38.140.000,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	38.140.000,00	100,00%	12,71%		
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	300.000.000,00	-	0,00			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			-	-	0,00			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**100 %**	**3.794.505.802,00**	**100 %**	**217.503.567,00**	**100 %**	**525.135.346,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**217.503.567,00**	**100,00%**	**5,73%**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 04 02 2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota**	**18 Dokumen**	**1.105.450.000,00**	**6 Dokumen**	**91.443.567,00**	**4 Dokumen**	**175.131.946,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**6,00**	**91.443.567,00**	**33,33%**	**8,27%**		
	1 04 02 2.01 0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5 Dokumen	345.450.000,00	3 Dokumen	74.667.567,00	1 Dokumen	66.221.500,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	74.667.567,00	60,00%	21,61%		Tunda Bayar
	1 04 02 2.01 0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	4 Dokumen	160.000.000,00	2 Dokumen	5.800.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2,00	5.800.000,00	50,00%	3,63%		Tunda Bayar
	1 04 02 2.01 0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	3 Dokumen	150.000.000,00	- Dokumen	-	1 Dokumen	13.232.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tunda Bayar
	1 04 02 2.01 0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Dokumen	300.000.000,00	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 04 02 2.01 0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	10.976.000,00	1 Dokumen	83.678.446,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	10.976.000,00	33,33%	7,32%		Tunda Bayar
	1 04 02 2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**150 Orang**	**300.000.000,00**	**50 Orang**	**6.060.000**	**50 Orang**	**39.103.400,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**50,00**	**6.060.000,00**	**33,33%**	**2,02%**		
	1 04 02 2.02 0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukare lawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	150 Orang	300.000.000,00	50 Orang	6.060.000,00	50 Orang	39.103.400,00	0,00	-	0,00%	0,00%	50,00	6.060.000,00	33,33%	2,02%		Tunda Bayar
	1 04 02 2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**	**30 Unit Rumah**	**2.100.000.000,00**	**10 Unit Rumah**	**120.000.000**	**3 Unit Rumah**	**310.900.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00**	**120.000.000,00**	**33,33%**	**5,71%**		
	1 04 02 2.03 0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	30 Unit Rumah	2.100.000.000,00	10 Unit Rumah	120.000.000,00	3 Unit Rumah	310.900.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	10,00	120.000.000,00	33,33%	5,71%		Tunda Bayar
	1 04 02 2.07	**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**	**Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung**	**3 Laporan**	**289.055.802,00**	**0 Laporan**	**-**	**0 Laporan**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
	1 04 02 2.07 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	3 Laporan	289.055.802,00	- Laporan	-	0 Laporan	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		-
	1 04 03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani**	**100 %**	**83.193.871.431,00**	**55,48 %**	**20.197.097.156,64**	**78 %**	**2.569.717.157,51**	**0,04**	**111.535.000,01**	**4,34%**	**4,34%**	**55,52**	**20.308.632.156,65**	**55,52%**	**24,41%**		
	1 04 03 2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**9 Dokumen**	**3.528.727.267,00**	**3 Dokumen**	**352.790.634,00**	**3 Dokumen**	**468.388.850,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**3,00**	**352.790.634,00**	**33,33%**	**10,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 04 03 2.02 0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	9 Laporan	2.698.858.000,00	3 Laporan	255.419.682,00	3 Laporan	304.371.850,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	255.419.682,00	33,33%	9,46%		Tunda Bayar
	1 04 03 2.02 0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	3 Kelompok Masyarakat	429.869.267,00	1 Kelompok Masyarakat	752.000,00	1 Kelompok Masyarakat	29.275.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	752.000,00	33,33%	0,17%		Tunda Bayar
	1 04 03 2.02 0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	450 Rumah Tangga	400.000.000,00	250 Rumah Tangga	96.618.952,00	100 Rumah Tangga	134.742.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	250,00	96.618.952,00	55,56%	24,15%		Tunda Bayar
	1 04 03 2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**216,73 Ha**	**79.665.144.164,00**	**67,02 Ha**	**19.844.306.522,64**	**168,76 Ha**	**2.101.328.307,51**	**0,05**	**111.535.000,01**	**5,31%**	**5,31%**	**67,07**	**19.955.841.522,65**	**30,95%**	**25,05%**		
	1 04 03 2.03 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	516 Unit Rumah	33.800.000.000,00	18 Unit Rumah	439.138.532,00	21 Unit Rumah	770.757.701,00	0,00	-	0,00%	0,00%	18,00	439.138.532,00	3,49%	1,30%		Tunda Bayar
	1 04 03 2.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	7 Laporan	1.765.113.014,00	4 Laporan	431.237.570,00	1 Laporan	28.395.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	4,00	431.237.570,00	57,14%	24,43%		-
	1 04 03 2.03 0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	3 Dokumen	90.000.000,00	1 Dokumen	20.883.500,00	1 Dokumen	12.450.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	20.883.500,00	33,33%	23,20%		Tunda Bayar
	1 04 03 2.03 0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	216,73 Ha	9.600.000.000,00	67,02 Ha	417.522.772,64	168,76 Ha	119.928.030,51	1,00	111.535.000,01	100,00%	93,00%	68,02	529.057.772,65	31,38%	5,51%		Tunda Bayar
	1 04 03 2.03 0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha	639 Unit Rumah	34.410.031.150,00	373 Unit Rumah	18.535.524.148,00	13 Unit Rumah	1.169.797.576,00	0,00	-	0,00%	0,00%	373,00	18.535.524.148,00	58,37%	53,87%		Tunda Bayar

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 04 04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni**	**100 %**	**19.500.000.000,00**	**45,50 %**	**2.335.325.084,00**	**73 %**	**2.065.731.870,00**	**0,04**	**90.000.000,00**	**4,36%**	**4,36%**	**45,54**	**2.425.325.084,00**	**45,54%**	**12,44%**		
	1 04 04 2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota**	**300 Unit**	**19.500.000.000,00**	**70 Unit**	**2.335.325.084**	**12 Unit**	**2.065.731.870,00**	**0,04**	**90.000.000,00**	**4,36%**	**4,36%**	**70,04**	**2.425.325.084,00**	**23,35%**	**12,44%**		
	1 04 04 2.01 0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	300 Unit	19.500.000.000,00	70 Unit	2.335.325.084,00	12 Unit	2.065.731.870,00	0,10	90.000.000,00	10,00%	4,36%	70,10	2.425.325.084,00	23,37%	12,44%		Tunda Bayar
	1 04 05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**100 %**	**44.090.086.641,00**	**71,43 %**	**13.341.269.127,50**	**78,57 %**	**5.376.343.829,58**	**0,25**	**1.318.732.625,39**	**25,00%**	**24,53%**	**71,68**	**14.660.001.752,89**	**71,68%**	**33,25%**		
	1 04 05 2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan**	**28 Lokasi**	**44.090.086.641,00**	**38 Lokasi**	**13.341.269.127,50**	**12 Lokasi**	**5.376.343.829,58**	**0,25**	**1.318.732.625,39**	**25,00%**	**24,53%**	**38,25**	**14.660.001.752,89**	**100,00%**	**33,25%**		
	1 04 05 2.01 0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	1.481.617.093,00	2 Dokumen	428.689.093,00	1 Dokumen	84.950.000,00	1,00	84.950.000,00	100,00%	100,00%	3,00	513.639.093,00	60,00%	34,67%		Tunda Bayar
	1 04 05 2.01 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	28 Lokasi	41.154.431.298,00	38 Lokasi	12.779.569.934,50	12 Lokasi	5.249.208.329,58	0,24	1.233.782.625,39	24,00%	23,50%	38,24	14.013.352.559,89	100,00%	34,05%		Tunda Bayar
	1 04 05 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	8 Laporan	1.454.038.250,00	4 Laporan	133.010.100,00	1 Laporan	42.185.500,00	0,00	-	0,00%	0,00%	4,00	133.010.100,00	50,00%	9,15%		Tunda Bayar
	1 04 06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN**	**Persentase Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan**	**100 %**	**1.630.000.000,00**	**60 %**	**123.025.780,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**60,00**	**123.025.780,00**	**60,00%**	**7,55%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 04 06 2.01	**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana**	**Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil**	**4 Laporan**	**1.630.000.000,00**	**2 Laporan**	**123.025.780,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**123.025.780,00**	**50,00%**	**7,55%**		
	1 04 06 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	4 Laporan	1.630.000.000,00	2 Laporan	123.025.780,00	0 Laporan	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2,00	123.025.780,00	50,00%	7,55%		-
	02.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Darat yang Layak**	**100 %**	**311.839.390.227,00**	**100 %**	**128.655.937.482,99**	**100 %**	**84.260.290.225,00**	**0,30**	**21.662.804.235,00**	**30,00%**	**25,71%**	**100,30**	**150.318.741.717,99**	**100,00%**	**48,20%**	**DINAS PERHUBUNGAN**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
	02.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**43 dokumen**	**4.241.321.335,00**	**23 dokumen**	**2.354.042.382,00**	**6 dokumen**	**550.000.000,00**	**0,80**	**399.884.955,00**	**80,00%**	**72,71%**	**23,80**	**2.753.927.337,00**	**55,35%**	**64,93%**		
	02.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	40 dokumen	4.041.321.335,00	23 dokumen	2.354.042.382,00	5 dokumen	500.000.000,00	0,80	399.884.955,00	80,00%	79,98%	23,80	2.753.927.337,00	59,50%	68,14%		
	02.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 dokumen	200.000.000,00		-	1 dokumen	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	02.15.02.2.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk		-					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	02.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**10758 unit**	**269.861.139.499,00**	**5736 unit**	**109.360.239.976,94**	**2.615 unit**	**74.833.290.225,00**	**0,30**	**21.262.919.280,00**	**30,00%**	**28,41%**	**5.736,30**	**130.623.159.256,94**	**53,32%**	**48,40%**		
	02.15.02.2.02,0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	21 unit	36.375.717.006,00	10 unit	16.465.413.507,32	5 unit	7.850.000.000,00	1,00	7.953.150.412,00	100,00%	100,00%	10,45	24.418.563.919,32	49,76%	67,13%		
	02.15.02.2.02,0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7744 unit	100.032.844.593,00	4449 unit	27.834.750.597,93	2.000 unit	34.271.288.453,00	0,30	5.268.489.290,00	30,00%	15,37%	4.449,30	33.103.239.887,93	57,45%	33,09%		
	02.15.02.2.02,0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	41 unit	5.307.320.431,00	14 unit	1.476.451.880,24	10 unit	2.500.000.000,00	0,10	69.900.000,00	10,00%	2,80%	14,10	1.546.351.880,24	34,39%	29,14%		
	02.15.02.2.02,0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2952 unit	128.145.257.469,00	1263 unit	63.583.623.991,45	600 unit	30.212.001.772,00	0,30	7.971.379.578,00	30,00%	26,38%	1.263,30	71.555.003.569,45	42,79%	55,84%		Tunda Bayar

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	02.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**2 unit**	**450.000.000,00**	**- unit**	**49.950.000,00**	**1 unit**	**300.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**49.950.000,00**	**0,00%**	**11,10%**		
	02.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	49.950.000,00		-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	49.950.000,00	100,00%	99,90%		
	02.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Terminal Tipe C yang terbangun dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2 unit	400.000.000,00		-	1 unit	300.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	02.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah Dokumen/Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**11 dokumen**	**10.400.918.111,00**	**5 dokumen**	**4.940.034.658,11**	**2 dokumen**	**2.400.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**5,00**	**4.940.034.658,11**	**45,45%**	**47,50%**		
	02.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7 dokumen	6.558.009.611,00	3 dokumen	2.973.285.840,26	1 dokumen	1.600.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	2.973.285.840,26	42,86%	45,34%		
	02.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	3.842.908.500,00	2 laporan	1.966.748.817,85	1 laporan	800.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	1.966.748.817,85	50,00%	51,18%		
	02.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Dokumen/Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**9 laporan**	**10.996.058.791,00**	**4 laporan**	**6.175.817.408,94**	**4 laporan**	**2.002.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4,00**	**6.175.817.408,94**	**44,44%**	**56,16%**		
	02.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	65 unit	7.513.094.210,00	58 unit	5.153.722.025,00	2 unit	1.000.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	58,00	5.153.722.025,00	89,23%	68,60%		
	02.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 orang	339.249.583,00	8 orang	111.621.688,00	5 orang	90.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	8,00	111.621.688,00	44,44%	32,90%		
	02.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	200 unit	200.000.000,00		-	100 unit	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	02.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 dokumen	467.137.000,00	2 dokumen	67.137.000,00	1 dokumen	150.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	67.137.000,00	100,00%	14,37%		
	02.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 laporan	12.000.000,00		-	1 laporan	12.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	02.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	69 unit	2.103.377.998,00	15 unit	732.162.195,94	20 unit	550.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	15,00	732.162.195,94	21,74%	34,81%		
	02.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 laporan	161.200.000,00	1 laporan	61.194.500,00	1 laporan	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	61.194.500,00	33,33%	37,96%		
	02.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 laporan	200.000.000,00	1 laporan	49.980.000,00	1 laporan	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	49.980.000,00	25,00%	24,99%		
	02.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**17 dokumen**	**6.763.836.369,00**	**8 dokumen**	**2.491.281.374,00**	**4 dokumen**	**1.650.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**8,00**	**2.491.281.374,00**	**47,06%**	**36,83%**		
	02.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 laporan	5.041.959.874,00	3 laporan	2.224.322.874,00	1 laporan	1.000.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	2.224.322.874,00	60,00%	44,12%		
	02.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4 unit	300.000.000,00		-	2 unit	150.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	02.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 laporan	300.000.000,00	1 laporan	76.237.000,00	1 laporan	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	76.237.000,00	33,33%	25,41%		
	02.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 laporan	307.556.495,00	3 laporan	77.230.000,00	1 laporan	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	77.230.000,00	60,00%	25,11%		
	02.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	21 unit	250.820.000,00		-	10 unit	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	02.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 laporan	563.500.000,00	1 laporan	113.491.500,00	1 laporan	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	113.491.500,00	25,00%	20,14%		
	02.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**9 dokumen**	**678.965.200,00**	**2 dokumen**	**99.855.600,00**	**3 dokumen**	**235.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**99.855.600,00**	**22,22%**	**14,71%**		
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3 laporan	99.109.600,00		-	1 laporan	20.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kompetensi dan Sertifikasi	4 orang	130.000.000,00		-	2 orang	65.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	2 laporan	100.000.000,00		-	1 laporan	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	4 dokumen	349.855.600,00	2 dokumen	99.855.600,00	1 dokumen	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	99.855.600,00	50,00%	28,54%		
	2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**9 dokumen**	**480.000.000,00**		-	**3 dokumen**	**160.000.000,00**	**-**	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3 laporan	150.000.000,00		-	1 laporan	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 laporan	90.000.000,00		-	1 laporan	30.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	6 orang	90.000.000,00		-	2 orang	30.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	3 laporan	150.000.000,00		-	1 laporan	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	02.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**4 laporan**	**7.149.170.922,00**	**3 laporan**	**3.107.124.838,00**	**2 laporan**	**1.765.000.000,00**	**-**	-	**0,00%**	**0,00%**	**3,00**	**3.107.124.838,00**	**75,00%**	**43,46%**		
	02.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 laporan	5.949.170.922,00	3 laporan	3.107.124.838,00	1 laporan	1.000.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	3.107.124.838,00	75,00%	52,23%		
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	1.200.000.000,00		-	1 unit	765.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	02.15.02.2.10	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**6 dokumen**	**415.000.000,00**	**1 dokumen**	**50.000.000,00**	**2 dokumen**	**165.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**50.000.000,00**	**16,67%**	**12,05%**		
	2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	150.000.000,00		-	1 dokumen	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	265.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	65.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	50.000.000,00	25,00%	18,87%		
	02.15.02.2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**6 dokumen**	**252.980.000,00**	**1 dokumen**	**27.591.245,00**	**2 dokumen**	**100.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**27.591.245,00**	**16,67%**	**10,91%**		
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	125.000.000,00		-	1 dokumen	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	02.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	127.980.000,00	1 dokumen	27.591.245,00	1 dokumen	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	27.591.245,00	33,33%	21,56%		
	2.15.02.2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)**	**Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**2 laporan**	**150.000.000,00**		-	**1 laporan**	**100.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	2 laporan	150.000.000,00		-	1 laporan	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Laut yang Layak sesuai Kewenangan Kota**	**5 %**	**8.600.000.000,00**	**2 dokumen**	**149.940.230,00**	**1 dokumen**	**150.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**149.940.230,00**	**40,00%**	**1,74%**		
	02.15.03.2.10	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**4 dokumen**	**600.000.000,00**	**2 dokumen**	**149.940.230,00**	**1 dokumen**	**150.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**149.940.230,00**	**50,00%**	**24,99%**		
	02.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 dokumen	600.000.000,00	2 dokumen	149.940.230,00	1 dokumen	150.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	149.940.230,00	50,00%	24,99%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.15.03.2.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**1 unit**	**8.000.000.000,00**		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 unit	8.000.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Persentase Penyediaan Rencana Induk Infrastruktur Perkeretaapian yang Terintegrasi sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**13 dokumen**	**2.000.000.000,00**		-	**4 dokumen**	**1.000.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.15.05.2.01	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**Jumlah Dokumen/Laporan Rencana Induk Perkeretaapian**	**3 dokumen**	**900.000.000,00**		-	**3 dokumen**	**900.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.15.05.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 dokumen	700.000.000,00		-	1 dokumen	700.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.05.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 dokumen	100.000.000,00		-	1 dokumen	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.05.2.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	1 laporan	100.000.000,00		-	1 laporan	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.05.2.02	**Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen/Laporan Rencana Induk Perkeretaapian**	**2 dokumen**	**200.000.000,00**		-	**1 dokumen**	**100.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.15.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	100.000.000,00		-	1 dokumen	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	1 laporan	100.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.15.05.2.03	**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**2 dokumen**	**300.000.000,00**		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.15.05.2.03.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	200.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.05.2.03.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.05.2.04	**Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**	**1 dokumen**	**200.000.000,00**		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.15.05.2.04.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dokumen	200.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.05.2.05	**Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**2 dokumen**	**150.000.000,00**		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.15.05.2.05.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	100.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.05.2.05.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	50.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.15.05.2.06	**Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota**	**1 dokumen**	**100.000.000,00**		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.15.05.2.06.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dokumen	100.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.05.2.07	**Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2 dokumen**	**150.000.000,00**		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.15.05.2.07.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	100.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.15.05.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	50.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Peningkatan penyelenggaraan Penataan Ruang**	**50,26 %**	**10.000.000.000,00**	**50,26 %**	**5.806.866.802,07**		**6.411.702.554,00**	**0,15**	**966.841.556,63**	**15,08%**	**15,08%**	**50,41**	**6.773.708.358,70**	**100,00%**	**67,74%**	**DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**2 Dokumen**	**1.600.000.000,00**	**2 Dokumen**	**546.643.393,55**	**2 Dokumen**	**1.326.624.364,00**	**0,41**	**547.376.284,95**	**41,26%**	**41,26%**	**2,41**	**1.094.019.678,50**	**100,00%**	**68,38%**		
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	700.000.000,00	2 Dokumen	148.607.693,55	1 Dokumen	700.000.000,00	0,50	346.751.284,95	50,00%	49,54%	2,50	495.358.978,50	100,00%	70,77%		
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	4.500.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	0,50	150.000.000,00	50,00%	50,00%	1,50	154.500.000,00	100,00%	51,50%		
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	600.000.000,00	104 Orang	393.535.700,00	450 Orang	326.624.364,00	0,20	50.625.000,00	20,00%	15,50%	104,20	444.160.700,00	100,00%	74,03%		
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**2.000.000.000,00**	**2 Dokumen**	**1.454.964.629,52**		**1.400.000.000,00**	**0,23**	**316.065.271,68**	**23,00%**	**22,58%**	**2,23**	**1.771.029.901,20**	**100,00%**	**88,55%**		
1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000.000.000,00	2 Dokumen	1.454.964.629,52			-	-	0,00%	0,00%	2,00	1.454.964.629,52	100,00%	100,00%		
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000.000.000,00			1 Dokumen	900.000.000,00	0,40	316.065.271,68	40,00%	35,12%	0,40	316.065.271,68	40,00%	31,61%		
1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota					1 Dokumen	500.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**1.600.000.000,00**	**2 Dokumen**	**795.014.895,00**	**1 Dokumen**	**370.349.275,00**	**0,20**	**74.900.000,00**	**20,22%**	**20,22%**	**2,20**	**869.914.895,00**	**100,00%**	**54,37%**		
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	200.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	7 Dokumen	1.400.000.000,00	2 Dokumen	795.014.895,00	7 Dokumen	370.349.275,00	0,30	74.900.000,00	30,00%	20,22%	2,30	869.914.895,00	32,86%	62,14%		
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**3 Dokumen**	**4.800.000.000,00**	**4 Dokumen**	**3.010.243.884,00**	**5 Dokumen**	**3.314.728.915,00**	**0,01**	**28.500.000,00**	**1,00%**	**0,86%**	**4,01**	**3.038.743.884,00**	**100,00%**	**63,31%**		
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	500.000.000,00	3 Berita Acara	283.330.844,00	1 Berita Acara	250.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	283.330.844,00	100,00%	56,67%		
1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	500.000.000,00		-	1 Dokumen	250.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	56.685.695,00	1 Dokumen	485.000.000,00	0,10	9.000.000,00	10,00%	1,86%	1,10	65.685.695,00	100,00%	10,95%		
1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan	Jumlah Kasus Yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	600.000.000,00		-	1 Kasus	300.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	500.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	2.100.000.000,00	3 Dokumen	2.670.227.345,00	1 Dokumen	2.029.728.915,00	0,10	19.500.000,00	10,00%	0,96%	3,10	2.689.727.345,00	100,00%	100,00%		
	1.03.12.2.04.0005	Terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	47,22 %						-	-	0,00%		0,00	-	0,00%			
	02:10:04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**80 %**	**951.665.000,00**	**80 %**	**159.071.538,00**	**80 %**	**786.500.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**80,00**	**159.071.538,00**	**100,00%**	**16,72%**		URUSAN PERTANAHAN
	2.10.1.03.2.104.2.01.	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**4 Dokumen**	**951.665.000,00**	**1 Dokumen**	**159.071.538,00**	**1 Dokumen**	**786.500.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**159.071.538,00**	**25,00%**	**16,72%**		
	2.10.1.03.2.104.2.01.0001.	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	512.435.000,00	1 Dokumen	58.157.000,00	2 Dokumen	297.500.000,00	0,50	-	50,00%	0,00%	1,50	58.157.000,00	100,00%	11,35%		Realisasi fisik 1 dokumen
	2.10.1.03.2.104.2.01.00 02.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	439.230.000,00	2 Berita Acara	100.914.538,00	2 Berita Acara	489.000.000,00	0,50	-	50,00%	0,00%	2,50	100.914.538,00	100,00%	22,98%		Realisasi fisik 1 dokumen
	02:10:10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Penatagunaan Tanah**	**80 %**	**1.537.305.000,00**	**80 %**	**187.751.488,00**	**80 %**	**1.397.550.000,00**	**0,33**	**5.000.000,00**	**33,00%**	**0,36%**	**80,33**	**192.751.488,00**	**100,00%**	**12,54%**		
	2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**3 Laporan**	**1.537.305.000,00**	**4 Laporan**	**187.751.488,00**	**1 Laporan**	**1.397.550.000,00**	**0,33**	**5.000.000,00**	**33,00%**	**0,36%**	**4,33**	**192.751.488,00**	**100,00%**	**12,54%**		
	2.10.1.03.2.110.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	512.435.000,00	4 Laporan	187.751.488,00	3 Laporan	1.200.000.000,00	0,33	5.000.000,00	33,33%	0,42%	4,33	192.751.488,00	100,00%	37,61%		
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	512.435.000,00			3 Dokumen	150.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	512.435.000,00			3 Dokumen	47.550.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PERSENTASE PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**100 %**	**6.572.017.000,00**	**40 %**	**2.382.986.075,00**	**85 %**	**1.327.500.000,00**	**0,33**	**432.000.000,00**	**33,00%**	**32,54%**	**40,33**	**2.814.986.075,00**	**40,33%**	**42,83%**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**	**Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup**	**1 Dokumen**	**3.005.757.000,00**	**1 Dokumen**	**490.586.755,00**	**1 Dokumen**	**527.500.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**490.586.755,00**	**100,00%**	**16,32%**		
	2.11.03.3.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/kota	jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 Dokumen	551.628.500,00	1 Dokumen	490.586.755,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	490.586.755,00	100,00%	88,93%		
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang di	1 Dokumen	1.500.000.000,00		-	1 Dokumen	527.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	954.128.500,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kota**	**1 Dokumen**	**3.566.260.000,00**	**1 Dokumen**	**1.892.399.320,00**	**1 Dokumen**	**800.000.000,00**	**0,54**	**432.000.000,00**	**54,00%**	**54,00%**	**1,54**	**2.324.399.320,00**	**100,00%**	**65,18%**		
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1.966.260.000,00				-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak / resiko lingkungan	1 Dokumen	1.600.000.000,00		-	3 Dokumen	800.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak / resiko lingkungan		-	1 Dokumen	1.892.399.320,00		-	0,54	432.000.000,00	54,00%	0,00%	1,54	2.324.399.320,00	0,00%	0,00%		
	2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**85 %**	**14.468.161.570,00**	**20 %**	**2.185.135.999,00**	**85 %**	**4.360.000.000,00**	**0,16**	**684.920.462,00**	**16,00%**	**15,71%**	**20,16**	**2.870.056.461,00**	**23,71%**	**19,84%**		
	2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**85 %**	**11.615.161.570,00**	**40 %**	**1.904.240.689,00**	**75 %**	**3.510.000.000,00**	**0,18**	**620.369.671,00**	**18,00%**	**17,67%**	**40,18**	**2.524.610.360,00**	**47,27%**	**21,74%**		
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase data dokumen laporan dan verifikasi emisi GRK, persentase terpantaunya perubahan iklim	1 dokumen	1.412.500.000,00	1 dokumen	68.201.900,00	1 dokumen	310.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	68.201.900,00	100,00%	4,83%		
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pencegahan pencemaran air dan udara	1 Kegiatan	3.882.169.820,00	1 Kegiatan	1.616.475.705,00	1 Kegiatan	1.000.000.000,00	0,65	620.369.671,00	65,00%	62,04%	1,65	2.236.845.376,00	100,00%	57,62%		
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 dokumen	2.400.000.000,00		-	1 dokumen	800.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan Dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 dokumen	800.000.000,00		-	15 dokumen	400.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	1 dokumen	3.120.491.750,00	100 dokumen	219.563.084,00	1 dokumen	1.000.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00	219.563.084,00	100,00%	7,04%		
	2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan**	**100 %**	**1.803.000.000,00**	**100 %**	**190.555.110,00**	**70 %**	**500.000.000,00**	**0,05**	**24.420.860,00**	**5,00%**	**4,88%**	**100,05**	**214.975.970,00**	**100,00%**	**11,92%**		
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat.	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Laporan	683.000.000,00	1 Laporan	76.773.603,00	3 Laporan	150.000.000,00	0,30	23.376.200,00	30,00%	15,58%	1,30	100.149.803,00	43,33%	14,66%		
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	3 Titik	1.120.000.000,00	1 Titik	113.781.507,00	3 Titik	350.000.000,00	0,02	1.044.660,00	2,00%	0,30%	1,02	114.826.167,00	34,00%	10,25%		
	2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemaran dengan dampak di kabupaten/kota**	**100 %**	**1.050.000.000,00**	**100 %**	**90.340.200,00**	**75 %**	**350.000.000,00**	**0,11**	**40.129.931,00**	**11,47%**	**11,47%**	**100,11**	**130.470.131,00**	**100,00%**	**12,43%**		
	2.11.03.2.03.0012	koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemaran di kabupaten/kota.	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemaran dengan dampak di kabupaten/kota	1 Kegiatan	400.000.000,00	1 Kegiatan	53.962.200,00	1 Kegiatan	150.000.000,00	0,02	3.048.300,00	2,03%	2,03%	1,02	57.010.500,00	100,00%	14,25%		
	2.11.03.2.03.0013	koordinasi dan sinkronisasi rehabiltasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemaran dengan dampak di kabupaten/kota	1 kegiatan	650.000.000,00	1 kegiatan	36.378.000,00	1 kegiatan	200.000.000,00	0,20	37.081.631,00	20,00%	18,54%	1,20	73.459.631,00	100,00%	11,30%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**	**100 %**	**48.552.494.801,00**	**60 %**	**26.430.156.973,00**	**75,00 %**	**10.000.000.000,00**	**0,20**	**1.077.945.000,00**	**20,00%**	**10,78%**	**60,20**	**27.508.101.973,00**	**60,20%**	**56,66%**		
	2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Luas taman kota dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara, Peresentase terbangunnya taman-taman di dlam kota dan tertatanya**	**25 ha**	**48.552.494.801,00**	**60 ha**	**26.430.156.973,00**	**25,75 ha**	**10.000.000.000,00**	**0,20**	**1.077.945.000,00**	**20,00%**	**10,78%**	**60,20**	**27.508.101.973,00**	**100,00%**	**56,66%**		
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Keanekaragaman Hayati		1 Dokumen	2.243.740.000,00		238.471.780,00	1 Dokumen	500.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	#VALUE!	0,00%	0,00%		
	2.11.042.01.0004	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota	25,25 ha	46.308.754.801,00	25 ha	26.191.685.193,00	25,25 ha	9.500.000.000,00	0,20	1.077.945.000,00	20,00%	11,35%	25,20	27.269.630.193,00	99,80%	58,89%		
	2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**PERSENTASE PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**	**70 %**	**873.517.954,00**	**60 %**	**52.222.104,00**	**75,00 %**	**286.745.627,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**60,00**	**52.222.104,00**	**85,71%**	**5,98%**		
	2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara limbah B3**	**Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Berbahaya dan Beracun**	**70 %**	**563.741.254,00**		-	1 **Dokumen**	**186.745.627,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	-	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintergrasi secara elektronik	1 Dokumen	113.741.254,00		-	1 Dokumen	36.745.627,00	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%		
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	450.000.000,00		-	1 Laporan	150.000.000,00	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%		
	2.11.05.2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah analisa sumur pantau yang terkelola**	**100 %**	**309.776.700,00**	**60 %**	**52.222.104,00**	**80 %**	**100.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**60,00**	**52.222.104,00**	**60,00%**	**16,86%**		
	2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	134.500.000,00			1 dokumen	50.000.000,00	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%		
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintahan provinsi dalam rangka pengangkutan pemanfaatan pengolahan dan/atau penimbunan	1 dokumen	175.276.700,00	1 dokumen	52.222.104,00	1 dokumen	50.000.000,00	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	52.222.104,00	100,00%	29,79%		
	2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**100 %**	**3.433.380.000,00**	**60 %**	**267.139.319,00**	**80 %**	**350.000.000,00**	**0,02**	**1.050.000,00**	**2,00%**	**0,30%**	**60,02**	**268.189.319,00**	**60,02%**	**7,81%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**	**Jumlah kegiatan pengawasan dokumen lingkungan terhadap kegiatan/badan usaha di Kota Dumai**	**100 %**	**3.433.380.000,00**	**60 %**	**267.139.319,00**	**85 %**	**350.000.000,00**	**0,02**	**1.050.000,00**	**2,00%**	**0,30%**	**60,02**	**268.189.319,00**	**60,02%**	**7,81%**		
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15 Dokumen	2.325.000.000,00	15 Dokumen	168.146.821,00		-	-	-	0,00%	0,00%	15,00	168.146.821,00	100,00%	7,23%		
	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD		-			1 Dokumen	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Dl Terbitkan Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	15 Badan Usaha	1.108.380.000,00	12 Badan Usaha	98.992.498,00	12 Badan Usaha	350.000.000,00	0,02	1.050.000,00	2,00%	0,30%	12,02	100.042.498,00	80,13%	9,03%		
	2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**PERSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**100 %**	**2.589.010.099,00**	**35 %**	**175.183.845,00**	**80 %**	**800.000.000,00**	**0,65**	**94.481.900,00**	**65,00%**	**11,81%**	**35,65**	**269.665.745,00**	**35,65%**	**10,42%**		
	2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**2.589.010.099,00**	**35 %**	**175.183.845,00**	**75 %**	**800.000.000,00**	**0,65**	**94.481.900,00**	**65,00%**	**11,81%**	**35,65**	**269.665.745,00**	**35,65%**	**10,42%**		
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli	Terlaksananya pendampingan gerakan peduli lingkungan	1 dokumen	839.070.799,00	1 dokumen	79.253.649,00	1 dokumen	250.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	79.253.649,00	100,00%	9,45%		
	2.11.08.2.01.0003	Penyelengaggaran penyuluhan dan Kampanye	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	50 Org	300.000.000,00		-	50 Org	100.000.000,00	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	50 Keluarga	549.939.300,00	50 Keluarga	95.930.196,00	50 Keluarga	150.000.000,00	0,65	94.481.900,00	65,00%	62,99%	50,65	190.412.096,00	100,00%	34,62%		
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat.	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	900.000.000,00			1 Lembaga	300.000.000,00	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	100,00%	0,00%		
	2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**PERSENTASE PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**100 %**	**955.413.036,00**	**40 %**	**164.282.150,00**	**80 %**	**300.000.000,00**	**0,02**	**4.500.000,00**	**2,00%**	**1,50%**	**40,02**	**168.782.150,00**	**100,00%**	**17,67%**		
	2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/flantropi dalam perlindungan dan pengelolaan**	**100 %**	**955.413.036,00**	**40 %**	**164.282.150,00**	**85 %**	**300.000.000,00**	**0,02**	**4.500.000,00**	**2,00%**	**1,50%**	**40,02**	**168.782.150,00**	**100,00%**	**17,67%**		
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam	Terlaksananya penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan	12 Entitas	955.413.036,00	12 Entitas	164.282.150,00	12 Entitas	300.000.000,00	0,02	4.500.000,00	2,00%	1,50%	12,02	168.782.150,00	100,00%	17,67%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PERSENTASE MONITORING EVALUASI TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT**	**100 %**	**2.034.868.466,00**	**50 %**	**78.754.405,00**	**80 %**	**350.000.000,00**	**0,02**	**5.280.000,00**	**2,00%**	**1,51%**	**50,02**	**84.034.405,00**	**100,00%**	**4,13%**		
	2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan dan**	**Jumlah Dokumen monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat**	**100 %**	**2.034.868.466,00**	**50 %**	**78.754.405,00**	**100 %**	**350.000.000,00**	**0,02**	**5.280.000,00**	**2,00%**	**1,51%**	**50,02**	**84.034.405,00**	**100,00%**	**4,13%**		
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota	12 Pengaduan	1.134.868.466,00	9 Pengaduan	78.754.405,00	12 Pengaduan	350.000.000,00	0,02	5.280.000,00	2,00%	1,51%	9,02	84.034.405,00	100,00%	7,40%		
	2.11.09.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	12 Sanksi	900.000.000,00				-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	0,00%		
	2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**PERSENTASE TIMBULAN SAMPAH YANG TERTANGANI**	**71,4 %**	**85.858.087.019,00**	**20 %**	**25.458.048.779,00**	**71,4 %**	**17.940.000.000,00**	**0,04**	**756.286.099,00**	**4,22%**	**4,22%**	**20,04**	**26.214.334.878,00**	**100,00%**	**30,53%**		
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah dokumen peraturan pengelolaan sampah, Jumlah saran dan prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan, Jumlah wilayah prasarana dan sarana**	**71,4 %**	**85.358.087.019,00**	**20 %**	**25.417.237.279,00**	**71,4 %**	**17.790.000.000,00**	**0,04**	**756.286.099,00**	**4,25%**	**4,25%**	**20,04**	**26.173.523.378,00**	**100,00%**	**30,66%**		
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.	Jumlah Masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	4 Kelompok	1.050.000.000,00			4 Kelompok	350.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	0,00%		
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang	1 Dokumen	1.220.000.000,00	1 Dokumen	162.333.284,00	1 Dokumen	500.000.000,00	0,04	19.653.360,00	4,00%	3,93%	1,04	181.986.644,00	100,00%	14,92%		
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	5 unit	23.640.000.000,00	5 unit	2.650.321.470,00	5 unit	10.720.000.000,00	0,04	51.200.000,00	4,00%	0,48%	5,04	2.701.521.470,00	100,00%	11,43%		
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan rencana ,kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	2 Dokumen	1.500.000.000,00		-	2 Dokumen	500.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	0,00%		
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	jumlah manfaat yang dimanfaatkan kembali	130 Ton	24.298.182.919,00			130 Ton	500.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	0,00%		
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah pemilahan dan pengelolaan sampah di instansi pengelolaan sampah TPS3R, PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTS,RDF,Pusat pengomposan, biodigester, bak sampah dan fasilitas lainnya sesuai peraturan perundangan	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	130 Ton	10.000.000.000,00	130 Ton	5.503.753.000,00		-	0,35	165.954.739,00	35,00%	0,00%	130,35	5.669.707.739,00	100,00%	56,70%		
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah.	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pemabatasan timbulan sampah.	1% Laporan	1.500.000.000,00			1 Laporan	500.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	0,00%		
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	3 Dokumen	660.000.000,00		-	3 Dokumen	220.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	100,00%	0,00%		
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	130 Sampah	6.500.000.000,00	130 Sampah	17.100.829.525,00		-	0,40	519.478.000,00	40,00%	0,00%	130,40	17.620.307.525,00	100,00%	100,00%		
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	5 Fasilitas	9.000.000.000,00			1 Fasilitas	4.500.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	5 Sarana	5.989.904.100,00				-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.11.11.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**PERSENTASE TIMBULAN SAMPAH YANG TERTANGANI**	**5 Unit**	**500.000.000,00**	**1 Unit**	**40.811.500,00**	**1 Unit**	**150.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**40.811.500,00**	**20,00%**	**8,16%**		
	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	5 Unit	500.000.000,00	1 Unit	40.811.500,00	1 Unit	150.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	40.811.500,00	20,00%	8,16%		
	1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan regional**	**1,85 %**	**13.000.000.000,00**	**185 %**	**21.829.149.110,00**	**100%**	**13.000.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**185,00**	**21.829.149.110,00**	**100,00%**	**100,00%**	**DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**	
	1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**25803 Unit**	**13.000.000.000,00**	**25803 Unit**	**21.829.149.110,00**	**5 Unit**	**13.000.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**25803,00**	**21.829.149.110,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	4 Dokumen	1.500.000.000,00	4 %	306.305.200,00		-	-	-	0,00%	0,00%	4,00	306.305.200,00	100,00%	20,42%		
	1.03.04.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Sistem Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1 Dokumen	1.500.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	100 Ton/hari	1.500.000.000,00		-	100 Ton/Hari	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	100 Ton/hari	7.000.000.000,00	25.001 Ton/hari	21.522.843.910,00	100 Ton/Hari	12.800.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	25001,00	21.522.843.910,00	100,00%	100,00%		
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	2 Unit	1.500.000.000,00		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	JUMLAH PRIORITAS (3) PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI				**1.107.524.815.248,00**		**1.232.109.931.557,84**		**597.855.083.927,95**		**121.564.220.586,82**				**1.353.674.152.144,66**				
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**24,13%**	**20,33%**						
											PREDIKAT KINERJA		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**24,13%**	**20,33%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
4.	**PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**																		
	4.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan pemerintah daerah (Mengikuti RPJMD)**	**100 %**	**282.135.394.350,00**	**100 %**	**189.247.553.983,00**	**100 %**	**50.537.266.724,18**	**0,30**	**13.583.686.057,00**	**30,00%**	**26,88%**	**100,30**	**202.831.240.040,00**	**100,00%**	**71,89%**	**SEKRETARIAT DAERAH**	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.1.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 %**	**1.705.000.000,00**	**100 %**	**416.816.529,00**	**100 %**	**69.506.993,00**	**0,10**	**6.250.000,00**	**10,00%**	**8,99%**	**100,10**	**423.066.529,00**	**100,00%**	**24,81%**		
	4.1.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	545.000.000,00	6 Dokumen	160.808.500,00	2 Dokumen	25.501.700,00	0,24	6.250.000,00	24,51%	24,51%	6,24	167.058.500,00	62,40%	30,65%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.1.1.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	150.000.000,00	6 Dokumen	8.537.750,00	2 Dokumen	2.946.162,00	-	-	0,00%	0,00%	6,00	8.537.750,00	60,00%	5,69%		
	4.1.1.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	150.000.000,00	6 Dokumen	15.364.950,00	2 Dokumen	4.591.356,00	0,50	-	50,00%	0,00%	6,50	15.364.950,00	65,00%	10,24%		
	4.1.1.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	280.000.000,00	3 Laporan	61.647.700,00	1 Laporan	20.176.650,00	0,50	-	50,00%	0,00%	3,50	61.647.700,00	70,00%	22,02%		
	4.1.1.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	580.000.000,00	9 Laporan	170.457.629,00	3 Laporan	16.291.125,00	0,30	-	30,00%	0,00%	9,30	170.457.629,00	100,00%	29,39%		
	4.1.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**36 Laporan**	**107.688.009.804,00**	**29 Laporan**	**75.983.501.577,00**	**19 Laporan**	**22.623.836.960,00**	**0,25**	**4.281.848.149,00**	**25,00%**	**18,93%**	**29,25**	**80.265.349.726,00**	**81,25%**	**74,54%**		
	4.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/Bulan	105.832.009.804,00	140 Orang/Bulan	75.203.780.885,00	140 Orang/Bulan	22.522.318.440,00	0,25	4.251.598.149,00	25,00%	18,88%	140,25	79.455.379.034,00	100,00%	75,08%		
	4.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16 Dokumen	715.000.000,00	3 Dokumen	410.780.016,00	1 Dokumen	27.306.700,00	0,25	9.750.000,00	25,00%	35,71%	3,25	420.530.016,00	20,31%	58,82%		
	4.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	383.000.000,00	6 Laporan	111.316.518,00	2 Laporan	12.327.770,00	-	-	0,00%	0,00%	6,00	111.316.518,00	60,00%	29,06%		
	4.1.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	5 Laporan	386.000.000,00	3 Laporan	163.500.458,00	1 Laporan	50.198.700,00	0,40	20.500.000,00	40,84%	40,84%	3,25	184.000.458,00	65,00%	47,67%		
	4.1.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	372.000.000,00	3 Dokumen	94.123.700,00	1 Dokumen	11.685.350,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	94.123.700,00	60,00%	25,30%		
	4.1.1.2	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Dumai**	**15 Laporan**	**1.425.000.000,00**	**9 Laporan**	**345.157.316,00**	**3 Laporan**	**52.754.013,00**	**0,25**	**8.000.000,00**	**25,00%**	**15,16%**	**9,25**	**353.157.316,00**	**61,67%**	**24,78%**		
	4.1.1.2.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	940.000.000,00	3 Dokumen	291.468.416,00	1 Dokumen	41.684.900,00	0,25	8.000.000,00	25,00%	19,19%	3,25	299.468.416,00	65,00%	31,86%		
	4.1.1.2.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	485.000.000,00	6 Laporan	53.688.900,00	2 Laporan	11.069.113,00	-	-	0,00%	0,00%	6,00	53.688.900,00	60,00%	11,07%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.1.1.2.1	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**138 Orang**	**2.341.867.832,00**	**3 Dokumen**	**587.377.765,00**	**1 Dokumen**	**27.840.000,00**	**0,25**	**3.500.000,00**	**25,00%**	**12,57%**	**3,25**	**590.877.765,00**	**2,36%**	**25,23%**		
	4.1.1.2.1.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	300.000.000,00	3 Dokumen	129.340.000,00	1 Dokumen	27.840.000,00	0,25	3.500.000,00	25,00%	12,57%	3,25	132.840.000,00	65,00%	44,28%		
	4.1.1.2.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	500.000.000,00		70.375.000,00		-	-	-	0,00%	0,00%	-	70.375.000,00	0,00%	14,08%		
	4.1.1.2.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implemantasi Peraturan Perundangundangan	108 Orang	1.541.867.832,00		387.662.765,00		-	-	-	0,00%	0,00%	-	387.662.765,00	0,00%	25,14%		
	4.1.1.2.1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**50 Paket**	**42.252.874.898,00**	**46 Paket**	**29.528.715.016,00**	**13 Paket**	**5.030.519.401,90**	**0,35**	**1.616.247.792,00**	**35,00%**	**32,13%**	**46,70**	**31.144.962.808,00**	**93,39%**	**73,71%**		
	4.1.1.2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	630.000.000,00	2 Paket	214.364.284,00	1 Paket	169.144.666,68	0,25	99.144.250,00	58,62%	58,62%	1,95	313.508.534,00	39,03%	49,76%		
	4.1.1.2.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	15.702.965.921,00	23 Paket	14.279.444.577,00	5 Paket	1.568.847.329,00	0,38	609.160.000,00	38,83%	38,83%	22,98	14.888.604.577,00	91,93%	94,81%		
	4.1.1.2.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.750.000.000,00	10 Paket	1.800.712.500,00	3 Paket	338.598.170,00	0,35	121.666.500,00	35,93%	35,93%	10,07	1.922.379.000,00	67,15%	69,90%		
	4.1.1.2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	749.908.977,00	3 Paket	463.477.100,00	1 Paket	33.226.924,00	-	-	0,00%	0,00%	3,09	463.477.100,00	61,80%	61,80%		
	4.1.1.2.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	950.000.000,00	3 Laporan	519.988.000,00	1 Laporan	502.083.000,00	0,25	72.353.000,00	25,00%	14,41%	3,25	592.341.000,00	65,00%	62,35%		
	4.1.1.2.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	18.810.000.000,00	3 Laporan	11.454.428.555,00	1 Laporan	1.732.769.312,22	0,25	441.974.042,00	25,51%	25,51%	3,25	11.896.402.597,00	65,00%	63,25%		
	4.1.1.2.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	2.660.000.000,00	3 Dokumen	796.300.000,00	1 Dokumen	685.850.000,00	0,40	271.950.000,00	39,65%	39,65%	3,25	1.068.250.000,00	65,00%	40,16%		
	4.1.1.2.1	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4 Unit**	**3.674.506.000,00**	**6 Unit**	**5.614.893.193,00**	**4 Unit**	**5.420.370.148,00**	**0,40**	**2.133.360.000,00**	**40,00%**	**39,36%**	**6,51**	**7.748.253.193,00**	**100,00%**	**100,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.1.1.2.1.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	1 uNIT	1.106.110.148,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	4.1.1.2.1.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya						1 Paket	2.150.900.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	4.1.1.2.1.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	3.674.506.000,00	6 Unit	5.614.893.193,00	2 Unit	2.163.360.000,00	0,40	2.133.360.000,00	40,00%	98,61%	6,51	7.748.253.193,00	100,00%	100,00%		
	4.1.1.2.1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20 Laporan**	**36.834.589.581,00**	**12 Laporan**	**19.469.930.249,00**	**4 Laporan**	**6.713.459.947,50**	**0,25**	**1.752.251.880,00**	**25,00%**	**26,10%**	**12,25**	**21.222.182.129,00**	**61,25%**	**57,61%**		
	4.1.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	370.000.000,00	3 Laporan	198.250.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	198.250.000,00	60,00%	53,58%		
	4.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	22.724.589.581,00	3 Laporan	11.958.847.540,00	1 Laporan	4.075.000.000,00	0,25	1.005.876.380,00	25,00%	24,68%	3,25	12.964.723.920,00	65,00%	57,05%		
	4.1.1.2.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	540.000.000,00	3 Laporan	299.052.629,00	1 Laporan	44.564.567,50	-	-	0,00%	0,00%	3,00	299.052.629,00	60,00%	55,38%		
	4.1.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	13.200.000.000,00	3 Laporan	7.013.780.080,00	1 Laporan	2.568.895.380,00	0,25	746.375.500,00	25,00%	29,05%	3,25	7.760.155.580,00	65,00%	58,79%		
	4.1.1.2.1	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**370 Unit**	**33.132.200.313,00**	**243 Unit**	**24.359.356.107,00**	**370 Unit**	**4.107.626.758,78**	**0,48**	**1.980.958.000,00**	**48,23%**	**48,23%**	**243,81**	**26.340.314.107,00**	**65,90%**	**79,50%**		
	4.1.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	1.790.000.000,00	2 Unit	1.022.744.622,00	4 Unit	133.708.000,00	0,25	10.000.000,00	25,00%	7,48%	2,54	1.032.744.622,00	63,39%	57,70%		
	4.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	7.452.857.177,00	43 Unit	5.354.974.798,00	60 Unit	537.531.160,00	0,25	31.750.000,00	25,00%	5,91%	43,36	5.386.724.798,00	72,27%	72,28%		
	4.1.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	1.800.260.000,00	193 Unit	1.160.356.300,00	300 Unit	114.750.000,00	-	-	0,00%	0,00%	193,36	1.160.356.300,00	64,45%	64,45%		
	4.1.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	22.089.083.136,00	5 Unit	16.821.280.387,00	6 Unit	3.321.637.598,78	0,25	1.939.208.000,00	25,00%	58,38%	4,82	18.760.488.387,00	80,32%	84,93%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.1.1.2.1	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**10 Paket**	**7.815.000.000,00**	**6 Paket**	**2.772.878.578,00**	**2 Paket**	**1.326.124.588,00**	**0,21**	**280.501.296,00**	**21,15%**	**21,15%**	**6,21**	**3.053.379.874,00**	**62,12%**	**39,07%**		
	4.1.1.2.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	985.000.000,00	2 Orang/Bulan	270.941.078,00	2 Orang/Bulan	230.124.588,00	0,25	31.501.296,00	25,00%	13,69%	2,25	302.442.374,00	100,00%	30,70%		
	4.1.1.2.1.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	10 Paket	1.000.000.000,00	6 Paket	305.937.500,00	2 Paket	80.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	6,00	305.937.500,00	60,00%	30,59%		
	4.1.1.2.1.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	400.000.000,00			2 Orang	20.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	4.1.1.2.1.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	5.430.000.000,00	2 Orang/Bulan	2.196.000.000,00	2 Orang/Bulan	996.000.000,00	0,25	249.000.000,00	25,00%	25,00%	2,25	2.445.000.000,00	100,00%	45,03%		
	4.1.1.2.1	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Terfasilitasinya Kebutuhan Kerumahtanggan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah**	**60 Paket**	**7.720.000.000,00**	**36 Paket**	**5.072.842.010,00**	**12 Paket**	**1.570.231.980,00**	**0,40**	**626.014.350,00**	**0,40%**	**39,87%**	**36,40**	**5.698.856.360,00**	**60,66%**	**73,82%**		
	4.1.1.2.1.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	4.110.000.000,00	12 Paket	4.248.026.910,00	4 Paket	1.026.559.410,00	0,25	577.355.850,00	25,00%	56,24%	12,25	4.825.382.760,00	61,25%	100,00%		
	4.1.1.2.1.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	2.080.000.000,00	12 Paket	235.892.630,00	4 Paket	289.115.230,00	0,25	9.000.000,00	25,00%	3,11%	12,25	244.892.630,00	61,25%	11,77%		
	4.1.1.2.1.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga	20 Paket	1.530.000.000,00	12 Paket	588.922.470,00	4 Paket	254.557.340,00	0,25	39.658.500,00	25,00%	15,58%	12,25	628.580.970,00	61,25%	41,08%		
	4.1.1.2.1	**Penataan Organisasi**	**Jumlah Dokumen Penataan Organisasi**	**20 Dokumen**	**6.030.000.000,00**	**18 Dokumen**	**2.352.866.315,00**	**6 Dokumen**	**491.198.863,00**	**0,20**	**87.441.863,00**	**20,00%**	**17,80%**	**18,20**	**2.440.308.178,00**	**91,00%**	**40,47%**		
	4.1.1.2.1.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	1.710.000.000,00	6 Dokumen	579.736.112,00	2 Dokumen	120.670.941,00	0,25	25.670.941,00	25,00%	21,27%	6,25	605.407.053,00	62,50%	35,40%		
	4.1.1.2.1.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1.050.000.000,00	3 Laporan	303.037.412,00	1 Laporan	77.588.000,00	0,25	8.326.000,00	25,00%	10,73%	3,25	311.363.412,00	100,00%	29,65%		
	4.1.1.2.1.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	460.000.000,00	3 Dokumen	261.430.352,00	1 Dokumen	115.400.000,00	0,25	30.280.000,00	25,00%	26,24%	3,25	291.710.352,00	100,00%	63,42%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.1.1.2.1.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1.125.000.000,00	3 Dokumen	600.466.365,00	1 Dokumen	87.539.922,00	0,25	19.634.922,00	25,00%	22,43%	3,25	620.101.287,00	100,00%	55,12%		
	4.1.1.2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokumen	1.685.000.000,00	3 Dokumen	608.196.074,00	1 Dokumen	90.000.000,00	0,25	3.530.000,00	25,00%	3,92%	3,25	611.726.074,00	65,00%	36,30%		
	4.1.1.2.1	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**15 Laporan**	**31.516.345.922,00**	**9 Laporan**	**22.743.219.328,00**	**3 Laporan**	**3.103.797.071,00**	**0,26**	**807.312.727,00**	**26,01%**	**26,01%**	**9,26**	**23.550.532.055,00**	**61,73%**	**74,72%**		
	4.1.1.2.1.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	5 Laporan	15.089.981.117,00	3 Laporan	11.068.668.584,00	1 Laporan	1.703.860.000,00	0,25	506.167.727,00	25,00%	29,71%	3,25	11.574.836.311,00	65,00%	76,71%		
	4.1.1.2.1.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5 Laporan	13.548.364.805,00	3 Laporan	9.964.026.544,00	1 Laporan	1.034.088.175,00	0,25	234.370.000,00	25,00%	22,66%	3,25	10.198.396.544,00	65,00%	75,27%		
	4.1.1.2.1.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5 Laporan	2.878.000.000,00	3 Laporan	1.710.524.200,00	1 Laporan	365.848.896,00	0,25	66.775.000,00	25,00%	18,25%	3,25	1.777.299.200,00	65,00%	61,75%		
	4.1.2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100 %**	**270.822.609.000,00**	**100 %**	**113.141.165.673,00**	**100 %**	**42.466.118.900,00**	**0,15**	**4.733.914.198,00**	**15,00%**	**11,15%**	**100,15**	**117.875.079.871,00**	**100,00%**	**43,52%**		
	4.1.2.2	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase meningkatnya kuliatas penyelenggaraan tata pemerintahan**	**15 Dokumen**	**9.257.784.000,00**	**9 Dokumen**	**2.442.646.460,00**	**3 Dokumen**	**296.990.600,00**	**0,28**	**83.508.500,00**	**28,12%**	**28,12%**	**9,28**	**2.526.154.960,00**	**61,87%**	**27,29%**		
	4.1.2.2.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	4.007.784.000,00	3 Dokumen	962.771.350,00	1 Dokumen	107.852.000,00	0,25	7.200.000,00	25,00%	6,68%	3,25	969.971.350,00	65,00%	24,20%		
	4.1.2.2.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	2.800.000.000,00	3 Dokumen	827.052.964,00	1 Dokumen	93.404.400,00	0,25	13.390.000,00	25,00%	14,34%	3,25	840.442.964,00	65,00%	30,02%		
	4.1.2.2.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	5 Dokumen	2.450.000.000,00	3 Dokumen	652.822.146,00	1 Dokumen	95.734.200,00	0,25	62.918.500,00	25,00%	65,72%	3,25	715.740.646,00	65,00%	29,21%		
	4.1.2.2	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat**	**15 Dokumen**	**254.504.825.000,00**	**9 Dokumen**	**108.241.810.596,00**	**3 Dokumen**	**41.322.000.000,00**	**0,15**	**4.597.905.698,00**	**15,00%**	**11,13%**	**9,15**	**112.839.716.294,00**	**61,00%**	**44,34%**		
	4.1.2.2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	5 Dokumen	68.939.700.000,00	3 Dokumen	34.301.097.213,00	1 Dokumen	13.076.000.000,00	0,25	1.259.034.071,00	25,00%	9,63%	3,25	35.560.131.284,00	65,00%	51,58%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.1.2.2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	63.380.000.000,00	3 Dokumen	40.921.757.397,00	1 Dokumen	11.561.000.000,00	0,25	1.676.440.100,00	25,00%	14,50%	3,25	42.598.197.497,00	65,00%	67,21%		
	4.1.2.2.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5 Dokumen	122.185.125.000,00	3 Dokumen	33.018.955.986,00	1 Dokumen	16.685.000.000,00	0,25	1.662.431.527,00	25,00%	9,96%	3,25	34.681.387.513,00	65,00%	28,38%		
	4.1.2.2	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**30 Kasus**	**3.635.000.000,00**	**9 Kasus**	**1.341.864.728,00**	**30 Kasus**	**407.543.700,00**	0,15	52.500.000,00	15,00%	12,88%	9,49	1.394.364.728,00	31,63%	38,36%		
	4.1.2.2.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum Daerah yang di susun	5 Dokumen	1.015.000.000,00	1 Dokumen	480.851.136,00	1 Dokumen	151.242.700,00	0,25	19.250.000,00	25,00%	12,73%	1,25	500.101.136,00	25,00%	49,27%		
	4.1.2.2.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi	30 Kasus	1.740.000.000,00	9 Kasus	541.585.381,00	6 Kasus	154.630.000,00	0,25	15.750.000,00	25,00%	10,19%	9,59	557.335.381,00	31,96%	32,03%		
	4.1.2.2.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi"	5 Dokumen	880.000.000,00	1 Dokumen	319.428.211,00	1 Dokumen	101.671.000,00	0,25	17.500.000,00	25,00%	17,21%	1,25	336.928.211,00	25,00%	38,29%		
	4.1.2.2	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah**	**15 Dokumen**	**3.425.000.000,00**	**9 Dokumen**	**1.114.843.889,00**	**3 Dokumen**	**439.584.600,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**9,00**	**1.114.843.889,00**	**60,00%**	**32,55%**		
	4.1.2.2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama	5 Dokumen	1.551.792.830,00	3 Dokumen	529.929.060,00	1 Dokumen	365.271.600,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	529.929.060,00	60,00%	34,15%		
	4.1.2.2.2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama	5 Dokumen	1.135.000.000,00	3 Dokumen	347.521.918,00	1 Dokumen	26.960.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	347.521.918,00	60,00%	30,62%		
	4.1.2.2.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan	5 Laporan	738.207.170,00	3 Laporan	237.392.911,00	1 Laporan	47.353.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	237.392.911,00	60,00%	32,16%		
	4.1.3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan**	**100 %**	**23.527.300.000,00**	**100 %**	**12.718.024.941,00**	**100 %**	**2.116.851.530,00**	**0,35**	**712.734.800,00**	**35,00%**	**33,67%**	**100,35**	**13.430.759.741,00**	**100,00%**	**57,09%**		
	4.1.3.2	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian**	**100 %**	**3.975.000.000,00**	**100 %**	**1.714.221.577,00**	**100 %**	**466.745.900,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**1.714.221.577,00**	**100,00%**	**43,13%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.1.3.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD'	3 BUMD	1.280.000.000,00	3 Dokumen	743.230.615,00	1 Dokumen	268.950.525,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	743.230.615,00	100,00%	58,06%		
	4.1.3.2.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	1.257.000.000,00	3 Laporan	456.376.547,00	1 Laporan	97.179.925,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	456.376.547,00	60,00%	36,31%		
	4.1.3.2.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	1.438.000.000,00	3 Dokumen	514.614.415,00	1 Dokumen	100.615.450,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	514.614.415,00	60,00%	35,79%		
	4.1.3.2	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan**	**15 Dokumen**	**8.766.500.000,00**	**9 Dokumen**	**5.202.353.976,00**	**3 Dokumen**	**483.302.828,80**	**0,15**	**53.950.000,00**	**15,00%**	**11,16%**	**9,15**	**5.256.303.976,00**	**61,00%**	**59,96%**		
	4.1.3.2.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dokumen	3.220.000.000,00	3 Dokumen	2.004.330.123,00	1 Dokumen	109.100.928,80	0,25	16.500.000,00	25,00%	15,12%	3,25	2.020.830.123,00	65,00%	62,76%		
	4.1.3.2.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendaliandan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan	2.896.500.000,00	3 Laporan	1.714.559.837,00	1 Laporan	178.761.900,00	0,25	21.950.000,00	25,00%	12,28%	3,25	1.736.509.837,00	65,00%	59,95%		
	4.1.3.2.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	2.650.000.000,00	3 Laporan	1.483.464.016,00	1 Laporan	195.440.000,00	0,25	15.500.000,00	25,00%	7,93%	3,25	1.498.964.016,00	65,00%	56,56%		
	4.1.3.2	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pengadaan Barang & Jasa di Kota Dumai**	**100 %**	**8.375.800.000,00**	**100 %**	**4.957.167.618,00**	**100 %**	**1.007.492.801,20**	**0,65**	**646.474.800,00**	**65,00%**	**64,17%**	**100,65**	**5.603.642.418,00**	**100,00%**	**66,90%**		
	4.1.3.2.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	2.770.300.000,00	3 Dokumen	1.592.257.528,00	1 Dokumen	395.939.001,20	0,25	281.520.000,00	25,00%	71,10%	3,25	1.873.777.528,00	65,00%	67,64%		
	4.1.3.2.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	3.500.000.000,00	3 Dokumen	2.631.119.025,00	1 Dokumen	542.396.800,00	0,25	364.954.800,00	25,00%	67,29%	3,25	2.996.073.825,00	100,00%	85,60%		
	4.1.3.2.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pen0gadaan Barang dan Jasa	32 Orang	2.105.500.000,00	11 Orang	733.791.065,00	4 Orang	69.157.000,00	-	-	0,00%	0,00%	11,15	733.791.065,00	34,85%	34,85%		
	4..1.3.2	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap pemantauan kebijakan sumber daya alam**	**15 Dokumen**	**2.410.000.000,00**	**9 Dokumen**	**844.281.770,00**	**3 Dokumen**	**159.310.000,00**	**0,10**	**12.310.000,00**	**10,00%**	**7,73%**	**9,10**	**856.591.770,00**	**60,67%**	**35,54%**		
	4..1.3.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan dibidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	5 Dokumen	820.000.000,00	3 Dokumen	241.932.140,00	1 Dokumen	55.070.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	241.932.140,00	60,00%	29,50%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4..1.3.2.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	870.000.000,00	3 Dokumen	362.006.470,00	1 Dokumen	51.400.000,00	0,25	7.060.000,00	25,00%	13,74%	3,25	369.066.470,00	65,00%	42,42%		
	4..1.3.2.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan ditidang energi dan air	5 Dokumen	720.000.000,00	3 Dokumen	240.343.160,00	1 Dokumen	52.840.000,00	0,25	5.250.000,00	25,00%	9,94%	3,25	245.593.160,00	65,00%	34,11%		
	5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**- Persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD**	**100 %**	**6.776.437.853,00**	**100 %**	**2.498.685.372,00**	**100 %**	**1.157.589.740,00**	**0,23**	**263.168.000,00**	**23,00%**	**22,73%**	**100,23**	**2.761.853.372,00**	**100,00%**	**40,76%**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	URUSAN PENUNJANG UNSUR PERENCANAAN
			- Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**-**		**0,00%**	**0,00%**						
	5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**40 Dokumen/Laporan**	**5.000.109.155,00**	**28 Dokumen/Laporan**	**1.819.833.039,00**	**9 Dokumen/Laporan**	**954.777.740,00**	**0,20**	**178.272.000,00**	**20,00%**	**18,67%**	**30,07**	**1.998.105.039,00**	**75,19%**	**39,96%**		
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	7 Dokumen	400.000.000,00	4 Dokumen	119.262.427,00	1 Dokumen	31.073.000,00	0,13	4.243.000,00	13,65%	13,65%	17,65	123.505.427,00	100,00%	30,88%		
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7 Berita Acara	289.580.000,00	4 Berita Acara	48.451.000,00	1 Berita Acara	49.704.000,00	0,50	14.300.000,00	50,00%	28,77%	54,00	62.751.000,00	100,00%	21,67%		
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 Berita Acara	380.459.500,00	3 Berita Acara	125.959.500,00	1 Berita Acara	65.720.000,00	0,40	15.400.000,00	40,00%	23,43%	43,00	141.359.500,00	100,00%	37,15%		
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7 Berita Acara	820.822.552,00	7 Berita Acara	229.204.696,00	2 Berita Acara	176.368.500,00	0,25	10.500.000,00	25,00%	5,95%	32,00	239.704.696,00	100,00%	29,20%		
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	14 Dokumen	3.109.247.103,00	10 Dokumen	1.296.955.416,00	4 Dokumen	631.912.240,00	0,25	133.829.000,00	25,00%	21,18%	16,25	1.430.784.416,00	100,00%	46,02%		
	5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**5 Dokumen**	**777.861.031,00**	**3 Dokumen**	**366.426.909,00**	**1 Dokumen**	**75.130.000,00**	**0,10**	**1.200.000,00**	**10,00%**	**1,60%**	**4,60**	**367.626.909,00**	**91,94%**	**47,26%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Dokumen	777.861.031,00	3 Dokumen	366.426.909,00	1 Dokumen	75.130.000,00	0,10	1.200.000,00	10,00%	1,60%	4,60	367.626.909,00	91,94%	47,26%		
	5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan**	**7 Laporan**	**698.467.667,00**	**6 Laporan**	**305.656.024,00**	**2 Laporan**	**124.586.000,00**	**0,65**	**80.600.000,00**	**65,00%**	**64,69%**	**38,35**	**386.256.024,00**	**100,00%**	**55,30%**		
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	7 Laporan	698.467.667,00	6	305.656.024,00	2 Laporan	124.586.000,00	0,65	80.600.000,00	65,00%	64,69%	38,35	386.256.024,00	100,00%	55,30%		
	5.01.02.2.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**3 Dokumen**	**300.000.000,00**	**1 Dokumen**	**6.769.400,00**	**1 Dokumen**	**3.096.000,00**	**1,00**	**3.096.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**9.865.400,00**	**100,00%**	**3,29%**		
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembinaan sistem infomasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	6.769.400,00	1 Dokumen	3.096.000,00	1,00	3.096.000,00	100,00%	100,00%	100,00	9.865.400,00	100,00%	3,29%		
	5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**- Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan**	**100 %**	**12.968.260.402,00**	**100 %**	**4.633.271.747,00**	**100 %**	**1.527.806.446,00**	**0,35**	**529.768.584,00**	**35,00%**	**34,68%**	**100,35**	**5.163.040.331,00**	**100,00%**	**39,81%**		
			- Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	**100 %**		**100 %**		**100 %**		-		**0,00%**		**100,00**					
	5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**38 Dokumen/ Laporan**	**4.408.665.382,00**	**25 Dokumen/ Laporan**	**1.180.478.000,00**	**9 Dokumen/ Laporan**	**802.360.850,00**	**0,50**	**367.370.700,00**	**50,00%**	**45,79%**	**30,09**	**1.547.848.700,00**	**79,18%**	**35,11%**		
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	788.563.593,00	4 Laporan	285.698.591,00	1 Dokumen	75.954.950,00	0,50	3.416.200,00	50,00%	4,50%	8,50	289.114.791,00	100,00%	36,66%		
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	64.200.000,00	2 Laporan	3.400.000,00	1 Laporan	7.616.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	3.400.000,00	50,00%	5,30%		
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	201.922.600,00	4 Laporan	112.142.600,00	1 Laporan	17.303.485,00	0,28	4.848.300,00	28,02%	28,02%	32,02	116.990.900,00	100,00%	57,94%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7 Laporan	944.363.224,00	3 Laporan	107.450.960,00	2 Laporan	439.596.300,00	0,73	317.508.800,00	73,00%	72,23%	39,11	424.959.760,00	100,00%	45,00%		
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	825.411.000,00	2 Dokumen	137.363.908,00	1 Dokumen	76.034.922,00	0,03	2.624.800,00	3,45%	3,45%	5,45	139.988.708,00	100,00%	16,96%		
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	100.968.000,00	2 Laporan	13.425.000,00	1 Laporan	9.222.058,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	13.425.000,00	40,00%	13,30%		
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	507.327.265,00	3 Laporan	177.961.900,00	1 Laporan	69.409.222,00	0,41	28.549.600,00	41,13%	41,13%	44,13	206.511.500,00	100,00%	40,71%		
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	975.909.700,00	5 Laporan	343.035.041,00	1 Laporan	107.223.913,00	0,09	10.423.000,00	9,72%	9,72%	14,72	353.458.041,00	100,00%	36,22%		
	5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**35 Dokumen/ Laporan**	**3.415.510.484,00**	**21 Dokumen/ Laporan**	**1.442.410.675,00**	**9 Dokumen/ Laporan**	**306.000.429,00**	**0,39**	**121.922.717,00**	**39,84%**	**39,84%**	**25,43**	**1.564.333.392,00**	**72,65%**	**45,80%**		
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	1.072.215.718,00	3 Dokumen	429.925.102,00	1 Dokumen	53.396.546,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	429.925.102,00	60,00%	40,10%		
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	76.773.089,00	2 Laporan	25.139.000,00	1 Laporan	5.940.759,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	25.139.000,00	50,00%	32,74%		
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	255.495.300,00	3 Laporan	73.028.500,00	1 Laporan	25.070.000,00	0,59	15.000.000,00	59,83%	59,83%	62,83	88.028.500,00	100,00%	34,45%		
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	809.016.500,00	6 Laporan	744.168.050,00	2 Laporan	137.663.965,00	0,55	76.432.717,00	55,52%	55,52%	33,76	820.600.767,00	100,00%	100,00%		
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	510.514.100,00	2 Dokumen	86.285.523,00	1 Dokumen	26.268.472,00	0,29	7.620.000,00	29,01%	29,01%	31,01	93.905.523,00	100,00%	18,39%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	65.581.677,00	2 Laporan	6.120.000,00	1 Laporan	6.864.800,00	0,24	1.650.000,00	24,04%	24,04%	26,04	7.770.000,00	100,00%	11,85%		
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	220.914.100,00	2 Laporan	27.468.500,00	1 Laporan	25.340.000,00	0,58	14.850.000,00	58,60%	58,60%	60,60	42.318.500,00	100,00%	19,16%		
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	405.000.000,00	1 Laporan	50.276.000,00	1 Laporan	25.455.887,00	0,25	6.370.000,00	25,02%	25,02%	26,02	56.646.000,00	100,00%	13,99%		
	5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**40 Dokumen/ Laporan**	**5.144.084.536,00**	**24 Dokumen/ Laporan**	**2.010.383.072,00**	**8 Dokumen/ Laporan**	**419.445.167,00**	**0,09**	**40.475.167,00**	**9,65%**	**9,65%**	**25,21**	**2.050.858.239,00**	**63,02%**	**39,87%**		
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	938.570.794,00	3 Dokumen	251.158.657,00	1 Dokumen	37.042.369,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	251.158.657,00	60,00%	26,76%		
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	108.164.700,00	3 Laporan	24.115.700,00	1 Laporan	6.217.461,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	24.115.700,00	60,00%	22,30%		
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	340.030.500,00	3 Laporan	116.775.500,00	1 Laporan	22.781.900,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	116.775.500,00	60,00%	34,34%		
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	1.667.817.064,00	3 Laporan	934.090.946,00	1 Laporan	204.603.038,00	0,15	32.212.167,00	15,74%	15,74%	18,74	966.303.113,00	100,00%	57,94%		
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	751.019.960,00	3 Dokumen	211.901.174,00	1 Dokumen	39.052.244,00	0,11	4.380.000,00	11,22%	11,22%	14,22	216.281.174,00	100,00%	28,80%		
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	108.244.700,00	3 Laporan	27.420.700,00	1 Laporan	6.024.872,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	27.420.700,00	60,00%	25,33%		
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	394.430.500,00	3 Laporan	110.308.500,00	1 Laporan	24.291.122,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	110.308.500,00	60,00%	27,97%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 Laporan	835.806.318,00	3 Laporan	334.611.895,00	1 Laporan	79.432.161,00	0,04	3.883.000,00	4,89%	4,89%	7,89	338.494.895,00	100,00%	40,50%		
	5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase pengelolaan keuangan daerah**	**100 %**	**158.308.797.282,00**	**264 %**	**34.627.563.835,00**	**100 %**	**44.369.966.984,00**	**0,03**	**1.137.002.870,00**	**3,00%**	**2,56%**	**263,54**	**35.764.566.705,00**	**100,00%**	**22,59%**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	URUSAN KEUANGAN
	5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah Dokumen penyusunan rencana anggaran daerah**	**8 dokumen**	**25.327.382.402,00**	**293 %**	**18.009.467.132,00**	**8 dokumen**	**5.270.000.000,00**	**0,01**	**51.784.427,00**	**1,00%**	**0,98%**	**293,18**	**18.061.251.559,00**	**100,00%**	**71,31%**		
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	1.098.585.700,00	4 dokumen	339.116.456,00	2 dokumen	160.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	4,00	339.116.456,00	100,00%	30,87%		
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	1.169.453.200,00	4 dokumen	399.577.503,00	2 dokumen	160.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	4,00	399.577.503,00	100,00%	34,17%		
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 dokumen	680.506.300,00	2 dokumen	134.868.400,00	40 dokumen	70.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	134.868.400,00	5,41%	19,82%		
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 dokumen	666.471.100,00	2 dokumen	121.954.800,00	40 dokumen	70.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	121.954.800,00	5,41%	18,30%		
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	37 dokumen	865.846.000,00	2 dokumen	207.059.222,00	40 dokumen	150.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	207.059.222,00	5,41%	23,91%		
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 dokumen	834.102.000,00	2 dokumen	219.286.462,00	40 dokumen	150.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	219.286.462,00	5,41%	26,29%		
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	5.228.856.842,00	6 dokumen	4.047.200.566,00	2 dokumen	1.000.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	6,00	4.047.200.566,00	100,00%	77,40%		
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	5.439.012.800,00	6 dokumen	4.592.385.154,00	2 dokumen	1.150.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	6,00	4.592.385.154,00	100,00%	84,43%		
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 dokumen	4.370.073.110,00	3 dokumen	5.818.507.666,00	1 dokumen	1.480.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	5.818.507.666,00	100,00%	100,00%		
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 dokumen	947.678.000,00	2 dokumen	332.481.600,00	1 dokumen	150.000.000,00	0,16	12.190.000,00	16,22%	8,13%	2,16	344.671.600,00	100,00%	36,37%		
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 dokumen	1.012.746.600,00	39 dokumen	376.183.436,00	1 dokumen	150.000.000,00	0,53	39.594.427,00	0,53%	26,40%	39,53	415.777.863,00	100,00%	41,05%		
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 dokumen	1.064.050.750,00	39 dokumen	398.216.217,00	1 dokumen	130.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	39,00	398.216.217,00	100,00%	37,42%		
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 orang	1.950.000.000,00	148 orang	1.022.629.650,00	74 orang	450.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	148,00	1.022.629.650,00	100,00%	52,44%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase pengelolaan keuangan daerah**	**4 Laporan**	**6.124.960.150,00**	**293 %**	**4.151.252.624,00**	**4 Laporan**	**1.000.000.000,00**	**0,09**	**88.242.291,00**	**9,00%**	**8,82%**	**293,46**	**4.239.494.915,00**	**100,00%**	**69,22%**		
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 dokumen	961.129.600,00	14 dokumen	481.005.037,00	1 dokumen	200.000.000,00	0,02	1.500.000,00	2,00%	0,75%	14,02	482.505.037,00	100,00%	50,20%		
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 dokumen	977.629.400,00	14 dokumen	549.437.596,00	1 dokumen	200.000.000,00	0,14	20.500.000,00	14,06%	10,25%	14,14	569.937.596,00	100,00%	58,30%		
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	3 Laporan	695.681.100,00	18 laporan	565.465.218,00	3 laporan	100.000.000,00	0,13	6.312.600,00	13,00%	6,31%	18,13	571.777.818,00	100,00%	82,19%		
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 dokumen	681.342.500,00	14 dokumen	570.036.733,00	1 dokumen	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	14,00	570.036.733,00	100,00%	83,66%		
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	1.511.756.550,00	4 dokumen	959.498.647,00	1 dokumen	300.000.000,00	0,17	20.723.000,00	17,06%	6,91%	4,17	980.221.647,00	100,00%	64,84%		
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	74 orang	1.297.421.000,00	185 orang	1.025.809.393,00	74 orang	150.000.000,00	0,71	39.206.691,00	71,19%	26,14%	185,71	1.065.016.084,00	100,00%	82,09%		
	5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase pengelolaan keuangan daerah**	**4 dokumen**	**9.481.639.045,00**	**251 %**	**3.523.830.663,00**	**4 dokumen**	**2.170.000.000,00**	**0,01**	**13.500.000,00**	**1,00%**	**0,62%**	**251,41**	**3.537.330.663,00**	**100,00%**	**37,31%**		
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan.	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 dokumen	542.621.400,00	39 dokumen	97.856.389,00	1 dokumen	150.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	39,00	97.856.389,00	100,00%	18,03%		
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	685.839.985,00	39 Laporan	132.104.460,00	1 laporan	150.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	39,00	132.104.460,00	100,00%	19,26%		
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	2.168.234.300,00	39 Laporan	840.056.260,00	1 laporan	530.000.000,00	0,04	13.500.000,00	4,14%	2,55%	39,04	853.556.260,00	100,00%	39,37%		
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	2.272.302.200,00	6 dokumen	571.702.189,00	2 dokumen	500.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	6,00	571.702.189,00	100,00%	25,16%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 dokumen	917.869.660,00	7 dokumen	522.484.399,00	1 dokumen	340.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	7,00	522.484.399,00	100,00%	56,92%		
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasi Penyelenggaraan Akuntansi			809.100.000,00	1 dokumen	174760000	1 dokumen	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	174.760.000,00	0,00%	21,60%		
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, PeLaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	74 orang	2.085.671.500,00	185 orang	1.184.866.966,00	74 orang	300.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	185,00	1.184.866.966,00	100,00%	56,81%		
	5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase pengelolaan keuangan daerah**	**1 Laporan**	**117.374.815.685,00**	**212 %**	**8.943.013.416,00**	**1 Laporan**	**35.929.966.984,00**	**0,03**	**983.476.152,00**	**3,00%**	**2,74%**	**212,25**	**9.926.489.568,00**	**100,00%**	**8,46%**		
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 laporan	8.700.000.000,00	3 laporan	8.256.011.976,00	1 laporan	100.000.000,00	0,49	772.261.102,00	49,36%	100,00%	3,49	9.028.273.078,00	100,00%	100,00%		
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	108.674.815.685,00	14 laporan	687.001.440,00	1 laporan	35.829.966.984,00	0,00	211.215.050,00	0,48%	0,59%	14,00	898.216.490,00	100,00%	0,83%		
	5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib**	**100 %**	**56.710.173.240,00**	**284 %**	**21.723.599.127,00**	**100 %**	**17.840.000.000,00**	**1,00**	**20.970.163.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**284,61**	**42.693.762.127,00**	**100,00%**	**75,28%**		
	5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib**	**4 dokumen**	**56.710.173.240,00**	**284 %**	**21.723.599.127,00**	**4 dokumen**	**17.840.000.000,00**	**1,00**	**20.970.163.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**284,61**	**42.693.762.127,00**	**100,00%**	**75,28%**		
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	1 Dokumen	277.748.000,00	1 Dokumen	126.237.000,00	0 Dokumen	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	126.237.000,00	100,00%	45,45%		
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	922.851.050,00	3 dokumen	248.404.100,00	1 dokumen	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	248.404.100,00	100,00%	26,92%		
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.487.365.200,00	39 Laporan	1.205.098.583,00	1 Laporan	300.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	39,00	1.205.098.583,00	100,00%	81,02%		
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.185.872.900,00	39 Laporan	579.496.518,00	1 Laporan	200.000.000,00	0,32	19.413.000,00	31,76%	9,71%	39,32	598.909.518,00	100,00%	50,50%		
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.558.390.690,00	39 Laporan	1.108.174.360,00	1 Laporan	200.000.000,00	0,76	110.000.000,00	76,01%	55,00%	39,76	1.218.174.360,00	100,00%	78,17%		
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.919.385.900,00	39 Laporan	1.068.333.067,00	1 Laporan	350.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	39,00	1.068.333.067,00	100,00%	55,66%		
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	997.760.000,00	39 Laporan	347.808.100,00	1 Laporan	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	39,00	347.808.100,00	100,00%	34,86%		
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	45.187.115.200,00	43 Dokumen	15.432.481.350,00	3 Dokumen	16.000.000.000,00	0,76	20.818.750.000,00	76,37%	100,00%	43,76	36.251.231.350,00	100,00%	80,22%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	987.435.000,00	39 Laporan	147.528.200,00	1 Laporan	80.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	39,00	147.528.200,00	100,00%	14,94%		
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1.447.080.400,00	3 Laporan	527.567.179,00	1 Laporan	200.000.000,00	0,16	22.000.000,00	16,26%	11,00%	3,16	549.567.179,00	100,00%	37,98%		
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang	739.168.900,00	148 Orang	932.470.670,00	74 Orang	310.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	148,00	932.470.670,00	100,00%	100,00%		
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota**	**100 %**	**7.396.097.653,00**	**100 %**	**15.506.664.844,00**	**100 %**	**2.897.955.246,00**	**0,10**	**227.067.040,00**	**10,00%**	**7,84%**	**100,10**	**15.733.731.884,00**	**100,00%**	**100,00%**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	URUSAN KEUANGAN
	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah**	**100 %**	**7.396.097.653,00**	**100 %**	**15.506.664.844,00**	**100 %**	**2.897.955.246,00**	**0,10**	**227.067.040,00**	**10,00%**	**7,84%**	**100,10**	**15.733.731.884,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	105.431.367,00	242 Dokumen	377.533.851	1 Dokumen	105.537.578,00	-	-	0,00%	0,00%	242,41	377.533.851,00	100,00%	100,00%		
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	281.070.457,00	238 Dokumen	362.510.643	1 Dokumen	8.385.460,00	-	-	0,00%	0,00%	238,09	362.510.643,00	100,00%	100,00%		
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	909.920.408,00	217 Laporan	1.349.505.169	1 Laporan	154.011.168,00	-	-	0,00%	0,00%	216,78	1.349.505.169,00	100,00%	100,00%		
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1.037.125.000,00	230 Unit	4.007.827.734	1 Unit	863.663.714,00	0,18	154.708.000,00	17,91%	17,91%	229,90	4.162.535.734,00	100,00%	100,00%		
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	593.195.924,00	274 Laporan	964.938.940	10 Laporan	141.406.174,00	-	-	0,00%	0,00%	273,73	964.938.940,00	100,00%	100,00%		
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	640.828.257,00	252 Laporan	1.762.728.600	1 Laporan	391.045.494,00	-	-	0,00%	0,00%	252,48	1.762.728.600,00	100,00%	100,00%		
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10 Obyek Pajak	464.466.757,00	280 Obyek Pajak	1.045.547.013	10 Obyek Pajak	325.325.250,00	0,25	72.359.040,00	25,00%	22,24%	279,83	1.117.906.053,00	100,00%	100,00%		
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	182.584.485,00	263 Dokumen	502.495.937	10 Dokumen	42.911.602,00	-	-	0,00%	0,00%	262,76	502.495.937,00	100,00%	100,00%		
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1000 Layanan	848.912.158,00	280 Layanan	1.697.680.537	1000 Layanan	391.885.224,00	-	-	0,00%	0,00%	279,68	1.697.680.537,00	27,97%	100,00%		
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	139.465.230,00	263 Dokumen	279.706.671	1 Dokumen	16.510.619,00	-	-	0,00%	0,00%	263,18	279.706.671,00	100,00%	100,00%		
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	803.319.536,00	255 Dokumen	1.258.558.346	1 Dokumen	160.615.156,00	-	-	0,00%	0,00%	254,55	1.258.558.346,00	100,00%	100,00%		
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	183.236.217,00	289 Dokumen	360.156.628	1 Dokumen	53.941.500,00	-	-	0,00%	0,00%	288,66	360.156.628,00	100,00%	100,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	303.187.500,00	283 Dokumen	584.660.667	4 Dokumen	98.430.000,00	-	-	0,00%	0,00%	282,97	584.660.667,00	100,00%	100,00%		
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	517.479.357,00	184 Laporan	633.909.269	1 Laporan	71.906.307,00	-	-	0,00%	0,00%	184,26	633.909.269,00	100,00%	100,00%		
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	385.875.000,00	90 Laporan	318.904.839	4 Laporan	72.380.000,00	-	-	0,00%	0,00%	90,13	318.904.839,00	100,00%	82,64%		
	6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan**	**100 %**	**16.792.039.182,00**	**60 %**	**4.412.272.621,00**	**100 %**	**3.300.000.000,00**	**0,25**	**507.183.023,00**	**25,00%**	**15,37%**	**60,25**	**4.919.455.644**	**60,25%**	**29,30%**	**INSPEKTORAT**	URUSAN PENGAWASAN
	6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**574 Laporan**	**12.795.265.100,00**	**364 Laporan**	**3.818.420.627,00**	**153 Laporan**	**2.450.000.000,00**	**0,30**	**274.662.255,00**	**29,62%**	**11,21%**	**364,36**	**4.093.082.882**	**63,48%**	**31,99%**		
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	65 Laporan	3.891.000.000,00	8 Laporan	887.850.000,00	20 Laporan	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	8,00	887.850.000	12,31%	22,82%		
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	230 Laporan	4.498.200.000,00	182 Laporan	1.199.700.000,00	60 Laporan	1.100.000.000,00	0,17	84.150.000,00	17,22%	7,65%	182,17	1.283.850.000	79,21%	28,54%		
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	267 Laporan	1.681.428.100,00	168 Laporan	746.114.621,00	70 Laporan	600.000.000,00	0,49	153.212.255,00	49,47%	25,54%	168,49	899.326.876	63,11%	53,49%		
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	4 Laporan	403.699.800,00	2 Laporan	139.131.666,00	1 Laporan	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	139.131.666	50,00%	34,46%		
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitori	8 Dokumen	2.320.937.200,00	4 Dokumen	845.624.340,00	2 Dokumen	550.000.000,00	0,18	37.300.000,00	17,69%	6,78%	4,18	882.924.340	52,21%	38,04%		
	6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**119 Laporan**	**3.996.774.082,00**	**43 Laporan**	**593.851.994,00**	**36 Laporan**	**850.000.000,00**	**0,27**	**232.520.768,00**	**27,00%**	**27,36%**	**43,29**	**826.372.762**	**36,38%**	**20,68%**		
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/ daerah yang ditangani	4 Laporan	1.829.080.000,00	2 Laporan	179.586.780,00	1 Laporan	250.000.000,00	0,89	108.865.000,00	89,00%	43,55%	2,89	288.451.780	72,22%	15,77%		
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	115 Laporan	2.167.694.082,00	41 Laporan	414.265.214,00	35 Laporan	600.000.000,00	0,25	123.655.768,00	25,00%	20,61%	41,25	537.920.982	35,87%	24,82%		
	6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**100 %**	**9.955.442.800,00**	**60 %**	**3.035.954.515,00**	**100 %**	**4.081.900.000,00**	**0,10**	**337.957.762,00**	**10,00%**	**8,28%**	**60,10**	**3.373.912.277**	**60,10%**	**33,89%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis yang Disusun**	**8 Rekomendasi**	**2.161.793.400,00**	**4,00 Rekomendasi**	**780.829.000,00**	**2 Rekomendasi**	**581.600.000,00**	**0,14**	**98.961.500,00**	**14,33%**	**17,02%**	**4,15**	**879.790.500**	**51,85%**	**40,70%**		
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	4 Rekomendasi	867.397.600,00	2 Rekomendasi	146.201.400,00	1 Rekomendasi	200.600.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	146.201.400	50,00%	16,86%		
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	4 Rekomendasi	1.294.395.800,00	2 Rekomendasi	634.627.600,00	1 Rekomendasi	381.000.000,00	0,29	98.961.500,00	29,00%	25,97%	2,29	733.589.100	57,16%	56,67%		
	6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi**	**252 Perangkat Daerah**	**7.793.649.400,00**	**37 Perangkat Daerah**	**2.255.125.515,00**	**57 Perangkat Daerah**	**3.500.300.000,00**	**0,03**	**238.996.262,00**	**3,00%**	**6,83%**	**37,03**	**2.494.121.777**	**14,69%**	**32,00%**		
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	18 Perangkat Daerah	1.688.000.000,00	13 Perangkat Daerah	225.120.100,00	5 Perangkat Daerah	1.319.000.000,00	0,20	88.157.762,00	20,30%	6,68%	13,20	313.277.862	73,35%	18,56%		
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	121 Perangkat Daerah	1.714.382.000,00	20 Perangkat Daerah	311.860.410,00	22 Perangkat Daerah	350.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	311.860.410	16,53%	18,19%		
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	2.403.862.600,00	6 Kegiatan	1.267.217.597,00	3 Kegiatan	1.000.000.000,00	0,04	19.000.000,00	4,21%	1,90%	6,04	1.286.217.597	50,35%	53,51%		
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	113 Perangkat Daerah	1.987.404.800,00	4 Perangkat Daerah	450.927.408,00	30 Perangkat Daerah	831.300.000,00	0,02	131.838.500,00	2,00%	15,86%	4,02	582.765.908	3,55%	29,32%		
	1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**	**100 %**	**13.784.766.965,00**	**100 %**	**7.311.630.306,00**	**100 %**	**201.080.000.000,00**	**0,01**	**18.000.000,00**	**1,00%**	**0,01%**	**101,00**	**7.329.630.306,00**	**100,00%**	**53,17%**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.03.2.01	**PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Dokumen pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota-**	**15.100 Orang**	**1.269.921.000,00**	**1 Dokumen**	**409.950.748,00**	**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**409.950.748,00**	**0,01%**	**32,28%**		
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi(KIE) Rawan Bnecana Kabupaten/Kota (Perjenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman	15.100 Orang	835.289.000,00	600 Orang	69.351.000,00	5000 Orang	50.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	600,00	69.351.000,00	3,97%	8,30%		
	1.05.03.2.01.0001	Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	434.632.000,00	1 Dokumen	340.599.748,00			0,00	-	**0,00%**	**0,00%**	1,00	340.599.748,00	100,00%	78,37%		
	1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Jumlah Dokumen pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**48 Dokumen**	**5.615.016.403,00**	**3 Dokumen**	**3.101.621.357,00**	**2 Dokumen**	**850.000.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**3,00**	**3.101.621.357,00**	**6,25%**	**55,24%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.03.2.02.0008	pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (trc) bencana kabupaten kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangan Kapasitas Teknis Manajerialnya	44 Orang	851.856.180,00	20 Orang	423.412.720,00	12 Orang	50.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	20,00	423.412.720,00	45,45%	49,70%		
	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	255 Keluarga	585.000.000,00	50 Keluarga	97.151.000	12 Keluarga	100.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	50,00	97.151.000,00	19,61%	16,61%		
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana RPB Kabupaten/Kota Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	1 Dokumen	325.400.000,00	1 Dokumen	90996030,00	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	90.996.030,00	100,00%	27,96%		
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	36 Kawasan	481.000.000,00	70 Kawasan	41729500,00	18 Kawasan	500.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	70,00	41.729.500,00	100,00%	8,68%		
	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	255 Keluarga	585.000.000,00		-	12 Keluarga	100.000.000,00	0,00	-	**0,00%**	**0,00%**	0,00	-	0,00%	0,00%		
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	11 Laporan	2.786.760.223,00	2 Laporan	2.448.332.107,00	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2,00	2.448.332.107,00	18,18%	87,86%		
	1.05.02.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah kejadian penanganan bencana**	**10 Dokumen**	**6.068.675.562,00**	**2 Dokumen**	**3.560.854.870,00**	**2 Dokumen**	**200.150.000.000,00**	**0,15**	**18.000.000,00**	**15,00%**	**0,01%**	**2,15**	**3.578.854.870,00**	**21,50%**	**58,97%**		
	1.05.02.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5 Dokumen	1.748.569.039,00	1 Dokumen	1.292.864.463,00	1 Dokumen	150.000.000,00	0,15	18.000.000,00	15,00%	12,00%	1,15	1.310.864.463,00	23,00%	74,97%		
	1.05.02.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	5 Laporan	4.320.106.523,00	1 Laporan	2.267.990.407,00	1 Laporan	200.000.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	2.267.990.407,00	20,00%	52,50%		
	1.05.02.03.2.04	**Penataan sistem dasar penanggulangan bencana**	**Jumlah Dokumen Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**	**8 Kegiatan**	**831.154.000,00**	**2 Dokumen**	**239.203.331,00**	**2 Kegiatan**	**30.000.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**239.203.331,00**	**25,00%**	**28,78%**		
	1.05.02.03.2.04.0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	8 Kegiatan	831.154.000,00	1 Kegiatan	239.203.331,00	2 Kegiatan	30.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	239.203.331,00	12,50%	28,78%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.004	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**100 %**	**1.248.000.000,00**	**100 %**	**675.261.359,00**	**100 %**	**905.162.760,57**	**0,39**	**351.938.438,00**	**39,00%**	**38,88%**	**100,39**	**1.027.199.797,00**	**100,00%**	**82,31%**	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.004.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**30 Laporan**	**1.248.000.000,00**	**12 Laporan**	**675.261.359,00**	**1 Dokumen**	**905.162.760,57**	**0,39**	**351.938.438,00**	**39,00%**	**38,88%**	**12,39**	**1.027.199.797,00**	**41,30%**	**82,31%**		
	1.05.004.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	- -		12 Laporan	15.000.000,00	1 Dokumen	6.637.350,06	0,00	-	0,00%	0,00%	12,00	15.000.000,00	0,00%	0,00%		
	1.05.004.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	- -		12 Laporan	467.757.354,00	14 Laporan	384.402.500,01	0,25	96.008.000,00	25,00%	24,98%	12,25	563.765.354,00	0,00%	0,00%		
	1.05.004.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-		12 Laporan	0,00	1 Dokumen	19.644.900,00	-	-	0,00%	0,00%	12,00	-	0,00%	0,00%		
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana Dan Prasarana Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 Unit	1.148.000.000,00	1 Unit	121.684.473,00	18 Unit	399.182.282,00	0,65	255.930.438,00	65,00%	64,11%	1,65	377.614.911,00	8,25%	32,89%		
	1.03.01.2.06.0002	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya			12 Keluarga	28.689.766		-	0,00	-	0,00%	#DIV/0!	12,00	28.689.766,00	0,00%	0,00%		
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan kerja sama dan Koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan kerja sama dan Koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	- -		12 Laporan	28689766,00	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	12,00	28.689.766,00	0,00%	0,00%		
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	110 Keluarga	100.000.000,00	870 Keluarga	13440000,00	110 Keluarga	70.295.728,50	0,00	-	0,00%	0,00%	870,00	13.440.000,00	100,00%	13,44%		
	1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum**	**100 %**	**4.556.939.100,00**	**100 %**	**5.480.826.522,00**	**100 %**	**1.037.019.500,00**	**0,30**	**283.300.000,00**	**30,00%**	**27,32%**	**100,30**	**5.764.126.522,00**	**100,00%**	**100,00%**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai**	**100 laporan**	**2.678.975.100,00**	**24 laporan**	**4.753.153.717,00**	**9 laporan**	**608.159.500,00**	**0,40**	**186.000.000,00**	**40,00%**	**30,58%**	**24,38**	**4.939.153.717,00**	**24,38%**	**100,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	7 dokumen	412.300.000,00	1 dokumen	72.215.000,00	1 dokumen	24.590.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	72.215.000,00	14,29%	17,52%		
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	1.188.433.000,00	3 dokumen	1.446.247.592,00	1 dokumen	93.368.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	1.446.247.592,00	60,00%	100,00%		
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 dokumen	131.422.100,00	1 dokumen	15.022.100,00	1 dokumen	14.850.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	15.022.100,00	25,00%	11,43%		
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	30 laporan	916.820.000,00	16 laporan	3.174.119.025,00	5 Kasus	467.851.500,00	0,40	186.000.000,00	40,00%	39,76%	16,40	3.360.119.025,00	54,67%	100,00%		
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30 laporan	30.000.000,00	3 laporan	45.550.000,00	1 Kasus	7.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,98	45.550.000,00	9,94%	100,00%		
	1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota**	**100 laporan**	**1.540.000.000,00**	**9 laporan**	**666.431.705,00**	**1 laporan**	**428.860.000,00**	**0,25**	**97.300.000,00**	**25,00%**	**22,69%**	**9,25**	**763.731.705,00**	**9,25%**	**49,59%**		
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 laporan	300.000.000,00	1 laporan	77.932.000,00		0,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	77.932.000,00	33,33%	25,98%		
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 laporan	120.000.000,00				-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	3 laporan	150.000.000,00				-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	3 laporan	90.000.000,00				-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	3 laporan	170.000.000,00	2 laporan	54.037.630,00		-	-	-	0,00%	0,00%	2,00	54.037.630,00	66,67%	31,79%		
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	3 laporan	450.000.000,00	4 laporan	438.316.275,00	1 laporan	428.860.000,00	0,25	97.300.000,00	25,00%	22,69%	4,25	535.616.275,00	100,00%	100,00%		
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 laporan	260.000.000,00	2 laporan	96.145.800,00		-	-	-	0,00%	0,00%	2,00	96.145.800,00	66,67%	36,98%		
	1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyidik Pegawai N**	**100 laporan**	**337.964.000,00**	**1 -**	**61.241.100,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**61.241.100,00**	**1,00%**	**18,12%**		
	1.05.02.2.03.0001	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	3 laporan	337.964.000,00	1 laporan	61.241.100,00		0,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	61.241.100,00	33,33%	18,12%		
	1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani**	**100 %**	**3.882.958.870,00**	**100 %**	**528.337.078,00**	**100 %**	**737.277.000,00**	**0,15**	**107.162.000,00**	**14,53%**	**14,53%**	**100,15**	**635.499.078,00**	**100,00%**	**16,37%**	**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**1.847.631.500,00**	**100 %**	**169.411.228,00**	**100 %**	**260.000.000,00**	**0,10**	**24.602.000,00**	**10,00%**	**9,46%**	**100,10**	**194.013.228,00**	**100,00%**	**10,50%**		
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	750,00 Orang	862.306.500,00	300 Orang	105.495.228,00	150 Orang	100.000.000,00	0,35	22.352.000,00	34,67%	22,35%	299,85	127.847.228,00	39,98%	14,83%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	515,00 Orang	439.050.000,00	165 Orang	43.597.000,00	150 Orang	50.000.000,00	0,05	2.250.000,00	4,67%	4,50%	165,05	45.847.000,00	32,05%	10,44%		
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3,00 Unit	120.000.000,00		-	1 Unit	10.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	485,00 Orang	336.275.000,00	160 Orang	20.319.000,00	50 Orang	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	160,00	20.319.000,00	32,99%	6,04%		
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	150,00 Orang	90.000.000,00		-	50 Orang	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Masyarakat yang diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**100 %**	**2.035.327.370,00**	**100 %**	**358.925.850,00**	**100 %**	**477.277.000,00**	**0,30**	**82.560.000,00**	**30,00%**	**17,30%**	**100,30**	**441.485.850,00**	**100,00%**	**21,69%**		
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3,00 Kampung	400.000.000,00	1 Kampung	13.770.000,00	1 Kampung	100.000.000,00	0,30	21.060.000,00	30,00%	21,06%	1,30	34.830.000,00	43,33%	8,71%		
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	236,00 Orang	1.635.327.370,00	87 Orang	345.155.850,00	41 Orang	377.277.000,00	0,17	61.500.000,00	17,07%	16,30%	87,17	406.655.850,00	36,94%	24,87%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**100 %**	**553.410.000,00**	**100 %**	**50.217.000,00**	**100 %**	**150.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**50.217.000,00**	**100,00%**	**9,07%**		
	1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang terpelihara**	**100 %**	**553.410.000,00**	**100 %**	**50.217.000,00**	**100 %**	**150.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**50.217.000,00**	**100,00%**	**9,07%**		
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 Dokumen	300.000.000,00		-	1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	275,00 Makam	253.410.000,00	110 Makam	50.217.000,00	55 Makam	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	110,00	50.217.000,00	40,00%	19,82%		
	2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan**	**90 %**	**1.657.541.203,00**	**90 %**	**359.140.200,00**	**90%**	**132.102.500,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**90,00**	**359.140.200,00**	**100,00%**	**21,67%**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Laporan Jumlah jenis layanan pendaftaran penduduk**	**10 Laporan**	**1.657.541.203,00**	**8 Laporan**	**359.140.200,00**	**3 Laporan**	**88.602.500,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**8,00**	**359.140.200,00**	**80,00%**	**21,67%**		
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	5 Laporan	830.918.003,00	3 Laporan	193.669.200,00	1 Laporan	54.540.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	193.669.200,00	60,00%	23,31%		
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan , Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	826.623.200,00	5 Laporan	165.471.000,00	1 Laporan	24.062.500,00	0,05	-	5,00%	0,00%	5,05	165.471.000,00	100,00%	20,02%		
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan , Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan						1 Laporan	10.000.000,00	0,05	-	5,00%	0,00%	0,05	-	0,00%	0,00%		
	2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**			-			**2 Laporan**	43.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran						1 Laporan	25.000.000,00	0,05	-	5,00%	0,00%	0,05	-	0,00%	0,00%		
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi pendaftaran penduduk						1 Laporan	18.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil**	**90 %**	**630.356.000,00**	**90 %**	**865.350.000,00**	**90 %**	**203.383.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**90,00**	**865.350.000,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Laporan Jumlah jenis layanan pencatatan sipil**	**5 Laporan**	**519.356.000,00**	**3 Laporan**	**197.230.000,00**	**1 Laporan**	**22.580.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**3,00**	**197.230.000,00**	**60,00%**	**37,98%**		
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan , Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		5 Laporan	**519.356.000,00**	3 Laporan	197.230.000,00	1 Laporan	22.580.000,00	0,06	-	6,00%	0,00%	3,06	197.230.000,00	61,20%	37,98%		
	2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Laporan Jumlah penyelenggaraan jenis layanan pencatatan sipil secara daring**	**5 Laporan**	**111.000.000,00**	**1 Laporan**	**668.120.000,00**	**3 Laporan**	**180.803.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**668.120.000,00**	**20,00%**	**100,00%**		
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatatn nikah, talak cerai dan rujuk bagi penduduk yang					-	1 Laporan	20.000.000,00	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%		
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan sipil						1 Laporan	14.635.000,00	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	0,00%	0,00%		
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5 Laporan	**111.000.000,00**	1 Laporan	668.120.000,00	1 Laporan	146.168.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	668.120.000,00	20,00%	100,00%		
	2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan**	**100 %**	**1.126.550.522,00**	**100 %**	**185.230.000,00**	**100 %**	**67.500.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**185.230.000,00**	**100,00%**	**16,44%**		
	2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Laporan Jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan**	**5 Laporan**	**567.705.522,00**	**3 Laporan**	**79.860.000,00**	**1 Laporan**	**27.500.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**3,00**	**79.860.000,00**	**60,00%**	**14,07%**		
	2.12.04.2.01.0002	Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Laporan	567.705.522,00	3 Laporan	79.860.000,00	1 Laporan	27.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	79.860.000,00	60,00%	14,07%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Laporan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi yang mendatangani perjanjian kerjasama**	**5 Laporan**	**558.845.000,00**	**3 Laporan**	**105.370.000,00**	**1 Laporan**	**40.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**3,00**	**105.370.000,00**	**60,00%**	**18,85%**		
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	jumlah Laporan Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	5 Laporan	558.845.000,00	3 Laporan	105.370.000,00	1 Lporan	40.000.000,00	0,03	-	2,50%	0,00%	3,03	105.370.000,00	60,50%	18,85%		
	2.12.05	**PROGRAM PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase data perkembangan kependudukan yang disajikan**	**100 %**	**290.000.000,00**	**100 %**	**29.865.000,00**	**100 %**	**28.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**29.865.000,00**	**100,00%**	**10,30%**		
	2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan**	**5 Dokumen**	**290.000.000,00**	**3 Dokumen**	**29.865.000,00**	**1 Dokumen**	**28.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**3,00**	**29.865.000,00**	**60,00%**	**10,30%**		
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Profil dan Proyeksi kependuduukan tersusun	5 Dokumen	290.000.000,00	3 Dokumen	29.865.000,00	1 Dokumen	28.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	29.865.000,00	60,00%	10,30%		
	2.24.2	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase PD yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai kaidah**	**100 %**	**3.018.437.402,00**	**100 %**	**634.500.562,00**	**100 %**	**574.464.488,00**	**0,05**	**14.700.000,00**	**5,00%**	**2,56%**	**100,05**	**649.200.562**	**100,00%**	**21,51%**	**DINAS PERPUSATAKAAN DAN ARSIP**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
	2.24.2.201	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota**	**Jumlah Arsip Dinamis yang di kelola sesuai tata kearsipan**	**120 Arsip**	**1.992.053.066,00**	**50 arsip**	**510.471.742,00**	**110 berkas**	**384.141.500,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**50,00**	**510.471.742**	**41,67%**	**25,63%**		
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan atau digunakan	120 arsip	861.556.446,00	50 arsip	225.484.182,00	100 berkas	184.141.500,00	0,00	-	0,00%	0,00%	50,00	225.484.182	41,67%	26,17%		
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	70 Arsip	235.000.000,00			10 berkas	50.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kab/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	895.496.620,00	3 laporan	284.987.560,00	1 laporan	150.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	284.987.560	75,00%	31,82%		
	2.24.2.202	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota**	**Jumlah Arsip Statis yang di kelola sesuai tata kearsipan**	**342 arsip**	**297.181.648,00**	**50 arsip**	**14.390.000,00**	**50 arsip**	**50.000.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**50,00**	**14.390.000**	**14,62%**	**4,84%**		
	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah SalinanOtentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	20 arsip	20.000.000,00					0,00	-	0,00%	#DIV/0!	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	323 arsip	277.181.648,00	50 arsip	14.390.000,00	50 arsip	50.000.000	-	-	0,00%	0,00%	50,00	14.390.000	15,48%	5,19%		
	2.24.2.203	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaen/Kota**	**Jumlah informasi kearsipan yang dikelola melalui simpul jaringan kearsipan nasional tingkat kab/kota**	**1 informasi**	**729.202.688,00**	**1 pengguna**	**109.638.820,00**	**1 Pengguna**	**140.322.988,00**	**0,25**	**14.700.000,00**	**25,00%**	**10,48%**	**1,25**	**124.338.820**	**100,00%**	**17,05%**		
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi , akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/ kota melalui JIKN	1 pengguna	522.583.188,00	1 pengguna	109.638.820,00	1 Pengguna	140.322.988,00	0,25	14.700.000,00	25,00%	10,48%	1,25	124.338.820	100,00%	23,79%		
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit kearsipan dan	2 laporan	206.619.500,00					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase Terlaksananya Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip di Kota Dumai**	**100 %**	**1.359.116.000,00**		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
		Permusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	**Jumlah arsip yang dimusnahkan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai**	**240 arsip**	**147.520.680,00**		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	240 arsip	72.520.680,00					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	3 berkas	75.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang berskala kabupaten/kota	**Jumlah Arsipi yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana**	**240 Arsip**	**63.718.000,00**		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	120 Arsip	31.859.000,00					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	120 arsip	31.859.000,00					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.24.3.203	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Jumlah arsip perangkat daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran**	**240 Arsip**	**703.819.968,00**		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pemngembangan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	6 daftar	244.162.998,00					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	90 Arsip	170.246.986,00					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	75 Arsip	150.246.986,00					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	75 Arsip	139.162.998,00					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	2.24.4.204	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Jumlah arsip yang terautentikasi**	**240 Arsip**	**150.000.000,00**		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
	2.24.04.2.01.0001	Penilaian dan Penetapan Autensititas Arsip Statis sesuai PersaratanPenjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autensitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	120 Arsip	75.000.000,00					-	-	**0,00%**	**0,00%**	0,00	-	0,00%	0,00%		
	2.24.04.2.01.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	120 Arsip	75.000.000,00					-	-	**0,00%**	**0,00%**	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	**Jumlah Arsipi yang dinyatakan hilang**	**240 arsip**	**294.057.352,00**		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
		Penilaian dan Penetapan Autensititas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autensititas Arsip yang Dinyatakan Hilang dan Dinilai dan Ditetapkan	90 Arsip	114.057.352,00					-	-	**0,00%**	**0,00%**	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	75 Arsip	90.000.000,00					-	-	**0,00%**	**0,00%**	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	75 Arsip	90.000.000,00					-	-	**0,00%**	**0,00%**	0,00	-	0,00%	0,00%		
	5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**	**100 %**	**12.090.045.005,00**	**100 %**	**5.596.434.554,00**	**100 %**	**4.080.502.000,00**	**0,02**	**63.829.950,00**	**1,56%**	**1,56%**	**100,02**	**5.660.264.504,00**	**100,00%**	**46,82%**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	URUSAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**512 Dokumen**	**5.372.490.603,00**	**337 Dokumen**	**2.647.381.848,00**	**114 Dokumen**	**2.827.585.000,00**	**0,02**	**63.829.950,00**	**2,26%**	**2,26%**	**337,02**	**2.711.211.798,00**	**65,82%**	**50,46%**		
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (dokumen)	8 Dokumen	2.413.805.753,00	2 Dokumen	1.311.630.723,00	2 Dokumen	2.286.595.000,00	-	329.950,00	0,00%	0,01%	2,00	1.311.960.673,00	25,00%	54,35%		
	5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase pelamar yang lulus seleksi CASN	91 %	294.922.700,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (dokumen)	496 Dokumen	346.392.800,00	331 Dokumen	136.390.500,00	110 Dokumen	80.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	331,00	136.390.500,00	66,73%	39,37%		
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (lembaga)	4 Lembaga	117.901.400,00	2 Lembaga	76.216.400,00	1 Lembaga	25.990.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	76.216.400,00	50,00%	64,64%		
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	4 Dokumen	1.309.022.850,00	2 Dokumen	683.095.100,00	1 Dokumen	290.000.000,00	0,25	47.500.000,00	25,00%	16,38%	2,25	730.595.100,00	56,25%	55,81%		
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (dokumen)	4 Dokumen	890.445.100,00	2 Dokumen	440.049.125,00	1 Dokumen	145.000.000,00	0,25	16.000.000,00	25,00%	11,03%	2,25	456.049.125,00	56,25%	51,22%		
	5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**		**3.824 Dokumen**	**2.042.029.502,00**	**2.056 Dokumen**	**837.852.873,00**	**273 Dokumen**	**349.920.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2.056,00**	**837.852.873,00**	**53,77%**	**41,03%**		
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (dokumen)	600 Dokumen	926.707.885,00	574 Dokumen	454.592.824,00	150 Dokumen	99.920.000,00	-	-	0,00%	0,00%	574,00	454.592.824,00	95,67%	49,05%		
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (dokumen)	3.200 Dokumen	815.321.617,00	1.482 Dokumen	383.260.049,00	115 Dokumen	155.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.482,00	383.260.049,00	46,31%	47,01%		
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	24 Dokumen	300.000.000,00	- -	-	8 Dokumen	95.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**		**4 Dokumen**	**586.684.800,00**	**1 Dokumen**	**169.169.500,00**	**1 Dokumen**	**129.997.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**169.169.500,00**	**25,00%**	**28,83%**		
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen	368.060.000,00	1 Dokumen	68.060.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	68.060.000,00	25,00%	18,49%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (orang)	275 orang	218.624.800,00	230 Orang	101.109.500,00	55 Orang	29.997.000,00	-	-	0,00%	0,00%	230,00	101.109.500,00	83,64%	46,25%		-
	5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**8 Dokumen**	**4.088.840.100,00**	**4 Dokumen**	**1.942.030.333,00**	**2 Dokumen**	**773.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4,00**	**1.942.030.333,00**	**50,00%**	**47,50%**		
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (dokumen)	4 Dokumen	3.042.783.100,00	2 Dokumen	1.572.830.333,00	1 Dokumen	525.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	1.572.830.333,00	50,00%	51,69%		
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (orang)	32 Orang	311.099.000,00	305 Orang	69.831.000,00	20 Orang	20.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	305,00	69.831.000,00	100,00%	22,45%		
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (orang)	600 Orang	180.000.000,00	622 Orang	48.000.000,00	200 Orang	90.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	622,00	48.000.000,00	100,00%	26,67%		
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (orang)	320 Orang	476.208.000,00	77 Orang	214.619.000,00	10 Orang	108.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	77,00	214.619.000,00	24,06%	45,07%		
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (laporan)	4 Laporan	78.750.000,00	2 Laporan	36.750.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	36.750.000,00	50,00%	46,67%		
	5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**100 %**	**15.547.418.244,00**	**100 %**	**2.577.699.171,00**	**100 %**	**3.503.000.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**2.577.699.171,00**	**100,00%**	**16,58%**		URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**		**4 Dokumen**	**3.613.014.796,00**	**10 Orang**	**118.257.660,00**	**20 Orang**	**200.000.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00**	**118.257.660,00**	**100,00%**	**3,27%**		
	5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang	4 Dokumen	23.182.000,00	5 Orang	23.240.000,00	- -	-	-	-	0,00%	0,00%	5,00	23.240.000,00	100,00%	100,00%		
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (orang)	290 Orang	3.589.832.796,00	5 Orang	95.017.660	20 Orang	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	5,00	95.017.660,00	1,72%	2,65%		
	5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**11 Laporan**	**11.934.403.448,00**	**4 Laporan**	**2.459.441.511,00**	**3 Laporan**	**3.303.000.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4,00**	**2.459.441.511,00**	**36,36%**	**20,61%**		
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (laporan)	11 Laporan	11.934.403.448,00	4 Laporan	2.459.441.511	3 Laporan	3.303.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	4,00	2.459.441.511,00	36,36%	20,61%		
	4.02.4.02.0.002.	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Peningkatan Sarana Pertanian**	**100 %**	**29.258.601.500,00**	**100 %**	**36.260.242.791,00**	**100 %**	**26.360.883.800,00**	**0,08**	**2.094.176.582,00**	**7,94%**	**7,94%**	**100,08**	**38.354.419.373,00**	**100,00%**	**100,00%**	**SEKERTARIAT DPRD**	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.02.4.02.0.002.2.01.	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah dokumen laporan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD**	**100 %**	**3.911.460.000,00**	**100 %**	**4.796.478.109,00**	**100 %**	**3.654.176.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**4.796.478.109,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	4.02.4.02.0.002.2.01.01.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (5 Dokumen)	5 Dokumen	2.067.000.000,00	13 Dokumen	1.782.762.998,00	5 Dokumen	2.067.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	13,00	1.782.762.998,00	100,00%	86,25%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.4.02.0.002.2.01.02.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (6 Dokumen)	6 Dokumen	649.000.000,00	11 Dokumen	944.291.517,00	6 Dokumen	649.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	11,00	944.291.517,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.01.03.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (5 Dokumen)	5 Dokumen	300.000.000,00	14 Dokumen	366.076.479,00	5 Dokumen	300.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	14,00	366.076.479,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.01.04.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (4 Dokumen)	4 Dokumen	485.000.000,00	13 Dokumen	1.528.951.515,00	5 Dokumen	485.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	13,00	1.528.951.515,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.01.05.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (1 Dokumen)	1 Dokumen	360.460.000,00	1 Dokumen	174.395.600,00	1 Dokumen	103.176.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	174.395.600,00	100,00%	48,38%		
	4.02.4.02.0.002.2.01.06.	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (50 Orang)	50 Orang	50.000.000,00		-	5 Dokumen	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.02.	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah dokumen laporan pembahasan kebijakan anggaran**	**100 %**	**1.456.000.000,00**	**100 %**	**3.521.331.161,00**	**100 %**	**1.489.390.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**3.521.331.161,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	4.02.4.02.0.002.2.02.01.	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (1 Dokumen)	1 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	129.081.815,00	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	129.081.815,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.02.02.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (1 Dokumen)	1 Dokumen	180.000.000,00	3 Dokumen	521.238.423,00	1 Dokumen	180.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	521.238.423,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.02.03.	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (1 Dokumen)	1 Dokumen	304.000.000,00	3 Dokumen	585.928.168,00	1 Dokumen	304.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	585.928.168,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.02.04.	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (1 Dokumen)	1 Dokumen	235.000.000,00	3 Dokumen	663.519.365,00	1 Dokumen	235.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	663.519.365,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.02.05.	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (2 Dokumen)	2 Dokumen	160.000.000,00	6 Dokumen	428.605.366,00	2 Dokumen	160.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	6,00	428.605.366,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.02.06.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (1 Dokumen)	1 Dokumen	477.000.000,00	3 Dokumen	1.192.958.024,00	1 Dokumen	510.390.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	1.192.958.024,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.03.	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah dokumen laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**	**100 %**	**1.151.300.000,00**	**100 %**	**1.433.362.789,00**	**100 %**	**1.215.750.000,00**	**0,01**	**6.160.000,00**	**0,51%**	**0,51%**	**100,01**	**1.439.522.789,00**	**100,00%**	**100,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.4.02.0.002.2.03.01.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (1 Laporan)	1 Laporan	70.000.000,00	3 Laporan	75.768.322,00	1 Laporan	70.000.000,00	0,01	560.000,00	0,80%	0,80%	3,01	76.328.322,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.03.02.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (1 Laporan)	1 Laporan	70.000.000,00	3 Laporan	60.891.500,00	1 Laporan	70.000.000,00	0,01	560.000,00	0,80%	0,80%	3,01	61.451.500,00	100,00%	87,79%		
	4.02.4.02.0.002.2.03.03.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (1 Laporan)	1 Laporan	70.000.000,00	3 Laporan	65.978.200,00	1 Laporan	70.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	65.978.200,00	100,00%	94,25%		
	4.02.4.02.0.002.2.03.04.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (1 Laporan)	1 Laporan	70.000.000,00	3 Laporan	57.953.600,00	1 Laporan	70.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	57.953.600,00	100,00%	82,79%		
	4.02.4.02.0.002.2.03.05.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (1 Laporan)	1 Laporan	70.000.000,00	3 Laporan	86.188.120,00	1 Laporan	70.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	86.188.120,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.03.06.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (1 Dokumen)	1 Dokumen	90.000.000,00	3 Laporan	202.019.632,00	1 Dokumen	96.300.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	202.019.632,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.03.07.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (1 Dokumen)	1 Dokumen	76.300.000,00	3 Dokumen	112.048.630,00	1 Dokumen	90.000.000,00	0,06	5.040.000,00	5,60%	5,60%	3,06	117.088.630,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.03.08.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (1 Dokumen)	1 Dokumen	635.000.000,00	3 Dokumen	772.514.785,00	1 Dokumen	679.450.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	772.514.785,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.04.	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah dokumen laporan peningkatan kapasitas DPRD**	**100 %**	**5.888.974.500,00**	**100 %**	**3.821.287.997,00**	**100 %**	**4.687.850.800,00**	**0,15**	**566.833.881,00**	**15,00%**	**12,09%**	**100,15**	**4.388.121.878,00**	**100,00%**	**74,51%**		
	4.02.4.02.0.002.2.04.01.	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (1 Dokumen)	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1 Dokumen	374.154.000,00			0,18	183.797.900,00	18,38%	0,00%	1,18	557.951.900,00	100,00%	55,80%		
	4.02.4.02.0.002.2.04.02.	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (4 Dokumen)	4 Dokumen	3.475.952.000,00	12 Dokumen	1.690.498.656,00	4 Dokumen	3.612.850.800,00	0,10	341.035.981,00	10,00%	9,44%	12,10	2.031.534.637,00	100,00%	58,45%		
	4.02.4.02.0.002.2.04.04.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (16 orang)	16 Orang	700.000.000,00	44 Orang	130.642.720,00	6 Orang	145.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	44,00	130.642.720,00	100,00%	18,66%		
	4.02.4.02.0.002.2.04.05.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (16 orang)	16 Orang	133.022.500,00	38 Orang	1.031.848.500,00	12 Orang	480.000.000,00	0,10	42.000.000,00	10,00%	8,75%	38,10	1.073.848.500,00	100,00%	100,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.4.02.0.002.2.04.06.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (1 Dokumen)	1 Dokumen	480.000.000,00		-	1 Dokumen	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (1 Dokumen)	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	17.443.880,00	1 Dokumen	50.000.000,00	**0,00**	-	0,00%	0,00%	**1,00**	17.443.880,00	100,00%	**34,89%**		
	4.02.4.02.0.002.2.04.08.	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (1 Dokumen)	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	576.700.241,00	1 Dokumen	350.000.000,00	**0,00**	-	0,00%	0,00%	**1,00**	576.700.241,00	100,00%	**100,00%**		
	4.02.4.02.0.002.2.05.	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah dokumen laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat**	**100 %**	**4.686.492.000,00**	**100 %**	**7.093.381.154,00**	**100 %**	**5.222.392.000,00**	**0,25**	**945.000.000,00**	**25,00%**	**18,10%**	**100,25**	**8.038.381.154,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	4.02.4.02.0.002.2.05.01.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (1 Laporan)	1 Laporan	25.000.000,00		-	1 Laporan	25.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.05.02.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (1 dokumen)	1 Dokumen	522.600.000,00	3 Dokumen	938.119.677,00	1 Dokumen	550.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	938.119.677,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.05.03.	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (3 Dokumen)	3 Dokumen	4.088.892.000,00	9 Dokumen	6.155.261.477,00	3 Dokumen	4.577.392.000,00	0,25	945.000.000,00	25,00%	20,64%	9,25	7.100.261.477,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.05.04.	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (50 Orang)	50 Orang	50.000.000,00		-	50 Orang	70.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.06.	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah dokumen laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD**	**100 %**	**940.000.000,00**	**100 %**	**649.174.562,00**	**100 %**	**567.100.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**649.174.562,00**	**100,00%**	**69,06%**		
	4.02.4.02.0.002.2.06.01.	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (1 Dokumen)	1 Dokumen	410.000.000,00	1 Dokumen	112.412.800,00			0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	112.412.800,00	100,00%	27,42%		
	4.02.4.02.0.002.2.06.02.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (1 Laporan)	1 Laporan	530.000.000,00	3 Laporan	536.761.762,00	1 Laporan	567.100.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	536.761.762,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.07.	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah dokumen laporan pembahasan kerja sama daerah**	**100 %**	**1.255.000.000,00**	**100 %**	**1.631.930.455,00**	**100 %**	**603.975.000,00**	**0,35**	**199.600.000,00**	**35,00%**	**33,05%**	**100,35**	**1.831.530.455,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	4.02.4.02.0.002.2.07.01.	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (1 Dokumen)	1 Dokumen	25.000.000,00		-	1 Dokumen	23.975.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.4.02.0.002.2.07.02.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (1 Dokumen)	1 Dokumen	1.230.000.000,00	3 Dokumen	1.631.930.455,00	1 Dokumen	580.000.000,00	**0,35**	199.600.000,00	35,00%	34,41%	3,35	1.831.530.455,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.08.	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah dokumen laporan fasilitasi tugas DPRD**	**100 %**	**9.969.375.000,00**	**100 %**	**13.313.296.564,00**	**100 %**	**8.920.250.000,00**	**0,25**	**376.582.701,00**	**25,00%**	**4,22%**	**100,25**	**13.689.879.265,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	4.02.4.02.0.002.2.08.01.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (3 Dokumen)	3 Dokumen	3.250.000.000,00	9 Dokumen	3.913.082.894,00	3 Dokumen	3.331.250.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	9,00	3.913.082.894,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.08.02.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (1 Laporan)	1 Laporan	25.375.000,00		-	1 Laporan	26.400.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.08.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (1 Dokumen)	1 Dokumen	1.352.000.000,00	3 Dokumen	514.758.199,00	1 Dokumen	1.385.800.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	514.758.199,00	100,00%	38,07%		
	4.02.4.02.0.002.2.08.04.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (1 Dokumen)	1 Dokumen	1.592.000.000,00	3 Dokumen	2.348.567.899,00	1 Dokumen	1.631.800.000,00	0,25	376.582.701,00	25,00%	23,08%	3,25	2.725.150.600,00	100,00%	100,00%		
	4.02.4.02.0.002.2.08.05.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (5 Dokumen)	5 Dokumen	3.750.000.000,00	9 Dokumen	6.536.887.572,00	5 Dokumen	2.545.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	9,00	6.536.887.572,00	100,00%	100,00%		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100 %**	**560.000.000,00**	**100 %**	**440.757.000,00**	**100 %**	**94.756.360,50**	**0,30**	**26.550.000,00**	**30,00%**	**28,02%**	**100,30**	**467.307.000,00**	**100,00%**	**83,45%**	**KECAMATAN DUMAI BARAT**	URUSAN KEWILAYAHAN
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 Dokumen**	**200.000.000,00**	**7 Dokumen**	**169.796.200,00**	**1 Dokumen**	**32.218.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**7,00**	**169.796.200,00**	**100,00%**	**84,90%**		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Dokumen	200.000.000,00	7 Dokumen	169.796.200,00	1 Dokumen	32.218.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	7,00	169.796.200,00	100,00%	84,90%		
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**175.000.000,00**	**20 Dokumen**	**191.844.200,00**	**16 Dokumen**	**12.701.548,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**20,00**	**191.844.200,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	1.948.800,00	11 Dokumen	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	1,00	1.948.800,00	100,00%	1,95%		
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan	5 Laporan	30.000.000,00	19 Dokumen	189.895.400,00	5 laporan	12.701.548,00	0,00	-	0,00%	0,00%	19,00	189.895.400,00	100,00%	100,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	1 laporan	45.000.000,00		-	-	-	0,00	-	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**5 Laporan**	**185.000.000,00**	**15 Dokumen**	**79.116.600,00**	**5 Dokumen**	**49.836.812,50**	**0,60**	**26.550.000,00**	**60,00%**	**53,27%**	**15,60**	**105.666.600,00**	**100,00%**	**57,12%**		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen pelaksanaan MUSRENBANG RKPD di kecamatan dan kelurahan	5 Laporan	185.000.000,00	15 Dokumen	79.116.600,00	5 Dokumen	49.836.812,50	0,60	26.550.000,00	60,00%	53,27%	15,60	105.666.600,00	100,00%	57,12%		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 %**	**4.150.409.014,00**	**100 %**	**6.007.960.200,00**	**100 %**	**63.370.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**6.007.960.200,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**4 Kelurahan**	**4.030.409.014,00**	**538 laporan**	**5.907.960.200,00**	**4 Kelurahan**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**538,00**	**5.907.960.200,00**	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	400 Lembaga	15.409.014,00	517 Lembaga	18.080.000,00	4 Lembaga		0,00	-	0,00%	0,00%	517,00	18.080.000,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembamngunan sarana dan prasarana kelurahan	4 unit	3.800.000.000,00	8 laporan	5.147.616.600,00	2 laporan		0,00	-	0,00%	0,00%	8,00	5.147.616.600,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksnakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	200.000.000,00	8 laporan	712.268.000,00	2 laporan		0,00	-	0,00%	0,00%	8,00	712.268.000,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Walikota	1 Laporan	15.000.000,00	5 laporan	29.995.600,00	2 laporan		-	-	0,00%	0,00%	5,00	29.995.600,00	100,00%	100,00%		
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan yang diberdayakan**	**2 Lembaga**	**20.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Lembaga	20.000.000,00	-	-	-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**50 Keluarga**	**100.000.000,00**	**50 keluarga**	**100.000.000,00**	**50 Keluarga**	**63.370.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**50,00**	**100.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaraan Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan	Jumlah Keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat kan pentingnya penghayatan	50 Keluarga	10.000.000,00	50 keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	6.610.000,00	-	-	0,00%	0,00%	50,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.06.0002	peningkatan Kesadaraan Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaraan keluarga dalam membangun kerja	50 Keluarga	10.000.000,00	50 keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	6.610.000,00	-	-	0,00%	0,00%	50,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatkan Ketahanan pangan keluarga	jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pagan keluarga	50 Keluarga	10.000.000,00	50 keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	9.100.000,00	-	-	0,00%	0,00%	50,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.06.0006	peningkatan kesadaraan keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah keluarga yang peningkatan kesadaraan keluarga keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	50 Keluarga	10.000.000,00	50 keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	8.210.000,00	-	-	0,00%	0,00%	50,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaraan Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	50 Keluarga	10.000.000,00	50 keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	8.210.000,00	-	-	0,00%	0,00%	50,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaraan Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	50 Keluarga	10.000.000,00	50 keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	8.210.000,00	-	-	0,00%	0,00%	50,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaraan keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian Lingkungan Hidup	jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup	50 Keluarga	10.000.000,00	50 keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	50 Keluarga	10.000.000,00	50 keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga		-	-	0,00%	0,00%	50,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.06.011	Pelatihan keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	50 Keluarga	10.000.000,00	50 keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	8.210.000,00	-	-	0,00%	0,00%	50,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan kesadaraan keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	50 Keluarga	10.000.000,00	50 keluarga	10.000.000,00	50 Keluarga	8.210.000,00	-	-	0,00%	0,00%	50,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**600.000.000,00**	**100 %**	**202.000.000,00**	**100 %**	**30.383.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**202.000.000,00**	**100,00%**	**33,67%**		
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah dokumen hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**1 Laporan**	**500.000.000,00**	**3 Dokumen**	**202.000.000,00**	**1 Dokumen**	**30.383.000,00**	-	-	0,00%	0,00%	3,00	**202.000.000,00**	100,00%	40,40%		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	500.000.000,00	3 Dokumen	202.000.000,00	1 Dokumen	30.383.000,00	-	-	0,00%	0,00%	3,00	202.000.000,00	100,00%	40,40%		
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumalh dokumen hasil penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**1 Laporan**	**100.000.000,00**		**0,00**	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang/undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Jumlah Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang/undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	1 Laporan	100.000.000,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**150.000.000,00**	**100 %**	**58.830.900,00**	**100 %**	-	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**58.830.900,00**	**100,00%**	**39,22%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**5 Lomba**	**150.000.000,00**	**55 orang**	**58.830.900,00**	**5 lomba**	**-**	-	-	0,00%	0,00%	55,00	**58.830.900,00**	100,00%	39,22%		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan	5 Lomba	150.000.000,00	55 orang	58.830.900,00	5 lomba	-	-	-	0,00%	0,00%	55,00	58.830.900,00	100,00%	39,22%		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**100 %**	**250.000.000,00**	**100 %**	**54.489.300,00**	**100 %**	**11.551.900,00**	**0,30**	**3.510.000,00**	**30,38%**	**30,38%**	**100,30**	**57.999.300,00**	**100,00%**	**23,20%**	**KECAMATAN DUMAI TIMUR**	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**1 Laporan**	**250.000.000,00**	**3 Laporan**	**54.489.300,00**	**1 Laporan**	**11.551.900,00**	**0,30**	**3.510.000,00**	**30,38%**	**30,38%**	**3,30**	**57.999.300,00**	**100,00%**	**23,20%**		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	250.000.000,00	2 Laporan	54.489.300,00	1 Laporan	11.551.900,00	0,30	3.510.000,00	30,38%	30,38%	2,30	57.999.300,00	100,00%	23,20%		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100 %**	**5.795.000.000,00**	**100 %**	**6.384.152.555,00**	**100 %**	**3.264.819.165,00**	**0,02**	**50.500.000,00**	**2,00%**	**1,55%**	**100,02**	**6.434.652.555,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksanaan pemberdayaan Masyarakat kelurahan**	**100 %**	**5.670.000.000,00**	**100 %**	**6.188.957.105,00**	**100 %**	**3.203.300.840,00**	**0,02**	**50.500.000,00**	**2,00%**	**1,58%**	**100,02**	**6.239.457.105,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1000 Orang	100.000.000,00	1500 Orang	66.640.480,00	500 Orang	53.000.000,00	1,00	50.500.000,00	100,00%	95,28%	1.501,00	117.140.480,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan di Kelurahan	5 Kel	4.000.000.000,00	5 Kel	5.038.816.347,00	5 Kel	2.737.625.755,00	-	-	0,00%	0,00%	5,00	5.038.816.347,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas/ormas	1.500.000.000,00	5 Pokmas/Ormas	1.059.950.278,00	5 Pokmas/Ormas	412.675.085,00	-	-	0,00%	0,00%	5,00	1.059.950.278,00	100,00%	70,66%		
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Walikota	1 laporan	70.000.000,00	3 Laporan	23.550.000,00	- -	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	3,00	23.550.000,00	100,00%	33,64%		
	7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100 %**	**125.000.000,00**	**100 %**	**195.195.450,00**	**100 %**	**61.518.325,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**195.195.450,00**	**100,00%**	**100,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	5 Kel	25.000.000,00	5 Kel	39.001.050,00	60 Keluarga	16.735.275,00	-	-	0,00%	0,00%	5,00	39.001.050,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5 Kel	25.000.000,00	5 Kel	39.048.600,00	60 Keluarga	16.735.275,00	-	-	0,00%	0,00%	5,00	39.048.600,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5 Kel	25.000.000,00	5 Kel	39.048.600,00	60 Keluarga	16.735.275,00	-	-	0,00%	0,00%	5,00	39.048.600,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5 Kel	25.000.000,00	5 Kel	39.048.600,00	60 Keluarga	11.312.500,00	-	-	0,00%	0,00%	5,00	39.048.600,00	100,00%	100,00%		
	7.01.03.2.06.00011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	5 Kel	25.000.000,00	5 Kel	39.048.600,00	- -	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	5,00	39.048.600,00	100,00%	100,00%		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**100 %**	**150.000.000,00**	**100 %**	**195.970.400,00**	**100 %**	**21.675.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**195.970.400,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksanannya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**150.000.000,00**	**2 Laporan**	**195.970.400,00**	**1 Laporan**	**21.675.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**195.970.400,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	150.000.000,00	2 Laporan	195.970.400,00	1 Laporan	21.675.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	195.970.400,00	100,00%	100,00%		
	7. 1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Memadai**	**100 %**	**7.917.000.000,00**	**100 %**	**10.103.049.466,00**	**100 %**	**4.234.353.325,00**	**0,10**	**222.501.740,00**	**10,00%**	**5,25%**	**100,10**	**10.325.551.206,00**	**100,00%**	**100,00%**	**KECAMATAN BUKIT KAPUR**	UNSUR KEWILAYAHAN
	7. 1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**100 %**	**7.527.000.000,00**	**100 %**	**9.785.259.111,00**	**100 %**	**4.180.704.150,00**	**0,10**	**222.501.740,00**	**10,00%**	**5,32%**	**100,10**	**10.007.760.851,00**	**100,00%**	**100,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7. 1.3.02.02.0001	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	105.000.000,00	12 Bulan	271.601.500,00	12 Bulan	82.676.200,00	1,00	82.524.740,00	100,00%	99,82%	13,00	354.126.240,00	100,00%	100,00%		
	7. 1.3.02.02.0002	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	7.000.000.000,00	12 Bulan	8.484.740.938,00	12 Bulan	3.592.497.050,00	0,05	139.977.000,00	5,00%	3,90%	12,05	8.624.717.938,00	100,00%	100,00%		
	7. 1.3.02.02.0003	3. Evaluasi Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	60.000.000,00	12,00 Bulan	4.500.000,00			0,00	-	0,00%	0,00%	12,00	4.500.000,00	100,00%	7,50%		
	7. 1.3.02.02.0004	4. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	362.000.000,00	12 Bulan	1.024.416.673,00	12 Bulan	505.530.900,00	0,00	-	0,00%	0,00%	12,00	1.024.416.673,00	100,00%	100,00%		
	7. 1.3.02.03	**Perberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**100 %**	**150.000.000,00**	**100 %**	**123.664.799,00**	**100 %**	-	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**123.664.799,00**	**100,00%**	**82,44%**		
	7. 1.3.02.03.0001	Peningkatan Kapsitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	30.000.000,00	12 Bulan	123.664.799,00	12,00 Bulan		-	-	0,00%	0,00%	12,00	123.664.799,00	100,00%	100,00%		
	7. 1.3.02.03.0002	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Bulan	30.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7. 1.3.02.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	12 Bulan	30.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7. 1.3.02.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Bulan	30.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7. 1.3.02.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Bulan	30.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7. 1.3.02.03	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**100 %**	**240.000.000,00**	**100 %**	**194.125.556,00**	**100 %**	**53.649.175,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**194.125.556,00**	**100,00%**	**80,89%**		
	7. 1.3.02.03.0001	1. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	10.498.790,00			-	-	0,00%	0,00%	12,00	10.498.790,00	100,00%	52,49%		
	7. 1.3.02.03.0002	2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	36.410.587,00	12 Bulan	12.266.750,00	0,00	-	0,00%	0,00%	12,00	36.410.587,00	100,00%	100,00%		
	7. 1.3.02.03.0003	3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	9.966.907,00			-	-	0,00%	0,00%	12,00	9.966.907,00	100,00%	49,83%		
	7. 1.3.02.03.0004	4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	10.817.200,00			-	-	0,00%	0,00%	12,00	10.817.200,00	100,00%	54,09%		
	7. 1.3.02.03.0005	5. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Deraiat Kesehatan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	10.692.200,00			-	-	0,00%	0,00%	12,00	10.692.200,00	100,00%	53,46%		
	7. 1.3.02.06.0006	6. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	29.414.201,00	12 Bulan	12.701.452,00	0,00	-	0,00%	0,00%	12,00	29.414.201,00	100,00%	100,00%		
	7. 1.3.02.06.0007	7. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	27.160.566,00	12 Bulan	16.317.973,00	0,00	-	0,00%	0,00%	12,00	27.160.566,00	100,00%	100,00%		
	7. 1.3.02.06.0008	8. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	29.463.004,00			0,00	-	0,00%	0,00%	12,00	29.463.004,00	100,00%	100,00%		
	7. 1.3.02.06.0009	9. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	29.702.101,00	12 Bulan	12.363.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	12,00	29.702.101,00	100,00%	100,00%		
	7. 1.3.02.06.0010	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	12 Bulan	20.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7. 1.3.02.06.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	12 Bulan	20.000.000,00					-	-	0,00%	#DIV/0!	-	-	0,00%	0,00%		
	7. 1.3.02.06.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	12 Bulan	20.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7. 1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**100 %**	**180.000.000,00**	**100 %**	**162.063.800,00**	**100 %**	**3.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**162.063.800,00**	**100,00%**	**90,04%**		
	7. 1.4.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Dokumen Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**180.000.000,00**	**100 %**	**162.063.800,00**	**100 %**	**3.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**162.063.800,00**	**100,00%**	**90,04%**		
	7. 1.4.02.01.0001	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	170.000.000,00	12 Bulan	162.063.800,00	12 Bulan	3.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	12,00	162.063.800,00	100,00%	95,33%		
	7. 1.4.02.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Bulan	10.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7. 1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**100 %**	**595.000.000,00**	**100 %**	**302.707.599,00**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**302.707.599,00**	**100,00%**	**50,88%**		
	7. 1.2 02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**340.000.000,00**	**100 %**	**222.945.407,00**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**222.945.407,00**	**100,00%**	**65,57%**		
	7. 1.2.02.02.0002	1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	210.000.000,00	12 Bulan	141.055.000,00			-	-	0,00%	0,00%	12,00	141.055.000,00	100,00%	67,17%		
	7. 1.2.02.02.0003	2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	70.000.000,00	12 Bulan	81.890.407,00			-	-	0,00%	0,00%	12,00	81.890.407,00	100,00%	100,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7. 1.2.02.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Bulan	60.000.000,00		-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7. 1.2 02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100 %**	**45.000.000,00**		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
	7. 1.2.02.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Bulan	45.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7. 1.2.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**210.000.000,00**	**100 %**	**79.762.192,00**	**100,00 %**	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**79.762.192,00**	**100,00%**	**37,98%**		
	7. 1.2.02.01.0002	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	70.000.000,00	12 Bulan	79.762.192,00	12,00 Bulan		-	-	0,00%	0,00%	12,00	79.762.192,00	100,00%	100,00%		
	7. 1.2.02.01.0001	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Bulan	140.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7. 1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**100 %**	**261.000.000,00**	**100 %**	**70.509.000,00**		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**70.509.000,00**	**100,00%**	**27,01%**		
	7. 1.5.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**261.000.000,00**	**100 %**	**70.509.000,00**		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**70.509.000,00**	**100,00%**	**27,01%**		
	7. 1.5.02.01.0001	1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	27.000.000,00	12 Bulan	70.509.000,00			-	-	0,00%	0,00%	12,00	70.509.000,00	100,00%	100,00%		
	7. 1.5.02.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Bulan	25.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7. 1.5.02.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12 Bulan	25.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7. 1.5.02.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan GolonganLainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku ,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12 Bulan	157.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7. 1.5.02.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Bulan	27.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	07:01:02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai kota**	**100 %**	**1.348.321.998,00**	**100 %**	**396.108.460,00**	**100 %**	**349.070.372,00**	**0,10**	**29.973.000,00**	**10,00%**	**8,59%**	**100,10**	**426.081.460,00**	**100,00%**	**31,60%**	**KECAMATAN DUMAI KOTA**	UNSUR KEWILAYAHAN
	07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**4 Dokumen**	**422.723.550,00**	**2 Dokumen**	**122.692.550,00**	**1 Dokumen**	**119.996.189,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**122.692.550,00**	**50,00%**	**29,02%**		
	07.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	422.723.550,00	2 Dokumen	122.692.550,00	1 Dokumen	119.996.189,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2,00	122.692.550,00	50,00%	29,02%		
	07.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**40 Dokumen**	**614.979.248,00**	**13 Dokumen**	**146.793.310,00**	**11 Dokumen**	**154.074.183,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**13,00**	**146.793.310,00**	**32,50%**	**23,87%**		
	07.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	20 Dokumen	30.806.910,00		-	5 Dokumen	9.092.933,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	07.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	547.689.110,00	12 Laporan	141.793.310,00	5 Laporan	135.000.000,00	**0,00**	-	0,00%	0,00%	12,00	141.793.310,00	60,00%	25,89%		
	07.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	36.483.228,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	9.981.250,00	**0,00**	-	0,00%	0,00%	1,00	5.000.000,00	25,00%	13,70%		
	07.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**30 Dokumen**	**310.619.200,00**	**10 Laporan**	**126.622.600,00**	**2 Laporan**	**75.000.000,00**	**0,50**	**29.973.000,00**	**50,00%**	**39,96%**	**10,50**	**156.595.600,00**	**35,00%**	**50,41%**		
	07.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30 Laporan	310.619.200,00	10 Laporan	126.622.600,00	2 Laporan	75.000.000,00	0,50	29.973.000,00	50,00%	39,96%	10,50	156.595.600,00	35,00%	50,41%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	07:01:03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota**	**100 %**	**26.612.844.716,00**	**100 %**	**5.598.254.894,00**	**100 %**	**4.992.537.000,00**	**1,00**	**15.200.000,00**	**100,00%**	**0,30%**	**101,00**	**5.613.454.894,00**	**100,00%**	**21,09%**		
	07.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan Kelurahan**	**5 Kelurahan**	**25.322.844.716,00**	**5 Kelurahan**	**5.466.925.694,00**	**5 Kelurahan**	**4.602.537.000,00**	**1,00**	**15.200.000,00**	**100,00%**	**0,33%**	**6,00**	**5.482.125.694,00**	**100,00%**	**21,65%**		
	07.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	592 Lembaga	190.000.000,00	300 Lembaga	36.800.000,00	148 lembaga	40.000.000,00	1,00	15.200.000,00	100,00%	38,00%	301,00	52.000.000,00	50,84%	27,37%		
	07.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	4.049.615.036,00	32 Unit	578.528.500,00	24 Unit	809.973.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	32,00	578.528.500,00	100,00%	14,29%		
	07.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	962.384.964,00	2 Pokmas / Ormas	145.141.100,00	1 pokmas/ormas	89.997.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2,00	145.141.100,00	40,00%	15,08%		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	165 Unit	4.049.615.036,00	59 Unit	751.431.000,00	24 unit	676.415.700,00	0,00	-	0,00%	0,00%	59,00	751.431.000,00	35,76%	18,56%		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dumai Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	962.384.964,00	2 Pokmas / Ormas	781.016.500,00	1 pokmas/ormas	75.157.300,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2,00	781.016.500,00	40,00%	81,15%		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit	4.049.615.036,00	38 Unit	979.426.580,00	24 Unit	879.407.100,00	0,00	-	0,00%	0,00%	38,00	979.426.580,00	42,22%	24,19%		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Laksamana	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	962.384.964,00	2 Pokmas / Ormas	68.053.314,00	1 pokmas/ormas	97.711.900,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2,00	68.053.314,00	40,00%	7,07%		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	4.049.615.036,00	43 Unit	996.365.000,00	24 Unit	863.328.600,00	0,00	-	0,00%	0,00%	43,00	996.365.000,00	43,00%	24,60%		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	962.384.964,00	2 Pokmas / Ormas	84.960.000,00	1 pokmas/ormas	95.925.400,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2,00	84.960.000,00	40,00%	8,83%		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60 Unit	4.049.615.036,00	35 Unit	857.504.100,00	24 Unit	832.158.900,00	0,00	-	0,00%	0,00%	35,00	857.504.100,00	58,33%	21,17%		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukajadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	840.934.080,00	2 Pokmas / Ormas	126.590.000,00	1 pokmas/ormas	92.462.100,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2,00	126.590.000,00	40,00%	15,05%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	07.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	5 Laporan	194.295.600,00	3 Laporan	61.109.600,00	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	61.109.600,00	60,00%	31,45%		
	07.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**10 Kegiatan**	**740.000.000,00**		-	**6 Kegiatan**	**240.000.000,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
	07.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	120 Keluarga	155.000.000,00			6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	07.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	120 Keluarga	135.000.000,00			6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	07.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	120 Keluarga	300.000.000,00			6 Unit	100.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	07.01.03.2.03.0004	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	120 Keluarga	75.000.000,00			1 Laporan	25.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	07.01.03.2.03.0005	Fasiltas Pemamfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasiltas Pemamfaatan Teknologi Tepat Guna	120 Keluarga	75.000.000,00			2 Laporan	25.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	07.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**	**12 Kegiatan**	**550.000.000,00**	**60 Keluarga**	**131.329.200,00**	**30 keluarga**	**150.000.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**60,00**	**131.329.200,00**	**100,00%**	**23,88%**		
	07.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	120 Keluarga	48.659.900,00	60 Keluarga	16.867.900,00	30 keluarga	12.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	60,00	16.867.900,00	50,00%	34,66%		
	07.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	120 Keluarga	86.000.000,00	30 Keluarga	49.577.000,00	30 keluarga	12.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	30,00	49.577.000,00	25,00%	57,65%		
	07.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 Keluarga	45.368.100,00	60 Keluarga	14.058.100,00	30 keluarga	12.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	60,00	14.058.100,00	50,00%	30,99%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	07.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	120 Keluarga	46.000.000,00	60 Keluarga	14.790.000,00	30 keluarga	12.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	60,00	14.790.000,00	50,00%	32,15%		
	07.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	90 Keluarga	36.000.000,00	60 Keluarga	1.800.000,00	30 keluarga	12.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	60,00	1.800.000,00	66,67%	5,00%		
	07.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	90 Keluarga	36.000.000,00			30 keluarga	12.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	07.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	120 Keluarga	63.972.000,00	60 Keluarga	18.342.000,00	30 keluarga	18.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	60,00	18.342.000,00	50,00%	28,67%		
	07.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	90 Keluarga	36.000.000,00	30,00 Keluarga	1.800.000,00	30 keluarga	12.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	30,00	1.800.000,00	33,33%	5,00%		
	07.01.03.2.06.0009	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	120 Keluarga	44.000.000,00			30 keluarga	12.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	07.01.03.2.06.0010	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	90 Keluarga	36.000.000,00	30 Keluarga	9.744.200,00	30 keluarga	12.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	30,00	9.744.200,00	33,33%	27,07%		
	07.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	90 Keluarga	36.000.000,00	30 Keluarga	4.350.000,00	30 keluarga	12.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	30,00	4.350.000,00	33,33%	12,08%		
	07.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	90 Keluarga	36.000.000,00			30 keluarga	12.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	07:01:04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai kota**	**100 %**	**604.800.000,00**	**100 %**	**250.151.103,00**	**100 %**	**89.490.724,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**250.151.103,00**	**100,00%**	**41,36%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	07.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum**	**5 Laporan**	**604.800.000,00**	**2 Laporan**	**250.151.103,00**	**1 laporan**	**89.490.724,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**250.151.103,00**	**40,00%**	**41,36%**		
	07.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	604.800.000,00	2 Laporan	250.151.103,00	1 laporan	89.490.724,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2,00	250.151.103,00	40,00%	41,36%		
	07:01:05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota**	**100 %**	**584.617.204,00**	**100 %**	**320.651.411,00**	**100 %**	**149.999.900,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**320.651.411,00**	**100,00%**	**54,85%**		
	07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25 Kegiatan**	**584.617.204,00**	**200 Orang**	**320.651.411,00**	**100 orang**	**149.999.900,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**200,00**	**320.651.411,00**	**100,00%**	**54,85%**		
	07.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	15.000.000,00	200 Orang	186.044.307,00	100 orang	5.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	200,00	186.044.307,00	66,67%	100,00%		
	07.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	15.000.000,00			100 orang	5.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	07.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 Orang	15.000.000,00			100 orang	5.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	07.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400 Orang	524.617.204,00	200 Orang	134.607.104,00	100 orang	129.999.900,00	0,00	-	0,00%	0,00%	200,00	134.607.104,00	50,00%	25,66%		
	07.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	15.000.000,00			1 Laporan	5.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	7.1.2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan**	**100 %**	**1.060.513.700,00**	**100 %**	**280.311.526,00**	**100 %**	**50.015.750,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**280.311.526,00**	**100,00%**	**26,43%**	**IATAN DUMAI SELATAN**	UNSUR KEWILAYAHAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 Dokumen**	**360.218.550,00**	**3 Dokumen**	**99.029.026,00**	**1 Dokumen**	**20.000.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**3,00**	**99.029.026,00**	**100,00%**	**27,49%**	**KECAM**	
	7.1.2.2.01.2	Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	360.218.550,00	3 Dokumen	99.029.026,00	**1 Dokumen**	20.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	3,00	99.029.026,00	100,00%	27,49%		
	7.1.2.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**5 Laporan**	**284.895.250,00**	**5 Laporan**	**181.282.500,00**	**5 Laporan**	**30.015.750,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**5,00**	**181.282.500,00**	**100,00%**	**63,63%**		
	7.1.2.2.02.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	284.895.250,00	5 Laporan	181.282.500,00	5 Laporan	30.015.750,00	0,00	-	0,00%	0,00%	5,00	181.282.500,00	100,00%	63,63%		
	7.1.2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**2 Laporan**	**415.399.900,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**		
	7.1.2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	2 Laporan	415.399.900,00		0,00			0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	7.1.3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan**	**100 %**	**17.583.581.567,00**	**100 %**	**5.726.802.775,00**	**100 %**	**77.710.260,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**5.726.802.775,00**	**100,00%**	**32,57%**		
	7.1.3	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**20 Laporan**	**115.000.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Langsung yang bersifat Rutin	20 Laporan	115.000.000,00					0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan Kelurahan**	**131 Dokumen**	**16.879.081.567,00**	**4 Laporan**	**5.490.600.725,00**	**1 Laporan**	**12.475.922,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4,00**	**5.490.600.725,00**	**3,05%**	**32,53%**		
	7.1.3.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	5 Dokumen	10.000.000,00	100 Lembaga	25.411.500,00			0,00	-	0,00%	0,00%	100,00	25.411.500,00	100,00%	100,00%		
	7.1.3.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	120 Unit	13.970.434.067,00	120 Unit	4.787.832.850,00			0,00	-	0,00%	0,00%	120,00	4.787.832.850,00	100,00%	34,27%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.1.3.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	5 Pokmas	2.798.647.500,00	5 Pokmas	651.368.700,00			0,00	-	0,00%	0,00%	5,00	651.368.700,00	100,00%	23,27%		
	7.1.3.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	25.987.675,00	1 Laporan	12.475.922,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	25.987.675,00	100,00%	25,99%		
	7.1.3.2.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100 Lembaga**	**309.500.000,00**	**100 Lembaga**	**0,00**	**100 Lembaga**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	7.1.3.2.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	100 Lembaga	61.900.000,00	100 Lembaga	0,00	100 Lembaga		0,00	-	0,00%	0,00%	100,00	0,00	100,00%	0,00%		
	7.1.3.2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	61.900.000,00	100 Lembaga	0,00	100 Lembaga		0,00	-	0,00%	0,00%	100,00	0,00	100,00%	0,00%		
	7.1.3.2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan	6 Unit	61.900.000,00	6 Unit	0,00	6 Unit		0,00	-	0,00%	0,00%	6,00	0,00	100,00%	0,00%		
	7.1.3.2.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	61.900.000,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan		0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	0,00	100,00%	0,00%		
	7.1.3.2.	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Lporan	61.900.000,00	2 Lporan	0,00	2 Lporan		0,00	-	0,00%	0,00%	2,00	0,00	100,00%	0,00%		
	7.1.3.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**50 Keluarga**	**280.000.000,00**	**30 Keluarga**	**236.202.050,00**	**30 Keluarga**	**65.234.338,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**30,00**	**236.202.050,00**	**60,00%**	**84,36%**		
	7.1.3.2.06.0001	Pembentukan dan pertumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti Pembentukan dan pertumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	50 Keluarga	40.000.000,00	30 Keluarga	54.607.200	30 Keluarga	9.239.175,00	0,00	-	0,00%	0,00%	30,00	54.607.200,00	60,00%	100,00%		
	7.1.3.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	40.000.000,00	30 Keluarga	25.489.100	30 Keluarga	6.633.340,00	0,00	-	0,00%	0,00%	30,00	25.489.100,00	60,00%	63,72%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.1.3.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	40.000.000,00	30 Keluarga	13.998.550	30 Keluarga	5.998.505,00	0,00	-	0,00%	0,00%	30,00	13.998.550,00	60,00%	35,00%		
	7.1.3.2.06.0007	Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	40.000.000,00	30 Keluarga	13.355.700	30 Keluarga	8.065.794,00	0,00	-	0,00%	0,00%	30,00	13.355.700,00	60,00%	33,39%		
	7.1.3.2.06.0008	Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	40.000.000,00	30 Keluarga	23.168.300	30 Keluarga	7.615.174,00	0,00	-	0,00%	0,00%	30,00	23.168.300,00	60,00%	57,92%		
	7.1.3.2.06.0009	Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	20.000.000,00	30 Keluarga	28.741.200	30 Keluarga	7.091.340,00	0,00	-	0,00%	0,00%	30,00	28.741.200,00	60,00%	100,00%		
	7.1.3.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	20.000.000,00	30 Keluarga	18.413.800	30 Keluarga	11.657.010,00	0,00	-	0,00%	0,00%	30,00	18.413.800,00	60,00%	92,07%		
	7.1.3.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah keluarga yang mengikutiPelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	20.000.000,00	30 Keluarga	24.754.800	30 Keluarga	8.934.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	30,00	24.754.800,00	60,00%	100,00%		
	7.1.3.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah keluarga yang mengikutiPelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	20.000.000,00	30 Keluarga	33.673.400	30 Keluarga		0,00	-	0,00%	0,00%	30,00	33.673.400,00	60,00%	100,00%		
	7.1.4	**Program Koordinasi dan Ketentraman Umum**	**Persentase Koordinasi dan Ketentraman Umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan**	**100 %**	**511.637.900,00**	**100 %**	**112.742.000,00**	**100 %**	**50.000.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**112.742.000,00**	**100,00%**	**22,04%**		
	7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**511.637.900,00**	**1 Laporan**	**112.742.000,00**	**1 Laporan**	**50.000.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**112.742.000,00**	**100,00%**	**22,04%**		
	7.1.4.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasiona Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	1 Laporan	511.637.900,00	1 Laporan	112.742.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1,00	112.742.000,00	100,00%	22,04%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.1.5.2.01	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan**	**100 %**	**677.487.430,00**	**100 %**	**42.550.000,00**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**42.550.000,00**	**100,00%**	**6,28%**		
	7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**30 Orang**	**677.487.430,00**	**30 Orang**	**42.550.000,00**	**30 Orang**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**30,00**	**42.550.000,00**	**100,00%**	**6,28%**		
	7.1.5.2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	30.000.000,00	30 Orang	42.550.000,00	30 Orang		0,00	-	0,00%	0,00%	30,00	42.550.000,00	100,00%	100,00%		
	7.1.5.2.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 Orang	30.000.000,00		0,00			0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	7.1.5.2.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	30 Orang	15.000.000,00		0,00			0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah lomba MTQ / STQ tingkat kecamatan	30 Orang	562.960.000,00		0,00			0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	7.1.5.2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30 Orang	39.527.430,00		0,00			0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kewilayahan Kecamatan Medang Kampai**	**100 %**	**2.489.477.250,00**	**100 %**	**234.260.450,00**	**100 %**	**16.045.313,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**234.260.450,00**	**100,00%**	**9,41%**	**KECAMATAN MEDANG KAMPAI**	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Penigkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**283.500.000,00**	**100 %**	**12.893.700,00**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**12.893.700,00**	**100,00%**	**4,55%**		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	283.500.000,00	1 Dokumen	12.893.700,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	12.893.700,00	100,00%	4,55%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100 %**	**1.230.000.000,00**	**100 %**	**161.129.850,00**	**100 %**	**16.045.313,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**161.129.850,00**	**100,00%**	**13,10%**		
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	190.000.000,00	1 Dokumen	16.544.000,00	1 Dokumen	16.045.313,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	16.544.000,00	100,00%	8,71%		
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	5 Laporan	910.000.000,00	5 Laporan	144.585.850,00			-	-	0,00%	0,00%	5,00	144.585.850,00	100,00%	15,89%		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	130.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**100 %**	**975.977.250,00**	**100 %**	**60.236.900,00**	**100 %**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**60.236.900,00**	**100,00%**	**6,17%**		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	975.977.250,00	5 Laporan	60.236.900,00			-	-	0,00%	0,00%	5,00	60.236.900,00	100,00%	6,17%		
	7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 %**	**29.898.000.000,00**	**100 %**	**5.398.306.230,00**	**100 %**	**2.612.957.019,00**	**1,00**	**41.617.500,00**	**100,00%**	**1,59%**	**101,00**	**5.439.923.730,00**	**100,00%**	**18,19%**		
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan Kelurahan**	**100 %**	**29.098.000.000,00**	**100 %**	**5.199.314.384,00**	**100 %**	**2.555.389.700,00**	**1,00**	**41.617.500,00**	**100,00%**	**1,63%**	**101,00**	**5.240.931.884,00**	**100,00%**	**18,01%**		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kelurahan	12 Lembaga	388.000.000,00	12,00 Lembaga	37.791.600,00	12 Lembaga	41.662.500,00	1,00	41.617.500,00	100,00%	99,89%	13,00	79.409.100,00	100,00%	20,47%		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit	19.488.960.000,00	90 Unit	4.568.978.884,00	90 Unit	2.055.225.700,00	-	-	0,00%	0,00%	90,00	4.568.978.884,00	100,00%	23,44%		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas	8.631.040.000,00	20 Pokmas	567.884.600,00	20 Pokmas	458.501.500,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	567.884.600,00	100,00%	6,58%		
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	590.000.000,00	1 Laporan	24.659.300,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	24.659.300,00	100,00%	4,18%		
	7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100 %**	**800.000.000,00**	**100 %**	**198.991.846,00**	**100 %**	**57.567.319,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**198.991.846,00**	**100,00%**	**24,87%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	80 Keluarga	80.000.000,00	80 Keluarga	49.347.300,00	40 Keluarga	14.425.000,00	-	-	0,00%	0,00%	80,00	49.347.300,00	100,00%	61,68%		
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mngikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	120 Keluarga	240.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	80 Keluarga	80.000.000,00	80 Keluarga	39.996.200,00	40 Keluarga	15.425.000,00	-	-	0,00%	0,00%	80,00	39.996.200,00	100,00%	50,00%		
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup	120 Keluarga	200.000.000,00	120 Keluarga	50.000.000,00			-	-	0,00%	0,00%	120,00	50.000.000,00	100,00%	25,00%		
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam PeningkatanTaraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam PeningkatanTaraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40 Keluarga	80.000.000,00	40 Keluarga	9.990.000,00			-	-	0,00%	0,00%	40,00	9.990.000,00	100,00%	12,49%		
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	120 Keluarga	120.000.000,00	120,00 Keluarga	49.658.346,00	60 Keluarga	27.717.319,00	-	-	0,00%	0,00%	120,00	49.658.346,00	100,00%	41,38%		
	7.01.04	**Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**410.000.000,00**	**100 %**	**221.227.400,00**	**100 %**	**29.554.021,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**221.227.400,00**	**100,00%**	**53,96%**		
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**410.000.000,00**	**100 %**	**221.227.400,00**	**100 %**	**29.554.021,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**221.227.400,00**	**100,00%**	**53,96%**		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	410.000.000,00	1 Laporan	221.227.400,00	1 Laporan	29.554.021,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	221.227.400,00	100,00%	53,96%		
	7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**1.595.711.213,00**	**100 %**	**2.500.000,00**	**100 %**	**7.737.279,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**2.500.000,00**	**100,00%**	**0,16%**		
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 %**	**1.595.711.213,00**	**100 %**	**2.500.000,00**	**100 %**	**7.737.279,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**2.500.000,00**	**100,00%**	**0,16%**		
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	100 Orang	200.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	200.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	200.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	795.711.213,00	20 Orang	2.500.000,00	40 Orang	7.737.279,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	2.500.000,00	20,00%	0,31%		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	200.000.000,00					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**	**100 %**	**1.954.535.670,00**	**100 %**	**378.904.731,00**	**100 %**	**28.524.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**378.904.731,00**	**100,00%**	**19,39%**	**KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Dokumen/ Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**8 Dokumen**	**348.217.857,00**	**1 Dokumen**	**36.273.900,00**		-	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**36.273.900,00**	**12,50%**	**10,42%**		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	159.000.000,00		-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	189.217.857,00	1 Dokumen	36.273.900,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	36.273.900,00	20,00%	19,17%		
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**8 laporan**	**1.272.597.013,00**	**2 laporan**	**255.440.631,00**		-	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**255.440.631,00**	**25,00%**	**20,07%**		
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	**1.089.999.351,00**	1 laporan	237.558.366,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	237.558.366,00	25,00%	21,79%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	182.597.662,00	1 laporan	17.882.265,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	17.882.265,00	25,00%	9,79%		
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**5 laporan**	**333.720.800,00**	**2 laporan**	**87.190.200,00**	**1 laporan**	**28.524.000,00**	**1,00**	**-**	**100,00%**	**0,00%**	**3,00**	**87.190.200,00**	**60,00%**	**26,13%**		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 laporan	333.720.800,00	2 laporan	87.190.200,00	1 laporan	28.524.000,00	1,00	-	100,00%	0,00%	3,00	87.190.200,00	60,00%	26,13%		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**	**100 %**	**21.970.335.616,00**	**100 %**	**2.761.591.800,00**	**100 %**	**6.252.581.700,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**2.761.591.800,00**	**0,00%**	**12,57%**		
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan**	**30 Pokmas**	**20.883.632.840,00**	**12 Pokmas**	**2.577.293.400,00**	**6 Pokmas**	**6.154.314.600,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**12,00**	**2.577.293.400,00**	**40,00%**	**12,34%**		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Lembaga Kemasyarakatan	146.886.000,00	6 Lembaga Kemasyarakatan	26.886.000,00	3 Lembaga Kemasyarakatan		-	-	0,00%	#DIV/0!	6,00	26.886.000,00	33,33%	18,30%		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	450 unit	16.670.499.000,00		2.210.400.000,00	155 unit	5.400.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	2.210.400.000,00	0,00%	13,26%		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas	3.996.184.640,00	12 Pokmas	330.064.700,00	6 Pokmas	750.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	12,00	330.064.700,00	40,00%	8,26%		
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 laporan	70.063.200,00	2 laporan	9.942.700,00	1 laporan	4.314.600,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	9.942.700,00	40,00%	14,19%		
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan**	**12 Lembaga Kemasyarakatan**	**387.243.876,00**	**161 unit**	**85.893.500,00**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**161,00**	**85.893.500,00**	**100,00%**	**22,18%**		
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga Kemasyarakatan	155.000.000,00		-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	136 unit	232.243.876,00	161 unit	85.893.500,00			-	-	0,00%	0,00%	161,00	85.893.500,00	100,00%	36,98%		
	7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**	**880 Keluarga**	**699.458.900,00**	**200 Keluarga**	**98.404.900,00**	**200 Keluarga**	**98.267.100,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**200,00**	**98.404.900,00**	**22,73%**	**14,07%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	80 Keluarga	59.898.800,00	20 Keluarga	9.898.800,00	20 Keluarga	9.962.900,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	9.898.800,00	25,00%	16,53%		
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	80 Keluarga	59.888.800,00	20 Keluarga	9.888.800,00	20 Keluarga	9.738.500,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	9.888.800,00	25,00%	16,51%		
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	80 Keluarga	59.952.500,00	20 Keluarga	9.952.500,00	20 Keluarga	9.904.900,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	9.952.500,00	25,00%	16,60%		
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	40 Keluarga	40.000.000,00		-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	40 Keluarga	40.000.000,00		-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	80 Keluarga	59.820.000,00	20 Keluarga	9.100.000,00	20 Keluarga	9.991.200,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	9.100.000,00	25,00%	15,21%		
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	80 Keluarga	59.898.800,00	20 Keluarga	9.664.800,00	20 Keluarga	9.923.600,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	9.664.800,00	25,00%	16,14%		
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	80 Keluarga	60.000.000,00	20 Keluarga	10.000.000,00	20 Keluarga	9.961.200,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	10.000.000,00	25,00%	16,67%		
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	80 Keluarga	60.000.000,00	20 Keluarga	9.900.000,00	20 Keluarga	9.973.300,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	9.900.000,00	25,00%	16,50%		
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	80 Keluarga	70.000.000,00	20	10.000.000,00	20 Keluarga	9.021.200,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	10.000.000,00	25,00%	14,29%		
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	80 Keluarga	70.000.000,00	20 Keluarga	10.000.000,00	20 Keluarga	9.840.600,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	10.000.000,00	25,00%	14,29%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80 Keluarga	60.000.000,00	20 Keluarga	10.000.000,00	20 Keluarga	9.949.700,00	-	-	0,00%	0,00%	20,00	10.000.000,00	25,00%	16,67%		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**	**100 %**	**993.164.800,00**	**100 %**	**189.725.000,00**	**100 %**	**100.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**189.725.000,00**	**100,00%**	**19,10%**		
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**8 Laporan**	**993.164.800,00**	**2 Laporan**	**189.725.000,00**	**1 Laporan**	**100.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**189.725.000,00**	**25,00%**	**19,10%**		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	943.164.800,00	2 laporan	189.725.000,00	1 laporan	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2,00	189.725.000,00	40,00%	20,12%		
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 laporan	50.000.000,00		-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**	**100 %**	**459.500.718,00**	**100**	**38.865.611,00**	**100 %**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**38.865.611,00**	**100,00%**	**8,46%**		
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4 laporan**	**459.500.718,00**	**1 laporan**	**38.865.611,00**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**38.865.611,00**	**25,00%**	**8,46%**		
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18 Orang	60.000.000,00		-			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	155 Orang	329.500.718,00		29.260.611,00			-	-	0,00%	0,00%	-	29.260.611,00	0,00%	8,88%		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	9.605.000,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	9.605.000,00	25,00%	13,72%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100 %**	**1.320.000.000,00**	**100 %**	**1.398.156.296,00**	**100 %**	**1.979.999.317,00**	**0,01**	**29.626.000,00**	**1,50%**	**1,50%**	**100,01**	**1.427.782.296,00**	**100,00%**	**100,00%**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Orang yang Mengikuti kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**108 Orang**	**1.320.000.000,00**	**51 Orang**	**1.398.156.296,00**	**42 Orang**	**1.979.999.317,00**	**0,01**	**29.626.000,00**	**1,50%**	**1,50%**	**51,01**	**1.427.782.296,00**	**47,24%**	**100,00%**		
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (laporan)	8 Orang	60.000.000,00	16 Orang	36.299.000,00	7 Orang	60.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	16,00	36.299.000,00	100,00%	60,50%		
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (laporan)	2 Laporan	160.000.000,00	5 Laporan	495.150.000,00	2 Laporan	599.999.962,00	0,01	1.350.000,00	1,00%	0,23%	5,01	496.500.000,00	100,00%	100,00%		
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (keluarga)	125 Keluarga	100.000.000,00	108 Keluarga	96.617.632,00	125 Keluarga	99.999.434,00	0,00	-	0,00%	0,00%	108,00	96.617.632,00	86,40%	96,62%		
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka (orang)	84 Orang	1.000.000.000,00	35 Orang	770.089.664,00	35 Orang	1.219.999.921,00	0,02	28.276.000,00	2,32%	2,32%	35,02	798.365.664,00	41,69%	79,84%		
	8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA**	**Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**100 %**	**3.337.802.528,00**	**100 %**	**54.846.258.638,00**	**100 %**	**2.941.834.600,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**54.846.258.638,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**68 Orang**	**3.337.802.528,00**	**90 Orang**	**54.846.258.638,00**	**57 Orang**	**2.941.834.600,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**90,00**	**54.846.258.638,00**	**100,00%**	**100,00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (orang)	45 Orang	3.217.802.528,00	90 Orang	6.217.930.464,00	45 Orang	2.828.985.972,00	0,00	-	0,00%	0,00%	90,00	6.217.930.464,00	100,00%	100,00%		
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (orang)	23 Orang	60.000.000,00	-	-	12 Orang	54.798.628,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (laporan)	2 Laporan	60.000.000,00	6 Laporan	48.628.328.174,00	2 Laporan	58.050.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	6,00	48.628.328.174,00	100,00%	100,00%		
	8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**100 %**	**726.760.272,00**	**100 %**	**4.293.469.150,00**	**100 %**	**2.770.000.000,00**	**0,07**	**6.600.000,00**	**7,00%**	**0,24%**	**100,07**	**4.300.069.150,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**25 Orang**	**726.760.272,00**	**30 Orang**	**4.293.469.150,00**	**25 Orang**	**2.770.000.000,00**	**0,07**	**6.600.000,00**	**7,00%**	**0,24%**	**30,07**	**4.300.069.150,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (orang)	20 Orang	576.760.272,00	25 Orang	4.097.880.000,00	20 Orang	2.620.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	25,00	4.097.880.000,00	100,00%	100,00%		
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (orang)	5 Orang	50.000.000,00	5 Orang	25.700.000,00	5 Orang	50.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	5,00	25.700.000,00	100,00%	51,40%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (laporan)	1 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	169.889.150,00	1 Laporan	100.000.000,00	0,07	6.600.000,00	7,00%	6,60%	4,07	176.489.150,00	100,00%	100,00%		
	8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**100 %**	**710.000.000,00**	**100 %**	**1.119.959.300,00**	**100 %**	**550.000.000,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**1.119.959.300,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**12 Orang**	**710.000.000,00**	**12 Orang**	**1.119.959.300,00**	**12 Orang**	**550.000.000,00**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**12,00**	**1.119.959.300,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (orang)	6 Orang	250.000.000,00	12 Orang	370.752.300,00	6 Orang	350.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	12,00	370.752.300,00	100,00%	100,00%		
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (laporan)	2 Laporan	460.000.000,00	5 Laporan	749.207.000,00	2 Laporan	200.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	5,00	749.207.000,00	100,00%	100,00%		
	8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial**	**100 %**	**1.390.000.000,00**		**2.431.097.024,00**	**100 %**	**1.250.000.000,00**	**0,02**	**5.700.000,00**	**2,00%**	**0,46%**	**0,02**	**2.436.797.024,00**	**0,02%**	**100,00%**		
	8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**68 Orang**	**1.390.000.000,00**		**2.431.097.024,00**	**68 Orang**	**1.250.000.000,00**	**0,02**	**5.700.000,00**	**2,00%**	**0,46%**	**0,02**	**2.436.797.024,00**	**0,03%**	**100,00%**		
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (orang)	48 Orang	300.000.000,00	96 Orang	231.848.246,00	48 Orang	200.000.000,00	0,02	3.000.000,00	2,00%	1,50%	96,02	234.848.246,00	100,00%	78,28%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (orang)	20 Orang	120.000.000,00	88 Orang	259.800.500,00	20 Orang	200.000.000,00	0,01	2.700.000,00	1,35%	1,35%	88,01	262.500.500,00	100,00%	100,00%		
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, FasilitasiKelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah (orang)	3 Laporan	70.000.000,00	2 Laporan	35.187.705,00	3 Laporan	50.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	2,00	35.187.705,00	66,67%	50,27%		
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	3 Dokumen	900.000.000,00	4 Dokumen	1.904.260.573,00	3 Dokumen	800.000.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	4,00	1.904.260.573,00	100,00%	100,00%		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase realisasi investasi PMA dan PMDN**	**6 %**	**4.334.346.318,00**	**91 %**	**268.010.285,00**	**91 %**	**88.290.540,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**91,00**	**268.010.285,00**	**100,00%**	**6,18%**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah izin yang diterbitkan**	**5510 izin**	**4.334.346.318,00**	**4000 Izin Usaha**	**268.010.285,00**	**1600 Izin Usaha**	**88.290.540,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4000,00**	**268.010.285,00**	**72,60%**	**6,18%**		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Derah	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	45 dokumen	900.000.000,00	15 Dokumen	-			-	-	0,00%	#DIV/0!	15,00	-	33,33%	0,00%		
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizianan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	2400 pelaku usaha	1.258.072.000,00	500 Pelaku Usaha	76.701.278,00	500 Pelaku Usaha	27.424.215,00	0,00	-	0,00%	0,00%	500,00	76.701.278,00	20,83%	6,10%		
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	66 pelaku usaha	1.276.274.318,00	15 Pelaku Usaha	91.076.707,00	15 Pelaku Usaha	36.086.325,00	0,00	-	0,00%	0,00%	15,00	91.076.707,00	22,73%	7,14%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemantauan,analisis ,evaluasi,dan pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko	jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan,analisis,dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	45 Dokumen	900.000.000,00	40 Kegiatan Usaha	100.232.300,00	40 Kegiatan Usaha	24.780.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	40,00	100.232.300,00	88,89%	11,14%		
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Presentase Pengelolaan data dan Informasi yang dipublikasi**	**4 %**	**870.721.994,00**	**30 %**	**23.238.300,00**	**30 %**	**10.669.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**30,00**	**23.238.300,00**	**100,00%**	**2,67%**		
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Buku Statistik Penanaman Modal Kota Dumai**	**4 Dokumen**	**870.721.994,00**	**1 buku**	**23.238.300,00**	**1 Buku**	**10.669.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**23.238.300,00**	**25,00%**	**2,67%**		
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah,Dikaji dan Dimanfaatkan	4 dokumen	870.721.994,00	4 Dokumen	23.238.300,00	1 Buku	10.669.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%	4,00	23.238.300,00	100,00%	2,67%		
	2.16.2.16.2.202.2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PERSENTASE INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**100 %**	**8.145.000.000,00**		**8.476.735.464,00**		**2.750.000.000,00**	**0,15**	**293.746.000,00**	**15,00%**	**10,68%**	**0,15**	**8.770.481.464,00**	**0,15%**	**100,00%**	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.2.16.2.202.2.01	**PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah yang dikelola**	**100 %**	**8.145.000.000,00**		**8.476.735.464,00**		**2.750.000.000,00**	**0,15**	**293.746.000,00**	**15,00%**	**10,68%**	**0,15**	**8.770.481.464,00**	**0,15%**	**100,00%**		
	2.16.2.16.2.202.2.01 .0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	557.500.000,00	12 Dokumen	1.528.292.000,00			-	-	0,00%	0,00%	12,00	1.528.292.000,00	100,00%	100,00%		
	2.16.2.16.2.202.2.01 .0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	600.000.000,00	6 Dokumen	1.086.135.356,00			-	-	0,00%	0,00%	6,00	1.086.135.356,00	100,00%	100,00%		
	2.16.2.16.2.202.2.01 .0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2 Dokumen	250.000.000,00	3 Dokumen	128.185.330,00			-	-	0,00%	0,00%	3,00	128.185.330,00	100,00%	51,27%		
	2.16.2.16.2.202.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	2.000.000.000,00	11 Layanan	4.780.862.621,00			-	-	0,00%	0,00%	11,00	4.780.862.621,00	100,00%	100,00%		
	2.16.2.16.2.202.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	13 Dokumen	210.000.000,00	23 Dokumen	213.637.247,00			-	-	0,00%	0,00%	23,00	213.637.247,00	100,00%	100,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.16.2.16.2.202.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	6 Dokumen	365.000.000,00	14 Dokumen	235.346.098,00			-	-	0,00%	0,00%	14,00	235.346.098,00	100,00%	64,48%		
	2.16.2.16.2.202.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	90.000.000,00	22 Unit	504.276.812,00			-	-	0,00%	0,00%	22,00	504.276.812,00	100,00%	100,00%		
	2.16.02.02.01.0014	Relasi Media	Jumlah Aktivitas relasi Media kepada Media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. terverikasi dewan pers, 2. terdaftar di Dinas Kominfotiksan, 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	2.000.000.000,00			1 Laporan	1.900.000.000,00	0,30	95.000.000,00	30,00%	5,00%	0,30	95.000.000,00	15,00%	4,75%		Pemutakhiran Sub Kegiatan 2025 terbaru
	2.16.02.02.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfotiksan	13 Komunitas	210.000.000,00			13 Komunitas	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.16.02.02.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10 Permohonan	250.000.000,00			10 Permohonan	250.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.16.02.02.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 %	305.000.000,00			100 %	100.000.000,00	1,00	198.746.000,00	100,00%	100,00%	1,00	198.746.000,00	1,00%	65,16%		
	2.16.02.02.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	1.157.500.000,00			2 Media	318.984.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.16.02.02.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN Komunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	15 Orang	150.000.000,00			15 Orang	81.016.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORAMATIKA**	**PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI**	**71,43 %**	**36.391.838.550,00**		**12.153.111.977,00**		**5.680.000.000,00**	**0,25**	**1.175.838.710,00**	**25,00%**	**20,70%**	**0,25**	**13.328.950.687,00**	0,35%	36,63%		
	2.16.2.16.2.203.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4 Dokumen**	**16.114.876.320,00**		**9.812.154.839,00**		**50.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	**9.812.154.839,00**	0,00%	60,89%		
	2.16.2.16.2.203.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	8 Dokumen	149.809.400,00			-	-	0,00%	0,00%	8,00	149.809.400,00	100,00%	49,94%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.16.2.16.2.203.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah	110 Unit	15.514.876.320,00	283 Unit/Titik Akses	9.662.345.439,00			-	-	0,00%	0,00%	283	9.662.345.439,00	100,00%	62,28%		
	2.16.03.02.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	300.000.000,00			1 Dokumen	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		Pemutakhiran Sub Kegiatan 2025 terbaru
	2.16.2.16.2.203.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penerapan Aplikasi e-governement**	**7 Aplikasi**	**20.276.962.230,00**		**2.340.957.138,00**		**5.630.000.000,00**	**0,25**	**1.175.838.710,00**	**25,00%**	**20,89%**	**0,25**	**3.516.795.848,00**	**3,57%**	**17,34%**		
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertfikat elektronik	1 Dokumen	416.630.000,00	1 Dokumen	216.630.000			-	-	0,00%	0,00%	1,00	216.630.000,00	100,00%	52,00%		
	2.16.03.02.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	7 Dokumen	223.660.800,00	7 Dokumen	223.660.800			-	-	0,00%	0,00%	7,00	223.660.800,00	100,00%	100,00%		
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	1 Unit	400.000.000,00	1 Unit	668.543.579			-	-	0,00%	0,00%	1,00	668.543.579,00	100,00%	100,00%		
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00	3 Dokumen	96.000.000			-	-	0,00%	0,00%	3,00	96.000.000,00	100,00%	64,00%		
	2.16.03.02.02. 0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	40 Perangkat Daerah	241.315.110,00	40 Perangkat Daerah	40.584.200			-	-	0,00%	0,00%	40,00	40.584.200,00	100,00%	16,82%		
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	7 Unit	275.000.000,00	7 Unit	593.063.910			-	-	0,00%	0,00%	7,00	593.063.910,00	100,00%	100,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	5 Dokumen	275.000.000,00	5 Dokumen	378.604.649			-	-	0,00%	0,00%	5,00	378.604.649,00	100,00%	100,00%		
	2.16.03.02.02.0010	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	10.480.000,00	1 Dokumen	10.480.000			-	-	0,00%	0,00%	1,00	10.480.000,00	100,00%	100,00%		
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	5 Dokumen	700.000.000,00	5 Dokumen	113.390.000,00			-	-	0,00%	0,00%	5,00	113.390.000,00	100,00%	16,20%		
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	200.000.000,00			1 Laporan	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		Permutakhiran Sub Kegiatan 2025 terbaru
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	400.000.000,00			1 Dokumen	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	200.000.000,00			1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	50 Aplikasi	700.000.000,00			41 Aplikasi	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	40 Aplikasi	125.000.000,00			40 Aplikasi	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	6 Unit	275.000.000,00			6 Unit	90.000.000,00	0,25	9.000.000,00	25,00%	10,00%	0,25	9.000.000,00	4,17%	3,27%		
	2.16.03.02.02.0024	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	110 Perangkat Daerah	15.514.876.320,00			105 Perangkat Daerah	5.100.000.000,00	0,35	1.166.838.710,00	35,00%	22,88%	0,35	1.166.838.710,00	0,32%	7,52%		
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program	170.000.000,00			6 Program	90.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**80 %**	**1.253.037.500,00**		**344.110.500,00**		**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**344.110.500,00**	**0,00%**	**27,46%**		
	2.20.02.2.01	**PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah data sektoral perangkat daerah yang memenuhi prinsip satu data**	**37 OPD**	**1.253.037.500,00**		**344.110.500,00**		**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**344.110.500,00**	**0,00%**	**27,46%**		
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	220.582.000,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	220.582.000,00	100,00%	73,53%		
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	230.000.000,00	1 Dokumen	123.528.500			-	-	0,00%	0,00%	1,00	123.528.500,00	100,00%	53,71%		
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 %	155.342.500,00			100 %	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		Pemutakhiran Sub Kegiatan 2025 terbaru
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 %	277.010.000,00			100 %	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	290.685.000,00			1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi**	**100 %**	**575.000.000,00**		**433.764.880,00**		**150.000.000,00**	**0,35**	**8.000.000,00**	**35,00%**	**5,33%**	**0,35**	**441.764.880,00**	**0,35%**	**76,83%**		
	2.21.02.2.01	**PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi**	**37 OPD**	**575.000.000,00**		**433.764.880,00**		**150.000.000,00**	**0,35**	**8.000.000,00**	**35,00%**	**5,33%**	**0,35**	**441.764.880,00**	0,95%	76,83%		
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	275.000.000,00	1 Laporan	92.570.396,00	1 Laporan	50.000.000,00	0,35	8.000.000,00	35,00%	16,00%	1,35	100.570.396,00	100,00%	36,57%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 Perangkat Daerah	300.000.000,00	37 Perangkat Daerah	341.194.484,00	40 Perangkat Daerah	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	37,00	341.194.484,00	100,00%	100,00%		
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Prosentase Hasil Kelitbangan yang Implentaif**	**4 Dokumen**	**640.000.000,00**	**4 Dokumen**	**576.246.516,00**	**5 Dokumen**	**342.264.363,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**4,00**	**576.246.516,00**	**100,00%**	**90,04%**	**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahn dan Pengkajian Peraturan**	**1 Dokumen**	**100.000.000,00**	**1 Dokumen**	**68.591.232,00**	**1 Dokumen**	**35.009.472,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**68.591.232,00**	**100,00%**	**68,59%**		
	5.05.02.2.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	68.591.232	1 Dokumen	35.009.472,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	68.591.232,00	100,00%	68,59%		
	5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**2 Dokumen**	**360.000.000,00**	**2 Dokumen**	**435.771.486,00**	**2 Dokumen**	**165.884.363,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**435.771.486,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	5.05.02.2.03.0002	Peneliian dan Pengembangan Bidang Industri dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	35465000	1 Dokumen	71.610.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	35.465.000,00	100,00%	19,70%		
	5.05.02.2.03.0009	Penelitan dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	400306486	1 Dokumen	94.274.363,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	400.306.486,00	100,00%	100,00%		
	5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**1 Dokumen**	**180.000.000,00**	**1 Dokumen**	**71.883.798,00**	**2 Dokumen**	**141.370.528,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**71.883.798,00**	**100,00%**	**39,94%**		
	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	71.883.798,00	1 Dokumen	58.430.528,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	71.883.798,00	100,00%	39,94%		
	5.05.02.2.04.01	penelitian,pengembangan , dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			-		1 Dokumen	82.940.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
JUMLAH PRIORITAS (4) PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH					**1.123.454.138.531,00**		**594.399.093.142,00**		**450.447.940.527,25**		**47.845.115.254,00**				**642.244.208.396,00**				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												**24,13%**	**10,62%**						
PREDIKAT KINERJA												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												**24,13%**	**10,62%**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
JUMLAH PRIORITAS (1) SAMPAI DENGAN (4)					**3.945.355.537.365,98**		**2.738.490.111.061,87**		**1.449.280.237.824,79**		**200.675.144.970,93**				**2.939.165.256.032,80**				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												**16,19%**	**13,85%**						
PREDIKAT KINERJA												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												**16,19%**	**13,85%**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						

PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2026

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2026 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2026. Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Dumai yang dipengaruhi antara lain oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program strategis dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota Dumai, serta menjawab berbagai permasalahan pembangunan daerah. Kerangka ini menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan, penyusunan Program, kegiatan serta sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan 2026.

Dalam rangka mencapai target-target kinerja pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025–2029, kerangka pendanaan indikatif memegang peranan yang sangat penting. Kerangka ini memuat analisis komprehensif atas estimasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah, proyeksi penerimaan dari sektor-sektor strategis, serta kemampuan belanja dan pembiayaan pembangunan yang realistis. Dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, kerangka ini menjadi landasan kebijakan dalam pengalokasian sumber daya keuangan secara efektif dan efisien.

Penyusunan kerangka ekonomi Tahun 2026 ini diharapkan mampu menjembatani secara optimal antara fungsi perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai alat untuk mengawal pencapaian target-target kinerja pembangunan, serta merespons isu-isu strategis yang telah diidentifikasi di Kota Dumai.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2026

Indikator ekonomi makro adalah ukuran utama yang digunakan untuk menggambarkan kondisi Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat suatu daerah secera menyeluruh. Adapan target indikator ekonomi makro Kota Dumai tahun 2026 seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Kota Dumai Tahun 2026

NO.	INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUN 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06-6,14
2	PDRB per Kapita	Rp. Juta	159,46-172,6
3	Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi Riau	%	4,85-4,8575
4	Tingkat Kemiskinan	%	2.41-2.63
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,74 - 4,88
6	Rasio Gini	Indeks	0,317-0,335
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,35
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	11,02
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	58,58

(Sumber : Perda No. 8 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Dumai tahun 2025-2029)

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perhitungan dasar-dasar ekonomi wilayah pada umumnya didasarkan pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Secara umum terdapat 2 macam perhitungan PDRB yaitu PDRB atas dasar berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga Konstan (ADHK). PDRB (ADHB) digunakan untuk mengukur kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB (ADHK) digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. dengan demikian PDRB merupakan salah satu alat ukur dan alat analisa untuk pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi. Hasil analisa PDRB terhadap ekonomi wilayah digunakan untuk melihat struktur perekonomian wilayah, kontribusi sektor terhadap perekonomian wilayah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, struktur perekonomian regional dan klasifikasi potensi perkembangan perekonomian wilayah (tipologi kalssen).

1) PDRB Kota Dumai Tahun 2019-2024 Atas Dasar Harga Berlaku Dan Struktur Ekonomi Kota Dumai

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Adapun PDRB atas dasar berlaku tahun 2019-2024 Kota Dumai sebagai berikut:

Tabel 3.2
Produk Dosmetik Regional Bruto Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019-2024

No	Sektor/Sub sector	NILAI PDRB ADHB (JUTA RUPIAH)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,923,589.42	2,079,109.40	2,303,167.25	2,452,756.78	2,616,278.48	2,851,570.00
2	Pertambangan dan Penggalian	128,171.90	129,553.49	132,990.46	139,352.95	151,508.49	159,030.00
3	Industri Pengolahan	20,867,983.78	21,772,852.25	24,294,167.07	27,839,955.31	30,032,692.95	31,824,120.00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	31,766.86	73,723.73	92,975.88	140,550.18	149,175.32	157,420.00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,327.47	5,604.43	6,038.04	6,599.65	7,857.29	9,150.00
6	Konstruksi	4,049,172.47	3,941,634.14	3,995,660.54	4,510,776.13	5,335,392.25	5,792,110.00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	573,600,897	525,818,852	5,873,683.29	6,349,996.34	6,847,745.54	7,601,090.00
8	Transportasi dan Pergudangan	1,055,618.11	72,659,229	757,618.13	889,949.98	1,002,207.32	1,128,030.00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	319,404.93	26,031,055	314,99.80	335,595.81	360,638.47	426,900.00
10	Informasi dan Komunikasi	418,394.91	45,723,742	478,073.42	500,687.76	529,335.31	576,450.00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	397,130.22	40,920,299	449,223.55	517,340.12	544,489.23	562,290.00
12	Real Estate	161,757.94	164,082.24	168,398.89	182,025.42	194,515.59	208,380.00
13	Jasa Perusahaan	2,057.23	1,631.94	1,650.72	1,738.00	1,926.43	2,060.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	587,758.74	590,244.82	605,346.83	667,050.56	702,392.18	767,360.00
15	Jasa Pendidikan	177,129.44	185,339.10	192,270.01	199,182.23	212,306.66	225,800.00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65,843.06	77,378.69	86,277.57	93,680.55	103,791.89	112,600.00
17	Jasa lainnya	220,031.06	181,04.05	193,571.52	225,572.10	242,032.48	263,750.00
PDRB		**36,147,146.52**	**36,313,730.07**	**39,946,107.96**	**45,052,809.86**	**49,034,285.87**	**52,668,100.00**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

Tabel 3.3
Kontribusi Sektor terhadap Produk Dosmetik Regional Bruto ADHB
Kota Dumai Tahun 2019-2024

No	Sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)						Rata-rata	Pergeseran
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.32	5.73	5.77	5.44	5.34	5.41	5.50	0.00
2	Pertambangan dan Penggalian	0.35	0.36	0.33	0.31	0.31	0.30	0.33	-0.03
3	Industri Pengolahan	57.73	59.96	60.82	61.79	61.25	60.42	60.33	0.01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.20	0.23	0.31	0.30	0.30	0.24	0.27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.15
6	Konstruksi	11.20	10.85	10.00	10.01	10.88	11.00	10.66	0.00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.87	14.48	14.70	14.09	13.97	14.43	14.59	-0.02
8	Transportasi dan Pergudangan	2.92	2.00	1.90	1.98	2.04	2.14	2.16	-0.06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.88	0.72	0.79	0.74	0.74	0.81	0.78	-0.02
10	Informasi dan Komunikasi	1.16	1.26	1.20	1.11	1.08	1.09	1.15	-0.01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.10	1.13	1.12	1.15	1.11	1.07	1.11	-0.01
12	Real Estate	0.45	0.45	0.42	0.40	0.40	0.40	0.42	-0.02
13	Jasa Perusahaan	0.0057	0.0045	0.0041	0.0039	0.0039	0.00	0.0037	-1.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1.63	1.63	1.52	1.48	1.43	1.46	1.53	-0.02
15	Jasa Pendidikan	0.49	0.51	0.48	0.44	0.43	0.43	0.46	-0.03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.18	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.03
17	Jasa lainnya	0.61	0.50	0.48	0.50	0.49	0.50	0.51	-0.04
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2024 dapat kita lihat terdapat 8 sektor yang kontribusinya diatas 1% dan 9 sektor yang kontribusinya dibawah 1% dalam pembentukan PDRB Kota Dumai tahun 2024.

Jika kita perhatikan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2019-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini adalah 5,32% dan mengalami kenaikan pada tahun 2020, 2021 dan 2024 menjadi 5,73%, 5,77%, dan 5,41%. Namun pada tahun 2022 dan 2023 kontribusi sektor ini mengalami penurunan menjadi 5,44% dan 5,34%. Artinya nilai produksi dari sektor ini terus mengalami perkembangan yang fluktuatif terhadap pembentukan PDRB kota Dumai. Jika kita lihat pergeseran kontribusi sektor ini cenderung positif yang mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ini mengalami peningkatan nilai produksi.

Adapun kontribusi sektor pertambangan dan penggalian termasuk sektor yang memiliki kontribusi dibawah 1% dalam pembentukan PDRB kota Dumai. Dalam kurun waktu 2019-2024 kontribusi sektor ini cenderung menurun. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini 0,35% dan pada tahun 2024 menjadi 0,30% dengan pergeseran dalam kurun waktu tersebut memiliki nilai negatif yang mengindikasikan kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan nilai produksi.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusi tertinggi diantara sektor-sektor pembentuk PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor industi terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai selama kurun waktu tahun 2019-2024 dengan kecenderungan meningkat dengan rata-rata kontribusi selama kurun waktu tersebut adalah 60,33%. Pada tahun 2019 kontribusi sektor industri 57,73% dan pada tahun 2024 kontribusi sektor ini mengalami kenaikan menjadi 60,42% dengan pergeseran dalam kurun waktu tersebut memiliki nilai positif yang mengindikasikan kontribusi sektor ini mengalami peningkatan nilai produksi.

Sektor pengadaan listrik dan gas merupakan termasuk sektor dari yang memiliki kontribusi dibawah 1% terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai dengan rata-rata kontribusi 0,19%. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini adalah 0,09% dan pada tahun 2024 sektor ini berkontribusi 0,30%. Meskipun kontribusi sektor ini sangat kecil, kontribusi sektor ini cenderung naik dengan pergeseran memiliki nilai positif yang mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ini mengalami kenaikan nilai produksi.

Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang termasuk sektor yang memiliki dibawah kontribusi 1% dengan rata-rata kontribusi 0,02%. Kontribusi sektor ini cenderung konsisten selama kurun waktu 2019-2024 yaitu 0,01%-0,02% dengan pergeseran bernilai positif yang mengindikasi meskipun bernilai kecil namun nilai produksi nya cenderung meningkat.

Sektor konstruksi termasuk sektor yang memiliki kontribusi yang cukup besar. Sektor kontribusi mengalami perkembangan yang fluktuatif dalam kurun waktu 2019-2024. Pada tahun 2019 kontribusi sektor sebesar 11,20% dan pada tahun 2024 menjadi 11,00% dengan pergeseran memiliki nilai positif yang mengindikasikan kontribusi sektor mengalami peningkatan nilai produksi.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi yang cukup besar dengan kecendrungan terjadi penurunan terhadap pembentukan PDRB kota Dumai selama kurun waktu 2019-2024 dengan rata-rata kontribusi 14,59%. Kontribusi sektor ini pada tahun 2019 adalah sebesar 15,87% dan pada tahun 2024 menjadi 14,43%, Adapun pergeseran sektor ini bernilai negatif yang mengindikasi nilai produksinya cenderung menurun.

Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan selama kurun waktu tahun 2019-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini 2,92% dan pada tahun 2024 menurun menjadi 2,14%. Pegeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman memiliki kontribusi dibawah 1%. Dalam kurun waktu 2019-2024 kontribusi sektor ini cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi sekitar 0,78%. Pada tahun 2019 sektor ini berkontribusi pada pembentukan PDRB sebesar 0,88% dan pada tahun 2024 menjadi 0,81%. Pegeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Untuk kontribusi Sektor Informasi dan komunikasi cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi kurun waktu 2019-2024 sebesar 1,15%. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini 1,16% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 1,09%. Adapun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai positif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini meningkat.

Sektor jasa keuangan dan asuransi memiliki kontribusi yang cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2019-2024 sebesar 1,11%. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini sebesar 1,10% dan pada tahun 2024 kontribusi sektor ini turun menjadi 1,07%. Adapun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Selama kurun waktu 2019-2024, kontribusi sektor real estate memiliki kontribusi yang relatif kecil bagi pembentukan PDRB Kota Dumai dengan rata-rata share sebesar 0,42%. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini sebesar 0,45% dan pada tahun 2024 turun menjadi 0,40% dengan pergeseran bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksinya menurun.

Kontribusi sektor perusahaan bagi pembentukan PDRB Kota Dumai merupakan yang paling kecil dari 17 sektor PDRB selama kurun waktu 2019-2024. Pada tahun 2019 sektor ini berkontribusi 0,0057% dan pada tahun 2023 turun menjadi 0,0039% dengan pergeseran kontribusi bernilai negative yang mengindikasikan nilai produksinya menurun.

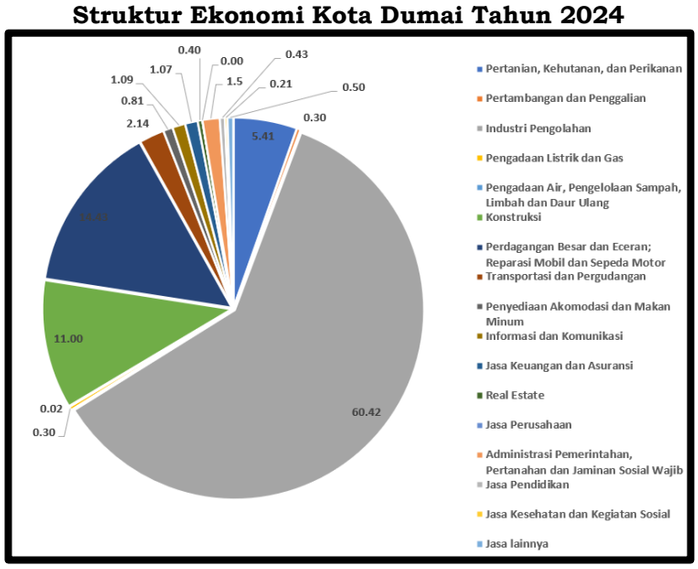
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memberi kontribusi pada pembentukan PDRB selama kurun waktu 2019-2024 diatas 1% namun cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi 1,53%. Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini sebesar 1,63% dan pada tahun 2024 turun menjadi 1,50% dengan pergeseran kontribusi sektor bernilai negative. Hal ini mengindikasi nilai produksi dari sektor ini menurun.

Sektor jasa pendidikan memiliki kontribusi cenderung menurun selama kurun waktu tahun 2019-2024 dengan rata-rata share 0,46%. Pada Tahun 2019 sektor ini mampu berkontribusi sebesar 0,49% dan pada tahun 2024 kontribusinya turun menjadi 0,43% dengan pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negative. Hal ini mengindikasikan produksi sektor ini menurun

Adapun Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki kontribusi yang cenderung meningkat dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2019-2024 sebesar 0,21%. Pada tahun 2018 kontribusi sektor ini adalah sebesar 0,18% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,21%. Meskipun konstribusi sektor ini tergolong kecil namun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai positif. Hal ini mengindikasikan meskipun kontribusi sektor ini sangat kecil namun nilai produksinya meningkat.

Untuk sektor jasa lainnya, kontribusi sektor ini juga relatif kecil namun cenderung turun dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2019-2024 sebesar 0,51%. Pada tahun 2019 sektor ini mampu berkontribusi 0,61% dan turun menjadi 0,60% pada tahun 2024 dengan pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksinya menurun.

Grafik 3.1
Struktur Ekonomi Kota Dumai Tahun 2024



Jika diperhatikan dari penjelasan dan gambar diatas, maka kontribusi sektor industri pengolahan dalam pembentukan PDRB Kota Dumai tahun 2024 sangat dominan dibanding sektor-sektor lainnya. Berdasarkan United nations for Industrial development organization (UNIDO), untuk menilai peran sektor industri pada suatu wilayah dapat lihat dari peran sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut (muta'ali, 2015):

- Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB < 10% dikelompokkan sebagai wilayah non industri
- Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB 10% - 20% dikelompokkan sebagai wilayah yang memasuki proses industrialisasi
- Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB 20% - 30% dikelompokkan sebagai wilayah semi industri
- Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB > 30% dikelompokkan sebagai wilayah industri

Jika kita lihat kontribusi sektor industri kota Dumai terhadap pembentukan PDRB kota Dumai dalam kurun waktu 2019-2024 diatas 30%, maka kota Dumai termasuk kategori wilayah industri.

2) PDRB Kota Dumai Tahun 2019-2024 atas dasar harga konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai tahun 2019-2024

Menurut publikasi BPS, PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2014, tahun dasar yang digunakan adalah tahun dasar 2010. Adapun PDRB kota Dumai tahun 2019-2024 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Produk Dosmetik Regional Bruto Kota Dumai Tahun 2019-2024 Atas Dasar Harga Konstan

No	Sektor/Sub sektor	NILAI PDRB ADHK (JUTA RUPIAH)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,247,922.09	1,299,761.49	1,351,367.35	1,353,308.06	1,378,765.08	1,406,220.00
2	Pertambangan dan Penggalian	78,506.74	77,470.45	77,974.01	79,578.24	83,595.62	87,240.00
3	Industri Pengolahan	14,581,613.37	15,020,311.75	16,006,044.09	17,241,068.60	18,253,329.59	18,974,950.00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	19,141.15	45,610.20	57,810.02	82,598.92	82,991.31	87,140.00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,953.63	4,107.82	4,427.41	4,787.35	5,494.51	6,210.00
6	Konstruksi	2,458,034.29	2,383,801.65	2,384,993.55	2,502,103.89	2,756,162.91	2,977,320.00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,158,872.44	3,730,303.07	4,066,732.21	4,202,233.90	4,472,739.04	4,809,190.00
8	Transportasi dan Pergudangan	712,126.69	465,475.75	467,439.73	510,168.26	540,637.24	557,930.00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	180,830.95	145,576.33	173,379.44	181,306.44	191,156.71	218,800.00
10	Informasi dan Komunikasi	308,203.51	336,681.51	350,586.46	360,504.90	377,263.01	409,430.00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	270,745.90	280,070.73	292,581.59	307,308.22	317,259.29	324,200.00
12	Real Estate	108,656.18	110,427.27	113,298.38	119,365.05	124,232.65	130,530.00
13	Jasa Perusahaan	1,343.56	1,047.17	1,064.45	1,078.86	1,152.04	1,240.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	442,434.46	432,877.88	442,184.75	482,175.06	503,634.02	552,960.00
15	Jasa Pendidikan	107,280.30	108,792.95	111,567.17	114,003.35	119,608.27	125,500.00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40,219.13	46,099.16	50,856.60	53,089.96	56,886.89	60,910.00
17	Jasa lainnya	137,017.95	109,573.25	115,972.33	131,188.36	137,697.01	147,400.00
PDRB		**24,856,902.32**	**24,597,988.44**	**26,068,279.54**	**27,725,867.44**	**29,402,605.17**	**30,877,160.00**

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

Menurut Muta'ali (2015) Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah ukuran yang utama dalam menggambarkan capaian pembangunan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Menurut Boediono (1999) dalam muta'ali (2015) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang,

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menghitung perubahan /pertambahan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tahun 2010 untuk menghilangkan pengaruh kenaikan harga, Suatu wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi jika PDRB atas dasar harga konstan yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya, Adapun rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebaga berikut :

$$\textbf{\textit{Pertumbuhan Ekonomi}} = \frac{(PDRBt - PDRB\ t-1)}{PDRB\ t-1} \textbf{\textit{x 100\%}}$$

$PDRB_t$ = PDRB ADHK tahun t

$PDRB_{t-1}$ = PDRB ADHK tahun t-1

Berdasarkan publikasi BPS kota Dumai, PDRB ADHK tahun dasar tahun 2010 menurut lapangan usaha Kota Dumai tahun 2023 adalah 29.402.605,17 (Juta Rupiah) sedangkan pada tahun 2024 adalah 30.877.160,00 (juta rupiah), maka pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$\textbf{\textit{Pertumbuhan Ekonomi}} = \frac{(30.877.160,00 - 29.402.605,17)}{29.402.605,17} \textbf{\textit{x 100\%}}$$

$$\textbf{\textit{Pertumbuhan Ekonomi = 5,02\%}}$$

Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai pada Tahun 2024 tidak setinggi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 namun tetap masih diatas 5%. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Dumai sebesar 6,05%. Sedangkan tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Dumai sebesar 5,02%. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin besar kemungkinan perkembangan suatu wilayah. Berdasarkan tabel berikut dapat dihitung pertumbuhan ekonomi Kota Dumai dalam kurun waktu 2019-2024, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2019-2024

No	Kategori	Pertumbuhan Ekonomi(%)						Rata-rata Pertumbuhan / Tahun
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,01	4,15	3,97	0,14	1,88	1,99	2.43
B	Pertambangan & penggalian	2,31	-1,32	0,65	2,06	5,05	4,36	2.16
C	industri pengolahan	7,18	3,01	6,56	7,72	5,87	3,95	5.42
D	Pengadaan listrik dan gas,	7,29	138,30	26,75	42,88	0,48	5	42.68
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6,18	4,05	7,79	8,13	14,77	12,94	9.54
F	Bangunan	4,15	-3,02	0,05	4,91	10,15	8,02	4.02

No	Kategori	Pertumbuhan Ekonomi(%)						Rata-rata Pertumbuhan / Tahun
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	2,87	-10,30	9,02	3,33	6,44	7,52	3.20
H	Transportasi dan pergudangan	5,35	-34,64	0,42	9,14	5,97	3,2	-3.18
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3,72	-19,49	19,10	4,57	5,43	14,46	4.81
J	Informasi dan komunikasi	7,21	9,24	4,13	2,83	4,65	8,53	5.88
K	Jasa keuangan dan asuransi	0,11	3,44	4,47	5,03	3,24	2,19	3.67
L	Real estate	5,29	1,63	2,60	5,35	4,08	5,07	3.75
M, N	Jasa perusahaan	7,20	-21,64	0,95	1,35	6,78	7,42	-1.03
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	2,32	-2,16	2,15	9,04	4,45	9,79	4.65
P	Jasa pendidikan	5,62	1,41	2,56	2,18	4,92	4,92	3.20
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	10,83	14,62	10,33	4,39	7,15	7,07	8.71
R, S, T, U	Jasa lainnya	8,79	-20,03	5,84	13,12	4,96	7,04	2.19
Pertumbuhan ekonomi		**5,60**	**1,04**	**5,98**	**6,36**	**6,05**	**5,02**	**5,40**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2025)

Dari tabel diatas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Kota Dumai selama kurun waktu 2019-2024 terus berfluktuatif dimana pada tahun 2020 terjadi kontraksi akibat pandemi Covid 19 namun mulai tahun 2021-2023 tumbuh lagi dan pada tahun 2022 merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2019. Jika dianalisa dari pertumbuhan lapangan usaha, maka penyebab pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tidak setinggi tahun 2023 dapat dilihat bahwa lapangan usaha industri pengolahan tumbuh pada tahun 2024 tumbuh sebesar 3,2%, angka ini lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 5,97%.

Hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Dumai pada tahun 2024 karena sector industri pengolahan merupakan sector yang memiliki nilai PDRB tertinggi dari seluruh sektor pembentuk PDRB Kota Dumai. Pada suatu daerah, jika suatu sektor lapangan usaha yg memiliki kontribusi yg sangat dominan pada struktur ekonomi namun pertumbuhannya tidak setinggi tahun sebelumnya maka berpotensi besar menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tidak setinggi tahun sebelumnya.

3) Pendapatan Per Kapita

Pengembangan ekonomi wilayah merupakan sebuah runtutan perubahan perekonomian suatu wilayah yang menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat suatu wilayah dalam jangka panjang (arsyad, 1992 dalam muta'ali, 2015). Oleh sebab itu proses pembangunan wilayah disebut juga dengan proses pengembangan ekonomi wilayah karena output sebuah pembangunan wilayah secara umum adalah tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut.

Pendapatan perkapita didefiniskan sebagai pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap penduduk suatu wilayah yang dihasilkan dari membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk.

$$\textbf{PDRB perkapita}_{(ADHB)} = \frac{PDRB}{\sum Penduduk}$$

$$= \frac{52.670.000.000.000}{349.389}$$

$$= \textbf{Rp. 150.748.878,76/Kapita}$$

$$\textbf{PDRB perkapita}_{(ADHK)} = \frac{PDRB}{\sum Penduduk}$$

$$= \frac{30.877.160.000,000}{349.389}$$

$$= \textbf{Rp. 88.374.734,18/Kapita}$$

Secara umum, semakin tinggi nilai PDRB perkapita maka perekonomian wilayah tersebut akan semakin baik. Berdasarkan rumus perhitungan diatas, ternyata tingkat perekonomian suatu wilayah tidak hanya tergantung pada PDRB semata namun juga ditentukan oleh jumlah penduduk, dimana semakin banyak jumlah penduduk maka PDRB perkapita akan semakin rendah (muta'ali, 2015). Lebih jauh dijelaskan, PDRB/kapita tidak menggambarkan kondisi pendapatan masyarakat dan distribusi pendapatan secara riil.

4) Struktur Perekonomian Regional (Share Regional)

Untuk mengukur peran perekonomian Kota Dumai tahun 2025 terhadap perekonomian Provinsi Riau, maka dapat dihitung melalui kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap PDRB Provinsi Riau dengan melihat distribusi peran ekonomi Kota Dumai dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\textbf{Share PDRB Kota Dumai} = \frac{PDRB\ Kota\ Dumai}{PDRB\ Provinsi\ Riau} x\ 100$$

$$= \frac{52.668.100.000.000}{1.112.481.620.000.000} x\ 100$$

$$= \textbf{4,73\%}$$

Dari Perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi Kota Dumai terhadap perkembangan PDRB Provinsi Riau sangat kecil, hanya 4,73%. Semakin besar persentase nilai PDRB suatu Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi, maka semakin besar peran Kabupaten/Kota tersebut dalam pembangunan ekonomi suatu Provinsi (muta'ali, 2015).

5) Tipologi Klassen

Salah satu metode untuk yang digunakan untuk menganalisis potensi perkembangan perekonomian wilayah dapat dilihat dati klasifikasi/tipologi perkembangan ekonomi wilayah. Adapun salah satu analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan alisis tipologi klassen. Tipologi klassen merupakan salah satu metode analisis untuk menentukan sejauh mana perkembangan perekonomian suatu wilayah melihat data pendapatan perkapia dan pertumbuhan ekonomi yang kemudian dikelompokkan menjadi klasifikasi wilayah (muta'ali, 2015). Lebih jauh muta'ali (2015) menjelaskan bahwa pengelolmpokkan wilayah dengan tipologi klassen bisa dijadikan salah satu pedoman untuk merencanakan arah kebijakan

pembangunan wilayah/daerah yang sesuai dengan karakter, potensi dan permasalahan wilayah.

Adapun kriteria tipologi klassen tersebut dapat dilihat pada tabel dbawah ini (sjafrizal, 1997, dalam muta'ali, 2015):

Tabel 3.6
Matrik Tipologi Klassen Perkembagan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi (r)	PDRB perkapita (Y)	
	Yi>Y	Yi<Y
ri>r	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah berkembang cepat
ri<r	Wilayah maju tapi tertekan	Wilayah relatif tertinggal

ri = Pertumbuhan ekonomi/PDRB kabupaten/kota
r = Pertumbuhan ekonomi/PDRB Provinsi
Yi = PDRB perkapita kabupaten/kota
Y = PDRB perkapita Provinsi

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS Provinsi Riau dan BPS Kota Dumai pada tahun 2023, maka dapat dilihat bahwa:

Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai Tahun 2024 = 5,02%
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau Tahun 2024 = 3,52%
PDRB perkapita Kota dumai Tahun 2024 = 150.748.878/Kapita
PDRB perkapitan Provinsi Riau Tahun 2024 = 165.350.000/Kapita

Dari data yang dipublikasikan oleh BPS dan dengan melihat tabel tipologi klassen diatas, maka kota Dumai pada tahun 2024 termasuk daerah dengan kriteria berkembang cepat.

6) Basis Ekonomi

Didalam analisa perkembangan ekonomi wilayah, terdapat 2 sektor pembangunan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Kedua sektor tersebut disebut sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah sektor yang mampu mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan Sektor-sektor Bukan Basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sektor-sektor tidak mengekspor barang-barang. Ruang lingkup mereka dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal.

Menurut Glasson (1977) dalam Muta'ali (2015) dijelaskan bahwa semakin banyak sektor basis pada suatu daerah maka semakin banyak arus pendapatan yang masuk ke wilayah tersebut serta akan memicu naiknya permintaan barang dan jasa didalam wilayah tersebut.Sektor basis meiliki hubungan langsung dengan permintaan dari luar wilayah sedangkan sektor non basis tidak. Untuk mengetahui apakah suatu sektor tersebut termasuk kedalam sektor basis atau non digunakan analisa Location Quotient (LQ). Analisa ini didasarkan pada teori basis ekonomi. Analisa ini digunakan untuk menentukan sektor apa saja yang masuk sektor basis yang dapat mengekspor (ke luar

daerah) dalam batas-batas perekonomian wilayah yang merupakan indikator untuk menunjukkan peranan suatu sektor dalam suatu daerah (kab/kota) dibandingkan dengan peranan sektor yang sama didaerah acuan yang lebih luas (provinsi). Secara matematis, analisa LQ dhitung dengan membandingkan peranan relatif sektor suatu wilayah terhadap nilai tambah total wilayah (PDRB) dengan peranan relatif sektor yang sama pada wilayah yang lebih luas (provinsi atau nasional).

Adapun persamaan untuk menghitung LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ_{ij} = \frac{Xij/Xi}{RVj/RV}$$

Dimana,

LQ_{ij} = Indeks LQ sektor i di kab/kota
X_{ij} = PDRB sektor i di kab/kota
Xi = PDRB sektor i di Provinsi
RV_j = PDRB kab/kota
RV = Total PDRB Provinsi

Tabel 3.7
Penafsiran nilai LQ

Nilai LQ	Penafsiran		
	Sektor Basis/Unggulan/Potensial	**Tingkat Spesialisasi**	**Pelayanan Pasar**
LQ > 1	Sektor basis dan unggulan	Sektor terspesialisasi	Eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
LQ < 1	Sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	Sektor tidak terspesialisasi	Non eksport, belummampu melayani pasardalam dan luar daerah
LQ = 1	Sektor seimbang dengan wilayah acuan	Spesialisasi sama denganwilayah acuan	Non eksport, hanyamampu melayani pasardi dalam =wilayah

(Sumber : Muta'ali, 2015)

Berdasarkan persamaan untuk menghitung LQ, maka didapatkan hasil LQ Kota Dumai setiap sektor pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Hasil Perhitungan LQ Kota Dumai Tahun 2024 Berdasarkan PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan Tahun 2010

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Xij) JutaRp	PDRB Provinsi Riau (Xi) Juta Rp	Xij / RVj	Xi/RV	LQ	Penafsiran		
							Sektor Basis/Unggulan/ Potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,406,220.00	152,698,390.00	0.04554	0.26731	0.17	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
2	Pertambangan dan Penggalian	87,240.00	81,020,060.00	0.00283	0.14183	0.02	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
3	Industri Pengolahan	18,974,950.00	182,856,220.00	0.61453	0.32011	1.92	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
4	Pengadaan Listrik dan Gas	87,140.00	478,450.00	0.00282	0.00084	3.37	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,210.00	80,340.00	0.00020	0.00014	1.43	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
6	Konstruksi	2,977,320.00	51,937,540.00	0.09642	0.09092	1.06	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,809,190.00	59,002,870.00	0.15575	0.10329	1.51	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
8	Transportasi dan Pergudangan	557,930.00	4,581,540.00	0.01807	0.00802	2.25	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	218,800.00	2,766,170.00	0.00709	0.00484	1.46	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
10	Informasi dan Komunikasi	409,430.00	7,057,790.00	0.01326	0.01236	1.07	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	324,200.00	5,563,130.00	0.01050	0.00974	1.08	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
12	Real Estate	130,530.00	5,511,750.00	0.00423	0.00965	0.44	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
13	Jasa Perusahaan	1,240.00	29,880.00	0.00004	0.00005	0.77	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Xij) JutaRp	PDRB Provinsi Riau (Xi) Juta Rp	Xij / RVj	Xi/RV	LQ	Penafsiran		
							Sektor Basis/Unggulan/ Potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	552,960.00	10,238,710.00	0.01791	0.01792	1.00	Sektor seimbang dengan wilayah acuan	Spesialisasi sama denganwilayah acuan	Non eksport, hanyamampu melayani pasardi dalam =wilayah
15	Jasa Pendidikan	125,500.00	3,008,750.00	0.00406	0.00527	0.77	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	60,910.00	1,541,730.00	0.00197	0.00270	0.73	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
17	Jasa lainnya	147,400.00	2,860,250.00	0.00477	0.00501	0.95	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
PDRB		**30,877,160.00**	**571,233,590.00**						
		(RVj)	**(RV)**						

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025, data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa sektor yang menjadi sektor basis (nilai LQ>1) di Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sektor industri pengolahan
2. Sektor Pengadaan listrik dan gas
3. Sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang
4. Sektor konstruksi
5. Sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
6. Sektor transportasi dan pergudangan
7. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
8. Sektor Informasi dan komunikasi
9. Sektor jasa keuangan dan Asuransi

Sedangkan sektor non basis (LQ<1) di Kota Dumai pada tahun 2024 adalah :

1. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
2. Sektor pertambangan dan penggalian
3. Sektor real estate
4. Sektor jasa perusahaan
5. Sektor pendidikan
6. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan social
7. Sektor jasa lainnya

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa semakin besar nilai LQ setiap sektor maka semakin tinggi peluang suatu daerah untuk mengembangkan sektor-sektor yang menjadi sektor basis sehingga peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah dan peluang kerja akan semakin terbuka.

Untuk menyempurnakan analisa sektor basis ini, maka untuk mengetahui sektor basis dengan memlihat laju pertumbuhan masing-masing sektor dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri-sendiri selama kurun waktu tertentu (muta'ali, 2015) maka digunakan analisa Dynamic Location Quotient (DLQ). Adapun persamaan analisa Dynamic location Quotient adalah sebagai berikut

$$DLQ_{ij} = \frac{(1+gij)/(1+gj)}{(1+Gi)/(1+G)}$$

Dimana,

DLQ_{ij} = Indeks Dynamic Location Quotient

g_{ij} = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di kab/kota

g_j = Rata-rata laju pertumbuhan di ka/kota

G_i = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di provinsi

G = Rata-rata laju pertumbuhan di provinsi

Adapun penjelasan terkait nilai DLQ dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Penafsiran nilai DLQ

Nilai LQ	Penafsiran
DLQ > 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kab/kota lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi Sektor i prospektif dan masih diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
LQ < 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kab lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi. Sektor i tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
LQ = 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kab sebanding dengan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi

(Sumber : muta'ali, 2015, data diolah)

Adapun hasil perhitungan dari persamaan DLQ diatas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Hasil Perhitungan DLQ Kota Dumai Berdasarkan PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2024

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	(1+gij) /(1+gj)	(1+Gi) / (1+G)	DLQ	Penafsiran
		2023	2024	2023	2024						
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,378,765.08	1,406,220.00	149,361,110.00	152,698,390.00	1.99	2.23	0.50	0.72	0.69	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
2	Pertambangan dan Penggalian	83,595.62	87,240.00	80,730,220.00	81,020,060.00	4.36	0.36	0.89	0.30	2.96	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
3	Industri Pengolahan	18,253,329.59	18,974,950.00	176,290,050.00	182,856,220.00	3.95	3.72	0.82	1.05	0.79	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
4	Pengadaan Listrik dan Gas	82,991.31	87,140.00	447,200.00	478,450.00	5.00	6.99	1.00	1.77	0.56	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,494.51	6,210.00	77,470.00	80,340.00	13.02	3.70	2.33	1.04	2.24	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
6	Konstruksi	2,756,162.91	2,977,320.00	48,756,790.00	51,937,540.00	8.02	6.52	1.50	1.67	0.90	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,472,739.04	4,809,190.00	55,636,270.00	59,002,870.00	7.52	6.05	1.42	1.56	0.91	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
8	Transportasi dan Pergudangan	540,637.24	557,930.00	4,300,020.00	4,581,540.00	3.20	6.55	0.70	1.67	0.42	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	(1+gij) /(1+gj)	(1+Gi) / (1+G)	DLQ	Penafsiran
		2023	2024	2023	2024						
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	191,156.71	218,800.00	2,498,890.00	2,766,170.00	14.46	10.70	2.57	2.59	0.99	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
10	Informasi dan Komunikasi	377,263.01	409,430.00	6,561,680.00	7,057,790.00	8.53	7.56	1.58	1.90	0.84	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	317,259.29	324,200.00	5,491,870.00	5,563,130.00	2.19	1.30	0.53	0.51	1.04	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
12	Real Estate	124,232.65	130,530.00	5,307,410.00	5,511,750.00	5.07	3.85	1.01	1.07	0.94	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
13	Jasa Perusahaan	1,152.04	1,240.00	27,580.00	29,880.00	7.64	8.34	1.44	2.07	0.69	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	503,634.02	552,960.00	9,354,720.00	10,238,710.00	9.79	9.45	1.79	2.31	0.78	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
15	Jasa Pendidikan	119,608.27	125,500.00	2,881,480.00	3,008,750.00	4.93	4.42	0.99	1.20	0.82	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	56,886.89	60,910.00	1,445,970.00	1,541,730.00	7.07	6.62	1.34	1.69	0.80	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
17	Jasa lainnya	137,697.01	147,400.00	2,659,740.00	2,860,250.00	7.05	7.54	1.34	1.89	0.71	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	(1+gij) /(1+gj)	(1+Gi) / (1+G)	DLQ	Penafsiran
		2023	2024	2023	2024						
PDRB		29,402,605.17	30,877,160.00	551,828,490.00	571,233,590.00	5.02	3.52				
						(gj)	(G)				

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025, data diolah)

Berdasarkan tabel hasil perhitungan DLQ tahun 2024 maka dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan seluruh sektor PDRB di Kota Dumai pada tahun 2024 ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat dari provinsi.

Jika analisa LQ digabungkan dengan analisa DLQ, maka dapat di kelompokkan sektor-sektor tersebut kedalam tipologi sektor

Tabel 3.11
Tipologi Sektor berdasarkan nilai LQ dan DLQ

	DLQ > 1	**DLQ < 1**
LQ > 1	Tipe I	Tipe III
	Sektor Basis, Prospektif	Sektor Basis, Tidak Prospektif
LQ < 1	Tipe II	Tipe IV
	Sektor Non-Basis, Prospektif	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif

(Sumber : muta'ali, 2015)

Adapun hasil analisa gabung LQ dan DLQ sektor PDRB tahun 2022 dan penafsirannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Hasil Analisa Gabungan LQ dan DLQ Sektor PDRB Kota Dumai Tahun 2024

NO	**LAPANGAN USAHA**	**2024**		
		LQ	**DLQ**	**PENAFSIRAN**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.17	0.69	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
2	Pertambangan dan Penggalian	0.02	2.96	Sektor Non-Basis, Prospektif
3	Industri Pengolahan	1.92	0.79	Sektor Basis, Tidak Prospektif
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.37	0.56	Sektor Basis, Tidak Prospektif
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.43	2.24	Sektor Basis, Prospektif
6	Konstruksi	1.06	0.90	Sektor Basis, Tidak Prospektif
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.51	0.91	Sektor Basis, Tidak Prospektif
8	Transportasi dan Pergudangan	2.25	0.42	Sektor Basis, Tidak Prospektif
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.46	0.99	Sektor Basis, Tidak Prospektif
10	Informasi dan Komunikasi	1.07	0.84	Sektor Basis, Tidak Prospektif
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.08	1.04	Sektor Basis, Prospektif
12	Real Estate	0.44	0.94	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
13	Jasa Perusahaan	0.77	0.69	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1.00	0.78	Sektor Seimbang, Tidak Prospektif
15	Jasa Pendidikan	0.77	0.82	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.73	0.80	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
17	Jasa lainnya	0.95	0.71	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025, data diolah)

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi di suatu wilayah dan dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bersangkutan terhadap bulan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Dumai pada Maret 2025, terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* sebesar 1,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya

sebesar 7,97 persen; kelompok transportasi sebesar 2,20 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,74 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,56 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,35 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,19 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,08 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,97 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,76 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,85 persen dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,53 persen..

Tingkat inflasi *month to month (m-to-m)* Kota Dumai sebesar 1,33 persen dan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* Kota Dumai bulan Maret 2025 sebesar 0,31 persen.

Tabel. 3.13
IHK dan Tingkat Inflasi month to month (m-to-m), year to date (y-to-d) dan year on year (y-on-y) Kota Dumai menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Maret 2025

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2024	IHK Desember 2024	IHK Maret 2025	Tingkat Inflasi *m-to-m* Maret 2025 [1] (%)	Tingkat Inflasi *y-to-d* Desember Maret 2025 [2] (%)	Tingkat Inflasi *y-on-y* Maret 2025 [3] (%)	Andil Inflasi *m-to-m* Maret 2025 (%)	Andil Inflasi *y-on-y* Maret 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (*Headline*)	**106.90**	**107.67**	108.00	**1.33**	**0.31**	**1.03**	**1.33**	**1.03**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110.50	110.06	111.81	-0.22	1.59	1.19	-0.08	0.36
Pakaian dan Alas Kaki	103.99	103.92	105.00	0.11	1.04	0.97	0.01	0.06
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102.29	102.16	97.33	11.67	-4.73	-4.85	1.26	-0.61
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103.17	103.71	103.95	0.11	0.23	0.76	0.01	0.03
Kesehatan	105.11	105.74	106.24	0.00	0.47	1.08	0.00	0.02
Transportasi	112.50	114.11	114.98	0.31	0.76	2.20	0.05	0.34
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99.93	99.40	99.40	0.00	0.00	-0.53	0.00	-0.02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102.44	103.02	104.04	0.00	0.99	1.56	0.00	0.03
Pendidikan	103.22	104.61	104.61	0.00	0.00	1.35	0.00	0.06
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	104.86	106.49	106.68	0.18	0.18	1.74	0.02	0.17
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	105.82	111.83	114.25	0.73	2.16	7.97	0.06	0.59

Keterangan:
[1] Persentase perubahan IHK Maret 2025 terhadap IHK Februari 2025.
[2] Persentase perubahan IHK Maret 2025 terhadap IHK Desember 2024.
[3] Persentase perubahan IHK Maret 2025 terhadap IHK Maret 2024.
-0: Data sangat kecil/mendekat

(Sumber : BPS Kota Dumai, 2025)

Pada Maret 2025 kelompok pengeluaran memberikan andil/ sumbangan inflasi y-on-y yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,59 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,36 persen; kelompok transportasi sebesar 0,34 persen,; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,17 persen; kelompok pendidikan dan kelompok pakaian dan alas kaki masing-masing sebesar 0,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya masing – masing sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,61 persen dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen.

Adapun inflasi Kota Dumai pada tahun 2024 sebesar 2,36% dan Tahun 2026 sebesar 2,8% - 3,0%.

Terkait pengendalian inflasi, Kota Dumai telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang yang terdiri dari beberapa Organsiasi Perangkat Daerah di Kota Dumai ditambah denan lembaga vertikal. Adapun langkah-langkah yang mungkin ditempuh sehubungan dengan program pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut:

1) Aspek Kelembagaan dan Koordinasi
   a) Memperkuat dan menyempurnakan mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan
   b) Memperkuat fungsi sekretariat TPID untuk mendukung komunikasi yang intensif
   c) Sinergi TPID dengan produsen dan retailer
2) Aspek Program
   a) Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program multiyears dan menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan, roadmap, dan target yang jelas.
   b) Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga dan mengarahkan ekspektasi; penguatan kerjasama antar daerahdalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, penyelarasan asumsi makro daerah dalam rangka mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan
3) Aspek Komitmen dan Komunikasi
   a) Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen TPID
   b) Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembagunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM dihitung melalui perhitungan rata geometrik terhadap Indeks Pendidikan, Indeks kesehatan dan Indeks Pengeluaran. Badan Pusat Statistik mengkalsifikasikan nilai IPM kedalam kategori:

1. Kelompok “sangat tinggi”: IPM = 80
2. Kelompok “tinggi”: 70 = IPM < 80
3. Kelompok “sedang”: 60 = IPM < 70
4. Kelompok “rendah”: IPM < 60

Indeks Pendidikan dihitung dengan menggunakan indeks harapan lama sekolah (HLS) dan indeks rata-rata lama sekolah (RLS) dengan rumus:

Adapun rumus menghitung indeks Harapan lama sekolah (I HLS) adalah;

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS\ min}{HLS\ maks - HLS\ min}$$

$$I_{HLS} = \frac{13{,}35 - 0}{18 - 0}$$

$$I_{HLS} = 0{,}742$$

Adapun rumus menghitung indeks rata-rata lama sekolah (I RLS) adalah;

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS\ min}{RLS\ maks - RLS\ min}$$

$$I_{RLS} = \frac{10{,}29 - 0}{15 - 0}$$

$$I_{RLS} = 0{,}686$$

Berdasarkan rumus diatas, maka Indeks Pendidikan dihitung dengan ;

$$I_{pendidikan} = \frac{I\ HLS + I\ RLS}{2} = = \frac{0{,}742 + 0{,}686}{2} = 0{,}714$$

Indeks kesehatan dihitung dengan menggunakan indeks angka harapan hidup (AHH) dengan rumus:

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH\ min}{AHH\ maks - AHH\ min} = \frac{71{,}78 - 20}{85 - 20}$$

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH\ min}{AHH\ maks - AHH\ min} = 0{,}797$$

Sedangkan untuk Indeks pengeluaran dihitung dengan rumus :

$$I_{Pengeluaran} = \frac{ln(pengeluaran) - ln\ (pengeluaran\ min)}{ln(pengeluaran\ maks) - ln\ (pengeluaran\ min)}$$

$$I_{Pengeluaran} = \frac{ln(12.847.000) - ln\ (1.007.436)}{ln(26.572.352) - ln\ (1.007.436)} = 0{,}7779$$

Dari seluruh perhitungan diatas, maka Indeks Pembangunan manusia (IPM) dapat dihitung dengan menggunakan Rumus :

$$\sqrt[3]{I\ Pendidikan\ x\ I\ Kesehatan\ x\ I\ Pengeluaran}\ \text{x}\ 100$$

$$\sqrt[3]{0{,}714x\ 0{,}797\ x0{,}7779\ x\ 100} = \mathbf{77{,}03}.$$

Berikut table Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2024.

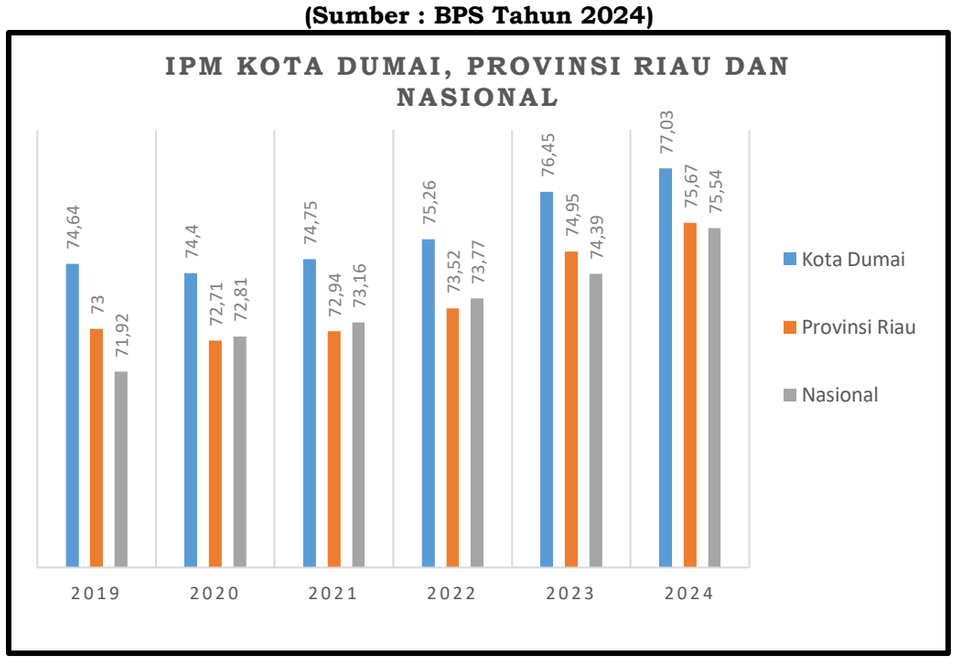
Tabel 3.14
Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Dumai	74,64	74,40	74,75	75.26	76,45	77,03
Provinsi Riau	73,00	72,71	72,94	73.52	74,95	75,67
Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39	75,54

(Sumber: BPS, 2025)

Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti yang tersaji pada gambar di bawah.

Gambar 3.1
IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional
(Sumber : BPS Tahun 2024)



Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2019-2024, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel dibawah. Pada tahun 2024, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, Pekanbaru yang memiliki angka IPM dengan kategori sangat tinggi, sedangkan Dumai, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Siak, Kampar, Pelalawan,Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir memiliki angka IPM dengan kategori tinggi.

Tabel 3.15
Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kuantan Singingi	70,78	70,31	70,60	72,78	73,35	74,00
Indragiri Hulu	70,05	69,83	70,01	71,69	72,28	72,75
Indragiri Hilir	66,84	66,54	66,63	69,12	69,64	70,07
Pelalawan	71,85	71,56	72,08	74,15	74,69	75,25
Siak	74,07	73,68	73,98	75,53	75,97	76,52
Kampar	73,15	72,83	73,02	75,21	75,59	76,29
Rokan Hulu	69,93	69,38	69,67	71,70	72,28	73,07
Bengkalis	73,44	73,46	73,58	75.38	75,96	76,37
Rokan Hilir	69,40	69,15	69,34	71,35	71,98	72,46
Kepulauan Meranti	65,93	65,50	65,70	68,31	68,96	69,64
Pekanbaru	81,35	81,32	81,58	83,38	83,67	84,26
Dumai	74,64	74,40	74,75	76,20	76,45	77,03
Riau	73,00	72.71	72.94	74,45	74,95	75,67

(Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025)

Berdasarkan trend data dan kondisi yang ada pada saat ini maka target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Dumai Tahun 2025 adalah 75,93 - 76,16 dengan nilai Umur Harapan Hidup 71,9 tahun -72,2 tahun, angka harapan lama sekolah 13,42 tahun -13,45 tahun; rata-rata lama sekolah 10,27 tahun - 11,07 tahun, indeks pengeluaran sebesar 0,772-0,776 dan perkiraan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Dumai Tahun 2026 adalah 78,35 dengan Umur Harapan Hidup 73,81 tahun, angka harapan lama sekolah 13,43 tahun; rata-rata lama sekolah 10,33 tahun, indeks pengeluaran sebesar 0,775-0,779.

d. Rasio Gini

Distribusi Pendapatan adalah ukuran yang mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah terhadap penduduknya

(muta'ali, 2015). Distribusi pendapatan merupakan kriteria yang menunjukkan mengenai penyebaran pembagian pendapatan/kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya dalam wilayah tertentu.

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin.

Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna) (muta'ali, 2015). Artinya, semakin mendekati angka satu (1) nilai indeks gini maka tingkat ketimpangan penduduk semakin lebar (Perfect inequality). Menurut Oshima dalam Muta'ali (2015), nilai indeks gini dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

G>0,5 ketimpangan tinggi
0,35<G<0,5 ketimpangan sedang
G<0,35 ketimpangan ringan

Adapun rumus untuk menghitung indeks gini adalah sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum (X_{i+1} - Xi)(Y_i + Y_{i+1})$$

Dimana,
G = Angka Gini Coefficient
Xi= Proporsi Jumlah tangga kumulatif dalam kelas i
Yi= Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Menurut muta'ali (2015), untuk menghitung indeks gini, maka dilakukan pengelompokkan penduduk sebagai berikut:

1. 20% penduduk yang menerima pendapatan tinggi dari jumlah penduduk
2. 40% penduduk yang menerima pendapatan menengah dari jumlah penduduk
3. 40% penduduk yang menerima pendapatan terendah
4. Atau penduduk dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu 20% termiskin, 20% kedua, 20% ketiga, 20% kempat dan 20% terkaya

Adapun hasil perhitungan dari persamaan indeks gini diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Rasio Gini di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Rasio Gini	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dumai	0,361	0,36	0,345	0,324	0,31	0,328

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2025)

Dari hasil pengolahan data dari statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2017-2023, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan /kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai tahun 2017, 2018, 2021, 2022 dan 2023 masuk kategori ketimpangan rendah sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020 masuk kategori ketimpangan sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan antar penduduk di Kota Dumai semakin merata.

e. Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (poverty line) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (headcount) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statitik Kota Dumai, tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2019-2024 cenderung menurun dimana kenaikan hanya terjadi pada tahun 2021 sebagai akibat Pandemi Covid 19.

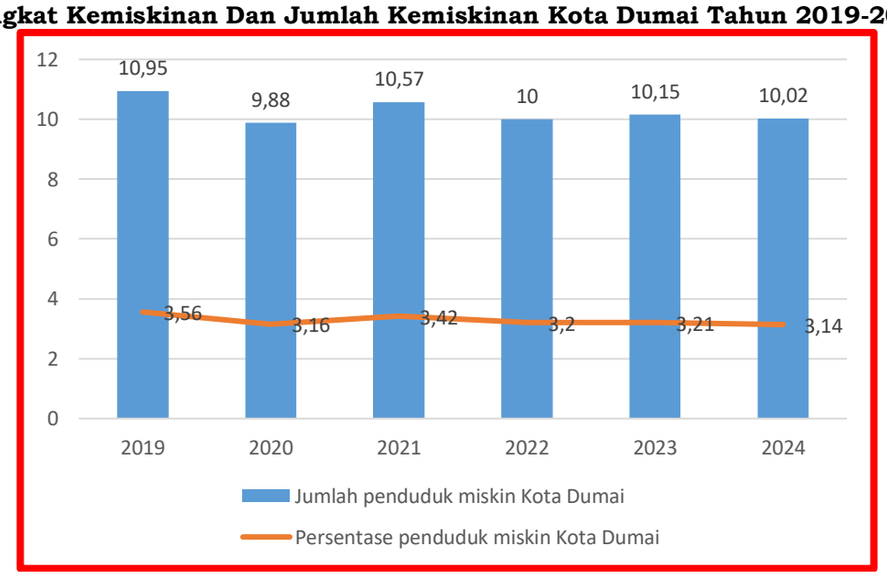
Tabel 3.17
Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/ Bln	439.152	484.609	509.002	543.182	601.348	631.652
Jumlah penduduk miskin Kota Dumai	000 Jiwa	10,95	9,88	10,57	10,00	10,15	10,02
Persentase penduduk miskin Kota Dumai	(%)	3,56	3,16	3,42	3,20	3,21	3,14

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2025)

Jika kita perhatikan tabel diatas, tingkat kemiskinan kota Dumai selama kurun waktu 2019-2024 cenderung menurun namun pada tahun 2021 tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kota Dumai naik 0,26 persen dari 3,16% menjadi 3,42% atau dari 9,880 jiwa menjadi 10,570 jiwa penduduk miskin. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0,07 persen dari 3,21% menjadi 3,14% atau dari 10,150 jiwa menjadi 10,020 jiwa penduduk miskin.

Grafik 3.2
Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2019-2024



Sedangkan garis kemiskinan kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 631.652,00/kapita/bulan. Dapat dijelaskan bahwa garis

kemiskinan digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut, Menurut BPS dalam Muta'ali (2015), garis kemiskinan dihitung dari hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM), Adapun persamaan garis kemiskinan adalah sebagai berikut :

GK = GKM + GKNM

Dimana,

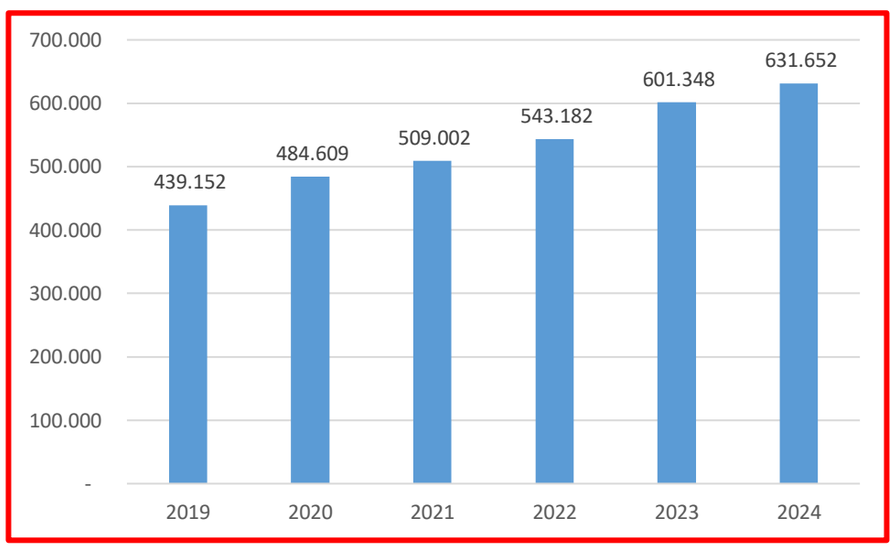
GK = Garis kemiskinan

GKM = garis kemiskinan makanan

GKNM = garis kemiskinan non-makanan

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan dibawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh worldbank yaitu US$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk *developing countries.* Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalam kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Grafik 3.3
Garis kemiskinan Kota Dumai Tahun 2019-2024



Pada tabel diatas menyajikan data indeks kedalam kemiskinan/poverty gap index atau yang sering dinotasikan dengan P1. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

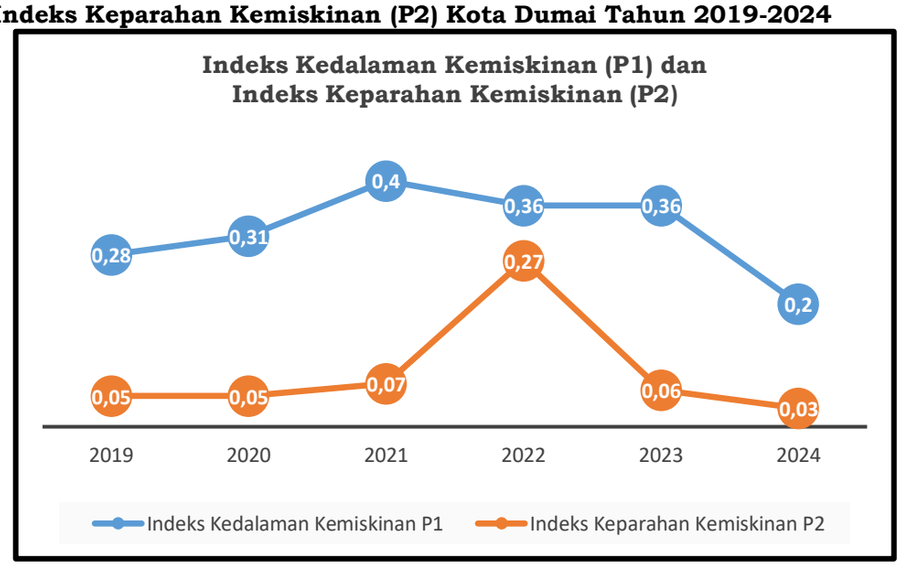
Kemudian tabel yang sama juga menyajikan indeks keparahan kemiskinan/*poverty severity index* atau yang sering dinotasikan dengan P2. Indeks keparahan kemiskinan menjelaskan tentang kondisi penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskina, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 3.18
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indeks	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	0,28	0,31	0,4	0,36	0,36	0,20

Indeks	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keparahan Kemiskinan P2	0,05	0,05	0,07	0,27	0,06	0,03

Grafik 3.4
Grafik Trend Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2019-2024



f. Pengangguran

Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Adapun beberapa data dan informasi yang butuhkan terkait dengan ketenagakerjaan adalah Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan elastisitas kesempatan kerja (EKK).

Tabel 3.19
Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja (Jiwa)	150,323	146,586	144,465	148,506	156,790	158,478
Penduduk 15+ Tahun (Jiwa)	216,983	218,283	222,553	226,891	237,323	254,797
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,47%	8,19%	6,29%	5,38%	5,15%	4,66
Bekerja (Jiwa)	140,600	134,581	135,381	140,509	148,710	151,095
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,28	67,15	64,91	65,45	66,07	65,21
Pengangguran Terbuka (Jiwa)	9,723	12,005	9,084	7,997	8,080	7,383

(Sumber : Dumai Dalam Angka, 2025)

1) Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Dumai

TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan informasi tentang penduduk yang aktif bekerja setiap hari pada suatu waktu. TPAK juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif berkerja atau mencari pekerjaan. Jika angka TPAK kecil maka kemungkinan jumlah penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun yang mengurus rumah tangga. TPAK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{TPAK} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Angkatan\ Kerja}}{\boldsymbol{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ Kerja}}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$$

Dari rumus perhitungan diatas, maka sebagai contoh dapat dihitung TPAK kota Dumai Tahun 2024 adalah

$$\boldsymbol{TPAK} = \frac{158.478}{254.797}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$$

$$\boldsymbol{TPAK} = \boldsymbol{65,21\%}$$

Dari perhitungan tersebut TPAK kota Dumai Tahun 2024 adalah 65,21%, artinya dari 100 penduduk kota Dumai usia 15 tahun keatas, sebanyak 65 orang tersedia untuk memproduksi barang/jasa pada tahun 2023. Semakin Tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat dalam memproduksi barang/jasa di suatu wilayah (muta'ali, 2015), Adapun kriteria TPAK adalah sebagai berikut:

< 50 : TPAK rendah
51-70 : TPAK sedang
>70 : TPAK tinggi

Dari kriteria TPAK diatas, maka dapat disimpulkan bahwa TPAK kota Dumai termasuk sedang. Semakin tinggi angka TPAK mengindikasikan semakin tinggi pula ketersediaan tenaga kerja (labour supply) di Kota Dumai untuk memproduksi barang/jasa dalam konteks perekonomian wilayah.

2) Tingkat Pengangguran terbuka

Menurut Muta'ali (2015), pengangguran adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja *(jobless)*. Pengangguran dengan kategori seperti tersebut adalah pengangguran terbuka *(open unemployment).* Sedangkan Sukirno (2016) menjelaskan bahwa pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang masuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum dapat pekerjaan.

Pengangguran adalah salah satu masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi, politik dan sosial (Sukirno,2016).Tingkat pengangguran terbuka (TPT) digunakan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan tentang peluang pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program pemerintah dibidang ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga sebagai alat ukur untuk menetukan keberhasilan pembangunan perekonomian selain tingkat kemiskinan.

$$\boldsymbol{TPT} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Pengangguran}}{\boldsymbol{Jumlah\ angkatan\ Kerja}}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$$

Dari rumus perhitungan diatas didapat sebagai contoh perhitungan TPT kota Dumai Tahun 2023 adalah

$$\boldsymbol{TPT} = \frac{\boldsymbol{7.383}}{\boldsymbol{158.478}}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$$

$$\boldsymbol{TPT = 4,66\%}$$

Jika dilihat data tingkat pengagguran terbuka (TPT) yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik, maka selama kurun waktu 2019-2024 TPT kota Dumai mengalami penurunan yang signifikan namun pada tahun 2020 TPT Kota Dumai mengalami kenaikan yang juga signifikan akibat dampak ekonomi dari terjadinya pandemi Covid 19. Kenaikan TPT akan berimplikasi semakin besarnya potensi kerawanan sosial di dalam kehidupan masyarakat kota Dumai seperti naiknya tingkat kriminalitas. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi tingkat pengganguran terbuka, tingkat pengangaguran terbuka kota Dumai masih masuk kategori rendah. Adapun kriteria TPT adalah sebagai berikut (muta'ali, 2015).

>70 : tinggi
51-69 : sedang
<50 : rendah

Tingkat Pengangguran terbuka dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.

3) Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)

Muta'ali (2015) menjelaskan bahwa elastisitas kesempatan kerja menggambarkan tingkat kesempatan kerja yang dapat tercipta oleh setiap persen pertumbuhan ekonomi. EKK dapat digunakan untuk menghitung proyeksi ketenagakerjaan. Nilai EKK akan semakin tinggi pada suatu wilayah didalam perekonomian yang memiliki kebijakan padat karya *(labour intensive)* dibandingkan dengan wilayah yang memiliki kebijakan perekonomian padat modal *(capital intensive).* Nilai EKK dapat digunakan untuk memperkirakan pertambahan kesempatan kerja/proyeksi ketenagkerjaan.

$$EKK = \frac{laju\ pertumbuhan\ kesempatan\ kerja\ (\Delta KK)}{laju\ pertumbuhan\ ekonomi\ (\Delta\ i)}$$

Dimana,

$\Delta\ KK$ = *tingkat kesempatan kerja tahun n - tingkat kesempatan kerja tahun n-1*

$\Delta\ i$ = *PDRB ADHK tahun n – PDRB ADHK tahun n-1*

$$Tingkat\ kesempatan\ kerja = \frac{jumlah\ penduduk\ yang\ bekerja}{jumlah\ angkatan\ kerja}\ x\ 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan diatas, maka:

$$Tingkat\ kesempatan\ kerja_{(2023)} = \frac{148.710}{156.790} \times 100 = 94,85\%$$

$$Tingkat\ kesempatan\ kerja_{(2024)} = \frac{151.095}{158.478} \times 100 = 95,34\%$$

Laju pertumbuhan kesempatan kerja (2024) $\Delta\ KK$ = **0,49%**

Pertumbuhan Ekonomi (2023) $\Delta\ i$ = **5,02%**

Maka dari hasil perhitungan persamaan-persamaan diatas, didapat nilai elastisitas tenaga kerja kota Dumai tahun 2015 adalah:

$$EKK = \frac{laju\ pertumbuhan\ kesempatan\ kerja\ (\Delta KK)}{laju\ pertumbuhan\ ekonomi\ (\Delta\ i)} = \frac{0,23\%}{6,05\%} = 0,09$$

Secara umum nilai EKK berkisar antara 0-1, semakin tinggi EKK berarti kemampuan dan dampak pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja

semakin tinggi (muta'ali, 2015). Berdasarkan hasil perhitungan nilai EKK, maka pertumbuhan ekonomi kota Dumai belum memberi pengaruh yang maksimal terhadap terciptanya lapangan kerja pada tahun 2025. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan angkatan kerja di Kota Dumai banyak didominasi oleh tamatam SMA/SMK dan tipe industri di Kota Dumai yang banyak tipe *(*Capital Intensive) yang didominasi oleh penggunaan teknologi. Adapun target tingkat pengangguran terbuka Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebesar 4,70% – 5,20% dan perkiraan tingkat pengangguran terbuka Tahun 2026 adalah sebesar 3,78%-4,88%.

g. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Dampak jangka pendek Stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme, sedangkan dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolik.

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan stunting, terdapat delapan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi/Integrasi untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat yaitu aksi pertama adalah Analisis situasi, aksi kedua adalah Rencana Kegiatan, aksi ketiga adalah rembuk stunting, aksi keempat adalah peraturan bupati/walikota tentang peran desa, aksi ke lima adalah pembinaan kader pembangunan manusia, aksi keenam adalah sistem manajemen data stunting, aksi ke tujuh adalah pengukuran dan publikasi stunting dan terakhir aksi delapan adalah reviu kinerja tahunan.

Pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi terpadu mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi sensitif mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan Kesehatan, peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar sektor Kesehatan. Sasaran intrvensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat umum. Program/kegiatan intervensi gizi sensistif dapat ditambah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan data E-PPGM pertanggal 31 Desember 2024 dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, ditemukan 192 balita dengan stunting (pendek dan sangat pendek). Tersebar di wilayah kerja yang ada di 10 (Sepuluh) Puskesmas Kota Dumai. Diantaranya Puskesmas Bukit Timah berjumlah 9 balita (0.75%), Puskesmas Jaya Mukti berjumlah 10 balita (0.25%), Puskesmas Sungai Sembilan berjumlah 10 balita (0.32%), Puskesmas Medang Kampai berjumlah 13 balita (1.16%), Puskesmas Bukit Kapur berjumlah 14 balita (0.78%), Puskesmas Bukit Kayu Kapur berjumlah 17 balita (0.74%),Puskesmas Dumai Kota berjumlah 19 balita (0.9%),Puskesmas Dumai Barat berjumlah 23 balita (1.71%) dan PuskesmasBumi Ayu berjumlah 28 balita (1.47%). Sedangkan kasus stunting yang terbanyak berada di Puskesmas Purnama Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai berjumlah 49 balita (3.08%) diantaranya 16 balita sangat pendek (1.01%) sangat pendek dan 33 balita pendek (2.07%). Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 target Prevalensi stunting Kota Dumai untuk Tahun 2026sebesar < 10 lebih kecil dari target nasional sebesar < 14.

3.1.2. Telaahan Kebijakan Nasional yang terkait dengan Kota Dumai

Kerangka ekonomi makro Kota Dumai Tahun 2026 dirumuskan dengan memperhatikan dan menelaah arah kebijakan makro nasional. Menurut Menteri Keuangan (2024) ekonomi Indonesia tetap resilien didukung kuatnya permintaan domestik, konsumsi, dan investasi di tengah pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan masih dalam posisi lemah. Meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 oleh International Monetary Fund (IMF) hanya sebesar 2,8%, sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global hanya tumbuh 2,7%, lebih rendah dari kinerja perekonomian global tahun 2024. Di tengah kondisi ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap relatif baik, mencapai 5,0%, bahkan lebih baik dibandingkan negara-negara G20 dan ASEAN. Pelemahan ekonomi global dan penurunan harga komoditas perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kinerja ekonomi Indonesia.

Kontributor yang penting dalam mendukung kuatnya ekonomi indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang masih terjaga tumbuh 4,89% pada twiwulan I 2025. dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur tumbuh 4,64% dari sisi produksi. Pertumbuhan ini didukung oleh inflasi yang terkendali dan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat. APBN akan terus dioptimalkan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional, mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang lebih inklusif, hijau, dan berkelanjutan

Lebih lanjut, pada tahun 2024 pemerintah bersama swasta akan meneruskan kebijakan hilirisasi industri pengolahan komoditas untuk pertambahan nilai tambah produk. Restriksi pada ekspor bahan mentah akan dilanjutkan untuk mendorong industri turunan dari Bauksit. Inflasi domestik semakin terkendali seiring dengan kebijakan moneter dan kebijakan pengendalian inflasi yang kontinu serta akomodatif. Dengan realisasi rata-rata inflasi 2024 sebesar 1,57% (yoy), terjaga dalam rentang sebesar 2,5 ± 1 persen. Kebijakan moneter negara lainnya juga diharapkan akan

semakin efektif dalam mengurangi laju inflasi, yang akan berdampak pada pengurangan *imported inflation*.

Tahun 2026, pemerintah pusat menetapkan Tema Pembangunan nasional yaitu Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. dengan Fokus Pembangunan sebagai berikut :

1. Kedaulatan Pangan dan Energi yang berfokus pada pangan, energi, air dan pengelolaan sampah:
   - Optimalisasi BULOG
   - Pelaksanaan food estate :
     difokuskan :
     - pengembangan Kawasan Sentra Pangan Pertanian (KSPP)/*food estate*
     - peningkatan hasil produktivitas perikanan
     - peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan,
     - keberlanjutan ekosistem perairan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan
   - Peningkatan bauran ethanol, biodiesel dan Energi terbarukan
     difokuskan :
     - meningkatkan kapasitas produksi biofuel, pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi
     - mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih
   - Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
     difokuskan :
     - pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam rangka meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat
     - program percepatan penyediaan air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan dan pembiayaan, serta Masyarakat
   - Pengelolaan Sampah
2. Ekonomi yang Produktif dan Inklusif yang berfokus pada peningkatan konsumsi Masyarakat, investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
   - Pendidikan dan Kesehatan
     - Ekosistem Makanan Bergizi Gratis : membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif melalui pemenuhan gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/MA/SMK/ sederajat.
     - Percepatan Renovasi Sekolah : mendukung pendidikan siswa.
     - Sekolah Unggulan
     - Cek Kesehatan : mendukung deteksi dini, edukasi, pencegahan penyakit, serta mengurangi potensi beban anggaran akibat biaya pengobatan dan perawatan, serta hilangnya produktivitas masyarakat.
     - Percepatan Rumah Sakit Daerah : percepatan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses akan dilanjutkan

- Digitalisasi Pendidikan
- Sekolah Rakyat

➢ Deregulasi dan Kepastian Hukum
- Reformasi Birokrasi
- Kemudahan berbisnis
- Ketertarikan Investasi

➢ Adopasi Teknologi dan Inovasi
- Transformasi Digital
- Riset dan Inovasi

➢ Pertahanan Semesta
- Komponen Cadangan
- Pemenuhan Alutsista
- Penguatan Kemampuan Teritorial

➢ Fiskal Adaptif, Stabilitas Makro Ekonomi

➢ Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
- Percepatan Hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia
- Optimalisasi potensi SWF Danantara

➢ Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- Data tunggal kemiskinan
- Digitalisasi bantuan
- Program 3 juta rumah : yang menyasar segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk masyarakat miskin dan rentan
- Pengembangan 70.000 koperasi merah putih : meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa

Sedangkan untuk Intervensi Umum Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sumatra Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan bioindustri Sumatra: sawit, karet, kelapa, dan kopi;
2. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional;
3. Peningkatan produktivitas perikanan di seluruh provinsi untuk penyediaan pangan akuatik dan bahan baku industri pengolahan;
4. Peningkatan investasi industri melalui penguatan tata kelola, promosi investasi, dan perluasan insentif pada kawasan-kawasan pusat pertumbuhan (KPBPB, KEK, KI, dan Kawasan Pariwisata);
5. Penurunan biaya logistik guna meningkatkan keunggulan komparatif investasi di Sumatera, melalui lanjutan pembangunan/peningkatan Jalan Tol Trans Sumatera dan Kereta Api Trans Sumatera, optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Sumatera (Belawan, Kualatanjung, Dumai, Batam, dan Panjang), serta pengembangan konektivitas udara melalui peningkatan infratruktur dan layanan bandara hub dan feeder di Wilayah Sumatera;
6. Pendayagunaan sumber daya air dan panas bumi guna menghasilkan green and cheap energy bagi pengembangan industri dan pembangunan di Sumatera;

7. Pengelolaan urban governance pada WM Medan, WM Palembang, dan kawasan perkotaan Batam sebagai pusat pertumbuhan dan aglomerasi ekonomi Sumatera;
8. Percepatan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan pada daerah afirmasi/lambat tumbuh dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Perbatasan Prioritas, serta peningkatan resiliensi dan kemandirian masyarakat di pulau-pulau kecil dengan vulnerability yang relatif tinggi;
9. Pengelolaan hutan secara lestari, melalui peningkatan produktivitas hasil kehutanan, pengembangan produk melalui agroforestri, pengembangan kapasitas pengelola kawasan, penguatan kelompok perhutanan sosial, dan perlindungan serta pengamanan hutan;
10. Peningkatan ekosistem lingkungan melalui konservasi dan pengurangan risiko bencana, dengan pelestarian hutan, restorasi lahan kritis, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
11. Pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset berupa redistribusi tanah dan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat;
12. Pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi;
13. Penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat;
14. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK);
15. Pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif;
16. Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
17. Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Pokok-pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sumatra Tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk Provinsi Riau meliputi 5 (lima) Kawasan Pembangunan sebagai berikut :

1. Kawasan Pertumbuhan
   A1. Kawasan Perkotaan Pekanbaru (Pekanbaru, Kampar, Pelalawan dan Siak)
   - Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Kawasan Perkotaan Pekanbaru;
   - Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Pekanbaru;
   - Pembangunan Jalan Tol Rengat - Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru (Junction Pekanbaru - IC Bypass Pekanbaru);
   - Peningkatan 6A pada koridor pariwisata Muaratakus-Pekanbaru-Siak (Revitalisasi dan Penataan *Waterfront* Sungai Siak di Pekanbaru dan Siak Sri Inderapura, Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Percandian;
   - Muaratakus, serta *Urban Renewal* Kota Tua Pekanbaru dan Kawasan Istana Siak);
   - Pembangunan Jalan Tol Rengat – Pekanbaru;

- Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11);
- Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR.

A2. Kawasan Perkotaan Dumai dan Kawasan Pengembangan Industri Dumai (Dumai)

- Pengembangan dan pembangunan Kilang Minyak Bumi Dumai:
- Pengembangan SPAM Perkotaan Dumai;
- Pembangunan Jalan Tol Dumai Kotapinang-Rantauprapat-Kisaran;
- Preservasi jalan ruas dalam kota Dumai;
- Pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Utara-Riau;
- Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR.

A3. Kawasan Perkotaan Rengat, Kab. Indragiri Hulu

- Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Rengat-Jambi;
- Preservasi jalan ruas Rengat–Teluk Kuantan dan Rengat-Tembilahan.

2. Kawasan Komoditas

B1. Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kelapa Rokan-Siak Kampar-Indragiri (Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi)

- Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian;
- Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu di Kab. Rokan Hilir: Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi;
- Kawasan kelapa di Kab. Indragiri Hilir;
- Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan di Kab. Indragiri Hilir.

B2 B3. Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Rokan Hilir (B2) dan Indragiri Hilir (B3) (Rokan Hilir, Indragiri Hilir)

- Pengembangan pelabuhan perikanan Pelabuhan Perikanan Bagansiapiapi dan Pelabuhan Perikanan Tembilahan;
- Pengembangan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Rokan Hilir dan Indragiri Hilir

3. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi

C1. Kawasan Swasembada Energi Riau (Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Meranti)

- Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada Central Sumatera Basi

C2. Kawasan Swasembada Pangan dan Air Indragiri (Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi)

- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, pada D. I. R. Kuala Sebatu;
- Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian;

- Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Indragiri dan DAS Gaung;
- Replacement Fasilitas Pelabuhan Sungai Guntung;
- Optimasi Lahan;
- Pembangunan irigasi perpompaan pertanian;
- Peningkatan SPAM di Kab. Indragiri Hilir.

4. Kawasan Afirmasi

D1. Kawasan Afirmasi Kepulauan Meranti-Bengkalis (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) (Kep Meranti, Bengkalis)

- Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan;
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara di PKSN Perbatasan Prioritas Bengkalis;
- Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T dan Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu di Kab. Kep. Meranti: Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Rangsang;
- Pembangunan SPAM di Kab. Kepulauan Meranti

5. Kawasan Konversi / Rawan Bencana

- Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem serta Areal Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi
- Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan
- Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati
- Penguatan pengelolaan hutan lestari
- Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan
- Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi perubahan iklim
- Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis adalah seluruh wilayah

3.1.3. Telaahan Kebijakan Provinsi yang terkait dengan Kota Dumai

Selain menelaah Kebijakan Nasional baik makro ataupun spasial yang terkait dengan Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai juga menelaah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Rancangan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan Rancangan RKPD Provinsi Riau tahun 2026.

Adapun Prioritas dan fokus pembangunan pemerintah provinsi Riau Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Transformasi Sosial :

1. Pendidikan

- Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah);
- Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Pendidikan untuk Masyarakat Miskin (Semua Siswa Miskin Harus bersekolah sampai jenjang tertinggi – Riau Cerdas);
- Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas;
- Dukungan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM;
- Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas;
- Peningkatan implementasi literasi Masyarakat.

2. Kesehatan
   - Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;
   - Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
   - Peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan tenaga Kesehatan;
   - Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting;
   - Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
   - Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis;
   - Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan Masyarakat;
   - Peningkatan Pembangunan Keolahragaan;
   - Pemenuhan Hak Dasar Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin;
   - Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;
   - Peningkatan kualitas perlindungan anak;
   - Peningkatan ketangguhan keluarga;
   - Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;
   - Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan.
3. Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial)
   - Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Wilayah Kantong Kemiskinan;
   - Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
   - Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM;
   - Pemenuhan Hak Dasar , Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin;
4. Agama dan Budaya
   - Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau dalam lingkungan masyarakat yang agamis;
   - Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan;
   - Dukungan Peningkatan Kenyamanan, Keamanan, Toleransi dan Kesejahteraan Rakyat.

2) Transformasi Ekonomi

a. Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perkebunan)
   - Pengembangan Kawasan Industri;

- Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi unggulan yang ramah lingkungan - perkebunan (Kelapa, Karet, Sagu, Kopi);
- Meningkatkan Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi lokal (padi, daging, telur, dan ikan);
- Meningkatkan keterjangkauan pangan;
- Pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
- Pemberdayaan Masyarakat , Pengembangan dan Perluasan Unit usaha Ekonomi Desa, branding Desa sebagai upaya peningkatan Pedapatan dan daya saing daerah.

b. Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi)
- Fasilitasi dan Dukungan Kemudahan Berinvestasi;
- Pengembangan pariwisata berbasis Ekowisata, religi, kesehatan dengan pelibatan Masyarakat;
- Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Pembangunan TPST Regional dan sistem air limbah terpadu;
- Membangun infrastruktur EBT;
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.

c. Inovasi
- Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital;
- Penguatan Kerjasama dalam pembangunan daerah.

3) Transformasi Tata Kelola

a. Peningkatan Kapasitas ASN
- Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN.

b. Implementasi Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis IT
- Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Berintegritas.

4) Infrastruktur

a. Peningkatan Infrastruktur (Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Industri
- Peningkatan infrastruktur untuk konektifitas wilayah;
- Peningkatan Infrastruktur Dasar;
- Peningkatan Akses Pelayanan dasar Infrastruktur masyarakat miskin;
- Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah;
- Mendorong pembangunan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur ke kawasan strategis Provinsi Riau.

Disamping menelaah Rancangan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dan Rancangan RKPD Provinsi Riau tahun 2026, Pemerintah Kota Dumai juga memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 dimana kota Dumai ditetapkan menjadi beberapa fungsi antara lain :

1. Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
2. Jaringan jalan ruas Dumai-Lubuk Gaung-Sinaboi, ruas jalan purnama, ruas Dumai-sepahat ditetapkan sebagai jaringan jalan arteri primer

3. Jaringan jalan ruas Dumai-sepahat, ruas Dumai-lubuk Gaung-sinaboi ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 2
4. Jaringan jalan ruas jalan lingkar kota Dumai ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 3
5. Pengembangan jaringan jalan strategis nasional direncanakan pada jalan Simpang kulim-Pelabuhan Dumai (*Rigid Pavement*), Jalan Dumai-Pelintung, peningkatan jalan simpang batang-batas Dumai (*Rigid Pavement*).
6. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antara Pekanbaru-kandis-Dumai, Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat.
7. Pengembangan Teriminal penumpang kota Dumai sebagai terminal penumpang Tipe A
8. Pengembangan terminal barang kota DUmai sebagai terminal utama
9. Rencana Pengembangan rel Kereta Api jalur Rantau Prapat-Duri-Dumai sebagai jalur utama dan jalur rokan IV koto-ujung baru-Kandis-Duri-Dumai sebagai jalur lokal
10. Memantapkan lintas penyeberangan antara Negara melalui pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) Dumai-Melaka dan Dumai-Tanjung Beruas
11. Mengembangkan pelabuhan angkutan penyeberangan ASDP Kota Dumai
12. Pengembangan Bandar udara Pinang kampai sebagai pengumpul skala tersier.
13. Rencana pengembangan pembakit listrik PLTGU di Kota Dumai dan Pembangunan transmisi saluran udara tegangan tinggi jalur Dumai-KID, Jalur Dumai-Bangkinang, Jalur Bagan Siapiapi-Dumai
14. Pengembangan Sistem Penyediaan Air mInum (SPAM) Durolis Kota Dumai-Kabupaten Rokan Hilir-Kabupaten Bengkalis
15. Pengembangan Sistem Pengelolaan sampah tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem *controlled landfill* di Kecamatan Dumai Selatan
16. Perlindungan kawasan bergambut di Kota Dumai dan taman wisata alam Kota Dumai
17. Pengembangan kawasan minapolitan di Kota Dumai
18. Pengembangan kawasan pariwisata pantai puak dan sekitarnya
19. Pengembangan kawasan industri Dumai sebagai kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi
20. Pengembangan sarana dan prasarana untuk memacu perkembangan kawasan ekonomi khusus Dumai dan pengembangan pelabuhan laut internasional Dumai
21. Pengembangan jaringan kabel serat optic di Kota Dumai

3.1.4. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Dumai Secara Umum

Berdasarkan telaahan diatas terkait isu-isu strategis baik isu strategis berdasarkan urusan, telaahan isu dari nasional dan provinsi, maka dapat disimpulkan isu-isu stategis pembangunan kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Menghadapi Era Globalisasi;
2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat;

3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi Pelayanan Publik;
4. Penguatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Energi Berkelanjutan sebagai Fondasi Pembangunan;
5. Optimalisasi Penataan Ruang Kota yang Terintegrasi, Harmonis, dan Berkelanjutan;
6. Mitigasi Risiko Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Kota Tangguh.

3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026

Adapun tantangan pada Tahun 2026 sebagai tahun landasan awal pencapaian "Indonesia Emas 2045" berfokus pada:

1. Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah dengan penekanan fokus pembangunan sebagai berikut :
   - Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta integrasi Rencana Detail Tata Ruang dengan sistem *Online Single Submission*
   - Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan
   - Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dilaksanakan melalui (i) harmonisasi hubungan pusat dan daerah, (ii) penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pemerintah daerah, serta (iii) penguatan fondasi keuangan daerah; Kebijakan ini didukung dengan upaya harmonisasi regulasi pusat - daerah, kerja sama multisektor pembangunan, dan penguatan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah).
   - Pelaksanaan akuisisi dan pembuatan peta dasar skala besar 1:5.000 untuk mendukung penyusunan RDTR dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
   - Penguatan fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pendanaan alternatif di daerah
   - Percepatan reforma agraria, penuntasan sertipikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital
2. Infrastruktur dan Layanan Dasar
   - Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah
   - Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
   - Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

- Menuntaskan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan rendah karbon termasuk melalui pengembangan infrastruktur, penyediaan bantuan, dan subsidi tenaga listrik tepat sasaran
- Pengembangan konektivitas serta fasilitas keselamatan transportasi termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi
- Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam (*nature-based solution*) melalui peningkatan infrastruktur tampungan air, penyediaan pasokan air, dan pengelolaan risiko daya rusak air
- Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana
- Penuntasan konektivitas digital, perluasan jangkauan layanan komunikasi, dan peningkatan literasi digital
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular
- Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim

3. Pembangunan Pedesaan dan Daerah Afirmasi
    - Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, penguatan kualitas perencanaan desa dan koordinasi desa dengan pemerintah di atasnya hingga tingkat nasional, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan kawasan perdesaan prioritas
    - Pembangunan kawasan perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi tata kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan
    - Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan
    - Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal menjadi daerah berkembang melalui pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan serta layanan dasar lainnya; penguatan ekonomi lokal terutama yang berbasis kearifan lokal; pemerataan penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas sesuai standar; serta pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
4. Pengelolaan Pusat Pertumbuhan
    - Pengelolaan urbanisasi dan perkotaan melalui penataan wilayah metropolitan, pembangunan kota otonom dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang layak huni, inklusif dan berbudaya, hijau dan berketahanan, serta maju menyejahterakan utamanya melalui percepatan penyelesaian rencana pembangunan dan rencana spasial, penyediaan konektivitas transportasi dan komunikasi yang memadai, pemanfaatan pendanaan inovatif, penyusunan regulasi serta pembentukan kelembagaan yang dinamis dan adaptif
    - Pengembangan pusat pertumbuhan baru (berbasis komoditas unggulan dan pariwisata rintisan) dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting (KI, KEK,

KPBPB, DPP) melalui peningkatan produktivitas, riset, inovasi, penguatan SDM, promosi, penguatan 3A (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas), pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan

- Penuntasan dan pemanfaatan proyek strategis nasional yang bersifat kawasan melalui percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, evaluasi dan penyiapan *carry over* proyek strategis nasional serta penguatan kerja sama pengelolaan proyek strategis nasional

5. Pelestarian Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
    - Pengelolaan kawasan konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sebagai upaya mitigasi *Triple Planetary Crisis* dalam menjamin keberlanjutan pembangunan
    - Menjaga keberlanjutan pembangunan melalui (i) peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, layanan peringatan dini dan resiliensi masyarakat
    - Peningkatan kualitas layanan kedaruratan dan pemulihan pasca bencana.

Selanjutnya sebagai daerah yang struktur ekonominya dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan dan kegiatan ekonomi turunannya, maka perekonomian Kota Dumai pada Tahun 2025 dan perkiraan Tahun 2026 sangat dipengaruhi oleh Perekonomian Nasional dan Global. Isu terkait pemerintahan presiden baru terpilih dan kepala daerah terpilih memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas dalam sistem politik dan ekonomi. Kemudian beberapa isu global yang dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian di Kota Dumai, diantaranya kampanye negatif yang dilakukan Uni Eropa terkait *sustainability* dari *Crude Palm Oil* (CPO). Kampanye negatif ini bertujuan untuk menggantikan ketergantungan terhadap *Crude Palm Oil* (CPO) dengan minyak biji bunga matahari atau *rapeseed*. Isu global lainnya terkait situasi geopolitik dunia yang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Hal ini berhubungan dengan aktifitas perekonomian Kota Dumai dimana industri pengolahan dan aktivitas ekspor impor menjadi kontributor terbesar yang berbasis dollar.

Beberapa situasi yang telah disebutkan di atas dapat menimbulkan berbagai macam kemungkinan dan juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Kota Dumai juga tidak terlepas dari kondisi ini, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa struktur ekonomi yang di dominasi oleh aktvitas industri pengolah dan ekspor dan impor akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan ekspektasi nyata dari perencanaan

dan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah (Perda) Yang terdiri dari Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang tersebut di atas, Penyusunan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai setiap tahunnya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, APBD diklasifikasi dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi,program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sehingga dengan demikian, tersusunnya APBD secara efektif dan efisien yang mencerminkan perwujudan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan fungsi salah satu didalam 3 (tiga) domain, yaitu sektor publik, sektor swasta dan masyarakat atau ”civil society”.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi serta proyeksi/target pendapatan Pemerintah Kota Dumai dari tahun 2023, 2024 sampai target tahun 2025 serta proyeksi 2026-2027 dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Realisasi Tahun 2023 – 2024, P APBD 2025 dan target Pendapatan Tahun 2026-2027

Uraian	Realisasi APBD		P APBD 2025	Target APBD 2026	Target Tahun 2027 *
	Tahun 2023	Tahun 2024			
PENDAPATAN DAERAH	**1.911.067.514.157,78**	**1.792.200.446.555,66**	**2.313.347.876.484,41**	**2.038.661.723.266,00**	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**566.903.618.474,78**	**606.665.799.254,66**	**1.103.406.435.543,41**	**1.104.056.269.901,00**	**1.123.800.517.537,00**
Pajak Daerah	358.508.134.419,00	400.061.670.918,00	876.773.675.384,41	887.918.345.356,00	
Retribusi Daerah	43.131.076.576,00	51.540.371.040,00	61.409.915.000,00	61.509.915.000,00	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.215.970.725,00	1.160.105.174,00	5.150.000.000,00	4.000.000.000,00	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.048.436.754,78	153.903.652.122,66	160.072.845.159,00	150.628.009.545,00	
Pendapatan Transfer	**1.344.163.895.683,00**	**1.185.534.647.301,00**	**1.231.505.205.941,00**	**934.605.453.365**	**1.681.977.534.041,00**
Tranfer Pemerintah Pusat	1.176.303.738.791,00	1.084.022.143.800,00	1.052.803.301.156,00	822.510.407.000,00	
Transfer antar Daerah	167.860.156.892,00	101.512.503.501,00	157.138.139.785,00	112.095.046.365,00	

(Sumber : BPKAD Kota Dumai, * Perda No 8 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029)

Penjelasan Tabel diatas, untuk Tahun 2026 sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2026 sebesar Rp. 2.038.661.723.266,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari :

a) Pajak Daerah;
b) Retribusi Daerah;
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Penyumbang PAD dikota Dumai diantaranya berasal dari objek :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Parkir,
7. Pajak Air Tanah,
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2),
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
12. Retribusi Pelayanan Pasar,
13. Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah (sewa alat-alat berat),
14. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah,
15. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
16. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
18. Retribusi Jasa Usaha Terminal,
19. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir,
20. Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan,
21. Retribusi Pelayanan Bandar Udara,
22. Retribusi Izin Trayek,
23. Retribusi Rumah Potong Hewan,
24. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol,
25. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
26. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air,
27. Retribusi Puskesmas, dan
28. Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Berdasarkan Perkiraan dari masing-masing jenis objek pendapatan, maka target PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 direncanakan Rp. 1.104.056.269.901 dengan rincian diperkirakan sumber yang diterima dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 4.000.000.000,00, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 150.628.009.545

2) Pendapatan transfer

Pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kepada Pemerintah Kota Dumai melalui Kas Umum Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan. Pada Tahun 2026, prediksi pendapatan transfer sebesar Rp. 934.605.453.365,00 Hal ini akan sangat berdampak terhadap prediksi Belanja Daerah yang direncanakan pada Tahun 2026 yang akan mengalami perubahan cukup signifikan.

Rencana pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer untuk Tahun Anggaran 2023 masing-masing terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat Rp. 822.510.407.000,00
b. Transfer antar daerah Rp. 112.095.046.365,00

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara teknis kebijakan keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah, untuk penjelasan diuraikan sebagai berikut :

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Dumai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya,
2. Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pendapatan, kelompok PAD dan jenis lain-lain pendapatan yang sah,
3. Alokasi dana perimbangan yang berasal dari DBH, DAU dan DAK dalam Tahun 2026 masih berdasarkan perkiraan yang bersifat indikatif.

Target Pendapatan Daerah Tahun 2026 meliputi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan daerah Tahun 2026 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
b. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.
c. Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
d. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal *(investasi daerah)*.
e. Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Badan Usaha Milik Daerah dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
f. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.

g. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
h. Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Transfer

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perhitungan alokasi Dana transfer pemerintah pusat didasarkan pada alokasi Tahun 2026 masih bersifat indikatif dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan target tahun 2024 serta mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Informasi Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
b. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Perhitungan alokasi dana transfer antar daerah yang bersifat indikatif didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2023. Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: Hibah; Dana Darurat; dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Alokasi Pendapatan Hibah Dana BOS yang termasuk Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun sebelumnya, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.

Proyeksi pendapatan APBD Tahun 2026 diatas didasari pada asumsi tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundangan yang mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan seperti pembatalan perda berkaitan dengan pendapatan tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem seperti inflasi atau devaluasi serta kondisi perekonomian yang stabil yang berfiat indikatif.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Analisis potensi pajak daerah;
2. Penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah;
3. Pemutakhiran basis data Wajib Pajak Daerah serta Optimalisasi pemanfaatan data Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Sosialisasi dan penyuluhan terkait ketentuan pajak dan retribusi daerah kepada Wajib Pajak
5. Peningkatan Kualitas Aparatur Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Peningkatan layanan pajak daerah dengan penyederhanaan dan moderniasi sistem pajak dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparatur;
7. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah;
9. Pengembangan kebijakan pajak daerah;
10. Pengkajian ulang penerapan tarif pajak dan Retribusi Daerah;
11. Evaluasi dan pelaporan kinerja;
12. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang Pendapatan;
13. Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait PAD;
14. Menyiapkan data-data penerimaan daerah secara akurat sebagai bahan analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah;
15. Melakukan pengawasan dan Penertiban PAD;
16. Penegakan Hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daeah tentang PAD;
17. Peningkatan Pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik;
18. Koordiasi antar OPD ditingkatkan sebagai upaya peningkatan PAD;
19. Koordinasi dengan BUMD dalam rangka optimalisasi Pendapatan dari unit usaha;
20. Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD;
21. Mendorong Investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain : industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain;
22. Melakukan koordinasi dan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait dengan dana transfer;
23. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika di Bidang Pendapatan.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksanakanya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai Tahun 2026. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran OPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan diperlukan sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah melalui Pengeluaran langsung yang didistribusikan menurut fungsi Pemerintah Daerah. Tabel di bawah ini menggambarkan realisasi belanja daerah Kota Dumai tahun 2023, target pada APBD tahun 2024 dan proyeksi Tahun 2026.

Tabel 3.22
Realisasi dan Target Belanja Kota Dumai Tahun 2023 – 2026

URAIAN	REALISASI		P APBD 2025	TARGET APBD 2026	TARGET 2027*
	TAHUN 2023	TAHUN 2024			
Belanja Daerah	**1.947.924.616.479,44**	**1.809.083.667.572,74**	**2.290.966.082.009,11**	**2.264.661.723.266,00**	**2.747.028.051.578,00**
Belanja Operasi	**1.453.409.582.381,98**	**1.438.582.957.069,90**	**1.725.072.133.449,73**	**1.691.261.047.779,42**	**1.723.370.208.740,90**
Belanja Pegawai	676.986.867.844,60	725.984.432.646,00	866.395.140.987,33	911.471.666.964,04	
Belanja Barang dan Jasa	700.247.720.233,49	612.399.464.331,11	785.706.444.595,78	653.504.563.055,38	
Belanja Bunga	4.139.515.445,00	1.813.245.312,00	1.204.000.000,00	32.390.000.000,00	
Belanja Hibah	67.168.778.858,89	88.943.514.780,79	68.537.647.866,62	88.199.317.760,00	
Belanja Bantuan Sosial	4.866.700.000,00	9.442.300.000,00	3.228.900.000,00	5.695.500.000,00	
Belanja Modal	**494.412.873.374,46**	**370.176.158.802,84**	**564.789.601.717,16**	**562.770.675.486,58**	**1.003.657.842.837,10**
Belanja Modal Tanah	4.474.680.000,00	19.706.460,00	16.557.769.218,00	21.268.089.173,47	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.265.340.501,15	54.840.692.076,00	74.018.829.571,28	22.381.703.699,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126.204.897.767,35	86.543.178.916,80	209.504.518.973,77	111.734.055.427,50	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	258.743.613.137,96	222.453.961.255,04	256.414.818.379,11	399.987.085.756,61	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.724.341.968,00	6.218.649.055,00	7.619.365.575,00	7.399.741.430,00	
Belanja Modal Aset Lainnya	-	99.971.040,00	674.300.000,00	-	
Belanja Tidak Terduga	**102.160.723,00**	**324.551.700,00**	**1.104.346.842,22**	**10.630.000.000,00**	**20.000.000.000,00**
Total Surflus/Defisit	**-36.857.102.321,66)**	**-16.883.221.017,08)**	**22.381.794.475,30**	**-226.000.000.000,00**	**58.750.000.000,00**

(Sumber : BPKAD Kota Dumai, * Perda No 8 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029)

Untuk perkembangan belanja langsung yang telah masuk pada sistem pengimputan SIPD Kota Dumai berdasarkan program/kegiatan serta pagu usulan OPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Rekap Pagu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	BATASAN PAGU
1	1.01.2.22.0.0200 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	479.970.332.777
2	1.02.0.0.0100 DINAS KESEHATAN	437.165.387.298
3	1.03.0.0.0100 DINAS PEKERJAAN UMUM	466.754.141.763
4	1.03.2.10.0.0100 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	108.858.666.777
5	1.04.0.0.0100 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.134.335.363
6	1.05.0.0.0100 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.197.524.640
7	1.05.0.0.0200 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	10.028.932.745
8	1.05.0.0.0400 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.143.456.360
9	1.06.0.2.13.0500 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	16.298.408.501
10	2.07.0.0.0100 DINAS TENAGA KERJA	8.238.105.108
11	2.08.0.0.0100 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.714.280.454
12	2.09.3.27.0.0200 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	21.036.686.305
13	2.11.0.0.0100 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.272.071.390
14	2.12.0.0.0100 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9.174.014.525
15	2.14.0.0.0100 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.174.469.595
16	2.15.0.0.0100 DINAS PERHUBUNGAN	54.584.309.205
17	2.16.2.20.2.21.0400 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	14.994.894.657
18	2.17.3.31.0.0200 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	8.836.528.627
19	2.18.0.0.0100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.374.745.865
20	2.19.3.26.0.0200 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	17.434.534.604
21	2.23.2.24.0.0200 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.502.226.364
22	3.25.0.0.0100 DINAS PERIKANAN	7.892.652.890
23	3.30.0.0.0100 DINAS PERDAGANGAN	10.759.887.319
24	4.01.5.06.0.0100 SEKRETARIAT DAERAH	96.561.304.568
25	4.02.0.0.0100 SEKRETARIAT DPRD	57.112.143.993
26	5.01.0.0.0100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.711.990.665
27	5.02.0.0.0200 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	150.796.219.840
28	5.02.0.0.0300 BADAN PENDAPATAN DAERAH	53.796.539.341
29	5.03.5.04.0.0100 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.776.038.733
30	5.05.0.0.0100 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	3.361.499.230
31	6.01.0.0.0100 INSPEKTORAT DAERAH	24.443.499.570
32	7.01.0.0.0100 KECAMATAN DUMAI BARAT	10.977.214.302
33	7.01.0.0.0200 KECAMATAN DUMAI TIMUR	13.185.837.260
34	7.01.0.0.0300 KECAMATAN BUKIT KAPUR	13.662.500.538
35	7.01.0.0.0400 KECAMATAN DUMAI KOTA	12.235.193.050
36	7.01.0.0.0500 KECAMATAN DUMAI SELATAN	11.858.981.332
37	7.01.0.0.0600 KECAMATAN MEDANG KAMPAI	9.281.197.660
38	7.01.0.0.0700 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	13.303.365.950
39	8.01.0.0.0100 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.057.604.102
TOTAL		**2.264.661.723.266**

(Sumber : BPKAD Kota Dumai, 2025)

a. Belanja Daerah

Belanja daerah tahun anggaran 2026 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang dan bersifat indikatif. Belanja daerah Tahun 2026 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Dumai, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Terutama terhadap target kinerja harus mempedomani Visi dan Misi serta program prioritas kepala daerah.

b. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta penanggulangan kemiskinan;
2. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyusunan program/kegiatan merupakan kebutuhan riil dengan dianalisis segi kewajaran biaya dikaitkan dengan capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi-misi dan program prioritas kepala daerah;
5. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah Tahun 2026 sesuai dengan amanat UU nomor 20 Tahun 2004 tentang sistem pendidikan nasional
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat;
7. Pengalokasian Belanja terhadap suatu kegiatan dilaksanakan secara proporsional terhadap output yang ingin dicapai;

8. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap budget sharing antara pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Provinsi Riau ataupun pemerintah pusat;
9. Penganggaran honorarium dalam kegiatan sangat selektif dan sebahagian besar dihapuskan dan perjalanan dinas diatur tersendiri (Perwako) dibatasi frekuensi, waktu dan jumlah orang;
10. Program/kegiatan/sub kegiatan diupayakan tidak tumpang tindih dan disesuaikan dengan Tupoksi OPD;

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Dumai juga telah mengajukan usulan belanja kegiatan pembangunan untuk Tahun 2026 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi Riau. Usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari DAK telah disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait, sedangkan usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari Bankeu Provinsi Riau telah disampaikan melalui tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah provinsi Riau.

c. Kebijakan Belanja Operasi Tahun 2026 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2025.

1. Ketentuan Terkait Belanja Operasi

   Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa;
   c. Belanja Bunga;
   d. Belanja Subsidi;
   e. Belanja Hibah; dan
   f. Belanja Bantuan Sosial.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
   a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
   b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
   c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi pemerintah.

6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.

7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:

   a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja normal;
   b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
   c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
   d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
   e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
   f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbanganobjektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagiPegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas

Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:

   a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;

   b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;

   c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.

   d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

   e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:

   a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

   b) penghargaan atas suatu prestasi;

   c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;

   d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau

g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu.

11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Hibah

1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
   a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
   b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
   a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko

sosial;

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

d. Kebijakan Belanja Modal Tahun 2026 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2024.

Mengacu pada Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun

2019, ketentuan terkait Belanja Modal namun bersifat indikatif yang diatur sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

   Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

   1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
   3) batas minimal kapitalisasi aset.

   Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

   1) berwujud;
   2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
   3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
   4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

   1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
   2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
   3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

1) dapat diidentifikasi;
2) tidak mempunyai wujud fisik;
3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

e. Kebijakan Belanja Tidak Terduga Tahun 2026 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2025.

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga yang bersifat indikatif diatur sebagai berikut:

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Keadaan darurat meliputi:
   1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

   Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar
d. Keperluan mendesak meliputi:
   1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
         (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
         (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait.

h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku

f. Kebijakan Belanja Belanja Transfer Tahun 2026 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer berdifat indikatif dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

c. Belanja Bagi Hasil

1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Keuangan

1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Bantuan keuangan terdiri atas:

a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;

b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;

c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerahnprovinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau

e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.

a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desasebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.

d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

e) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan

evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.24.
Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 – 2026

NO	JENIS PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	REALISASI		P APBD 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027 *
		TAHUN 2023	TAHUN 2024			
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**107.418.609.614,33**	**25.562.007.293,00**	**8.678.746.490,59**	**316.000.000.000,00**	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.417.609.614,33	25.561.507.293,00	8.678.746.490,59	16.000.000.000,00	
3.1.2	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	-	-	-	300.000.000.000,00	
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000,00	500.000,00	-	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**107.418.609.614,33**	**25.562.007.293,00**	**8.678.746.490,59**	**316.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**45.000.000.000,00**	-	**31.060.540.965,89**	**90.000.000.000,00**	**83.750.000.000,00**
3.2.1	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	45.000.000.000,00	-	31.060.540.965,89	90.000.000.000,00	
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang dan bunga	-	-	-	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman daerah	-	-	-	-	
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**45.000.000.000,00**	-	**31.060.540.965,89**	**90.000.000.000,00**	**108.750.000.000,00**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**62.418.609.614,33**	**25.561.507.293,00**	**-22.381.794.475,30**	**226.000.000.000,00**	**-58.750.000.000,00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**25.561.507.292,67**	**8.678.746.490,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Sumber : BPKAD Kota Dumai, * Perda No 8 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029)

a. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

b. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

c. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang beserta bunga ; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk meningkatkan investasi jangka panjang pemerintah daerah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai yang pada intinya mampu menambah *deviden* (keuntungan) bagi Pemerintah Kota Dumai dan disalurkan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat atau lembaga ekonomi tertentu.

PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2026

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah serta Rencana Kerja yang terukur pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Tahun 2026 juga merupakan tahun pertama dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045. Arah pembangunan Provinsi Riau, khususnya Kota Dumai pada tahun tersebut, difokuskan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah: "Kota Industri yang Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029".

Pertimbangan lain yang tak kalah penting digunakan adalah hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun lalu, Hasil Musrenbang RKPD, Pokok-pokok Pikiran DPRD, Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), pelaksanaan *Suistainable Development Goals* (SDGs) dan pelaksanaan aksi konvergensi stunting serta target penuntasan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Dumai.

4.1.1. RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029

Mempedomani Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Dumai, maka RPJMD kota Dumai Tahun 2025-2029 mempunyai visi sebagai berikut:

"Kota Industri yang Unggul, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029"

Secara filosofi, visi tersebut mencerminkan makna dan harapan besar bagi Kota Dumai untuk berkembang menjadi pusat industri yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat, kelestarian lingkungan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Melayu. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dumai sebagai **Kota Industri yang Unggul** menunjukkan bahwa Kota Dumai ingin menjadi kota industri yang kompetitif, efisien, dan inovatif. Keunggulan ini dapat diukur berdasarkan daya saing sektor industri, penerapan teknologi modern,

keberlanjutan ekonomi, serta kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan potensi sebagai kota Pelabuhan dan pusat industri pengolahan, Kota Dumai diharapkan mampu menarik investasi, meningkatkan produktivitas industri dan menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif.

- Dumai sebagai Kota Industri yang **Sejahtera** mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Industri yang berkembang harus berdampak positif terhadap kehidupan Masyarakat, baik melalui peningkatan lapangan kerja, pendapatan yang layak, maupun fasilitas umum yang memadai. Sejahtera juga mencakup aspek sosial, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kota Dumai.
- Dumai sebagai Kota Industri yang **Berkelanjutan** berarti menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Kota Dumai diharapkan dapat mengembangkan industri yang ramah lingkungan, mengelola sumber daya alam secara bijaksana serta mengadopsi prinsip ekonomi hijau agar Pembangunan industri tidak merusak lingkungan dan tetap memberi manfaat bagi generasi mendatang.
- Dumai yang **Berlandaskan Budaya Melayu** mencerminkan Kota Dumai dengan akar budaya Melayu yang kuat ingin memastikan bahwa pembangunan kota tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal. Berlandaskan budaya Melayu berarti menjadikan adat, norma, dan kearifan lokal sebagai landasan dalam tata kelola pemerintahan, kehidupan sosial, serta pengembangan industri.
- **Tahun 2029** menjadi target pencapaian visi pembangunan tersebut, menandakan periode perencanaan dan implementasi strategi pembangunan. Dalam rentan waktu ini, diharapkan terdapat kemajuan signifikan dalam aspek industri, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta pelestarian budaya, sehingga Kota Dumai dapat mencapai posisi yang diharapkan.

4.1.2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2029

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Berdaya Saing,
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan,
3. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Produktif,
4. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Penjabaran masing-masing misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama periode pemerintahan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Berdaya Saing

Misi pertama bertujuan untuk menciptakan masyarakat Kota Seruyan yang memiliki kompetensi tinggi, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, serta memiliki daya saing dalam berbagai bidang, baik di tingkat regional, nasional, maupun

global. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi faktor utama dalam mendukung terwujudnya Kota Seruyan sebagai kota industri yang unggul, sejahtera, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap teknologi modern agar mereka siap menghadapi tantangan dunia kerja serta perkembangan industri yang semakin dinamis.

Dalam implementasinya, misi ini dijalankan dengan mengedepankan aspek peningkatan kualitas pendidikan formal maupun nonformal, pemberdayaan tenaga kerja, serta penguatan karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai budaya Melayu. Pemerintah juga mendorong penguasaan teknologi dan inovasi agar SDM yang dihasilkan tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kreatif dan solutif. Selain itu, penguatan nilai-nilai keagamaan, etos kerja, serta jiwa kewirausahaan menjadi bagian integral dari strategi peningkatan SDM, sehingga masyarakat Seruyan tidak hanya menjadi tenaga kerja yang kompetitif, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan di era industri modern.

Misi 2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.

Misi kedua berfokus pada pengembangan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Seruyan. Infrastruktur yang memadai menjadi fondasi utama dalam mendorong kelancaran aktivitas industri, perdagangan, dan sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, sanitasi, serta fasilitas telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Dengan pembangunan infrastruktur yang merata, diharapkan konektivitas antarwilayah dapat diperkuat, sehingga distribusi barang dan jasa semakin lancar serta mendorong pemerataan pembangunan.

Selain itu, aspek keberlanjutan menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang dilakukan akan mengedepankan prinsip ramah lingkungan dengan memanfaatkan teknologi hijau serta memperhatikan daya dukung lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem. Pemerintah juga akan mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, guna menciptakan sistem infrastruktur yang efisien dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim serta bencana alam. Dengan adanya infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, Kota Seruyan dapat tumbuh sebagai kota industri yang unggul dengan daya saing tinggi, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakatnya.

Misi 3. Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif

Misi ketiga bertujuan untuk menciptakan perekonomian Kota Seruyan yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan perkembangan industri, diperlukan strategi yang mampu mendorong produktivitas di berbagai sektor, seperti

industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, dengan menyediakan akses terhadap permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta kemudahan regulasi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Selain itu, pembangunan ekonomi yang produktif juga akan diarahkan pada pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing daerah. Pemerintah akan mendorong digitalisasi ekonomi, memperkuat rantai pasok industri lokal, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional. Prinsip keberlanjutan juga menjadi perhatian utama dalam pertumbuhan ekonomi, dengan memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dilakukan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Kota Seruyan dapat menjadi kota industri yang unggul dengan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Misi 4. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel

Misi keempat bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, reformasi birokrasi akan terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), digitalisasi layanan publik, serta penyederhanaan regulasi guna mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Selain itu, akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran akan dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan juga akan ditingkatkan guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan tata kelola yang baik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin meningkat, serta tercipta lingkungan yang kondusif bagi pembangunan Kota Seruyan yang unggul, sejahtera, dan berkelanjutan.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan capaian strategis yang mencerminkan tingkat kinerja tertinggi dalam pembangunan daerah. Perumusannya didasarkan pada visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagai landasan utama dalam menyusun strategi, kebijakan, dan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah untuk periode lima tahun. Tujuan pembangunan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun sebagai dampak dari keberhasilan berbagai program prioritas daerah. Tujuan ini disusun untuk menjawab isu-isu

strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Sementara itu, sasaran pembangunan merupakan hasil konkret yang ingin dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran dirancang agar terukur, spesifik, realistis, dan dapat diwujudkan dalam periode lima tahun, sehingga dapat menjadi indikator pencapaian outcome dari berbagai program perangkat daerah. Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran yang tepat akan memastikan arah pembangunan daerah lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil yang nyata.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025 – 2029, maka tujuan pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- Tujuan 1.1 Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk yang sejalan dengan penambahan penduduk dan arus urbansiasi.
  Adapun sasaran dari tujuan ini adalah sebagai berikut :
  a. Kesehatan untuk semua
  b. Pendidikan berkualitas yang merata
  c. Perlindungan sosial yang adaptif
- Tujuan 1.2 Terwujudnya Masyarakat yang Tangguh
  Adapun sasaran dari tujuan ini adalah sebagai berikut :
  a. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
- Tujuan 2.1 Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur.
  Adapun sasaran dari tujuan ini adalah sebagai berikut :
  a. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dari Pusat Kota Hingga ke Kelurahan
- Tujuan 2.2 Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas
  Adapun sasaran dari tujuan ini adalah sebagai berikut
  a. Lingkungan Hidup yang Berkualitas
  b. Berketahanan air, energi dan kemandirian pangan
  c. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
- Tujuan 3.1 Terwujudnya Perekonomian Kota Dumai yang Maju dan Berdaya Saing
  Adapun sasaran dari tujuan ini adalah sebagai berikut :
  a. Stabilitas Ekonomi Makro
  b. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
  c. Produktivitas Ekonomi
- Tujuan 4.1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Berkualitas
  Adapun sasaran dari tujuan ini adalah sebagai berikut :
  a. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif.

Strategi dan arah kebijakan merupakan perencanaan menyeluruh yang dirancang agar pemerintah daerah dapat mencapai tujuan serta sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah diwujudkan melalui strategi yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan sebagai program prioritas dalam

pembangunan daerah .Perencanaan strategis berfokus pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta bertujuan untuk menginterpretasikan visi dan misi kepala daerah. Lebih lengkapnya kerangka penjabaran tujuan,sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kota Dumai

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.1 Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk yang sejalan dengan penambahan penduduk dan arus urbansiasi	1.1.1 Kesehatan untuk Semua	1.1.1.1 Penataan Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas	Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan;
			Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;
			Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
			Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya;
			Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;
			Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehata yang ditugaskan di kecamatan perbatasan;
			Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting;
			Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat serta pengendalian terhadap produksi konsumsi dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat;
			Percepatan eliminasi penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis terabaikan.
	1.1.2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	1.1.2.1 Penataan Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas.	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar);
			Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah;
			Penguatan upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan dan pemerataan akses serta perluasan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik;
			Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar yang adaptif berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK;
			Penguatan upaya peningkatan kecakapan literasi numerasi dan manajemen talenta serta prestasi peserta didik;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta pemberian insentif khusus bagi guru dan tenaga kependidikan yang ditugaskan di kecamatan perbatasan.
	1.1.3 Perlindungan Sosial yang Adaptif	1.1.3.1 Penataan Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Penguatan pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan serta perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas secara inklusif;
			Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & highvalue economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi;
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling;
			Peningkatan government induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
			Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;
			Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.
1.2 Terwujudnya Masyarakat yang Tangguh	1.2.1 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan abelMasyarakat Inklusif	1.2.1.1 Penataan Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai sosial kemasyarakatan	Peningkatan Pemajuan Kebudayaan Melayu Sebagai Payung Negeri
			Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
			Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan stimulasi dini
			Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
			Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
			Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
2.1 Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur	2.1.1 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dari Pusat Kota Hingga Ke Kelurahan	2.1.1.1 Penataan Peningkatan sarana penunjang aktivitas ekonomi daerah	Penguatan Regulasi dan Ketahanan Sosial Ekologi serta Pembangunan Kewilayahan yang Terintegrasi;
			City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism,

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			terutama pada kawasan perkotaan;
			Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha;
			Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;
			Dukungan pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Dumai-Rupat-Malaka (di Selat Malaka);
			Dukungan peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan Bandar Udara Pinang Kampai;
			Dukungan Penguatan infrasturktur untuk mendukung kawasan strategis industri Medan-Dumai (yang menjadi bagian klaster industri pengolahan sawit, kelapa, kopi karen dan perkebunan hasil lainnya) yang diarahkan sebagai koridor ekonomi industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat Indonesia;
			Dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkar Dumai dan lingkar Pekanbaru.
			Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
			Dukungan Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Rantauprapat-Kotapinang-Dumai-Pekanbaru.
			Dukungan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf global port, terutama di Pelabuhan Dumai.
			Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada kawasan perkotaan Dumai;
			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan;
2.2 Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	2.2.1 Lingkungan Hidup yang Berkualitas	2.2.1.1 Penataan Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami;
		2.2.1.2 Penataan Pelaksanaan Transfer Anggaran yang Pro Lingkungan	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan;
	2.2.2 Berketahanan air, energi dan kemandirian pangan	2.2.2.1 Penataan Peningkatan upaya dan koordinasi serta sinergitas sektor untuk ketersediaan air, energi dan pangan daerah	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion;
			Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;
			Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan;
	2.2.3 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	2.2.3.1 Penataan Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan early warning system berbasis IT dan pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi serta proteksi kebakaran pada kawasan perumahan dan permukiman;
			Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
			Dukungan Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
			Dukungan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Medan-Dumai
			Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb) yang adaptif.
			Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
			Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, dsb);
3.1 Terwujudnya Perekonomian Kota Dumai yang Maju dan Berdaya Saing	3.1.1 Stabilitas Ekonomi Makro	3.1.1.1 Penataan Optimalisasi peran seluruh stakeholder dalam pembangunan daerah	Pengendalian inflasi daerah;
			Dukungan peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut;
			Dukungan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
			Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah;
			Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
			Peningkatan produktivitas BUMD;
			Dukungan Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon;
		3.1.1.2 Penataan Peningkatan ekosistem riset dan inovasi daerah	Penguatan hilirisasi sektor industri pengolahan dan usaha menengah kecil dan mikro; dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penguatan riset dan inovasi daerah;
			Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, sarana prasarana dan lainnya);
			Penguatan Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;
			Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;
			Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya;
	3.1.2 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	3.1.2.1 Penataan Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan ekonomi	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
			Dukungan Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya mineral, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi);
			Dukungan Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi);

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3.1.3 Produktivitas Ekonomi	3.1.3.1 Penataan Percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri serta pengembangan komoditas berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja;
			Dukungan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai;
			Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan dan daerah pinggiran;
			Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital);
			Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage di kawasan perkotaan;
			Persiapan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4.1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	4.1.1 Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	4.1.1.1 Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah	Penguatan Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
			Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah;
			Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
			Penguatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat dan penguatan aspek pemerintahan digital;
			Penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Dumai yang profesional dan bebas korupsi;
			Penguatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;
			Dukungan Penguatan integritas partai politik;
			Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;
			Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;
			Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota Dumai.
			Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
			Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			Penguatan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasayarakat
			Peningkatan kehidupan kerukunan beragama
			Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
			Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi
			Mendorong peluang inovasi pendanaan daerah
			Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
			Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal;
			Penguatan dana sosial syariah guna mendukung perlindungan sosial nasional dilakukan melalui akselerasi bauran zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF) dan keuangan syariah, dengan penyempurnaan bentuk kelembagaan dan skema bisnis bank wakaf serta penguatan tata kelola dan literasi ZISWAF

(Sumber: Perda No. 8 Tahun 2025 RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029)

4.1.4. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2026

Prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2026 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat disamping dari hasil evaluasi pembangunan, permasalahan daerah dan isu strategis yang diidentifikasi serta keselarasan dengan pembangunan nasional. Adapun tema pembangunan provinsi Riau pada tahun 2026 adalah ***"Perkuatan Fondasi Tranformasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan***". Untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan sub tema dan prioritas pembangunan yang dikelompokan menjadi 4 (empat) sub tema antara lain:

1) Transformasi Sosial : Pendidikan, Sosial, Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial), Agama dan Budaya;
2) Transformasi Ekonomi : Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perkebunan), Peningkatan Nilai Tambah (IKM,UMKM, Hilirisasi, Koperasi) dan Inovasi);
3) Transformasi Tata Kelola : Peningkatan Kapasitas ASN dan Implementasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis IT;
4) Infrastruktur : Peningkatan Infrastruktur (Infrastruktur Dasar, Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategis).

4.1.5. Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan daerah provinsi merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dimana dijabarkan dengan arah kebijakan dibawah ini :

1. Transformasi Sosial :
   a. Pendidikan
      - Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah);
      - Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Pendidikan untuk Masyarakat Miskin (Semua Siswa Miskin Harus bersekolah sampai jenjang tertinggi – Riau Cerdas);
      - Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas;
      - Dukungan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM;
      - Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas;
      - Peningkatan implementasi literasi Masyarakat.
   b. Kesehatan
      - Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;
      - Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
      - Peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan tenaga Kesehatan;
      - Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting;
      - Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
      - Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis;
      - Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan Masyarakat;
      - Peningkatan Pembangunan Keolahragaan;
      - Pemenuhan Hak Dasar Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin;
      - Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan;
      - Peningkatan kualitas perlindungan anak;
      - Peningkatan ketangguhan keluarga;
      - Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;
      - Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan.
   c. Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial)
      - Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Wilayah Kantong Kemiskinan;
      - Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
      - Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM;
      - Pemenuhan Hak Dasar , Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin;

d. Agama dan Budaya
   - Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau dalam lingkungan masyarakat yang agamis;
   - Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan;
   - Dukungan Peningkatan Kenyamanan, Keamanan, Toleransi dan Kesejahteraan Rakyat.

2) Transformasi Ekonomi

a. Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perkebunan)
   - Pengembangan Kawasan Industri;
   - Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi unggulan yang ramah lingkungan - perkebunan (Kelapa, Karet, Sagu, Kopi);
   - Meningkatkan Pendapatan Daerah;
   - Meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi lokal (padi, daging, telur, dan ikan);
   - Meningkatkan keterjangkauan pangan;
   - Pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
   - Pemberdayaan Masyarakat , Pengembangan dan Perluasan Unit usaha Ekonomi Desa, branding Desa sebagai upaya peningkatan Pedapatan dan daya saing daerah.

b. Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi)
   - Fasilitasi dan Dukungan Kemudahan Berinvestasi;
   - Pengembangan pariwisata berbasis Ekowisata, religi, kesehatan dengan pelibatan Masyarakat;
   - Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
   - Pembangunan TPST Regional dan sistem air limbah terpadu;
   - Membangun infrastruktur EBT;
   - Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.

c. Inovasi
   - Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital;
   - Penguatan Kerjasama dalam pembangunan daerah.

3) Transformasi Tata Kelola

a. Peningkatan Kapasitas ASN
   - Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN.

b. Implementasi Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis IT
   - Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Berintegritas.

4) Infrastruktur

a. Peningkatan Infrastruktur (Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Industri
   - Peningkatan infrastruktur untuk konektifitas wilayah;
   - Peningkatan Infrastruktur Dasar;

- Peningkatan Akses Pelayanan dasar Infrastruktur masyarakat miskin;
- Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah;
- Mendorong pembangunan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur ke kawasan strategis Provinsi Riau.

4.1.6. Fokus Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026

Menurut Kementrian PPN/Bappenas (2025), untuk membangun fondasi yang kuat dalam merealisasikan sasaran pembangunan nasional, disusun Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang mampu menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur meliputi :

1. Memberi makanan bergizi sehat disekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Menambah dan memberikan program kartu-kartu kesejahteraan serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran;
6. Menaikkan gaji ASN (TNI/Polri, guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), serta pensiunan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem;
7. Membangun dan melanjutkan infrastruktur desa dan kota, termasuk infrastruktur transportasi, teknologi, dan perumahan murah bersubsidi bagi masyarakat miskin, generasi muda, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Menambah rasio penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Lebih lanjut Kementrian PPN/Bappenas juga menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan besar antara lain :

1) Peningkatan timbulan sampah domestik nasional;
2) Digitalisasi pendidikan di Indonesia;
3) Kesenjangan akses terhadap fasilitas teknologi informasi;
4) Pengembangan koperasi;
5) Pemerataan kualitas pembangunan manusia;
6) Kualitas jalan daerah yang masih rendah;
7) Penuntasan manfaat bendungan terbangun;
8) *Gap* pengelolaan persampahan.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional serta regulasi turunannya, yaitu Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko

Lintas Sektor, menjadi komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional. Penerapan MRPN Lintas Sektor pada RKP Tahun 2026 akan difokuskan pada Program Presiden bersifat strategis yang terpilih di level KP dengan penekanan topik sesuai Tema RKP Tahun 2026 di antaranya MBG, swasembada pangan, energi, dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, koperasi, dan hal strategis lainnya

Pemerintah pusat menetapkan Tema Pembangunan nasional tahun 2026 adalah "*Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*". RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif sebagai berikut :

1. Swasembada Pangan, Energi dan Air
   - Optimalisasi BULOG
   - Pelaksanaan food estate :

     difokuskan :
     - pengembangan Kawasan Sentra Pangan Pertanian (KSPP)/*food estate*
     - peningkatan hasil produktivitas perikanan
     - peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan,
     - keberlanjutan ekosistem perairan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan
   - Peningkatan bauran ethanol, biodiesel dan Energi terbarukan

     difokuskan :
     - meningkatkan kapasitas produksi biofuel, pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi
     - mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih
   - Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir

     difokuskan :
     - pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam rangka meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat
     - program percepatan penyediaan air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan dan pembiayaan, serta masyarakat
2. Ekonomi yang Produktif dan Inklusif
   - Pendidikan dan Kesehatan
     - Ekosistem Makanan Bergizi Gratis : membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif melalui pemenuhan gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/MA/SMK/ sederajat.
     - Percepatan Renovasi Sekolah : mendukung pendidikan siswa.
     - Sekolah Unggulan

- Cek Kesehatan : mendukung deteksi dini, edukasi, pencegahan penyakit, serta mengurangi potensi beban anggaran akibat biaya pengobatan dan perawatan, serta hilangnya produktivitas masyarakat.
- Percepatan Rumah Sakit Daerah : percepatan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses akan dilanjutkan.

➢ Deregulasi dan Kepastian Hukum
- Reformasi Birokrasi
- Kemudahan berbisnis
- Ketertarikan Investasi

➢ Adopasi Teknologi dan Inovasi
- Transformasi Digital
- Riset dan Inovasi

➢ Pertahanan Semesta
- Komponen Cadangan
- Pemenuhan Alutsista
- Penguatan Kemampuan Teritorial

➢ Fiskal Adaptif, Stabilitas Makro Ekonomi

➢ Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
- Percepatan Hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia
- Optimalisasi potensi SWF Danantara

➢ Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- Data tunggal kemiskinan
- Digitalisasi bantuan
- Program 3 juta rumah : yang menyasar segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk masyarakat miskin dan rentan
- Pengembangan 70.000 koperasi merah putih : meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa.

4.1.7. Hasil Evaluasi Pencapaian RKPD Tahun 2024

Evaluasi yang dilakukan terkait kinerja tahun sebelumnya merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Tabel 4.2
Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Dumai Tahun 2024

Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2024	
					Target	Realisasi
Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan Perekonomian Yang Mandiri Dan Masyarakat Yang Sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,36-5,07	5,02
	Sasaran	Meningkatnya Perekonomian Dan Daya Saing Daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	30,25-30,45	30,88
			Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	52,42-53,37	52,67
			PDRB Perkapita ADHK	Rp. Juta	90,83-91,45	92,72
			PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	157,42-160,27	158,15
	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,314-0,340	0,301
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,89-5,27	4,66
			Tingkat Kemiskinan	%	2,93-3,07	3,14
	Sasaran	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	73,66	76,3
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saing Dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,72-75,95	77,03
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,790-0,791	0,797
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,714-0,717	0,714
	Sasaran	Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,769-0,773	0,778
	Sasaran	Meningkatnya penerapan budaya melayu	Persentase objek pemajuan kebudayaan melayu yang mendapatkan perlindungan	%	92,35	89,79
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Tujuan	Mewujudkan Infrastrtuktur Dan Ruang Kota Dumai Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan	Persentase Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Dumai yang Berkualitas	%	60,23	55,03
	Sasaran	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	%	64,72	53,73
	Sasaran	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah Yang Konsisten	Persentase Pemanfaan Ruang Yang	%	50,26	50,26

Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2024	
					Target	Realisasi
			Sesuai Dengan Aturan			
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	61,76	67,56
			Cakupan pelayanan persampahan	%	65,7	61,1
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B
	Sasaran	Meningkatnya Akuntabiltas Pemerintah Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun,	Opini	WTP	WTP
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B	B
			Indeks Manajemen Resiko	Indeks	3	3,306
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,65	89,78
			Indeks Layanan SPBE	Indeks	3	3,9
			Indeks Inovasi Daerah	Skor	35,00-60,00	54,7

(Sumber: LKPJ Walikota Dumai Tahun 2025)

Dari Hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan hampir semua indikator utama terlah tercapai. Adapun indikator yang belum mencapai realisasi 100% adalah Ketersediaan pangan utama, Tingkat pelayanan infrastruktur daerah, Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan, dan Persentase 4 jenis bencana daerah yang ditangani.

4.1.8. Hasil Musrenbang RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kota Dumai sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah. Dari Proses partisipatif yang telah dimulai dari Rembuk RT, Musrenbang tingkat Kelurahan dan Musrenbang RKPD di kecamatan serta pada Musrenbang RKPD tingkat Kota, maka dapat diketahui bahwa jumlah usulan masyarakat yang dihasil pada proses partisipatif ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah usulan Masyarakat serta Perangkat daerah yang menjadi Tujuan usulan pada proses partisipatif

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH USULAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8
2	DINAS PEKERJAAN UMUM	320
3	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	10
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2
5	DINAS PERHUBUNGAN	10
TOTAL		**350**

4.1.9. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2026 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Adapun jumlah pokok-pokok pikiran DPRD Kota Dumai pada Tahun 2026 adalah 301 usulan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 4.4
Jumlah usulan Pokok-Pokok pikiran DPRD dan Perangkat Daerah Tujuan

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH USULAN	PAGU ANGGARAN
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM	277	49.253.815.851
2.	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	5	1.378.142.857
3.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2	320.000.000
4.	DINAS PERHUBUNGAN	17	699.750.000
TOTAL		**301**	**51.651.708.708**

Kemudian jika melihat pelaksanaan amanat pasal 78 dan 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, maka dapat dilihat bahwa hubungan antara pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diinput kedalam SIPD milik Kementerian Dalam Negeri dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026 dan yang disetujui oleh perangkat daerah mendukung pada 4 Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia berlandaskan Budaya Melayu;
2. Penguatan Landasan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan;
3. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4.1.10. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, strategi perbaikan pelayanan dasar di Indonesia sudah sejak lama dilakukan dengan penetapan, penerapan, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 lebih memfokuskan pada 6 urusan pemerintahan wajib penyelenggaraan Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Ada tiga prinsip dalam urusan wajib, yaitu: (1) bentuk pelayanan dasar, yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara agar hidup layak; (2) pelaksanaannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM); (3) merupakan prioritas, yaitu dilaksanakan mendahului sebelum seluruh kebutuhan pembiayaan lainnya. Secara umum, capaian SPM Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Kota Dumai Tahun 2024)

No	Bidang SPM	Nilai	Kategori indeks pencapaian SPM
1.	Bidang Pendidikan	90,86 %	Tuntas Utama
2.	Bidang Kesehatan	90,01%	Tuntas Utama
3.	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	57,94 %	Belum Tuntas
4.	Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;	100.00 %	Tuntas Paripurma
5.	Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;	92,26 %	Tuntas Utama
6.	Bidang sosial.	93,58 %	Tuntas Utama

Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Pemerintah Kota Dumai mempedomani target dan capaian Standar Pelayanan Minimal yang terdapat pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan kemudian disesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Dumai pencapaian SPM tahun pada 2023 yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang termaktub pada pasal 3 tentang urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dengan memperhatikan bersifat mutlak dan mudah distandarkan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Berikut sinkronisasi antara Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan yang ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 dan Permedagri nomor 59 Tahun 2021.

Tabel 4.6.
Sinkronisasi SPM Tahun 2025 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

No	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
1	2	3
1.	Bidang Pendidikan : 1. pendidikan anak usia dini	Pembangunan Sumber Daya Manusia berlandaskan Budaya Melayu

No	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
1	2	3
	2. pendidikan dasar 3. pendidikan kesetaraan	
2.	Bidang Kesehatan ; 1. pelayanan kesehatan ibu hamil 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. pelayanan kesehatan balita 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolusis 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	Pembangunan Sumber Daya Manusia berlandaskan Budaya Melayu
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan
4.	Bidang Perumahan Rakyat: 1. Fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan
5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat: 1. pelayanan informasi rawan bencana 2. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan
6.	Bidang Sosial : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota Dumai	Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

4.1.11. Pelaksanaan *Suistainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim;

(14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Tujuan dan 169 target TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu;

1. Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5
2. Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17
3. Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16

Selanjutnya sesuai dengan Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Suistanable Development Goals* (SDG's) pembahasan pada bab II sebelumnya, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 terkait dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 akan disajikan pada table berikut ini :

Tabel 4.7.
Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah Tahun 2026

No	*Suistanable Development Goals* (SDG's)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
1	**Pilar Pembangunan Sosial :** 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Pembangunan Sumber Daya Manusia berlandaskan Budaya Melayu;
2	**Pilar Pembangunan Ekonomi :** 1. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal,Berkelanjutan dan Modern untuk Semua 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua 3. Membangun Infrastruktur yang Tangguh,Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi 4. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara 5. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
3	**Pilar Lingkungan Hidup :** 1. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua 2. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif,Aman, Tangguh dan Berkelanjutan 3. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan 4. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya 5. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan 6. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan;

No	*Suistanable Development Goals* (SDG's)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
	Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	
4	**Pilar Pembangunan Hukum :** 1. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang fektif,Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan .	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.1.12. Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Dampak jangka pendek Stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme, sedangkan dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolik.

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan stunting, terdapat delapan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi/Integrasi untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat yaitu aksi pertama adalah Analisis situasi, aksi kedua adalah Rencana Kegiatan, aksi ketiga adalah rembuk stunting, aksi keempat adalah peraturan bupati/walikota tentang peran desa, aksi ke lima adalah pembinaan kader pembangunan manusia, aksi keenam adalah sistem manajemen data stunting, aksi ke tujuh adalah pengukuran dan publikasi stunting dan terakhir aksi delapan adalah reviu kinerja tahunan.

Pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi terpadu mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi sensitif mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan Kesehatan, peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar sektor Kesehatan. Sasaran intrvensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat umum. Program/kegiatan intervensi gizi sensistif dapat ditambah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir,

terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan data E-PPGM pertanggal 31 Desember 2024 dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, ditemukan 192 balita dengan stunting (pendek dan sangat pendek). Tersebar di wilayah kerja yang ada di 10 (Sepuluh) Puskesmas Kota Dumai. Diantaranya Puskesmas Bukit Timah berjumlah 9 balita (0.75%), Puskesmas Jaya Mukti berjumlah 10 balita (0.25%), Puskesmas Sungai Sembilan berjumlah 10 balita (0.32%), Puskesmas Medang Kampai berjumlah 13 balita (1.16%), Puskesmas Bukit Kapur berjumlah 14 balita (0.78%), Puskesmas Bukit Kayu Kapur berjumlah 17 balita (0.74%),Puskesmas Dumai Kota berjumlah 19 balita (0.9%),Puskesmas Dumai Barat berjumlah 23 balita (1.71%) dan PuskesmasBumi Ayu berjumlah 28 balita (1.47%). Sedangkan kasus stunting yang terbanyak berada di Puskesmas Purnama Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai berjumlah 49 balita (3.08%) diantaranya 16 balita sangat pendek (1.01%) sangat pendek dan 33 balita pendek (2.07%). Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 target Prevalensi stunting Kota Dumai untuk Tahun 2026sebesar < 10 lebih kecil dari target nasional sebesar < 14.

1.1. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2026

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2026, maka telah ditetapkan tema pembangunan Kota Dumai tahun 2026 adalah :

"PENGUATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN."

Berdasarkan tema diatas, maka Pemerintah Kota Dumai menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Prioritas, Tujuan, Sasaran, Outcome, Program dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2026

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	1.1 Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk yang sejalan dengan penambahan penduduk dan arus urbansiasi			Indeks Pembangunan Manusia		78,35	
				Tingkat Kemiskinan		2,41 - 2,63	
				Rasio Gini (Indeks)		0,317-0,335	
		1.1.1 Kesehatan untuk Semua		Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)		73,81	
				Jumlah Kelahiran Hidup		10305,28	
				Jumlah Kematian Balita Absolut		136,00	
				Jumlah Kematian Ibu Absolut		8,00	
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		16,50	
				Penanganan Tuberkulosis:			
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%);		83,00	
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis *(treatment success rate)* (%)		97,48	
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)		100,00	
				Cakupan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap		85,00	
				Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100,00	
				Total Fertility Rate (TFR)		2,27	
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun *(Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)		7,80	

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / *Modern Contraceptive* (mCPR)		71,20	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Dinas Kesehatan	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0.6	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		23.4	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)		84	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
				Cakupan penemuan kasus TB (%)		83	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)		100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)		100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)		58.33	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)		93	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		50	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)		12	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		76	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit kapur	Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83	1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Bukit Kapur
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)		100	1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Bukit Kapur
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)		76	1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Bukit Kapur
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83	1.02.0.00.0.00.01.0022 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)		100	1.02.0.00.0.00.01.0022 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)		76	1.02.0.00.0.00.01.0022 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bukit Timah	Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83	1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Bukit Timah
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)		100	1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Bukit Timah
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)		76	1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Bukit Timah
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Bumi Ayu	Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83	1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Bumi Ayu
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)		100	1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Bumi Ayu
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)		76	1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Bumi Ayu
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan	Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	83	1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Dumai Barat
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)		100	1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Dumai Barat

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			terjangkau pada Puskesmas Dumai Barat	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	76	1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Dumai Barat
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Dumai Kota	Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83	1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Dumai Kota
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)		100	1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Dumai Kota
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)		76	1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Dumai Kota
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Jaya Mukti	Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83	1.02.0.00.0.00.01.0021 - Puskesmas Jaya Mukti
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)		100	1.02.0.00.0.00.01.0021 - Puskesmas Jaya Mukti
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)		76	1.02.0.00.0.00.01.0021 - Puskesmas Jaya Mukti
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Medang Kampai	Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83	1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Medang kampai
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)		100	1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Medang kampai
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)		76	1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Medang kampai
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Purnama	Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83	1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Purnama
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)		100	1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Purnama
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)		76	1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Purnama

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Puskesmas Sungai Sembilan	Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83	1.02.0.00.0.00.01.0024 - Puskesmas Sungai Sembilan
				Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)		100	1.02.0.00.0.00.01.0024 - Puskesmas Sungai Sembilan
				Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)		76	1.02.0.00.0.00.01.0024 - Puskesmas Sungai Sembilan
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada RSUD	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	85	1.02.0.00.0.00.01.0013 - RSUD
			Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan pada Dinas Kesehatan	Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	70	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
				Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)		100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
				Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)		4.85	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan pada RSUD	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100	1.02.0.00.0.00.01.0013 - RSUD
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman pada Dinas Kesehatan	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	60	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.pada Dinas Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	71.5	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Kapur	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	71.5	1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Bukit Kapur
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	71.5	1.02.0.00.0.00.01.0022 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bukit Timah	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	71.5	1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Bukit Timah
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Bumi Ayu	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	71.5	1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Bumi Ayu
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Dumai Barat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	71.5	1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Dumai Barat
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Dumai Kota	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	71.5	1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Dumai Kota

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Jaya Mukti	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	71.5	1.02.0.00.0.00.01.0021 - Puskesmas Jaya Mukti
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Medang Kampai	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	71.5	1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Medang kampai
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Purnama	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	71.5	1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Purnama
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada Puskesmas Sungai Sembilan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	71.5	1.02.0.00.0.00.01.0024 - Puskesmas Sungai Sembilan
		1.1.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Skor Kemampuan Literasi jenjang pendidikan di Kota Dumai:			
				a. SD		a. 68,27	
				b. SMP		b. 76,85	
				Skor Kemampuan Numerasi jenjang pendidikan di Kota Dumai:			
				a. SD		a. 59,04	
				b. SMP		b. 67,39	
				Rata-rata lama sekolah		10,33	
				Harapan Lama Sekolah (tahun)		13,43	
				Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		19,20-20,25	

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	47.22	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun (%)		62.64	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)		59	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)		81.81	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 (%)		99.79	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Iklim Inklusivitas SD (Nilai)		63.91	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Iklim Keamanan SD (Nilai)		78.2	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)		76.33	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 (%)		97.94	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)		65.41	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Iklim Keamanan SMP (Nilai)		76.07	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)		75.54	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Meningkatnya kualitas kurikulum Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengimplementasikan	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	100	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Kurikulum Muatan Lokal (%)			
			Meratanya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Pemerataan Guru SD (Indeks)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0.7	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Indeks Pemerataan Guru SMP (Indeks)		1	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Terselenggaranya Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) (Event)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	65	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
		1.1.3 Perlindungan Sosial yang Adaptif		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai (%)		73,15	
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)		2,25-2,75	
				Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)		58,44	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Persentase Penerima Manfaat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	20	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
	1.2 Terwujudnya Masyarakat yang Tangguh			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,385-0,39	
		1.2.1 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		67,50	
				Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan		33,33	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	30	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	60	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	90	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	53	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Terjaminnya Pemenuhan Hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	67	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	80	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	7.8-7.8	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)		2.27	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	71.2	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)		6.8	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	46	2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	90	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang berprestasi (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	90	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	75	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Event)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Meningkatnya perkembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan (%)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	40.74	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Terlestarikannya Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	33.33	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG	2.1 Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur			Indeks Infrastruktur Daerah (IID)		67,17	
		2.1.1 Pemerataan Pembangunan		Tingkat kemantapan jalan (%)		58,15	

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
BERWAWASAN LINGKUNGAN		Infrastruktur Wilayah dari Pusat Kota Hingga Ke Kelurahan		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak (%)		77,59	
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		86,43	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	87.85	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	58.15	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman pada wilayah Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Kota	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)		58.15	1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman pada wilayah Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Dumai Selatan	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)		58.15	1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman pada wilayah Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Dumai Barat	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)		58.15	1.03.0.00.0.00.01.0002 - UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kota Dumai (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	34	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana atau terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	74.54	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Meningkatnya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	15.57	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0.60	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan PSU dengan Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.2 Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		58,58	
		2.2.1 Lingkungan Hidup yang Berkualitas		Penurunan Intensitasi Emisi GRK		11,02	
				Pengelolaan Sampah:			
				a. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		76,66	
				b. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*		76,66	
			Meningkatnya layanan persampahan di daerah Kota Dumai	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	76.66	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak (%)		77.59	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	20	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	20	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	60	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	35.55	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)		71.14	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	66	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	74	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	85	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	49.1	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.2.2 Berketahanan air, energi dan kemandirian pangan		Kemandirian Pangan:			
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)* (%)		10,92	
				Ketahanan Air:			
				Kapasitas Air Baku (m3/detik)		0,85	
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Layak Perpipaan (%)		21,38	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	21.38	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
				Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)		3.46	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton) (Ton)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	16023	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton) (Ton)		8006	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Skor Pola Pangan Harapan (Skor) (Skor)		89.67	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	3.03	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.2.3 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Risiko Bencana (IRB)		92,31	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	23	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	48	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	53	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	12.70	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)		100	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)		100	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100	1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)		100	1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	3.1 Terwujudnya Perekonomian Kota Dumai yang Maju dan Berdaya Saing			Pertumbuhan Ekonomi (%)		5,06-6,14	
				Indeks Daya Saing Daerah		3,79	
		3.1.1 Stabilitas Ekonomi Makro		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		60,44 - 60,65	
				PDRB per Kapita		159,46-172,6	
				Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi Riau (%)		4,85-4,8575	
				Tingkat Inflasi (%)		2,8-3,0	
				Indeks Kapabilitas Inovasi		2,38	
				Indeks Inovasi Daerah		57,70	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	33.33	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil Menengah (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	12	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri Kecil Menengah yang Diterbitkan (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	8	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	10	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	36	5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	0	5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)		0	5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		3.1.2 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		41,08-41,86	
				Rasio Ekspor Non Migas Terhadap Total Ekspor Perdagangan Luar Negeri		94,25	

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	10	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	40	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Nilai Ekspor Non Migas (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.6	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
		3.1.3 Produktivitas Ekonomi		Pengembangan Pariwisata:			
				a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*		0,85 - 0,86	
				b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara		6615-6958	
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		2,8-3,00	

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Kota Dumai (%)		94.27–94.34	
				Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi Kota Dumai (%)		99,00	
				Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		4.64–4.71	
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)		0,55-0,615	
				Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik: Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		3,74 - 4,46	
				Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal		95,16 – 95,65	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		47,74	
				Koefisien Variasi Harga Antarwilayah		11,08	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	90	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	10	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	10	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	79	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut dan sungai	Konektivitas Laut dan Sungai (%)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	20	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
			Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	20	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	45	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	69	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	41	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	21	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	30	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	10	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik NasionalÂ (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	3	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1290	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	350.36	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
			Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kota Dumai	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	47	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	80	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	80	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	80	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3392	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Ton)		154021	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	30	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian (%)		14.08	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	18.52	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)		100	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	50	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)		0	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
			Meningkatnya tertib niaga	Persentase Pelaku Usaha yang melakukan Tera/Tera Ulang (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	80	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	35	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4.1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas			Indeks Integritas		75-77	
		4.1.1 Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif		Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)		2,16	
				Indeks Reformasi Hukum		81,25-86,25	
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)		1,03-1,14	
				Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		5,16	
				Indeks Kualitas Kebijakan		67,80	
				Indeks Kepuasan Masyarakat		90,78	
				Indeks Zakat Nasional		0,60	
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)		100	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)		100	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	40	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)		70	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
			Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahnya (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang Aktif (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100	1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey) (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	97	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	55	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	10	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.7	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kualitas Kerja Sama Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	KESEJAHTERAAN RAKYAT	100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		86.80	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)		85	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)		100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Sumber Daya Alam	Efektivitas Kebijakan Sumber Daya Alam (%)		100	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)		2	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)		100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)		100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)		100	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)		100	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	22.72	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)		38.80	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)		100	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)		12.96	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)		66.55	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	19.58	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	34	5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	60.4	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)		96.75	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)		2	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)		8	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (%)		12.2	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Terlaksananya Penunjang Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah	Persentase Penunjang Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah (%)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan tahun n-1 (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	87.5	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			ataupun proses dan kewenangan				
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi sebagai implementasi dari kebijakan teknis yang disusun (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Dumai Barat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Barat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUMAI BARAT
			Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Bukit Kapur (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BUKIT KAPUR
			Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Kota (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DUMAI KOTA
			Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Selatan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUMAI SELATAN
			Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Timur (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN DUMAI TIMUR

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			kewilayahan Kecamatan Dumai Timur				
			Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Medang Kampai	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Medang Kampai (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN MEDANG KAMPAI
			Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BUKIT KAPUR
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Barat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUMAI BARAT
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DUMAI KOTA
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUMAI SELATAN

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN DUMAI TIMUR
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Medang Kampai	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Medang Kampai (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN MEDANG KAMPAI
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
			Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Bukit Kapur	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Bukit Kapur (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BUKIT KAPUR
			Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Barat	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUMAI BARAT
			Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Kota	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DUMAI KOTA
			Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Selatan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Selatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUMAI SELATAN

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Timur	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Timur (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN DUMAI TIMUR
			Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Medang Kampai	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Medang Kampai (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN MEDANG KAMPAI
			Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Sungai Sembilan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Bukit Kapur	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Bukit Kapur (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BUKIT KAPUR
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Barat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUMAI BARAT
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Kota	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DUMAI KOTA

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Selatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Selatan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUMAI SELATAN
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Timur	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Timur (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN DUMAI TIMUR
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Medang Kampai	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Medang Kampai (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN MEDANG KAMPAI
			Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Sungai Sembilan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PRIORITAS DAERAH KOTA DUMAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	90	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	90	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	90	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Untuk melihat kesinambungan pembangunan daerah, tabel berikut menyajikan perbandingan Prioritas pembangunan daerah tahun 2024, 2025 dan isu strategis pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Perbandingan Prioritas Tahun 2025 dan 2026 dan Sinkronisasi dengan Isu Strategis Pembangunan

Tahun 2025	Tahun 2026	ISU STRATEGIS
1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia berlandaskan Budaya Melayu	1. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Menghadapi Era Globalisasi (isu strategis ke 1)
2. Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu	2. Penguatan Landasan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan	1. Optimalisasi Penataan Ruang Kota yang Terintegrasi, Harmonis, dan Berkelanjutan (Isu strategis ke 5) 2. Mitigasi Risiko Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Kota Tangguh (Isu Strategis ke -6)
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	3. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat (Isu strategis ke 2) 2. Penguatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Energi Berkelanjutan sebagai Fondasi Pembangunan (Isu strategis ke 4)
4. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi Pelayanan Publik (Isu strategis ke 3)

Dalam rangka mendukung *(promote)* pelaksanaan *tagline* Pembangunan daerah **Dumai Kota Idaman**, maka Pemerintah Kota Dumai merumuskan beberapa program aksi dalam bentuk program Khidmat Pembangunan Daerah yang merupakan bagian dari operasionalisasi Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun program Khidmat pembangunan daerah tersebut terdiri dari :

1. Khidmat Bidang Persampahan dan Pariwisata. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dan Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan. Adapun sasaran dari khidmat

bidang persampahan dan pariwisata adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah.

2. Khidmat Bidang Infrastruktur yang terdiri dari Penanganan Banjir/Drainase/Rutin Jalan dan penerangan jalan. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi. Adapun sasaran dari Khidmat Bidang Penanganan Banjir/Drainase/Rutin Jalan adalah Meningkatnya infrastruktur kota.
3. Khidmat Bidang Tertib Administrasi. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun sasaran dari khidmat Bidang Tertib Administrasi adalah Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
4. Khidmat Bidang Sosial dan Kesra. Khidmat ini merupakan bagian dari operasionalisasi prioritas pembangunan Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan dan Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu. Adapun sasaran dari Khidmat Bidang Sosial dan Kesra adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota dumai dan Meningkatnya penerapan budaya melayu.
5. Khidmat Bidang Pembangunan Manusia. Adapun sasaran dari khidmat Bidang Pembangunan Manusia adalah Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Kota Dumai.

Tabel berikut menyajikan hubungan antara Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026, Indikator dan Target Indikator Kinerja Daerah Kota Dumai tahun 2026 :

Tabel 4.10
Prioritas Pembangunan Daerah, Indikator dan Target Indikator Kinerja Daerah Kota Dumai Tahun 2026

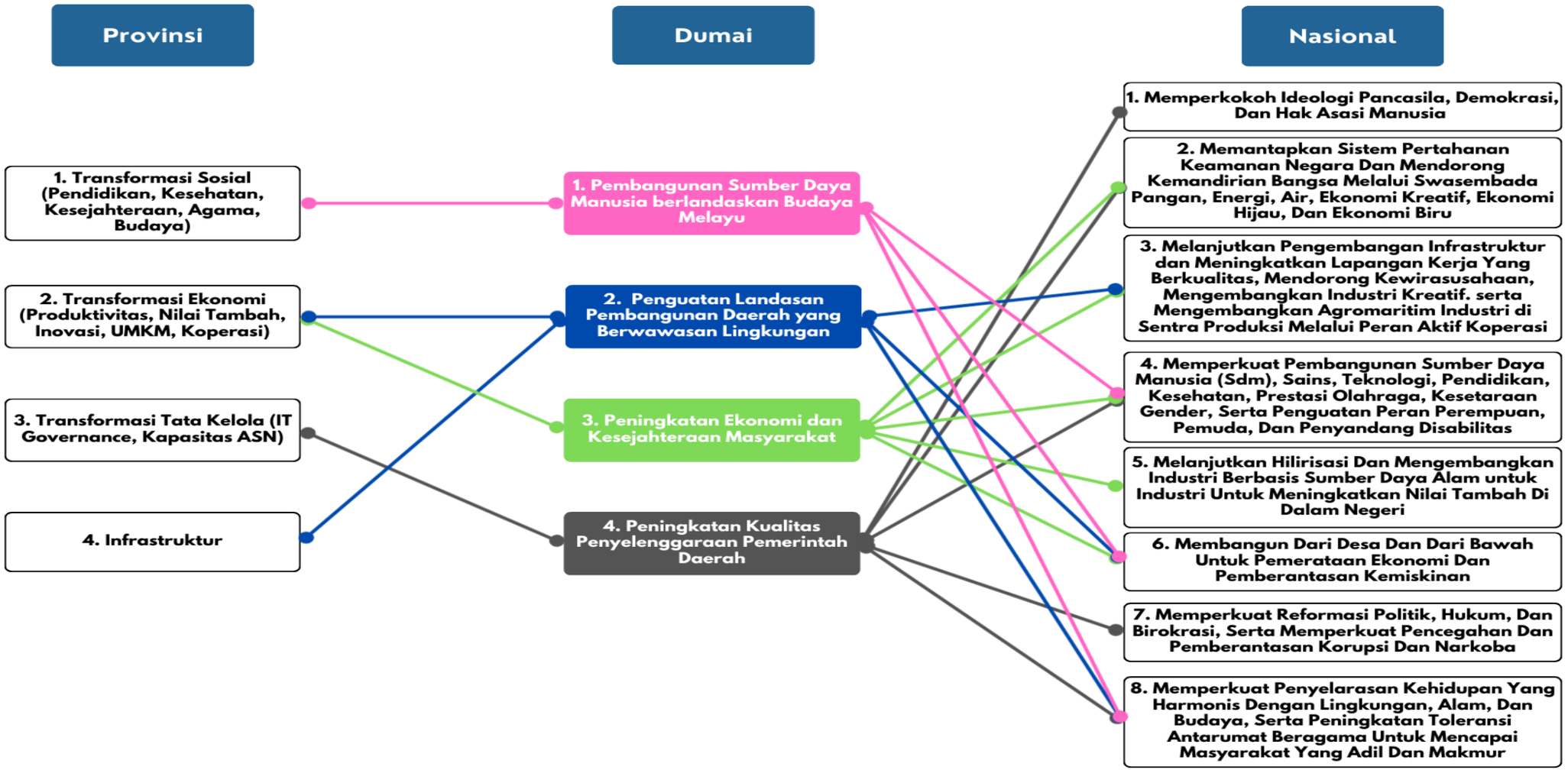
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET 2026
Pembangunan Sumber Daya Manusia Berlandaskan Budaya Melayu	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	78,35
	Tingkat Kemiskinan (%)	2.41-2.63
	Rasio Gini (Indeks)	0.317-0.335
	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	73,81
	Kesehatan Ibu dan Anak: - Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	91.20
	a. Jumlah Kelahiran Hidup (Jiwa)	8892-8955
	b. Jumlah Kematian Ibu Absolut (Jiwa)	7-8
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16.5
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	83
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	97.48
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	100
	Skor Kemampuan Literasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SD (Skor)	68.27

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET 2026
	Skor Kemampuan Literasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SMP (Skor)	76.85
	Skor Kemampuan Numerasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SD (Skor)	59.04
	Skor Kemampuan Numerasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SMP (Skor)	67.39
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10.33
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.43
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))	19.20-20,25
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai (%) (%)	73,15
	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	2,25 – 2,75
	Indeks Kesejahteraan Sosial	0,62
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0.385-0.39
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Indeks)	67.5-67.5
	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan (%)	33.33
Penguatan Landasan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah (Angka)	67.17
	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	58.15
	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak (%)	77.59
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	86.43
	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	3126,75-3316,75
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	58.58
	Penurunan intensitas emisi GRK ((%))	59.34
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	76.66
	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	76.66
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	10.92
	Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	0.85
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	21.38
	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	92.31
Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.06-6.14
	Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3.79
	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	60.44 – 60,65
	PDRB per kapita (Rp Juta) (Rp. Juta Per Tahun)	159.46-172.6
	Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi Riau (%) (%)	4.85-4.8575
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks)	26.81
	Tingkat Inflasi (%) (%)	2.8-3
	Indeks Kapabilitas Inovasi (Indeks)	2.38
	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	57.7
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	9.70
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41.08 – 41,86
	Rasio Ekspor Non Migas terhadap total Ekspor Perdagangan Luar Negeri (%)	94.25
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	6615 - 6.958

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET 2026
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) (%)	0.8-0.87
	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) (%)	2.8-3.00
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	94.27
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi Kota Dumai (%)	99
	Rasio Kewirausahaan Daerah (%) (%)	4.64-4.71
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) (%)	0.55-0.615
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (%)	3.74-4.88
	Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal (%)	95.16-95.65
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	47.74
	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah (Koefisien)	11.08
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Integritas (Indeks)	75-77
	Indeks SPBE (Indeks)	-
	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Indeks)	2.16
	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	81.25
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))	1.03
	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	5.16
	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)	67.8
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90.78

Untuk melihat kesinambungan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Riau terhadap Kota Dumai pada tahun 2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang menggambarkan sinkronisasi prioritas pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Gambar 4.1
Sinkronisasi Fokus Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Riau Tahun 2026 ke dalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2026



Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2026 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Sinkronisasi Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2026 dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2026

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
1	**Transformasi Sosial**	Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Sehat dan produktif	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,58	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan dan Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional	**PRIORITAS DAERAH 1: PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU**	Kesehatan untuk Semua	Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,81	Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan;	Penataan Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas
						Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Peningkatan sarana prasarana RS sesuai standar layanan			Jumlah Kelahiran Hidup	10.305	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;	
							Dukungan Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan			Jumlah Kematian Balita Absolut	136	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;	
						Peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan tenaga kesehatan	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standart			Jumlah Kematian Ibu Absolut	8	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
						Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting	Peningkatan promosi kesehatan dan perubahan perilaku pola pengasuhan			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;	
						Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	Peningkatan akses pangan bergizi			Penanganan Tuberkulosis:		Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehata yang ditugaskan di kecamatan perbatasan;	
							Pembudayaan perilaku hidup sehat dari usia dini dalam lingkungan keluarga dan dunia pendidikan			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%);	83	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting;	
						Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis	Mitigasi sumber dan resiko penyakit menular dan penyakit tropis			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	97,48	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat serta pengendalian terhadap produksi konsumsi dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
						Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat	Pengendalian potensi wabah dan KLB			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100	Percepatan eliminasi penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis terabaikan.	
						Peningkatan Pembangunan Keolahragaan	Peningkatan daya saing Keolahragaan			Cakupan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	85		
						Pemenuhan Hak Dasar Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin	Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Semua Masyarakat Miskin Terjaga Gizinya, Terlindungi dari Penyakit dan Mendapat Layanan Kesehatan-Riau Sehat) dan Penyandang Disabilitas			Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
										Total Fertility Rate (TFR)	2,27		
										Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR* 15-19)	7,8		

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
										Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive (mCPR)*	71,2		
			Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas keluarga, dan masyarakat inklusif	Indeks Ketimpangan Gender (indeks)		Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan	(a) peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan (b) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan (c) peningkatan pasrtisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan (d) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan serta (e) penguasan tata kelola dan pelembagaan pengarustamaan gender dalam proses pembangunan	**PRIORITAS DAERAH 1: PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU**	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,5	Peningkatan Pemajuan Kebudayaan Melayu Sebagai Payung Negeri	Penataan Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai sosial kemasyarakatan
				Indeks Kualitas Keluarga (indeks)		Peningkatan kualitas perlindungan anak	(a) Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak, serta (b) perlindungan anak dari tindak kekerasan, ekspolitasi, penelantaran, perkawinan anak dan perlakuan salah lainnya.			Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	33,33	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
						Peningkatan ketangguhan keluarga	(a) Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karaakter dan pengembangan psikosial anak, (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga serta (c) pemenuhan hak sipil dan hukum serta afirmasi bagi keluarga rentan					Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan stimulasi dini	
						Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia	(a) penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta					Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	
							(b) penguatan prinsip dan pendekatan kesetaraan, partisipasi dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan					Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
						Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan	Penguatan Jiwa Usaha / Entrepreneur dan Wirausaha					Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	
		Agama dan Budaya	Menguatnya nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Riau dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau	Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks)		Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau dalam lingkungan masyarakat yang agamis`	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau						
							Peningkatan pelestarian budaya Melayu Riau						
							Peningkatan Pengamalan Nilai Nilai Agama dan Budaya Melayu						
			Meningkatnya Kerukunan Sosial Antar masyarakat dan Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif, Aman, Nyaman	Indeks kerukunan umat beragama (indeks)		1. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan 2.Dukungan Peningkatan Kenyamanan, Keamanan, Toleransi dan Kesejahteraan Rakyat	1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Penggiat Dakwah 2. Memperkuat Kerjasama Toleransi 3. Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga keagamaan dalam menunjang pembangunan daerah 4. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan, rumah ibadah , lembaga pendidikan agama						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
							Pembinaan Kepemudaan dan Keluarga Sejahtera dalam pengurangan penyakit masyarakat (narkoba, LGBT, perzinahan, hidup hedons, game online, pinjaman online dan penyakit masyarakat lainnya)						
							Pencegahan Konflik						
							Penguatan SDM Perlindungan Masyarakat atau LIMAS						
							Optimalisasi Penegakan Perda						
		Pendidikan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,06 -10,06	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah)	Pendidikan gratis melalui pembiayaan operasional sekolah	**PRIORITAS DAERAH 1: PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU**	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Skor Kemampuan Literasi jenjang pendidikan di Kota Dumai:		Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar);	Penataan Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas
							Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas.			a. SD	a. 68,27	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
							Peningkatan Akses Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Marginal			b. SMP	b. 76,85	Penguatan upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan dan pemerataan akses serta perluasan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik;	
							Dukungan penguatan kualitas layanan PAUD dan pendidikan dasar			Skor Kemampuan Numerasi jenjang pendidikan di Kota Dumai:		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar yang adaptif berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK;	
							Dukungan Peningkatan Program Pertukaran Pelajar, Magang Kerja dan Kerjasama Pendidikan Lintas Negara			a. SD	a. 59,04	Penguatan upaya peningkatan kecakapan literasi numerasi dan manajemen talenta serta prestasi peserta didik;	
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,63 - 13,64	Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Pendidikan untuk Masyarakat Miskin (Semua Siswa Miskin Harus bersekolah	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah (ATS) , Bantuan Siswa Miskin/BSM dan Siswa Daerah Terpecil (KAT)			b. SMP	b. 67,39	Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta pemberian insentif khusus bagi guru dan tenaga kependidikan yang ditugaskan di kecamatan perbatasan.	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
						sampai jenjang tertinggi – Riau Cerdas)							
						Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik yang merata dan berkeadilan			Rata-rata lama sekolah	10,33		
						Dukungan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM	Beasiswa Pendidikan Sarjana S1, S2, S3 bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu berbasis science, technology, engineering, arts, mathematics (STEAM)			Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,43		
							Dukungan Peningkatan Program Pertukaran Mahasiswa, Magang Kerja dan Kerjasama Pendidikan Lintas Negara			Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	19,20-20,25		
							Dukungan Peningkatan kualitas layanan pendidikan pesantren serta pendidikan keagamaan						
						Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan	Dukungan Peningkatan kualitas layanan pendidikan pesantren serta pendidikan keagamaan						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
						Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas							
							Pembangunan Islamic Center dan Institut Quran Riau						
						Peningkatan implementasi literasi masyarakat	Peningkatan kapasitas perpustakaan						
		Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial)	Berkurangnya Kesenjangan Antar Masyarakat dan Antar Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Desa (persen)		Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Wilayah Kantong Kemiskinan	Peningkatan Pembangunan Desa dan Kawasan pedessan yang inklusif untuk membangun kawasan pedesaan baru						
				Presentase Penduduk Miskin Kota (persen)									
			Meningkatkan Pemberdayaan, Produktivitas, dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengeluaran Perkapita Masyarakat Miskin/Garis Kemiskinan (ribu rupiah)		Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja						

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
				Tingkat Penganggu ran Terbuka (persen)			- Sertifikasi dan Skill Tenaga Kerja Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja - Peningkatan Kualitas BLK						
							Peningkatan Akses dan Peluang Kerja						
						Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Penguatan Jiwa Usaha / Entrepreneur ,Wirausaha, Pelatihan UMKM dan Peningkatan Peluang Usaha di Masyarakat						
							Penguatan Kelembagaan dan Akses Permodalan UMKM						
							Peningkatan Keahlian SDM dan Kualitas Produk						
			Meningkatn ya perlindunga n Sosial yang Adaptif dan Inklusif	Persentase Penduduk Miskin yang memiliki setidaknya satu Jaminan Sosial dan bantuan Sosial (persen)		Pemenuhan Hak Dasar , Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin	Perlindungan Sosial yang integratif, adatif dan inklusif	**PRIORITAS DAERAH 1: PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKA N BUDAYA MELAYU**	Perlindung an Sosial yang Adaptif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaa n Kota Dumai (%)	73,15	Penguatan pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan serta perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas secara inklusif;	Penataan Peningkatan kesejahteraa n masyarakat
							Peningkatan layanan kepemilikan dokumen kependudukan dan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin, rentan dan marginal			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	2,25-2,75	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & highvalue economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
							Dukungan asesmen pembaruan, pengelolaan dan pemanfaatan data terpadu sosial ekonomi untuk pensasaran dalam perencanaan pembangunan			Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	58,44	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling;	
												Peningkatan government induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;	
												Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;	
												Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
2	**Transformasi Ekonomi**	Peningkatan Produktifitas Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah		Pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah	Pengembangan Kawasan Industri	**PRIORITAS DAERAH 3: PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**	Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	60,44 - 60,65	Pengendalian inflasi daerah;	Penataan Optimalisasi peran seluruh stakeholder dalam pembangunan daerah
		Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hirilisasi, Koperasi)					Meningkatkan Produksi dan Produktivitaskomoditi unggulan yang ramah lingkungan - Perkebunan (kelapa, karet, sagu, kopi)			PDRB per Kapita	159,46 -172,6	Dukungan peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut;	
							Meningkatkan Pendapatan Daerah			Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi Riau (%)	4,85-4,8575	Dukungan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	
										Tingkat Inflasi (%)	2,8-3,0	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah;	Penataan Peningkatan ekosistem riset dan inovasi daerah
										Indeks Kapabilitas Inovasi	2,38	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing;	
										Indeks Inovasi Daerah	57,7	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	
												Peningkatan produktivitas BUMD	
												Dukungan Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon;	
												Penguatan hilirisasi sektor industri pengolahan dan usaha menengah kecil dan mikro; dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penguatan riset dan inovasi daerah;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, sarana prasarana dan lainnya);	
												Penguatan Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;	
												Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;	
												Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												kerja sama internasional lainnya;	
												Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;	
												Dukungan Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya mineral, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi);	
												Dukungan Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan,	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi);	
												Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												Dukungan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai;	
												Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan dan daerah pinggiran;	
												Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital);	
												Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage di kawasan perkotaan;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
												Persiapan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga.	
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan kesejahteraan Petani	1. Indeks Ketahanan Pangan (indeks) 2. Nilai Tukar Petani (NTP)		Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan akses pangan untuk masyarakat miskin	Meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi lokal (padi, daging, telur, dan ikan)	**PRIORITAS DAERAH 2: PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**	Berketahanan air, energi dan kemandirian pangan	Kemandirian Pangan: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	10,92	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami;	Penataan Peningkatan upaya dan koordinasi serta sinergitas sektor untuk ketersediaan air, energi dan pangan daerah
							Meningkatkan keterjangkauan pangan			Ketahanan Air		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan;	
							Pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)			Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,85	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												konektivitas intraregion;	
							Pemberdayaan Masyarakat , Pengembangan dan Perluasan Unit usaha Ekonomi Desa, branding Desa sebagai upaya peningkatan Pedapatan dan daya saing daerah			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Layak Perpipaan (%)	21,38	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan;	
												Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan;	
												Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan early warning system berbasis IT dan pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan;	
												Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi serta proteksi kebakaran pada kawasan perumahan dan permukiman;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	
												Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	
												Dukungan Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	
												Dukungan Pembangunan infrastruktur jaringan	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												transmisi migas, terutama yang menghubungkan Medan-Dumai	
												Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb) yang adaptif.	
												Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	
												Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, dsb);	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
			Peningkatan daya saing investasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (triliun rupiah)		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses permodalan di tingkat pusat dan daerah	Fasilitasi dan Dukungan Kemudahan Berinvestasi	**PRIORITAS DAERAH 3: PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41,08-41,86	Pengendalian inflasi daerah;	Penataan Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan ekonomi
										Rasio Ekspor Non Migas Terhadap Total Ekspor Perdagangan Luar Negeri	94,25	Dukungan peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut;	
												Dukungan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	
												Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah;	
												Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing;	
												Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	
												Peningkatan produktivitas BUMD	
												Dukungan Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon;	
												Penguatan hilirisasi sektor industri pengolahan dan usaha menengah kecil dan mikro; dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penguatan riset dan inovasi daerah;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, sarana prasarana dan lainnya);	
												Penguatan Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;	
												Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;	
												Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												kerja sama internasional lainnya;	
												Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;	
												Dukungan Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya mineral, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi);	
												Dukungan Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan,	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi);	
												Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja;	
												Dukungan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai;	
												Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan dan daerah pinggiran;	
												Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital);	
												Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage di kawasan perkotaan;	
												Persiapan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
												saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga.	
			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks) Persentase Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	**PRIORITAS DAERAH 2: PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**	Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Pengelolaan Sampah:		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami;	Penataan Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
						Peningkatan Pengelolaan Limbah dan Persampahan yang Berkelanjutan	Pembangunan TPST Regional dan sistem air limbah terpadu			a. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	76,66	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan;	Penataan Pelaksanaan Transfer Anggaran yang Pro Lingkungan
						Mendorong Ketahanan dan Transisi Energi	Membangun infrastruktur EBT			b. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	76,66	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan;	
												Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;	
												Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												perkotaan pada kawasan perkotaan;	
												Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan early warning system berbasis IT dan pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan;	
												Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi serta proteksi kebakaran pada kawasan perumahan dan permukiman;	
												Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	
												Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	
												Dukungan Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	
												Dukungan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Medan-Dumai	
												Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
												rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb) yang adaptif.	
												Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	
												Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, dsb);	
			Mengurangi Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah (indeks)		Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	**PRIORITAS DAERAH 2: PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	92,31	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami;	Penataan Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan;	
												Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan;	
												Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;	
												Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												perkotaan pada kawasan perkotaan;	
												Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan early warning system berbasis IT dan pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan;	
												Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi serta proteksi kebakaran pada kawasan perumahan dan permukiman;	
												Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	
												Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	
												Dukungan Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	
												Dukungan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Medan-Dumai	
												Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
												rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb) yang adaptif.	
												Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	
												Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, dsb);	
			Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara (rupiah)		Penataan amenitas, peningkatan SDM Pariwisata dan manajemen pengelolaan destinasi wisata	Pengembangan pariwisata berbasis Ekowisata, religi, kesehatan dengan pelibatan masyarakat	**PRIORITAS DAERAH 3: PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**	Produktivitas Ekonomi	Pengembangan Pariwisata:		Pengendalian inflasi daerah;	Penataan Percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri serta pengembang

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
													an komoditas berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan
		Inovasi	Meningkatnya hasil Riset dan Inovasi untuk pembangunan Daerah	Indeks Kapabilitas Inovasi (indeks)		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital	Perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan berbasis Riset dan Inovasi			a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,85 - 0,86	Dukungan peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut;	
							Kemitraan Riset dan Inovasi			b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	6615-6958	Dukungan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	
							Penguatan Kapasitas Kelembagaan Riset dan Inovasi			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	2,8-3,00	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah;	
										Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Kota Dumai (%)	94.27–94.34	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing;	
										Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi Kota Dumai (%)	99,00	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
										Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4.64–4.71	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	
										Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,55-0,615	Peningkatan produktivitas BUMD	
										Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik: Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,74 - 4,46	Dukungan Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon;	
										Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal	95,16 – 95,65	Penguatan hilirisasi sektor industri pengolahan dan usaha menengah kecil dan mikro; dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penguatan	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												riset dan inovasi daerah;	
										Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	47,74	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, sarana prasarana dan lainnya);	
										Koefisien Variasi Harga Antarwilayah	11,08	Penguatan Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;	
												Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya;	
												Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;	
												Dukungan Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya mineral, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi);	
												Dukungan Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi);	
												Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												Dukungan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai;	
												Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan dan daerah pinggiran;	
												Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital);	
												Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage di kawasan perkotaan;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
												Persiapan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga.	
			Meningkatnya Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan yang sudah dilaksanakan		Penguatan Kerjasama dalam pembangunan daerah	Mendorong kerjasama secara lebih intens dalam percepatan pembangunan daerah						
	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan Kapasitas ASN	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (indeks) Nilai survey Indeks Berakhlak (poin) Nilai survey penilaian integritas (poin)		Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN	Peningkatan Kapasitas ASN (Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja, dan Kedisiplinan Pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya)	**PRIORITAS DAERAH 4 : PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks SPBE	-	Penguatan Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Penataan Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		Implementasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis IT					Peningkatan Implementasi Merit Sistem			Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	2,16	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah;	
							Peningkatan Budaya Kerja dan Pelayanan Prima			Indeks Reformasi Hukum	81,25-86,25	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;	
							Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada unit kerja			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,03-1,14	Penguatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat dan penguatan aspek pemerintahan digital;	
							Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	5,16	Penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												Kota Dumai yang profesional dan bebas korupsi;	
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN (indeks) Nilai survey Indeks Berakhlak (poin) Nilai survey penilaian integritas (poin)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Peningkatan penataan dan reformasi birokrasi kelembagaan			Indeks Kualitas Kebijakan	67,80	Penguatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;	
							Meningkatkan Sarana Prasarana pendukung pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	90,78	Dukungan Penguatan integritas partai politik;	
										Indeks Zakat Nasional	0,60	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;	
							Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi					Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;	
												Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota Dumai.	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	
												Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	
												Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
												Penguatan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasayarakat	
												Peningkatan kehidupan kerukunan beragama	
												Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	
												Penguatan kerukunan antar	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												etnis, agama, dan golongan.	
												Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi	
												Mendorong peluang inovasi pendanaan daerah	
												Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	
												Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
	Infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur (Infrastruktur Dasar, Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategi Provinsi, Kawasan Industri)	Meningkatnya Konektivitas Daerah	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi (poin)		Peningkatan infrastruktur untuk konektifitas wilayah	Penguatan kerjasama antar wilayah untuk penerapan angkutan aglomerasi	**PRIORITAS DAERAH 2: PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dari Pusat Kota hingga ke Kelurahan	Tingkat kemantapan jalan (%)	58,15	Penguatan Regulasi dan Ketahanan Sosial Ekologi serta Pembangunan Kewilayahan yang Terintegrasi;	Penataan Peningkatan sarana penunjang aktivitas ekonomi daerah
							Mendorong terwujudnya pembangunan jalur kereta api			Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak (%)	77,59	City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan;	
							Mendorong pembangunan bandar udara			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	86,43	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha;	
							Pemantapan jalan dan peningkatan aksesibilitas					Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	**PRIORITAS**	**SUB PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**	**PRIORITAS**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**ARAH KEBIJAKAN**	**STRATEGI**
			Meningkatnya cakupan dan Kualitas layanan infrastruktur dasar	Indeks layanan infrastruktur dasar (indeks)		1. Peningkatan Infrastruktur Dasar 2. Peningkatan Akses Pelayanan dasar Infrastruktur masyarakat miskin	Dukungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik					Dukungan pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Dumai-Rupat-Malaka (di Selat Malaka);	
							Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan					Dukungan peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan Bandar Udara Pinang Kampai;	
							Dukungan Percepatan pembangunan Rumah Layak Huni yang bersanitasi aman					Dukungan Penguatan infrasturktur untuk mendukung kawasan strategis industri Medan-Dumai (yang menjadi bagian klaster industri pengolahan sawit, kelapa, kopi karen dan perkebunan hasil	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												lainnya) yang diarahkan sebagai koridor ekonomi industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat Indonesia;	
							Percepatan penurunan luasan kawasan kumuh Kewenangan Provinsi					Dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkar Dumai dan lingkar Pekanbaru	
							Dukungan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman dan pemukiman kumuh					Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	
							Membangun Infrastruktur Ketenagalistrikan					Dukungan Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Rantauprapat-Kotapinang-Dumai-Pekanbaru.	
						Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah	Penguatan Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan (PKN,PKSN,PKW,PKL)					Dukungan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf global port,	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												terutama di Pelabuhan Dumai.	
						Mendorong pembangunan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur ke kawasan strategis Provinsi Riau	Penguatan kelembagaan kerjasama dan pengembangan antar wilayah					Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada kawasan perkotaan Dumai;	
												Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan	

PROVINSI								KABUPATEN/KOTA					
NO	PRIORITAS	SUB PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
												skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan;	

Jika dilihat pada tabel diatas, maka dari Prioritas Pembangunan Kota Dumai dan dengan membandingkan dengan Sasaran dan target pada Prioritas Pembangunan Provinsi Riau, maka dapat dilihat dukungan program pembangunan daerah terhadap pencapaian seluruh prioritas pembangunan Provinsi tahun 2026.

Selanjutnya berdasarkan Tabel dibawah ini, maka dapat dilihat sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Nasional tahun 2026 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Sinkronisasi antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2026 dengan Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2026

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
					1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Indeks Demokrasi Indonesia	82,12 – 85,66	a.penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional; b.penguatan komunikasi publik dan media; c. penguatan lembaga demokrasi; d. pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM.
							Indeks Hak Asasi Manusia	2,8	
					2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	Asia Power Index (Military Capability)	17	a. pembangunan postur pertahanan; b. pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; c. penguatan komponen cadangan dan komponen pendukung; d. penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri; e. peningkatan
							Asia Power Index (Diplomatic Influence)	65,8	
							Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tinggalnya Area Tempat	68	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
							Global Cybersecurity Index	95	keamanan siber, sandi, dan sinyal; f. peningkatan keamanan laut dan hidro-oseanografi; g. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; h. peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian; i. penguatan diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi.
							Indeks Keamanan Laut Nasional	61	
						Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan	Indeks Ketahanan Pangan	75,4	Pangan a. pengembangan KSPP/lumbung pangan; b. penguatan cadangan pangan; c. pengembangan pangan hewani; d. pengembangan pangan akuatik (blue food);

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
						Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,38	e. pengembangan pangan lokal dan nabati; f. fortifikasi dan biofortifikasi pangan; g. pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia (SDM), riset, inovasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dan perikanan yang adaptif dan inklusif; h. penguatan produksi komoditas pertanian bernilai tambah tinggi.
2: PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Berketahanan air, energi dan kemandirian pangan	Kemandirian Pangan: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	10,92	a. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion; b. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; c. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan;			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	6,55	
						Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Indeks Ketahanan Energi	6,82	Energi a. peningkatan penyediaan energi; b. perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi; c. penguatan transisi energi berkeadilan dari energi fosil ke pemanfaatan energi bersih.
							Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)[b)]	20	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
						Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,50	Air a. penyediaan pasokan air berkelanjutan; b. konservasi sumber daya air; c.pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir; d. penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS (Citywide Inclusive Sanitation); e. pengembangan terpadu pesisir utara Jawa.
		Ketahahan Air : Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,85				Kapasitas tampungan air (m^3/kapita)[b)]	60,16	
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Layak Perpipaan (%)	21,38				Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,24	
2: PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dari Pusat Kota hingga ke Kelurahan	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak (%)	77,59	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)[b)]	17	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
						Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan	Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)	2	Ekonomi Syariah a. penguatan industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) halal; b. penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi internasional; c. penguatan ekosistem halal; d. penguatan keuangan syariah; e. penguatan dana sosial syariah.

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
							Indonesia *Blue Economy Index* (IBEI)	41,26	Ekonomi Biru a. penguatan tata kelola ekonomi biru; b. peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir; c. peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan; d. pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut; e. penguatan industri transportasi laut; f. pengembangan pariwisata berbasis bahari dan danau; g. pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru.
							Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	41	Ekonomi Digital penguatan faktor pendukung ekonomi digital serta penguatan ekonomi dan industri digital

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
									serta sektor strategis lainnya.
						Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	Indeks Ekonomi Hijau	71,01	a. penguatan ekosistem ekonomi sirkular; b. penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; c. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; d. reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; e. pembangunan rendah karbon; f. peningkatan pekerjaan hijau/green jobs; g.penguatan pengelolaan hutan lestari.
2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Pengelolaan Sampah:		a. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami; b. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan;			Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	60,00	
		a. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	76,66				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah[b)]	28 (17 terdaur ulang)	
		b. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	76,66						
							Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)[b)]	19,07	
							Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)[b)]	27,35	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
							Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,47	
							Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,67	
					3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	47,00	pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda serta peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik.
						Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	188,04	pendalaman sektor keuangan
							Aset Perbankan/PDB (%)	64,51	
							Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,63	
							Aset Asuransi/PDB (%)	9,3	
							Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	59,9	
							Total Kredit/PDB (%)	38,46	
							Inklusi Keuangan (%)	91,50	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Produktivitas Ekonomi	Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal	95,16 – 95,65	a. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja; b. Dukungan		Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95	peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,55-0,615				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,12	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi Kota Dumai (%)	99	Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai; c. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan dan daerah pinggiran; d. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,15	
		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Kota Dumai (%)	94.27–94.34						

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4.64–4.71	prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital); e. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage di kawasan perkotaan; f. Persiapan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan			Rasio Kewirausahaan (%)	3,18	
		Pengembangan Pariwisata: a. . Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	a. 0,85 - 0,86 b. 6615-6958			Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6-4,7	pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan
		Koefisien Variasi Harga Antarwilayah	11,08				Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,0 - 24,7	
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	2,8-3,00			Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,48 - 8,0	penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
				perkotaan dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga.					
1: PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata lama sekolah	10,33	a. Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar); b. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; c. Penguatan upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan dan pemerataan akses serta perluasan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik; d. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar yang adaptif berbasis kondisi lokal, potensi, dan	**4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)	9,45	a. percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); b. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; c. pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; d. penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; e. penguatan
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,43				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,36	
		Skor Kemampuan Literasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: a. SD b. SMP	a. 68,27 b. 76,85				Rata-rata Nilai PISA a. Membaca b. Matematika c. Sains	a. 396 b. 404 c. 416	
		Skor Kemampuan Numerasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: a. SD b. SMP	a. 59,04 b.67,39				Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: a. Literasi Membaca b. Numerasi	a. 65,89 b. 58,86	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
				keunggulan daerah serta Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK; e. Penguatan upaya peningkatan kecakapan literasi numerasi dan manajemen talenta serta prestasi peserta didik; f. Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta pemberian insentif khusus bagi guru dan tenaga kependidikan yang ditugaskan di kecamatan perbatasan.			Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)c)	34,92	sistem tata kelola pendidikan; f. penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan bidang Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM); g. penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi.
		Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	19,20-20,25				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,49	
							Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,5	
	Kesehatan untuk Semua	Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,81	a. Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan; b. Pemerataan dan peningkatan akses layanan		Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,68	a. peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara holistik berdasarkan siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia; b. pemberian
		Total Fertility Rate (TFR)	2,27				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata Kelahiran per Wanita Usia Subur 15–49 Tahun)	2,10	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
		Jumlah Kematian Ibu Absolut	8	kesehatan universal; c. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; d. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; e. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; f. Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehata yang ditugaskan di kecamatan perbatasan; g. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; h. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat serta pengendalian terhadap produksi konsumsi dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat; i. Percepatan eliminasi penyakit menular, tidak			Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	109	makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi, terutama bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; c. pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; d. penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, terutama respons terhadap krisis kesehatan, termasuk kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi dan bencana kesehatan lainnya; e. penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,5				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	17,50	
		Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%); b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	a. 83 b. 97,48				Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	252	
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,7	
		Jumlah Kelahiran Hidup	10305						
		Jumlah Kematian Balita Absolut	136						
		Cakupan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	85						

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	menular dan penyakit tropis terabaikan.					
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR* 15-19)	7,8						
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive (mCPR)*	71,2						
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,5	a. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. b. Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan stimulasi dini; c. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang; d. Pemberdayaan perempuan, pemuda,		Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,83	a. peningkatan ketangguhan keluarga; b. peningkatan kualitas perlindungan anak; c. peningkatan kualitas pemuda; d. peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; e. peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang
							Indeks Perlindungan Anak	72,33	
							Indeks Pembangunan Pemuda	67,24	
							Indeks Ketimpangan Gender	0,421	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
				penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; e. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.			Indeks Pembangunan Gender	92,11-92,21	disabilitas dan lanjut usia
							Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	94,5	
							Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	69,50	
3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stabilitas Ekonomi Makro	Indeks Kapabilitas Inovasi	2,38	a. Penguatan hilirisasi sektor industri pengolahan dan usaha menengah kecil dan mikro; dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penguatan riset dan inovasi daerah; b. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, sarana prasarana dan		Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peringkat Indeks Inovasi Global	52	a. penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas SDM tenaga kerja; b. peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional; c. pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) untuk

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
		Indeks Inovasi Daerah	57,7	lainnya); c. Penguatan Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi; d. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha; e. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya;			Pengeluaran Iptek dan Inovasi (%PDB)	0,31	menciptakan talenta-talenta unggulan di bidang riset dan inovasi, kebudayaan, serta olahraga.
3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Produktivitas Ekonomi	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik: Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,74 - 4,46	a. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 - 4,96	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	47,74	industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja; b. Dukungan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai; c. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan dan daerah pinggiran; d. Pembangunan ekosistem digital yang perlu			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,40–59,31	
						Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat	Peringkat pada Asian Games	9–11	peningkatan pembinaan prestasi olahraga dan pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif.

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
				dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan			Peringkat pada Asian Para Games	5–7	
							Peringkat pada ASEAN Para Game	1–2	

				SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital); e. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage di kawasan perkotaan; f. Persiapan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga.			Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga	10,80–11,94	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	60,44 - 60,65	a. Dukungan peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut; b. Dukungan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. c. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah; d. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing;	**5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	21,20	pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor dan pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KI/KEK) prioritas sebagai pusat

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
		PDRB per Kapita	159,46-172,6	e. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. f. Peningkatan produktivitas BUMD; g. Dukungan Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon;					pertumbuhan baru.
3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			a. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis; b. Dukungan Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang		Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Biaya Logistik (% PDB)	13,30	a. optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; b. peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; c. peningkatan perdagangan domestik,

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41,08-41,86	dikembangkan pada kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya mineral, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi); c. Dukungan Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi);			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,4	antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global; d. optimalisasi investasi strategis Danantara.
		Rasio Ekspor Non Migas Terhadap Total Ekspor Perdagangan Luar Negeri	94,25				Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22, 7	
1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perlindungan Sosial yang Adaptif			a. Penguatan pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan serta perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas secara inklusif; b. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & highvalue economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi	**6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	Tingkat kemiskinan (%)	6,5-7,5	a. sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi; b. perlindungan sosial adaptif dan inklusif; serta c. peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif.
							Tingkat kemiskinan ekstrem (%)[c]	0-0,5	
		Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	58,44				Proporsi penduduk kelas menengah (%)	18,20	
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai (%)	73,15				Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)[b]	34,99	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	2,25-2,75	investasi; c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling; d. Peningkatan government induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi; e. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien; f. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan			Proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	10,4	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
2: PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dari Pusat Kota hingga ke Kelurahan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	86,43	a. Penguatan Regulasi dan Ketahanan Sosial Ekologi serta Pembangunan Kewilayahan yang Terintegrasi; b. City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan; c. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha; d. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif; e. Dukungan pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang		Meningkatkan akses rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	68,66	percepatan penyediaan perumahan dan permukiman

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
		Tingkat kemantapan jalan (%)	58,15	menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Dumai-Rupat-Malaka (di Selat Malaka); f. Dukungan peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan Bandar Udara Pinang Kampai; g. Dukungan Penguatan infrasturktur untuk mendukung kawasan		Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Persentase desa mandiri (%)	23,91	peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

				strategis industri Medan-Dumai (yang menjadi bagian klaster industri pengolahan sawit, kelapa, kopi karen dan perkebunan hasil lainnya) yang diarahkan sebagai koridor ekonomi industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat Indonesia; h. Dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkar Dumai dan lingkar Pekanbaru. i. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. j. Dukungan Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Rantauprapat-Kotapinang-Dumai-Pekanbaru. k. Dukungan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf global port, terutama di Pelabuhan Dumai. l. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan					

				perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada kawasan perkotaan Dumai; m. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; n. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala					

				kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan;					

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stabilitas Ekonomi Makro	Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi Riau (%)	4,85-4,8575			Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi	Proporsi PDRB Perkotaan Terhadap PDB Nasional (%)[a)]	57,70	pembangunan perkotaan berkelanjutan dan pembangunan IKN
							Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	
4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	**Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif**	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	2,16	a. Penguatan Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat b. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah; c. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan,	**7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan**	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional	Indeks Pembangunan Hukum	0,70	a. reformasi politik dan tata kelola pemilu melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; b. reformasi hukum melalui penguatan tata kelola regulasi, budaya hukum, dan akses terhadap keadilan; c.penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
		Indeks Reformasi Hukum	81,25-86,25	dan pengawasan pembangunan serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; d. Penguatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat dan penguatan aspek pemerintahan digital; e. Penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Dumai yang profesional dan bebas korupsi;f.			Indeks Persepsi Korupsi	40	hukum; d. transformasi sistem penuntutan dan advocaat general melalui penguatan kelembagaan Kejaksaan; e. pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui pencegahan tindak pidana korupsi.
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,03-1,14				Indeks Integritas Partai Politik	65 ,00- 66,99	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	5,16	Penguatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja; g. Dukungan Penguatan integritas partai politik; h. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional; i. Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko; j. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota Dumai.		Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	72,8	a. penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan pengembangan kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar; b. transformasi tata kelola pelayanan publik dan Pembangunan melalui penguatan manajemen kinerja pembangunan;

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
		Indeks Kualitas Kebijakan	67,8	k. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. l. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. m. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik n. Penguatan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasayarakat o. Peningkatan kehidupan kerukunan beragama p. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. q. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. r. Mendorong Pemerintah			Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	94	c. penataan desentralisasi dan otonomi daerah melalui revitalisasi kebijakan otonomi daerah dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang adaptif, produktif, serta memiliki kinerja unggul dan daya saing tinggi; d. pemerintah digital melalui pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN; e. pelindungan WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia di luar negeri yang integratif.
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,78			Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika (%)	1,70	Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
		Indeks Zakat Nasional	0,6	Daerah untuk mengintegrasikan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi s. Mendorong peluang inovasi pendanaan daerah t. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. u. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; v. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal; w. Penguatan dana sosial syariah guna mendukung perlindungan sosial nasional dilakukan melalui akselerasi bauran zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF) dan keuangan		Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	Return on Asset (RoA) BUMN	3,26	peningkatan produktivitas BUMN
						Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	12,22-13,35	a. optimalisasi pendapatan negara; b. optimalisasi belanja negara; c. perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.
							Rasio Perpajakan terhadap PDB (persen)	10,45-11,40	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
				syariah, dengan penyempurnaan bentuk kelembagaan dan skema bisnis bank wakaf serta penguatan tata kelola dan literasi ZISWAF					
3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stabilitas Ekonomi Makro	Tingkat Inflasi (%)	2,8-3,0	Pengendalian Inflasi		Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Tingkat Inflasi (persen)	2,5 ± 1,0	pengendalian inflasi
					8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	66,15	penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	33,33	Peningkatan Pemajuan Kebudayaan Melayu Sebagai Payung Negeri			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,99	
							Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,14	

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	92,31	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan early warning system berbasis IT dan pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan;		Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,136	pembangunan berketahanan iklim serta pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
				Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi serta proteksi kebakaran pada kawasan perumahan dan permukiman;					
				Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan					

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
				aktivitas ekonomi strategis/prioritas					
				Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.					
				Dukungan Percepatan pelaksanaan reforma agraria.					
				Dukungan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Medan-Dumai					

Prioritas Dumai	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama	Indikator	Target	Arah Kebijakan
				Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb) yang adaptif.					
				Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.					
				Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, dsb);					

Dilihat dari Prioritas Pembangunan Kota Dumai dan dengan membandingkan dengan Sasaran dan target pada Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, maka dapat dilihat dukungan program pembangunan daerah terhadap pencapaian seluruh prioritas pembangunan Nasional tahun 2026

4.3. Penjabaran arah kebijakan dalam rangka mendukung fokus dan highlight major Project pada RKP tahun 2026

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026: **"*Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*"** dan dalam rangka mendukung Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, maka Pemerintah Kota Dumai menjabarkan arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.13
Sikronisasi Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan Kota Dumai Tahun 2026

SASARAN PEMBANGUNAN RKP	ARAH KEBIJAKAN
Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & highvalue economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi;
	Peningkatan government induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
	Penguatan Regulasi dan Ketahanan Sosial Ekologi serta Pembangunan Kewilayahan yang Terintegrasi;
	City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan;
	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha;
	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;
	Dukungan pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Dumai-Rupat-Malaka (di Selat Malaka);
	Dukungan peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan Bandar Udara Pinang Kampai;
	Dukungan Penguatan infrasturktur untuk mendukung kawasan strategis industri Medan-Dumai (yang menjadi bagian klaster industri pengolahan sawit, kelapa, kopi karen dan perkebunan hasil lainnya) yang diarahkan sebagai koridor ekonomi industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat Indonesia;
	Dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkar Dumai dan lingkar Pekanbaru.
	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
	Dukungan Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Rantauprapat-Kotapinang-Dumai-Pekanbaru.
	Dukungan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf global port, terutama di Pelabuhan Dumai.
	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada kawasan perkotaan Dumai;
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;

SASARAN PEMBANGUNAN RKP	ARAH KEBIJAKAN
	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan;
	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami;
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan;
	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion;
	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;
	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan;
	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan early warning system berbasis IT dan pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan;
	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi serta proteksi kebakaran pada kawasan perumahan dan permukiman;
	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
	Dukungan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Medan-Dumai
	Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb) yang adaptif.
	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, dsb);
	Dukungan peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut;

SASARAN PEMBANGUNAN RKP	ARAH KEBIJAKAN
	Dukungan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah;
	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing;
	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
	Peningkatan produktivitas BUMD;
	Dukungan Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon;
	Penguatan hilirisasi sektor industri pengolahan dan usaha menengah kecil dan mikro; dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penguatan riset dan inovasi daerah;
	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, sarana prasarana dan lainnya);
	Penguatan Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;
	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya;
	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
	Dukungan Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya mineral, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi);
	Dukungan Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi);
	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja;
	Dukungan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai;

SASARAN PEMBANGUNAN RKP	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan dan daerah pinggiran;
	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital);
	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage di kawasan perkotaan;
	Persiapan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga.
	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah;
	Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota Dumai.
	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
	Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi
	Mendorong peluang inovasi pendanaan daerah
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal;
Penurunan Kemiskinan	Penguatan pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan serta perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas secara inklusif;
	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;
	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.
	Dukungan Percepatan pelaksanaan reforma agraria.

SASARAN PEMBANGUNAN RKP	ARAH KEBIJAKAN
	Pengendalian inflasi daerah;
	Penguatan dana sosial syariah guna mendukung perlindungan sosial nasional dilakukan melalui akselerasi bauran zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF) dan keuangan syariah, dengan penyempurnaan bentuk kelembagaan dan skema bisnis bank wakaf serta penguatan tata kelola dan literasi ZISWAF
Sumber Daya Manusia Berkualitas	Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan;
	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya;
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;
	Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehata yang ditugaskan di kecamatan perbatasan;
	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting;
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat serta pengendalian terhadap produksi konsumsi dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat;
	Percepatan eliminasi penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis terabaikan.
	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar);
	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah;
	Penguatan upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan dan pemerataan akses serta perluasan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik;
	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar yang adaptif berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK;
	Penguatan upaya peningkatan kecakapan literasi numerasi dan manajemen talenta serta prestasi peserta didik;
	Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta pemberian insentif khusus bagi guru dan tenaga kependidikan yang ditugaskan di kecamatan perbatasan.
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling;
	Peningkatan Pemajuan Kebudayaan Melayu Sebagai Payung Negeri
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan stimulasi dini
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

SASARAN PEMBANGUNAN RKP	ARAH KEBIJAKAN
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
	Penguatan Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
	Penguatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat dan penguatan aspek pemerintahan digital;
	Penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Dumai yang profesional dan bebas korupsi;
	Penguatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;
	Dukungan Penguatan integritas partai politik;
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	Penguatan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasayarakat
	Peningkatan kehidupan kerukunan beragama
	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.

PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2026

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
TAHUN 2026

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kota Dumai Tahun 2026 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disampaikan pada Bab II sampai dengan Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2026. Tabel berikut menyajikan pagu indikatif belanja setiap perangkat daerah:

Tabel 5.1
Rekap Pagu Indikatif Renja Prangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN
1	1.01.2.22.0.0200 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	479.970.332.777,00
2	1.02.0.0.0100 DINAS KESEHATAN	437.165.387.298,00
3	1.03.0.0.0100 DINAS PEKERJAAN UMUM	466.754.141.763,00
4	1.03.2.10.0.0100 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	108.858.666.777,00
5	1.04.0.0.0100 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.134.335.363,00
6	1.05.0.0.0100 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.197.524.640,00
7	1.05.0.0.0200 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	10.028.932.745,00
8	1.05.0.0.0400 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.143.456.360,00
9	1.06.0.2.13.0500 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	16.298.408.501,00
10	2.07.0.0.0100 DINAS TENAGA KERJA	8.238.105.108,00
11	2.08.0.0.0100 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.714.280.454,00
12	2.09.3.27.0.0200 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	21.036.686.305,00
13	2.11.0.0.0100 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.272.071.390,00
14	2.12.0.0.0100 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9.174.014.525,00
15	2.14.0.0.0100 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.174.469.595,00
16	2.15.0.0.0100 DINAS PERHUBUNGAN	54.584.309.205,00
17	2.16.2.20.2.21.0400 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	14.994.894.657,00
18	2.17.3.31.0.0200 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	8.836.528.627,00
19	2.18.0.0.0100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.374.745.865,00
20	2.19.3.26.0.0200 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	17.434.534.604,00
21	2.23.2.24.0.0200 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.502.226.364,00
22	3.25.0.0.0100 DINAS PERIKANAN	7.892.652.890,00
23	3.30.0.0.0100 DINAS PERDAGANGAN	10.759.887.319,00
24	4.01.5.06.0.0100 SEKRETARIAT DAERAH	96.561.304.568,00
25	4.02.0.0.0100 SEKRETARIAT DPRD	57.112.143.993,00
26	5.01.0.0.0100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.711.990.665,00
27	5.02.0.0.0200 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	150.796.219.840,00
28	5.02.0.0.0300 BADAN PENDAPATAN DAERAH	53.796.539.341,00
29	5.03.5.04.0.0100 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.776.038.733,00
30	5.05.0.0.0100 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	3.361.499.230,00
31	6.01.0.0.0100 INSPEKTORAT DAERAH	24.443.499.570,00
32	7.01.0.0.0100 KECAMATAN DUMAI BARAT	10.977.214.302,00
33	7.01.0.0.0200 KECAMATAN DUMAI TIMUR	13.185.837.260,00

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN
34	7.01.0.0.0300 KECAMATAN BUKIT KAPUR	13.662.500.538,00
35	7.01.0.0.0400 KECAMATAN DUMAI KOTA	12.235.193.050,00
36	7.01.0.0.0500 KECAMATAN DUMAI SELATAN	11.858.981.332,00
37	7.01.0.0.0600 KECAMATAN MEDANG KAMPAI	9.281.197.660,00
38	7.01.0.0.0700 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	13.303.365.950,00
39	8.01.0.0.0100 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.057.604.102,00
TOTAL		**2.264.661.723.266,00**

Untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2026 yang tertuang pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2026, maka tabel berikut menyajikan dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk setiap prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Pagu Indikatif untuk Setiap Prioritas Pembangunan Daerah

No	Dumai	Program*	Keg*	Sub Keg*	Pagu
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia Berlandaskan Budaya Melayu	31	66	248	298.050.778.713,80
2	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan	30	48	139	565.226.694.193,50
3	Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	39	69	128	34.068.295.164,93
4	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	32	74	453	192.743.792.474,14
	Jumlah	**132**	**257**	**968**	**1.090.089.560.546,37**

Berkenaan dengan dukungan terhadap prioritas pembangunan Provinsi, maka tabel berikut menyajikan dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk setiap prioritas pembangunan provinsi.

Tabel.5.3
Dukungan Pendanaan Yang Bersifat Indikatif Untuk
Prioritas Pembangunan Provinsi Riau

No	PD PROV	Program*	Keg	Subkeg	Pagu
1	Transformasi Sosial; a) Pendidikan; b) Kesehatan; c) Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial); d) Agama dan Budaya.	31	66	248	298.050.778.713,80
2	Transformasi Ekonomi; a) Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perkebunan); b) Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi); dan c) Inovasi.	51	86	163	46.083.073.464,93
3	Transformasi Tata Kelola; a) Peningkatan Kapasitas ASN; b) Implementasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis IT.	32	74	453	192.743.792.474,14
4	Infrastruktur Penguatan Ekonomi; a) Peningkatan Infrastruktur (Infrastruktur Dasar, Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategis).	18	31	104	553.211.915.893,50
Jumlah		**132**	**257**	**968**	**1.090.089.560.546,37**

Selanjut dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi Riau, maka tabel 5.4 berikut menyajikan dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk setiap prioritas pembangunan nasional.

Tabel.5.4
Dukungan Pendanaan Yang Bersifat Indikatif Untuk Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEG	SUB KEG	PAGU
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM)	5	5	16	9.585.232.136,00
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	13	26	41	8.372.108.975,60
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirasusahaan, Mengembangkan Industri Kreatif.	21	35	72	123.731.145.389,50
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas	28	59	222	294.148.229.937,94
5	Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	13	19	43	2.865.335.262,33
6	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan	15	25	207	480.377.239.315,00
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba	23	62	285	156.358.517.340,00
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	14	26	82	14.651.752.190,00
TOTAL		**132**	**257**	**968**	**1.090.089.560.546,37**

Berdasarkan Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kota Dumai telah mengalokasi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat indikatif pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana yang disajikan pada tabel dibawah ini dan untuk rincian keseluruhan dari program, kegiatan dan subkegiatan Pagu Pendanaan SPM disajikan pada lampiran III Dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2026:

Tabel 5.5.
Pendanaan Indikatif Untuk Penerapan
Standard Pelayanan Minimal Pada Tahun 2026

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1.	**Bidang Pendidikan :**	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu	**19.482.117.629,80**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1. Angka Partisipasi Sekolah		8.295.649.261,79	
	2. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas		1.850.000.000,01	
	3. Kekhususan PAUD		685.000.000,00	
	4. Literasi dan Numerasi		8.651.468.368,00	
2.	**Bidang Kesehatan ;**		**1.177.200.000,00**	DINAS KESEHATAN
	1. Pelayanan Kesehatan Balita		80.000.000,00	
	2. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		93.200.000,00	
	3. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		120.000.000,00	
	4. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		100.000.000,00	
	5. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		50.000.000,00	
	6. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Manusia (HIV)		350.000.000,00	
	7. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		60.000.000,00	
	8. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		80.000.000,00	
	9. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		60.000.000,00	
	10. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		55.000.000,00	
	11. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		70.000.000,00	
	12. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		9.000.000,00	
3.	**Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :**	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan	**10.989.128.000,00**	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota		1.000.000.000,00	
	2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/kota		9.989.128.000,00	
4.	**Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :**		**316.000.000,00**	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		316.000.000,00	
5.	**Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum :**	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan	**1.652.468.000,00**	
	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		217.500.000,00	
	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		175.500.000,00	
	4. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		527.351.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		692.116.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
6.	**Bidang Sosial :**	Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	**626.707.934,00**	DINAS SOSIAL
	1. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota		131.686.020,00	
	2. Rehablitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		495.021.914,00	
TOTAL			**34.243.621.563,80**	

Sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Dumai untuk mempercepat penurunan stunting berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka Pemerintah Kota Dumai telah mengalokasikan pendanaan yang bersifat indikatif yang tersebar pada beberapa perangkat daerah sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.6.
Pendanaan Indikatif Dalam Rangka Penanganan Stunting
Kota Dumai Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	29.985.123
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	60.000.000
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	34.500.000
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	210.107.900
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	103.341.580
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	190.728.000

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
7	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	8.941.248
8	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	26.711.540
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	66.000.000
10	DINAS KESEHATAN	21.855.312.942
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	523.793.375
12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	53.979.200
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	137.500.000
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	193.838.493
15	DINAS PEKERJAAN UMUM	37.000.000
16	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	32.596.000
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18.426.317
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	40.999.840
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.201.615.522
20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	141.626.340
21	DINAS PERDAGANGAN	34.496.046
22	DINAS PERHUBUNGAN	71.952.000
23	DINAS PERIKANAN	143.314.400
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	21.002.889
25	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	4.172.625.480
26	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	76.062.089
27	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	267.664.503
28	DINAS TENAGA KERJA	15.000.000
29	INSPEKTORAT DAERAH	83.200.000
30	KECAMATAN BUKIT KAPUR	72.398.680
31	KECAMATAN DUMAI BARAT	58.001.080
32	KECAMATAN DUMAI KOTA	49.114.330
33	KECAMATAN DUMAI SELATAN	57.298.500
34	KECAMATAN DUMAI TIMUR	102.895.000
35	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	47.868.860
36	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	66.720.420
37	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	30.500.000
38	SEKRETARIAT DAERAH	436.002.380
39	SEKRETARIAT DPRD	1.832.119.256
	Grand Total	**34.605.239.331**

Selanjutnya Pemerintah Kota Dumai juga telah mengalokasikan pendanaan yang bersifat indikatif untuk menanggulangi kemiskinan didaerah yang tersebar di beberapa perangkat daerah, sebagai berikut :

Tabel 5.7.
Pendanaan Indikatif Dalam Rangka Kemiskinan
Kota Dumai Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23.500.000,00
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	61.000.000,00
3	DINAS KESEHATAN	8.739.747.480,00
4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	896.761.649,88
5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	127.118.100,10
6	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.475.400.000,00
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	35.196.689.858,30
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25.000.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	298.758.600,00
10	DINAS PERIKANAN	965.753.618,70
11	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	360.000.000,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	548.950.000,00
13	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	840.006.786,50
14	DINAS TENAGA KERJA	1.237.927.375,00
15	KECAMATAN BUKIT KAPUR	14.000.000,00
16	KECAMATAN DUMAI BARAT	16.000.000,00
17	KECAMATAN DUMAI KOTA	19.200.000,00
18	KECAMATAN DUMAI SELATAN	16.600.000,00
19	KECAMATAN DUMAI TIMUR	11.000.000,00
20	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	34.200.000,00
	Grand Total	**50.907.613.468,48**

*beririsan dengan SPM dan stunting

Kemudian merujuk pada beberapa ketentuan terkait porsi mandatory spending, tabel berikut menyajikan mandatory spending yang bersifat indikatif pada RKPD Tahun 2026.

Tabel 5.8.
Pendanaan Indikatif Terkait Mandatory Spending
Pada RKPD Kota Dumai Tahun 2026

No	OPD	Pagu Indikatif	% Terhadap Total RKPD
1	Urusan Pendidikan	492.428.412.522	20,91%
2	Pendidikan dan Pelatihan	4.139.796.093	0,18%
3	Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan	11.015.406.470	0,47%

Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran II Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026.

PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2026

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah ditetapkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi kepala daerah serta wakilnya dapat direalisasikan. Indikator ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan pencapaian target strategis daerah, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu periode kepemimpinan.

Indikator kinerja utama ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian tujuan, merangkum berbagai program dan kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi. Adapun penetapan indikator utama Kota Dumai Tahun 2025-2029 dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Dumai Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	58,58
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,35
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.06-6.14
4	Indeks Integritas	Indeks	75-77
5	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	67,17
6	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,79
7	Tingkat Kemiskinan	%	2.41-2.63

Sumber : Perda No. 8 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029

Penetapan indikator kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026. Indikator kinerja ini meliputi 4 aspek utama pembangunan daerah yaitu Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Pelayanan Umum.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Kota Dumai Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
I	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**		
1	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	67.17
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.79
3	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	58.15
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	60.44

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	41.08
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	0.85-0.86
7	Rasio Ekspor Non Migas terhadap total Ekspor Perdagangan Luar Negeri	%	94.25
8	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	6.958
9	Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi Riau (%)	%	4.85-4.8575
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	86.43
11	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	%	2.8-3.00
12	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	94.27
13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	1.03
14	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi Kota Dumai	%	99
15	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06-6,14
16	Tingkat Inflasi (%)	%	2.8-3
17	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	%	4.64-4.71
18	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	0.55-0.615
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	47.74
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah	Koefisien	11.08
II	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	58.58
2	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	11.02
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	10.92
4	Indeks Risiko Bencana	Indeks	92.31
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	76.66
6	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	%	77.59
7	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	0.85
8	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	76.66
9	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	21.38
III	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
1	Tingkat Kemiskinan	%	2.41-2.63
2	Rasio Gini	Indeks	0.317-0.335
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,35
4	Skor Kemampuan Literasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SD	Skor	68.27
5	Skor Kemampuan Literasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SMP	Skor	76.85
6	Skor Kemampuan Numerasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SD	Skor	59.04

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
7	Skor Kemampuan Numerasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SMP	Skor	67.39
8	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	19.20
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.33
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.43
11	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	73.81
12	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	10305
13	Jumlah Kematian Ibu Absolut	Jiwa	8-8
14	Jumlah Kematian Balita Absolut	Jiwa	136
15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
16	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.27
17	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	7.8
18	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	71.2
19	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	16.5
20	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	83
21	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	97.48
22	Cakupan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	%	85
23	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	67.5
24	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.385-0.39
25	PDRB per kapita (Rp Juta)	Rp. Juta Per Tahun	159.46-172.6
26	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan	%	33.33
27	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	58.44
28	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0.6
29	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	100
30	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	3.74-4.88
31	Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal	%	95.16-95.65
32	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai (%)	%	73.15-73.15
33	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	2.75
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
1	Indeks Integritas	Indeks	75-77
2	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Indeks	2.16
3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	81.25
4	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	5.16
5	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	67.8

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
6	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	2.38
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90.78
9	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	57.7
10	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	91
II	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**		
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**		
1	Skor Kemampuan Literasi SD	Skor	68.27
2	Skor Kemampuan Numerasi SD	Skor	59.04
3	Skor Kemampuan Literasi SMP	Skor	76.85
4	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Skor	67.39
5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal	%	100
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	%	97.94
7	Indeks Pemerataan Guru SD	Indeks	0.7
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Kesetaraan	%	47.22
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	%	99.79
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun	%	62.64
11	Terselenggaranya Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI)	Event	1
12	Indeks Pemerataan Guru SMP	Indeks	1
13	Iklim Keamanan SMP	Nilai	76.07
14	Iklim Keamanan SD	Nilai	78.2
15	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	75.54
16	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	59
17	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	76.33
18	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	63.91
19	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	65.41
20	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	81.81
AB	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**		
1	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan	%	40.74
2	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	5
3	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan	%	33.33
AA	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)**		
1	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	76
2	Prevalensi obesitas > 18 tahun	%	23.4
3	Prevalensi depresi pada usia > 15 tahun	%	0.6
4	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
5	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	50
6	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	80.5
7	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	0.6
8	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	23.4
9	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	84
10	Cakupan penemuan kasus TB	%	83
11	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100
12	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100
13	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	58.33
14	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	93
15	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	76
16	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	12
17	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Per 1000 Penduduk	4.85
18	Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	70
19	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	71.5
20	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	Persentase	60
21	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	100
AA	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (RSUD)**		
1	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	100
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	85
AA	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS DUMAI KOTA)**		
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	71.5
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76
3	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	83
AA	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS DUMAI BARAT)**		
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	71.5
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76
3	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	83
AA	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS BUKIT KAPUR**		
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	71.5

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76
3	Cakupan penemuan kasus TB	%	83
4	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100
AA	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS MEDANG KAMPAI)**		
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	71.5
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76
3	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	83
AA	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS BUMI AYU)**		
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	71.5
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76
3	Cakupan penemuan kasus TB	%	83
4	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100
AA	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS BUKIT TIMAH)**		
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	71.5
2	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100
3	Cakupan penemuan kasus TB	%	83
4	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76
AA	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS PURNAMA)**		
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	71.5
2	Cakupan penemuan kasus TB	%	83
3	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76
4	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100
AA	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS JAYA MUKTI)**		
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	71.5
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76
3	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	83
AA	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR)**		
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	71.5
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76
3	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	83
AA	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN)**		
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	71.5
2	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100
3	Cakupan penemuan kasus TB	%	83
4	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76
AA	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DINAS PEKERJAAN UMUM)**		
1	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persentase	23
2	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persentase	48
3	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	12.70
4	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	58.15
5	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	53
AA	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A)**		
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	58.15
AA	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A)**		
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	58.15
AA	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A)**		
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	58.15
AA	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG)**		
1	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak	%	21.38
2	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	87.85
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	76.66
4	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	%	77.59
5	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kota Dumai	%	34
6	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak	%	21.38
7	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman	%	0
8	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	0
9	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	3.46
AB	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN (DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG)**		
1	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	20
2	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persentase	20
AA	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN)**		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
1	Persentase warga negara korban bencana atau terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni	%	100
2	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	74.54
3	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase	50.00
4	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	15.57
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0.60
6	Persentase warga negara korban bencana atau terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni	%	100
AA	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)**		
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
2	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	0
3	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100
4	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	100
5	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	Indeks	100
AA	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (DINAS PEMADAM KEBAKARAN)**		
1	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100
2	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100
AA	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)**		
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks	66
2	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	100
3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100
4	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100
AA	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL (DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)**		
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	%	100
2	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100
3	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	%	100
4	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100
5	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100
6	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persentase	100
AB	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)**		
1	Persentase Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahnya	%	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang Aktif	%	100
AA	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA (DINAS TENAGA KERJA)**		
1	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	20
2	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	10
3	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	10
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	90
AA	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)**		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91.60
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0.41
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70.30
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	60
5	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	67
6	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	80
7	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	30
8	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persentase	53
9	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	90
AA	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)**		
1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	89.67
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	8006
3	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	Skor	89.67
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	100
5	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3.03
6	Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton)	Ton	16023
7	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)	Ton	8006
AB	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)**		
1	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular	%	18.52
2	Persentase Penanganan Bencana Pertanian		100
3	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	30
4	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	100
5	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	%	50
6	Peningkatan Produksi Perkebunan	Ton	154021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
7	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	14.08
8	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular	%	18.52
9	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Ton	3392
AA	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)**		
1	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	50
2	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	60
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	49.1
4	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	85
5	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	50
6	Persentase RTH	Persentase	66
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100
8	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	74
9	Indeks Kualitas Air	Indeks	35.55
10	Indeks Kualitas Udara	Indeks	71.14
LVI	**ASPEK PELAYANAN UMUM (DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL)**		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	91
AA	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL)**		
1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	40
2	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	Persentase	100
3	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	70
6	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100
7	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100
8	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100
AA	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)**		
1	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	46
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	71.2
3	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.27
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6.8

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	7.8-7.8
AA	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN (DINAS PERHUBUNGAN)**		
1	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Persentase	20
2	Konektivitas Laut dan Sungai	%	20
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	79
AA	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN)**		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	97
2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey)	%	100
AB	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN)**		
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3
AC	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN)**		
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	100
AA	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN)**		
1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	69
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	45
3	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	30
4	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	10
5	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	41
6	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	21
AB	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN)**		
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil Menengah	%	12
2	Persentase Izin Usaha Industri Kecil Menengah yang Diterbitkan	%	8
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	10
AA	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)**		
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	triliun rupiah	15
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	100
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	100
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100
6	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	%	10

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
AA	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA)**		
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	75
2	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	90
3	Persentase Atlet yang berprestasi	%	90
AB	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA (DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA)**		
1	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	80
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	80
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	80
AA	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)**		
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	71
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65
AB	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)**		
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	57
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	10
3	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	55
AA	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (DINAS PERIKANAN)**		
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	107
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	102
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	350.36
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1290
5	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	47
AA	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN (DINAS PERDAGANGAN)**		
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	40
2	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persentase	35
3	Persentase Nilai Ekspor Non Migas	%	3.6
4	Persentase Pelaku Usaha yang melakukan Tera/Tera Ulang	%	80
5	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	40
6	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	33.33
7	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	100
8	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	%	35
AA	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**		
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	2
2	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase	100
3	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	85

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
4	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	28.7
5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	100
6	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	100
7	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	100
8	Efektivitas Kebijakan Sumber Daya Alam	%	100
9	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100
10	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	86.80
AA	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**		
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100
2	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100
AA	**5.01 – PERENCANAAN (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH)**		
1	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100
AA	**5.02 - KEUANGAN (BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH)**		
1	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	66.55
2	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	38.80
3	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	22.72
4	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	12.96
5	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	19.58
6	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100
AA	**5.02 - KEUANGAN (BADAN PENDAPATAN DAERAH)**		
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	34
AA	**5.03 – KEPEGAWAIAN (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA)**		
1	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	96.75
2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	2
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	8
4	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	60.4
AB	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA)**		
1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	100
2	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	12.2

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
AA	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH)**		
1	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase	0
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	36
3	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan		0
AA	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**		
1	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi sebagai implementasi dari kebijakan teknis yang disusun	%	100
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan tahun n-1	%	87.5
AA	**7.01 - KECAMATAN DUMAI BARAT**		
1	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat	%	100
2	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat	%	100
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Barat	%	100
4	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100
AA	**7.01 - KECAMATAN DUMAI TIMUR**		
1	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Timur	%	100
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Timur	%	100
3	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Timur	%	100
4	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100
AA	**7.01 - KECAMATAN BUKIT KAPUR**		
1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Bukit Kapur	%	100
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Bukit Kapur	%	100
4	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Bukit Kapur	%	100
AA	**7.01 - KECAMATAN DUMAI KOTA**		
1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Kota	%	100
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100
3	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota	%	100
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota	%	100
AA	**7.01 - KECAMATAN DUMAI SELATAN**		
1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Selatan	%	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100
3	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Selatan	%	100
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Selatan	%	100
AA	**7.01 - KECAMATAN MEDANG KAMPAI**		
1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Medang Kampai	%	100
2	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Medang Kampai	%	100
3	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Medang Kampai	%	100
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Medang Kampai	%	100
AA	**7.01 - KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**		
1	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan	%	100
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan	%	100
3	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan	%	100
4	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100
AA	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		
1	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	90
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100
3	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	90
4	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100
5	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	90

Sumber : Perda No. 8 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029

PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB VII

PENUTUP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2026

BAB VII

P E N U T U P

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026, merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024. Kebijakan program lebih diarahkan untuk memperkuat instrumen pendukung yang kondusif untuk memantapkan Kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman).

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasionalisasi pembangunan tahun 2026, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan pada tahun 2026. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah Kota Dumai serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Dumai berkewajiban untuk mempedomani program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2026, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. RKPD Kota Dumai tahun 2026 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholder* Kota Dumai untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah Kota Dumai yang telah ditetapkan.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Kota Dumai Tahun 2026, RKPD Kota Dumai Tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Dumai.

4. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2026.
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Rembuk RT, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodir dan dikelola secara baik.
6. Dalam rangka sinergitas dan menyadari kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka untuk mengatasinya antara lain telah ditempuh dengan cara kebijakan *sharing* pembiayaan pembangunan antar pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Propinsi Riau, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing* yang dimuat pada RKPD masing-masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber dana lainnya.
7. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, setiap OPD diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2026, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala (laporan per triwulan) kepada Wali Kota, melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Keuangan dan Bappeda Kota Dumai sebagai *leading sector*.
8. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2026 dan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah serta MUSRENBANG RKPD Tingkat Kota Tahun 2026, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian untuk mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG RKPD dimulai dari rembuk RT, di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi Riau sampai dengan Tingkat Nasional, perlu mekanisme yang lebih sinergi dan selektif sesuai dengan aturan perencanaan, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Dumai secara bertahap dan berkesinambungan.

9. RKPD Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Serta hal-hal yang bersifat perubahan akan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM,MARS

LAMPIRAN

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KOTA DUMAI TAHUN 2026

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	DINAS KESEHATAN	22.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	23.	DINAS PERIKANAN
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	24.	DINAS PERDAGANGAN
5.	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	25.	SEKRETARIAT DAERAH
6.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.	SEKRETARIAT DPRD
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	27.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	28.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	29.	BADAN PENDAPATAN DAERAH
10.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	30.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
11.	DINAS TENAGA KERJA	31.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
12.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	32.	INSPEKTORAT
13.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	33.	KECAMATAN DUMAI BARAT
14.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34.	KECAMATAN DUMAI TIMUR
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	35.	KECAMATAN BUKIT KAPUR
16.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	36.	KECAMATAN DUMAI KOTA
17.	DINAS PERHUBUNGAN	37.	KECAMATAN DUMAI SELATAN
18.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	38.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
19.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	39.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	40.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KOTA DUMAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**479.970.332.777,00**							**559.949.650.107,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**477.517.332.777,00**							**557.059.650.549,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**477.517.332.777,00**							**557.059.650.549,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**374.453.582.286,20**							**435.889.012.205,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**374.453.582.286,20**	-	-	-	-	-	-	**435.889.012.205,00**	-
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun*	-			20 Dokumen	2.022.228.187,70			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	3.765.799.805,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	489.602.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		437.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	105.665.281,50	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		211.330.563,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	41.115.754,50	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		82.231.509,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	52.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	38.961.173,50	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		77.922.347,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	876.911.533,20	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1.421.682.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	417.472.195,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1.430.133.086,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun*	-			16 Dokumen	370.465.992.446,50			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	427.730.464.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2719 Orang/bulan	370.014.599.840,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		425.930.464.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	75.509.559,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	138.519.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	41.489.420,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	37.480.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	108.857.315,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	49.537.312,50	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Perangkat Daerah yang Disusun*	-			10 Laporan	244.655.260,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	711.629.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	101.787.020,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		267.678.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	210.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		41.951.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	41.658.240,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	101.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		202.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	786.871.972,00			-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	2.148.758.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.765.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	147.010.430,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	40.350.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		80.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	21.782.450,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	7.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**374.453.582.286,20**	-	-	-	-	-	-	**435.889.012.205,00**	-
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10.880.208,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**374.453.582.286,20**	-	-	-	-	-	-	**435.889.012.205,00**	-
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	420.421.084,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	68.162.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		243.058.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			48 Laporan	703.032.704,00			-	-	ASN dan Non ASN	-	1.217.361.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN		16.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	82.310.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN		116.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	62.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN		124.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	556.222.704,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN		961.361.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara*	-			2 Unit	230.801.716,00			-	-	Laporan	-	315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	166.125.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan		145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	64.676.416,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					**100 %**	**102.263.750.490,80**							**119.780.638.344,00**	
		[Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan Sekolah Dasar]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12** **Iklim Inklusivitas SD** **Iklim Keamanan SD** **Iklim Kebhinekaan SD**	**73.91** **80.33** **81.8** **99.92**	**58.91** **74.33** **76.64** **99.64**	**61.41** **75.33** **77.3** **99.71**	**63.91** **76.33** **78.2** **99.79**	**102.263.750.490,80**	-	-	-	-	-	-	**119.780.638.344,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Dikelola*	-			113 Satuan Pendidikan	57.934.006.880,01			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan	-	67.558.152.021,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		2.310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				25 Paket	975.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		975.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2268 Peserta Didik	700.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				128 Orang	3.513.806.880,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		6.213.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1230 Orang	700.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		2.144.470.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				113 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		2.012.470.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				113 Satuan Pendidikan	45.870.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		38.022.612.021,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				290 Orang	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				290 Konten Digital	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				290 Orang	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	850.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				113 Komunitas	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				14 Paket	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	200.000.000,01	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1614 Paket	1.465.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				590 Orang	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				113 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15** **Iklim Inklusivitas SMP** **Iklim Keamanan SMP** **Iklim Kebinekaan SMP**	**75.01** **79.54** **82.07** **99.25**	**60.61** **73.03** **73.54** **96.45**	**63.01** **74.54** **74.57** **97.2**	**65.41** **75.54** **76.07** **97.94**	**102.263.750.490,80**	-	-	-	-	-	-	**119.780.638.344,00**	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Dikelola*	-			42 Satuan Pendidikan	31.849.861.488,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan	-	36.531.166.323,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	65.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	270.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				67 Orang	1.336.861.488,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		3.780.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				236 Orang	140.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				41 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				41 Satuan Pendidikan	25.374.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		20.237.166.323,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				50 Orang	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				104 Orang	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				130 Konten Digital	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		114.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				9 Dokumen	700.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				24 Komunitas	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				3 Kegiatan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				24 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				84 Orang	85.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				518 Paket	1.183.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				9 Paket	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan PAUD]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun** **Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4** **Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B**	**100** **62** **74.83**	**48.44** **52.42** **55.88**	**58.25** **59.06** **64.79**	**59** **62.64** **81.81**	**102.263.750.490,80**	-	-	-	-	-	-	**119.780.638.344,00**	-
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Dikelola*	-			13 Satuan Pendidikan	7.641.443.421,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan	-	9.170.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				9 Unit	290.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Didik	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				31 Orang	1.748.810.560,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		2.292.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				165 Orang	90.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				13 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				13 Satuan Pendidikan	4.107.632.861,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		3.145.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				76 Orang	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				50 Komunitas	45.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta didik	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		178.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				165 Orang	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				50 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Kesetaraan**	**67.12**	**37.26**	**42.24**	**47.22**	**102.263.750.490,80**	-	-	-	-	-	-	**119.780.638.344,00**	-
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dikelola*	-			13 Satuan Pendidikan	4.838.438.701,79			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan	-	6.520.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				16 Orang	250.973.760,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		760.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				11 Satuan Pendidikan	47.464.941,79	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				11 Satuan Pendidikan	3.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		3.385.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	590.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				130 Peserta Didik	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				4 unit	95.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	580.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN, Peserta Didik, Satuan Pendidikan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**					**100 %**	**400.000.000,00**							**890.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kurikulum Muatan Lokal]	**Persentase Satuan Pendidikan yang Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal**	**100**	**100**	**100**	**100**	**400.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**890.000.000,00**	-
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun*	-			1 Kurikulum	400.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Laporan	-	890.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Laporan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				444 Orang	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Laporan		690.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**					**-**	**100.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		[Meratanya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan]	**Indeks Pemerataan Guru SD** **Indeks Pemerataan Guru SMP**	**0.95** **1**	**0.56** **1**	**0.6** **1**	**0.7** **1**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**200.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	ASN		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**					**0 %**	**300.000.000,00**							**300.000.000,00**	
		[Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah]	**Terselenggaranya Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI)**	**1**	**1**	**1**	**1**	**300.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**300.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang disusun*	-			0 %	300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Siswa	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi				1 Bahasa	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Siswa		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.453.000.000,00**							**2.889.999.558,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.453.000.000,00**							**2.889.999.558,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**					**95 %**	**2.300.000.000,00**							**2.419.999.558,00**	
		[Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan]	**Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**	**5**	**6**	**3**	**5**	**2.300.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.419.999.558,00**	-
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya yang Dikelola*	-			6 Objek	220.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	699.999.558,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 Objek	220.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		699.999.558,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan*	-			3 Objek	390.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				3 Objek	390.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Adat yang Dibina*	-			1 Lembaga	1.690.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				8 Objek	1.690.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**					**95 %**	**60.000.000,00**							**160.000.000,00**	
		[Meningkatnya perkembangan kesenian tradisional]	**Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan**	**100**	**14.81**	**25.93**	**40.74**	**60.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**160.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Kesenian Dibina*	-			50 Orang	60.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**					**100 %**	**93.000.000,00**							**310.000.000,00**	
		[Terlestarikannya Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya]	**Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan**	**57.00**	**21.21**	**27.27**	**33.33**	**93.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**310.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan*	-			5 Objek	88.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				3 Objek	28.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-				5.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0004	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi				1 Objek	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN						**229.688.741.885,00**							**222.372.915.812,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**229.688.741.885,00**							**222.372.915.812,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**229.688.741.885,00**							**222.372.915.812,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**179.646.520.685,00**							**172.733.922.796,00**	
		[Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**179.646.520.685,00**	-	-	-	-	-	-	**172.733.922.796,00**	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			28 Dokumen	125.318.500,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	-	340.860.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	77.900.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		148.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	11.468.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		41.769.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2.570.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		22.155.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	890.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		18.458.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	890.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		18.458.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	9.850.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		32.670.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	21.750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		58.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	175.408.877.040,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	-	167.664.758.219,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1880 Orang/bulan	175.383.877.040,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		167.609.758.219,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			4 Dokumen	14.200.000,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	-	31.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	6.700.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		14.740.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	7.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*tersedianya dokumen/laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			1 Dokumen	69.992.500,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	-	175.983.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	69.992.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		175.983.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan administrasi Umum perangkat daerah*	-			3 Dokumen	433.554.645,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	-	968.528.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.252.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	96.382.445,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	13.740.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		30.228.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	27.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		60.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	215.180.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		385.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	27.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		60.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			3 Laporan	3.236.794.000,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	-	2.782.552.777,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	462.424.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		527.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	109.580.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		495.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.664.790.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		1.759.992.777,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			18 Unit	357.784.000,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	-	770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	357.784.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai		770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**49.011.721.200,00**							**46.880.682.516,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada Dinas Kesehatan]	**Cakupan penemuan kasus TB** **Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat** **Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna** **Persentase merokok penduduk 10-21 tahun** **Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat** **Presentase lanjut usia yang mandiri** **Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun** **Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun**	**0.6** **10** **100** **23.4** **66.67** **75** **83** **87** **92** **94**	**0** **100** **58.33** **6.97** **79.28** **81.12** **92**	**0.6** **100** **12.4** **23.4** **50** **58.33** **75** **80** **82** **92.5**	**0.6** **100** **12** **23.4** **50** **58.33** **76** **83** **84** **93**	**49.011.721.200,00**	-	-	-	-	-	**46.880.682.516,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP*	-			13 Sarana	5.410.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	-	3.034.406.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	120.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	130.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Padua Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				11 Unit	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				450 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				20 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	4.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		2.626.406.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				10 Paket	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		88.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP*	-			11 Sarana	41.976.737.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	-	42.570.276.316,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9849 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		176.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9849 Orang	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9470 Orang	93.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		154.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				32376 Orang	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		126.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				65121 Orang	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		88.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				236101 Orang	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29667 Orang	59.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		64.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				61862 Orang	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5368 Orang	55.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				628 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		93.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6619 Orang	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				13028 Orang	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HIBAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		385.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		198.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		279.644.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	155.675.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	175.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		385.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	39.075.737.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		38.252.531.896,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1326 Orang	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				585 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				8 Orang	22.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		24.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	91.125.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah sarana fasilitas Pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi*	-			11 Sarana	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	-	198.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				8 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		198.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan*	-			103 Sarana	1.524.983.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	-	1.078.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				18 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				75 Unit	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				11 Unit	850.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HIBAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				2 Dokumen	564.983.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		297.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					**85 %**	**575.500.000,00**							**1.615.343.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan pada Dinas Kesehatan]	**Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar** **Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar** **Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi**	**100** **5**	**100** **4.73** **60**	**100** **4.80** **60**	**100** **4.85** **70**	**575.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.615.343.400,00**	-
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan*	-			30 Tempat	25.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	-	27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang menerapkan aplikasi SDMK*	-			11 Sarana	550.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	-	1.587.843.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				12 Orang	504.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		1.444.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	46.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		143.763.400,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					**85 %**	**270.000.000,00**							**730.275.700,00**	
		[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman pada Dinas Kesehatan]	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman**	**90**	**54.45**	**55**	**60**	**270.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**730.275.700,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan*	-			118 Sarana	45.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	-	49.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				3 Dokumen	45.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		49.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan*	-			50 Sarana	60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	-	258.210.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		258.210.700,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M*	-			4 Dokumen	75.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				4 Dokumen	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah dokumen pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan*	-			1 Dokumen	60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan*	-			1 Dokumen	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	-	202.565.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				30 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		202.565.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**4,68 %**	**185.000.000,00**							**412.691.400,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.pada Dinas Kesehatan]	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**	**75.5**	**67.69**	**69.5**	**71.5**	**185.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**412.691.400,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kelurahan siaga aktif*	-			36 Kelurahan	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				6 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah tangga yang melaksanakan PHBS*	-			42579 RT	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				42579 Keluarga	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Posyandu mandiri*	-			202 Posyandu	85.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	-	247.691.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	85.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai		247.691.400,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD						**187.477.295.763,00**							**140.834.789.672,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**187.477.295.763,00**							**140.834.789.672,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**187.477.295.763,00**							**140.834.789.672,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**117.725.693.025,00**							**124.697.283.799,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD)]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**117.725.693.025,00**	-	-	-	-	-	-	**124.697.283.799,00**	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			3 Dokumen	55.000.000,00			-	-	RSUD Kota Dumai	-	132.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	55.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai		132.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			2 Laporan	13.925.000,00			-	-	RSUD Kota Dumai	-	49.500.000,00	RSUD
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai		22.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.925.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai		27.500.000,00	RSUD
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokuman/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	25.000.000,00			-	-	RSUD Kota Dumai	-	99.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai		99.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	10.000.000,00			-	-	RSUD Kota Dumai	-	33.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai		33.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	25.000.000,00			-	-	RSUD Kota Dumai	-	165.000.000,00	RSUD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai		165.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			3 Laporan	13.571.286.000,00			-	-	Pegawai RSUD dan Masyarakat Kota Dumai	-	17.342.977.223,00	RSUD
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5.167.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai RSUD dan Masyarakat Kota Dumai		5.900.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai RSUD dan Masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8.379.286.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai RSUD dan Masyarakat Kota Dumai		11.332.977.223,00	RSUD
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	212.500.000,00			-	-	RSUD Kota Dumai	-	467.500.000,00	RSUD
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	60.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai		82.500.000,00	RSUD
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	152.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai		385.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Unit Kerja untuk Peningkatan Pelayanan BLUD yang tersedia*	-			1 Unit Kerja	103.812.982.025,00			-	-	RSUD Kota Dumai	-	106.408.306.576,00	RSUD
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	103.812.982.025,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	-	RSUD Kota Dumai		106.408.306.576,00	RSUD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**69.751.602.738,00**							**16.137.505.873,00**	
		[Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau pada RSUD]	**Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan**	**91**	**85**	**85**	**85**	**69.751.602.738,00**	-	-	-	-	-	-	**16.137.505.873,00**	-
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah untuk UKM dan UKP*	-			1 Sarana	68.881.576.018,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	13.629.705.873,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				2 Unit	46.281.576.018,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		0,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				2 Unit	3.500.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		3.300.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	3.000.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		8.679.705.873,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				300 Unit	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		825.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				21 Unit	600.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		825.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				21 Paket	15.000.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		0,00	RSUD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah RS yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP*	-			1 Sarana	750.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	1.157.800.000,00	RSUD
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		217.800.000,00	RSUD
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		330.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-			1 Dokumen	70.026.720,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	1.300.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	70.026.720,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		1.300.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan*	-			1 Sarana	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	50.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	RSUD
		PUSKESMAS DUMAI KOTA						**2.542.813.000,00**							**2.797.094.300,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.542.813.000,00**							**2.797.094.300,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.542.813.000,00**							**2.797.094.300,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**2.542.813.000,00**							**2.797.094.300,00**	
		[Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Dumai Kota]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.542.813.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.797.094.300,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 unit kerja	2.542.813.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	-	2.797.094.300,00	PUSKESMAS DUMAI KOTA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.542.813.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-	masyarakat Kota Dumai		2.797.094.300,00	PUSKESMAS DUMAI KOTA
		PUSKESMAS DUMAI BARAT						**1.750.000.000,00**							**1.925.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.750.000.000,00**							**1.925.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.750.000.000,00**							**1.925.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**1.750.000.000,00**							**1.925.000.000,00**	
		[Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Dumai Barat]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.750.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.925.000.000,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 unit kerja	1.750.000.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	-	1.925.000.000,00	PUSKESMAS DUMAI BARAT
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.750.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-	masyarakat Kota Dumai		1.925.000.000,00	PUSKESMAS DUMAI BARAT
		PUSKESMAS BUKIT KAPUR						**1.786.500.000,00**							**1.965.150.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.786.500.000,00**							**1.965.150.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.786.500.000,00**							**1.965.150.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**1.786.500.000,00**							**1.965.150.000,00**	
		[Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bukit kapur]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.786.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.965.150.000,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 unit kerja	1.786.500.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	-	1.965.150.000,00	PUSKESMAS BUKIT KAPUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.786.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-	masyarakat Kota Dumai		1.965.150.000,00	PUSKESMAS BUKIT KAPUR
		PUSKESMAS MEDANG KAMPAI						**1.429.618.000,00**							**1.572.579.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.429.618.000,00**							**1.572.579.800,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.429.618.000,00**							**1.572.579.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**1.429.618.000,00**							**1.572.579.800,00**	
		[Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Medang Kampai]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.429.618.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.572.579.800,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 unit kerja	1.429.618.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	-	1.572.579.800,00	PUSKESMAS MEDANG KAMPAI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.429.618.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-	masyarakat Kota Dumai		1.572.579.800,00	PUSKESMAS MEDANG KAMPAI
		PUSKESMAS BUMI AYU						**1.520.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.520.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.520.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**1.520.000.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bumi Ayu]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.520.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 unit kerja	1.520.000.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	-	0,00	PUSKESMAS BUMI AYU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.520.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-	masyarakat Kota Dumai		0,00	PUSKESMAS BUMI AYU
		PUSKESMAS BUKIT TIMAH						**966.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**966.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**966.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**966.000.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bukit Timah]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**966.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 unit kerja	966.000.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	-	0,00	PUSKESMAS BUKIT TIMAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	966.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-	masyarakat Kota Dumai		0,00	PUSKESMAS BUKIT TIMAH
		PUSKESMAS PURNAMA						**1.650.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.650.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.650.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**1.650.000.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Purnama]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.650.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 unit kerja	1.650.000.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	-	0,00	PUSKESMAS PURNAMA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.650.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-	masyarakat Kota Dumai		0,00	PUSKESMAS PURNAMA
		PUSKESMAS JAYA MUKTI						**3.252.098.850,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.252.098.850,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.252.098.850,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**3.252.098.850,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Jaya Mukti]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.252.098.850,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja	3.252.098.850,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	-	0,00	PUSKESMAS JAYA MUKTI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.252.098.850,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-	masyarakat Kota Dumai		0,00	PUSKESMAS JAYA MUKTI
		PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR						**1.824.950.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.824.950.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.824.950.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**1.824.950.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Bukit Kayu Kapur]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.824.950.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 unit kerja	1.824.950.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	-	0,00	PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.824.950.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-	masyarakat Kota Dumai		0,00	PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR
		UPT LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A						**214.024.800,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**214.024.800,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**214.024.800,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**214.024.800,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Air Kelas A]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**214.024.800,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 unit kerja	214.024.800,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	-	0,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	214.024.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS	-	-	masyarakat Kota Dumai		0,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A
		PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN						**3.063.345.000,00**							**3.369.679.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.063.345.000,00**							**3.369.679.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.063.345.000,00**							**3.369.679.500,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**3.063.345.000,00**							**3.369.679.500,00**	
		[Terlaksananya penunjang urusan Bidang Kesehatan pada Puskesmas Sungai Sembilan]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.063.345.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.369.679.500,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 unit kerja	3.063.345.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	-	3.369.679.500,00	PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.063.345.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-	masyarakat Kota Dumai		3.369.679.500,00	PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM						**431.998.805.340,67**							**278.407.351.724,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**431.998.805.340,67**							**278.407.351.724,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**431.998.805.340,67**							**278.407.351.724,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**14.241.705.356,00**							**22.768.295.040,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**14.241.705.356,00**	-	-	-	-	-	-	**22.768.295.040,00**	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			16 Dokumen	70.000.000,00			-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	-	340.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			2 Dokumen	10.598.592.400,00			-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	-	8.668.295.040,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				160 Orang/bulan	10.588.592.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		8.638.295.040,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	20.000.000,00			-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	-	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	375.109.956,00			-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	-	2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	27.887.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	92.822.462,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	20.399.994,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	14.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	175.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 Laporan	2.145.000.000,00			-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	-	5.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.320.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			150 Unit	1.033.003.000,00			-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	-	5.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	363.003.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				17 Unit	600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					**75.14 %**	**230.060.926.557,40**							**59.589.056.684,00**	
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir]	**Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir**	**60**	**0**	**45**	**48**	**230.060.926.557,40**	-	-	-	-	-	-	**59.589.056.684,00**	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Pengendalian Air yang Dioptimalkan*	-			415 KM	229.560.926.557,40			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	59.589.056.684,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				23 Unit	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**230.060.926.557,40**	-	-	-	-	-	-	**59.589.056.684,00**	-
	1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir														
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi				5 Unit	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir														
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				9 Unit	918.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir]	**Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir**	**60**	**0**	**45**	**48**	**230.060.926.557,40**	-	-	-	-	-	-	**59.589.056.684,00**	-
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				64 KM	17.237.077.271,43	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				1.6 KM	203.405.849.285,97	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		6.589.056.684,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi														
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				2 Unit	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				4 Unit	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				2.5 KM	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	2.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	**Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas**	**65**	**0**	**20**	**23**	**230.060.926.557,40**	-	-	-	-	-	-	**59.589.056.684,00**	-
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			2 KM	500.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**					**4 %**	**53.681.903.830,11**							**48.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**	**65**	**0**	**50**	**53**	**53.681.903.830,11**	-	-	-	-	-	-	**48.000.000.000,00**	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara*	-			21 Sistem Drainase Perk	53.681.903.830,11			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	48.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				4 Sistem Drainase Perkotaan	8.049.192.663,08	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				4 Sistem Drainase Perkotaan	45.632.711.167,03	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**66.42 %**	**133.864.269.597,16**							**147.400.000.000,00**	
		[Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	**Tingkat Kemantapan Jalan**	**71.86**	**51.45**	**54.91**	**58.15**	**133.864.269.597,16**	-	-	-	-	-	-	**147.400.000.000,00**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik*	-			25 KM	133.864.269.597,16			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	147.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				2 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1 KM	428.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				15 KM	110.475.439.300,75	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		109.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				10 KM	9.537.072.823,19	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				20 Meter	6.237.072.823,22	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				36 Meter	6.185.884.650,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		17.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
5.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					**85 %**	**150.000.000,00**							**650.000.000,00**	
		[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli**	**26.98**	**0**	**9.52**	**12.70**	**150.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**650.000.000,00**	-
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan*	-			60 Orang	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				25 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A						**10.644.925.729,09**							**4.275.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.644.925.729,09**							**4.275.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**10.644.925.729,09**							**4.275.000.000,00**	
1.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**66.42 %**	**10.644.925.729,09**							**4.275.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman pada wilayah Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Kota]	**Tingkat Kemantapan Jalan**	**71.86**	**51.45**	**54.91**	**58.15**	**10.644.925.729,09**	-	-	-	-	-	-	**4.275.000.000,00**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)*	-			3 KM	10.644.925.729,09			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	4.275.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				1 KM	10.369.925.729,09	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		4.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				2 Meter	275.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		275.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A
		UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A						**11.284.159.805,18**							**4.454.866.648,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.284.159.805,18**							**4.454.866.648,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**11.284.159.805,18**							**4.454.866.648,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**66.42 %**	**11.284.159.805,18**							**4.454.866.648,00**	
		[Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman pada wilayah Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Dumai Barat]	**Tingkat Kemantapan Jalan**	**71.86**	**51.45**	**54.91**	**58.15**	**11.284.159.805,18**	-	-	-	-	-	-	**4.454.866.648,00**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)*	-			3 KM	11.284.159.805,18			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	4.454.866.648,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				1 KM	10.829.293.157,18	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		4.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0.21 KM	146.750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		146.750.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang jembatan yang dibangun				1.71 Meter	308.116.648,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		308.116.648,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A
		UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A						**12.826.250.888,06**							**4.088.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.826.250.888,06**							**4.088.500.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**12.826.250.888,06**							**4.088.500.000,00**	
1.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**66.42 %**	**12.826.250.888,06**							**4.088.500.000,00**	
		[Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman pada wilayah Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Dumai Selatan]	**Tingkat Kemantapan Jalan**	**71.86**	**51.45**	**54.91**	**58.15**	**12.826.250.888,06**	-	-	-	-	-	-	**4.088.500.000,00**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)*	-			3 KM	12.826.250.888,06			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	4.088.500.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				1 KM	12.737.750.888,06	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		4.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0.07 KM	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				0.21 Meter	38.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		38.500.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG						**108.858.666.777,00**							**56.739.450.599,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**107.958.666.777,00**							**56.364.450.599,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**107.958.666.777,00**							**56.364.450.599,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**12.385.909.207,50**							**7.489.483.456,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**12.385.909.207,50**	-	-	-	-	-	-	**7.489.483.456,00**	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			11 Dokumen	90.422.187,50			-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-	190.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	28.640.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.202.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	11.579.687,50	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			1 Dokumen	10.852.932.338,00			-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-	5.448.915.480,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/bulan	10.842.938.200,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		5.438.915.480,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9.994.138,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	11.418.021,00			-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.830.804,50	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	4.587.216,50	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	354.267.741,00			-	-	Masyarakat Kota Dumai	-	770.399.926,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.297.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai		5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	33.784.768,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai		160.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	24.919.875,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai		35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	24.991.635,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai		40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.967.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai		3.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	35.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	206.607.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai		450.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	18.699.963,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai		67.399.926,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			8 Unit	80.000.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-	561.168.050,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	9.375.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		75.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	70.625.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		486.168.050,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 Laporan	829.429.520,00			-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-	294.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	694.429.520,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		294.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			23 Unit	167.439.400,00			-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-	205.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	15.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	132.579.400,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	19.860.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		15.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					**21,38 %**	**9.989.128.000,00**							**24.024.967.143,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	**Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak** **Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)**	**29.36** **8.70**	**0.69** **14.67**	**19.30** **2.09**	**21.38** **3.46**	**9.989.128.000,00**	-	-	-	-	-	-	**24.024.967.143,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan*	-			2383 SR	9.989.128.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	24.024.967.143,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				85 Unit	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		1.750.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				5 Dokumen	545.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				7 Unit	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		1.900.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1760 SR	8.144.128.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		19.674.967.143,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**					**76,66 %**	**12.000.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya layanan persampahan di daerah Kota Dumai]	**Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**	**78.04**	**76.17**	**76.17**	**76.66**	**12.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan*	-			100 Ton/hari	12.000.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				100 Ton/hari	12.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					**77,59 %**	**1.000.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman** **Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak**	**2.827** **68.93**	**0** **82.41**	**0** **79.93**	**0** **77.59**	**1.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja*	-			1000 Rumah Tangga	1.000.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				1000 Rumah Tangga	351.813.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	348.186.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				215 Rumah Tangga	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					**37 %**	**71.383.629.569,50**							**23.900.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	**Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik**	**85.98**	**92.82**	**91.36**	**87.85**	**71.383.629.569,50**	-	-	-	-	-	-	**23.900.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*	-			16 Kegiatan	71.383.629.569,50			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	23.900.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				16 Bangunan Gedung	15.350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		4.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				28 Dokumen	56.033.629.569,50	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		19.400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**					**34 %**	**1.200.000.000,00**							**950.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	**Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kota Dumai**	**42**	**30**	**32**	**34**	**1.200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**950.000.000,00**	-
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang*	-			1 Sistem Informasi	300.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kasus Yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang*	-			4 Dokumen	800.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	750.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal														
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**900.000.000,00**							**375.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**900.000.000,00**							**375.000.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**					**20 %**	**100.000.000,00**							**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan]	**Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi**	**100**	**80**	**100**	**20**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**150.000.000,00**	-
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**					**20 %**	**800.000.000,00**							**225.000.000,00**	
		[Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah]	**Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah**	**100**	**80**	**100**	**20**	**800.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**225.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen	800.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	225.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	700.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**7.134.335.363,00**							**6.676.627.472,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.134.335.363,00**							**6.676.627.472,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**7.134.335.363,00**							**6.676.627.472,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**4.460.835.363,00**							**4.760.377.930,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.460.835.363,00**	-	-	-	-	-	-	**4.760.377.930,00**	-
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			7 Dokumen	7.031.500,00			-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	-	16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.054.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	5.977.500,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			2 Laporan	3.309.539.860,00			-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	-	2.942.892.080,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.294.435.160,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		2.926.892.080,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	15.104.700,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	13.457.613,00			-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	-	24.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	5.152.381,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	5.152.381,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3.152.851,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	181.166.665,00			-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	-	713.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.875.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	36.486.585,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	19.944.720,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	15.103.917,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	104.256.443,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 Laporan	817.379.725,00			-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	-	819.485.850,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.708.759,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		5.485.850,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	18.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	31.719.870,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		14.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	764.951.096,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		780.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			35 Unit	132.260.000,00			-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	-	245.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	11.400.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		160.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	106.720.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	14.140.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait		35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					**100 %**	**316.000.000,00**							**110.000.000,00**	
		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah]	**Persentase warga negara korban bencana atau terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni**	**100**	**100**	**100**	**100**	**316.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**110.000.000,00**	-
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	-			2 Dokumen	96.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait	-	40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	76.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota*	-			4 Unit	200.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait	-	70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				4 Unit Rumah	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait		70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen	20.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah				4 Rumah Tangga	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					**-**	**1.220.000.000,00**							**800.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	**Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani**	**86.36**	**70.15**	**70.42**	**74.54**	**1.220.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**800.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha*	-			1 Dokumen	200.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Luasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	-			2 Ha	1.020.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait	-	700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				4 Unit Rumah	220.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				2 Ha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				4 Unit	280.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**					**100 %**	**667.500.000,00**							**70.000.000,00**	
		[Meningkatnya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni]	**Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)**	**15.34**	**15.677**	**15.62**	**15.57**	**667.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**70.000.000,00**	-
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	-			13 Unit	667.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait	-	70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				9 Unit Rumah	367.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				4 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait		70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**					**100 %**	**450.000.000,00**							**886.249.542,00**	
		[Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan]	**Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**	**15.15**	**0**	**0**	**0.60**	**450.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**886.249.542,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan*	-			1 Lokasi	450.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait	-	886.249.542,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				1 Lokasi	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait		886.249.542,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**100 %**	**20.000.000,00**							**50.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan PSU dengan Tingkat Kemampuan Kecil]	**Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU**	**60.87**	**45.65**	**45.65**	**50.00**	**20.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	*Jumlah Laporan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan PSU Tingkat Kemampuan Kecil*	-			1 Laporan	20.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait	-	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Disperkim dan stakeholder terkait		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**15.197.524.640,00**							**13.114.088.453,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.197.524.640,00**							**13.114.088.453,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**15.197.524.640,00**							**13.114.088.453,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**13.868.173.140,00**							**10.715.868.453,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (SATPOL PP)]	**Persentase Penunjang Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (SATPOL PP)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**13.868.173.140,00**	-	-	-	-	-	-	**10.715.868.453,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	-			8 Dokumen	14.500.000,00			-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	-	32.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	4.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		9.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			7 Dokumen	11.387.845.120,00			-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	-	6.732.768.453,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				122 Orang/bulan	11.375.309.320,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		6.704.768.453,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	7.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2.485.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	14.000.000,00			-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	-	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	4.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daeerah*	-			14 Dokumen	276.944.800,00			-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	-	638.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	28.194.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	40.000.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		28.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	13.750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-			14 Unit	161.289.600,00			-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	-	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	161.289.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			37 Laporan	1.759.720.720,00			-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	-	2.807.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	199.247.880,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	115.175.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.440.297.840,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		2.397.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			67 Unit	253.872.900,00			-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	-	450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	19.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	218.220.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	16.652.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 %**	**1.329.351.500,00**							**2.398.220.000,00**	
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum]	**Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.329.351.500,00**	-	-	-	-	-	-	**2.398.220.000,00**	-
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai*	-			5 Dokumen	717.351.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	1.653.220.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	110.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				5 laporan	527.351.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		758.220.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada]	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.329.351.500,00**	-	-	-	-	-	-	**2.398.220.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Laporan Hasil Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota*	-			2 Laporan	612.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	745.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	612.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		745.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						**10.028.932.745,00**							**68.175.832.916,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.028.932.745,00**							**68.175.832.916,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**10.028.932.745,00**							**68.175.832.916,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**9.081.710.828,00**							**61.214.851.916,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (DAMKAR)]	**Persentase Penunjang Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (DAMKAR)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.081.710.828,00**	-	-	-	-	-	-	**61.214.851.916,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Penggganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	3.251.048,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Peyelamatan	-	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.251.048,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Peyelamatan		5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Peyelamatan		5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	4.668.944.480,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	3.700.720.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	4.666.519.480,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		3.688.720.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		6.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.425.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		6.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang MIlik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	2.110.088,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	11.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		6.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.110.088,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket dalam kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			1 Paket	11.322.640,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	436.312.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	11.322.640,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		436.312.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	656.658.000,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	2.808.396.616,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		85.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	440.178.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		2.433.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	162.980.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		254.796.616,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			3 Unit	1.355.596.452,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	47.513.082.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1.300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		47.053.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12.748.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		399.582.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	42.847.952,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			2 laporan	1.965.698.120,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	5.842.340.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	65.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		80.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.900.698.120,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		5.762.340.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.081.710.828,00**	-	-	-	-	-	-	**61.214.851.916,00**	-
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			18 Unit	418.130.000,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	893.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		19.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (DAMKAR)]	**Persentase Penunjang Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (DAMKAR)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.081.710.828,00**	-	-	-	-	-	-	**61.214.851.916,00**	-
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	375.130.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		844.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**					**100 %**	**947.221.917,00**							**6.960.981.000,00**	
		[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	**Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran** **Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**947.221.917,00**	-	-	-	-	-	-	**6.960.981.000,00**	-
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pencegahaan Pengendalian Pemadaman Peneyelamanatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			16 Dokumen	692.116.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	5.883.650.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	46.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		225.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				10 Orang	100.816.750,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		2.315.150.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**947.221.917,00**	-	-	-	-	-	-	**6.960.981.000,00**	-
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen	108.249.750,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	**Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran** **Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**947.221.917,00**	-	-	-	-	-	-	**6.960.981.000,00**	-
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				20 Unit	100.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		1.891.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				50 Keluarga	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**947.221.917,00**	-	-	-	-	-	-	**6.960.981.000,00**	-
	1.05.04.2.01.0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	221.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		802.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	**Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran** **Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**947.221.917,00**	-	-	-	-	-	-	**6.960.981.000,00**	-
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen Inspkesi Peralatan Proteksi Kebakaran*	-			1 Dokumen	2.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Jumlah Dokumen Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran*	-			1 Dokumen	179.309.417,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	133.331.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				150 Orang	99.309.417,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				36 Desa/Kelurahan	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		83.331.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia*	-			1 Dokumen	73.296.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	924.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	19.796.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		324.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				6 Unit	53.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		600.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**7.143.456.360,00**							**13.695.232.100,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.143.456.360,00**							**13.695.232.100,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**7.143.456.360,00**							**13.695.232.100,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**6.537.456.360,00**							**8.593.732.100,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)]	**Persentase Penunjang Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.537.456.360,00**	-	-	-	-	-	-	**8.593.732.100,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			12 dokumen	12.550.000,00			-	-	ASN	-	76.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		19.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		16.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		11.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		9.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		19.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen / Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			8 Dokumen	4.329.762.120,00			-	-	ASN	-	3.644.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	4.319.486.720,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		3.600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	4.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		23.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				6 Dokumen	5.775.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			6 Laporan	26.950.000,00			-	-	ASN	-	37.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	3.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		9.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		7.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	20.850.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		19.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen / Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			1 dokumen	32.000.000,00			-	-	ASN	-	235.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	21.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		112.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	11.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		123.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			3 dokumen	252.500.000,00			-	-	ASN	-	1.093.860.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		72.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		217.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		28.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		9.860.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	170.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		485.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		156.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			3 Unit	190.537.440,00			-	-	ASN	-	214.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		14.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	182.037.440,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			3 Laporan	1.254.816.800,00			-	-	ASN	-	2.334.302.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	71.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		171.802.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	94.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		182.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.089.316.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		1.980.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Unit	438.340.000,00			-	-	ASN	-	958.570.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	331.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		833.570.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	106.540.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**85 %**	**606.000.000,00**							**5.101.500.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana]	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**606.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.101.500.000,00**	-
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*	-			2600 Orang	40.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat	-	256.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				2600 Orang	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		256.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat]	**Persentase penanganan tanggap darurat bencana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**606.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.101.500.000,00**	-
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Dokumen pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	-			4 Dokumen	217.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat	-	1.378.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				3 Kegiatan	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		145.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				70 Unit	12.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		197.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				800 Orang	23.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		95.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				100 Keluarga	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				7 Kawasan	17.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				10 Orang	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		140.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	32.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		140.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	27.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		76.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				2 laporan	6.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				7 Kawasan	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah Dokumen pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*	-			4 Dokumen	175.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat	-	1.808.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		39.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	61.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		175.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	3.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		198.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				20 Orang	14.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				20 Orang	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		372.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		73.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	78.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana]	**Persentase Penanganan Pasca Bencana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**606.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.101.500.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah Dokumen Penaatan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	-			10 dokumen	173.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat	-	1.658.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	45.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	9.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		68.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	15.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		87.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				26 Orang	22.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		285.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				3 Kegiatan	16.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		340.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota														
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				2 Laporan	9.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		108.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	23.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	8.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	INFRASTRUKTUR 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat		165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						**16.298.408.501,00**							**14.982.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.401.224.821,00**							**12.382.500.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**14.401.224.821,00**							**12.382.500.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**6.717.229.920,00**							**7.955.000.000,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa]	**Persentase Penunjang Urusan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.717.229.920,00**	-	-	-	-	-	-	**7.955.000.000,00**	-
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			11 Dokumen	8.250.000,00			-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai	-	15.300.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		2.500.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		2.100.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		2.100.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		2.100.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		2.100.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	1.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		2.300.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		2.100.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			2 Dokumen	5.461.415.040,00			-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai	-	6.004.200.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	5.459.315.040,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		6.000.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		2.100.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		2.100.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			2 Laporan	18.000.000,00			-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai	-	27.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	18.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		27.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	180.100.000,00			-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai	-	451.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		3.500.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	33.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		80.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	17.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		40.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		30.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		17.500.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		260.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			119 Unit	170.000.000,00			-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai	-	175.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				110 Unit	71.214.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	98.786.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 Laporan	641.964.880,00			-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai	-	787.500.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		2.500.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	49.410.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		60.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		25.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	581.554.880,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			62 Unit	237.500.000,00			-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai	-	495.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	17.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	68.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	12.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		35.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	140.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai		210.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					**100 %**	**993.869.280,00**							**970.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan sosial]	**Persentase SDM kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial**	**100**	**100**	**100**	**100**	**993.869.280,00**	-	-	-	-	-	-	**970.000.000,00**	-
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen	5.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-	10.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		10.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan*	-			100 %	988.869.280,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-	960.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6555 Keluarga	51.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Lembaga	389.660.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	25.180.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		55.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				81 Orang	522.229.280,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		605.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**					**-**	**5.000.000,00**							**20.000.000,00**	
		[Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan]	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**20.000.000,00**	-
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	*Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal*	-			100 %	5.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Warga Negara Migran	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Warga Negara Migran		20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					**100 %**	**874.355.001,00**							**1.337.500.000,00**	
		[Meningkatnya rehabilitasi sosial]	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial**	**100**	**100**	**100**	**100**	**874.355.001,00**	-	-	-	-	-	-	**1.337.500.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti*	-			100 %	497.521.914,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	965.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	28.098.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Orang	20.942.750,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				85 Orang	140.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Orang	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Orang	142.381.664,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	6.160.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	2.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		10.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	5.360.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	62.717.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	14.890.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Orang	56.972.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	2.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		10.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial*	-			100 %	376.833.087,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	372.500.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	13.224.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	195.141.772,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	13.102.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		25.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	143.775.840,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	2.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		10.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	669.475,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		10.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				1 Dokumen	8.420.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		7.500.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					**100 %**	**5.295.972.000,00**							**1.110.000.000,00**	
		[Persentase Penerima Manfaat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial]	**Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.295.972.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.110.000.000,00**	-
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Persentase anak terlantar yang dipelihara*	-			100 %	47.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	110.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	7.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		30.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		30.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang terdata*	-			100 %	5.248.472.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				135761 Orang	52.890.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5876 Orang	5.108.582.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				30530 Usulan	37.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					**100 %**	**478.534.870,00**							**915.000.000,00**	
		[Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana]	**Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**478.534.870,00**	-	-	-	-	-	-	**915.000.000,00**	-
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	136.686.020,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Korban Bencana Alam dan Sosial	-	365.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	42.544.750,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Korban Bencana Alam dan Sosial		150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	48.275.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Korban Bencana Alam dan Sosial		100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	30.866.270,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Korban Bencana Alam dan Sosial		75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Korban Bencana Alam dan Sosial		20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Korban Bencana Alam dan Sosial		20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Masyarakat yang diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*	-			100 %	341.848.850,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Kampung Siaga Bencana, Taruna Siaga Bencana	-	550.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	53.126.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Kampung Siaga Bencana, Taruna Siaga Bencana		100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				41 Orang	288.722.850,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Kampung Siaga Bencana, Taruna Siaga Bencana		450.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**					**100 %**	**36.263.750,00**							**75.000.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan]	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**36.263.750,00**	-	-	-	-	-	-	**75.000.000,00**	-
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase taman makam pahlawan nasional kab/kota yang terpelihara*	-			100 %	36.263.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Taman Makam Pahlawan Nasional	-	75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				55 Makam	36.263.750,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Taman Makam Pahlawan Nasional		75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.897.183.680,00**							**2.600.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**1.897.183.680,00**							**2.600.000.000,00**	
1.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**					**100 %**	**133.722.550,00**							**500.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**Persentase Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahnya**	**100**	**100**	**100**	**100**	**133.722.550,00**	-	-	-	-	-	-	**500.000.000,00**	-
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar*	-			100 %	133.722.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Kelurahan	-	500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				36 Dokumen	58.780.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Kelurahan		200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				36 Dokumen	74.942.550,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Kelurahan		300.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**					**-**	**1.763.461.130,00**							**2.100.000.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan]	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang Aktif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.763.461.130,00**	-	-	-	-	-	-	**2.100.000.000,00**	-
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.763.461.130,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	-	2.100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				36 Dokumen	817.096.380,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				36 Lembaga	737.606.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				36 Laporan	45.872.750,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				36 Laporan	60.300.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 Keluarga	57.586.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	45.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		DINAS TENAGA KERJA						**8.238.105.108,00**							**11.547.165.708,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.238.105.108,00**							**11.547.165.708,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**8.238.105.108,00**							**11.547.165.708,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**5.300.110.958,00**							**5.788.903.708,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja]	**Persentase Penunjang Urusan Bidang Tenaga Kerja**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.300.110.958,00**	-	-	-	-	-	-	**5.788.903.708,00**	-
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			2 Dokumen	62.500.000,00			-	-	ASN DISNAKER KOTA DUMAI	-	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	57.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DISNAKER KOTA DUMAI		16.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DISNAKER KOTA DUMAI		14.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	4.544.547.000,00			-	-	ASN DISNAKER KOTA DUMAI	-	4.704.150.880,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	4.539.547.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN DISNAKER KOTA DUMAI		4.694.150.880,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DISNAKER KOTA DUMAI		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	5.000.000,00			-	-	Administrasi Perkantoran	-	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Perkantoran		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	130.426.563,00			-	-	ASN DISNAKER KOTA DUMAI	-	342.168.428,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DISNAKER KOTA DUMAI		17.306.700,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	27.901.563,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DISNAKER KOTA DUMAI		80.005.752,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DISNAKER KOTA DUMAI		32.197.600,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DISNAKER KOTA DUMAI		7.559.876,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.525.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DISNAKER KOTA DUMAI		5.098.500,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	75.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DISNAKER KOTA DUMAI		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			3 Laporan	446.637.395,00			-	-	ASN Disnaker Kota Dumai	-	472.584.400,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disnaker Kota Dumai		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disnaker Kota Dumai		143.431.200,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	244.137.395,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disnaker Kota Dumai		324.153.200,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	111.000.000,00			-	-	ASN Disnaker Kota Dumai	-	230.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	95.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disnaker Kota Dumai		190.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	16.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disnaker Kota Dumai		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**					**100 %**	**49.320.000,00**							**142.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terkelolanya informasi tenaga kerja]	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	**90**	**100**	**90**	**90**	**49.320.000,00**	-	-	-	-	-	-	**142.000.000,00**	-
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase sinkronisasi perencanaan kebutuhan pelatihan dengan Rencana Tenaga Kerja*	-			75 %	49.320.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perencanaan Kebutuhan Pelatihan dengan Rencana Tenaga Kerja Kota Dumai	-	142.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				40 Orang	49.320.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perencanaan Kebutuhan Pelatihan dengan Rencana Tenaga Kerja Kota Dumai		142.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					**10 %**	**145.453.000,00**							**1.215.000.000,00**	
		[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	**Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya**	**10**	**10**	**10**	**10**	**145.453.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.215.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja berbasis ketenagakerjaan dan kompetensi*	-			10 Orang	81.133.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai Kota Dumai	-	1.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				10 Orang	51.133.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Persentase Produktivitas pada perusahaan kecil*	-			100 %	24.840.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	-	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				20 Perusahaan	24.840.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja*	-			25 %	39.480.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	-	65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	39.480.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**					**-**	**262.393.750,00**							**790.000.000,00**	
		[Meningkatnya penempatan tenaga kerja]	**Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan**	**10**	**35**	**10**	**10**	**262.393.750,00**	-	-	-	-	-	-	**790.000.000,00**	-
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	126.313.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pencari Kerja yang ditempatkan Terdaftar di Disnaker Kota Dumai Kota Dumai	-	430.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				50 Orang	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pencari Kerja yang ditempatkan Terdaftar di Disnaker Kota Dumai Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				20 Orang	49.660.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pencari Kerja yang ditempatkan Terdaftar di Disnaker Kota Dumai Kota Dumai		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				50 Orang	51.653.750,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pencari Kerja yang ditempatkan Terdaftar di Disnaker Kota Dumai Kota Dumai		220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase Meningkatnya pelayanan Informasi Pasar Kerja*	-			85 %	100.120.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Aplikasi Ketenagkerjaan Berbasis Komputer Kota Dumai	-	220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Aplikasi Ketenagkerjaan Berbasis Komputer Kota Dumai		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				50 Orang	50.120.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Aplikasi Ketenagkerjaan Berbasis Komputer Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran*	-			85 %	35.960.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai Kota Dumai	-	140.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				30 Orang	26.080.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				20 Orang	9.880.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai Kota Dumai		90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**					**95 %**	**2.480.827.400,00**							**3.611.262.000,00**	
		[Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi]	**Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial**	**20**	**85**	**20**	**20**	**2.480.827.400,00**	-	-	-	-	-	-	**3.611.262.000,00**	-
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan pembinaan hubungan industrial*	-			85 %	83.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai Kota Duma	-	456.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				5 Perusahaan	7.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai Kota Duma		81.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				2 Perusahaan	7.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai Kota Duma		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	68.600.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai Kota Duma		325.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial*	-			100 %	2.397.227.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai Kota Dumai	-	3.155.262.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				15 Perkara	10.800.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai Kota Dumai		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				20 Perkara	24.365.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai Kota Dumai		36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	4.722.400,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai Kota Dumai		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	67.300.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				13500 Orang	2.290.040.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai Kota Dumai		2.749.262.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**6.714.280.454,00**							**6.705.245.242,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.714.280.454,00**							**6.705.245.242,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**6.714.280.454,00**							**6.705.245.242,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**5.654.280.454,00**							**5.581.045.462,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak]	**Persentase Penunjang Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.654.280.454,00**	-	-	-	-	-	-	**5.581.045.462,00**	-
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			5 Dokumen	11.140.260,00			-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	12.254.286,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6.199.960,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		6.819.956,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	4.940.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		5.434.330,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			1 Dokumen	4.758.020.120,00			-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	4.598.601.920,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	4.758.020.120,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		4.598.601.920,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	138.708.734,00			-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	152.579.606,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.913.210,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		4.304.531,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		13.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	17.499.899,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		19.249.888,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.864.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		4.250.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	85.931.625,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		94.524.787,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			4 Laporan	690.816.840,00			-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	756.455.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	87.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		95.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	108.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		118.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	582.729.840,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		637.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			11 Unit	55.594.500,00			-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	61.153.950,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		20.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	34.110.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		37.521.550,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.484.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.732.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**					**30 %**	**291.332.750,00**							**245.665.805,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**35**	**20**	**25**	**30**	**291.332.750,00**	-	-	-	-	-	-	**245.665.805,00**	-
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota*	-			100 %	25.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen	18.562.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	3.918.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				1 Lembaga	3.562.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		3.918.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				100 orang	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan*	-			2 Lembaga	247.770.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	214.247.605,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				1 Lembaga	113.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek				300 orang	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		88.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0011	mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.														
			Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi				1 Lembaga	14.770.550,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		16.247.605,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					**60 %**	**144.575.000,00**							**192.032.500,00**	
		[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**65**	**40**	**50**	**60**	**144.575.000,00**	-	-	-	-	-	-	**192.032.500,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota*	-			1 Dokumen	65.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	104.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		71.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				20 Lembaga	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi*	-			50 Layanan	33.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	36.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				50 orang	18.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		19.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				3 orang	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota*	-			1 Dokumen	46.575.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	51.232.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan				40 Orang	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				20 orang	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				1 Dokumen	16.575.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		18.232.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**					**55 Indeks**	**100.000.000,00**							**110.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak anak]	**Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai**	**90**	**90**	**90**	**90**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**110.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten / Kota*	-			1 Dokumen	80.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	88.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				1 Lembaga	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		38.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak*	-			1 Dokumen	20.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**					**53 %**	**91.425.000,00**							**100.567.500,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak]	**Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan**	**54**	**45**	**50**	**53**	**91.425.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100.567.500,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data terpilah gender dan anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai*	-			4 Dokumen	91.425.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	100.567.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	56.425.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		62.067.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak				1 Lembaga	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		38.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**					**90 Indeks**	**322.667.250,00**							**354.933.975,00**	
		[Terjaminnya Pemenuhan Hak semua anak secara komprehensif]	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**	**72**	**0**	**65**	**67**	**322.667.250,00**	-	-	-	-	-	-	**354.933.975,00**	-
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha*	-			8 Organisasi	12.667.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	13.933.975,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	9.067.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		9.973.975,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	3.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		3.960.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota*	-			1 Dokumen	310.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	341.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				50 Orang	140.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		154.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				25 Lembaga	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		132.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**					**80 %**	**110.000.000,00**							**121.000.000,00**	
		[Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak]	**Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**85**	**60**	**70**	**80**	**110.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**121.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota*	-			1 Dokumen	15.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota*	-			45 Layanan	77.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	84.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				3 Orang	12.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		13.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				45 Orang	65.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		71.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota*	-			1 Dokumen	18.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	19.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				40 Orang	18.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat		19.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						**21.036.686.305,00**							**24.242.590.333,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.822.586.305,40**							**15.170.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**16.822.586.305,40**							**15.170.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**15.328.740.805,40**							**12.160.000.000,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Pertanian**	**100**	**100**	**100**	**100**	**15.328.740.805,40**	-	-	-	-	-	-	**12.160.000.000,00**	-
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen / laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			6 Dokumen	70.000.000,00			-	-	ASN DKPP	-	160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN DKPP		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN DKPP		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	-			2 Dokumen	13.369.929.160,00			-	-	ASN DKPP	-	9.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				131 Orang/bulan	13.354.929.160,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN DKPP		9.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			2 Dokumen	25.000.000,00			-	-	ASN DKPP	-	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen / laporan administrasi umum perangkat daerah*	-			7 Dokumen	356.000.000,00			-	-	ASN DKPP	-	1.275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	45.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	45.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	201.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			3 Laporan	1.392.628.980,00			-	-	ASN DKPP	-	1.105.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	142.840.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.245.388.980,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				115.182.665,40			-	-	ASN DKPP	-	380.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	60.182.665,40	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DKPP		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**					**10,91 %**	**1.393.845.500,00**							**2.710.000.000,00**	
		[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	**Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton)** **Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)** **Skor Pola Pangan Harapan (Skor)**	**17686** **8837** **93.31**	**15251** **7620** **87.90**	**15632** **7811** **88.78**	**16023** **8006** **89.67**	**1.393.845.500,00**	-	-	-	-	-	-	**2.710.000.000,00**	-
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jumlah Laporan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura*	-			3 Laporan	1.000.445.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Kelompok Tani	-	1.520.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				3 Laporan	900.445.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Kelompok Tani		1.400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				20 Keluarga	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Laporan Pemantauan Cadangan pangam tingkat kota*	-			1 Laporan	150.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat / Petani / Kelompok Tani	-	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat / Petani / Kelompok Tani		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita / tahun*	-			3 Laporan	243.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani	-	1.040.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	243.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		1.040.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**					**100 %**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		[Meningkatnya penanganan kerawanan pangan]	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**3.03**	**3.03**	**3.03**	**3.03**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**150.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah dokumen ketahanan dan kerentanan pangan*	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani	-	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**					**13,34 %**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan]	**Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**150.000.000,00**	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar*	-			2 Laporan	50.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani	-	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				4 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.214.099.999,60**							**9.072.590.333,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**4.214.099.999,60**							**9.072.590.333,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					**10,74 %**	**1.464.500.000,00**							**3.740.000.000,00**	
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian]	**Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan** **Peningkatan Produksi Perkebunan**	**160275** **4124**	**150986** **3077**	**152496** **3231**	**154021** **3392**	**1.464.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.740.000.000,00**	-
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian*	-			2 Laporan	197.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani	-	1.350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	147.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan SDG dan pengembangan tanaman di KPT*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani	-	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pemeliharaan benih/bibit ternak, bahan pakan ternak, tanaman yang dipelihara*	-			1 Laporan	110.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	UPT Pembibitan Ternak dan Hjauan Pakan Ternak	-	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				12 Laporan	110.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	UPT Pembibitan Ternak dan Hjauan Pakan Ternak		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			2 Laporan	195.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani	-	840.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				1 Laporan	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		390.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah pengadaan benih/bibit ternak untuk masyarakat*	-			4020 ekor	862.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani	-	800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				4020 Ekor	862.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					**12,66 %**	**1.709.599.999,60**							**2.160.000.000,00**	
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B** **Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian**	**10** **16.43**	**0** **11.27**	**0** **12.21**	**14.08** **30**	**1.709.599.999,60**	-	-	-	-	-	-	**2.160.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah dokumen persiapan dan pengelolaan LP2B*	-			1 Dokumen	582.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani	-	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				50 Ha	32.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan diadakan*	-			20 Unit	1.126.999.999,60			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani	-	1.860.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				20 Unit	1.126.999.999,60	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		1.860.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**					**1,36 %**	**400.000.000,00**							**1.270.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner]	**Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular** **Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)**	**100** **3.7**	**100** **22.22**	**100** **22.22**	**100** **18.52**	**400.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.270.000.000,00**	-
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis dan Non zoonosis*	-			5 Kasus	150.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat / Petani / Kelompok Tani	-	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				12 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat / Petani / Kelompok Tani		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah data peredaran ternak dan produk ternak*	-			12 Laporan	40.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani	-	320.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				12 laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		320.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pelayanan jasa medik veteriner*	-			12 Laporan	50.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	UPT Puskeswan	-	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	UPT Puskeswan		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*	-			12 Laporan	110.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat / Petani / Kelompok Tani	-	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	110.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat / Petani / Kelompok Tani		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	*Jumlah pelaksanaan operasional Rumah Potong Hewan*	-			1 Unit	50.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani	-	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha														
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan				1 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					**10 %**	**100.000.000,00**							**800.000.000,00**	
		[Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian]	**Persentase Penanganan Bencana Pertanian**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**800.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*	-			65 Ha	100.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani	-	800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				70 Ha	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani		800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					**-**	**540.000.000,00**							**1.102.590.333,00**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian]	**Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi** **Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan**	**0** **70**	**40** **50**	**40** **45**	**0** **50**	**540.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.102.590.333,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	540.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	-	1.102.590.333,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Unit	91.840.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian		502.590.333,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Unit	388.160.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				6 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				1 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**20.272.071.390,00**							**42.828.876.358,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.272.071.390,00**							**42.828.876.358,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**20.272.071.390,00**							**42.828.876.358,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**9.751.138.590,00**							**13.623.557.757,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup]	**Persentase Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.751.138.590,00**	-	-	-	-	-	-	**13.623.557.757,00**	-
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			8 Dokumen	282.258.102,00			-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup	-	476.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	149.265.287,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	17.999.674,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	13.998.995,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	18.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	14.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	23.996.556,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	44.997.590,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	-			1 Dokumen	6.902.167.240,00			-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup	-	8.277.557.757,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	6.852.167.240,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		8.080.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		197.557.757,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			2 Laporan	35.000.000,00			-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup	-	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			5 Dokumen	245.500.000,00			-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup	-	320.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	195.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			10 Dokumen	580.970.810,00			-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup	-	900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	89.923.745,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	51.047.065,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		360.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			20 Unit	577.904.078,00			-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup	-	1.452.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		655.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.751.138.590,00**	-	-	-	-	-	-	**13.623.557.757,00**	-
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	557.904.078,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		797.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup]	**Persentase Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.751.138.590,00**	-	-	-	-	-	-	**13.623.557.757,00**	-
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			48 Laporan	947.313.360,00			-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup	-	1.517.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	192.381.920,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		297.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		425.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	714.931.440,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		735.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			135 Unit	180.025.000,00			-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup	-	570.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	156.525.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		360.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.751.138.590,00**	-	-	-	-	-	-	**13.623.557.757,00**	-
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	23.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Lingkungan Hidup		210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**					**75 %**	**400.000.000,00**							**1.146.500.000,00**	
		[Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP]	**Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti**	**90**	**0**	**0**	**60**	**400.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.146.500.000,00**	-
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Tercapainya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	336.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		336.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kota*	-			1 Dokumen	300.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	810.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		810.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**					**70 %**	**2.250.000.000,00**							**7.540.000.000,00**	
		[Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup]	**Indeks Kualitas Air** **Indeks Kualitas Udara**	**36.35** **72.34**	**50.83** **87.97**	**35.35** **70.84**	**35.55** **71.14**	**2.250.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.540.000.000,00**	-
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen	1.450.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	6.650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		1.010.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		310.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		5.010.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah monitoring kegaiatan industri Kota dumai yang terlaksana*	-			1 Laporan	500.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	520.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		360.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota*	-			1 Dokumen	300.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	370.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 Kegiatan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**					**70 %**	**5.473.425.000,00**							**6.098.818.601,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.473.425.000,00**	-	-	-	-	-	-	**6.098.818.601,00**	-
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Luas taman kota dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara, Persentase terbangunnya taman-taman di dalam kota dan tertatanya pedestrian*	-			25.25 Ha	5.473.425.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	6.098.818.601,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				2 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		510.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	**Persentase RTH**	**70**	**65**	**65**	**66**	**5.473.425.000,00**	-	-	-	-	-	-	**6.098.818.601,00**	-
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				25.25 Ha	5.273.425.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		5.588.818.601,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**					**70 %**	**250.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		[Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)]	**Persentase Limbah B3 yang Terkelola**	**84**	**70**	**72**	**74**	**250.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**150.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terinteragsi secara elektronik*	-			2 Dokumen	250.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				10 Usaha	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**					**70 %**	**111.000.000,00**							**410.000.000,00**	
		[Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota**	**100**	**60**	**100**	**100**	**111.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**410.000.000,00**	-
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan pengawasan dokumen lingkungan terhadap kegiatan/badan usaha di Kota Dumai*	-			12 Laporan	111.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	410.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				4 Orang	61.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				12 Badan Usaha	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					**-**	**220.000.000,00**							**430.000.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup]	**Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**60**	**-**	**0**	**50**	**220.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**430.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	220.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	430.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				50 Keluarga	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				1 Lembaga	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					**70 %**	**50.000.000,00**							**310.000.000,00**	
		[Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup]	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**60**	**-**	**0**	**50**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**310.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/flantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup*	-			12 Entitas	50.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	310.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				12 Entitas	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		310.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**					**70 %**	**50.000.000,00**							**260.000.000,00**	
		[Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup]	**Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup**	**95**	**90**	**80**	**85**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**260.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat*	-			12 Laporan	50.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				2 Pengaduan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					**57 %**	**1.716.507.800,00**							**12.860.000.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola persampahan]	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**	**62.9**	**39.6**	**44.5**	**49.1**	**1.716.507.800,00**	-	-	-	-	-	-	**12.860.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah dokumen peraturan pengelolaan sampah, Jumlah saran dan prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan, Jumlah wilayah prasarana dan sarana yang terpelihara*	-			2 Dokumen	1.716.507.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai	-	12.860.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				4 Kelompok	74.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		360.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				5 Unit	865.054.360,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		10.510.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				2 Dokumen	600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		510.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah														
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	26.653.440,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		510.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0023	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah				2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah														
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				10 Ton	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI EKONOMI 2. PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Masyarakat Kota Dumai		510.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A						**8.000.000.000,00**							**8.000.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.000.000.000,00**							**8.000.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**8.000.000.000,00**							**8.000.000.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**8.000.000.000,00**							**8.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya pelayanan BLUD UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A]	**Persentase Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup**	**100**	**100**	**100**	**100**	**8.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**8.000.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Unit	8.000.000.000,00			-	-	Masyarakat Kota Dumai	-	8.000.000.000,00	UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A
	2.11.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	8.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Masyarakat Kota Dumai		8.000.000.000,00	UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						**9.174.014.525,00**							**10.290.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.174.014.525,00**							**10.290.000.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**9.174.014.525,00**							**10.290.000.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**8.479.014.525,00**							**9.390.000.000,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil]	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**8.479.014.525,00**	-	-	-	-	-	-	**9.390.000.000,00**	-
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN,PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA*	-			7 DOKUMEN	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah*	-			3 Laporan	6.242.006.060,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	6.420.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	6.227.966.060,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		6.400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9.040.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah* *Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			1 Laporan 1 LAPORAN	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah* *Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*	-			12 BULAN 12 Bulan	1.597.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	1.835.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		1.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	82.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*	-			27 Unit	141.763.425,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	126.763.425,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*	-			12 Bulan	287.445.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	287.445.040,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jenis barang milik perangkat daerah yang dipelihara*	-			3 Jenis	90.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	45.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	45.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**					**-**	**315.000.000,00**							**450.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	**Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)** **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**75** **90**	**30** **54**	**34** **60**	**40** **70**	**315.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**450.000.000,00**	-
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah jenis layanan pendaftaran penduduk*	-			20 Jenis	315.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI	-	450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				12 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12 Dokumen	115.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**					**-**	**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]	**Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	**100**	**100** **99.15**	**100**	**100**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100.000.000,00**	-
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah penyelenggaraan jenis layanan pencatatan sipil secara daring*	-			4 Jenis	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**					**-**	**230.000.000,00**							**300.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]	**Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**230.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**300.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan*	-			16 OPD	115.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				13 Dokumen	115.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*JUMLAH ORMAS DAN PERGURUAN TINGGI YANG MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi yang menandatangani perjanjian erjasama*	-			47 LEMBAGA 47 Lembaga	115.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 Dokumen	115.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**					**-**	**50.000.000,00**							**50.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan]	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Jumlah Dokumen Profil kependudukan yang disajikan* *Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan*	-			1 dokumen 1 Dokumen	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	-	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**6.174.469.595,00**							**5.614.527.517,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.174.469.595,00**							**5.614.527.517,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**6.174.469.595,00**							**5.614.527.517,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**5.012.469.595,00**							**4.022.060.240,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana]	**Persentase Penunjang Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.012.469.595,00**	-	-	-	-	-	-	**4.022.060.240,00**	-
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			2 Dokumen	22.000.000,00			-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	-	9.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6.750.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		9.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	15.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			2 Dokumen	4.140.988.020,00			-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	-	3.083.926.296,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	4.096.666.520,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		2.985.586.846,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16.372.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		37.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	27.949.500,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		60.939.450,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	7.380.000,00			-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	-	24.288.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.380.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		24.288.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	209.402.609,00			-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	-	447.798.978,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.076.115,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		6.068.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		77.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.794.795,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		22.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.400.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		19.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	28.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		66.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		9.108.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	120.631.699,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		247.822.278,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			36 Laporan	500.549.230,00			-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	-	255.044.966,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	580.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		1.287.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	106.656.750,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		105.119.630,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	393.312.480,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		148.638.336,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			51 Unit	132.149.736,00			-	-	-	-	201.102.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	121.189.736,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		170.962.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	10.960.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.140.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**					**7,8 % 2,27 %**	**220.000.000,00**							**143.000.000,00**	
		[Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk]	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun**	**2.18 6.9-6.9**	**2.5 8-8**	**2.29 7.9-7.9**	**2.27 7.8-7.8**	**220.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**143.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*	-			2 Laporan	220.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	143.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal														
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				6 Satuan Pendidikan	110.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		71.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0028	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				9 Laporan	110.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		71.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**					**6,8 % 71,2 Usia**	**455.000.000,00**							**1.001.521.400,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)** **Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**	**6.4** **73.5**	**7** **70.3**	**6.9** **71**	**6.8** **71.2**	**455.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.001.521.400,00**	-
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*	-			2 Laporan	110.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				2 Laporan	110.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	-			32 Laporan	345.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	1.001.521.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	110.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		114.620.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1240 Orang	110.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		781.631.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Unit	100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		110.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				28 Laporan	124.900.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		105.160.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**					**46 %**	**487.000.000,00**							**447.945.877,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)]	**Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**	**50**	**44**	**45**	**46**	**487.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**447.945.877,00**	-
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	-			3 Laporan	487.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	447.945.877,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				33 Keluarga	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Laporan	132.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		71.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				50 Orang	185.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		244.445.877,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		77.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN						**54.584.309.205,00**							**76.306.300.332,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**54.584.309.205,00**							**76.306.300.332,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**54.584.309.205,00**							**76.306.300.332,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**33.426.142.205,00**							**38.092.550.332,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33.426.142.205,00**	-	-	-	-	-	-	**38.092.550.332,00**	-
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	30.665.000,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan	-	31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	11.765.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			3 Laporan	26.214.404.532,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan	-	29.110.904.520,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang/bulan	26.187.004.532,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		29.083.504.520,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		14.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	13.400.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		13.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	7.500.000,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan	-	7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	637.568.500,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan	-	1.210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	112.317.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.550.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	66.341.500,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	348.360.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			3 Laporan	5.597.329.373,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan	-	5.893.971.012,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.750.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.220.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		1.220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.375.579.373,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		4.670.971.012,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			133 Unit	938.674.800,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan	-	1.838.674.800,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	448.664.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		798.664.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				97 Unit	490.010.800,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		1.040.010.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					**95 %**	**20.958.167.000,00**							**36.913.750.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	**Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal**	**90**	**73**	**77**	**79**	**20.958.167.000,00**	-	-	-	-	-	-	**36.913.750.000,00**	-
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	-			181 Unit	18.866.786.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai	-	33.263.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				75 Unit	813.750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		10.013.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				106 Unit	18.053.036.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		23.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir*	-			1 Dokumen	204.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	204.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	-			1 Laporan	87.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai	-	700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				12 Unit	12.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	-			3 Laporan	654.519.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai	-	1.450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	354.519.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)														
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				2 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Laporan	1.145.862.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai	-	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	695.862.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**					**20 %**	**100.000.000,00**							**800.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut dan sungai]	**Konektivitas Laut dan Sungai**	**100**	**0**	**0**	**20**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**800.000.000,00**	-
	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			-	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai	-	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**					**20 %**	**100.000.000,00**							**500.000.000,00**	
		[Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api]	**Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani**	**100**	**0**	**0**	**20**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**500.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	*Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai	-	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						**14.994.894.657,00**							**19.979.230.440,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.994.894.657,00**							**19.979.230.440,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**14.794.894.657,00**							**19.089.230.440,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**7.064.141.461,86**							**7.337.850.440,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian]	**Persentase Penunjang Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.064.141.461,86**	-	-	-	-	-	-	**7.337.850.440,00**	-
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	-			1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan	49.535.400,00			-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	-	54.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI		4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI		6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI		4.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	33.880.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.155.400,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI		4.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	-			1 Laporan 14 Bulan 2 Dokumen	5.808.674.327,72			-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai	-	5.988.600.440,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	5.714.600.440,04	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai		5.858.600.440,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	41.653.887,68	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai		65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	52.420.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai		65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	167.997.317,00			-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	-	360.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	24.101.317,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	2.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	119.896.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	949.166.560,00			-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	-	680.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI		130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	849.166.560,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI		550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-			1 Unit 3 Unit 52 Unit	88.767.857,14			-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai	-	255.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	9.767.857,14	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					**100 %**	**2.350.449.775,14**							**3.280.000.000,00**	
		[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.350.449.775,14**	-	-	-	-	-	-	**3.280.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.350.449.775,14			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	-	3.280.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	1.410.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		1.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				8 Komunitas	140.449.775,14	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				10 Permohonan	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	500.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				15 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**					**-**	**5.380.303.420,00**							**8.471.380.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**100**	**147.15**	**96**	**97**	**5.380.303.420,00**	-	-	-	-	-	-	**8.471.380.000,00**	-
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	20.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	-	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa* *Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo* *Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE*	-			1 Dokumen 39 Perangkat Daerah 1 Laporan	5.360.303.420,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	-	8.451.380.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				15 Aplikasi	11.660.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				39 Perangkat Daerah	2.604.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		672.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				10 Aplikasi	22.800.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				1 Laporan	70.347.420,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				50 Aplikasi	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				39 Perangkat Daerah	2.181.496.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		5.894.380.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	170.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai		175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**150.000.000,00**							**470.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					**3,2 Indeks 80 %**	**150.000.000,00**							**470.000.000,00**	
		[Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)]	**Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**	**3.5**	**0**	**2.77**	**3**	**150.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**470.000.000,00**	-
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik*	-			100 %	150.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Mitra	-	470.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				100 %	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Mitra		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				100 %	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Mitra		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				100 %	50.000.000,00	Kota Dumai, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Mitra		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**50.000.000,00**							**420.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					**100 %**	**50.000.000,00**							**420.000.000,00**	
		[Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**100**	**80**	**100**	**100**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**420.000.000,00**	-
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	-			1 Laporan	50.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Mitra	-	420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Mitra		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				40 Perangkat Daerah	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Mitra		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN						**8.836.528.627,00**							**69.529.051.701,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.411.528.627,00**							**68.962.551.701,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**8.411.528.627,00**							**68.962.551.701,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**7.097.165.200,00**							**7.739.825.462,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Bidang Perindustrian]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perindustrian**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.097.165.200,00**	-	-	-	-	-	-	**7.739.825.462,00**	-
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			9 Dokumen	12.544.443,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN	-	21.969.823,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		2.750.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.558.185,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		2.814.004,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.304.503,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		2.806.650,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.226.225,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		2.697.695,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.233.173,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		2.712.290,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3.722.357,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		8.189.184,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			8 Dokumen	5.792.677.987,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN	-	6.193.070.284,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	5.775.119.190,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		6.156.004.459,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.847.648,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		4.065.825,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	15.711.149,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		33.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	15.000.000,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN	-	33.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		33.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	341.746.910,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN	-	381.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4.746.910,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	65.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		71.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		8.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		4.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	811.318.360,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN	-	892.967.355,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		2.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	198.633.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		217.913.459,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	611.685.360,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		672.853.896,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	123.877.500,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN	-	217.118.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	19.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		41.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	96.480.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		151.118.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	6.336.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		13.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.061.500,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**					**40 %**	**163.884.670,00**							**44.000.000,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi]	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**65**	**35**	**40**	**45**	**163.884.670,00**	-	-	-	-	-	-	**44.000.000,00**	-
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai*	-			114 Koperasi	163.884.670,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Koperasi	-	44.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				47 Unit Usaha	78.875.310,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Koperasi		22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				67 Unit Usaha	85.009.360,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Koperasi		22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**					**-**	**109.842.000,00**							**120.826.200,00**	
		[Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi]	**Persentase Koperasi Aktif**	**72**	**65**	**68**	**69**	**109.842.000,00**	-	-	-	-	-	-	**120.826.200,00**	-
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	109.842.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Koperasi	-	120.826.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				27 Unit Usaha	39.842.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Koperasi		43.826.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				29 Unit Usaha	70.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Koperasi		77.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**					**25,55 %**	**100.000.000,00**							**68.663.100,00**	
		[Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian]	**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**	**44**	**35**	**40**	**41**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**68.663.100,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota*	-			75 Orang	100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pengurus Koperasi	-	68.663.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pengurus Koperasi		68.663.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**					**37,5 %**	**215.000.000,00**							**60.538.500.000,00**	
		[Meningkatnya produktivitas koperasi]	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**24**	**20**	**20**	**21**	**215.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**60.538.500.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota*	-			136 Orang	215.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Koperasi	-	60.538.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	140.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Koperasi		38.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				36 Unit Usaha	75.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Koperasi		60.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					**-**	**585.636.757,00**							**285.736.939,00**	
		[Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	**Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal**	**50**	**20**	**25**	**30**	**585.636.757,00**	-	-	-	-	-	-	**285.736.939,00**	-
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Usaha mikro*	-			1395 UMKM	585.636.757,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	UMKM	-	285.736.939,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				10 Unit Usaha	50.393.667,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	UMKM		27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	305.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	UMKM		33.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				10 Unit Usaha	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	UMKM		27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				5 Unit Usaha	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	UMKM		27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				1260 Unit Usaha	140.243.090,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	UMKM		115.236.939,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				10 Orang	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	UMKM		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**					**10 %**	**140.000.000,00**							**165.000.000,00**	
		[Meningkatnya daya saing UMKM]	**Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor**	**21**	**5**	**7**	**10**	**140.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**165.000.000,00**	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah UMKM yang dibina* *Jumlah UMKM yang dibina*	-			250 UMKM 200 UMKM	140.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	UMKM	-	165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				250 Unit Usaha	140.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	UMKM		165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**425.000.000,00**							**566.500.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**425.000.000,00**							**566.500.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**					**80 %**	**275.000.000,00**							**302.500.000,00**	
		[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil Menengah**	**20**	**5**	**10**	**12**	**275.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**302.500.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri*	-			4 Dokumen	275.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Dokumen	-	302.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Dokumen		165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Dokumen		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Dokumen		27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Dokumen		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**					**35 %**	**60.000.000,00**							**115.500.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian]	**Persentase Izin Usaha Industri Kecil Menengah yang Diterbitkan**	**14**	**5**	**7**	**8**	**60.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**115.500.000,00**	-
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Industri yang diberikan fasilitasi*	-			1 Dokumen	60.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Dokumen	-	115.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Dokumen		82.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Dokumen		33.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**					**75 %**	**90.000.000,00**							**148.500.000,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi industri]	**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini**	**14**	**5**	**8**	**10**	**90.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**148.500.000,00**	-
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan Kawasan Industri*	-			2 Dokumen	90.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Dokumen	-	148.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Dokumen		33.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Dokumen		82.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Dokumen		33.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**9.374.745.865,00**							**17.620.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.374.745.865,00**							**17.620.500.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**9.374.745.865,00**							**17.620.500.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**8.157.284.864,67**							**12.675.500.000,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang penanaman modal]	**Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal**	**100**	**100**	**100**	**100**	**8.157.284.864,67**	-	-	-	-	-	-	**12.675.500.000,00**	-
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			15 Dokumen	36.553.275,00			-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.999.198,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	4.999.948,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	4.999.924,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5.003.748,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	5.011.748,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	6.538.811,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4.999.898,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.555.827.965,00			-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	6.273.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	5.532.213.545,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		6.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	4.516.383,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	4.586.035,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	4.962.071,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	4.574.745,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		13.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	4.975.186,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			7 Dokumen/Laporan	16.331.484,67			-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	49.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	4.159.252,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.851.103,67	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	4.422.002,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3.899.127,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			7 Dokumen/Laporan	394.656.167,50			-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	1.910.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	25.312.500,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	75.115.227,50	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				45 Paket	95.832.920,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	28.395.520,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	65.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			3 Laporan	1.855.522.372,50			-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	3.750.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.114.976.852,50	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		2.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	735.545.520,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		1.550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			20 Unit	298.393.600,00			-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	483.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	9.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		33.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	49.057.600,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	39.836.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.157.284.864,67**	-	-	-	-	-	-	**12.675.500.000,00**	-
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**					**53,59 %**	**512.479.699,33**							**800.000.000,00**	
		[Meningkatnya kemudahan berinvestasi]	**Persentase peningkatan jumlah proyek investasi**	**10**	**44.29**	**10**	**10**	**512.479.699,33**	-	-	-	-	-	-	**800.000.000,00**	-
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Terkait Penetapan Pemberian Fasilitasi/insentif dibidang penanaman modal*	-			1 Laporan	55.519.550,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha	-	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	35.356.550,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				1 Dokumen	20.163.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan pembuatan peta potensi dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah*	-			1 Laporan	456.960.149,33			Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha	-	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	406.960.149,33	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**					**10 %**	**394.981.301,00**							**650.000.000,00**	
		[Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal]	**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**394.981.301,00**	-	-	-	-	-	-	**650.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan pelaksanaan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah*	-			1 Laporan	394.981.301,00			Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha	-	650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	94.981.301,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**					**90 %**	**145.000.000,00**							**1.550.000.000,00**	
		[Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko]	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**100**	**85**	**85**	**100**	**145.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.550.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Izin yang Diterbitkan*	-			1,400 izin	145.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha	-	1.550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				300 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				10 Kegiatan Usaha	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha		450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					**100 %**	**145.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
		[Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal]	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**100**	**100**	**100**	**100**	**145.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.650.000.000,00**	-
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cakupan Pengendalian Penanaman Modal Terhadap PMA dan PMDN*	-			75 Pelaku Usaha	145.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha	-	1.650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				15 Kegiatan Usaha.	45.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha		550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				35 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha		550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				15 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha		550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**					**100 %**	**20.000.000,00**							**295.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal]	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**100**	**100**	**100**	**100**	**20.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**295.000.000,00**	-
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah buku statistik penanaman modal Kota Dumai*	-			1 Buku	20.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha	-	295.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pelaku Usaha		295.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						**17.434.534.604,00**							**10.103.342.278,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.689.535.354,00**							**8.992.017.460,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**16.689.535.354,00**							**8.992.017.460,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**90 %**	**5.880.859.564,00**							**6.334.517.460,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Bidang Pariwisata]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata**	**90**	**80**	**80**	**90**	**5.880.859.564,00**	-	-	-	-	-	-	**6.334.517.460,00**	-
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	18.557.700,00			-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	11.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	8.557.700,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		5.750.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		5.750.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			28 Orang	3.989.629.600,00			-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	4.014.028.753,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	3.979.629.600,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		4.009.369.660,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		4.659.093,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			3 Laporan	20.081.688,00			-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	46.460.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	20.081.688,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		46.460.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Paket	243.665.600,00			-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	136.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		5.750.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	35.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		23.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		11.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		23.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	4.665.600,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		5.750.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	125.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		57.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			3 Unit	20.000.000,00			-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	23.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		11.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		11.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Laporan	1.520.924.976,00			-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	1.999.528.707,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		9.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	172.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		167.900.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	18.900.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		34.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.323.524.976,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		1.787.928.707,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			7 Unit	68.000.000,00			-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	103.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	58.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		92.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		11.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**					**-**	**400.000.000,00**							**977.500.000,00**	
		[Meningkatnya daya saing kepemudaan]	**Rasio Wirausaha Pemuda**	**95**	**80**	**80**	**90**	**400.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**977.500.000,00**	-
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat	-	517.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				60 Orang	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat		517.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha*	-			80 orang	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat	-	460.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				25 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat		460.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**					**90 %**	**10.208.675.790,00**							**1.380.000.000,00**	
		[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga]	**Persentase Atlet yang berprestasi**	**95**	**80**	**80**	**90**	**10.208.675.790,00**	-	-	-	-	-	-	**1.380.000.000,00**	-
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan*	-			2 unit	8.300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat	-	115.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	8.300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat		115.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	800.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat	-	517.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				6 Kegiatan	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat		517.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah olahraga rekreasi yang terlaksana*	-			55 Dokumen	1.108.675.790,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat	-	747.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit	808.675.790,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat		460.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				11 Lembaga	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat		287.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**					**-**	**200.000.000,00**							**300.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kepramukaan]	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan**	**95**	**0**	**0**	**75**	**200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**300.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	-	-	300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	-		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**744.999.250,00**							**1.111.324.818,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**744.999.250,00**							**1.111.324.818,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					**90 %**	**144.999.250,00**							**310.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata]	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**	**90**	**80**	**80**	**80**	**144.999.250,00**	-	-	-	-	-	-	**310.500.000,00**	-
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota*	-			2 dokumen	50.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat	-	57.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat		57.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota*	-			30 unit	49.999.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat	-	138.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				30 Unit	49.999.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat		138.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kab/kota*	-			20 unit	45.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat	-	115.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	45.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat		115.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**					**-**	**100.000.000,00**							**230.000.000,00**	
		[Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata]	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**	**90**	**80**	**80**	**80**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**230.000.000,00**	-
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat	-	230.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				4 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat		115.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Promosi	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat		115.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					**90 %**	**500.000.000,00**							**570.824.818,00**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif]	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**	**90**	**80**	**80**	**80**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**570.824.818,00**	-
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya*	-			1320 Orang	500.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat	-	570.824.818,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				1320 Orang	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat		570.824.818,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**4.502.226.364,00**							**5.794.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.502.226.364,00**							**5.794.500.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**4.306.956.034,00**							**5.544.500.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**4.106.956.034,00**							**4.794.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Perpustakaan, dan Bidang Kearsipan]	**Persentase Penunjang Urusan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.106.956.034,00**	-	-	-	-	-	-	**4.794.500.000,00**	-
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen / laporan perencanaan,penggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			9 Dokumen	9.914.012,33			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	-	27.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	943.150,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	967.150,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.202.448,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	598.533,33	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5.452.731,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	-			13 dokumen	3.244.711.148,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	-	3.207.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.242.527.720,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		3.200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	1.430.580,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	752.848,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen / laporan administrasi umum perangkat daerah*	-			3 Dokumen	158.855.638,41			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	-	371.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.007.366,67	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.256.980,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.462.606,67	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.984.240,63	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.880.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		6.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	104.264.444,44	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			2 Laporan	564.390.000,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	-	750.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	111.960.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	452.430.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			22 unit	129.085.235,26			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	-	438.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	19.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		38.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	105.085.235,26	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**					**100 %**	**200.000.000,00**							**750.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan]	**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**	**67**	**60.32**	**64.5**	**65**	**200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**750.000.000,00**	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perpustakaan yang di kelola*	-			10 Perpustakaan	126.248.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpustakaan	65.224.005,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Orang	12.024.495,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	14.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				200 Eksemplar	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemustaka*	-			20000 Orang	73.751.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	-	350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				3 Perpustakaan	26.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				5 Lokus	47.251.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**195.270.330,00**							**250.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**					**100 %**	**195.270.330,00**							**250.000.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis]	**Tingkat Ketersediaan Arsip**	**70**	**0**	**52**	**55**	**195.270.330,00**	-	-	-	-	-	-	**250.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip Dinamis yang di kelola sesuai tata kearsipan*	-			50 Arsip	195.270.330,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	-	250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	195.270.330,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN						**7.892.652.890,00**							**11.435.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**7.892.652.890,00**							**11.435.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**7.892.652.890,00**							**11.435.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**5.428.489.414,00**							**8.625.000.000,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan]	**Persentase Penunjang Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.428.489.414,00**	-	-	-	-	-	-	**8.625.000.000,00**	-
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			7 dokumen	73.500.000,00			-	-	Dinas Perikanan	-	105.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	3.819.903.000,00			-	-	Dinas Perikanan	-	6.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	3.819.903.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perikanan		6.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	50.784.431,00			-	-	Dinas Perikanan	-	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	50.784.431,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	35.000.000,00			-	-	Dinas Perikanan	-	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			7 Dokumen	283.250.000,00			-	-	Dinas Perikanan	-	655.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	61.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	8.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	180.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			29 Unit	127.554.100,00			-	-	Dinas Perikanan	-	260.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	97.554.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 Laporan	942.997.883,00			-	-	Dinas Perikanan	-	1.205.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	205.550.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10.853.403,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	725.094.480,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.428.489.414,00**	-	-	-	-	-	-	**8.625.000.000,00**	-
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			13 Unit	95.500.000,00			-	-	Dinas Perikanan	-	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	95.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perikanan		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**					**-**	**31.464.295,00**							**100.000.000,00**	
		[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**1330**	**1280.27**	**1280**	**1290**	**31.464.295,00**	-	-	-	-	-	-	**100.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya*	-			26 kelompok	31.464.295,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Nelayan	-	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				26 Kelompok	31.464.295,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Nelayan		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**					**-**	**2.205.160.663,00**							**2.360.000.000,00**	
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**394.34**	**292.44**	**340.15**	**350.36**	**2.205.160.663,00**	-	-	-	-	-	-	**2.360.000.000,00**	-
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya*	-			40 Kelompok	1.211.111.048,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pembudi Daya Ikan	-	460.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				12 Kelompok	1.150.087.048,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pembudi Daya Ikan		400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				3 Kelompok	61.024.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pembudi Daya Ikan		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang Terlaksana*	-			4 Kegiatan	994.049.615,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pembudi Daya Ikan	-	1.900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	484.486.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pembudi Daya Ikan		800.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	117.079.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pembudi Daya Ikan		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				250 Unit	22.083.215,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pembudi Daya Ikan		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	370.401.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pembudi Daya Ikan		800.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**					**100 %**	**227.538.518,00**							**350.000.000,00**	
		[Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kota Dumai]	**Angka Konsumsi Ikan**	**49**	**46.6**	**46.8**	**47**	**227.538.518,00**	-	-	-	-	-	-	**350.000.000,00**	-
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil*	-			1 Dokumen	14.309.718,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan	-	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	14.309.718,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah dokumen penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen	213.228.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan	-	300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0.1 Ton	213.228.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kelompok Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan		300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERDAGANGAN						**10.759.887.319,00**							**11.951.072.332,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.759.887.319,00**							**11.951.072.332,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**10.759.887.319,00**							**11.951.072.332,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**9.537.013.057,00**							**9.596.072.332,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Perdagangan]	**Persentase Penunjang Urusan Bidang Perdagangan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.537.013.057,00**	-	-	-	-	-	-	**9.596.072.332,00**	-
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			16 Dokumen	71.876.788,00			-	-	ASN Dinas Perdagangan	-	71.325.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5.215.050,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		5.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	6.336.738,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		5.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	12.575.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		12.575.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	12.750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		12.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			9 Dokumen	7.077.168.673,00			-	-	ASN Dinas Perdagangan	-	7.280.033.555,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	7.068.557.474,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		7.238.170.080,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	3.726.950,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		1.863.475,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	2.765.092,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.119.157,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	41.776.528,00			-	-	ASN Dinas Perdagangan	-	5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		1.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	38.276.528,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		1.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	262.072.228,00			-	-	ASN Dinas Perdagangan	-	243.503.777,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		17.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	39.092.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		26.606.727,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		10.897.050,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	27.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		3.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	147.480.228,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			3 Laporan	1.965.118.840,00			-	-	ASN Dinas Perdagangan	-	1.887.210.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		600.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	423.990.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		423.990.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.540.528.840,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		1.462.620.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			24 Unit	119.000.000,00			-	-	ASN Dinas Perdagangan	-	109.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		9.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	91.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		91.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	8.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan		8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**					**40 %**	**117.900.000,00**							**183.000.000,00**	
		[Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha]	**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi**	**60**	**30**	**35**	**40**	**117.900.000,00**	-	-	-	-	-	-	**183.000.000,00**	-
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah Penerbitan Dokumen Tanda Daftar Gudang*	-			5 Dokumen	30.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait	-	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				5 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	*Jumlah Penerbitan Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik*	-			1 Dokumen	10.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait	-	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*	-			2 Laporan	10.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait	-	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				2 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	*Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)*	-			3000 Dokumen	67.900.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait	-	133.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				3000 Dokumen	67.900.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		133.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**					**33,3 %**	**325.474.262,00**							**750.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**	**100**	**33.33**	**33.33**	**33.33**	**325.474.262,00**	-	-	-	-	-	-	**750.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Pasar Tradisional Pemerintah yang Tertib, Bersih dan Aman*	-			3 Pasar	225.474.262,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait	-	525.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	225.474.262,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		525.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat*	-			3 Dokumen	100.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait	-	225.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**					**100 %**	**268.000.000,00**							**450.000.000,00**	
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**100**	**100**	**100**	**100**	**268.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**450.000.000,00**	-
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah*	-			6 Laporan	118.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait	-	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2 Laporan	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2 Laporan	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2 Laporan	48.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat*	-			6 Laporan	150.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait	-	300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**					**3,6 %**	**172.000.000,00**							**422.000.000,00**	
		[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]	**Persentase Nilai Ekspor Non Migas**	**4.0**	**3.4**	**3.5**	**3.6**	**172.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**422.000.000,00**	-
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	172.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait	-	422.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				1 Pelaku Usaha	104.627.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				1 Pelaku Usaha	34.680.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				2 Pelaku Usaha	27.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		72.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				1 Produk	5.093.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**					**80 %**	**214.500.000,00**							**300.000.000,00**	
		[Meningkatnya tertib niaga]	**Persentase Pelaku Usaha yang melakukan Tera/Tera Ulang**	**88**	**16.67**	**16.67**	**80**	**214.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**300.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	214.500.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait	-	300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1160 Unit	124.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				950 Orang	90.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		90.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**					**35 %**	**125.000.000,00**							**250.000.000,00**	
		[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	**Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan**	**55**	**25**	**30**	**35**	**125.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**250.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*	-			4 UMKM	125.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait	-	250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				3 UMKM	90.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		180.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				1 UMKM	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Stakeholder terkait		70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH						**96.561.304.568,00**							**142.919.366.410,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**96.561.304.568,00**							**142.919.366.410,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**96.561.304.568,00**							**142.919.366.410,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**45.043.756.374,00**							**55.059.480.410,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Pendukung Sekretariat Daerah]	**Persentasenya Penunjang Unsur Pendukung Sekretariat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**45.043.756.374,00**	-	-	-	-	-	-	**55.059.480.410,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	-			8 Dokumen	75.983.266,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	-	320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.011.900,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	3.133.662,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4.004.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	15.176.650,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	23.657.054,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			5 Laporan	22.595.821.440,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	-	22.037.677.449,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/bulan	22.520.224.120,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai		21.627.677.449,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	43.943.300,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	12.327.770,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	7.640.900,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	11.685.350,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Dumai*	-			3 Laporan	59.826.600,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	-	295.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	9.826.600,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai		95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen 30 Orang	13.500.000,00			-	-	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	-	70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	13.500.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	3.083.214.728,00			-	-	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	-	8.080.530.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	300.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	249.999.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	33.215.728,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	430.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai		580.530.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai		4.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 Laporan	9.146.223.122,00			-	-	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	-	8.950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4.000.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai		5.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	44.548.654,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.076.674.468,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai		3.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			370 Unit	874.426.930,00			-	-	Sekretariat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	-	4.920.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	99.918.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	524.508.930,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		1.350.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				300 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		2.950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah orang yang menerima Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	-			2 Orang	1.326.124.588,00			-	-	Walikota dan Wakil Walikota Dumai	-	1.567.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	230.124.588,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Walikota dan Wakil Walikota Dumai		197.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	80.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Walikota dan Wakil Walikota Dumai		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	20.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Walikota dan Wakil Walikota Dumai		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	996.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Walikota dan Wakil Walikota Dumai		1.090.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	-			12 Paket	573.635.700,00			-	-	Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Dumai	-	1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	299.999.560,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Dumai		800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	200.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Dumai		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				4 Paket	73.636.140,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Dumai		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah]	**Indeks Kematangan Organisasi**	**32.5**	**28.5**	**28.6**	**28.7**	**45.043.756.374,00**	-	-	-	-	-	-	**55.059.480.410,00**	-
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah Dokumen Penataan Organisasi*	-			6 Dokumen	405.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat Kota Dumai	-	1.180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	60.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	75.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	140.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	70.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	60.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat Kota Dumai		330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Pendukung Sekretariat Daerah]	**Persentasenya Penunjang Unsur Pendukung Sekretariat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**45.043.756.374,00**	-	-	-	-	-	-	**55.059.480.410,00**	-
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan*	-			3 Laporan	6.790.000.000,00			-	-	Walikota, Wakil Walikota, Perangkat Daerah, dan Masyarakat Kota Dumai	-	5.738.672.961,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	5.200.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Walikota, Wakil Walikota, Perangkat Daerah, dan Masyarakat Kota Dumai		2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1.250.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Walikota, Wakil Walikota, Perangkat Daerah, dan Masyarakat Kota Dumai		2.399.672.961,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	340.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Walikota, Wakil Walikota, Perangkat Daerah, dan Masyarakat Kota Dumai		589.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**100 %**	**50.196.548.194,00**							**82.419.886.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan]	**Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50.196.548.194,00**	-	-	-	-	-	-	**82.419.886.000,00**	-
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan*	-			3 Dokumen	300.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	-	1.939.446.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	120.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		889.446.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat]	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50.196.548.194,00**	-	-	-	-	-	-	**82.419.886.000,00**	-
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*	-			3 Dokumen	49.344.706.194,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	-	79.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3 Dokumen	9.863.348.667,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		19.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	22.734.833.214,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		40.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	16.746.524.313,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		19.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan]	**Indeks Reformasi Hukum** **Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan**	**85** **90**	**85** **86.44**	**85** **86.50**	**85** **86.80**	**50.196.548.194,00**	-	-	-	-	-	-	**82.419.886.000,00**	-
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum*	-			3 Dokumen	391.842.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	-	650.440.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		165.440.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	150.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	91.842.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas Kerja Sama Daerah]	**Efektivitas Kerja Sama Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50.196.548.194,00**	-	-	-	-	-	-	**82.419.886.000,00**	-
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah*	-			3 Dokumen	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah, Lembaga/Institusi dan Masyarakat Kota Dumai	-	830.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah, Lembaga/Institusi dan Masyarakat Kota Dumai		380.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah, Lembaga/Institusi dan Masyarakat Kota Dumai		270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah, Lembaga/Institusi dan Masyarakat Kota Dumai		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**100 %**	**1.321.000.000,00**							**5.440.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian]	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.321.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.440.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*	-			3 Dokumen	275.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	BUMD dan Masyarakat Kota Dumai	-	940.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	BUMD dan Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	BUMD dan Masyarakat Kota Dumai		325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	BUMD dan Masyarakat Kota Dumai		365.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan]	**Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**1.321.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.440.000.000,00**	-
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan*	-			3 Dokumen	290.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	-	2.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	90.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa]	**Tingkat Kematangan UKPBJ**	**3**	**0**	**2**	**2**	**1.321.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.440.000.000,00**	-
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengkuti Bimbingan Teknis untuk Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* *Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa di Kota Dumai*	-			12 Orang 2 Dokumen	600.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	-	1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	120.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	430.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Kebijakan Sumber Daya Alam]	**Efektivitas Kebijakan Sumber Daya Alam**	**100**	**0**	**100**	**100**	**1.321.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.440.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam*	-			3 Dokumen	156.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	-	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	52.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	52.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	52.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						**57.112.143.993,00**							**75.919.089.217,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**57.112.143.993,00**							**75.919.089.217,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**57.112.143.993,00**							**75.919.089.217,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**44.451.781.431,00**							**66.739.296.201,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Pendukung Sekretariat DPRD]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD**	**100**	**100**	**100**	**100**	**44.451.781.431,00**	-	-	-	-	-	-	**66.739.296.201,00**	-
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			16 Dokumen	161.239.600,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	-	330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	22.108.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	21.764.800,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	12.230.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	16.242.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	13.689.600,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	34.359.200,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	40.846.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.997.559.550,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	-	7.627.387.995,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	5.916.456.440,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		7.507.387.995,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	24.934.240,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	35.934.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	20.234.870,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			8 Laporan	55.000.000,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	-	55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	335.640.000,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	-	402.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	35.640.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		67.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				86 Orang	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		335.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			9 Dokumen	10.164.698.128,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai	-	28.725.945.069,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	94.084.937,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	175.121.339,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai		275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	145.704.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai		210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	177.126.700,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	165.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	35.880.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	38.354.563,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai		38.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	194.938.308,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	9.138.488.281,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai		27.002.445.069,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			14 Laporan	2.482.283.020,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	-	3.895.753.845,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	428.400.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	44.880.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	2.003.753.020,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		3.340.753.845,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			258 Unit	411.278.500,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	-	1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	19.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	165.402.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	226.876.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	-			35 Orang	24.330.500.196,00			-	-	DPRD Kota Dumai	-	23.555.530.452,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	23.190.969.696,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD Kota Dumai		22.205.530.452,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				6 Paket	639.530.500,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Kota Dumai		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	500.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Kota Dumai		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	513.582.437,00			-	-	DPRD Kota Dumai	-	797.178.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				6 Dokumen	513.582.437,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Kota Dumai		797.178.840,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**					**95 %**	**12.660.362.562,00**							**9.179.793.016,00**	
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	**Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N** **Persentase Penetapan Ranperda Tahun N**	**100**	**100**	**100**	**100**	**12.660.362.562,00**	-	-	-	-	-	-	**9.179.793.016,00**	-
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	-			21 Dokumen	1.349.779.633,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	-	1.152.721.041,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				5 Dokumen	584.387.096,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		305.656.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	285.334.377,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		227.553.937,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	67.363.160,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		134.511.104,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	412.695.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		485.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan]	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100**	**0**	**0**	**100**	**12.660.362.562,00**	-	-	-	-	-	-	**9.179.793.016,00**	-
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran*	-			7 Dokumen	1.329.755.774,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	-	710.390.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	120.365.774,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	304.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	235.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	160.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	410.390.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		210.390.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*	-			8 Dokumen	758.791.299,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	-	690.052.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	32.973.780,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	38.050.283,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	33.882.278,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	39.403.308,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	39.735.955,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	91.576.512,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		103.041.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	90.279.142,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	392.890.041,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		227.011.500,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	**Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N** **Persentase Penetapan Ranperda Tahun N**	**100**	**100**	**100**	**100**	**12.660.362.562,00**	-	-	-	-	-	-	**9.179.793.016,00**	-
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*	-			9 Dokumen	1.757.285.461,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	-	1.222.298.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	1.010.565.421,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		514.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				16 Orang	150.397.080,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		132.998.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				10 Orang	373.800.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		360.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	197.522.960,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		190.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan]	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100**	**0**	**0**	**100**	**12.660.362.562,00**	-	-	-	-	-	-	**9.179.793.016,00**	-
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	-			4 dokumen	2.989.587.612,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	-	1.927.392.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	457.895.926,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	2.531.691.686,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai		1.577.392.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD*	-			2 dokumen	246.597.927,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD Kota Dumai	-	324.209.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	246.597.927,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD Kota Dumai		324.209.400,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	**Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N** **Persentase Penetapan Ranperda Tahun N**	**100**	**100**	**100**	**100**	**12.660.362.562,00**	-	-	-	-	-	-	**9.179.793.016,00**	-
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah*	-			2 Dokumen	346.671.075,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD Kota Dumai	-	346.671.075,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	346.671.075,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD Kota Dumai		346.671.075,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD*	-			11 Dokumen	3.881.893.781,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD Kota Dumai	-	2.806.059.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				3 Dokumen	965.736.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD Kota Dumai		939.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	356.812.500,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD Kota Dumai		257.059.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1.100.934.862,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD Kota Dumai		860.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				5 Dokumen	1.458.410.419,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	DPRD Kota Dumai		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**12.711.990.665,00**							**19.922.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**12.711.990.665,00**							**19.922.000.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**12.711.990.665,00**							**19.922.000.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**10.036.961.397,00**							**14.742.000.000,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Perencanaan]	**Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.036.961.397,00**	-	-	-	-	-	-	**14.742.000.000,00**	-
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			14 Dokumen/ Laporan	58.000.000,00			-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	-	305.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	14.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	7.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			20 Dokumen/ Laporan	7.588.570.960,00			-	-	ASN BAPPEDA KOTA DUMAI	-	9.535.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	7.579.570.960,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN BAPPEDA KOTA DUMAI		9.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BAPPEDA KOTA DUMAI		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	2.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BAPPEDA KOTA DUMAI		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BAPPEDA KOTA DUMAI		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			7 Dokumen/Laporan	3.000.000,00			-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	-	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	1.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	81.000.000,00			-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	-	502.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	80.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan/ Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			7 Paket	636.644.206,00			-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	-	1.400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	169.082.706,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	85.561.500,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 Unit	393.386.637,00			-	-	-	-	850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	87.493.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	305.892.837,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 Laporan	549.511.360,00			-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	-	1.270.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25.500.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	506.011.360,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		1.100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			83 unit	726.848.234,00			-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	-	850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				68 Unit	57.848.234,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	400.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**					**100 %**	**1.204.123.953,00**							**1.610.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah]	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**100**	**95.985**	**100**	**100**	**1.204.123.953,00**	-	-	-	-	-	-	**1.610.000.000,00**	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*	-			3 Dokumen	653.723.953,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	-	1.110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	44.060.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	31.860.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	65.030.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	81.160.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				2 Dokumen	431.613.953,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai		700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	-			1 Dokumen	387.640.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	387.640.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Jumlah laporan pelaksanaan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*	-			1 Dokumen	62.760.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	62.760.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					**100 %**	**1.470.905.315,00**							**3.570.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.470.905.315,00**	-	-	-	-	-	-	**3.570.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	-			10 Dokumen/ Laporan	580.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra	-	1.020.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	9.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	9.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	32.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.470.905.315,00**	-	-	-	-	-	-	**3.570.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	-			8 Dokumen/ Laporan	396.382.840,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra	-	1.170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	73.192.746,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	13.042.933,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	26.842.933,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	122.868.496,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	48.282.933,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	13.042.933,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	26.842.933,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	72.266.933,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.470.905.315,00**	-	-	-	-	-	-	**3.570.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun*	-			8 Dokumen/Laporan	494.522.475,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra	-	1.380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	64.082.933,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	13.042.933,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	26.842.933,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	189.516.496,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	81.522.933,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	13.622.431,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	27.498.661,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	78.393.155,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah Mitra		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**146.596.219.840,00**							**123.629.549.312,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**146.596.219.840,00**							**123.629.549.312,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**146.596.219.840,00**							**123.629.549.312,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**55.765.473.840,00**							**46.889.549.312,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Keuangan (BPKAD)]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Keuangan (BPKAD)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**55.765.473.840,00**	-	-	-	-	-	-	**46.889.549.312,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	-	ASN BPKAD Kota Dumai	-	120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	45.607.073.840,00			-	-	ASN BPKAD Kota Dumai	-	40.274.549.312,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	45.517.073.840,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		40.124.549.312,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		17.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		17.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		17.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		17.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			4 Laporan	90.000.000,00			-	-	ASN BPKAD Kota Dumai	-	120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur*	-			90 Orang	322.000.000,00			-	-	ASN BPKAD Kota Dumai	-	620.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	22.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	1.595.107.900,00			-	-	ASN BPKAD Kota Dumai	-	2.920.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	55.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	501.707.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		950.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	518.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		1.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan*	-			5 Kegiatan	1.428.608.500,00			-	-	ASN BPKAD Kota Dumai	-	565.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	504.206.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	769.402.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	155.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		195.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	1.603.525.000,00			-	-	ASN BPKAD Kota Dumai	-	1.630.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.925.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	57.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			134 Unit	5.029.158.600,00			-	-	ASN BPKAD Kota Dumai	-	640.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	280.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.649.158.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPKAD Kota Dumai		190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**					**100 %**	**50.715.000.000,00**							**59.100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan]	**Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik** **Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD** **Persentase laporan keuangan tepat waktu** **Persentase Penurunan SILPA** **Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**100** **30** **40** **70.12** **8.20**	**100** **14.66** **20.46** **36.54** **63.43**	**100** **13.86** **21.56** **40.25** **65.05**	**100** **12.96** **22.72** **38.80** **66.55**	**50.715.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**59.100.000.000,00**	-
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah Dokumen Anggaran Daerah*	-			8 Dokumen	4.680.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai	-	5.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	1.385.075.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	1.824.925.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		850.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	270.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				74 Orang	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah Laporan Perbendaharaan Daerah*	-			4 Laporan	1.530.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai	-	1.560.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	85.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	155.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				3 Laporan	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	220.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	160.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				74 Orang	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	-			4 Dokumen	1.485.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai	-	2.540.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	85.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		530.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				74 Orang	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				2 Lembaga	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	43.020.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	-	-	50.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	32.390.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	-		35.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	10.630.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	-		15.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**					**15 Dokumen**	**40.115.746.000,00**							**17.640.000.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola aset daerah]	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**21.91**	**13.78**	**16.58**	**19.58**	**40.115.746.000,00**	-	-	-	-	-	-	**17.640.000.000,00**	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah*	-			4 Dokumen	40.115.746.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai	-	17.640.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	38.455.746.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		15.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	310.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				74 Orang	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kota Dumai		90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		UPT. PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH KELAS A						**4.200.000.000,00**							**4.700.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.200.000.000,00**							**4.700.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**4.200.000.000,00**							**4.700.000.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.000.000.000,00**							**2.200.000.000,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Keuangan (UPT. Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Kelas A)]	**Persentase Penunjang Unsur Keuangan (UPT. Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Kelas A)**	**100**	**-**	**100**	**100**	**2.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.200.000.000,00**	-
	5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.000.000.000,00			-	-	-	-	2.200.000.000,00	UPT. PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH KELAS A
	5.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		2.200.000.000,00	UPT. PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH KELAS A
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**					**-**	**2.200.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.500.000.000,00**	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	2.200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	-	-	2.500.000.000,00	UPT. PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH KELAS A

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	2.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	-		2.500.000.000,00	UPT. PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH KELAS A
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**53.796.539.341,00**							**34.742.179.854,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**53.796.539.341,00**							**34.742.179.854,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**53.796.539.341,00**							**34.742.179.854,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**49.330.100.388,00**							**30.017.142.226,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Keuangan (BAPENDA)]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Keuangan (BAPENDA)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**49.330.100.388,00**	-	-	-	-	-	-	**30.017.142.226,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	50.539.500,00			-	-	ASN Bapenda Kota Dumai	-	29.479.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	50.539.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		29.479.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	-			3 Dokumen	45.547.633.711,00			-	-	ASN Bapenda Kota Dumai	-	26.435.053.926,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				124 Orang/bulan	45.502.699.711,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		26.390.119.926,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	29.934.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		29.934.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	22.013.372,00			-	-	ASN Bapenda Kota Dumai	-	49.608.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	22.013.372,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		49.608.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			154 Dokumen	1.665.913.805,00			-	-	ASN Bapenda Kota Dumai	-	1.459.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	206.913.805,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	175.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		175.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	24.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		24.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		650.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			11 Laporan	1.534.000.000,00			-	-	ASN Bapenda Kota Dumai	-	1.534.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	924.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		924.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			167 Unit	510.000.000,00			-	-	ASN Bapenda Kota Dumai	-	510.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				156 Unit	160.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bapenda Kota Dumai		160.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**100 %**	**4.466.438.953,00**							**4.725.037.628,00**	
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah]	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**38**	**32**	**33**	**34**	**4.466.438.953,00**	-	-	-	-	-	-	**4.725.037.628,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah laporan pengelolaan pendapatan daerah*	-			1 Laporan	4.466.438.953,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai	-	4.725.037.628,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	36.585.780,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai		86.935.780,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	29.440.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai		131.762.860,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	384.032.961,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai		400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	992.365.435,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai		779.384.682,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				10 Laporan	228.916.311,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai		334.178.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	367.168.806,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai		367.168.806,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				10 Obyek Pajak	382.986.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai		382.986.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				10 Dokumen	253.603.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai		253.603.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1000 Layanan	497.765.860,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai		495.443.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	114.999.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai		114.999.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	185.115.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai		385.115.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	221.091.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai		121.091.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	220.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai		220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	298.539.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai		298.539.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				4 Laporan	253.829.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai		353.829.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**10.776.038.733,00**							**8.873.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.776.038.733,00**							**8.873.000.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**8.696.038.733,00**							**8.523.000.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**7.372.538.733,00**							**6.314.000.000,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Kepegawaian, dan Unsur Pendidikan dan Pelatihan]	**Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.372.538.733,00**	-	-	-	-	-	-	**6.314.000.000,00**	-
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			6 Dokumen	47.901.263,00			-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai	-	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	24.925.613,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	20.632.030,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.343.620,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	6.579.002.640,00			-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai	-	5.056.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	6.529.002.640,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		5.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		56.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			2 Laporan	25.000.000,00			-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai	-	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	230.458.750,00			-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai	-	446.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.100.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.318.750,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		73.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32.040.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		69.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	17.500.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		51.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	125.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		216.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			2 unit	37.429.800,00			-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai	-	55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	37.429.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			2 Laporan	345.506.280,00			-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai	-	470.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	28.200.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		29.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	317.306.280,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		441.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			33 Unit	107.240.000,00			-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai	-	242.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	69.340.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		139.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	16.780.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		34.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	21.120.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BKPSDM Kota Dumai		69.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					**99.75 %**	**1.323.500.000,00**							**2.209.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian]	**Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi**	**60**	**60.9**	**61.4**	**60.4**	**1.323.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.209.000.000,00**	-
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian*	-			114 Dokumen	690.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai	-	1.166.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		530.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				110 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		425.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN]	**Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya**	**15**	**3**	**8**	**8**	**1.323.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.209.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN*	-			958 Dokumen	150.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai	-	335.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				150 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				800 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		155.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				8 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN]	**Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**2.6**	**1.5**	**1.6**	**2**	**1.323.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.209.000.000,00**	-
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN*	-			1 Dokumen	62.920.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai	-	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				55 Orang	12.920.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN]	**Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik**	**97**	**96.65**	**96.7**	**96.75**	**1.323.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.209.000.000,00**	-
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen/Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	-			2 Dokumen	420.580.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai	-	633.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				20 Orang	11.640.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				200 Orang	48.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		48.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	42.940.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	18.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**2.080.000.000,00**							**350.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					**8 %**	**2.080.000.000,00**							**350.000.000,00**	
		[Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis]	**Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis**	**14.2**	**11.2**	**11.7**	**12.2**	**2.080.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**350.000.000,00**	-
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis*	-			1 Dokumen	80.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai	-	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				12 Orang	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional]	**Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.080.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**350.000.000,00**	-
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*	-			2 Laporan	2.000.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai	-	300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	2.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Pemerintah Kota Dumai		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH						**3.361.499.230,00**							**4.237.500.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.361.499.230,00**							**4.237.500.000,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**3.361.499.230,00**							**4.237.500.000,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**2.611.499.230,00**							**3.702.500.000,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Penelitian dan Pengembangan]	**Persentase Penunjang Unsur Penelitian dan Pengembangan**	**100**	**90**	**100**	**100**	**2.611.499.230,00**	-	-	-	-	-	-	**3.702.500.000,00**	-
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			4 Dokumen	3.521.131,00			-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai	-	4.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3.521.131,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai		4.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			1 Dokumen	2.030.931.720,00			-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai	-	2.800.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2.030.931.720,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai		2.800.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			2 laporan	9.081.000,00			-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai	-	15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	9.081.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai		15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	131.652.834,00			-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai	-	264.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.175.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai		7.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	50.434.664,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai		55.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.250.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai		17.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai		20.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	9.086.930,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai		15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	44.706.240,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai		150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			3 Laporan	387.432.945,00			-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai	-	512.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.214.625,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai		900.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	50.400.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai		78.600.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	335.818.320,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai		433.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			18 unit	48.879.600,00			-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai	-	106.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai		40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	23.250.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai		40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	6.629.600,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai		26.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**					**36 %**	**750.000.000,00**							**535.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan]	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan**	**100**	**10**	**12**	**36**	**750.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**535.000.000,00**	-
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Kota Dumai	-	90.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Kota Dumai		90.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	-			2 Dokumen 2 Dokumen	150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Kota Dumai	-	135.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga				1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Kota Dumai		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Kota Dumai		135.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	-			2 Dokumen	450.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Kota Dumai	-	165.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				1 Dokumen	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Kota Dumai		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Kota Dumai		165.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Dokumen / Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Kota Dumai	-	145.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Kota Dumai		145.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		INSPEKTORAT DAERAH						**24.443.499.570,00**							**27.148.453.580,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**24.443.499.570,00**							**27.148.453.580,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**24.443.499.570,00**							**27.148.453.580,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**18.390.679.384,00**							**20.598.453.580,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah]	**Persentase Penunjang Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**18.390.679.384,00**	-	-	-	-	-	-	**20.598.453.580,00**	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	210.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat	-	350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	13.428.093.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat	-	14.054.453.580,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	13.428.093.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		14.054.453.580,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			1 Laporan	270.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat	-	350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	270.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya*	-			86 Orang	2.250.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat	-	2.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				86 Orang	2.250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		2.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	1.014.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat	-	1.320.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	170.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	411.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan*	-			16 Unit	345.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat	-	585.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		195.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		195.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.390.679.384,00**	-	-	-	-	-	-	**20.598.453.580,00**	-
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	195.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		195.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah]	**Persentase Penunjang Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**18.390.679.384,00**	-	-	-	-	-	-	**20.598.453.580,00**	-
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasan*	-			3 Laporan	436.203.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat	-	914.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	410.203.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		864.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Dipelihara*	-			144 Unit	436.883.084,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat	-	1.025.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	3.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		330.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				130 Unit	135.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	48.883.084,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN Inspektorat		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**					**100 %**	**2.926.078.970,00**							**2.900.000.000,00**	
		[Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]	**Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan tahun n-1**	**90.5**	**87**	**87**	**87.5**	**2.926.078.970,00**	-	-	-	-	-	-	**2.900.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal*	-			156 Laporan	2.682.478.970,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah	-	2.250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Laporan	124.460.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				68 Laporan	1.604.673.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah		850.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				80 Laporan	377.703.270,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah		600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	525.642.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah		600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	-			21 Laporan	243.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah	-	650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	180.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	63.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah		400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**					**100 %**	**3.126.741.216,00**							**3.650.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi]	**Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi sebagai implementasi dari kebijakan teknis yang disusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.126.741.216,00**	-	-	-	-	-	-	**3.650.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun*	-			2 rekomendasi	285.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah	-	300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	210.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi*	-			40 perangkat daerah	2.841.741.216,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah	-	3.350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				3 perangkat daerah	1.300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah		1.250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				40 perangkat daerah	637.161.216,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah		750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah		850.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				40 perangkat daerah	404.580.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah		500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN DUMAI BARAT						**8.507.360.302,00**							**10.747.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**8.507.360.302,00**							**10.747.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**8.507.360.302,00**							**10.747.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**8.177.360.302,00**							**9.745.500.000,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat]	**Persentase Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Dumai Barat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**8.177.360.302,00**	-	-	-	-	-	-	**9.745.500.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen / laporan perencanaan, penganggaran dan eevaluasi kinerja perangkat Daerah*	-			10 Dokumen	15.173.900,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat	-	70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.677.900,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	996.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan*	-			16 Dokumen	5.311.824.765,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat	-	6.030.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	5.308.145.640,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		6.000.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.597.625,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	1.081.500,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			3 Laporan	7.500.000,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat	-	37.500.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		26.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		2.500.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		9.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat Daerah*	-			12 bulan	84.717.207,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat	-	435.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	25.697.207,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		75.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		75.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		65.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.520.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah*	-			12 bulan	2.661.579.990,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat	-	2.953.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	89.379.990,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.571.200.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		2.800.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara*	-			54 Unit	96.564.440,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat	-	220.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	94.564.440,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	2.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Barat		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 %**	**145.000.000,00**							**595.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Dumai Barat]	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Barat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**145.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**595.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan*	-			1 Dokumen	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai	-	125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai		125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*	-			7 Dokumen	75.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	-	415.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat*	-			5 Dokumen	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	-	55.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		55.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**125.000.000,00**							**267.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Barat]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**125.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**267.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	-			4 Kelurahan	10.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	-	90.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				400 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		55.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		35.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan*	-			2 Lembaga	15.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	-	30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Laporan dan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan*	-			4 Laporan	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	-	147.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 %**	**50.000.000,00**							**120.000.000,00**	
		[Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Barat]	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**120.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah dokumen hasil Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	-	120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**100 %**	**10.000.000,00**							**20.000.000,00**	
		[Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Barat]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Barat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**20.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			5 Jenis Lomba	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	-	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				20 Orang	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
		KELURAHAN PURNAMA						**722.126.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**722.126.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**722.126.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**722.126.000,00**							**1.000.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Purnama]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**722.126.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	722.126.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Purnama	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN PURNAMA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	649.913.400,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Purnama		900.000.000,00	KELURAHAN PURNAMA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	72.212.600,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Purnama		100.000.000,00	KELURAHAN PURNAMA
		KELURAHAN PANGKALAN SESAI						**571.884.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**571.884.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**571.884.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**571.884.000,00**							**1.000.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Pangkalan Sesai]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**571.884.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	571.884.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Pangkalan Sesai	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN PANGKALAN SESAI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	514.695.600,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Pangkalan Sesai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Pangkalan Sesai		900.000.000,00	KELURAHAN PANGKALAN SESAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	57.188.400,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Pangkalan Sesai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Pangkalan Sesai		100.000.000,00	KELURAHAN PANGKALAN SESAI
		KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN						**621.517.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**621.517.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**621.517.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**621.517.000,00**							**1.000.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**621.517.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	621.517.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Simpang tetap darul Ihsan	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	559.365.300,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Simapang Tetap Darul Ichsan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Simpang tetap darul Ihsan		900.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	62.151.700,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Simapang Tetap Darul Ichsan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Simpang tetap darul Ihsan		100.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
		KELURAHAN BAGAN KELADI						**554.327.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**554.327.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**554.327.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**554.327.000,00**							**1.000.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bagan Keladi]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**554.327.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	554.327.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Keladi	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN BAGAN KELADI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	498.894.300,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Bagan Keladi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Keladi		900.000.000,00	KELURAHAN BAGAN KELADI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	55.432.700,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Bagan Keladi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Keladi		100.000.000,00	KELURAHAN BAGAN KELADI
		KECAMATAN DUMAI TIMUR						**10.662.580.260,00**							**12.052.533.760,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**10.662.580.260,00**							**12.052.533.760,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**10.662.580.260,00**							**12.052.533.760,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**10.530.278.160,00**							**11.612.533.760,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur]	**Persentase Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.530.278.160,00**	-	-	-	-	-	-	**11.612.533.760,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			10 Dokumen/ Laporan	15.000.000,00			-	-	Kecamatan Dumai Timur	-	180.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			20 Dokumen	6.510.533.760,00			-	-	Kecamatan Dumai Timur	-	6.742.533.760,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	6.504.533.760,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		6.552.533.760,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	2.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	2.000.000,00			-	-	Kecamatan Dumai Timur	-	70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			57 Orang	2.000.000,00			-	-	Kecamatan Dumai Timur	-	70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	170.000.000,00			-	-	Kecamatan Dumai Timur	-	845.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	40.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		75.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	3.637.123.560,00			-	-	Kecamatan Dumai Timur	-	3.400.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	80.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3.547.123.560,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		3.200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	-			52 Unit	193.620.840,00			-	-	Kecamatan Dumai Timur	-	305.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	188.990.840,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		280.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	4.630.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Dumai Timur		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 %**	**13.952.100,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Dumai Timur]	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Timur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**13.952.100,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat*	-			1 Dokumen	13.952.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan	-	0,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	13.952.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan		0,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**96.100.000,00**							**270.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Timur]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**96.100.000,00**	-	-	-	-	-	-	**270.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	-			5 Kelurahan	46.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Dumai Timur	-	170.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				106 Lembaga Kemasyarakatan	43.850.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Dumai Timur		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	2.250.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Dumai Timur		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	-			5 Kelurahan	50.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Dumai Timur	-	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				70 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Dumai Timur		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				70 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Dumai Timur		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				70 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Dumai Timur		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				70 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Dumai Timur		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				70 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Dumai Timur		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 %**	**1.063.586,00**							**20.000.000,00**	
		[Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Timur]	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Timur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.063.586,00**	-	-	-	-	-	-	**20.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			1 Laporan	1.063.586,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur	-	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1.063.586,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**100 %**	**21.186.414,00**							**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Timur]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Timur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**21.186.414,00**	-	-	-	-	-	-	**150.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*	-			5 jenis lomba	21.186.414,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Dumai Timur	-	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	21.186.414,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Dumai Timur		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
		KELURAHAN JAYA MUKTI						**632.700.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**632.700.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**632.700.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**632.700.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Jaya Mukti]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**632.700.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas / Ormas	632.700.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Kelurahan Jaya Mukti	-	0,00	KELURAHAN JAYA MUKTI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	500.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Kelurahan Jaya Mukti		0,00	KELURAHAN JAYA MUKTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	132.700.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Kelurahan Jaya Mukti		0,00	KELURAHAN JAYA MUKTI
		KELURAHAN BULUH KASAP						**285.411.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**285.411.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**285.411.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**285.411.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Buluh Kasap]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**285.411.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas / Ormas	285.411.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Kelurahan Buluh Kasap	-	0,00	KELURAHAN BULUH KASAP
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	235.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Kelurahan Buluh Kasap		0,00	KELURAHAN BULUH KASAP
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50.411.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Kelurahan Buluh Kasap		0,00	KELURAHAN BULUH KASAP
		KELURAHAN TANJUNG PALAS						**574.315.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**574.315.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**574.315.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**574.315.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Tanjung Palas]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**574.315.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas / Ormas	574.315.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Kelurahan Tanjung Palas	-	0,00	KELURAHAN TANJUNG PALAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	440.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Tanjung Palas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Kelurahan Tanjung Palas		0,00	KELURAHAN TANJUNG PALAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	134.315.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Tanjung Palas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Kelurahan Tanjung Palas		0,00	KELURAHAN TANJUNG PALAS
		KELURAHAN BUKIT BATREM						**582.049.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**582.049.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**582.049.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1 Pokmas / Ormas**	**582.049.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Batrem]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**582.049.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas / Ormas	582.049.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Kelurahan Bukit Batrem	-	0,00	KELURAHAN BUKIT BATREM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	500.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Bukit Batrem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Kelurahan Bukit Batrem		0,00	KELURAHAN BUKIT BATREM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	82.049.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Bukit Batrem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Kelurahan Bukit Batrem		0,00	KELURAHAN BUKIT BATREM
		KELURAHAN TELUK BINJAI						**448.782.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**448.782.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**448.782.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**448.782.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Teluk Binjai]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**448.782.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas / Ormas	448.782.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Kelurahan Teluk Binjai	-	0,00	KELURAHAN TELUK BINJAI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	363.782.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Kelurahan Teluk Binjai		0,00	KELURAHAN TELUK BINJAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	85.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Kelurahan Teluk Binjai		0,00	KELURAHAN TELUK BINJAI
		KECAMATAN BUKIT KAPUR						**10.314.046.538,00**							**14.122.902.540,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**10.314.046.538,00**							**14.122.902.540,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**10.314.046.538,00**							**14.122.902.540,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**10.107.149.065,00**							**13.282.902.540,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur]	**Persentase Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.107.149.065,00**	-	-	-	-	-	-	**13.282.902.540,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			8 Dokumen	17.235.151,73			-	-	ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur	-	120.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.650.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.676.064,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.502.684,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.576.679,33	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.500.000,40	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.329.724,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumalah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	7.124.455.650,00			-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	-	8.856.402.540,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	7.074.558.200,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		8.711.402.540,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	44.999.988,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		115.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.371.822,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		10.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.525.640,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			4 Laporan	37.682.896,00			-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	-	175.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	23.280.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		115.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.107.149.065,00**	-	-	-	-	-	-	**13.282.902.540,00**	-
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.402.896,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur]	**Persentase Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.107.149.065,00**	-	-	-	-	-	-	**13.282.902.540,00**	-
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			2 Laporan	2.400.000,00			-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	-	20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.400.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum*	-			7 Laporan	133.625.962,00			-	-	ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur	-	827.500.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.729.900,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur		95.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	27.598.100,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur		130.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10.342.850,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur		90.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	39.955.012,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur		190.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.100,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur		90.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur		45.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	22.500.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Kecamatan Bukit Kapur		187.500.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 Laporan	2.715.132.905,27			-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	-	3.007.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.340.198,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		10.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	135.135.359,27	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		145.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.100.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		52.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.573.557.348,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		2.800.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			5 Laporan	76.616.500,00			-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	-	277.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	44.584.200,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		87.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	27.032.300,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		100.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.107.149.065,00**	-	-	-	-	-	-	**13.282.902.540,00**	-
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	5.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur		90.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 %**	**15.000.000,00**							**205.000.000,00**	
		[Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur]	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Bukit Kapur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**15.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**205.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	-			2 Dokumen	10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	-	150.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		0,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		150.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat*	-			2 Laporan	5.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	-	55.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		55.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**152.212.000,00**							**335.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**152.212.000,00**	-	-	-	-	-	-	**335.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			7 Laporan	92.212.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	-	215.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	92.212.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		215.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	60.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	-	120.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				30 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				30 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				30 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				30 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				30 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 %**	**15.685.473,00**							**150.000.000,00**	
		[Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Bukit Kapur]	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Bukit Kapur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**15.685.473,00**	-	-	-	-	-	-	**150.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			1 Laporan	15.685.473,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	-	150.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	15.685.473,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		150.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**100 %**	**24.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		[Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Bukit Kapur]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Bukit Kapur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**24.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**150.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			1 Laporan	24.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	-	150.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	24.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur		150.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
		KELURAHAN BUKIT NENAS						**513.205.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**513.205.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**513.205.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**513.205.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Nenas]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**513.205.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.200.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	513.205.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Nenas	-	1.000.200.000.000,00	KELURAHAN BUKIT NENAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	461.886.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Nenas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Nenas		1.000.000.000.000,00	KELURAHAN BUKIT NENAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	51.318.500,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Nenas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Nenas		200.000.000,00	KELURAHAN BUKIT NENAS
		KELURAHAN KAMPUNG BARU						**541.027.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**541.027.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**541.027.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**541.027.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Kampung Baru]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**541.027.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.200.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	541.027.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Kampung Baru	-	1.000.200.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	486.924.300,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Kampung Baru		1.000.000.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	54.102.700,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Kampung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Kampung Baru		200.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BARU
		KELURAHAN GURUN PANJANG						**449.124.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**449.124.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**449.124.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**449.124.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Gurun Panjang]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**449.124.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.200.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	449.124.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Gurun Panjang	-	1.000.200.000.000,00	KELURAHAN GURUN PANJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	404.211.600,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Gurun Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Gurun Panjang		1.000.000.000.000,00	KELURAHAN GURUN PANJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	44.912.400,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Gurun Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Gurun Panjang		200.000.000,00	KELURAHAN GURUN PANJANG
		KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR						**552.274.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**552.274.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**552.274.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**552.274.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bagan Besar Timur]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**552.274.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.200.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana*	-			100 %	552.274.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Besar Timur	-	1.000.200.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	497.046.600,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Besar Timur		1.000.000.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	55.227.400,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar Timur	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Besar Timur		200.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR
		KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR						**404.795.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**404.795.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**404.795.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**404.795.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Kayu Kapur]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**404.795.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.200.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	404.795.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Kayu Kapur	-	1.000.200.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	364.315.500,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Kayu Kapur		1.000.000.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	40.479.500,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Kayu Kapur		200.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR
		KELURAHAN BAGAN BESAR						**499.289.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**499.289.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**499.289.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**499.289.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bagan Besar]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**499.289.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.200.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	499.289.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Besar	-	1.000.200.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	449.360.100,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Besar		1.000.000.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	49.928.900,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Besar		200.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR
		KELURAHAN BUKIT KAPUR						**388.740.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**388.740.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**388.740.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**388.740.000,00**							**1.000.200.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Kapur]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**388.740.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.200.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	388.740.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Kapur	-	1.000.200.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	349.866.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Sabudom Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Kapur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Kapur		1.000.000.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	38.874.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Sabudom Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Kapur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Kapur		200.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAPUR
		KECAMATAN DUMAI KOTA						**10.079.749.050,00**							**12.407.799.102,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**10.079.749.050,00**							**12.407.799.102,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**10.079.749.050,00**							**12.407.799.102,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**9.821.301.698,00**							**11.613.799.102,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota]	**Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan Dumai Kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.821.301.698,00**	-	-	-	-	-	-	**11.613.799.102,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			9 Dokumen	19.052.900,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	-	41.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.147.250,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.590.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		6.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.588.750,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.755.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.921.900,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		6.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.400.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		6.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.650.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	-			14 Dokumen	6.076.653.893,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	-	6.832.789.102,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	6.066.078.868,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		6.797.789.102,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.848.750,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	5.339.375,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.386.900,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			6 Laporan	5.629.000,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	-	18.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.475.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2.435.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.719.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	78.537.159,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	-	682.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.004.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	19.155.310,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		160.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	9.999.450,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.999.500,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	2.499.899,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	999.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	26.880.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		202.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	3.435.023.720,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	-	3.570.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	750.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	134.640.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		37.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.293.133.720,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		3.400.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			101 Unit	206.405.026,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	-	470.010.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	165.125.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		400.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	41.280.026,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota		70.010.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 %**	**75.607.352,00**							**295.000.000,00**	
		[Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Dumai Kota]	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	**75.607.352,00**	-	-	-	-	-	-	**295.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			1 dokumen	26.502.352,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	-	120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	26.502.352,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*	-			2 Dokumen	49.105.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	-	175.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	49.105.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		175.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**162.840.000,00**							**244.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Kota]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**162.840.000,00**	-	-	-	-	-	-	**244.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	-			5 Kelurahan	25.640.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	-	90.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				148 Lembaga Kemasyarakatan	20.640.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	-			5 Kegiatan	17.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	-	70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	5.200.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	-			12 Kegiatan	120.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	-	84.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				30 Keluarga	24.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				30 Keluarga	12.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	12.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				30 Keluarga	12.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				30 Keluarga	12.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				30 Keluarga	24.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				30 Keluarga	24.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 %**	**10.000.000,00**							**125.000.000,00**	
		[Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Kota]	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**125.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			1 Laporan	10.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	-	125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**100 %**	**10.000.000,00**							**130.000.000,00**	
		[Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Kota]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**130.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			5 Kegiatan	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	-	130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota		130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
		KELURAHAN LAKSAMANA						**549.390.000,00**							**1.098.780.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**549.390.000,00**							**1.098.780.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**549.390.000,00**							**1.098.780.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**549.390.000,00**							**1.098.780.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Laksamana]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**549.390.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.098.780.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	549.390.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Laksamana	-	1.098.780.000,00	KELURAHAN LAKSAMANA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	494.451.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Laksamana		988.902.000,00	KELURAHAN LAKSAMANA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	54.939.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Laksamana		109.878.000,00	KELURAHAN LAKSAMANA
		KELURAHAN SUKAJADI						**342.565.000,00**							**685.132.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**342.565.000,00**							**685.132.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**342.565.000,00**							**685.132.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**342.565.000,00**							**685.132.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Sukajadi]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**342.565.000,00**	-	-	-	-	-	-	**685.132.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	342.565.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Sukajadi	-	685.132.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	308.308.500,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Sukajadi		616.619.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	34.256.500,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Sukajadi		68.513.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
		KELURAHAN DUMAI KOTA						**390.851.000,00**							**781.702.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**390.851.000,00**							**781.702.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**390.851.000,00**							**781.702.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**390.851.000,00**							**781.702.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Dumai Kota]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**390.851.000,00**	-	-	-	-	-	-	**781.702.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	390.851.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Dumai Kota	-	781.702.000,00	KELURAHAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	351.765.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Dumai Kota	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Dumai Kota		703.531.800,00	KELURAHAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	39.085.100,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Dumai Kota	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Dumai Kota		78.170.200,00	KELURAHAN DUMAI KOTA
		KELURAHAN BINTAN						**411.156.000,00**							**822.313.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**411.156.000,00**							**822.313.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**411.156.000,00**							**822.313.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**411.156.000,00**							**822.313.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bintan]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**411.156.000,00**	-	-	-	-	-	-	**822.313.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	411.156.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	masyarakat kelurahan bintan	-	822.313.000,00	KELURAHAN BINTAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	370.040.400,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	masyarakat kelurahan bintan		740.081.700,00	KELURAHAN BINTAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	41.115.600,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	masyarakat kelurahan bintan		82.231.300,00	KELURAHAN BINTAN
		KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG						**461.482.000,00**							**922.963.100,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**461.482.000,00**							**922.963.100,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**461.482.000,00**							**922.963.100,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**461.482.000,00**							**922.963.100,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Rimba Sekampung]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**461.482.000,00**	-	-	-	-	-	-	**922.963.100,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	461.482.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung	-	922.963.100,00	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	415.333.800,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Rimba Sekampung	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung		830.666.700,00	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	46.148.200,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Rimba Sekampung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung		92.296.400,00	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG
		KECAMATAN DUMAI SELATAN						**9.300.056.332,00**							**10.278.646.800,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**9.300.056.332,00**							**10.278.646.800,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**9.300.056.332,00**							**10.278.646.800,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**9.102.144.332,00**							**9.908.646.800,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan]	**Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan Dumai Selatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.102.144.332,00**	-	-	-	-	-	-	**9.908.646.800,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			9 Dokumen	13.893.506,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan	-	35.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.898.921,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.898.917,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.898.917,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.898.917,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.898.917,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.898.917,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			14 Dokumen	5.668.470.167,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan	-	5.951.646.800,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	5.660.970.167,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		5.927.646.800,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		7.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		7.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah*	-			2 Laporan	6.490.080,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan	-	27.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3.990.080,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Paket	79.806.579,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan	-	400.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.507.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.292.241,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		90.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	1.907.338,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		60.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	28.100.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			10 Laporan	3.204.411.200,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan	-	3.255.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	121.071.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	3.082.140.200,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		3.150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			300 unit	129.072.800,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan	-	240.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	126.306.800,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		210.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.766.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Dumai Selatan		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 %**	**80.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		[Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan]	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Selatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**80.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100.000.000,00**	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			11 Dokumen	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan	-	80.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	-			6 Dokumen	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan	-	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**84.000.000,00**							**130.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**84.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**130.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			5 Kelurahan	5.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan	-	30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Keluarga yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	-			360 Keluarga	79.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan	-	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				50 Keluarga	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 Keluarga	7.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	7.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 %**	**8.912.000,00**							**50.000.000,00**	
		[Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Dumai Selatan]	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Selatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**8.912.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	-			1 Laporan	8.912.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan	-	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	8.912.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**25.000.000,00**							**90.000.000,00**	
		[Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Dumai Selatan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Selatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**25.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**90.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan	-	90.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Dumai Selatan		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
		KELURAHAN BUKIT TIMAH						**555.629.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**555.629.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**555.629.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**555.629.000,00**							**1.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Timah]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**555.629.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	555.629.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Timah	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN BUKIT TIMAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	500.066.100,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Timah		900.000.000,00	KELURAHAN BUKIT TIMAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	55.562.900,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Timah		100.000.000,00	KELURAHAN BUKIT TIMAH
		KELURAHAN BUKIT DATUK						**448.876.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**448.876.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**448.876.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**448.876.000,00**							**1.000.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bukit Datuk]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**448.876.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	448.876.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Datuk	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN BUKIT DATUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	403.988.400,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Datuk		900.000.000,00	KELURAHAN BUKIT DATUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	44.887.600,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Datuk		100.000.000,00	KELURAHAN BUKIT DATUK
		KELURAHAN MEKAR SARI						**545.752.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**545.752.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**545.752.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**545.752.000,00**							**1.000.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Mekar Sari]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**545.752.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	545.752.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Mekar Sari	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN MEKAR SARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	491.176.800,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Mekar Sari		900.000.000,00	KELURAHAN MEKAR SARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	54.575.200,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Mekar Sari		100.000.000,00	KELURAHAN MEKAR SARI
		KELURAHAN BUMI AYU						**482.578.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**482.578.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**482.578.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**482.578.000,00**							**1.000.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bumi Ayu]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**482.578.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	482.578.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bumi Ayu	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN BUMI AYU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	434.320.200,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bumi Ayu		900.000.000,00	KELURAHAN BUMI AYU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	48.257.800,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bumi Ayu		100.000.000,00	KELURAHAN BUMI AYU
		KELURAHAN RATU SIMA						**526.090.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**526.090.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**526.090.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**526.090.000,00**							**1.000.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Ratu Sima]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**526.090.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	526.090.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Ratu Sima	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN RATU SIMA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	473.481.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Ratu Sima		900.000.000,00	KELURAHAN RATU SIMA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	52.609.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Ratu Sima		100.000.000,00	KELURAHAN RATU SIMA
		KECAMATAN MEDANG KAMPAI						**7.154.572.660,00**							**8.858.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.154.572.660,00**							**8.858.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.154.572.660,00**							**8.858.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**6.984.901.580,00**							**7.968.000.000,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Medang Kampai]	**Persentase Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Medang Kampai**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.984.901.580,00**	-	-	-	-	-	-	**7.968.000.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			9 Dokumen	12.279.550,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	41.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.681.800,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		8.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.741.050,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		6.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	696.100,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		6.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.727.650,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		6.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.659.250,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		5.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.848.500,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		5.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.925.200,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		5.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			14 Dokumen	5.247.404.790,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	6.047.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	5.233.502.640,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		6.000.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.902.150,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		16.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		24.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		7.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	-			3 Laporan	13.500.000,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	96.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		6.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		90.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	81.210.020,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	1.046.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.818.620,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		6.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.783.400,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		300.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	25.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		300.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		60.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.608.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		80.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		300.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	1.563.109.720,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	338.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		8.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	60.014.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		80.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.481.595.720,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			45 Unit	67.397.500,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	400.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	56.877.500,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	10.520.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 %**	**29.671.080,00**							**370.000.000,00**	
		[Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Medang Kampai]	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Medang Kampai**	**100**	**100**	**100**	**100**	**29.671.080,00**	-	-	-	-	-	-	**370.000.000,00**	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	-			11 Dokumen	24.671.080,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	70.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	24.671.080,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI		70.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*	-			5 Dokumen	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN KECAMATAN MEEDANG KAMPAI	-	300.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ASN KECAMATAN MEEDANG KAMPAI		300.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**90.000.000,00**							**270.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Medang Kampai]	**Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Medang Kampai**	**100**	**100**	**100**	**100**	**90.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**270.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	-			4 Pokmas	50.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				500 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Keluarga Yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	-			170 Keluarga	40.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	70.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				20 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		30.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				40 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		40.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 %**	**40.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		[Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Medang Kampai]	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Medang Kampai**	**100**	**100**	**100**	**100**	**40.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**200.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			1 Dokumen	40.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		200.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**10.000.000,00**							**50.000.000,00**	
		[Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Medang Kampai]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Medang Kampai**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			5 Event	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	-	50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	10.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai		50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
		KELURAHAN PELINTUNG						**438.728.000,00**							**5.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**438.728.000,00**							**5.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**438.728.000,00**							**5.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**438.728.000,00**							**5.000.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Pelintung]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**438.728.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.000.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	-			4 Pokmas	438.728.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	5.000.000.000,00	KELURAHAN PELINTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	394.855.200,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Pelintung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		2.000.000.000,00	KELURAHAN PELINTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	43.872.800,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		3.000.000.000,00	KELURAHAN PELINTUNG
		KELURAHAN GUNTUNG						**594.886.000,00**							**5.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**594.886.000,00**							**5.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**594.886.000,00**							**5.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**594.886.000,00**							**5.000.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Guntung]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**594.886.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.000.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	-			4 Pokmas	594.886.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	5.000.000.000,00	KELURAHAN GUNTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	535.397.400,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Guntung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		2.000.000.000,00	KELURAHAN GUNTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	59.488.600,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Guntung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MASYARAKAT KECAMATAN MEDANG KAMPAI		3.000.000.000,00	KELURAHAN GUNTUNG
		KELURAHAN TELUK MAKMUR						**520.937.000,00**							**4.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**520.937.000,00**							**4.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**520.937.000,00**							**4.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**520.937.000,00**							**4.000.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Teluk Makmur]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**520.937.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.000.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	-			4 Pokmas	520.937.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat kelurahan Teluk Makmur	-	4.000.000.000,00	KELURAHAN TELUK MAKMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	468.843.300,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Teluk Makmur	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat kelurahan Teluk Makmur		2.000.000.000,00	KELURAHAN TELUK MAKMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	52.093.700,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Teluk Makmur	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat kelurahan Teluk Makmur		2.000.000.000,00	KELURAHAN TELUK MAKMUR
		KELURAHAN MUNDAM						**572.074.000,00**							**4.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**572.074.000,00**							**4.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**572.074.000,00**							**4.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**572.074.000,00**							**4.000.000.000,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Mundam]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**572.074.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.000.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	-			4 Pokmas	572.074.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat kelurahan Mundam	-	4.000.000.000,00	KELURAHAN MUNDAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	514.866.600,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Mundam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat kelurahan Mundam		2.000.000.000,00	KELURAHAN MUNDAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	57.207.400,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Mundam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat kelurahan Mundam		2.000.000.000,00	KELURAHAN MUNDAM
		KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN						**10.485.904.950,00**							**12.534.438.143,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**10.485.904.950,00**							**12.534.438.143,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**10.485.904.950,00**							**12.534.438.143,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**10.206.586.200,00**							**11.205.000.000,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan]	**Persentase Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.206.586.200,00**	-	-	-	-	-	-	**11.205.000.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			10 Dokumen	34.600.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	220.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		10.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		10.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		10.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		10.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		10.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	4.600.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		160.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		10.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			3 Laporan	7.113.346.920,00			-	-	Perangkat Daerah	-	7.225.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	7.040.594.920,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		7.200.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.490.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	66.262.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	35.980.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	70.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		10.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	31.980.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		60.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			4 Laporan	36.000.000,00			-	-	ASN Kecamatan Sungai Sembilan	-	80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	36.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Sungai Sembilan		80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			2 Laporan	130.256.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	560.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.900.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	27.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		120.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	37.500.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		130.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		70.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	46.856.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		200.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 Laporan	2.807.058.280,00			-	-	Perangkat Daerah	-	2.830.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		10.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	84.019.800,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		120.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.722.038.480,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		2.700.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			21 Unit	49.345.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	220.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	22.345.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	27.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		140.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**-**	**39.740.000,00**							**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan]	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39.740.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100.000.000,00**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	-			1 Laporan	39.740.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	-	100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	39.740.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**214.578.750,00**							**900.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**214.578.750,00**	-	-	-	-	-	-	**900.000.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	-			6 Pokmas	22.596.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	-	0,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	22.596.750,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		0,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Sungai Sembilan]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**214.578.750,00**	-	-	-	-	-	-	**900.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*kelurahan Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	-			6 Pokmas	9.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	-	100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	9.250.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Keluarga yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	-			200 Keluarga	182.732.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan dan PKK Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan	-	800.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				20 Keluarga	18.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan dan PKK Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan		80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				20 Keluarga	18.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan dan PKK Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan		80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				20 Keluarga	18.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan dan PKK Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan		80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				20 Keluarga	20.732.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan dan PKK Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan		80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				20 Keluarga	18.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan dan PKK Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan		80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				20 Keluarga	18.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan dan PKK Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan		80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				20 Keluarga	18.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan dan PKK Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan		80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				20 Keluarga	18.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan dan PKK Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan		80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				20 Keluarga	18.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan dan PKK Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan		80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				20 Keluarga	18.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan dan PKK Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan		80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**10.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		[Terlaksananya fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Sungai Sembilan]	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	-			1 Laporan	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	-	100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**100 %**	**15.000.000,00**							**229.438.143,00**	
		[Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan urusan pemerintahan umum yang terlaksana di Kecamatan Sungai Sembilan]	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**15.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**229.438.143,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			2 Laporan	15.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	-	229.438.143,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				30 Orang	10.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		129.438.143,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan		100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
		KELURAHAN BASILAM BARU						**386.487.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**386.487.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**386.487.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**386.487.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Basilam Baru]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**386.487.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas / Ormas	386.487.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Basilam Baru	-	0,00	KELURAHAN BASILAM BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	347.838.300,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Basilam Baru		0,00	KELURAHAN BASILAM BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	38.648.700,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Basilam Baru		0,00	KELURAHAN BASILAM BARU
		KELURAHAN BANGSAL ACEH						**451.121.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**451.121.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**451.121.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**451.121.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Bangsal Aceh]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**451.121.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas	451.121.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh	-	0,00	KELURAHAN BANGSAL ACEH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	406.008.900,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh		0,00	KELURAHAN BANGSAL ACEH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	45.112.100,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh		0,00	KELURAHAN BANGSAL ACEH
		KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL						**526.438.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**526.438.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**526.438.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**526.438.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelutahan Tanjung Penyembal]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**526.438.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	526.438.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Tanjung Penyembal	-	0,00	KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	473.794.200,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Tanjung Penyembal		0,00	KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	52.643.800,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Tanjung Penyembal		0,00	KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL
		KELURAHAN LUBUK GAUNG						**524.432.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**524.432.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**524.432.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**524.432.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Lubuk Gaung]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**524.432.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas / Ormas	524.432.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Lubuk Gaung	-	0,00	KELURAHAN LUBUK GAUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	471.988.800,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Lubuk Gaung		0,00	KELURAHAN LUBUK GAUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	52.443.200,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Lubuk Gaung		0,00	KELURAHAN LUBUK GAUNG
		KELURAHAN SUNGAI GENIOT						**463.447.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**463.447.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**463.447.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**463.447.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Sungai Geniot]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**463.447.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			1 Pokmas / Ormas	463.447.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Sungai Geniot	-	0,00	KELURAHAN SUNGAI GENIOT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	417.102.300,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Padua Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Sungai Geniot		0,00	KELURAHAN SUNGAI GENIOT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	46.344.700,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Padua Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Sungai Geniot		0,00	KELURAHAN SUNGAI GENIOT
		KELURAHAN BATU TERITIP						**465.536.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**465.536.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**465.536.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**465.536.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kelurahan Batu Teritip]	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**465.536.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	465.536.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Batu Teritip	-	0,00	KELURAHAN BATU TERITIP
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	418.982.400,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Batu Teritip		0,00	KELURAHAN BATU TERITIP
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	46.553.600,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kelurahan Batu Teritip		0,00	KELURAHAN BATU TERITIP
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**14.057.604.102,00**							**7.947.450.760,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**14.057.604.102,00**							**7.947.450.760,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**14.057.604.102,00**							**7.947.450.760,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**100 %**	**4.472.371.966,00**							**4.832.450.760,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik]	**Persentase Penunjang Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik**	**100**	**88.37**	**100**	**100**	**4.472.371.966,00**	-	-	-	-	-	-	**4.832.450.760,00**	-
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 dokumen	3.435.382.440,00			-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai	-	3.618.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	3.435.382.440,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		3.618.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			1 dokumen	446.701.100,00			-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai	-	535.000.760,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.941.100,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Sabudom Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Kapur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	35.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.760.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		5.000.760,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			40 unit	140.000.000,00			-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai	-	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				23 Unit	70.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	70.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			3 laporan	343.426.240,00			-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai	-	358.345.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.500.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	330.926.240,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		343.345.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			54 unit	106.862.186,00			-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai	-	171.020.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	63.072.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		105.120.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	24.540.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		40.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	19.250.186,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**					**100 %**	**1.388.508.376,00**							**1.460.000.000,00**	
		[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100**	**70.48**	**100**	**100**	**1.388.508.376,00**	-	-	-	-	-	-	**1.460.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Disusun*	-			1 Dokumen	1.388.508.376,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	1.460.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				8 Orang	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2 Laporan	190.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				125 Keluarga	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paskibraka				84 Orang	1.118.508.376,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		1.150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**					**90 %**	**2.886.723.760,00**							**180.000.000,00**	
		[Meningkatnya etika dan budaya politik]	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**	**90**	**95.15**	**90**	**90**	**2.886.723.760,00**	-	-	-	-	-	-	**180.000.000,00**	-
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun*	-			1 Dokumen	2.886.723.760,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				45 Orang	2.806.723.760,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				23 Orang	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**					**90 %**	**3.560.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		[Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan]	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**	**90**	**68.00**	**90**	**90**	**3.560.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**200.000.000,00**	-
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun*	-			1 Dokumen	3.560.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Organisasi Kemasyarakatan	-	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				20 Orang	3.480.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Organisasi Kemasyarakatan		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				5 Orang	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Organisasi Kemasyarakatan		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Organisasi Kemasyarakatan		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**					**90 %**	**430.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		[Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat]	**Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan**	**90**	**84.80**	**90**	**90**	**430.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100.000.000,00**	-
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Disusun*	-			1 Dokumen	430.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				6 Orang	240.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2 Laporan	190.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**					**100 %**	**1.320.000.000,00**							**1.175.000.000,00**	
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	**Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan**	**100**	**71.03**	**100**	**100**	**1.320.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.175.000.000,00**	-
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik solsial yang disusun*	-			1 Dokumen	1.320.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	-	1.175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				45 Orang	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 Orang	140.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TRANSFORMASI TATA KELOLA 4. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		875.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**2.264.661.723.266,00**							**9.295.095.010.922,00**	